GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai Kepala Daerah mempunyai tugas untuk menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Badan Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

(1) RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 merupakan penjabaran dari arah tematik pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 periode kelima dan disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan dan Program Strategis Nasional serta pedoman penyusunan RKPD yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yang memuat :
   a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
   b. prioritas pembangunan Daerah;
   c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
   d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah.

(2) RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2023.

Pasal 3

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

BAB I. Pendahuluan;
BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
BAB III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
BAB V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota;
BAB VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
BAB VIII. Penutup.

Pasal 4

Rincian lebih lanjut RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 selanjutnya menjadi :

a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
b. pedoman penyelarasan prioritas pembangunan tahun 2023 Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023; dan
c. pedoman penyusunan Rancangan KUA serta Rancangan PPAS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Pasal 6

(1) Dalam hal terjadi penambahan sub kegiatan baru pada KUA serta Rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Gubernur dengan ketua DPRD.

(2) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Pasal 7

(1) Perubahan RKPD hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
   a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah atau keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
   b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan.

Pasal 8

Pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juni 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juni 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RIZA INDRA RIADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 18.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran pelaksanaan tahun kelima yang merupakan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2019-2023, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD 2023 ini selanjutnya dijadikan sebagai pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). Penyusunan RKPD 2023 juga mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024, serta menerapkan peraturan perundangan yang terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya.

Dokumen RKPD Tahun 2023 ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

RKPD 2023 akan difokuskan pada penguatan kondisi perekonomian dan sosial masyarakat secara merata, yang didukung dengan peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur, upaya pelestarian lingkungan, serta kemandirian birokrasi dalam rangka mencapai Kalimantan Timur yang berdaulat.

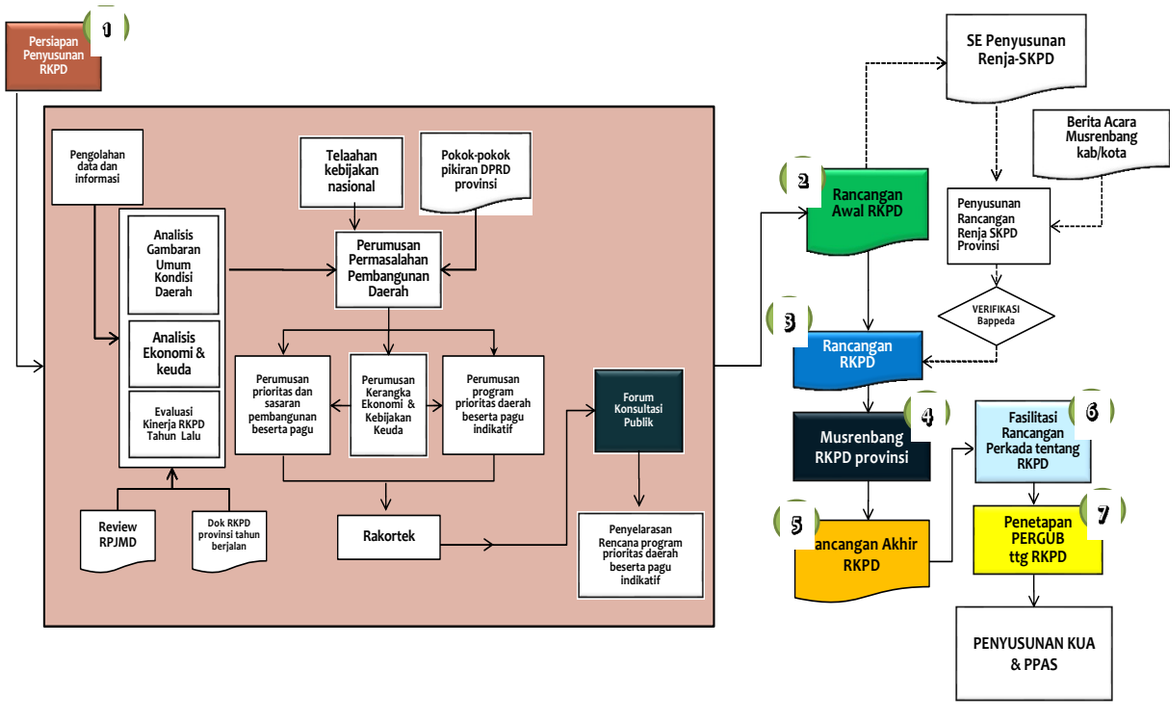

Gambar 1.1
Bagan Alur Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Penyusunan RKPD Tahun 2023 dilakukan dengan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) melalui 8 (delapan) tahapan yang dapat dilihat pada Gambar I.1, yakni sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan RKPD;
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
3. Pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD;
4. Penyusunan Rancangan RKPD;
5. Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
6. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD;
7. Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD oleh Kementerian Dalam Negeri; dan
8. Penetapan RKPD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1.2.1 Undang-Undang

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

1.2.2 Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah

Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1); dan
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sistem perencanaan pembangunan merupakan rangkaian dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri, dimulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, yang sinergis antara nasional dan daerah. Oleh karena itu, penyusunan RKPD 2023 berpedoman pada :

a. Kebijakan tahapan pelaksanaan RPJMD 2019-2023 tahun kelima, yaitu penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, serta penyelarasan prioritas pembangunan, program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota;

b. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, yaitu penyelarasan prioritas pembangunan, program dan kegiatan tahunan daerah dengan Tema, agenda pembangunan, sasaran pengembangan wilayah dan program strategis nasional dalam RKP Tahun 2023.

Selanjutnya RKPD 2023 dijabarkan kedalam Rencana Kerja Perangkat daerah (Renja –PD), KUA/PPAS dan Rancangan APBD. Adapun hubungan keterkaitan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada

Gambar 1.2. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian panjang dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri. Sistem ini dimulai dari tahapan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Selanjutnya hasil perencanaan ini dijadikan sebagai acuan pada tahap penganggaran dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

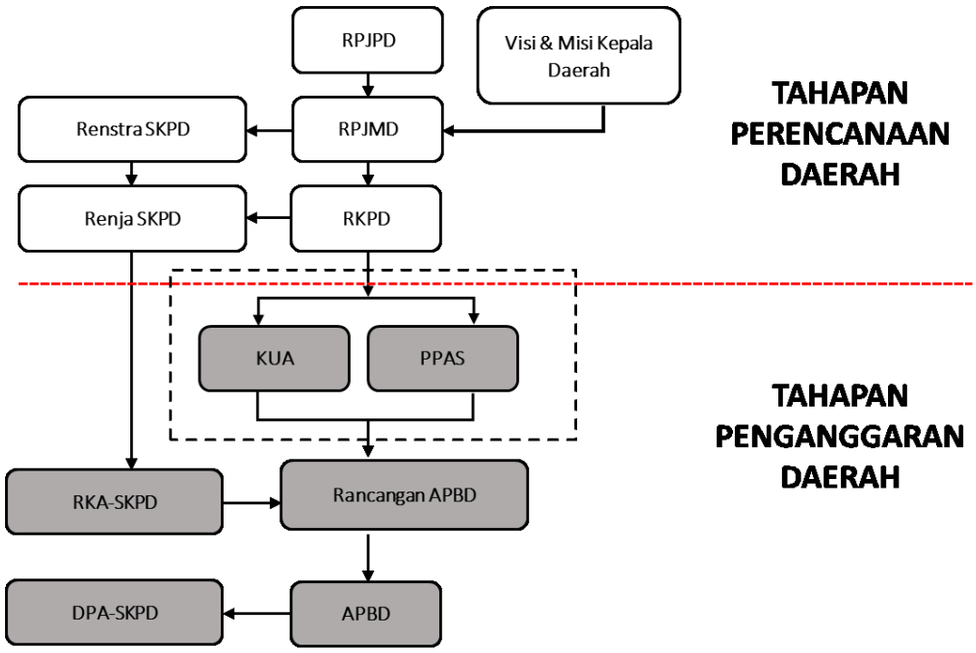

Gambar 1.2
Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2023.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, yaitu:

a. Menyelaraskan dan mensinergikan program pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023;

b. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rumusan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat gambaran umum kondisi daerah (kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Memuat kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta penyajian aspirasi dan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

BAB V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Mengemukakan tentang arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi yang nantinya

akan menjadi pedoman bagi kabupaten/kota dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota.

BAB VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Mengemukakan rencana kerja yang berisi tentang seluruh rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun perencanaan pembangunan RKPD, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Mengemukakan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII. Penutup

Mengemukakan kaidah pelaksanaan RKPD yang diantaranya meliputi peran dokumen RKPD dalam pelaksanaan pembangunan serta mekanisme pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Proses pengembangan hilirisasi industri di Provinsi Kalimantan Timur sebagai upaya transformasi ekonomi dari basis sektor ekonomi yang semula bersifat *unrenewable resources* menjadi *renewable resources* perlu mendapatkan perhatian besar. Sektor industri pengolahan dapat menjadi penopang ekonomi yang *sustainable* bagi daerah untuk menggeser dominasi sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur perekonomian. Besarnya potensi keanekaragaman SDA, baik yang terbarukan maupun tak terbarukan dapat dioptimalkan sebagai sumber bahan baku industri. SDA yang tidak terbarukan diantaranya berupa tambang batubara dan minyak bumi. Sedangkan SDA terbarukan yang dapat memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi hijau seperti kelapa sawit, karet, padi, perikanan, peternakan dan pariwisata. Oleh karena itu, untuk meningkatkan nilai tambah produk, diperlukan hilirisasi industri yang dapat menyentuh ekonomi kerakyatan hingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi kawasan.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan tahunan, dalam proses penyusunannya perlu mempertimbangkan isu strategis yang berkembang dengan memperhatikan berbagai aspek pembangunan baik sosial, ekonomi dan lingkungan. Proses perumusan kebijakan pembangunan daerah harus dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan tahapan analisa terhadap potensi, kelemahan dan tantangan pembangunan daerah. Pada bagian ini akan dijabarkan kinerja pembangunan daerah yang mencakup gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi dan misi kepala daerah serta kebutuhan perumusan strategi.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Secara geografis, Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 2^0 33’ Lintang Utara (LU) dan 2^0 25’ Lintang Selatan (LS), 113^0 44’ Bujur Timur

(BT) dan 119^0 00^0 Bujur Timur (BT). Secara administratif, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Sebelah Barat : berbatasan dengan Negara Bagian Serawak Malaysia, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan; dan
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan cakupan wilayah yang cukup luas, yaitu mencapai 16.732.065,18 ha. Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur berupa daratan dengan luasnya mencapai 12.734.692 ha. Bentangan alam yang luas ini menjadikan Provinsi Kalimantan Timur memiliki peluang lebih besar untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya.

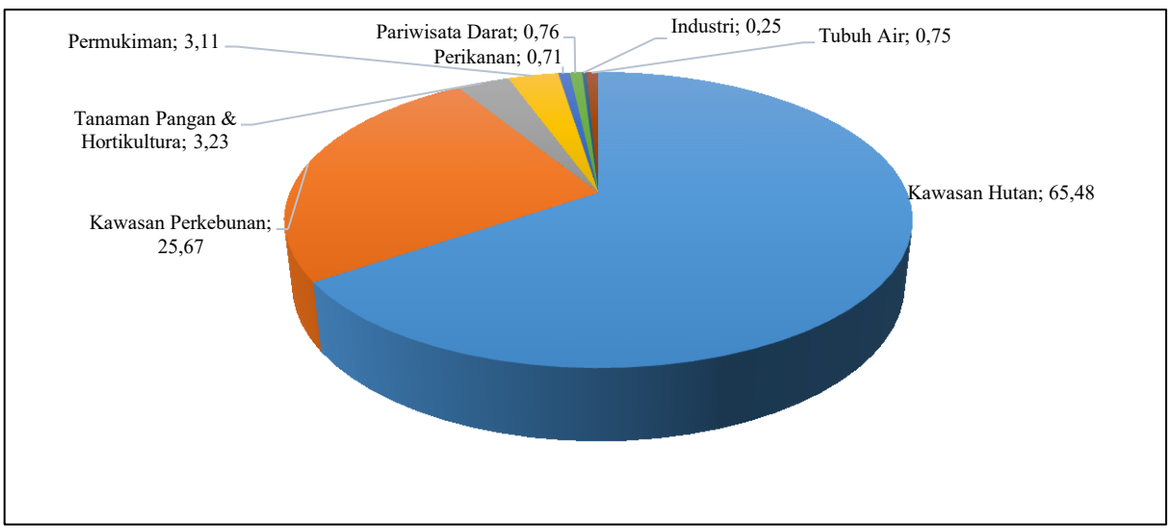

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2016

Gambar II.1
Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Peruntukan Kawasan
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016 – 2035

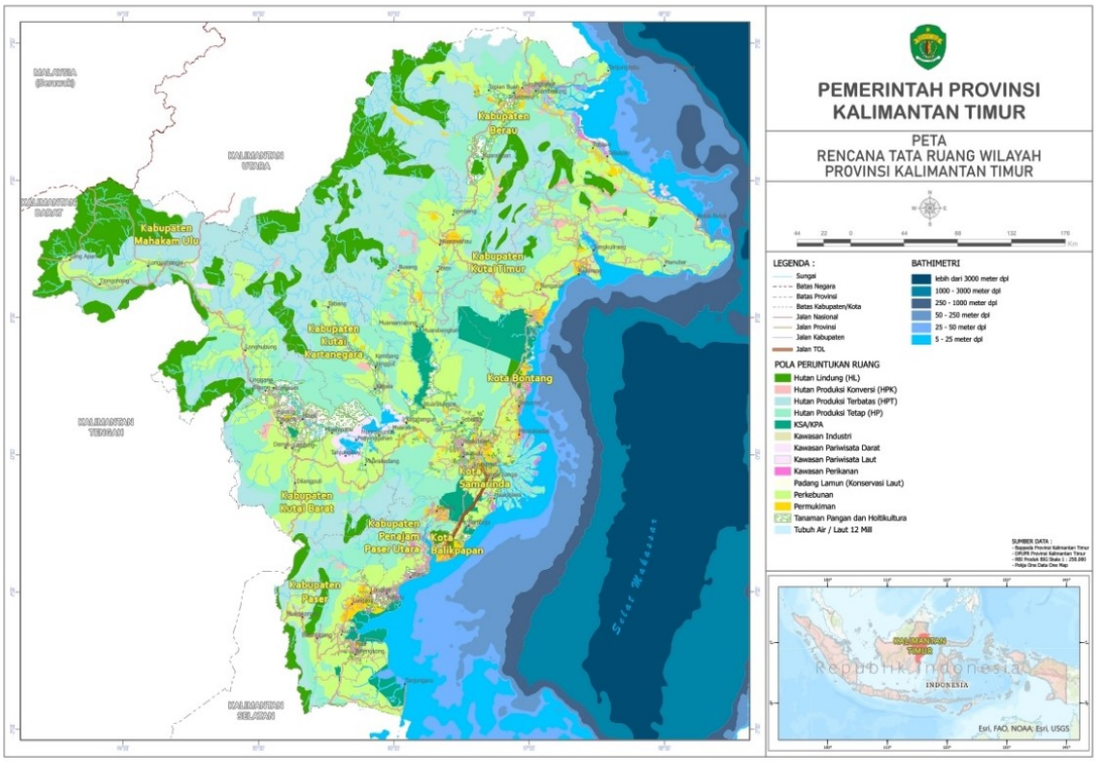

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.2
Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Jika dilihat dari peruntukan kawasannya, sebagian besar luas sumber daya lahan (wilayah daratan) Kalimantan Timur berstatus sebagai Kawasan Hutan dengan luasan mencapai 8.339.155 Ha (65,48%), yang terdiri dari Kawasan Lindung seluas 2.283.360 Ha dan Kawasan Budidaya Hutan seluas 6.055.793 Ha. Sedangkan sisanya seluas 4.395.537 Ha (34,52%), berstatus sebagai Areal Penggunaan Lain (APL) yang terbagi untuk kawasan perkebunan seluas 3.269.560 Ha (25,67%), kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebesar 412.095 Ha (3,23%), kawasan permukiman seluas 396.266 Ha (3,11%), kawasan perikanan seluas 91.547 Ha (0,71%), kawasan pariwisata darat seluas 97.423 Ha (0,76%), kawasan industri seluas 32.887 Ha (0,25%), dan tubuh air seluas 95,758 Ha (0,75%).

Topografi Provinsi Kalimantan Timur bergelombang dari kemiringan landai sampai curam, dengan ketinggian berkisar antara 0-1500 meter diatas permukaan laut dengan kemiringan antara 0-60 persen. Daerah dataran rendah pada umumnya dijumpai pada Kawasan sepanjang sungai. Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan memiliki ketinggian rata-rata lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 300 persen, terdapat dibagian barat laut dengan kemiringan 300 persen, terdapat dibagian barat laut yang berbatasan langsung dengan wilayah

Malaysia. Kondisi topografi tersebut sangat berpengaruh terhadap peluang budidaya suatu jenis komoditi, potensi dan persediaan air, dinamika hidrologi dan kerentanan terhadap erosi.

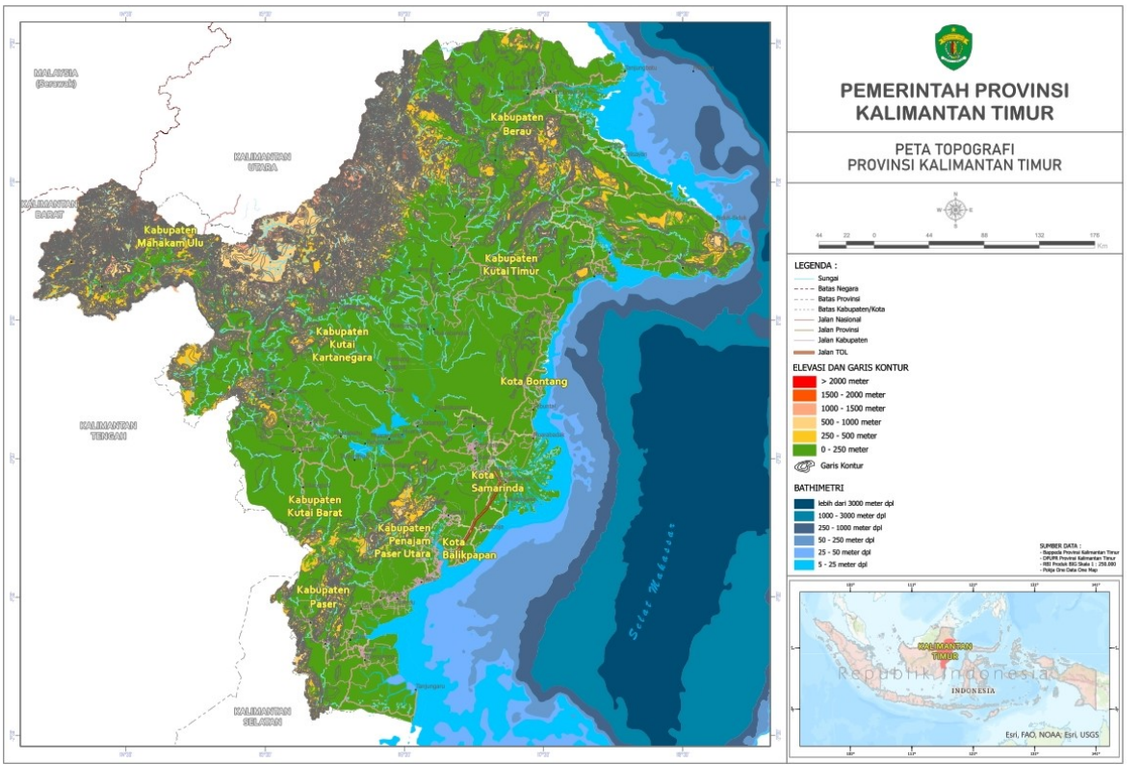

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.3
Peta Topografi Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan ketinggian lahan di Provinsi Kalimantan Timur, tertinggi adalah wilayah pada ketinggian 100-500 M sebesar 4,23 juta Ha (terutama di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau), disusul wilayah pada ketinggian 25-100 M sebesar 4,12 Ha, dan wilayah pada ketinggian 0-25 M sebesar 2,08 Ha. Artinya wilayah di Kalimantan Timur cenderung didominasi oleh dataran rendah yang subur karena merupakan wilayah pengendapan. Sementara itu yang termasuk daerah dataran tinggi di Provinsi Kalimantan Timur (pada ketinggian 1000-15000 M) sebesar 2,02 juta Ha terutama pada Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

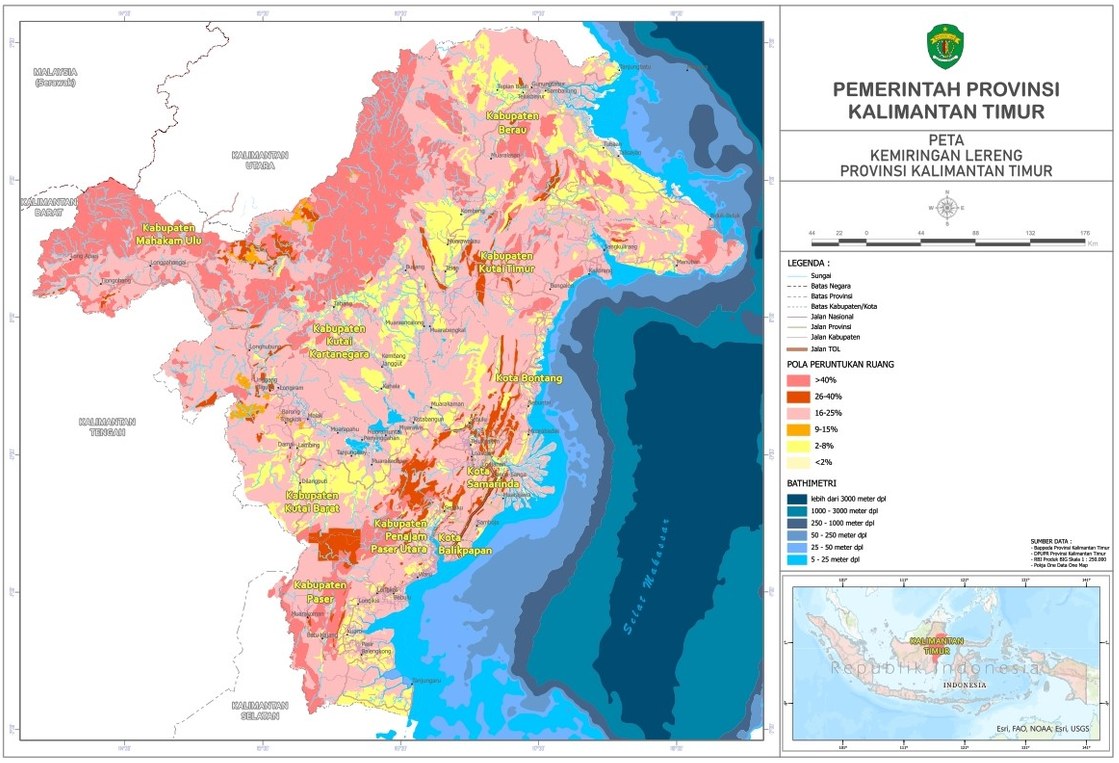

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.4
Peta Kemiringan Lereng Provinsi Kalimantan Timur

Jika dilihat dari kemiringan lahan di Provinsi Kalimantan Timur, wilayahnya didominasi dataran dengan kelas kemiringan 15-25 persen seluas 7,23 juta Ha termasuk kategori agak curam, terutama pada Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat dan Berau. Selanjutnya, luas wilayah pada kemiringan diatas 40 persen (curam) sebesar 2,91 juta Ha dan kemiringan 2-15 persen sebesar 1,82 juta Ha (datar dan landai). Beberapa sungai yang ada di wilayah Kalimantan Timur adalah Sungai Mahakam, Gunung Batuayan, Sungai Bahan, Sungai Bani, Sungai Kayan, Sungai Senyiur, Sungai Sesayap, Sungai Telen dan Sungai Wahan.

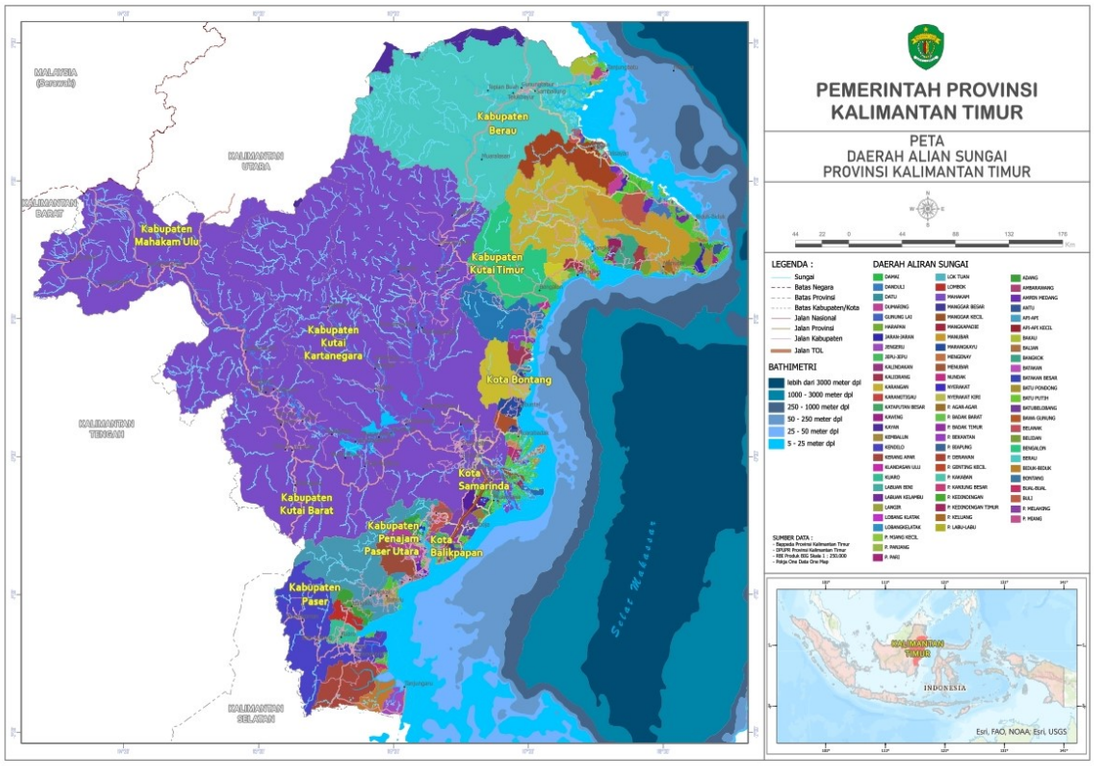

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.5
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Kalimantan Timur

Aktivitas geologi yang telah berlangsung di wilayah Kalimantan Timur menghasilkan berbagai jenis batuan. Jenis batuan yang terbentuk berupa sedimen, batuan beku (ekstrusif dan intrusif) dan batuan metamorfik ditemukan berbagai kandungan mineral baik logam (mineral logam) dan non-logam (*mineral industry*) serta bahan konstruksi yang memiliki nilai ekonomis sebagai potensi bahan galian tambang yang tersebar di kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Pada praktiknya keberadaan bahan galian tambang yang berlimpah, menarik orang untuk mengeksploitasi secara berlebihan sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan. Perlu dilakukan pertambangan berkelanjutan sesuai kaidah *"Good Mining Practice"* yang berwawasan lingkungan. Potensi kawasan tambang Provinsi Kalimantan Timur tersebar di berbagai daerah yang disajikan pada gambar II.6.

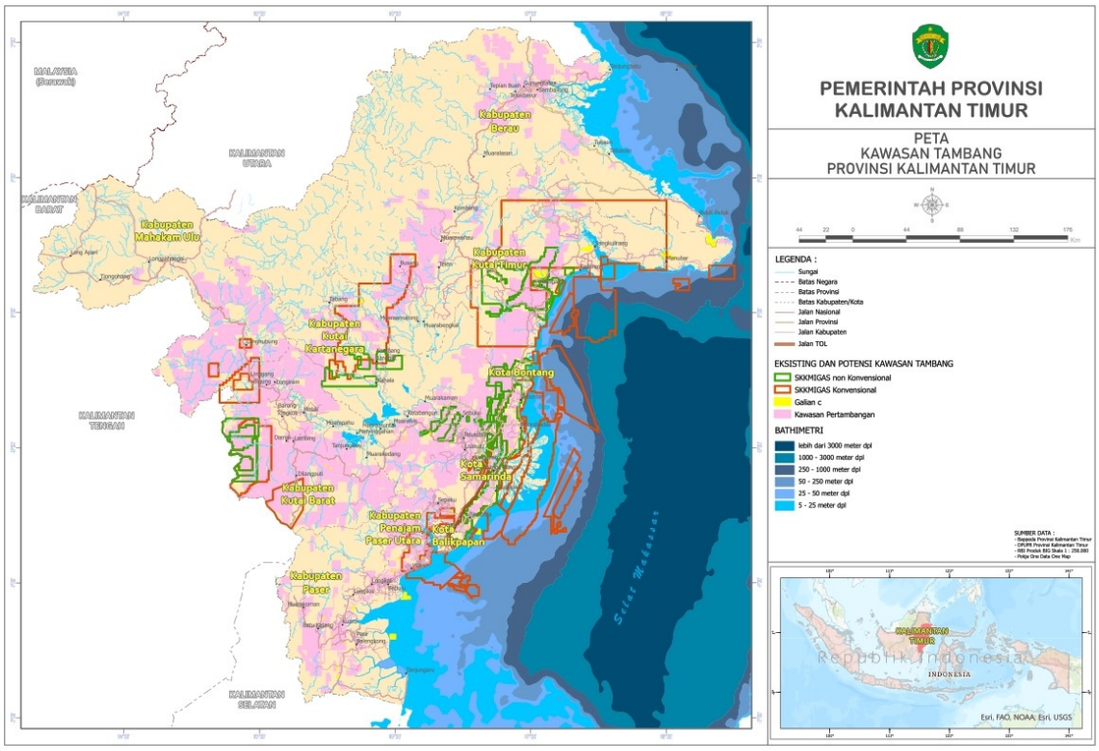

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.6
Peta Kawasan Tambang Provinsi Kalimantan Timur

Ditinjau dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten, yaitu: Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu, serta memiliki 3 (tiga) wilayah administrasi kota, yaitu: Balikpapan, Bontang, dan Samarinda. Adapun pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur menurut kabupaten/kota dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel II.1
Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten/Kota	Luas wilayah (Ha)*	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan
1	Paser	1.109.696	10	144
2	KUBAR	1.370.992	16	194
3	KUKAR	2.598.808	18	237
4	KUTIM	3.105.171	18	141
5	Berau	2.173.519	13	110
6	PPU	292.373	4	54
7	MAHULU	1.944.941	5	50
8	Balikpapan	51.225	6	34
9	Samarinda	71.653	10	59
10	Bontang	16.314	3	15

Kalimantan Timur	12.734.692	103	1.038

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2021

Gambaran mengenai wilayah administratif disajikan dalam bentuk Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur seperti gambar II.7.

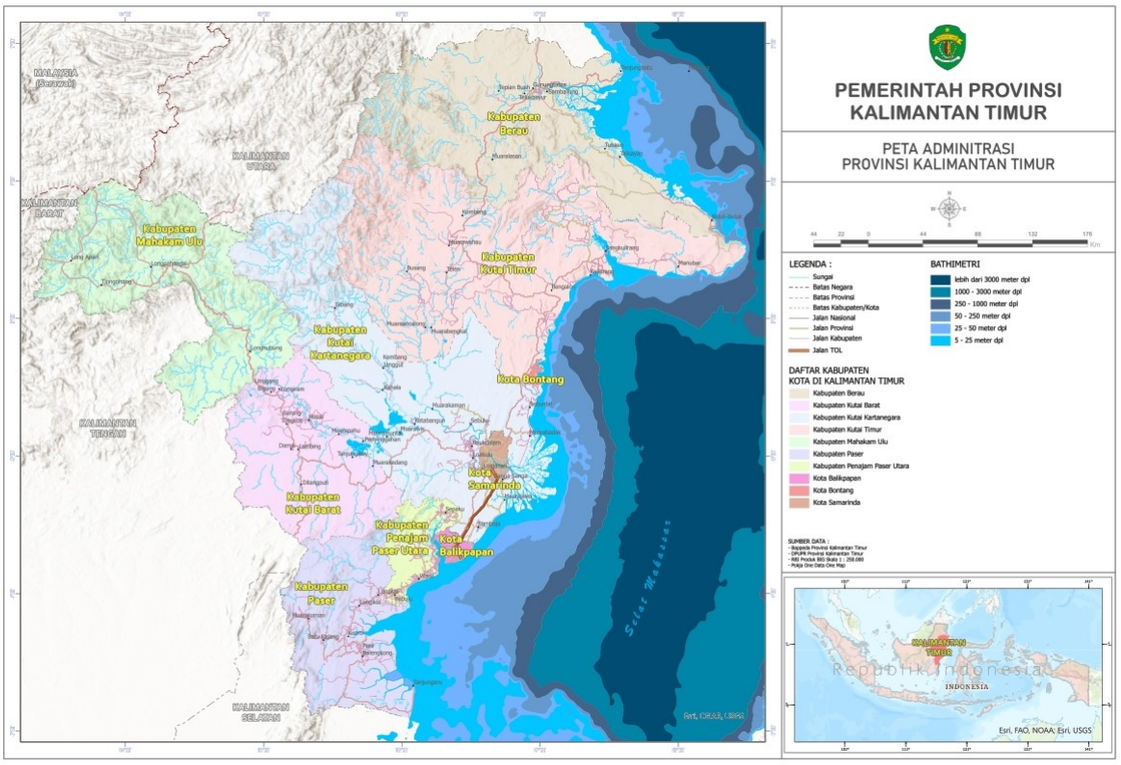

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.7
Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur

Dari sisi klimatologi, pengukuran iklim Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui tiga stasiun bandara, yaitu: di wilayah Samarinda, Balikpapan, dan Tanjung Redeb. Diketahui bahwa kondisi curah hujan Provinsi Kalimantan Timur yang dilihat dari tiga stasiun ini berada dalam kategori sedang. Tabel II.2 berikut ini menunjukkan statistik klimatologi Provinsi Kalimantan Timur di tiga stasiun bandara.

Tabel II.2
Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

No	Uraian	Stasiun		
		Samarinda	Balikpapan	Tanjung Redeb
1	Suhu Udara (ºC)			
	- Minimum	23,80	24,40	22,30
	- Maksimum	32,80	32,00	33,50
2	Kelembaban (%)	83	87	90
3	Tekanan Udara (Mbs)	1.011,80	1.010,80	1.011,80
4	Kecepatan Angin (Knot)	4,00	4,00	3,00
5	Curah Hujan (mm)	2.889	3.018	2.161

6	Penyinaran Matahari (%)	43	50	42

Sumber: BMKG Wilayah KALTIM, 2021

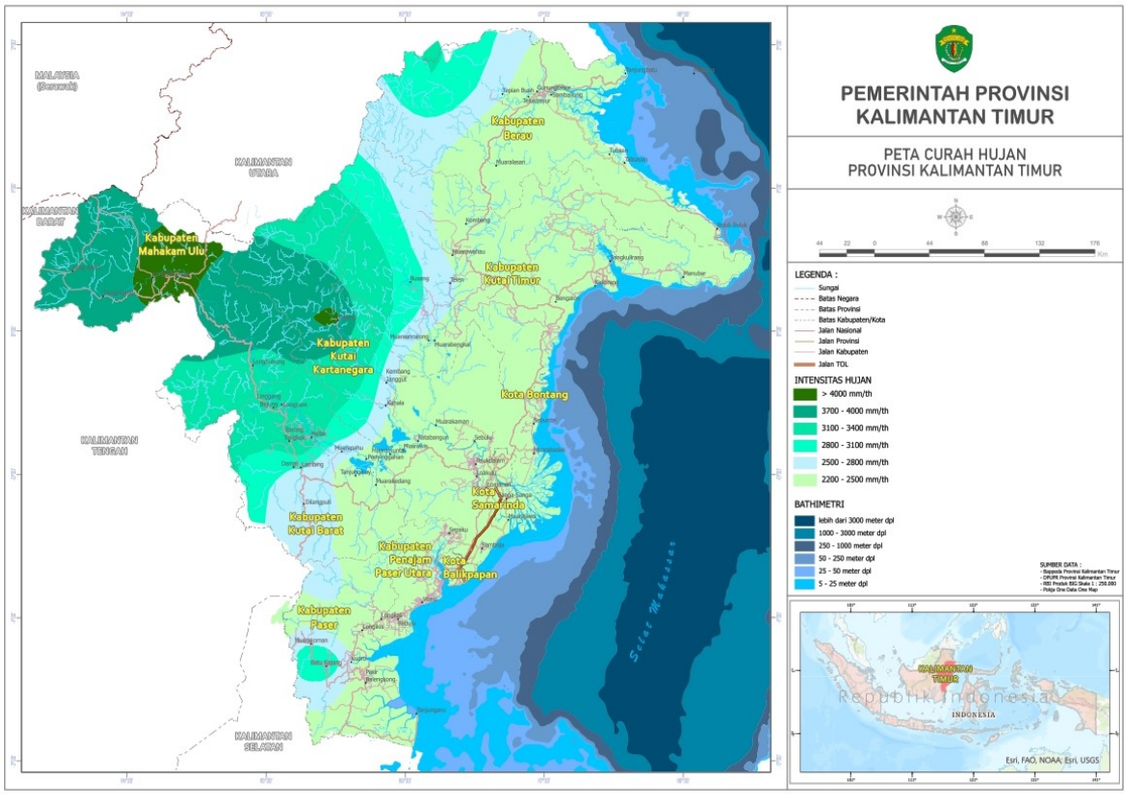

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.8
Peta Curah Hujan Provinsi Kalimantan Timur

Seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur berisi lahan yang diidentifikasi melalui interpretasi Peta Citra Satelit yang dibedakan dalam klasifikasi tutupan lahan. Hasil akhir tutupan lahan dapat dilihat pada gambar II.9 dibawah ini.

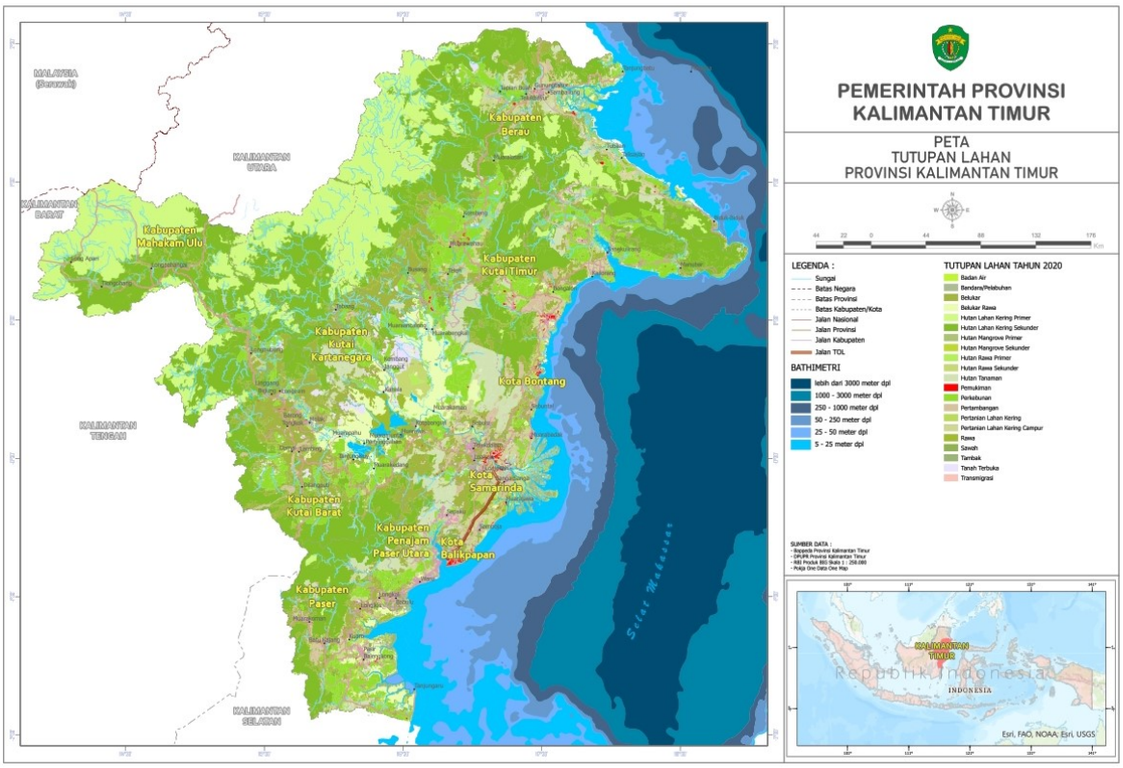

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.9
Peta Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Timur

Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Dalam perencanaan Pengurangan Risiko Bencana, perlu ada informasi awal berupa suatu indeks dalam rangka penentuan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan. Indeks Risiko Bencana bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut serta menjadi dasar untuk memahami ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas daerah. Kalimantan Timur merupakan wilayah yang relatif aman dari bencana gempa bumi tektonik dan vulkanik. Kejadian bencana yang paling berpotensi di Provinsi Kalimantan Timur adalah banjir, kebakaran permukiman, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, abrasi, kebakaran lahan dan hutan.

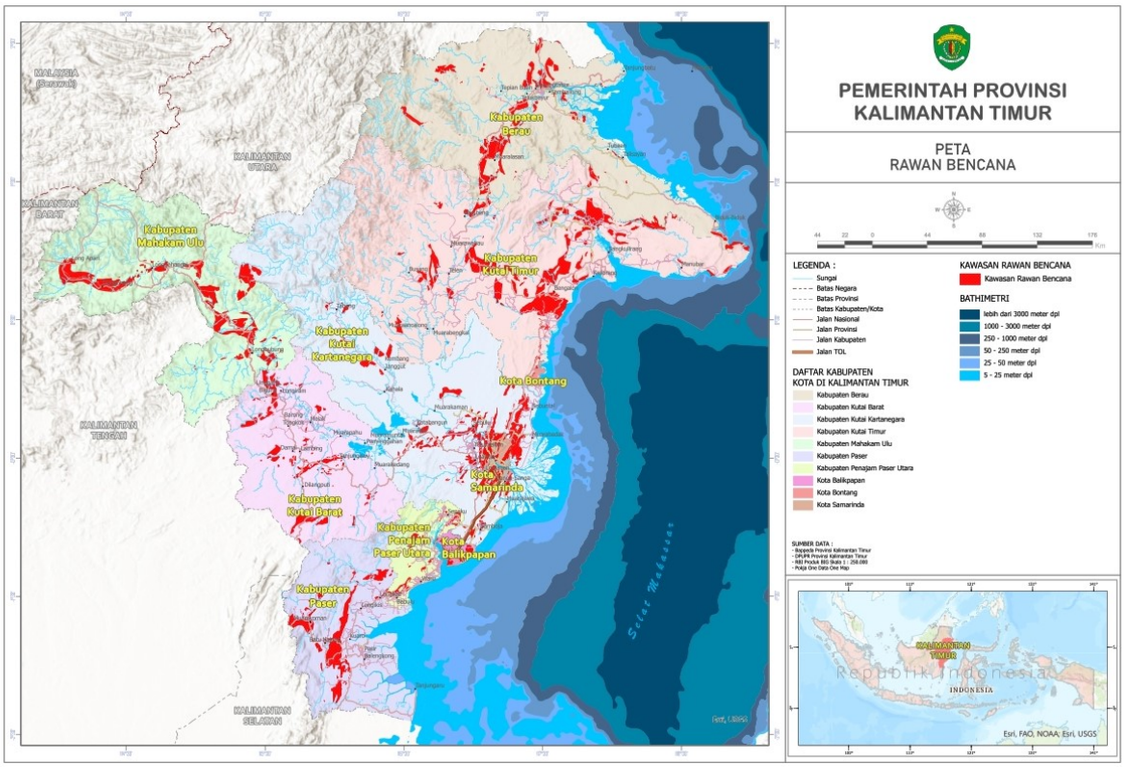

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.10
Peta Kawasan Rawan Bencana Alam Provinsi Kalimantan Timur

Salah satu dasar perhitungan Indeks Risiko Bencana yaitu diperlukannya Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas untuk melakukan perhitungan baru akan menyusun dokumen kajian pada tahun 2020 dan rencana pada tahun 2021 sehingga belum bisa menyajikan data Indeks Risiko Bencana 5 tahun terakhir. Indeks Risiko Bencana yang dirilis oleh BNPB Pusat, Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 memiliki indeks 153,28 dengan kategori tinggi.

Dari segi demografi, penduduk Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik dikarenakan pertumbuhan penduduk alami (kelahiran) maupun efek dari migrasi. Jumlah penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2019 sebesar 3.630.765 jiwa dan terus meningkat menjadi 3.849.832 jiwa pada tahun 2021.

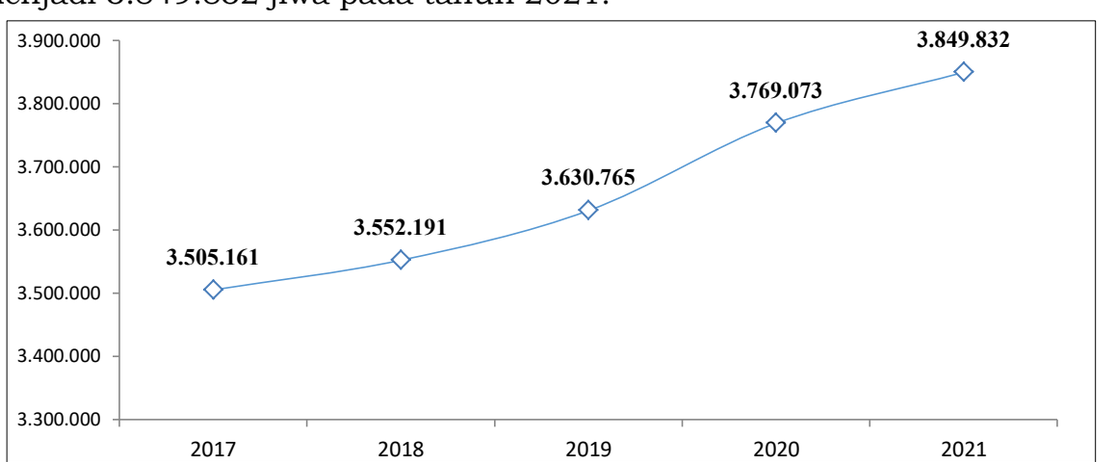

Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.11
Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021

Persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Timur tidak merata sehingga terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota, baik itu dari jumlah penduduk maupun kepadatannya. Penduduk Provinsi Kalimantan Timur paling banyak berdomisili di Kota Samarinda, yaitu sebesar 21,59 persen. Tidak dipungkiri bahwa Kota Samarinda menjadi daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi mengingat Kota Samarinda merupakan pusat pemerintahan sekaligus perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian, jumlah sebaran penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang distribusinya kurang dari lima persen terdapat di Kota Bontang (4,82%), Kabupaten Penajam Paser Utara (4,85%), Kabupaten Kutai Barat (4,44%), dan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kabupaten Mahakam Ulu dengan distribusi tidak mencapai satu persen (0,92%).

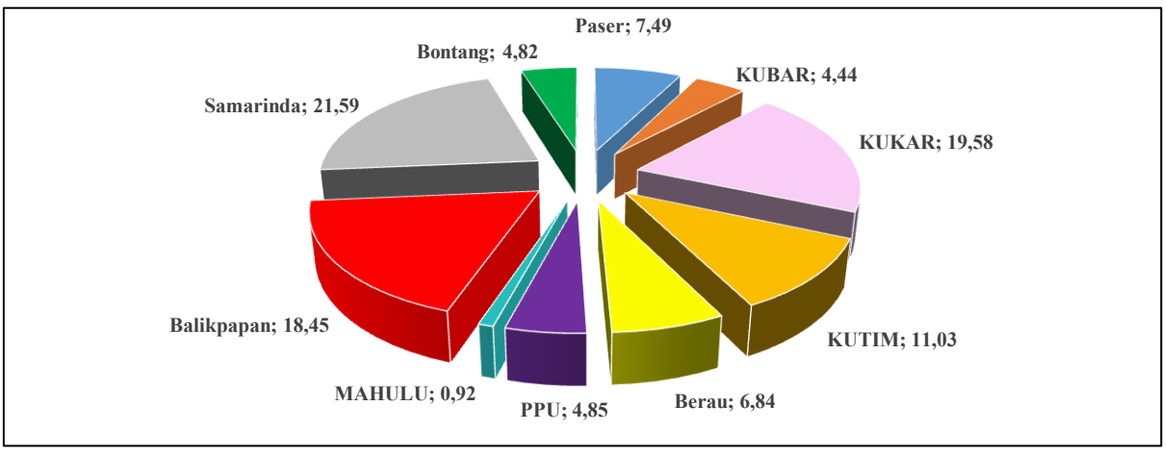

Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.12
Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Timur tumbuh sebesar 2,27 persen selama lima tahun sejak tahun 2017 – 2021. Kabupaten Mahakam Ulu menjadi kabupaten yang paling tinggi laju pertumbuhan penduduknya hingga mencapai 5,54 persen dalam lima tahun. Sedangkan pertumbuhan penduduk paling rendah yaitu Kabupaten Kutai Timur dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,29 persen.

Tabel II.3
Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021

No	KAB/KOTA	2017	2018	2019	2020	2021	Laju Pertumbuhan Penduduk (2017-2021) (%)
1	Paser	255.648	259.417	265.148	277.401	288.225	2,43
2	KUBAR	160.000	162.200	164.048	165.938	170.871	1,32
3	KUKAR	674.759	677.755	696.784	734.485	753.862	2,24
4	KUTIM	418.625	420.760	422.905	424.334	424.743	0,29
5	Berau	221.836	224.654	232.189	251.439	263.150	3,47
6	PPU	168.012	170.475	173.671	181.349	186.801	2,14
7	MAHULU	26.938	28.833	30.321	35.010	35.274	5,54
8	Balikpapan	633.196	649.806	670.505	697.079	710.293	2,32
9	Samarinda	769.632	778.883	793.576	817.254	831.220	1,55
10	Bontang	176.515	179.408	181.618	184.784	185.393	0,99
Kalimantan Timur		3.441.731	3.505.161	3.552.191	3.630.765	3.849.832	2,27

Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2021

Kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur terdapat di Kota Balikpapan mencapai 1.386,61 per km^2. Sedangkan kepadatan terendah terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 1,81 per km^2. Dimana total kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 30,23 per km^2.

Berdasarkan *Sex Ratio,* jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan atau tepatnya 100-110 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan.

Tabel II.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

No	KAB/KOTA	Penduduk			Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (Per Km^2)
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1	Paser	149.277	138.948	288.225	107,43	25,97
2	KUBAR	89.534	81.337	170.871	110,08	12,46
3	KUKAR	392.404	361.458	753.862	108,56	29,01
4	KUTIM	227.388	197.355	424.743	115,22	13,68
5	Berau	139.540	123.610	263.150	112,89	12,11
6	PPU	96.701	90.100	186.801	107,33	63,89
7	MAHULU	18.830	16.444	35.274	114,51	1,81
8	Balikpapan	362.754	347.539	710.293	104,38	1.386,61
9	Samarinda	422.783	408.437	831.220	103,51	1.160,06
10	Bontang	96.113	89.280	185.393	107,65	1.136,40
Kalimantan Timur		1.995.324	1.854.508	3.849.832	107,59	30,23

Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2021

Dari sisi struktur usia penduduk, sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur berada pada usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun) yang mencapai 68,92 persen dari total penduduk Kalimantan Timur, sebagaimana tampak pada piramida penduduk. Sehingga rasio ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 tercatat sebesar 45,16 persen. Artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 45 orang yang tidak dan belum produktif.

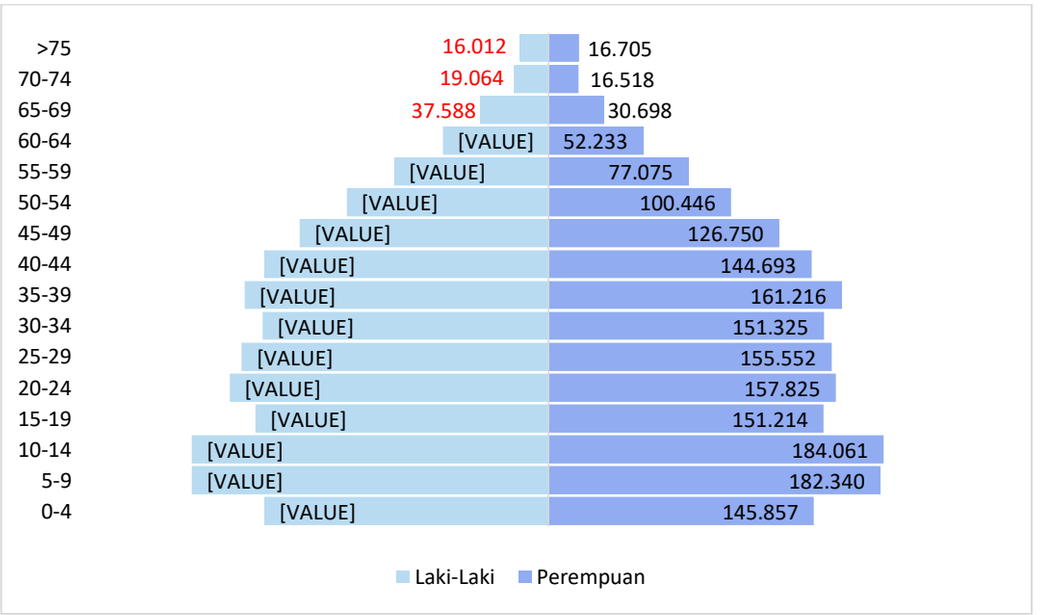

Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.13
Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

Rata-rata usia penduduk pada usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah lagi di Kalimantan Timur pada tahun 2020 pada laki-laki dan perempuan mengalami penurunan menjadi sebesar 0,14 persen jika dibanding dengan tahun 2019 yaitu sebesar 0,16 persen. Sedangkan untuk usia anak 13-15 tahun mengalami penurunan menjadi sebesar 0,88 persen jika dibanding dengan tahun 2016 sebesar 1,82 persen. Untuk usia 16-18 tahun, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 17,95 persen jika dibanding dengan tahun 2016 sebesar 18,95 persen, dan untuk usia 19-24 tahun dimana kategori usia ini adalah merupakan penentu keberhasilan dalam rangka mencetak para generasi muda Kalimantan Timur dengan kemampuan sumber daya manusia yang handal, pada tahun 2020 kategori penduduk usia 19-24 tahun ada peningkatan menjadi sebesar 70,17 persen

jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 69,76 persen. Meskipun begitu, jika dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami penurunan yaitu sebesar 70,56 persen.

Secara umum, rata-rata usia dari 7-24 tahun persentase penduduk yang tidak bersekolah lagi pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu menjadi sebesar 26,25 persen jika dibanding dengan tahun 2016 yaitu 25,70 persen. Hal ini menggambarkan bahwa jenjang pendidikan dari usia dini sampai dengan dewasa telah memenuhi target yang ingin dicapai. Namun demikian angka tersebut terjadi kenaikan yang perlu diwaspadai, terlebih capaian tersebut masih di bawah angka Nasional.

Tabel II.5
Persentase Penduduk Usia 7 – 24 Tahun yang Tidak Bersekolah Lagi Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 – 2021

Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Sekolah	2017	2018	2019	2020	2021
Laki-Laki					
7-12	0,00	0,00	0,20	0,03	0,07
13-15	0,54	1,52	1,43	1,34	0,77
16-18	17,49	19,94	17,84	19,17	16,28
19-24	68,80	67,55	71,64	69,98	70,59
7-24	25,07	25,48	26,62	27,32	26,09
Perempuan					
Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Sekolah	2017	2018	2019	2020	2021
7-12	0,00	0,00	0,13	0,26	0,00
13-15	1,05	0,12	0,48	0,43	0,26
16-18	19,50	16,05	18,40	16,66	19,66
19-24	70,47	72,30	67,62	70,38	69,60
7-24	24,23	24,96	24,19	25,10	25,66
Laki-Laki + Perempuan					
Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Sekolah	2017	2018	2019	2020	2021
7-12	0,00	0,00	0,16	0,14	0,04
13-15	0,78	0,86	0,98	0,88	0,52
16-18	18,50	18,07	18,10	17,95	17,93
19-24	69,55	69,78	69,76	70,17	70,12
7-24	25,67	25,23	25,45	26,25	25,88

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Tabel II.6

Persentase Penduduk Usia 7 – 24 Tahun Menurut Kelompok Usia Sekolah dan Jenis Kelamin (Laki-Laki+Perempuan) di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 – 2021

Tidak / Belum Pernah Bersekolah					
Kelompok Usia Sekolah	2017	2018	2019	2020	2021
7-12	0,33	0,24	0,16	0,12	0,36
13-15	0,44	0,25	0,19	0,05	0,58
16-18	0,18	0,38	0,09	0,17	0,06
19-24	0,41	0,38	0,35	0,12	0,02
7-24	0,35	0,31	0,21	0,12	0,23
Masih Bersekolah					
Kelompok Usia Sekolah	2017	2018	2019	2020	2021
7-12	99,67	99,67	99,68	99,73	99,60
13-15	98,79	98,89	98,83	99,07	98,90
16-18	81,32	81,55	81,81	81,88	82,01
19-24	30,04	29,84	29,89	29,71	29,86
7-24	74,97	74,46	74,34	73,63	73,88
Tidak Bersekolah Lagi					
Kelompok Usia Sekolah	2017	2018	2019	2020	2021
7-12	0,00	0,00	0,16	0,14	0,04
13-15	0,78	0,86	0,98	0,88	0,52
16-18	18,50	18,07	18,10	17,95	17,93
19-24	69,55	69,78	69,76	70,17	70,12
7-24	24,67	25,23	25,45	26,25	25,88

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Indikator-indikator utama yang digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, laju inflasi, dan angka kemiskinan. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi perencanaan pembangunan, terutama untuk monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam mensukseskan program-program prioritas pembangunan nasional.

A. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Secara umum, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2017 hingga tahun 2021 menunjukkan tren yang meningkat dari komposisi sektor non migas dan batubara sedangkan dari sektor dengan migas dan non migas mengalami sedikit penurunan di tahun 2020. Nilai PDRB dengan migas Tahun 2020 tercatat sebesar Rp 607,59 triliun, sedangkan nilai PDRB

non migas sebesar Rp 505,55 triliun dan nilai PDRB non migas dan batubara sebesar Rp 314,89 triliun. Penurunan Nilai PDRB pada tahun 2020 dikarenakan terjadi anomali dimana karena dampak Pandemi COVID-19 yang sangat signifikan khususnya dalam hal ekspor. Akan tetapi pada tahun 2021 nilai PDRB kembali meningkat seiring dengan mulai pulihnya perekonomian Kalimantan Timur dengan berkurangnya dampak Pandemi COVID-19 dengan nilai PDRB migas mencapai Rp 695,16 triliun, nilai PDRB non migas sebesar Rp 582,79 triliun dan nilai PDRB non migas dan batubara sebesar Rp 338,22 triliun.

Tabel II.7
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

Tahun	Migas	Non Migas	Non Migas dan Batubara
2017	591.903.487	476.190.332	267.249.474
2018	636.454.483	518.074.570	291.567.584
2019	652.158.057	539.448.590	310.699.091
2020	607.586.183	505.550.893	314.891.114
2021	695.158.330	582.785.512	338.221.300

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Mayoritas lapangan usaha utama Tahun 2021 mengalami perbaikan ekonomi terutama yang menjadi sumber utama berlanjutnya tren perbaikan ekonomi yaitu lapangan usaha pertambangan dan penggalian, pertanian, kehutanan dan perikanan serta konstruksi. Dilihat dari PDRB atas dasar harga berlaku, kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian mencapai 45,05 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp 313,16 triliun pada tahun 2021 dimana nilai ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dengan nilai PDRB mencapai Rp 251,60 triliun dan kontribusi sebesar 41,43 persen.

Tabel II.8
Nilai dan Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2017-2021

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	47.211.914 (7,98)	50.147.994 (7,89)	51.567.377 (7,91)	53.468.749 (8,80)	58.922.900 (8,48)
B	Pertambangan dan Penggalian	275.822.162 (46,60)	296.725.329 (46,69)	297.371.390 (45,60)	250.850.972 (41,29)	313.164.493 (45,05)
C	Industri Pengolahan	112.075.372 (18,93)	115.272.211 (18,14)	116.204.903 (17,82)	115.474.304 (19,01)	123.809.010 (17,81)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	280.204 (0,05)	315.059 (0,05)	344.961 (0,05)	385.055 (0,06)	395.464 (0,06)
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	273.473 (0,05)	288.891 (0,05)	307.667 (0,05)	326.368 (0,05)	348.038 (0,05)
F	Konstruksi	46.876.979 (7,92)	53.500.578 (8,42)	58.472.319 (8,97)	57.956.112 (9,54)	62.227.322 (8,95)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	32.018.022 (5,41)	35.227.602 (5,54)	38.245.238 (5,86)	39.233.473 (6,46)	41.468.044 (5,97)
H	Transportasi dan Pergudangan	21.242.090 (3,59)	22.990.716 (3,62)	24.172.248 (3,71)	22.196.586 (3,65)	23.195.360 (3,34)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.448.930 (0,92)	6.106.132 (0,96)	6.691.563 (1,03)	6.479.400 (1,07)	6.653.262 (0,96)
J	Informasi dan Komunikasi	7.375.629 (1,25)	7.988.163 (1,26)	8.708.382 (1,34)	9.346.481 (1,54)	10.183.252 (1,46)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9.032.358 (1,53)	9.717.119 (1,53)	10.216.630 (1,57)	10.490.249 (1,73)	11.244.159 (1,62)
L	Real Estate	5.218.431 (0,88)	5.574.934 (0,88)	5.768.853 (0,88)	5.868.848 (0,97)	5.868.356 (0,84)
M,N	Jasa Perusahaan	1.215.392	1.299.480	1.346.710	1.334.840	1.380.140

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
		(0,21)	(0,20)	(0,21)	(0,22)	(0,20)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11.658.604 (1,97)	12.337.921 (1,94)	13.019.826 (2,00)	12.750.866 (2,10)	13.201.128 (1,90)
P	Jasa Pendidikan	9.081.381 (1,53)	10.107.377 (1,59)	10.995.564 (1,69)	11.724.048 (1,93)	12.340.330 (1,78)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.506.039 (0,59)	3.905.167 (0,61)	4.289.673 (0,66)	5.331.025 (0,88)	6.205.096 (0,89)
R,S,T,U	Jasa lainnya	3.566.508 (0,60)	3.994.008 (0,63)	4.434.754 (0,68)	4.368.807 (0,72)	4.551.977 (0,65)
PDRB		508.880.237 (100,00)	635.498.680 (100,00)	652.158.057 (100,00)	607.586.183 (100,00)	695.158.330 (100,00)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Tabel II.9
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2017-2021

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30.261.400 (6,68)	32.140.165 (6,92)	33.396.194 (6,86)	33.048.689 (6,99)	32.963.902 (6,81)
B	Pertambangan dan Penggalian	216.447.124 (47,81)	218.686.722 (47,06)	233.762.253 (48,03)	222.920.728 (47,17)	227.952.678 (47,07)
C	Industri Pengolahan	96.364.829 (21,28)	96.797.539 (20,83)	96.824.494 (19,89)	94.031.228 (19,90)	96.180.243 (19,86)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	238.533 (0,05)	261.834 (0,06)	284.529 (0,06)	317.363 (0,07)	324.785 (0,07)
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	218.601 (0,05)	224.574 (0,05)	235.440 (0,05)	247.872 (0,05)	258.257 (0,05)

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
F	Konstruksi	31.211.245 (6,89)	33.754.000 (7,26)	35.682.996 (7,33)	35.388.716 (7,49)	36.949.557 (7,63)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23.948.480 (5,29)	25.678.998 (5,53)	27.025.570 (5,55)	27.196.567 (5,76)	28.222.666 (5,83)
H	Transportasi dan Pergudangan	13.184.391 (2,91)	13.937.815 (3,00)	14.264.273 (2,93)	13.373.271 (2,83)	13.684.587 (2,83)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.753.586 (0,83)	4.080.239 (0,88)	4.340.118 (0,89)	4.108.418 (0,87)	4.184.892 (0,86)
J	Informasi dan Komunikasi	6.989.140 (1,54)	7.295.360 (1,57)	7.795.537 (1,60)	8.338.485 (1,76)	9.002.576 (1,86)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.525.584 (1,44)	6.751.780 (1,45)	6.966.068 (1,43)	7.137.891 (1,51)	7.320.021 (1,51)
L	Real Estate	4.032.550 (0,89)	4.227.269 (0,91)	4.316.690 (0,89)	4.321.113 (0,91)	4.290.183 (0,89)
M,N	Jasa Perusahaan	853.812 (0,19)	896.170 (0,19)	914.126 (0,19)	889.671 (0,19)	911.553 (0,19)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.565.604 (1,67)	7.941.460 (1,71)	8.252.791 (1,70)	7.951.298 (1,68)	8.108.528 (1,67)
P	Jasa Pendidikan	6.328.422 (1,40)	6.780.283 (1,46)	7.036.310 (1,45)	7.244.720 (1,53)	7.420.373 (1,53)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.492.457 (0,55)	2.691.435 (0,58)	2.864.486 (0,59)	3.404.051 (0,72)	3.858.132 (0,80)
R,S,T,U	Jasa lainnya	2.326.151 (0,51)	2.548.786 (0,55)	2.750.363 (0,57)	2.634.737 (0,56)	2.664.412 (0,55)
PDRB		452.741.908 (100,00)	464.694.427 (100,00)	486.712.237 (100,00)	472.554.817 (100,00)	484.297.346 (100,00)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Jika dilihat menurut kontribusinya, struktur perekonomian Kalimantan Timur masih didominasi oleh Kategori Pertambangan dan Penggalian. Kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian secara konsisten menyumbang di atas 40 persen dari total PDRB Kaltim. Namun dalam beberapa tahun terakhir kontribusi Lapangan Usaha ini cenderung menurun tipis meski masih fluktuatif. Mulai tahun 2017, kontribusi Lapangan Usaha utama yakni Pertambangan dan Penggalian serta industri pengolahan mengalami penurunan, demikian pula kontribusi Lapangan Usaha pertanian yang sempat turun tipis pada tahun yang sama. Namun semenjak 2020, khususnya karena masa Pandemi COVID-19, maka terlihat penurunan kontribusi Kategori Pertambangan dan Penggalian hingga menjadi 41,29 persen dan terjadi peningkatan cukup signifikan pada Kategori Industri Pengolahan dan Kategori Pertanian. Sedangkan pada tahun 2021 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian mengalami peningkatan mencapai 45,05 persen sedangkan sektor yang lain mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

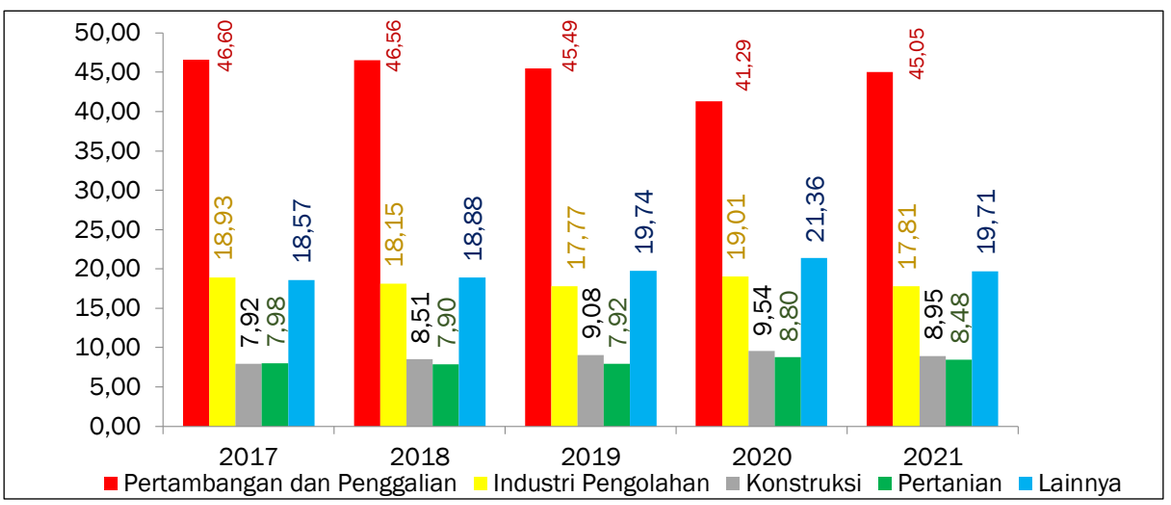

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.14
Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2017-2021 (persen)

Menyadari bahwa Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian bergantung pada sumber daya alam yang tak terbarukan, maka transformasi ekonomi baik secara horizontal yaitu menumbuhkan dan mendorong lapangan usaha ekonomi baru maupun transformasi vertikal melalui upaya hilirisasi/industrialisasi sangat tepat untuk dilakukan. Lapangan Usaha yang dapat didorong diantaranya Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti luas). Jika dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB

Kaltim secara rata-rata dari tahun 2017-2021 sebesar 8,21 persen. Capaian ini tentunya masih sangat kecil. Maka diperlukan dorongan besar untuk melakukan perubahan yang besar pula, terutama diarahkan pada inovasi pengembangan komoditas. Dimana sektor yang dominan menggerakkan lapangan usaha ini adalah sektor pertanian, peternakan, dan jasa pertanian terutama pada sub tanaman perkebunan.

Sub sektor perkebunan tahunan menunjukkan nilai PDRB yang meningkat dari tahun ke tahun. Komoditas perkebunan tahunan yang dimiliki Provinsi Kaltim diantaranya kelapa sawit, karet, kelapa dalam, dan lada. Potensi ini perlu mendapatkan perhatian besar untuk memperkuat struktur ekonomi Kaltim di luar migas dan batubara. Komoditas dalam sektor perikanan dan sektor kehutanan dan penebangan kayu juga berpotensi dalam mendongkrak geliat ekonomi di lapangan usaha pertanian, namun untuk melihat komoditas apa yang perlu dikembangkan, dibutuhkan supporting data yang lengkap, akurat dan valid.

Perlu diketahui bahwa *share* Lapangan Usaha Perdagangan terhadap PDRB Kaltim juga menunjukkan pergerakan yang positif, serta cenderung dipengaruhi oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor dimana di dalamnya tercatat omzet dari UMKM. Nilai PDRB pada sub sektor ini terus meningkat ditengah-tengah menurunnya aktivitas pertambangan dan penggalian, namun kontribusinya masih relatif kecil, pada tahun 2020 kontribusinya hanya sebesar 6,46 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami peningkatan sebesar 3,13 persen pada tahun 2017, dimana laju pertumbuhan ekonomi non migas tercatat sebesar 4,22 persen serta laju pertumbuhan ekonomi non migas dan batubara sebesar 4,87 persen. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami penurunan menjadi negatif 2,87 persen. Hal ini disebabkan terjadi pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan kinerja ekonomi sebagian besar lapangan usaha, sehingga laju pertumbuhan ekonomi non migas mengalami kontraksi sebesar 2,27 persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara juga mengalami kontraksi sebesar 0,56 persen.

Pada tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami peningkatan menjadi 2,48 persen. Pertumbuhan bersumber dari

peningkatan permintaan global maupun domestik serta juga turut ditopang oleh peningkatan aktivitas masyarakat, sehingga laju pertumbuhan ekonomi non migas mencapai 3,24 persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi

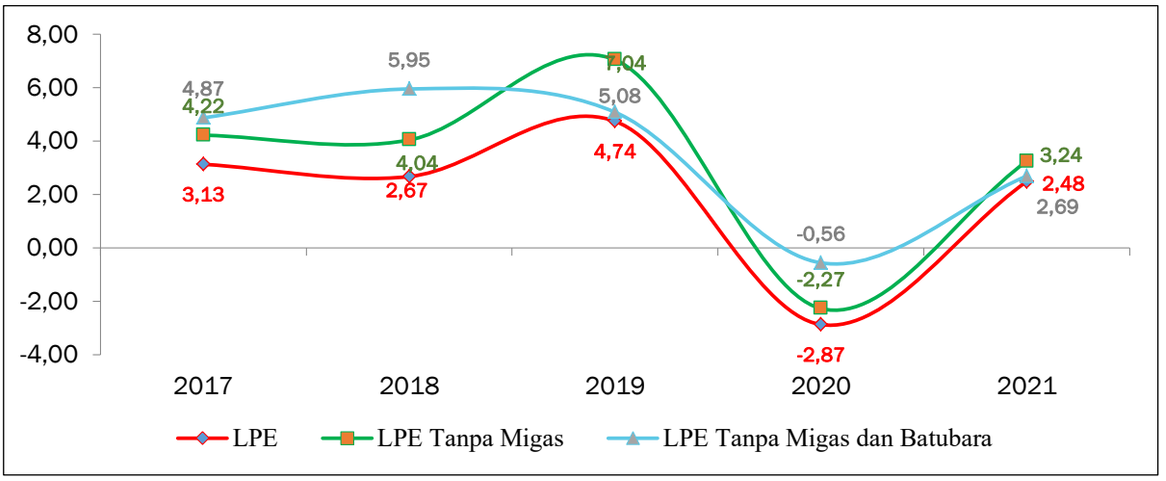

non migas dan non batubara juga mengalami pertumbuhan sebesar 2,69 persen.

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.15
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021 (%)

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur jika dilihat menurut Lapangan Usaha cukup berfluktuatif. Pada tahun 2020 dimana terlihat pertumbuhan negatif di beberapa lapangan usaha karena pandemi COVID-19. Laju pertumbuhan tertinggi diciptakan oleh Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 20,22 persen. Kemudian disusul Lapangan Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh sebesar 11,47 dan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 7,56 persen. Sedangkan Lapangan Usaha lainnya tumbuh di bawahnya bahkan mengalami kontraksi (negatif) dan di tahun 2021 perekonomian Kalimantan Timur mengalami perbaikan dimana terlihat pertumbuhan positif di sebagian besar lapangan usaha. Laju pertumbuhan tertinggi diciptakan oleh Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 19,34 persen. Kemudian disusul Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 7,96 persen dan Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 4,41 Sedangkan Lapangan Usaha yang masih mengalami kontraksi (negatif) yaitu Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar -0,26 persen dan Lapangan Usaha *Real Estate* sebesar -0,72 persen.

Tabel II.10
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021 (persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,66	6,14	3,91	(0,92)	(0,26)
B	Pertambangan dan Penggalian	1,79	1,07	6,89	(4,60)	2,26
C	Industri Pengolahan	2,80	0,69	0,03	(2,86)	2,29
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,78	9,76	8,67	11,47	2,34
E	Pengadaan Air	8,37	3,22	4,84	5,28	4,19
F	Konstruksi	5,76	7,91	5,71	(1,46)	4,41
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,22	7,16	5,24	1,04	3,77
H	Transportasi dan Pergudangan	6,46	5,80	2,34	(5,93)	2,33
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,37	8,70	6,37	(5,34)	1,86
J	Informasi dan Komunikasi	7,79	4,38	6,86	7,56	7,96
K	Jasa Keuangan	(0,72)	4,05	3,17	2,47	2,55
L	*Real Estate*	3,35	4,83	2,12	0,69	(0,72)
M,N	Jasa Perusahaan	3,54	4,96	2,00	(3,13)	2,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(3,47)	3,11	3,92	(3,83)	1,98
P	Jasa Pendidikan	6,73	7,73	3,78	2,96	2,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,16	8,05	6,43	20,22	13,34
R,S,T,U	Jasa Lainnya	6,44	9,02	7,91	(3,00)	1,13
Laju Pertumbuhan Ekonomi		3,13	2,67	4,74	(2,87)	2,48

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Beberapa hal yang menjadi catatan tahun 2021 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi hanya pada tiga sektor yaitu Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan lapangan usaha *Real Estate*.

Secara regional, pertumbuhan ekonomi tahun 2021 mulai membaik. Secara *year on year* (YoY) menempatkan Kalimantan Barat dengan pertumbuhan tertinggi dibanding wilayah lainnya di Pulau Kalimantan yaitu sebesar 4,95 persen, lalu diikuti Kalimantan Utara sebesar 2,98 persen, Kalimantan Selatan sebesar 2,68 persen, Kalimantan Timur sebesar 2,34 persen dan Kalimantan Tengah sebesar 1,92 persen. Selanjutnya jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional, dengan pertumbuhan sebesar 3,24 persen, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur juga masih tertinggal.

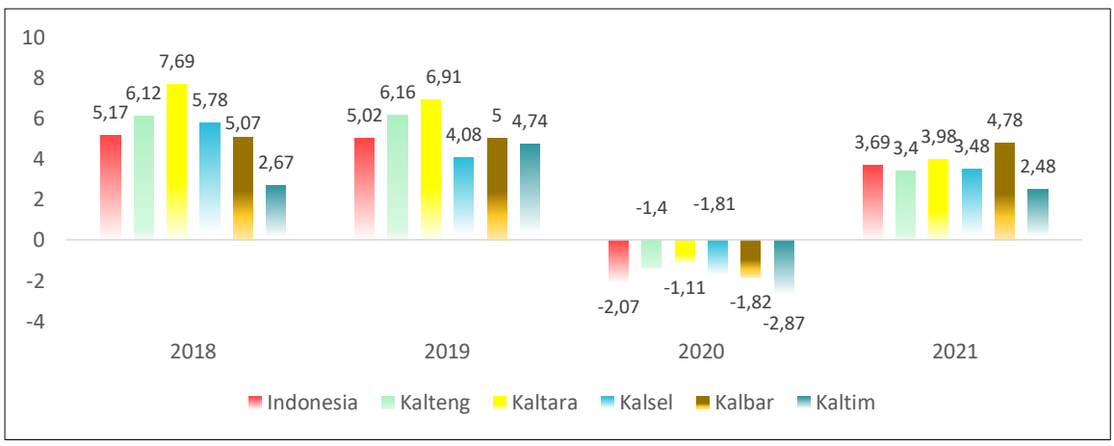

Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.16
Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Regional Kalimantan (%)

Tabel II.11
Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021 (miliar rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	96.807,32	102.584,20	109.767,66	111.183,75	115.437,96
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2.629,57	2.958,20	3.238,86	3.250,60	3.407,57
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	21.596,79	23.760,62	26.298,93	26.257,95	27.422,86
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	154.503,23	173.474,79	187.939,11	188.195,89	210.237,72
5	Perubahan Inventori	1.757,93	1.613,95	722,91	1.238,58	383,59
6	Net Ekspor Barang & Jasa	314.608,65	331.106,93	324.190,59	277.049,17	338.268,63
PDRB		591.903,49	635.498,68	652.158,06	607.320,78	695.158,33

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku dari sisi pengeluaran pada tahun 2017-2021 secara keseluruhan mengalami

peningkatan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan karena Pandemi COVID-19, dimana PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku menurut kelompok pengeluaran mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 607,32 triliun. Pada tahun 2021 Ekonomi Kalimantan Timur mulai mengalami perbaikan ekonomi yang mencapai Rp 695,16 triliun meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Tabel II.12
Distribusi PDRB Menurut Kelompok Pengeluaran
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021

No	Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	16,36	16,26	16,79	18,30	16,61
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,44	0,47	0,50	0,54	0,49
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,65	3,73	4,03	4,32	3,94
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	26,10	27,25	28,72	30,97	30,24
5	Perubahan Inventori	0,30	0,25	0,11	0,20	0,06
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	53,15	52,10	49,71	45,67	48,66

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Distribusi komponen pengeluaran PDRB Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017-2021 masih didominasi oleh Komponen Net ekspor barang dan jasa. Hal ini tentu saja tidak dapat dipungkiri dimana ekspor barang tambang dan penggalian sangat mendominasi dalam ekspor barang dan jasa. Fenomena tersebut merupakan aktivitas perdagangan luar negeri yang tercermin dari besarnya kontribusi Komponen ekspor barang dan jasa, dimana komoditas ekspor Kalimantan Timur sebagian besar didominasi komoditas bahan bakar mineral (batubara, minyak bumi dan gas alam).

Tabel II.13
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran ADHK
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021

No	Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,58	3,14	3,15	(0,48)	1,20
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,89	8,57	6,77	(0,99)	0,30
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	(9,79)	7,91	7,70	(1,95)	2,03
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,75	7,54	4,79	(1,06)	8,03

No	Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Net Ekspor Barang & Jasa	4,28	0,17	5,17	(4,60)	5,99
PDRB		3,13	2,64	4,74	-2,87	2,48

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan kelompok pengeluaran pada tahun 2021 mencapai 2,48 persen. Dimana pertumbuhan terendah dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 0,30 persen. Selain memiliki kontribusi tertinggi, Komponen Net Ekspor Barang dan Jasa juga mengalami pertumbuhan ekonomi baik yang mengindikasikan bahwa nilai PDRB Kalimantan Timur baik dari sisi nilai maupun pertumbuhannya dikarenakan kegiatan ekspor barang dan jasa.

Tabel II.14
Nilai PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021 (Miliar Rp)

No	KAB/KOTA	2017	2018	2019	2020	2021
1	Paser	33.137,65	34.362,05	35.734,75	34.711,82	36.588,97
2	KUBAR	19.139,86	20.108,76	21.253,83	20.646,51	21.509,22
3	KUKAR	118.943,99	121.509,48	126.272,37	120.952,01	124.178,50
4	KUTIM	86.520,25	88.582,49	95.815,41	92.846,68	91.906,13
5	Berau	26.227,29	26.769,40	28.275,57	27.337,54	28.802,74
6	PPU	6.506,88	6.590,45	6.762,58	6.604,22	6.492,34
7	MAHULU	1.589,56	1.675,32	1.767,80	1.763,74	1.786,10
8	Balikpapan	76.032,08	79.807,11	83.793,41	83.010,71	86.796,99
9	Samarinda	41.274,97	43.323,57	45.491,36	45.039,69	46.282,12
10	Bontang	43.073,06	41.316,22	40.427,70	39.319,93	39.949,43

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Dominasi struktur ekonomi kewilayahan didominasi oleh PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara dimana Nilai PDRB (ADHK) pada tahun 2021 mencapai Rp 124,18 triliun disusul perekonomian Kutai Timur dan Kota Balikpapan yang masing-masing dengan nilai PDRB (ADHK) sebesar Rp 91,91 triliun dan Rp 86,80 triliun. Ketiga daerah ini memang layak memiliki kontribusi dominan karena memiliki aktivitas pertambangan dan penggalian yang cukup menjanjikan dalam memberikan sumbangsih nilai PDRB.

Tabel II.15
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021 (%)

No	KAB/KOTA	2017	2018	2019	2020	2021
1	Paser	1,17	3,69	3,99	-2,86	5,41
2	KUBAR	3,64	5,06	5,69	-2,86	4,18
3	KUKAR	1,63	2,16	3,92	-4,21	2,67
4	KUTIM	3,28	2,38	8,17	-3,10	-1,01
5	Berau	3,01	2,07	5,63	-3,32	5,36
6	PPU	2,44	1,28	2,61	-2,34	-1,69
7	MAHULU	4,29	5,40	5,52	-0,23	1,27
8	Balikpapan	3,84	4,97	4,99	-0,93	4,56
9	Samarinda	3,85	4,96	5,00	-0,99	2,76
10	Bontang	0,55	-4,08	-2,15	-2,74	1,60

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Pada tahun 2021 terjadi peningkatan kinerja yang cukup signifikan, salah satu faktor penyebab meningkatnya kinerja ekonomi adalah mulai menurunnya pandemi COVID-19 dan meningkatnya aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Selain itu, dari sisi eksternal ekonomi wilayah Kalimantan Timur, khususnya pasar global, meningkatnya rata-rata harga komoditas pangan (tandan buah segar/TBS kelapa sawi dan minyak kelapa sawit/CPO), Harga Batu Bara Acuan (HBA) serta harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sehingga terdapat peningkatan *demand* terhadap komoditas energi, yang dihasilkan di wilayah Kalimantan Timur seperti migas dan batubara dan kemudian diikuti peningkatan harga komoditas energi tersebut di pasar internasional.

Kondisi tersebut berdampak pada perkembangan ekonomi kabupaten/kota se-Kalimantan Timur yang secara umum mengalami peningkatan. Kabupaten yang masih mengalami pertumbuhan negatif adalah Kabupaten Kutai Timur yaitu sebesar minus 1,01 persen dan Kabupaten Penajam Paser Utara minus 1,69 persen. Sementara itu, wilayah kabupaten/kota lainnya mengalami pertumbuhan positif dengan Kabupaten Paser memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan capaian 5,41 persen.

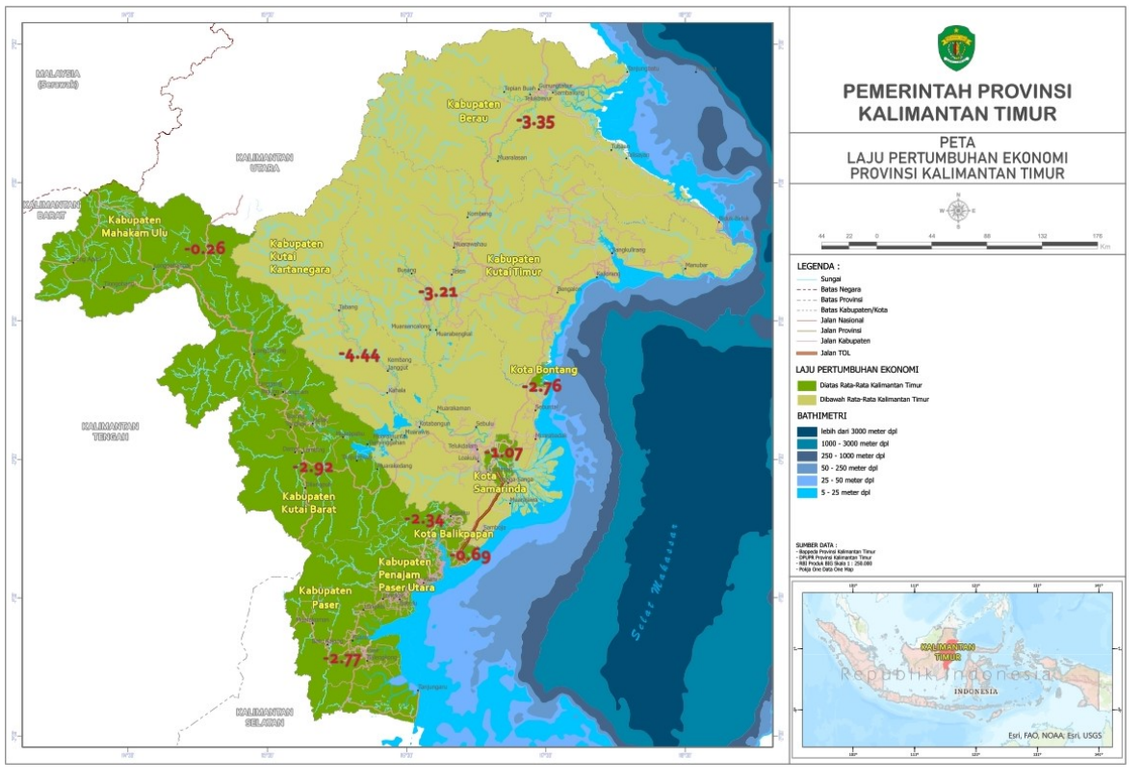

Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

Gambar II.17
Distribusi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Kabupaten/Kota Tahun 2021

Berdasarkan peranan kabupaten/kota dalam pembentukan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021, maka terlihat bahwa peranan Kabupaten Kutai Kartanegara paling besar diantara kabupaten/kota lainnya yang mencapai 25,50 persen, selanjutnya disusul Kabupaten Kutai Timur 19,47 persen. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur merupakan sentra pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur. Kota Balikpapan memberikan peran sebesar 16,01 persen sebagai pusat jasa dan niaga serta industri kilang minyak. Selebihnya Kabupaten/Kota lainnya berkontribusi pada PDRB Kalimantan Timur dibawah 11 persen.

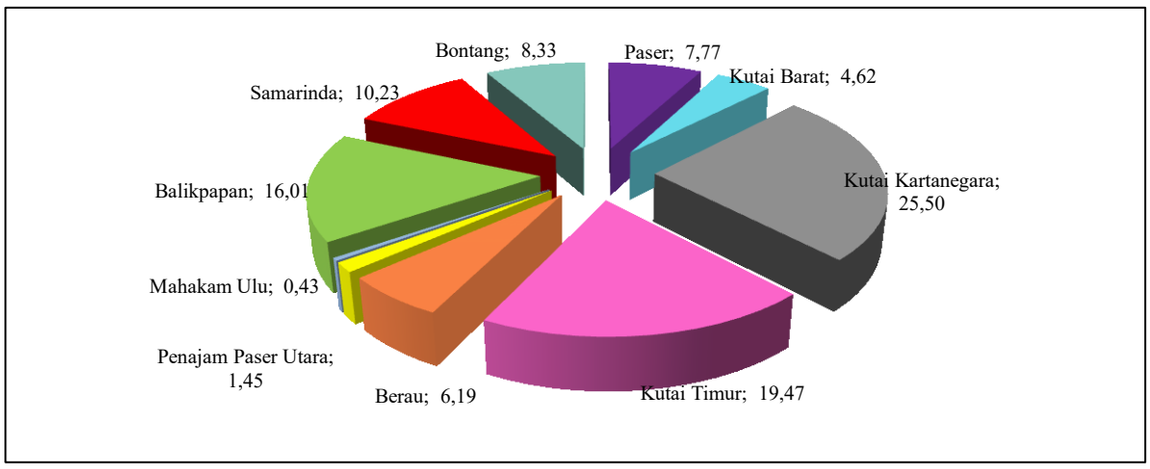

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Gambar II.18
Distribusi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2021 (%)

Pada tahun 2021, terdapat 6 (enam) kabupaten yang menjadikan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebagai sektor ekonomi utama. Jika dilihat dari besaran kontribusi yang diberikan, maka terlihat bahwa sektor Pertambangan dan Penggalian sangat mendominasi terutama pada perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Besaran yang diberikan sangat signifikan, hingga mencapai 79,72 persen, dan kegiatan tersebut ditopang oleh aktivitas pertambangan batubara.

Tabel II.16
Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Sektoral Kabupaten/Kota
Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021

Kab/Kota	Peringkat I		Peringkat II		Peringkat III	
	Lap. Usaha	Share (%)	Lap. Usaha	Share (%)	Lap. Usaha	Share (%)
Paser	Pertambangan	70,95	Pertanian	12,02	Industri	5,28
KUBAR	Pertambangan	49,15	Pertanian	14,97	Konstruksi	10,84
KUKAR	Pertambangan	64,10	Pertanian	13,46	Konstruksi	7,52
KUTIM	Pertambangan	79,72	Pertanian	8,24	Industri	3,43
Berau	Pertambangan	56,43	Pertanian	11,64	Perdagangan	6,51
PPU	Pertambangan	23,51	Pertanian	22,98	Industri	16,21
MAHULU	Pertanian	74,72	Konstruksi	6,84	Pertambangan	6,63
Balikpapan	Industri	46,63	Konstruksi	17,56	Transportasi	9,17
Samarinda	Konstruksi	20,75	Perdagangan	16,62	Pertambangan	12,51
Bontang	Industri	79,41	Konstruksi	6,49	Perdagangan	3,31

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Peranan aktivitas Pertambangan dan Penggalian juga cukup dominan di wilayah Kabupaten Paser, mencapai 70,95 persen. Sama halnya dengan wilayah Kutai Timur, wilayah Kabupaten Paser juga didominasi oleh kegiatan pertambangan batubara. Wilayah lainnya yang juga memiliki kemiripan karakteristik dengan Kutai Timur dan Paser adalah Kabupaten

Kutai Kartanegara, dimana Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian memberikan peranan yang cukup besar mencapai 64,10 persen terhadap total PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun aktivitas pertambangan yang dimaksud adalah pertambangan migas, pertambangan batubara dan pertambangan lainnya. Kabupaten lain dengan sektor utama pertambangan juga tercatat di Berau dan Penajam Paser Utara. Adapun daerah yang menggantungkan sektor utamanya pada sektor industri adalah Kota Bontang dan Kota Balikpapan, sedangkan daerah yang sektor utamanya Pertanian yaitu Kabupaten Mahakam Ulu.

Tabel II.17
Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Pengeluaran
Kabupaten/Kota Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021

Kab/Kota	Peringkat I		Peringkat II		Peringkat III	
	Komponen	Share (%)	Komponen	Share (%)	Komponen	Share (%)
Paser	Net Ekspor	66,72	PMTB	17,83	K. Ruta	12,24
KUBAR	Net Ekspor	42,52	PMTB	34,53	K. Ruta	15,20
KUKAR	Net Ekspor	49,72	PMTB	36,23	K. Ruta	11,12
KUTIM	Net Ekspor	72,11	PMTB	19,57	K. Ruta	6,32
Berau	Net Ekspor	64,98	PMTB	19,06	K. Ruta	11,81
PPU	PMTB	40,51	K. Ruta	40,36	K. Pemerintah	10,98
MAHULU	Net Ekspor	32,41	PMTB	30,18	K. Ruta	24,08
Balikpapan	PMTB	42,57	Net Ekspor	29,12	K. Ruta	24,68
Samarinda	K. Ruta	45,16	PMTB	40,87	K. Pemerintah	12,87
Bontang	Net Ekspor	73,79	PMTB	13,14	K. Ruta	10,66

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Pada tahun 2021, dari sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Timur sebanyak tujuh kabupaten/kota memiliki perekonomian yang didominasi oleh komponen Net Ekspor, sedangkan beberapa kabupaten/kota lainnya didominasi oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT). Kabupaten/kota yang perekonomiannya didominasi oleh komponen selain Net ekspor adalah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan didominasi oleh komponen PMTB (investasi) yang masing-masing memberi *share* sebesar 40,51 persen dan 42,57 persen. Sementara itu, perekonomian wilayah Kota Samarinda didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsusmsi Akhir Rumah Tangga dengan *share* 45,16.

Kabupaten/kota yang porsi tersebarnya merupakan Net Ekspor merupakan wilayah dengan ekonomi yang berbasis sumber daya alam, seperti batubara, minyak dan gas bumi. Jika dibandingkan porsi komponen

Net Ekspor antar wilayah tersebut, yang memiliki nilai *share* Net Ekspor terbesar adalah Kota Bontang, yaitu sebesar 73,79 persen. Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Paser juga memiliki *share* Net Ekspor yang signifikan, yaitu masing-masing sebesar 72,11 persen dan 66,72 persen. Sementara itu, Kabupaten Kutai Barat, Berau, Kutai Kartanegara dan Mahakam Ulu memiliki nilai *share* Net Ekspor masing-masing sebesar 42,52 persen, 64,98 persen, 49,72 persen dan 32,41 persen.

B. Laju Inflasi

Laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur cenderung menurun dari tahun ke tahun, akan tetapi mengalami peningkatan pada tahun 2021 mencapai 2,15 persen. Kondisi ini terpengaruh dari meningkatnya daya beli masyarakat pada tahun 2021 dimasa pemulihan ekonomi akibat Pandemi COVID-19 termasuk didalamnya perubahan cara pembelian barang kebutuhan pokok masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh meningkatnya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau; Kelompok Transportasi, Kelompok Pengeluaran, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran, Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga, Kelompok Kesehatan, Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya; Kelompok Pendidikan.

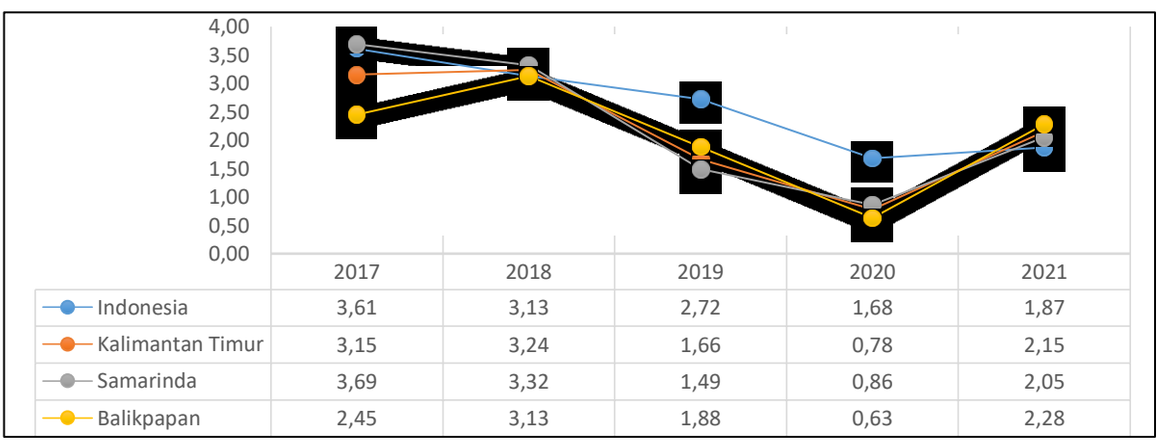

	2017	2018	2019	2020	2021
Indonesia	3,61	3,13	2,72	1,68	1,87
Kalimantan Timur	3,15	3,24	1,66	0,78	2,15
Samarinda	3,69	3,32	1,49	0,86	2,05
Balikpapan	2,45	3,13	1,88	0,63	2,28

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.19
Laju Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021 (%)

Namun demikian penurunan inflasi tertahan oleh kenaikan harga dari kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan. Kota Balikpapan pada tahun 2021 mengalami inflasi lebih tinggi dari tahun sebelumnya menjadi 2,28 persen, dan lebih tinggi dibandingkan inflasi Kota Samarinda sebesar 2,05 persen. Sehingga secara keseluruhan tingkat inflasi Kalimantan Timur berada di atas inflasi nasional yang mencapai 2,15 persen.

C. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menggambarkan rata-rata produktivitas yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah dan dapat digunakan sebagai indikator dalam menentukan pencapaian tingkat kemakmuran di suatu daerah. Apabila nilai PDRBnya besar dengan jumlah penduduk sedikit maka dapat dipastikan PDRB per kapita daerah tersebut akan besar, demikian pula sebaliknya. Nilai dasar yang digunakan ada dua yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk dan PDRB per Kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

Nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2017-2021 cenderung meningkat. Namun nilai PDRB per Kapita tersebut mengalami penurunan pada tahun 2020 dari sebesar Rp 180,26 juta menjadi Rp 160,11 juta. Hal ini tentu saja disebabkan adanya pengaruh dari Pandemi COVID-19 yang memberikan dampak negatif bagi perekonomian daerah, khususnya ekonomi makro. Namun di tahun 2021 nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku kembali meningkat mencapai Rp 182,54 juta. Sama halnya dengan pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku yang mengalami perlambatan di tahun 2020 dengan capaian -10,26 persen dan tahun 2021 meningkat dengan tumbuh sebesar 12,85 persen.

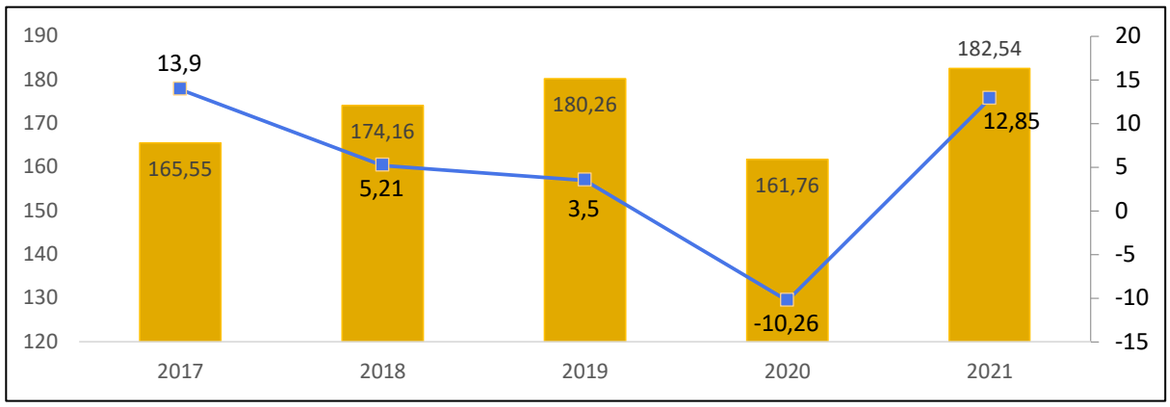

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.20
Nilai PDRB dan Pertumbuhan per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

Dilihat dari nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku menurut kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, jika diurutkan maka nilai PDRB per kapita tertinggi tahun 2021 yakni di Kota Bontang sebesar Rp 320,44 juta, Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp 301,40 juta, dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp 241,70 juta. Sedangkan kabupaten/kota dengan PDRB per Kapita paling rendah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp 55,84 juta dan Kota Samarinda sebesar Rp 85,58 juta.

Tabel II.18
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota
di Kalimantan Timur Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

No	KAB/KOTA	2017	2018	2019	2020	2021
1	Paser	160,30	171,64	173,34	157,20	194,51
2	KUBAR	175,43	192,10	195,40	158,05	184,46
3	KUKAR	198,41	210,47	212,76	204,50	241,70
4	KUTIM	346,12	353,74	367,11	268,81	301,40
5	Berau	161,63	166,27	173,83	143,66	170,29
6	PPU	53,77	55,70	57,76	50,79	55,84
7	MAHULU	88,87	95,32	102,45	85,37	90,16
8	Balikpapan	137,92	151,30	165,69	151,20	160,10
9	Samarinda	69,29	74,08	79,95	80,36	85,58
10	Bontang	345,15	337,45	327,06	311,88	320,44

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Jika dilihat secara nasional, nilai PDRB per Kapita Kalimantan Timur pada tahun 2021 berada di atas PDRB per Kapita Nasional sebesar Rp 182,54 juta. Dengan demikian, PDRB per Kapita Kalimantan Timur tahun 2021 merupakan yang tertinggi kedua di tingkat nasional setelah DKI

Jakarta. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh nilai PDRB yang tinggi dan jumlah penduduk Kalimantan Timur yang besarannya tidak sebanyak jumlah penduduk di luar Pulau Kalimantan.

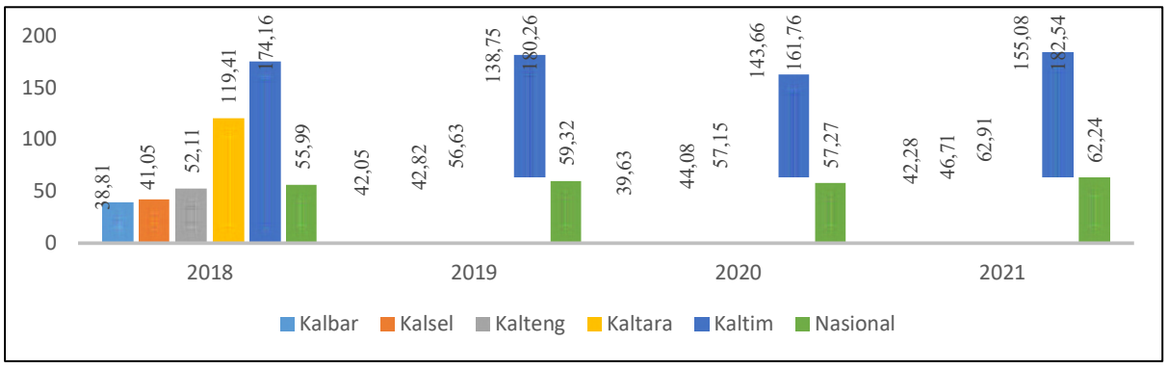

Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2022

Gambar II.21
PDRB per Kapita Nasional dan Regional Kalimantan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2021 (Juta Rupiah)

Nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2017-2021 cenderung meningkat. Namun nilai PDRB per Kapita tersebut mengalami penurunan pada tahun 2020 dari sebesar Rp 134,41 juta menjadi Rp 125,81 juta. Hal ini tentu saja disebabkan adanya pengaruh dari Pandemi COVID-19 yang memberikan dampak negatif bagi perekonomian daerah, khususnya ekonomi makro. Namun di tahun 2021 nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan kembali meningkat mencapai Rp 127,17 juta. Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan mengalami perlambatan di tahun 2020 dengan capaian -6,40 persen dan tahun 2021 meningkat dengan tumbuh sebesar 1,08 persen.

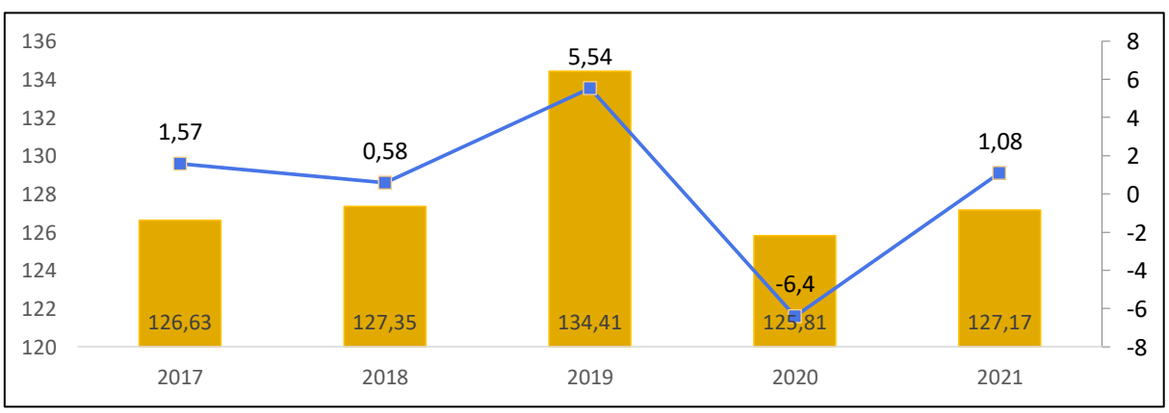

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.22
Nilai PDRB dan Pertumbuhan per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

Dilihat dari nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan menurut kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, jika diurutkan maka nilai PDRB per kapita tertinggi tahun 2021 yakni di Kota Bontang sebesar Rp 220,91 juta, Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp 204,62 juta, dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp 169,27 juta. Sedangkan kabupaten/kota dengan PDRB per Kapita paling rendah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp 35,94 juta dan Kota Samarinda sebesar Rp 55,66 juta.

Tabel II.19
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota
di Kalimantan Timur Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

No	KAB/KOTA	2017	2018	2019	2020	2021
1	Paser	120,85	122,73	128,98	126,20	131,80
2	KUBAR	130,20	136,24	142,54	120,09	123,63
3	KUKAR	158,15	157,94	165,73	165,95	169,27
4	KUTIM	249,00	244,93	262,75	215,97	204,62
5	Berau	118,89	118,18	125,69	110,79	114,00
6	PPU	41,26	41,35	42,80	37,06	35,94
7	MAHULU	60,43	63,59	66,63	54,44	54,18
8	Balikpapan	119,55	123,59	132,06	120,87	124,84
9	Samarinda	48,94	50,49	53,80	54,41	55,66
10	Bontang	252,46	237,17	227,95	220,31	220,91

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Jika dilihat secara nasional, nilai PDRB per Kapita Kalimantan Timur pada tahun 2021 berada di atas PDRB per Kapita Nasional sebesar Rp 127,17 juta. Dengan demikian, PDRB per Kapita Kalimantan Timur tahun 2021 merupakan yang tertinggi kedua di tingkat nasional setelah DKI Jakarta. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh nilai PDRB yang tinggi dan jumlah penduduk Kalimantan Timur yang besarannya tidak sebanyak jumlah penduduk di luar Pulau Kalimantan.

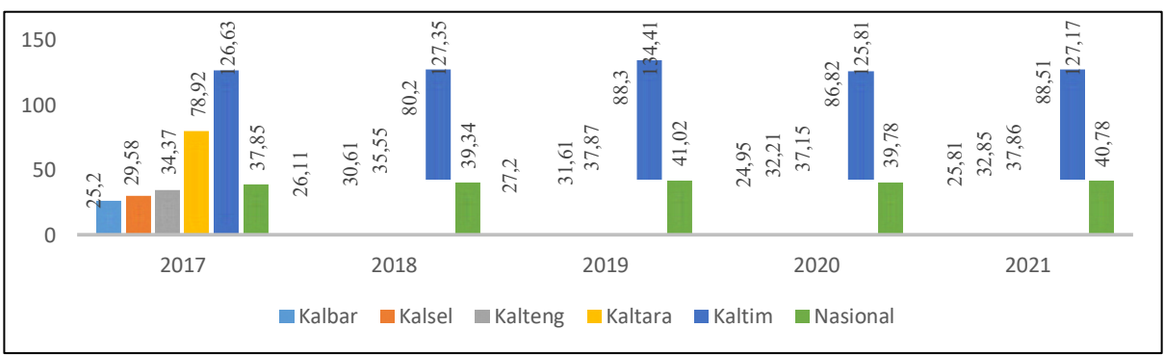

Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2022

Gambar II.23
PDRB per Kapita Nasional dan Regional Kalimantan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

D. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi 6,54 persen. Secara absolut, jumlah penduduk miskin juga meningkat menjadi sebanyak 241,77 ribu jiwa dibandingkan tahun 2020 yaitu sebanyak 230,26 ribu jiwa. Dimana garis kemiskinan di Kalimantan Timur juga meningkat menjadi sebesar Rp 689.035 yang didominasi untuk memenuhi kecukupan pangan/makanan. Peningkatan angka kemiskinan yang merupakan fenomena nasional ini disebabkan adanya Pandemi COVID-19 yang memberikan pengaruh negatif pada beberapa lapangan usaha. Beberapa kondisi dilakukan dalam menghadapi pandemi ini seperti pengurangan pegawai, penurunan omzet, hingga pembatasan produksi. Adanya keterbatasan-keterbatasan tersebut secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat sehingga meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Tabel II.20
Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021

Periode	Garis Kemiskinan			Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
	Makanan	Non Makanan	Total		
Maret 2017	389.152	158.943	548.094	220,17	6,19
Maret 2018	405.108	169.596	574.704	218,90	6,03
Maret 2019	429.165	179.991	609.155	219,92	5,94
Maret 2020	463.823	198.479	662.302	230.260	6,10
Maret 2021	485.445	203.590	689.035	241.770	6,54

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Komoditi makanan yang mempunyai andil terbesar dalam pembentuk garis kemiskinan makanan di Kalimantan Timur pada bulan Maret 2021 antara daerah perkotaan dan perdesaan terdapat kemiripan pola. Dari enam komoditi penyumbang garis kemiskinan makanan terbesar di pedesaan dan di perkotaan, dua komoditi terbesarnya terdapat persamaan. Dua jenis komoditi terbesar yang sama yaitu beras dan rokok kretek filter. Berikut adalah jenis komoditi penyusun garis kemiskinan makanan untuk daerah perkotaan secara berturut-turut adalah beras, rokok kretek filter, daging ayam ras, telur ayam ras, mie instan dan gula pasir. Sedangkan di daerah perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, mie instan, gula pasir, dan cabe rawit. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.20

terkait persentase komoditi makanan terhadap garis kemiskinan makanan menurut daerah.

Tabel II.21
Persentase Komoditi Makanan terhadap Garis Kemiskinan Makanan Menurut Daerah Tahun 2021

No	Perkotaan		Perdesaan	
	Komoditi	%	Komoditi	%
1	Beras	20,96	Beras	23,73
2	Rokok Kretek Filter	18,09	Rokok Kretek Filter	20,73
3	Daging ayam ras	6,33	Telur ayam ras	6,23
4	Telur ayam ras	6,19	Mie Instan	4,90
5	Mie Instan	4,05	Gula Pasir	4,15
6	Gula Pasir	3,21	Cabe Rawit	3,18
7	Kue basah	3,21	Bawang merah	2,48
8	Cabe Rawit	3,07	Daging Ayam Ras	2,47
9	Tongkol/Tuna/Cakalang	2,59	Bandeng	2,27
10	Bawang Merah	2,57	Tongkol/Tuna/Cakalang	2,26

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Berdasarkan kabupaten/kota tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2021 masih di Kabupaten Mahakam Ulu yaitu mencapai 11,90 persen, sementara tingkat kemiskinan terendah adalah Kota Balikpapan hanya sebesar 2,89 persen. Sebagai daerah baru dan memiliki wilayah yang sulit diakses, menjadi salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan Mahakam Ulu. Namun dalam perjalanannya, progress positif selalu ditunjukkan dari hasil program pembangunan daerah hingga Pandemi COVID-19 menimpa.

Tabel II.22
Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021 (persen)

No	KAB/KOTA	2017	2018	2019	2020	2021
1	Paser	9,28	9,03	8,95	9,23	9,73
2	KUBAR	8,72	9,15	9,09	9,29	10,24
3	KUKAR	7,57	7,41	7,20	7,31	7,99
4	KUTIM	9,29	9,22	9,48	9,55	9,81
5	Berau	5,41	5,04	5,04	5,19	5,88
6	PPU	7,63	7,40	7,18	7,36	7,61
7	MAHULU	11,29	11,62	11,25	11,44	11,90
8	Balikpapan	2,82	2,64	2,42	2,57	2,89
9	Samarinda	4,77	4,59	4,59	4,76	4,99
10	Bontang	5,16	4,67	4,22	4,38	4,62

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur adalah yang tertinggi ketiga di Regional Kalimantan, setelah Kalimantan Selatan dan Kalimantan

Tengah. Tingkat kemiskinan terendah dicatat oleh Provinsi Kalimantan Selatan. Disamping itu, pada tahun 2021 terjadi peningkatan tingkat kemiskinan di provinsi Regional Kalimantan, kecuali Provinsi Kalimantan Barat menurun sebanyak 0,02 poin, sementara Kalimantan Timur meningkat sebanyak 0,44 poin. Meski demikian, tingkat kemiskinan

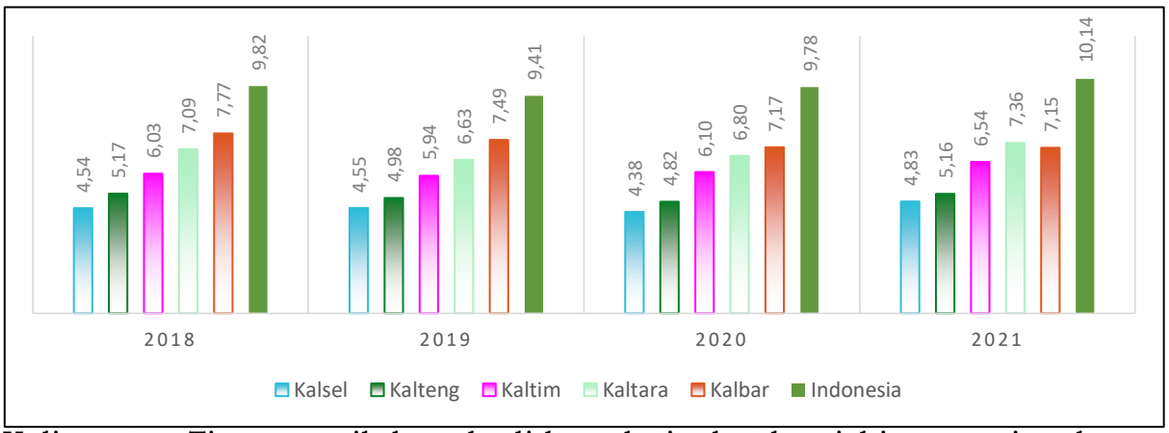

Kalimantan Timur masih berada di bawah tingkat kemiskinan nasional yang sebesar 10,14 persen.

Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.24
Tingkat Kemiskinan Regional Kalimantan dan Nasional

Secara absolut, jumlah penduduk miskin terbesar terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 62.360 jiwa, Kota Samarinda sebanyak 42.840 jiwa, Kabupaten Kutai Timur sebanyak 37.780 jiwa. Disisi lain, yang perlu menjadi perhatian adalah share PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur merupakan dua terbesar terhadap total PDRB Kalimantan Timur namun ternyata memiliki jumlah penduduk miskin yang terbesar di daerah tersebut. Besarnya nilai PDRB daerahnya belum mampu memberikan dampak maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh belahan dunia, termasuk Kalimantan Timur memberikan dampak peningkatan kemiskinan di Kalimantan Timur. Secara global diprediksi bahwa 420 – 580 juta orang akan menjadi miskin, sedangkan secara Nasional diperkirakan angka kemiskinan akan meningkat menjadi 9,39 persen. Angka kemiskinan di Kalimantan Timur juga mengalami peningkatan akibat pelemahan ekonomi di sektor pariwisata, transportasi, perdagangan dan beberapa sektor terdampak COVID-19 lainnya. Berkenaan dengan ini maka upaya untuk

menumbuhkan perekonomian pasca COVID-19 perlu untuk mendapatkan perhatian serius.

Tabel II.23
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021 (jiwa)

No	KAB/KOTA	2017	2018	2019	2020	2021
1	Paser	25.300	25.140	25.450	26.770	27.560
2	KUBAR	12.800	13.490	13.450	13.780	15.380
3	KUKAR	56.570	56.560	56.340	58.420	62.360
4	KUTIM	31.950	33.020	35.310	36.980	37.780
5	Berau	11.860	11.330	11.620	12.300	13.620
6	PPU	12.000	11.760	11.520	11.930	12.130
7	MAHULU	3.070	3.250	3.190	3.260	3.180
8	Balikpapan	17.860	17.010	15.780	17.020	18.530
9	Samarinda	40.010	39.230	39.800	41.920	42.840
10	Bontang	8.750	8.100	7.470	7.910	8.410

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami kenaikan begitu juga Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode Maret. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 0,208 pada keadaan Maret 2021 menjadi 1,223. Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,240 menjadi 0,337 pada periode yang sama. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi dari perkotaan. Pada bulan Maret 2021, Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan hanya 1,017 sementara di daerah perdesaan mencapai 1,673. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan hanya 0,303 sementara di daerah perdesaan mencapai 0,413. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih parah daripada daerah perkotaan.

Tabel II.24
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
di Kalimantan Timur Menurut Daerah Tahun 2017-2021

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
Maret 2017	0,465	1,708	0,885
Maret 2018	0,656	1,229	0,846
Maret 2019	0,610	1,530	0,910
Maret 2020	0,664	1,743	1,015
Maret 2021	1,017	1,673	1,223
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
Maret 2017	0,092	0,436	0,208

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
Maret 2018	0,161	0,270	0,197
Maret 2019	0,130	0,380	0,210
Maret 2020	0,157	0,412	0,240
Maret 2021	0,303	0,413	0,337

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 tertinggi pertama bila dibandingkan dengan regional kalimantan tetapi masih berada dibawah nasional sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan memiliki indeks kedalaman kemiskinan terendah.

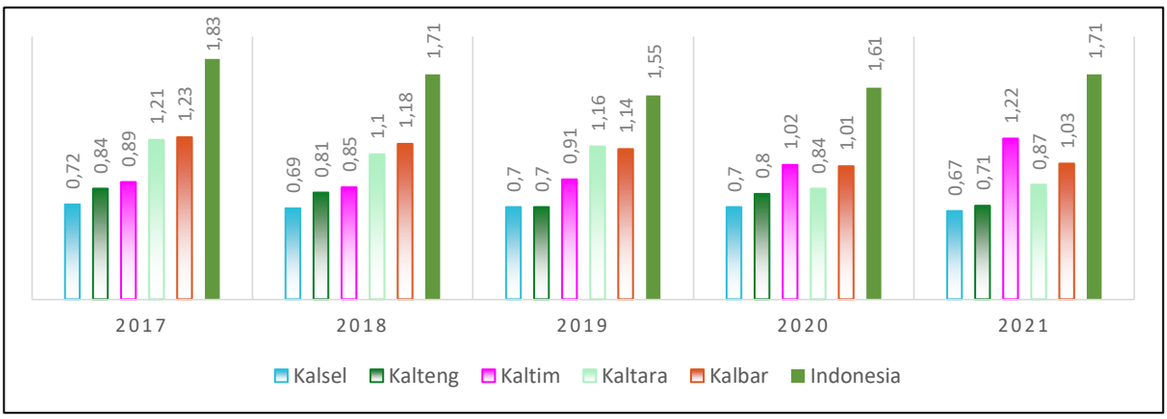

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.25
Indeks Kedalaman Kemiskinan Regional Kalimantan dan Nasional

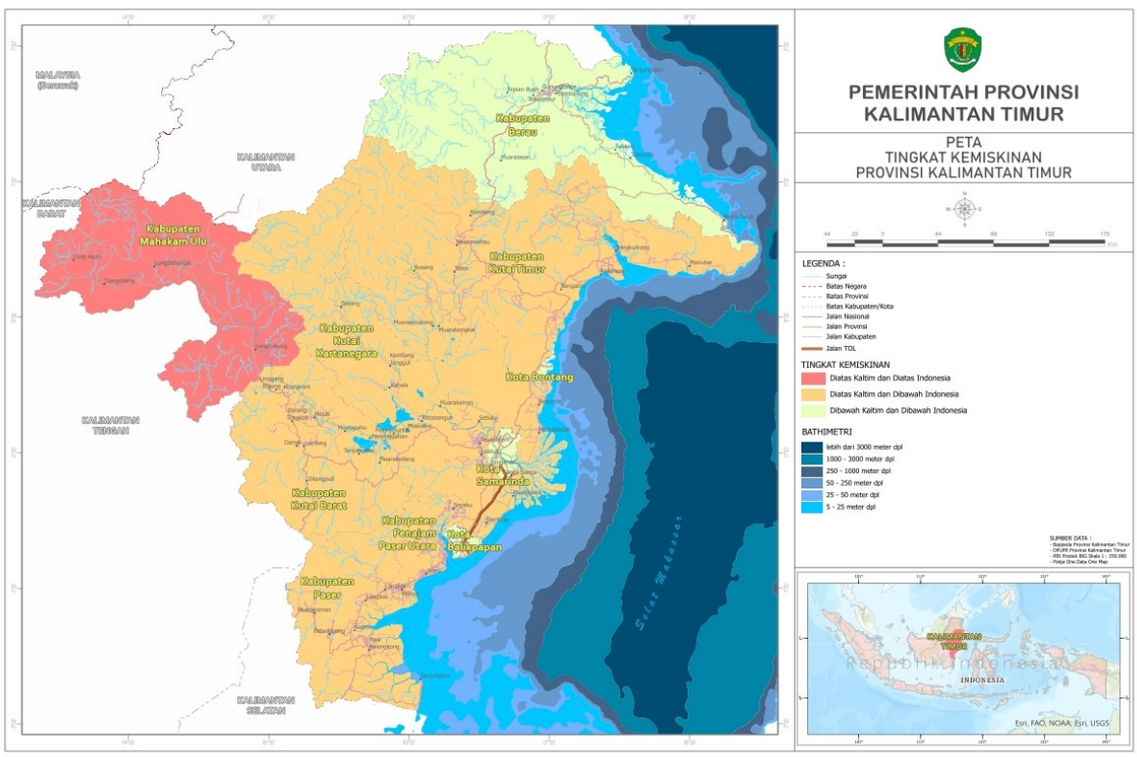

Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.26
Peta Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

Indeks gini kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 yang masuk dalam kategori sedang adalah Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kota Bontang. Sedangkan kabupaten/kota yang indeks gininya termasuk dalam kategori rendah yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Mahakam Ulu yang memiliki indeks gini paling rendah dengan capaian masing-masing 0,263 dan 0,270. Kabupaten Berau memiliki Indeks Gini

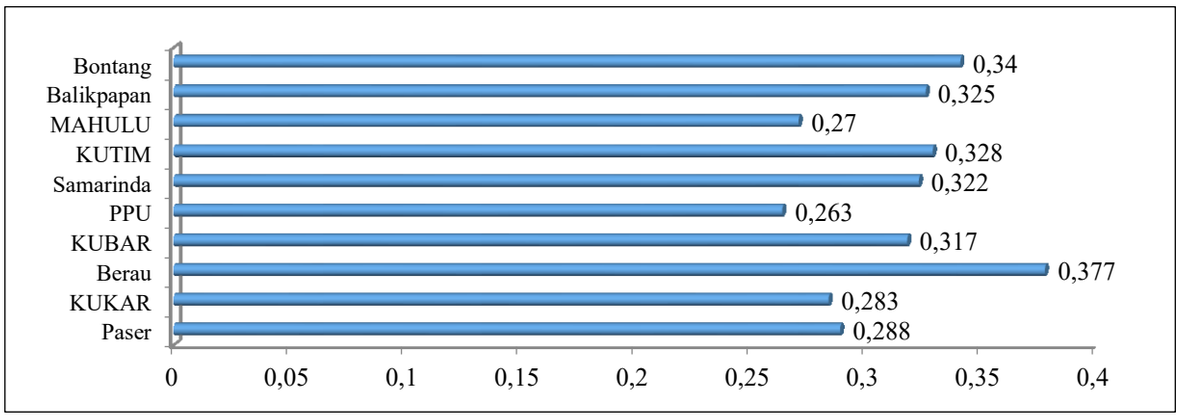

tertinggi dengan capaian 0,377.

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2022

Gambar II.27
Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021

Indeks Gini Kalimantan Timur yang mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan angka ketimpangan menjadi 0,334. Sebelumnya indeks gini Kalimantan Timur sebesar 0,328. Jika dibandingkan dengan regional Kalimantan, pada tahun 2021 ketimpangan pendapatan terendah di Kalimantan Utara sebesar 0,292. Sedangkan sisanya menunjukkan level ketimpangan yang serupa pada posisi 0,31-0,35. Dengan capaian indeks gini Kalimantan Timur tersebut, masih berada di bawah tingkat ketimpangan Indonesia yang mencapai 0,384 pada tahun 2021. Cukup tingginya ketimpangan Kalimantan Timur ini dikarenakan sulitnya

aksesibilitas yang menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Timur, khususnya daerah terpelosok dan terdalam.

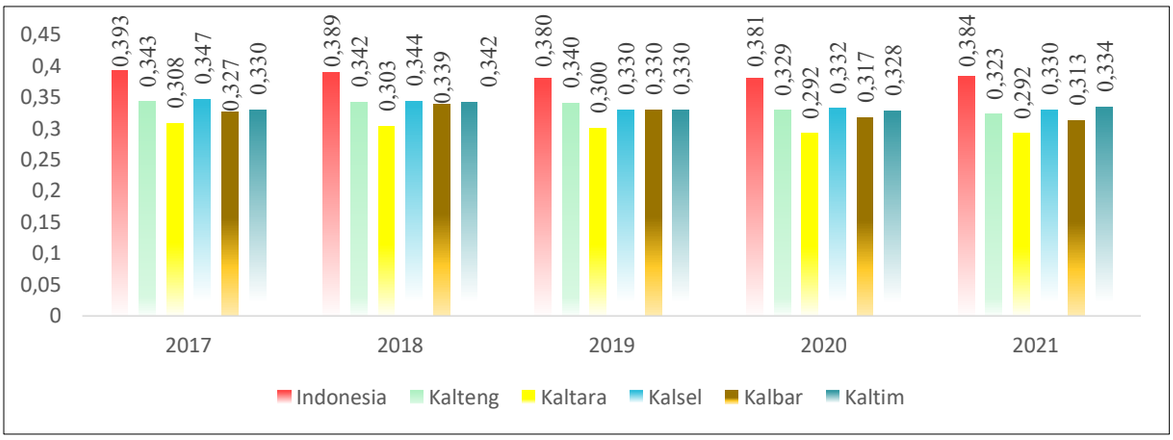

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.28
Indeks Gini Regional Kalimantan dan Indonesia Tahun 2017-2021

E. Ketimpangan Antar Wilayah

Ketimpangan wilayah terjadi akibat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti pemerataan ekonomi sehingga kegiatan ekonomi terkonsentrasi pada suatu wilayah. Terlihat dengan adanya wilayah yang maju dan terbelakang atau kurang maju. Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah.

Dampak utama dari ketimpangan pembangunan adalah timbulnya masalah sosial di masyarakat, seperti pengangguran, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dampak tersebut merupakan muncul akibatnya kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan di wilayah yang kinerja pembangunan tidak cukup baik. Tingginya angka pengangguran di suatu wilayah cenderung akan diikuti oleh terjadinya kemiskinan. Pada akhirnya, kemiskinan yang terjadi di masyarakat pada suatu wilayah akan mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia generasi berikutnya, karena kesulitan untuk dapat mengakses fasilitas pendidikan akibat rendahnya pendapatan masyarakat.

Berdasarkan penghitungan Indeks Williamson, kesenjangan antar wilayah dalam regional Kalimantan juga tercatat masih cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh besaran angka Indeks Williamson yang selalu berada di atas angka 0,60, walaupun terdapat kecenderungan semakin menurun

sampai dengan tahun 2020 sebesar 0,594. Namun di tahun 2021 angka Indeks Williamson mengalami sedikit peningkatan yang mencapai 0,613.

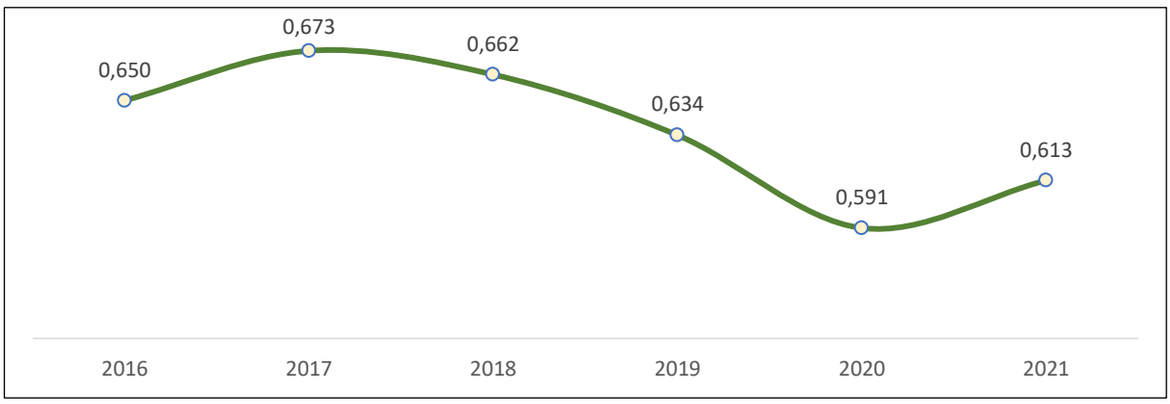

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Gambar II.29
Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson)
Regional Kalimantan Tahun 2017-2021

Secara umum, struktur perekonomian di pulau Kalimantan masih mengandalkan kekayaan sumber daya alam atau sektor primer. Sektor Pertanian menjadi *leading sector* bagi perekonomian di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, sedangkan sektor Pertambangan dan Penggalian menjadi *leading sector* bagi perekomian di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Ketimpangan yang cukup tinggi pada regional Kalimantan ini disebabkan perbedaan potensi dan produktivitas hasil sumber daya alam pada masing-masing provinsi.

Pada tahun 2021, Kalimantan Timur memegang 48,46 persen perekonomian di pulau Kalimantan, disusul Kalmantan Barat yang menyumbang 16,53 persen perekonomian, sedangkan Kalimantan Utara hanya menyumbang 7,91 persen. Sedangkan jika dilihat dari PDRB per kapita, Kalimantan Timur memiliki PDRB per kapita yang tertinggi kedua yakni mencapai 182,54 juta rupiah, sedangkan PDRB per kapita di Kalimantan Barat hanya seperempat dari PDRB per kapita Kalimantan Timur, yakni hanya sebesar 42,28 juta rupiah.

Dalam konteks wilayah Kalimantan Timur, kondisi ketimpangan di wilayah ini relatif moderat, bahkan termasuk rendah. Hal ini ditunjukkan oleh besaran nilai Indeks Williamson di dalam wilayah Kalimantan Timur yang berada pada kisaran 0,40 - 0,50. Nilai tersebut menunjukkan bahwa

antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki kondisi ekonomi yang relatif homogen. Namun, disisi lain besaran yang relatif sama tersebut

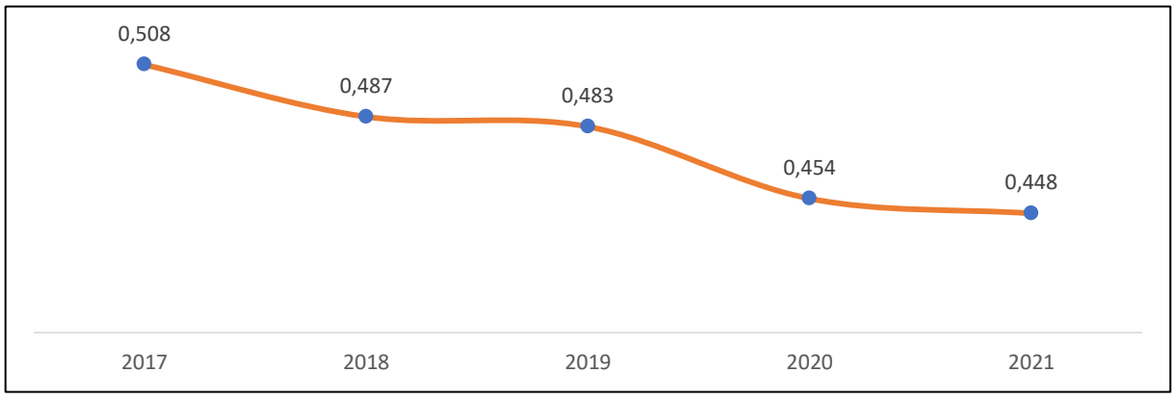

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengindikasikan bahwa masih diperlukan berbagai kebijakan yang lebih tepat yang dapat lebih menurunkan ketimpangan antara kabupaten/kota yang terjadi.

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.30
Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021

Kondisi perekonomian kabupaten/kota yang hampir homogen tersebut disebabkan karena wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki struktur ekonomi yang hampir sama. Sebagian besar perekonomian di kabupaten/kota di Kalimantan Timur mengandalkan sumber daya alam atau memiliki karakteristik ekonomi yang berbasis sektor primer. Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi penyumbang perekonomian terbesar di Kalimantan Timur, disusul oleh Kabupaten Kutai Timur dan Kota Balikpapan. Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur sangat mengandalkan perekonomiannya pada sektor Pertambangan dan Penggalian, sedangkan Kota Balikpapan mengandalkan industri pengolahan, khususnya industri pengilangan migas sebagai sumber perekonomian.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial masyarakat dalam analisis hasil pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: aspek kependudukan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hingga seni budaya dan olahraga. Namun, dari aspek-aspek tersebut

terdapat aspek utama sekaligus *ultimate impact* dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat, yaitu melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Dengan menggabungkan tiga komponen dasar (kesehatan, pendidikan, dan ekonomi) menjadikan IPM sebagai salah satu indeks acuan pembangunan suatu daerah untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Indeks Pembangunan Gender dan Indek Desa Membangun.

A. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat dan horisontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketerampilan serta mampu mencukupi kebutuhan, baik primer, sekunder, maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia, salah satunya dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia.

Selama periode 2010-2019, angka IPM Kalimantan Timur secara konsisten mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 angka IPM mengalami penurunan. Angka IPM tahun 2020 turun 0,37 poin menjadi 76,24 dari yang sebelumnya sebesar 76,61 di tahun 2019. Penurunan ini disebabkan karena adanya Pandemi COVID-19 yang menyebabkan pengeluaran per kapita masyarakat mengalami penurunan sehingga berdampak pada rumusan IPM Kalimantan Timur. Pada tahun 2021 IPM Kalimantan Timur kembali mengalami peningkatan mencapai 76,88. Capaian pembangunan manusia Kalimantan Timur masih sama seperti pada tahun sebelumnya, yaitu berstatus “tinggi” dan berada pada posisi ketiga di Nasional setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.

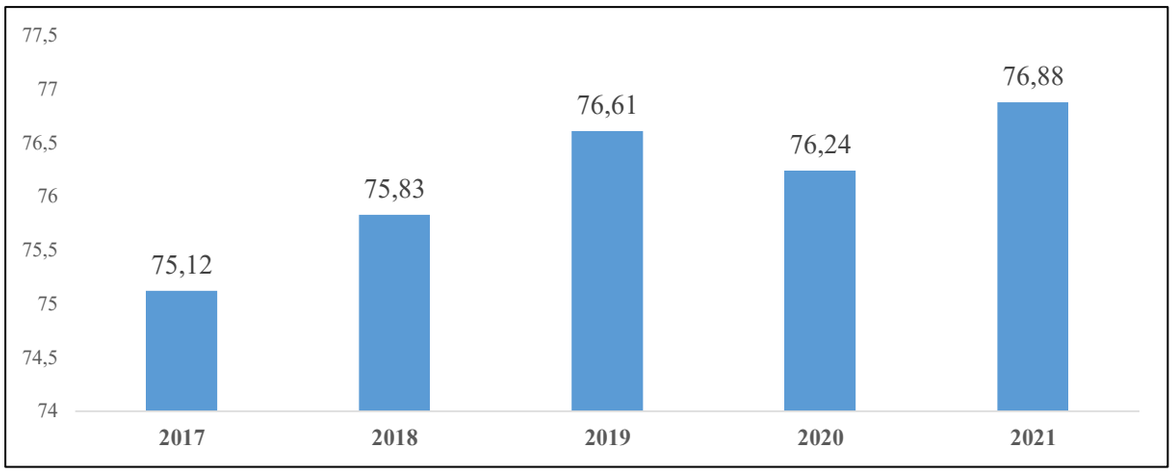

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.31
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2017-2021

Peningkatan angka IPM di tingkat Provinsi juga tercermin pada tingkat kabupaten/kota. Pada tahun 2021, angka IPM seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur terkoreksi naik. Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan terbesar adalah Kabupaten Paser sebesar 0,89 persen dari 72,04 di tahun 2020 menjadi 72,93 di tahun 2021. Selain Paser, Kabupaten Kutai Barat juga mengalami peningkatan angka IPM yang signifikan yaitu sebesar 0,88 poin dari 71,19 di tahun 2020 menjadi 72,07 di tahun 2021. Selain itu, jika dilihat dari perbandingan dengan regional Kalimantan, maka IPM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 merupakan IPM tertinggi dengan interval yang cukup jauh, dimana berkisar antara 67,90 – 71,28. Hal ini mengindikasikan bahwa pandemi telah berkurang di seluruh wilayah Kalimantan sehingga seluruh provinsi terdampak positif, khususnya kualitas SDM dari sisi pengeluaran per kapita.

Tabel II.25
Indeks Pembangunan Manusia Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 - 2021

No	Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Paser	71,16	71,61	72,29	72,04	72,93
2	KUBAR	70,18	70,69	71,63	71,19	72,07
3	KUKAR	72,75	73,15	73,78	73,59	74,06
4	KUTIM	71,91	72,56	73,49	73,00	73,81
5	Berau	73,56	74,01	74,88	74,71	75,20
6	PPU	70,59	71,13	71,64	71,41	72,01
7	MAHULU	66,09	66,67	67,58	67,09	67,95
8	Balikpapan	79,01	79,81	80,11	80,01	80,71
9	Samarinda	79,46	79,93	80,20	80,11	80,76
10	Bontang	79,47	79,86	80,09	80,02	80,59

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

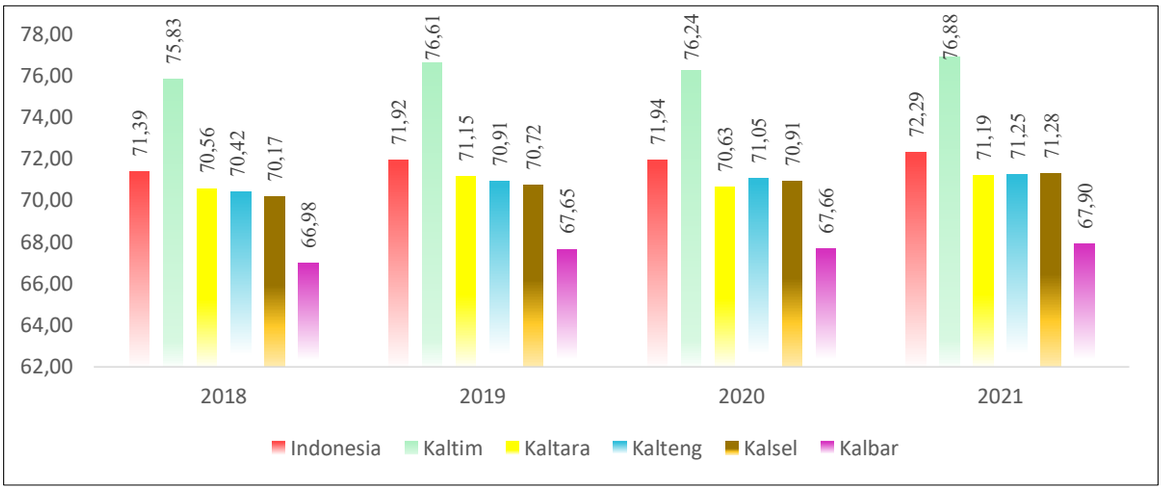

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.32
Indeks Pembangunan Manusia Regional Kalimantan dan Indonesia

Hal yang penting untuk dimaknai dalam pencapaian IPM Kalimantan Timur yang tinggi bukanlah ranking secara nasional atau regional. Laju pertumbuhan IPM menjadi hal yang paling utama untuk diulas karena hal ini terkait perkembangan dimensi pembangunan manusia yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Namun di sisi lain, jika tidak didorong, maka capaian pembangunan manusia di Kalimantan Timur dapat tertinggal. Oleh karena itu, pembangunan yang terus menerus pada dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi harus terus dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan manusia di Kalimantan Timur.

Pola spasial capaian IPM kabupaten/kota tahun 2021 menunjukkan kondisi adanya kesenjangan dalam pembangunan manusia di Kalimantan Timur. Penduduk kabupaten/kota dengan status pencapaian IPM yang sudah masuk dalam kategori “Sangat Tinggi” dan “Tinggi” memiliki kemudahan dan kesempatan yang lebih luas dalam mengakses hasil pembangunan terutama dalam hal memperoleh atau bahkan meningkatkan pendapatan serta memperoleh layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik dibanding penduduk di kabupaten dengan status pencapaian IPM kategori “sedang”, “rendah” dan “sangat rendah”.

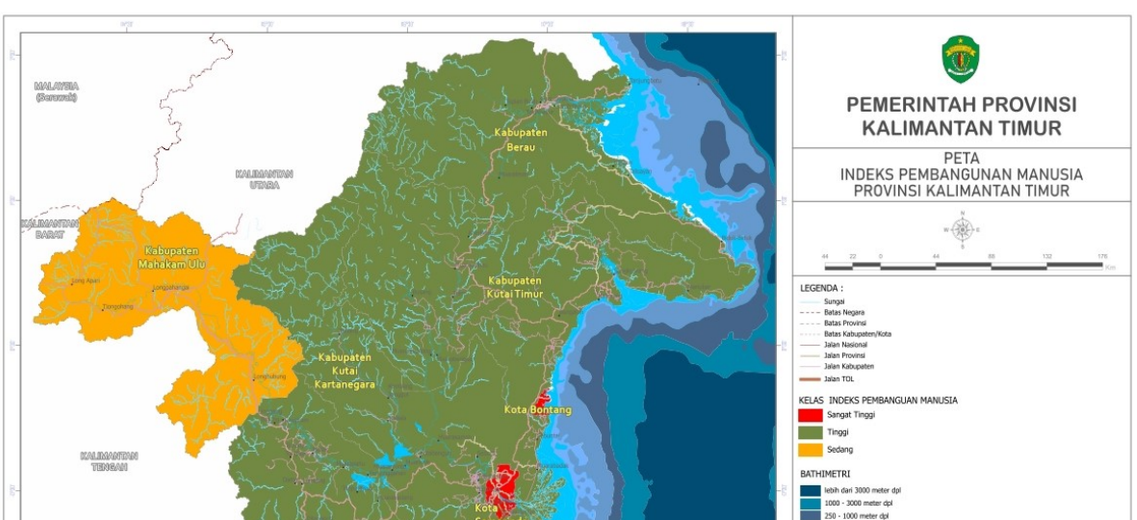

Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.33
Pola Spasial Status Pencapaian IPM Kabupaten/Kota Tahun 2021

Pada tahun 2021 tidak ada perubahan status pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota. Kota Balikpapan, Kota Bontang dan Kota Samarinda memiliki status IPM "Sangat Tinggi", Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki status IPM "Tinggi" sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki status "Sedang".

B. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam peningkatan potensi dan daya saing sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan, dengan memiliki pendidikan yang berkualitas maka setiap penduduk akan memiliki lebih banyak kesempatan dalam memperbaiki kualitas kehidupannya dari mulai mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pendapatan lebih layak, hingga kehidupan yang lebih sejahtera. Berikut beberapa indikator kinerja pembangunan daerah pada bidang pendidikan:

1) Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan suatu indikator yang menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk di suatu wilayah dalam mengenyam jenjang pendidikan. Di Provinsi Kalimantan Timur, rata-rata lama sekolah penduduk terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya dimana pada tahun terakhir 2021 mencapai 9,84 tahun. Angka ini

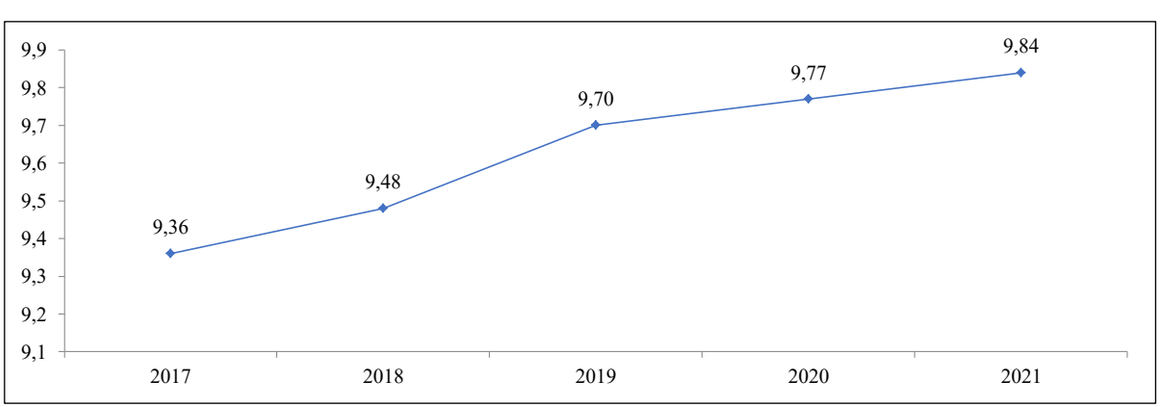

mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di Provinsi Kalimantan Timur usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA Kelas I). Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Timur di tahun 2021 berada di atas target yang ditetapkan sebesar 9,40 tahun.

Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.34
Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2017-2021 (Tahun)

Sama halnya dengan Provinsi Kalimantan Timur, Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota juga selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2021, tiga kota di Kalimantan Timur mengalami rata-rata lama sekolah tertinggi diatas rata-rata lama sekolah Provinsi, yang dimana Kota Balikpapan memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi mencapai 10,91 tahun. Sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki rata-rata lama sekolah paling rendah dibanding kabupaten/kota lainnya dengan capaian 8,18 tahun pada tahun 2021. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP Kelas III). Angka ini masih belum cukup untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun dimana masih perlu waktu yang lama untuk mewujudkannya. Meskipun begitu, capaian ini patut di apresiasi karena terus meningkatkan progress layanan pendidikan bagi masyarakat Kaltim.

Tabel II.26
Rata-Rata Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 – 2021 (tahun)

No	Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Paser	8,2	8,22	8,54	8,55	8,79
2	KUBAR	8,06	8,07	8,34	8,47	8,70
3	KUKAR	8,83	8,84	9,10	9,22	9,23
4	KUTIM	9,06	9,08	9,18	9,19	9,43
5	Berau	8,96	8,98	9,25	9,52	9,53
6	PPU	7,95	8,03	8,16	8,28	8,36
7	MAHULU	7,68	7,69	7,89	7,97	8,18
8	Balikpapan	10,55	10,65	10,67	10,68	10,91
9	Samarinda	10,34	10,46	10,47	10,48	10,49
10	Bontang	10,7	10,72	10,73	10,79	10,80

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Timur sebesar 9,84 tahun adalah yang tertinggi di Regional Kalimantan serta lebih tinggi dari Nasional sebesar 8,54 tahun. Disusul Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah masing-masing sebesar 9,11 tahun dan 8,64 tahun.

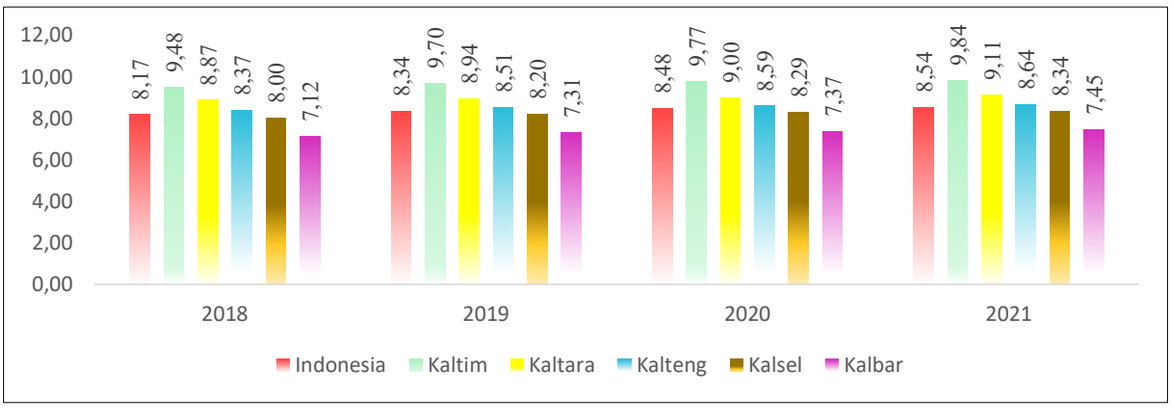

Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.35
Rata-rata Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia

Pola spasial capaian Rata-Rata Lama Sekolah kabupaten/kota tahun 2021 menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tingginya angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia.

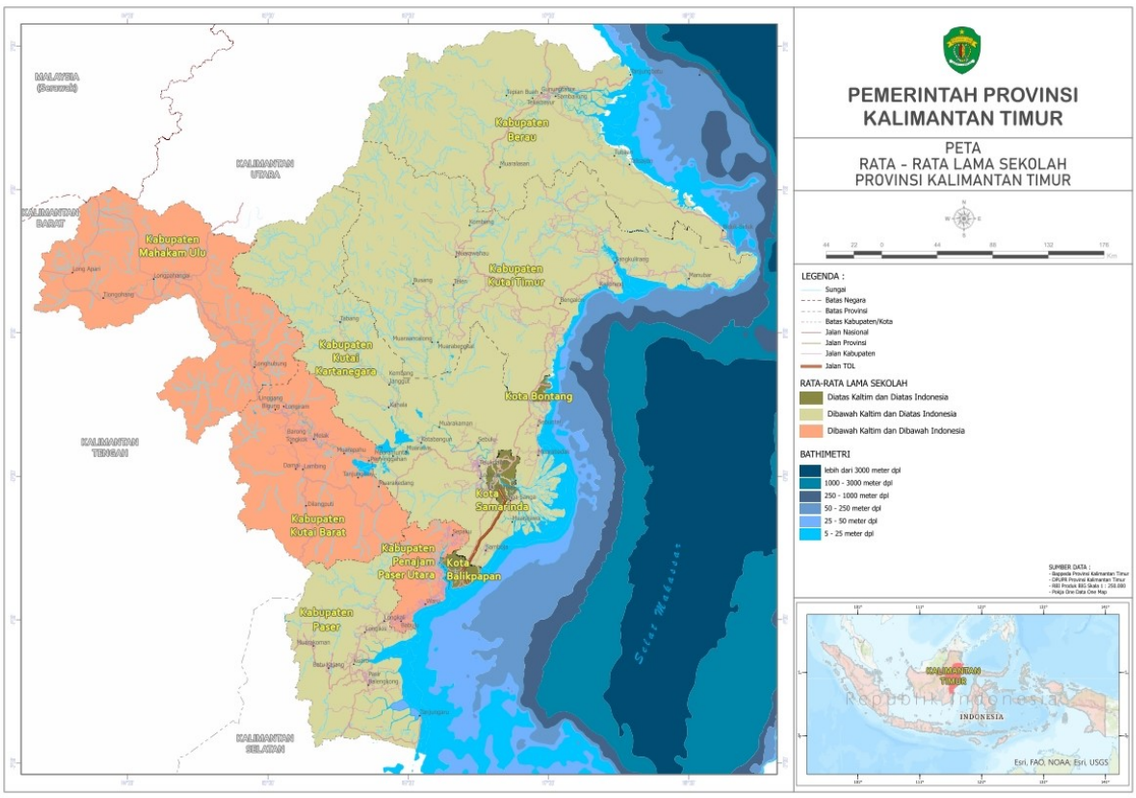

Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.36
Pola Spasial Capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2021

2) Harapan Lama Sekolah

Di tahun 2021, Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai 13,81 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga SMA atau D1. Hal ini sangat baik karena menjadikan potensi sumber daya manusia pada generasi mendatang menjadi lebih baik. Angka ini menggambarkan makin tingginya perhatian pemerintah provinsi terhadap dunia pendidikan sehingga harapan lama sekolah setiap penduduk dapat mengikuti pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.

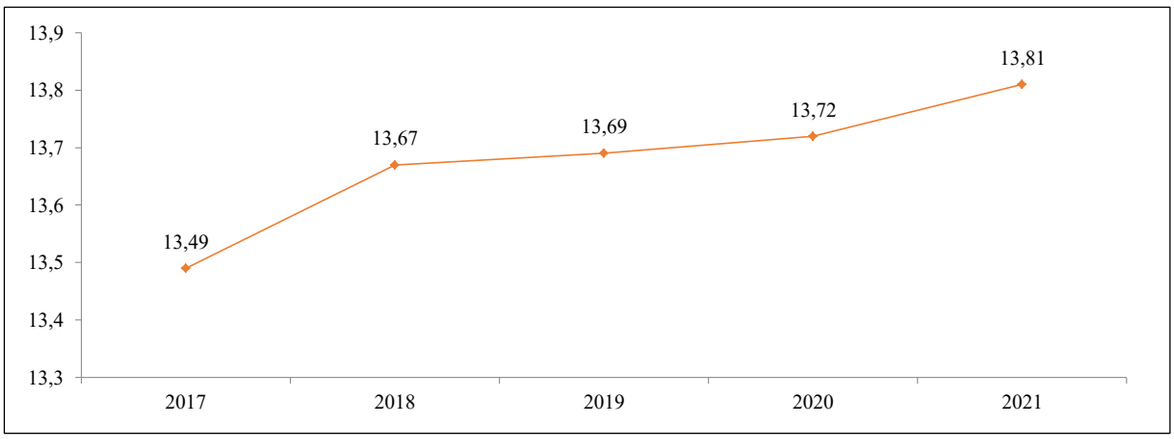

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.37
Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2017-2021 (Tahun)

Kota Samarinda memiliki capaian harapan lama sekolah paling tinggi dibanding kabupaten/kota lainnya yaitu 15,09 tahun sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu mencapai 12,57 tahun pada tahun 2021 merupakan capaian harapan lama sekolah dibanding kabupaten/kota lainnya.

Tabel II.27
Harapan Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 – 2021 (tahun)

No	Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Paser	12,98	12,99	13,00	13,10	13,25
2	KUBAR	12,82	12,88	12,89	12,90	13,02
3	KUKAR	13,56	13,57	13,58	13,59	13,60
4	KUTIM	12,48	12,65	12,78	12,89	12,90
5	Berau	13,29	13,3	13,31	13,32	13,33
6	PPU	12,53	12,54	12,55	12,56	12,57
7	MAHULU	12,47	12,48	12,50	12,51	12,61
8	Balikpapan	13,75	14,12	14,13	14,14	14,22
9	Samarinda	14,64	14,66	14,70	14,89	15,09
10	Bontang	12,88	12,89	12,90	13,03	13,17

Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2021

Harapan Lama Sekolah Kalimantan Timur selalu menjadi yang tertinggi di Regional Kalimantan. Namun tren laju pertumbuhan komponen ini (2017-2021) cenderung mengalami perlambatan. Berbeda dengan Provinsi lainnya di Regional Kalimantan yang meski berfluktuasi, namun cenderung meningkat. Laju pertumbuhan tertinggi ditunjukkan oleh Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

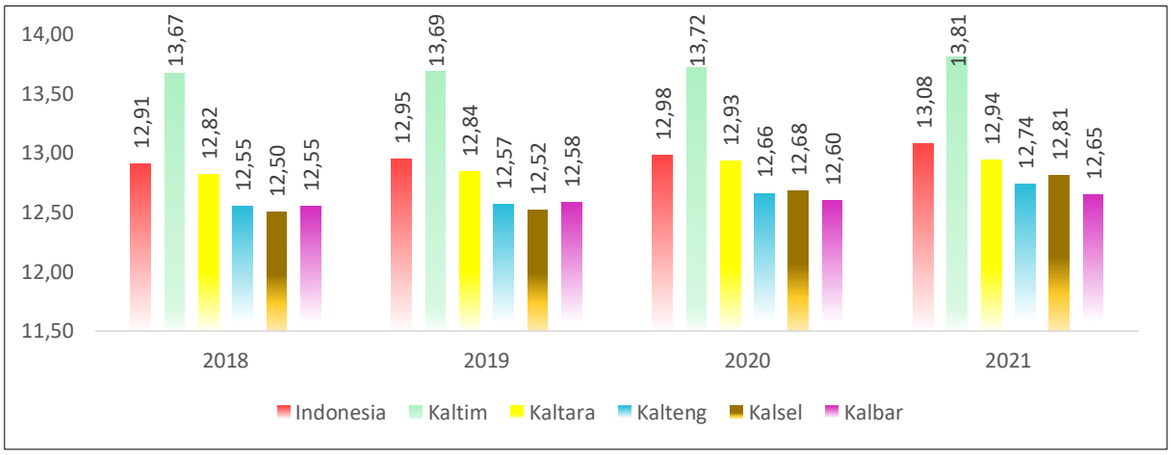

Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.38
Harapan Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia

Harapan Lama Sekolah Kalimantan Timur juga lebih tinggi dari Harapan Lama Sekolah Indonesia. Namun sayangnya, rata-rata laju pertumbuhan Harapan Lama Sekolah Indonesia selama lima tahun terakhir lebih tinggi dari laju pertumbuhan Kalimantan Timur. Hal ini berarti pertumbuhan HLS wilayah lain di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan selama 5 tahun terakhir, sedangkan pertumbuhan HLS di Provinsi Kalimantan Timur cenderung melambat.

Pola spasial capaian Harapan Lama Sekolah kabupaten/kota tahun 2020 menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam Pendidikan formal pada waktu tertentu.

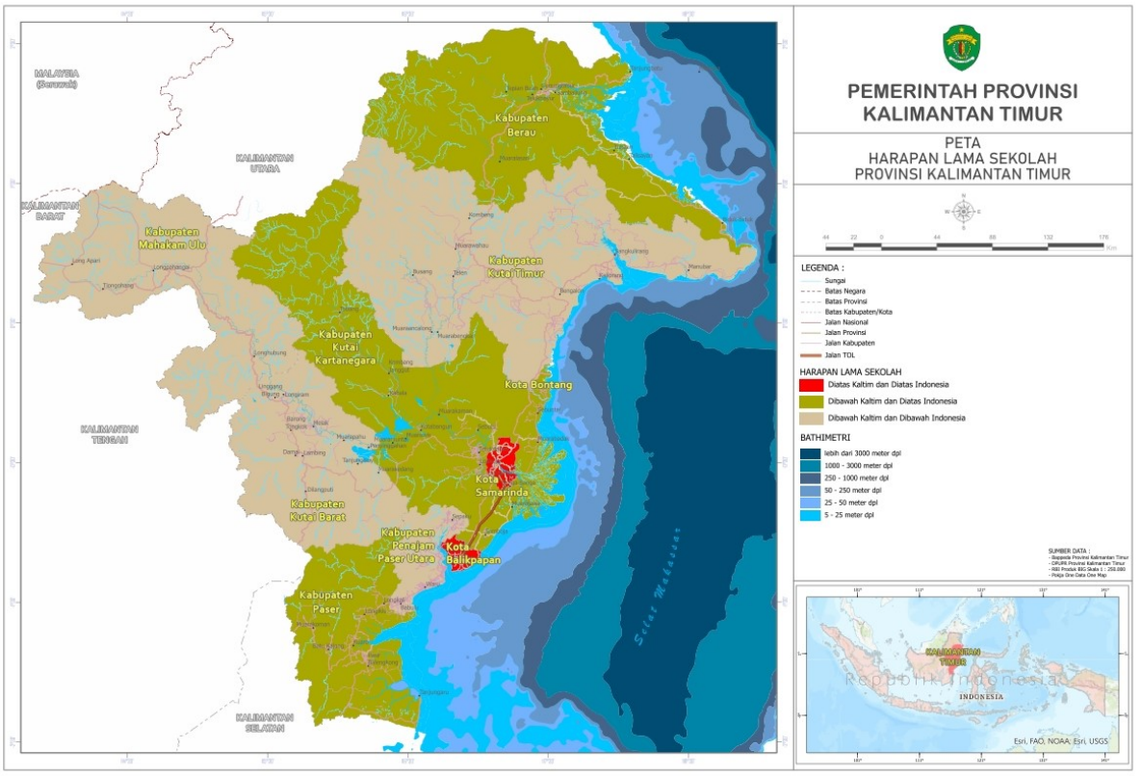

Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.39
Pola Spasial Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2021

C. Kesehatan

Kesehatan merupakan modal dasar bagi manusia untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pergerakan perekonomian maupun pembangunan daerah sangat tergantung pada derajat kesehatan suatu masyarakat. Berikut beberapa indikator kinerja pembangunan daerah pada bidang kesehatan:

1) Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia. Umur Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan hidup sekian tahun.

Di Provinsi Kalimantan Timur, Umur Harapan Hidup mengalami kenaikan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2020 mencapai 74,33 tahun dan meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 74,61 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2021 akan memiliki harapan hidup hingga usia 74-75 tahun. Sehingga, angka ini bisa dikatakan memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 74,75 tahun.

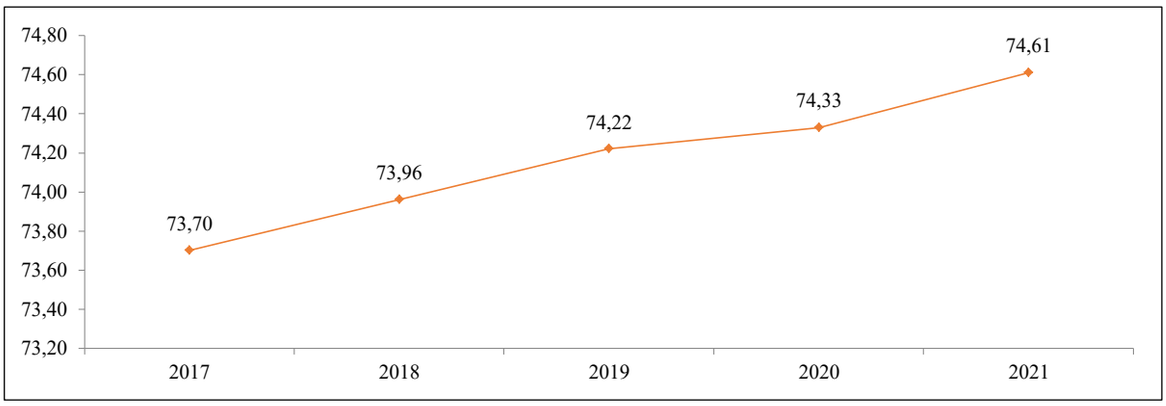

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.40
Umur Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021

Sedangkan jika dirinci menurut Kabupaten/Kota, Kota Balikpapan memiliki usia harapan hidup mencapai 74,76 tahun dan Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai usia harapan hidup 71,68 tahun merupakan usia harapan hidup terendah dibanding kabupaten/kota lainnya. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2021 akan memiliki harapan hidup hingga usia 71 tahun.

Tabel II.28
Usia Harapan Hidup Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 – 2021 (tahun)

No	Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Paser	72,05	72,28	72,52	72,62	72,88
2	KUBAR	72,37	72,57	72,79	72,86	73,10
3	KUKAR	71,68	71,93	72,21	72,34	72,64
4	KUTIM	72,51	72,76	73,03	73,16	73,46
5	Berau	71,44	71,68	71,94	72,06	72,32
6	PPU	70,82	71,05	71,30	71,41	71,68
7	MAHULU	71,25	71,56	71,90	72,10	72,33
8	Balikpapan	73,97	74,18	74,41	74,49	74,76
9	Samarinda	73,71	73,93	74,17	74,27	74,54
10	Bontang	73,72	73,94	74,18	74,28	74,55

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Jika dibandingkan dengan provinsi di Regional Kalimantan, Umur Harapan Hidup Kalimantan Timur masih menjadi yang tertinggi dan masih berada di atas capaian nasional sebesar 71,57 tahun.

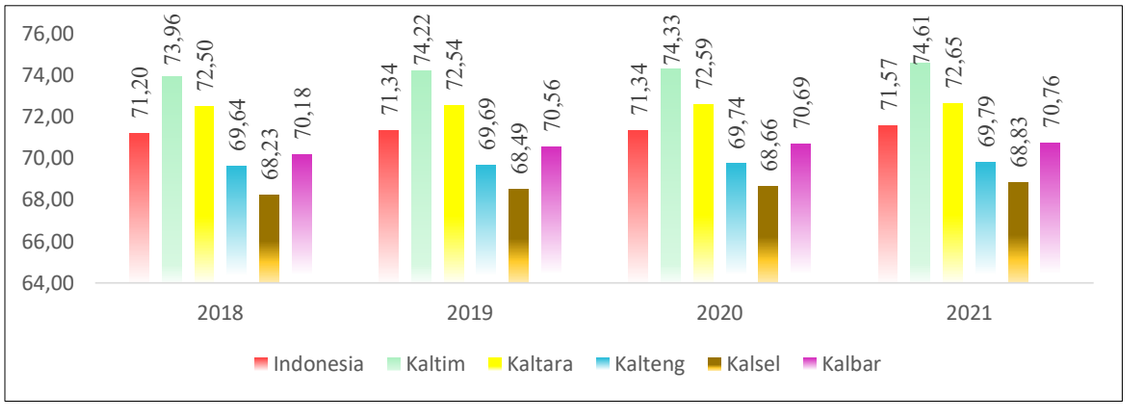

Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.41

Umur Harapan Hidup Regional Kalimantan dan Indonesia Tahun 2018-2021

Pola spasial capaian Usia Harapan Hidup kabupaten/kota tahun 2021 menggambarkan rata-rata lama waktu hidup seseorang dalam suatu populasi. Semakin tinggi angka harapan suatu wilayah maupun negara, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat didalamnya.

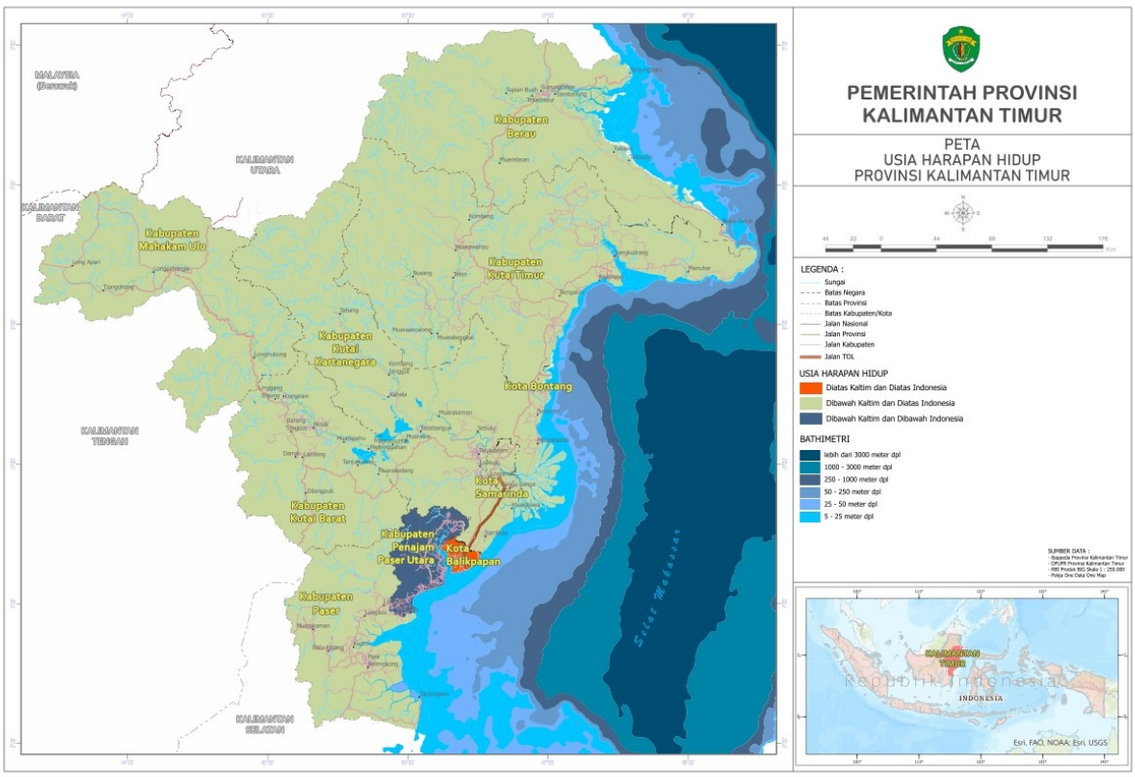

Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.42

Pola Spasial Capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 2021

2) Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Stunting

Kematian Ibu dan Bayi dan Stunting masih tetap menjadi tantangan utama di sektor Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Trend Jumlah Kematian Ibu dari tahun 2017 – 2018 sudah terjadi penurunan, namum pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah kematian ibu. Sedangkan jumlah kematian bayi (0 – 11) bulan sudah mengalami penurunan.



	Paser	KUBAR	KUKAR	KUTIM	Berau	PPU	MAHULU	BPP	SMD	BTG	KALTIM
Hasil Riskesdas 2013	25,50	30,70	26,10	28,40	21,70	34,70	0,00	21,00	24,90	32,40	27,60
Hasil Riskesdas 2018	27,50	30,00	35,70	30,50	31,70	31,60	32,80	23,80	26,30	26,60	29,20
Hasil SSGBI 2019	32,20	35,70	36,50	39,40	24,70	27,00	36,60	14,00	24,70	29,00	28,10
Hasil e-PPGBM 2020	15,50	16,60	14,30	16,10	17,60	11,40	9,60	13,30	11,90	20,90	14,70

Sumber: DINKES Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.43
Tren Balita Pendek (Stunting) Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013, 2018-2020

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dari 34 Provinsi, hanya Provinsi Kalimantan Timur yang Prevalensi stunting pada anak balitanya meningkat, yaitu dari 27,6 persen pada tahun 2017 meningkat menjadi 29,40 persen pada tahun 2018, walaupun hasil Survey Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada tahun 2019 turun menjadi 28,10 persen, tapi masih diatas rata-rata nasional (27 persen) dan bila dibandingkan dengan *Cut of Point* menurut Rekomendasi WHO bahwa stunting tidak bermasalah apabila <20 persen. Rata-rata prevalensi stunting menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2019 masih tinggi yaitu diatas 20 persen, kecuali Kota Balikpapan sudah mencapai 14 persen.

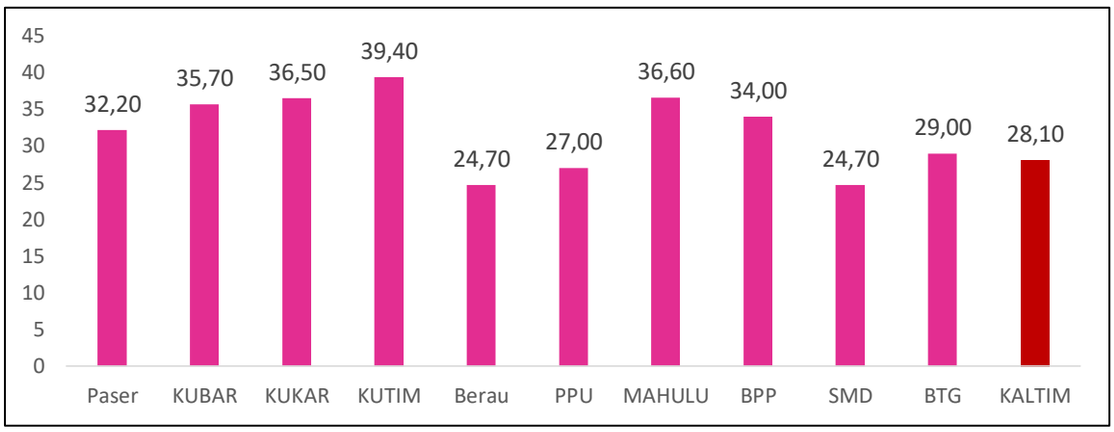

Sumber: DINKES Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.44
Prevalensi Balita Pendek (Stunting) Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019 berdasarkan Hasil Survei SSGBI

Angka Kematian Ibu dan Stunting merupakan *Major Project* sedangkan Angka Kematian Bayi dan Wasting merupakan Prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024. Sejak tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Timur memiliki 2 lokus yaitu Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Tahun 2020 bertambah 2 lokus yaitu pada Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga menjadi 4 lokus, sementara tahun 2021 bertambah 2 lokus lagi yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda dan pada Tahun 2022 seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur menjadi daerah lokus stunting. Hasil Riskesdas tahun 2018 angka stunting di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 29,20 persen sementara Hasil SGGBI tahun 2019 sebesar 28,10 persen dan hasil ePPGBM sebesar 14,70 persen dari 36,62 persen yang diukur. Untuk wasting sendiri hasil Riskesdas 2018 sebesar 7,60 persen dan dari ePPGBM 7,2 persen dari target 9 persen. Hal ini merupakan tantangan bagi Provinsi Kalimantan Timur bagaimana agar semua balita yang ada dalam sasaran untuk dilakukan pengukuran setiap bulan agar terlihat data stunting dan wasting yang sebenarnya. Perlu adanya dukungan dan sinergitas antar Perangkat Daerah terkait dalam rangka Percepatan Penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Bayi dan Stunting di Provinsi Kalimantan Timur.

D. Standar Hidup Layak

Standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Pada tahun 2021, Pengeluaran

per Kapita disesuaikan masyarakat Kalimantan Timur mencapai Rp. 12,12 juta per tahun, atau naik Rp 388 ribu dibandingkan tahun 2020. Maka, Pengeluaran per Kapita Disesuaikan tersebut selama periode lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 4,34 persen per tahun. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2021 merupakan dampak dari adanya pemuliham pandemi COVID-19 yang menyebar di seluruh wilayah Kalimantan Timur tanpa terkecuali yang menyebabkan daya beli masyarakat meningkat karena pulihnya pada perekonomian masyarakat.

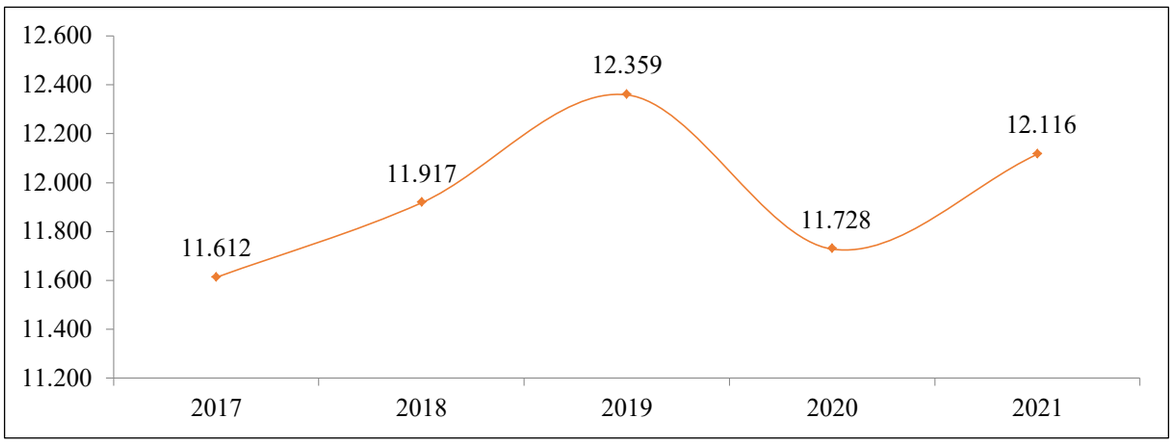

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.45
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2017-2021 (Ribu Rp)

Sedangkan jika dirinci menurut Kabupaten/Kota, Kota Bontang memiliki pengeluaran per kapita disesuaikan paling besar diantara kabupaten/kota lainnya mencapai 16.765 ribu rupiah dan Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 7.802 ribu rupiah merupakan pengeluaran per kapita terendah dibanding kabupaten/kota lainnya. Secara umum, peningkatan pengeluaran per kapita menggambarkan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur yang diakibatkan pemulihan pandemi COVID-19 dengan banyaknya masyarakat yang telah vaksin di tahun 2021.

Tabel II.29
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 – 2021 (Ribu Rupiah)

No	Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Paser	10.280	10.605	10.767	10.344	10.673
2	KUBAR	9.532	9.849	10.338	9.712	10.062
3	KUKAR	10.692	10.959	11.152	10.720	11.048
4	KUTIM	10.273	10.614	11.196	10.485	10.868

No	Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
5	Berau	11.843	12.207	12.726	12.018	12.435
6	PPU	11.126	11.492	11.750	11.231	11.651
7	MAHULU	7.364	7.653	8.008	7.524	7.802
8	Balikpapan	14.254	14.557	14.791	14.549	14.862
9	Samarinda	14.175	14.466	14.613	14.135	14.582
10	Bontang	16.271	16.698	16.843	16.278	16.765

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Pada komponen standar hidup layak di Regional Kalimantan tahun 2021, Kalimantan Timur menjadi yang tertinggi kedua setelah Kalimantan Selatan. Serta perolehan komponen pengeluaran per kapita Kalimantan Timur masih berada di atas nasional. Capaian ini harus dipertahankan agar kesejahteraan masyarakat dapat terus terlihat peningkatannya dari sisi pendapatan rumah tangga.

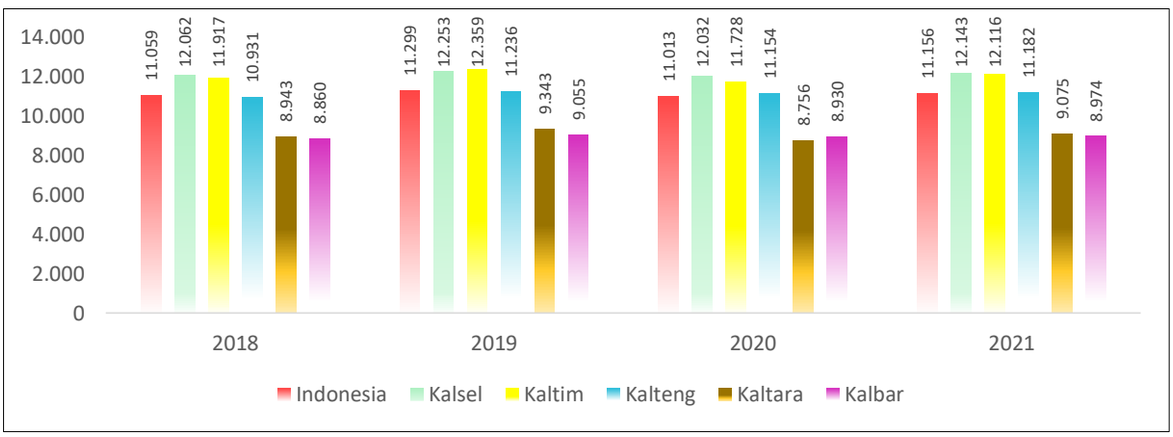

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.46
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan
Regional Kalimantan dan Indonesia (Ribu Rupiah)

E. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia di suatu wilayah secara umum, tidak merinci menurut jenis kelamin. Oleh sebab itu, IPM masih belum menjelaskan disparitas pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Untuk dapat melihat pembangunan manusia yang dirinci menurut gender, UNDP merumuskan sebuah metode penghitungan Indeks Pembangunan Gender. Seiring dengan penggunaan metode baru di penghitungan IPM pada tahun 2010, terjadi perubahan penghitungan IPG. Saat ini, IPG diformulasikan sebagai rasio antara IPM Perempuan dan IPM Laki-Laki. Semakin dekat

angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

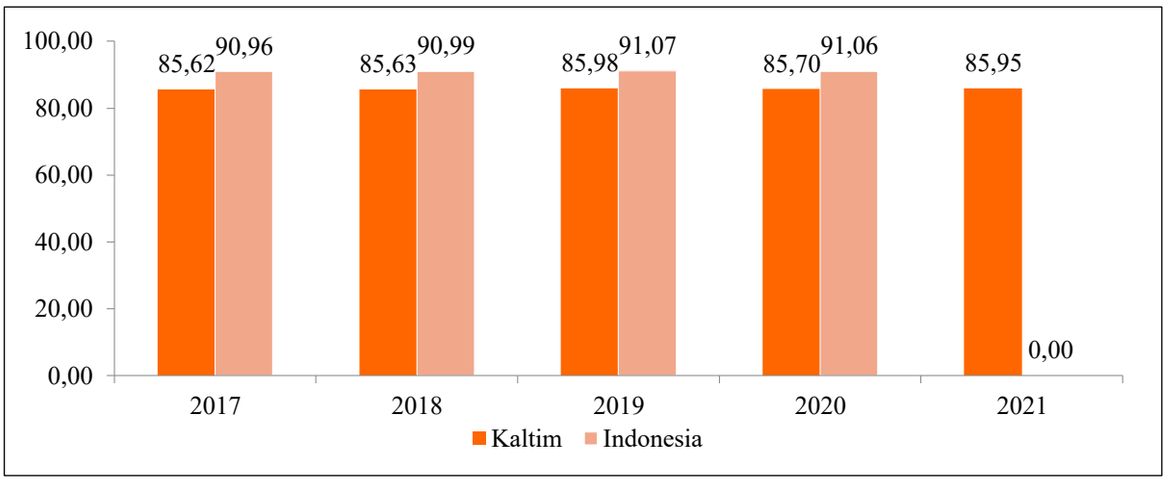

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Gambar II.47
Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2021 (tahun)

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu lima tahun sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 terus mengalami peningkatan dengan capaian 85,62 menjadi 85,98 di tahun 2019. Namun menurun di tahun 2020 menjadi 85,70. Dalam rumusan IPG, dilakukan formulasi menggunakan komponen IPM yang dipisahkan sesuai jenis kelamin, sehingga penurunan IPM akibat dampak COVID-19 akan berpengaruh pada penurunan IPG. Seiiring dengan pemulihan ekonomi dan mulai berkurangnya COVID-19 tahun 2021 Indeks Pembangunan Gender Kalimantan Timur mengalami peningkatan menjadi 85,95.

Tabel II.30
Indeks Pembangunan Gender Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 – 2021 (tahun)

No	KAB/KOTA	2017	2018	2019	2020	2021
1	Paser	69,78	70,64	71,41	71,15	71,19
2	KUBAR	83,30	83,52	83,84	83,87	84,28
3	KUKAR	78,54	78,83	79,14	78,90	79,12
4	KUTIM	75,48	76,03	76,51	76,26	76,40
5	Berau	87,77	87,92	87,93	87,61	87,76
6	PPU	86,31	86,34	86,22	86,39	86,57
7	MAHULU	79,82	80,18	80,89	80,98	81,65
8	Balikpapan	89,74	89,76	89,71	89,65	89,83
9	Samarinda	89,26	89,42	89,41	89,27	89,27
10	Bontang	86,44	86,61	86,72	86,87	87,12
Kalimantan Timur		85,62	85,63	85,98	85,70	85,95

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Kota Balikpapan memiliki Indeks Pembangunan Gender tertinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian 89,76 sedangkan Paser memiliki Indeks Pemberdayaan Gender terendah yaitu 70,64 yang artinya bahwa di Kabupaten Paser kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki masih tinggi.

F. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah Indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai ukuran keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, meski relatif lambat. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Ukuran ini, diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.

Tabel II.31
Indeks Pemberdayaan Gender Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 – 2021 (tahun)

No	KAB/KOTA	2017	2018	2019	2020	2021
1	Paser	62,07	62,76	66,20	65,66	65,67
2	KUBAR	62,63	63,68	61,14	60,60	65,34
3	KUKAR	55,07	56,44	63,74	61,43	62,76
4	KUTIM	53,71	55,72	56,35	53,77	53,78
5	Berau	49,85	50,55	57,66	57,91	56,48
6	PPU	50,30	50,02	50,36	49,75	49,85
7	MAHULU	74,12	76,04	80,61	80,41	80,43
8	Balikpapan	65,52	66,33	69,11	68,97	68,62
9	Samarinda	70,84	69,61	66,29	70,65	67,54
10	Bontang	45,44	46,36	51,99	51,97	45,67
Kalimantan Timur		56,64	57,53	65,65	65,54	66,64

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 terus mengalami peningkatan dengan capaian 56,64 menjadi 65,65 di tahun 2019. Namun mengalami sedikit penurunan

di tahun 2020 menjadi 65,54. Seiiring dengan pemulihan ekonomi dan mulai berkurangnya COVID-19 tahun 2021 Indeks Pemberdayaan Gender Kalimantan Timur mengalami peningkatan menjadi 66,64. Jika dilihat berdasarkan wilayah, maka Kabupaten Mahulu memiliki Indeks Pemberdayaan Gender tertinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian 80,43 sedangkan Penajam Paser Utara memiliki Indeks Pemberdayaan Gender terendah yaitu 49,85 yang artinya bahwa di Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki masih tinggi.

G. Indeks Desa Membangun

Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi (lingkungan).

Indeks Desa Membangun akan menentukan 5 status kemajuan dan kemandirian Desa, yang disebut dengan Klasifikasi Status Desa yaitu Desa Mandiri (IDM > 0.8155), Desa Maju (0.7072 < IDM ≤ 0.8155), Desa Berkembang (0.5989 < IDM ≤ 0.7072), Desa Tertinggal (0.4907 < IDM ≤ 0.5989) dan Desa Sangat Tertinggal (IDM ≤ 0.4907). Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri. Oleh karena itu pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dasar pada desa tertinggal dan sangat tertinggal.

Pada tahun 2021, dari 1.038 desa/kelurahan di Provinsi Kalimantan Timur, 841 desa yang tersebar di tujuh kabupaten di Kalimantan Timur tersisa 1 Desa sangat tertinggal yaitu di Kabupaten Kutai Barat dan 54 desa tertinggal, hanya di Kabupaten Penajam Paser Utara yang tidak memiliki Desa Tertinggal.

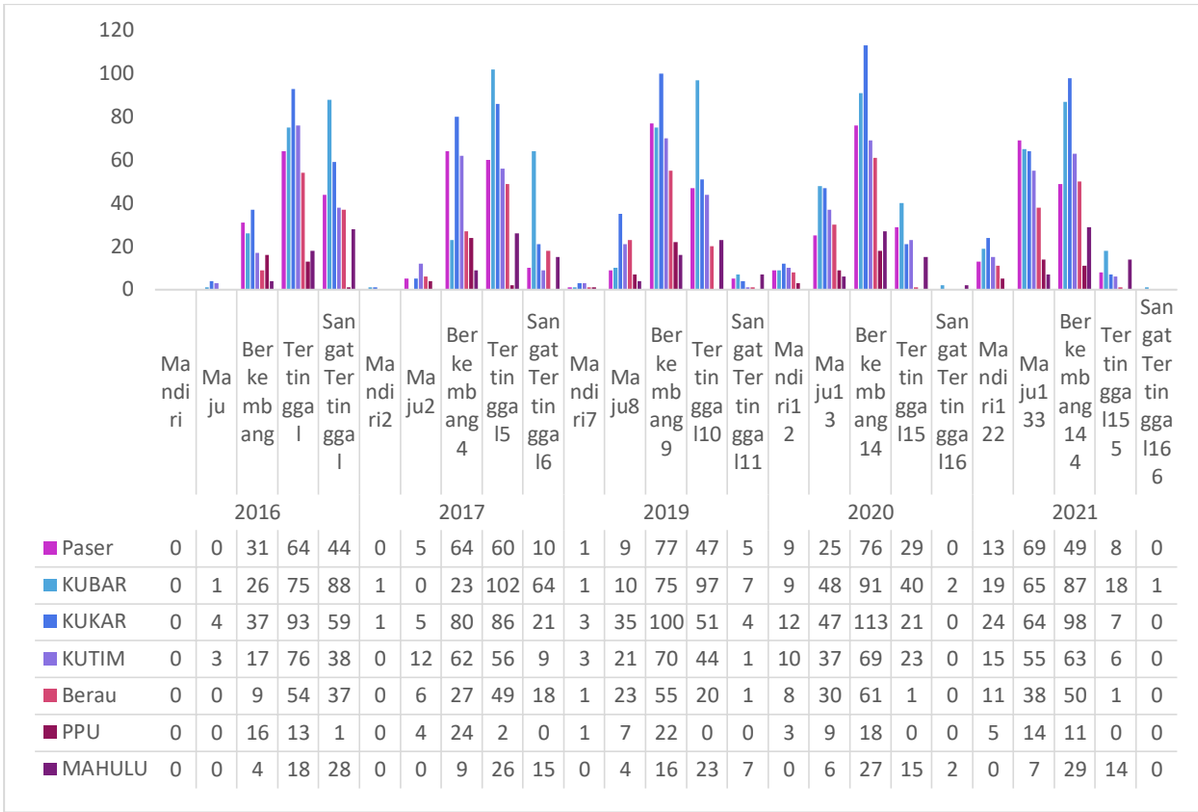

	2016					2017					2019					2020					2021				
Paser	0	0	31	64	44	0	5	64	60	10	1	9	77	47	5	9	25	76	29	0	13	69	49	8	0
KUBAR	0	1	26	75	88	1	0	23	102	64	1	10	75	97	7	9	48	91	40	2	19	65	87	18	1
KUKAR	0	4	37	93	59	1	5	80	86	21	3	35	100	51	4	12	47	113	21	0	24	64	98	7	0
KUTIM	0	3	17	76	38	0	12	62	56	9	3	21	70	44	1	10	37	69	23	0	15	55	63	6	0
Berau	0	0	9	54	37	0	6	27	49	18	1	23	55	20	1	8	30	61	1	0	11	38	50	1	0
PPU	0	0	16	13	1	0	4	24	2	0	1	7	22	0	0	3	9	18	0	0	5	14	11	0	0
MAHULU	0	0	4	18	28	0	0	9	26	15	0	4	16	23	7	0	6	27	15	2	0	7	29	14	0

Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.48
Perkembangan Status Desa Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2021

Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan indeks 0,5250 pada tahun 2016 status tertinggal menjadi status berkembang pada tahun 2021 dengan indeks mencapai 0,7071. Dari 33 Provinsi di Indonesia, Kalimantan Timur menempati Peringkat ke 6 di bawah Provinsi Bali dan Provinsi DI Yogyakarta yang menempati peringkat Pertama dan Kedua dengan Status IDM Maju. Sedangkan Provinsi Papua menjadi satu-satunya Provinsi dengan status IDM Sangat Tertinggal. Peningkatan ini tentu saja merupakan rapor positif bagi pemerataan dan pemberdayaan pembangunan hingga level administrasi terkecil.

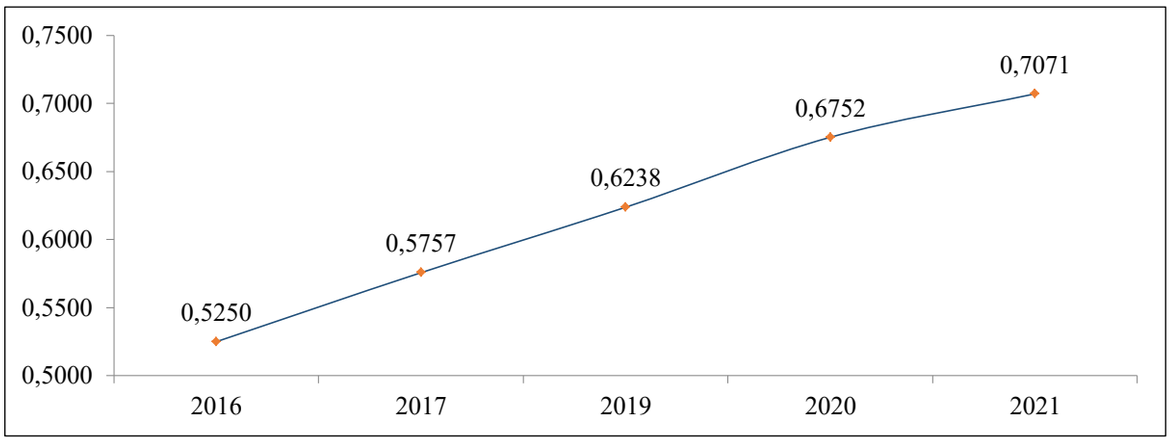

Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.49
Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2021

Indeks Desa Membangun 7 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan sejak 5 tahun terakhir. Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2020 mencapai Indeks Desa Membangun 0,6181 dengan status Berkembang, Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi satu-satunya Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai Status Maju dengan indeks sebesar 0,7085.

Tabel II.32
Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016 – 2021

No	Kab/Kota	2016	2017	2019	2020	2021
1	Paser	0,5368	0,5856	0,6092	0,6664	0,7240
2	KUBAR	0,5018	0,5233	0,5900	0,6660	0,6953
3	KUKAR	0,5337	0,5815	0,6415	0,6846	0,7128
4	KUTIM	0,5349	0,6037	0,6378	0,6782	0,7119
5	Berau	0,5130	0,6097	0,6539	0,6999	0,7177
6	PPU	0,6045	0,6505	0,6905	0,7085	0,7340
7	MAHULU	0,4969	0,5352	0,5862	0,6181	0,6318
Kalimantan Timur		0,5250	0,5757	0,6238	0,6752	0,7071

Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2021

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

A. Seni Budaya

Pembangunan bidang seni dan budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Pembangunan sektor kebudayaan di Provinsi Kalimanan Timur memprioritaskan pada program pengembangan nilai – nilai budaya yaitu pembinaan, pelestarian dan aktualisasi adat

budaya daerah yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pada tahun 2019, Provinsi Kalimantan Timur mendapat apresiasi penetapan Warisan Budaya Takbenda (WBTB) oleh Kemendikbud Republik Indonesia. Apresiasi ini diberikan dalam rangka untuk menjaga agar karya budaya baik benda dan tak benda di Kalimantan Timur tidak diklaim oleh negara lain. Pada tahun 2020 mensertifikasikan calon TACB, berdasarkan hasil sertifikasi maka dibentuklah Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur yang diputuskan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 430 tahun 2020 tentang TACB Prov. Kaltim. dan yang sudah melakukan sidang penetapan cagar budaya peringkat provinsi untuk Kawasan Gambar Cadas Prasejarah Sangkulirang Mangkalihat dan Situs Penguburan Gunung Selendang.

Tabel II.33
Karya Budaya Benda dan tak Benda di Provinsi Kalimantan Timur
yang Telah Dipatenkan Tahun 2020

No	Kabupaten/ Kota	Karya Budaya tak Benda	Peringkat	Karya Budaya Benda	Peringkat
1.	KUBAR	Alat Musik Kelentangan Tari Ngerangkau Tari Gong Alat Musik Sapeq Tari Perang Dayak Alat Musik Geniknng Suliiknng Dewa	Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional	Bunker Komando Gudang Peluru Kolam Belanda Penampungan Air Belanda Pillbox Sumur Kembar Belanda Lamin Mancong Lamin Tolar	Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten
2.	KUKAR	Tari Dewa Memanah Tari Ganjur Tari Datun Ngentau Tari Topeng Kemindu	Nasional Nasional Nasional Nasional		
3.	Paser	Tari Ngarang	Nasional		
4.	Provinsi			1. Kawasan Gambar Cadas Prasejarah Sangkuliran Mangkalihat 2. Situs Penguburan Gunung Selendang	

Sumber: DISDIKBUD Provinsi KALTIM, 2021

Di Provinsi Kalimantan Timur terdapat berbagai cagar budaya yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Secara keseluruhan pada Tahun 2020 tercatat sebanyak 611 Cagar Budaya, 9 Museum, 437 Komunitas Budaya, 57 Tenaga Budaya, dan 205 Adat Istiadat/Tradisi.

Tabel II.34
Kekayaan Budaya yang Dimiliki Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No	KAB/KOTA	Jenis Kekayaan Budaya				
		Cagar Budaya	Museum	Komunitas Budaya	Tenaga Budaya	Adat Istiadat/ Tradisi
1	Paser	96	1	58	0	6
2	KUBAR	12	1	81	25	19
3	KUKAR	132	2	69	25	0
4	KUTIM	57	0	7	4	7
5	Berau	167	3	7	0	0
6	PPU	17	0	24	3	7
7	MAHULU	47	0	0	9	137
8	Balikpapan	55	1	29	0	29
9	Samarinda	28	1	122	87	0
10	Bontang	0	0	40	4	0
Kalimantan Timur		611	9	437	157	205

Sumber: DISDIKBUD Provinsi KALTIM, 2020

Dalam hal pengembangan budaya dan seni di Kalimantan Timur ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 yang mencapai 52,78. Namun capaian IPK ini masih dibawah capaian IPK Nasional yaitu sebesar 53,74. Dari dimensi penilaian yang tercakup dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan, Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan nilai di atas angka nasional, yaitu pada dimensi Pendidikan dengan nilai 73,85, dimensi Ketahanan Sosial Budaya dengan nilai (76,82) dan dimensi budaya literasi dengan nilai 66,13.

Tabel II.35
Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Dimensi IPK	Provinsi	Nasional
Ekonomi Budaya	26,60	30,55
Pendidikan	73,85	69,67
Ketahanan Sosial Budaya	76,82	72,84
Warisan Budaya	29,96	41,11
Ekspresi Budaya	33,86	36,57
Budaya Literasi	66,13	55,03
Gender	49,99	54,97
IPK	52,78	53,74

Sumber: KEMENDIKBUD, 2019

Terhadap capaian IPK Provinsi Kalimantan Timur tersebut, maka diperlukan sinergitas antar lembaga terkait di pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota dengan masyarakat sebagai pelaku seni budaya, masyarakat sebagai pemilik ataupun sebagai pengapresiasi seni budaya.

B. Olahraga

Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sumberdaya manusia baik kepemudaan dan keolahragaan. Dalam pembangunan kepemudaan di Kalimantan Timur terus dilakukan terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepemudaan, mengingat pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan di berbagai bidang.

Untuk mengukur kapasitas pemuda dalam pembangunan ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang menggambarkan kapasitas pemuda berdasarkan domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Pada Tahun 2018 IPP Propinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dari 52,17 pada tahun 2015 menjadi 54,83 pada tahun 2018. Dengan capaian ini IPP Kalimantan Timur menduduki Peringkat 8 secara nasional menurun dari peringkat tahuh 2015 yang menduduki peringkat 6. Semua capaian domain mengalami peningkatan, kecuali domain kesehatan dan kesejahteraan. Penurunan nilai indeks domain kesehatan dan kesejahteraan disebabkan oleh naiknya angka kehamilan remaja dari dibawah 1 persen di tahun 2015 menjadi hampir 8 persen ditahun 2018.

Tabel II.36
Domain Penyusun Indeks Pembangunan Pemuda
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2018

Uraian	2015	2016	2017	2018
Domain : Pendidikan	70,00	73,33	73,33	73,33
1. Rata-Rata Lama Sekolah	10,70	10,81	10,92	10,72
2. APK Sekolah Menengah	94,55	95,32	95,52	94,35
3. APK PT	28,44	31,60	35,58	35,64
Domain : Kesehatan dan Kesejahteraan	77,50	70,00	67,50	72,50
1. Angka Kesakitan Pemuda	5,81	4,83	6,15	5,37
2. Pemuda Menjadi Korban Kejahatan	0,47	0,97	1,37	0,93
3. Pemuda Merokok	22,09	22,59	20,80	20,80

Uraian	2015	2016	2017	2018
4. Remaja Perempuan Sedang Hamil	0,80	4,82	7,99	7,99
Domain : Lapangan dan Kesempatan Kerja	30,00	65,00	40,00	35,00
1. Pemuda Berwirausaha	0,24	1,41	0,40	0,24
2. Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda	17,05	16,29	15,78	15,21
Domain : Partisipasi dan Kepemimpinan	40,00	40,00	40,00	43,33
1. Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	77,25	77,25	77,25	70,55
2. Partisipasi Pemuda yang aktif dalam organisasi	3,63	3,63	3,63	4,87
3. Pemuda Berpendapat Dalam Rapat	6,21	6,21	6,21	5,12
Domain : Gender dan Diskriminasi	43,33	43,33	46,67	50,00
1. Angka Perkawinan Usia Anak	14,78	14,85	13,90	11,54
2. Pemuda Perempuan Sedang Bersekolah Menengah dan Perguruan Tinggi	42,28	40,35	44,83	44,39
3. Pemuda Perempuan Bekerja di Sektor Formal	23,99	23,82	24,21	25,29
Indeks Pembangunan Pemuda Kaltim	52,17	58,33	53,50	54,83
Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia	48,67	50,83	49,33	51,50

Sumber: BAPPENAS, 2021

Sedangkan dalam pembangunan keolahragaan, setelah sukses meraih peringkat lima besar pada PON XIX Tahun 2016, Pemerintah Kalimantan Timur terus meningkatkan pembinaan bagi para atlet dengan tujuan menjadikan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lumbung atlet berprestasi untuk wilayah Indonesia Timur. Selain itu Provinsi Kalimantan Timur siap menjadi tuan rumah dalam event berskala nasional maupun internasional dengan mengoptimalkan seluruh sarana dan prasarana olahraga yang ada.

Tabel II.37
Kondisi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Organisasi Pemuda	107	107	107	107	107
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	42	42	42	45	45
Jumlah Klub Olahraga	1.050	1.050	1.087	1.109	1.109
Jumlah Lapangan/Gedung Olahraga	97	101	102	105	105
Jumlah Kegiatan Olahraga	152	152	152	161	161
Jumlah Organisasi Olahraga	57	57	63	63	63

Sumber: DISPORA Provinsi KALTIM, 2021

Tabel II.38
Capaian Kinerja Pembangunan Aspek Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 – 2021

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
1.1	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	15,04	15,04	15,13
1.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	0,92	0,96	1,03	1,06	10,47
1.3	Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	16,34
1.4	Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan Non Migas dan Batubara terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	7,46	8,25	7,97
1.4	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,53	0,55	0,56	0,63	0,54
1.5	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,30	0,31	0,33	0,36	0,32
1.6	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	4,50	4,34	4,33	4,94	4,97
1.7	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,45	1,48	1,52	1,67	1,56
1.8	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,16	1,17	1,12	1,13	1,04
2	Fokus Kesejahteraan Sosial					
2.1	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,36	9,48	9,70	9,77	9,84
2.2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,49	13,67	13,69	13,72	13,81
2.3	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,70	73,96	74,22	74,33	74,61
3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga					
3.1	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	60
3.2	Presentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	20,59

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

A. Pendidikan

Pendidikan merupakan investasi masa depan dalam rangka menumbuhkan insan yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tangguh, oleh karenanya masyarakat harus mengakses pelayanan pendidikan lebih baik. Dengan demikian Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni menggambarkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang telah menikmati pendidikan.

Secara umum, peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Semakin tingginya persentase penduduk usia sekolah yang mengenyam pendidikan merupakan target mutlak yang harus dicapai oleh pemerintah. APS Provinsi Kalimantan Timur pada jenjang usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun terus mengalami penurunan yang mengindikasikan jumlah penduduk usia sekolah mengenyam pendidikan semakin menurun. Sedangkan APS pada jenjang usia 16-18 tahun mengalami kenaikan pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan semakin tinggi jenjang pendidikan maka mulai meningkat partisipasi sekolahnya.

Tabel II.39
Angka Partisipasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2017-2021

Angka Partisipasi Sekolah					
Usia Sekolah	2017	2018	2019	2020	2021
7-12	99,67	99,76	99,68	99,73	99,60
13-15	98,79	98,89	98,21	99,07	98,90
16-18	81,32	81,55	82,07	81,88	82,10
Angka Partisipasi Kasar					
Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
SD	108,07	108,02	106,84	105,75	105,26
SLTP	91,46	92,57	91,03	92,17	92,03
SLTA	99,51	96,08	94,96	95,23	95,52
Angka Partisipasi Murni					
Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
SD	97,43	98,40	98,41	98,44	98,36
SLTP	79,58	79,68	80,42	81,28	81,30
SLTA	68,23	68,43	68,55	69,00	69,29

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 paling tinggi berada pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar, yakni sebesar 105,26. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 5,26 persen penduduk yang bukan golongan umur 7-12 tahun bersekolah ditingkat SD.

Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur ketepatan usia penduduk dalam berpartisipasi untuk mengenyam suatu jenjang pendidikan tertentu, serta dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas Pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang Pendidikan. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, sedangkan APM hanya sebatas usia pada jenjang yang bersesuaian.

Dari tabel diatas terlihat bahwa, APM di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 - 2021 mengalami peningkatan pada setiap jenjang Pendidikan terkecuali jenjang SD mengalami sedikit penurunan di tahun 2021. Peningkatan APM ini menunjukkan bahwa proporsi anak yang bersekolah sesuai dengan jenjang Pendidikan yang harus diikuti terus bertambah dan menjadi penanda dari keningkatnya akses penduduk kelompok usia tersebut terhadap layanan Pendidikan di Kalimantan Timur.

Namun, meskipun APM terus mengalami kenaikan, pemerintah tetap mendorong peningkatan yang lebih baik lagi melalui beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur berupa pemberian bantuan operasional Pendidikan, bantuan bagi siswa miskin, pembangunan unit sekolah baru, pemerataan guru, dan sebagainya.

Rasio Murid-Guru yang menggambarkan tingkat perbandingan guru terhadap murid untuk melihat kecukupan jumlah guru di suatu wilayah terhadap jumlah murid yang harus diajar. Sedangkan Rasio Murid-Sekolah mengambarkan tingkat perbandingan fasilitas pendidikan yakni jumlah sekolah yang aktif terhadap jumlah murid di Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun begitu, angka ini masih umum mengingat belum dilihat persebaran fasilitas pendidikan di wilayah Kalimantan Timur.

Tabel II.40
Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Sekolah Dasar (SD)					
Negeri	1.650	347.886	22.323	15,58	210,84
Swasta	251	63.435	3.546	17,89	252,73
MI	133	30.179	2.194	13,76	226,91
Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
Negeri	447	127.778	8.593	14,87	285,86
Swasta	221	32.664	2.247	14,54	147,80
MTs	170	31.829	3.027	10,52	187,23
Sekolah Menengah Atas (SMA)					
Negeri	142	65.859	3.941	16,71	463,80
Swasta	86	12.905	963	13,40	150,06
MA	80	10.890	1.565	6,96	136,13
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)					
Negeri	142	65.859	3.941	16,71	463,80
Swasta	86	12.905	963	13,40	150,06

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Pada tahun 2021, rasio murid-guru paling tinggi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Sedangkan rasio guru terendah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Sementara rasio murid-sekolah tertinggi adalah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Tabel II.41
Jumlah Sekolah Yang Tersebar di 10 Kabupaten/Kota Negeri dan Swasta pada Jenjang Pendidikan SMA, SMK dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Tahun 2021

No	KAB / KOTA	Sekolah Menengah atas (SMA)			Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)			Sekolah Luar Biasa (SLB)		
		Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta
1	Paser	17	13	4	12	4	8	1	1	0
2	KUBAR	22	17	5	14	7	7	1	1	0
3	KUKAR	52	35	17	45	17	28	5	1	4
4	KUTIM	24	22	2	25	13	12	3	1	2
5	Berau	19	15	4	14	8	6	1	1	0
6	PPU	10	7	3	10	6	4	1	1	0
7	MAHULU	7	4	3	2	0	2	1	1	0
8	Balikpapan	28	9	19	33	6	27	4	1	3
9	Samarinda	43	19	24	52	22	30	14	2	12
10	Bontang	11	3	8	14	4	10	6	1	5
Total		233	144	89	221	87	134	37	11	26

Sumber: KEMDIKBUD, 2021

Angka Putus Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 mengalami penurunan di seluruh kelompok usia sekolah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,14 persen untuk kelompok usia 7-12 tahun, kelompok usia 13,15 tahun mencapai 0,88 persen dan 17,98 persen untuk kelompok usia 16-18 tahun. Tingginya angka putus sekolah kelompok usia 16,18 tahun disebabkan karena pada wilayah tertentu (wilayah terpencil) di beberapa Kabupaten Provinsi Kalimantan Timur tidak memenuhi standar untuk dibangun unit sekolah baru. Selain itu, ada sebagian kecil masyarakat usia sekolah yang lebih memilih bekerja membantu orang tua daripada melanjutkan sekolah.

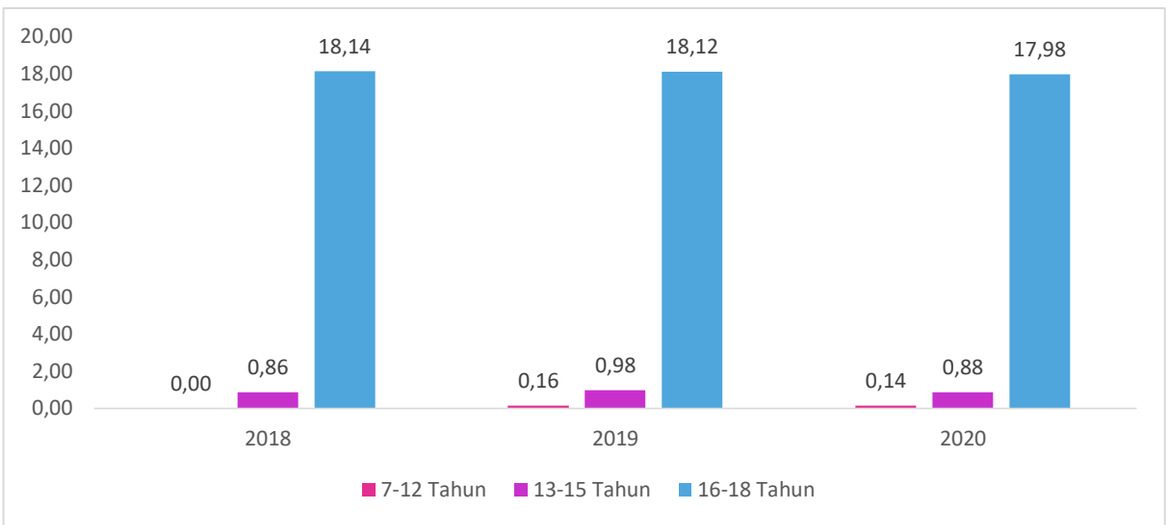

Sumber: KEMENDIKBUD, 2021

Gambar II.50
Angka Putus Sekolah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2020 (persen)

Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan tertinggi dalam peningkatan potensi sumber daya manusia sebagai bagian dari pendidikan formal. Di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 53 perguruan tinggi/akademi/lembaga pendidikan tinggi. Pada tahun 2021, jumlah mahasiswa mencapai 96.613 dengan jumlah dosen sebanyak 4.246 orang.

Tabel II.42
Indikator Perguruan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

Kategori	Jumlah Perguruan Tinggi	Jumlah Tenaga Pendidik	Jumlah Mahasiswa
Negeri	5	1.955	45.681
Swasta	48	2.291	50.932
Jumlah	53	4.246	96.613

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

B. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu modal utama dari sumber daya manusia dalam melaksanakan aktivitas untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Kesehatan juga menjadi pra syarat mutlak bagi penduduk untuk melaksanakan segala program perencanaan pembangunan terkait pendidikan, ketenagakerjaan, perekonomian, bahkan kesehatan itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan bidang kesehatan akan memiliki *multiplier effect* pada program-program pembangunan kedepannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah melihat bagaimana perkembangan kesehatan masyarakat, baik dari segi fasilitas, sarana prasarana, pemerataan kesehatan, maupun tingkat kesehatan penduduk. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya melakukan peningkatan berbagai pelayanan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan berkualitas. Berbagai upaya peningkatan tersebut antara lain dilakukannya penyempurnaan pada beberapa program pembangunan kesehatan masyarakat, seperti peningkatan kesadaran akan kesehatan ibu dan bayi, kesadaran untuk menggunakan fasilitas kesehatan resmi, hingga terkait pola hidup sehat di masyarakat. Berikut fasilitas dan pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur.

Saat ini bidang Kesehatan merupakan salah satu bidang yang mempunyai tugas dan beban berat dalam menangani dampak akibat pandemi COVID-19, dimana perlu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di masyarakat. Untuk menanggulangi dampak COVID-19, perlu adanya reformasi di bidang kesehatan yang ditekankan pada pengendalian penyebaran penyakit menular, pelayanan kesehatan dan surveilans. Sehingga pasca COVID-19 akan difokuskan kepada Gerakan Masyarakat (Germas) Hidup Sehat, penanganan penyakit menular, ketersediaan alat kesehatan, kesiapan sarana dan prasarana kesehatan serta masyarakat keluarga miskin yang terdampak penyakit menular.

Tabel II.43
Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021

No	Fasilitas Kesehatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rumah Sakit Umum	44	54	53	57	59
2	Rumah Sakit Swasta	16	19	19	22	22
3	Dokter Umum	1.114	1.010	1.024	1.106	2.097
4	Dokter Gigi	320	309	314	320	411
5	Dokter Spesialis	678	503	597	649	768
6	Perawat	6.662	7.823	6.524	7.510	10.789
7	RS Bersalin	10	15	9	7	10
8	Puskesmas	186	186	187	187	188
9	Puskesmas Pembantu	714	716	716	730	742
10	Pedagang Besar Farmasi	47	48	49	52	53
11	Apotek	524	637	704	759	745
12	Persentase Persalinan dengan Tenaga Medis	88,2	96,34	96,39	97,46	72,65

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2021

Dalam upaya percepatan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan di fasilitas pelayaan kesehatan mutlak diperlukan, sejumlah upaya telah dilakukan dalam upaya pemenuhan tenaga kesehatan di Puskesmas dan atau Rumah Sakit diantaranya pemenuhan tenaga kesehatan melalui Program Nusantara sehat, Program Intersip Dokter Indonesia (PIDI), Program Pemberdayaan Dokter Spesialis (Dokter Spesialis yang baru selesai tugas belajar) ataupun juga dengan Institusi Pendidikan kesehatan untuk penempatan tenaga residen.

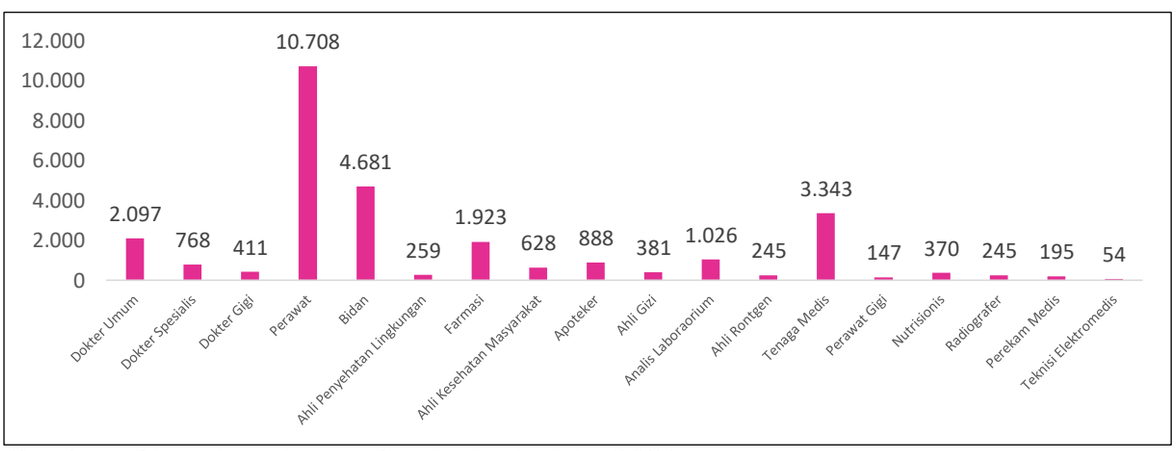

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.51
Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2021

Kecukupan jumlah tenaga kesehatan jika dilihat berdasarkan rasio di tingkat provinsi untuk tenaga dokter kususnya Dokter Spesialis telah melampaui target rasio dengan rasio 18 per 100.000 penduduk dari target rasio 12 per 100.000 penduduk, namun rasio di tingkat kabupaten masuh ada beberapa kabupaten yang belum mencapai target rasio dikarenakan dokter spesialis banyak berada di daerah perkotaan. Sedangkan Kecukupan jenis tenaga kesehatan juga sangat menetukan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di puskesmas 9 jenis tenaga kesehatan harus ada (dokter, dokter gigi, bidan, perawat, farmasi, promkes, kesling, gizi dan tenaga laboratorium medik) saat ini 53 persen puskesmas telah terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatannya.

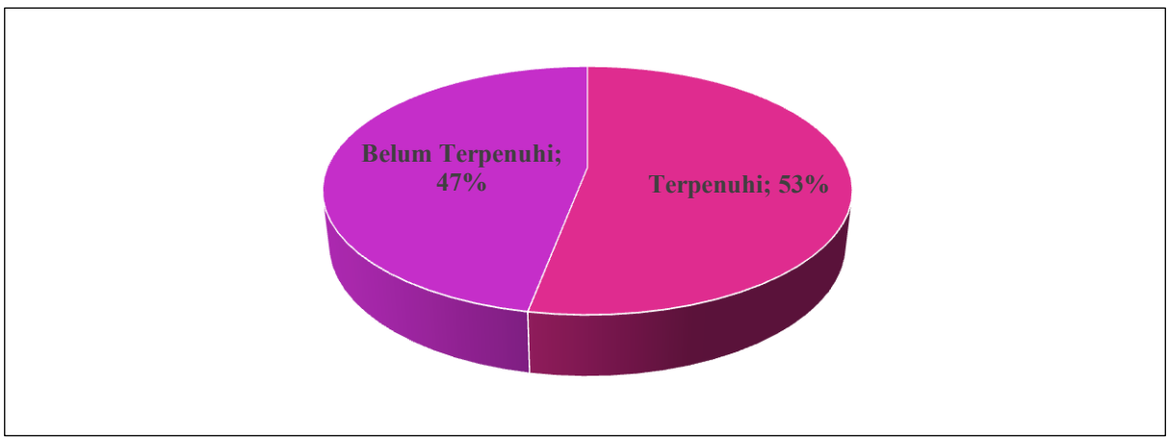

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.52
Pemenuhan 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Pemenuhan Tenaga Kesehatan terus dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Sebesar 55 persen RSUD di Provinsi Kalimantan Timur telah terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Penunjang dengan jumlah 9 RSUD yang belum terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Penunjang.

Tabel II.44
Jumlah RSUD Belum Terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan
3 Spesialis Penunjang Provinsi Kalimantan Timur

KAB/KOTA	Jumlah RSUD	Nama RSUD
Berau	1	RSUD Talisayan
Samarinda	2	RSUD Inche Abdoel Moeis
		RSUD KORPRI Prov KALTIM
KUKAR	1	RSUD Dayaku Raja
KUTIM	1	RSUD Sangkulirang

KAB/KOTA	Jumlah RSUD	Nama RSUD
MAHULU	2	RS Gerbang Sehat MAHULU
		RS Nawacita Datah Dave
Paser	1	RS Pratama Batu Engau
PPU	1	RS Pratama PPU
Total	9	

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2021

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja pelayanan dasar dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat dengan memperhatikan beberapa indikator utama. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah dari sektor pekerjaan umum salah satunya adalah terkait dengan sistem penyediaan air minum (SPAM). Pemaparan kondisi pelayanan pada urusan tersebut diarahkan pada penilaian aspek ketersediaan dan kualitas.

Mengacu pada Target Nasional dalam RPJMN 2020-2024, target capaian akses air minum layak di tahun 2024 adalah 100 persen, yang terdiri didalamnya persentase akses air minum aman sebesar 15 persen. Permasalahan dalam pencapaian target tersebut dirasakan ketika capaian daerah aktual saat ini masih rendah, terutama terkait capaian pelayanan air minum perpipaan.

Tabel II.45
Fasilitas dan Pelayanan Penduduk Terlayani Air Minum Perpipaan

No	KAB/KOTA	Sambungan Rumah (SR)					Cakupan Layanan Air Minum Perpipaan (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Paser	19.050	19.050	21.551	23.599	26.837	38,29	38,29	37,16	43,79	47,88
2	KUBAR	10.012	10.012	11.009	9.565	22.683	34,35	34,35	34,24	28,84	67,37
3	KUKAR	68.035	68.035	73.203	67.017	83.840	63,39	63,39	58,68	49,52	56,50
4	KUTIM	15.945	15.945	20.122	30.335	37.521	33,13	33,13	15,43	38,08	44,20
5	Berau	16.517	16.517	23.738	18.101	35.663	44,70	44,70	81,59	54,87	70,21
6	PPU	5.470	5.470	7.845	10.399	12.241	15,87	15,87	34,79	30,13	33,08
7	MAHULU	n/a	n/a	1.554	1.656	1.272	n/a	n/a	12,00	22,49	10,85
8	Balikpapan	97.243	97.243	100.927	100.163	121.760	76,98	76,98	79,05	77,79	95,11
9	Samarinda	146.225	146.225	158.901	158.900	154.806	95,46	95,46	99,29	85,28	78,76
10	Bontang	23.999	23.999	22.953	28.464	29.851	87,05	87,05	51,10	97,96	80,59
Jumlah		396.673	402.496	441.803	448.199	526.474	51,5	54,3	54,59	62,64	67,48

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2021

Berdasarkan data di atas, peningkatan cakupan pelayanan air minum perpipaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana capaian tahun 2020 sebelumnya sebesar 62,64 persen dan saat ini akhir tahun 2021 telah meningkat ±5 persen menjadi 67,48 persen. Peningkatan ini disebabkan oleh semakin banyaknya program/kegiatan air minum yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui pendanaan APBN, dan juga terdapat 6 proyek strategis SPAM oleh pemerintah provinsi di Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, dan Kutai Timur. Peningkatan ini juga tidak lepas dari pendanaan oleh kabupaten/kota (melalui APBD II), dimana penerapan SPM menjadi salah satu target utamanya. Hal tersebut menggambarkan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah telah mulai menjadikan sektor penyediaan air minum menjadi salah satu program prioritas daerah dan nasional.

Namun dalam upaya pemenuhan layanan air minum saat ini, mulai ditemui kendala terkait terbatasnya kuantitas dan keandalan sumber air baku yang dimiliki masing-masing Kabupaten/Kota. Hal tersebut kemudian menjadikan upaya pembangunan/peningkatan/perluasan SPAM menjadi kurang optimal. Idealnya penyelenggaraan SPAM, sangat dipengaruhi oleh ketersediaan, kualitas, kuantitas dan kehandalan air baku yang sangat besar, sementara di daerah lain diprediksi akan mengalami kesulitan air baku. Beberapa daerah yang diperkirakan mengalami defisit air baku di masa depan meliputi beberapa daerah yang saat ini hanya mengandalkan sumber air baku yang berasal dari tanah, dengan tanpa alternatif sumber air baku lain, seperti air permukaan (DAS, danau dan mata air).

Melihat permasalahan diatas, dalam rangka peningkatan capaian akses air minum untuk seluruh masyarakat, maka kedepan akan diperlukan upaya untuk pemerataan akses terhadap sumber air baku yang potensial dimanfaatkan secara bersama. Upaya tersebut akan berjalan melalui skema penyediaan air minum lintas Kabupaten/Kota atau Regional (SPAM Regional). Terdapat beberapa potensi SPAM Regional di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, dan akan potensial direalisasikan dengan skema kerjasama daerah, melalui Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antar daerah, Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Saat ini Provinsi Kalimantan Timur memiliki rencana penyelenggaraan SPAM Regional yang menjadi target jangka pendek, yakni SPAM Regional

Marangkayu (Kukar – Bontang) dan juga SPAM Regional Indominco (Kutim – Bontang). Berikut adalah data RISPAM Provinsi :

Tabel II.46
Potensi Penyelenggaraan SPAM Regional di Wilayah
Provinsi Kalimantan Timur

No	Potensi Spam Regional	KAB/KOTA Terlibat	Kebutuhan	Sumber Air Baku	
			Kapasitas L/Det	Nama	Kapasitas
1	KUKAR- Bontang	KAB. KUKAR, Kota Bontang	450	Bendung Marangkayu	450 l/det
2	KUTIM– Bontang	KAB. KUTIM, Kota Bontang	150	Waduk Ex Tambang Indominco	> 100 L/DET (Masih Dalam Kajian)
3	PPU – Balikpapan	KAB. PPU, Kota Balikpapan	- (Masih Dalam Kajian)	Waduk Sepaku Semoi, Waduk Sepaku	> 2.000 l/det
4	KUKAR – Balikpapan	KAB. KUKAR, Kota Balikpapan	- (Masih Dalam Kajian)	Waduk Batu Lepek	5.000 l/det
5	Paser – Balikpapan	KAB. Paser, Kota Balikpapan	- (Masih Dalam Kajian)	Waduk Lambakan	12.000 l/det

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2020

Untuk Provinsi Kalimantan Tmur, rata-rata kehilangan air *Non Revenue Water* (NRW) Distribusi berdasarkan data Audit ESP-ADB Tahun 2021 yaitu sebesar 26,72 persen. Dengan kapasitas produksi rata-rata sebesar 8.061,29 l/dt, kapasitas distribusi sebesar 7.043,26 l/dt dan kapasitas terjual 5.139,86 l/dt.

Tabel II.47
Rekapitulasi Kehilangan Air Rata-Rata Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

No	KAB/KOTA	Jumlah Unit	Kap Terpasang (l/dt)	Kap Produksi (l/dt)	Kap Distribusi (l/dt)	Kap Terjual (l/dt)	Idle Capacity (l/dt)	Kehilangan Air (%)
1	Paser	9	405	327,99	316,69	220,03	80,25	24,53
2	KUBAR	15	320	219,30	194,50	155,40	100,70	19,83
3	KUKAR	37	1.817	1.707,10	1.151,51	999,13	193,20	33,33
4	KUTIM	22	650	457,47	421,19	335,61	192,53	33,71
5	Berau	18	925	750,00	686,80	607,50	175,00	15,12
6	PPU	5	340	150,80	137,79	97,22	191,06	13,08
7	MAHULU	9	42	0,00	0,00	0,00	42,00	-
8	Balikpapan	8	1.510	1.428,97	1.343,30	840,78	125,15	44,07
9	Samarinda	14	2.540	2.612,95	2.366,95	1.459,66	179,58	35,76
10	Bontang	11	530	406,71	424,53	424,53	92,38	21,02
Kalimantan Timur		148	9.079	8.061,29	7.043,26	5.139,86	1.371,85	26,72

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2022

Kehilangan air tertinggi terdapat di PDAM Kota Balikpapan sebanyak 44 persen dan di Kota Samarinda sebanyak 35,76 persen sedangkan kehilangan air terendah terdapat di PDAM Penajam Paser Utara sekitar 13,08 persen dan PDAM Kabupaten Berau sebesar 15,12 persen. Penyebab kehilangan air pada umumnya disebabkan oleh adanya kebocoran pipa jaringan distribusi yang telah tua, dan belum akuratnya pencatatan meter water pelanggan, masih banyaknya *water meter* pelanggan yang rusak dan belum dilakukan peneraan *water meter* pelanggan. Pada umumnya PDAM telah berupaya untuk menurunkan NRW distribusi dengan melakukan penggantian *water meter* pelanggan yang rusak secara bertahap.

D. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang relatif aman dari konflik sosial. Walau demikian Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan). Secara umum kondisi ketertiban dan ketentraman sampai dengan tahun 2020 relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap baik aparatur pemerintah dan aparatur keamanan. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya. Hal ini terliat dari jumlah kasus kejahatan yang semakin menurun dari tahun ke tahun.

Tabel II.48
Banyaknya Peristiwa Kejahatan dan Pelanggaran yang Dilaporkan di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Jenisnya, 2016-2020

No	Jenis Kriminal	Jumlah Kasus Kriminalitas Menurut Jenisnya				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kasus Narkoba	2438	1635	1582	1700	1419
2	Kasus Pembunuhan	33	23	19	12	12
3	Kasus Kejahatan Seksual	56	96	77	80	129
4	Kasus Penganiayaan	821	499	444	296	214
5	Kasus Pencurian	1824	1242	981	680	624
6	Kasus Penipuan	370	350	331	130	105
7	Kasus Pemalsuan Uang	6	8	7	1	1

Jumlah	5548	3853	3441	2899	2504

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Upaya penurunan peristiwa kejahatan dan pelanggaran ini memang terus diupayakan. Berdasarkan data yang ada, penurunan angka kejahatan dan pelanggaran saat ini masih belum optimal. Pada tahun 2017, persentase penurunan angka kejahatan dan pelanggaran sebesar 31 persen. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 11 persen, hingga pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 16 persen dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 14 persen.

Masih belum optimalnya penurunan angka kriminalitas disebabkan karena pelaksanaan fungsi perlindungan masyarakat juga kurang. Berdasarkan indikator persentase poskamling aktif, pada tahun 2016, jumlahnya hanya sebesar 2.242. Angka ini mengalami penurunan menjadi 1927 pada tahun 2020. Dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum sebagai upaya penurunan angka kriminalitas untuk jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 mengalami peningkatan yang sebelumnya pada tahun 2016 sebanyak 63 kali, tahun 2017 sebanyak 211 kali, tahun 2018, 2019 dan 2020 sebanyak 2.793 kali.

Saat ini total jumlah petugas linmas adalah 30 orang. Idealnya setiap pos kamling dijaga minimal 2 orang dengan asumsi penjagaannya selama 24 jam bukan hanya pada malam hari saja. Hal ini sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020, karena keterbatasan tersebut, satlinmas diorientasikan untuk membantu pelaksanaan pengawasan pilkada. Kurangnya jumlah petugas linmas ini karena aturan terdahulu belum memberikan insentif kepada petugas linmas yang berasal dari anggaran dinas. Mengikuti aturan terbaru dari permendagri, program satlinmas ini nantinya berhak mendapatkan biaya operasional dari pemerintah. Diharapkan dengan adanya pemberian insentif tersebut dapat meningkatkan motivasi kerja bagi para petugas linmas.

Tabel II.49
Tabel II.50 Angka Pelanggaran K3 dan Perlindungan Masyarakat
Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Elemen Data	Tahun					Satuan	Ket.
	2016	2017	2018	2019	2020		
Aparat dan Sarana Keamanan	12.875	8.106	23.026	23.028	23.811	Orang	Jumlah Aparat Satpol PP

Elemen Data	Tahun					Satuan	Ket.
	2016	2017	2018	2019	2020		
							dan Satlinmas
Jumlah Aparat Satuan Pamong Praja	1.825	1.649	439	441	1.224	orang	Jumlah PNS dan Non PNS
a. Provinsi	148	147	143	145	172	Orang	Jumlah PNS dan Non PNS
b. Kabupaten/ Kota	1.643	1.502	1.502	1.502	1.052	Orang	Jumlah PNS dan Non PNS
Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	11.050	6.457	22.587	22.587	22.587	Orang	Linmas Cadangan Umum
a. Provinsi	30	30	30	30	30	Orang	jumlah non PNS
b. Kabupaten/ Kota	11.020	6.427	22.557	22.557	22.557	Orang	Jumlah Linmas
Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam	63	211	2.793	2.793	2.793	kali	24 Jam (1 Tahun)
Jumlah Pos Siskamling	2.242	3.111	1.927	1.927	1.927	Unit	pos jaga
- Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa	2	3	2	2	2		
Jumlah Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	852	5.672	138	138	138	Kasus	
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	130	5.958	365	365	365	Kasus	
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	15	105	264	264	264	%	
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000	5	4	4	4	3		

Elemen Data	Tahun					Satuan	Ket.
	2016	2017	2018	2019	2020		
Penduduk							

Sumber: SIDATA Kalimantan Timur, 2021

E. Sosial

Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di daerah perlu dilakukan penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam rangka kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik perseorangan, keluarga dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam rangka kesejahteraan sosial dilaksanakan secara simultan melalui Sistem Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Sosial yang bersifat pencegahan *(preventif)*, penyembuhan *(curative)*, pemulihan *(rehabilitative)* dan pengembangan *(promotive)* bagi PMKS dan PSKS.

Tabel II.51
Jumlah PMKS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 - 2021

Jumlah PMKS	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah PMKS	Orang	243.459	243.459	251.234	251.234	247.465
PMKS yang ditangani	Jenis	26	26	26	26	26
Persentase Penanganan PMKS	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan	Orang	76.000	78.387	78.387	81.247	108.434
PMKS yang diberikan Bantuan	Orang	75.696	1.200	1.052	1.134	2.708
PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	99,60	1,53	1,34	1,40	2,50
Persentase Keluarga Miskin dan PMKS lainnya yang memiliki Usaha Ekonomi Produktif	%	99,6	0	1,34	1,4	1,4
Jumlah Keluarga Miskin dan PMKS	KK	46.510	n/a	46.510	46.510	23.355
Jumlah Keluarga yang memiliki Usaha Ekonomi Produktif	KK	38.187	n/a	100	100	24

Sumber: Dinas Sosial Provinsi KALTIM, 2021

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kalimantan Timur mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebanyak 243.459 orang menjadi 247.465 orang pada tahun 2021, terjadi kenaikan sebanyak 4.006 orang. Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, peningkatan jumlah PMKS ini harus diiringi dengan peningkatan penanganan PMKS menuju hidup yang lebih baik. Jumlah PMKS juga tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota dimana rinciannya dapat dilihat pada tabel II.45 berikut.

Tabel II.52

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

No	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks)	Balikpapan		KUKAR		Samarinda		PPU		KUBAR		Paser	
		Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK
1	Anak Balita Terlantar	94	-	68	-	1.841	-	59	-	102	-	82	-
2	Anak Terlantar	327	-	743	-	1.542	-	274	-	326	-	1.625	-
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	71	-	79	-	66	-	48	-	26	-	21	-
4	Anak Jalanan	124	-	81	-	206	-	-	-	-	-	39	-
5	Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)	76	-	63	-	435	-	31	-	14	-	164	-
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	187	-	24	-	97	-	170	-	59	-	93	-
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	161	-	921	-	816	-	23	-	-	-	43	-
8	Lanjut Usia Terlantar	29	-	668	-	1.162	-	-	-	422	-	-	-
9	Penyandang Disabilitas	314	-	2.349	-	1.626	-	1.097	-	449	-	530	-
10	Tuna Susila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Gelandangan	11	-	4		51	-	-	-	26	-	10	-
12	Pengemis	9	-	8		55	-	-	-	-	-	-	-
13	Pemulung	21	-	5	-	64	-	-	-	-	-	7	-
14	Kelompok Minoritas	65	-	-	-	38	-	93	-	-	-	17	-

No	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks)	Balikpapan		KUKAR		Samarinda		PPU		KUBAR		Paser	
		Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	143	-	134	-	439	-	110	-	240	-	298	-
16	Orangr Dengan HIV/AIDS (ODHA)	1.091	-	180	-	1.990	-	19	-	43	-	7	-
17	Korban Penyalahgunaan Napza	303	-	75	-	508	-	4	-	6	-	3	-
18	Korban Trafficking	2	-	3	-	8	-	6	-	-	-	-	-
19	Korban Tindak Kekerasan	56	-	-	-	73	-	-	-	-	-	51	-
20	Pekerja Migram Bermasalah Sosial	399	-	-	-	59	-	-	-	48	-	34	-
21	Korban Bencana Alam	2.807	591	169	43	5.950	1.267	981	214	47.301	9.748	1.211	287
22	Korban Bencana Sosial	948	171	2.477	412	3.288	612	781	192	25.304	5.941	1.011	214
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	56	-	-	-	-	-	27	-	29	-	48	-
24	Fakir Miskin	14.704	3.114	20.114	3.193	14.248	3.101	12.047	3.012	12.678	2.870	13.647	3.291
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	-	-	34	-	337	-	-	-	581	-	11	-
26	Komunitas Adat Terpencil	-	-	-	-	-	-	-	-	72	27	1.697	378
JUMLAH		21.998	3.876	28.199	3.648	34.899	4.980	15.770	3.418	87.726	18.586	20.648	4.170

Sumber: Dinas Sosial Provinsi KALTIM, 2021

Tabel II.45 Lanjutan

NO	JENIS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	BERAU		KUTIM		BONTANG		MAHULU	
		Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK
1	Anak Balita Terlantar	77	-	128	-	78	-	-	-
2	Anak Terlantar	502	-	213	-	437	-		-
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	172	-	442	-	43	-	18	-
4	Anak Jalanan	16	-	-	-	51	-	-	-
5	Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)	35	-	872	-	43	-	-	-
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	139	-	187	-	56	-	-	-
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	147	-	587	-	-	-	-	-
8	Lanjut Usia Terlantar	-	-	198	-	337	-	-	-
9	Penyandang Disabilitas	276	-	612	-	795	-	310	-
10	Tuna Susila	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Gelandangan	75	-	19	-	17	-	-	-
12	Pengemis	-	-	-	-	4	-	-	-
13	Pemulung	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kelompok Minoritas	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	JENIS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	BERAU		KUTIM		BONTANG		MAHULU	
		Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	44	-	-	-	-	-	-	-
16	Orangr Dengan HIV/AIDS (ODHA)	31	-	159	-	160	-	-	-
17	Korban Penyalahgunaan Napza	2	-	4	-	4	-	-	-
18	Korban Trafficking	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pekerja Migram Bermasalah Sosial	52	-	-	-	34	-	-	-
21	Korban Bencana Alam	-	-	712	154	869	196	-	-
22	Korban Bencana Sosial	422	106	392	98	377	95	-	-
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Fakir Miskin	9.307	2.107	12.001	3.001	4.587	1.047	1.067	264
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Komunitas Adat Terpencil	1.717	411	575	104	-	-	1.250	249
JUMLAH		13.014	2.624	17.101	3.357	7.892	1.338	2.645	513

Sumber: Dinas Sosial Provinsi KALTIM, 2021

F. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator penting dalam melihat kemampuan kehidupan masyarakat sekaligus mengindikasikan daya saing sumber daya manusia suatu wilayah. Kualitas penduduk yang bekerja dapat dilihat dari kelompok umur dan tingkat pendidikan. Seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, berimbas pada pergeseran komposisi angkatan kerja menurut umur. Program wajib belajar 9 tahun telah menggeser angkatan kerja usia muda lebih banyak yang bersekolah, dampaknya mengurangi proporsi tenaga kerja usia muda.

Semakin tinggi tingkat pendidikan tenaga kerja dapat diasumsikan kualitas tenaga kerja tersebut semakin baik, karena semakin tinggi tingkat pendidikan diharapkan kemampuan dan keterampilan mereka akan bertambah. Dengan meningkatnya kemampuan dan keterampilan, maka nilai tambah sebagai imbalan yang diperoleh akan semakin meningkat sehingga dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan mereka.

Tabel II.53
Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang Bekerja menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2017-2021

No	Tingkat Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD ke Bawah	443.488	477.106	482.844	493.889	491.456
		(28,79)	(29,43)	(28,51)	(29,18)	(28,57)
2	SMP	236.959	260.843	273.257	267.721	260.789
		(15,38)	(16,09)	(16,14)	(15,82)	(15,16)
3	SMA/SMK	593.161	609.994	659.047	643.105	666.878
		(38,50)	(37,63)	(38,92)	(37,99)	(38,76)
4	Diploma I/II/III	68.636	64.291	57.174	64.507	64.906
		(4,45)	(3,97)	(3,38)	(3,81)	(3,77)
5	Universitas/DI V	198.431	208.735	221.159	223.574	236.332
		(12,88)	(12,88)	(13,06)	(13,21)	(13,74)
Kalimantan Timur		1.540.675	1.620.969	1.693.481	1.692.796	1.720.361
		(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Bila dilihat dari pendidikan yang ditamatkan, ternyata penduduk yang bekerja di Kalimantan Timur persentase terbesar adalah pendidikan SMA/SMK dan persentase terkecil adalah tamatan Diploma I/II/III. Masih tingginya proporsi penduduk pada kelompok tamatan SD ke bawah untuk usia bekerja perlu menjadi perhatian serius oleh Provinsi Kalimantan Timur, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di daerah ini.

Pada tahun 2021 persentase penduduk bekerja dengan pendidikan SD ke bawah tercatat 28,57 persen menurun dibanding tahun 2020 yang mencapai 29,18 persen. Sementara Persentase penduduk yang bekerja dengan latar belakang pendidikan lulus Diploma I/II/III sekitar 3,81 persen menurun dibandingkan pada tahun 2021 yang mencapai 3,77 persen.

Tabel II.54
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tinggi berdasar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2019

No	KAB/KOTA	SMA/SMK			Diploma/Universitas		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Paser	34.244	35.740	39.940	15.981	16.325	14.888
		29,67	27,69	30,38	13,85	12,65	11,32
2	KUBAR	18.598	19.590	22.592	6.070	7.601	8.553
		28,31	26,97	32,80	9,24	10,46	12,42
3	KUKAR	121.146	119.976	128.560	38.307	44.946	43.730
		37,76	35,60	36,18	11,94	13,34	12,31
4	KUTIM	56.497	60.335	70.942	22.272	20.426	21.588
		35,70	35,52	39,91	14,07	12,02	12,15
5	Berau	34.925	36.398	40.825	11.843	11.184	13.557
		36,45	35,50	38,76	12,36	10,91	12,87
6	PPU	19.086	20.372	20.077	6.661	7.691	5.585
		29,20	28,81	28,57	10,19	10,88	7,95
7	MAHULU	4.172	4.371	3.589	1.522	1.697	1.047
		32,18	30,89	28,22	11,74	11,99	8,23
8	Balikpapan	123.119	131.097	146.838	71.439	70.634	60.319
		46,01	46,77	48,79	26,70	25,20	20,04
9	Samarinda	160.685	157.910	165.736	80.294	79.300	98.779
		43,37	42,80	41,10	21,67	21,49	24,50
10	Bontang	20.689	36.718	37.090	12.678	15.905	16.102
		30,34	50,27	47,00	18,59	21,78	20,41

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Bontang memiliki lebih banyak Pekerja yang lulusan SMA/SMK dan Diploma/Perguruan Tinggi yang dimana pada tahun 2019 mencapai 48,79 persen di Kota Balikpapan, 41,10 persen di Kota Samarinda dan 47 persen di Kota Bontang lulusan SMA/SMK. Dengan tingginya pekerja lulusan SMA/SMK di Kota tersebut diharapkan kualitas tenaga kerja tersebut semakin baik, sehingga dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan mereka.

Di Provinsi Kalimantan Timur, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 63,75 persen pada tahun 2017 menjadi 65,50 persen pada tahun 2020. Namun tahun 2021 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sedikit mengalami

penurunan sebesar 0,01 persen mencapai 65,49 persen. Hal ini dimungkinkan karena terjadinya pergeseran penduduk angkatan kerja menjadi penduduk bukan angkatan kerja, baik yang sekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan yang lainnya. Selain itu, penurunan ini juga bisa disebabkan oleh penimbangnya, yaitu jumlah penduduk yang tumbuh melebihi pertumbuhan angkatan kerja.

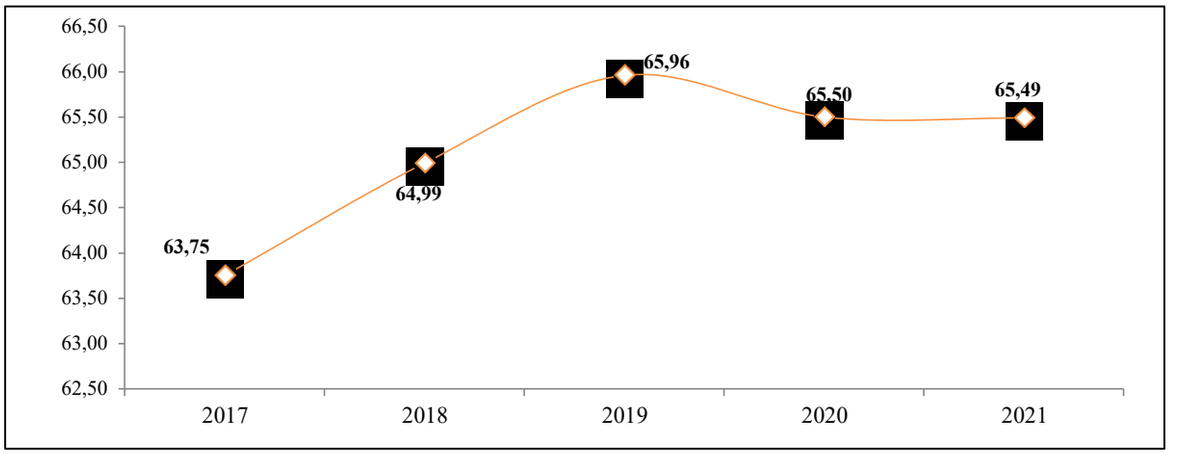

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.53
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2017-2021

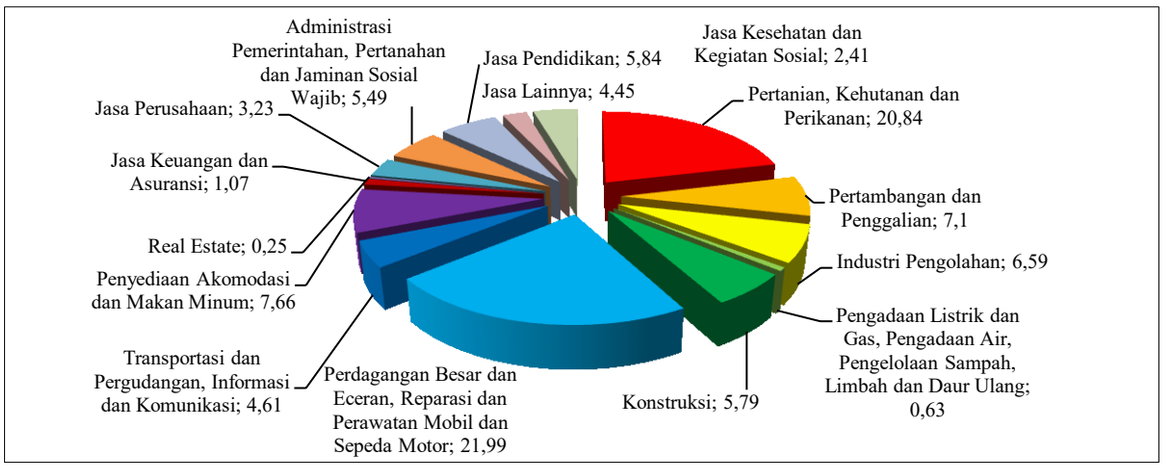

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.54
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Pekerjaan Utama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 (%)

Tahun 2021, penduduk bekerja di Kalimantan Timur memiliki pekerjaan yang terbagi dalam 17 (tujuh belas) kategori sektor lapangan usaha seperti yang terlihat pada gambar di atas. Sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur bekerja pada sektor perdagangan besar dan

eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor mencapai 21,99 persen diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 20,84 persen, dan yang paling sedikit bekerja di sektor real estate mencapai 0,25 persen.

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

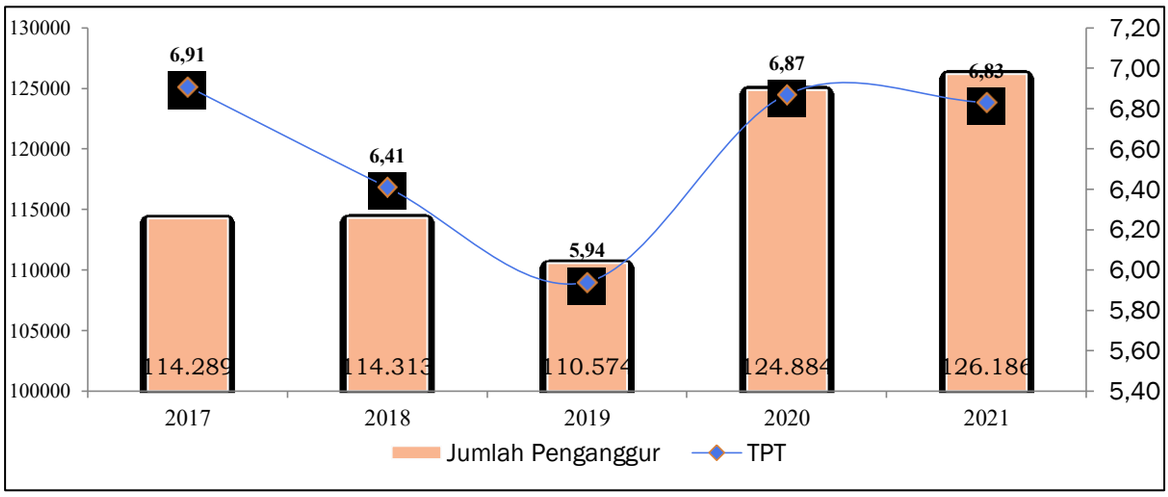

Gambar II.55
Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2017-2021 (persen)

Penduduk yang tidak bekerja (pengangguran) di Provinsi Kalimantan Timur semakin menurun di setiap tahunnya. Akan tetapi pada tahun 2020,

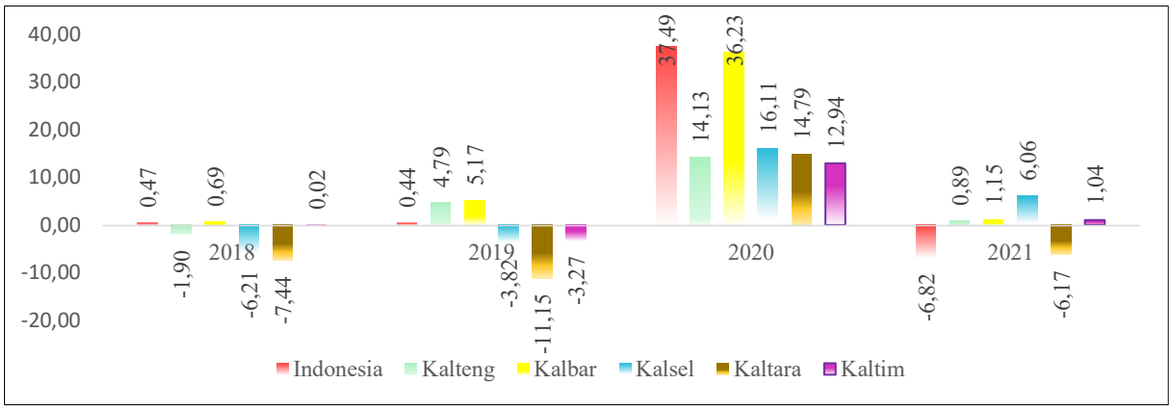

tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan yang mencapai 6,87 persen dimana angka ini meningkat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 5,94 persen. Peningkatan ini diperkirakan akibat dampak dari Pandemi COVID-19 yang mulai mewabah di dunia pada akhir tahun 2019 dan mulai terasa dampaknya di Indonesia khususnya di Kalimantan Timur pada awal tahun 2020 terutama pada sektor transportasi dikarenakan beberapa negara memberlakukan pembatasan berskala besar bahkan ada yang memberlakukan karantina wilayah. Sehingga berdampak pada pengurangan tenaga kerja pada sektor Transportasi dan Pergudangan serta sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, *real estate* dan jasa perusahaan. Namun di tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka sedikit mengalami penurunan mencapai 6,83 persen akan tetapi secara jumlah absolut jumlah pengangguran mengalami peningkatan, penurunan TPT terjadi dikarenakan di tahun 2021 pandemi COVID-19 sudah mulai berkurang dan banyaknya masyarakat yang telah di vaksin serta pemulihan ekonomi mulai membaik.

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.56
Pertumbuhan Jumlah Pengangguran Regional Kalimantan dan Indonesia

Pada grafik diatas terlihat bahwa jumlah pengangguran pada tahun 2020 mengalami peningkatan baik di regional Kalimantan dan Nasional. Sedangkan pada tahun 2021 yang mengalami pengurangan jumlah pengangguran hanya Provinsi Kalimantan Utara sedangkan kalimantan yang lain mengalami peningkatan, hal ini tergambarkan dari pertumbuhan jumlah pengangguran.

Tabel II.55
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021 (persen)

No	KAB/KOTA	2017	2018	2019	2020	2021
1	Paser	5,54	5,00	4,55	4,52	5,70
2	KUBAR	5,87	4,86	5,08	4,97	5,14
3	KUKAR	5,72	5,96	5,98	5,70	5,66
4	KUTIM	4,61	5,93	5,53	5,45	5,35
5	Berau	6,45	5,62	5,08	5,08	5,82
6	PPU	4,75	4,76	6,26	6,22	2,95
7	MAHULU	9,05	4,17	3,69	3,49	3,14
8	Balikpapan	10,39	9,52	7,29	9,00	8,94
9	Samarinda	6,19	6,16	5,87	8,26	8,16
10	Bontang	12,44	9,61	9,19	9,46	9,92

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2021 terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka pada kabupaten/kota di Kalimantan Timur paling tinggi terdapat di Kota Bontang sebesar 9,92 persen, Kota Balikpapan sebesar 8,94 persen, dan Kota Samarinda sebesar 8,16 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terendah ditorehkan oleh Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 2,95 persen. Jika dilihat dari perbandingan regionalnya, maka Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Timur tahun 2021 masih

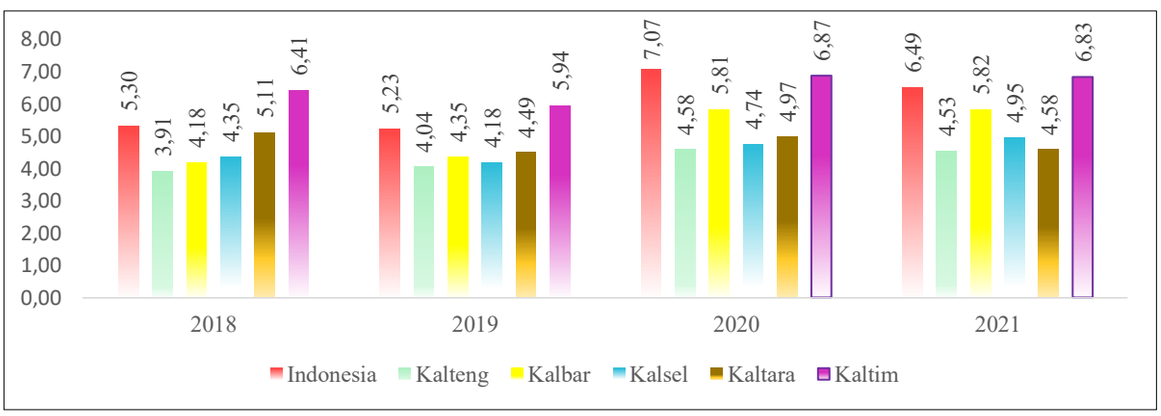

menjadi yang tertinggi diantara provinsi lainnya di regional Kalimantan dan berada di atas tingkat pengangguran terbuka nasional sebesar 6,49 persen. Hal ini memerlukan perhatian lebih lanjut, jika mengingat Kalimantan Timur sebagai penghasil nilai tambah ekonomi terbesar di Regional Kalimantan.

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.57
Tingkat Pengangguran Terbuka Regional Kalimantan dan Indonesia



Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.58
Peta Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Timur Tahun 2021

Ketenagakerjaan juga merupakan salah satu aspek yang paling terdampak akibat Pandemi COVID-19. Pada tingkat global diperkirakan sekitar 195 juta orang akan kehilangan pekerjaan akibat pandemi ini. Upaya mengatasi pengangguran melalui peningkatan kapasitas masyarakat terutama pada sektor-sektor yang dapat bertahan dan bahkan berkembang ditengah Pandemi COVID-19. Hal ini yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu Penganggur, Bukan Angkatan kerja yang pernah berhenti bekerja pada Februari-Agustus 2020, Penduduk yang bekerja dengan status sementara tidak bekerja dan Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja. Komponen ketiga dan keempat merupakan dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja, sedangkan komponen pertama dan kedua merupakan dampak pandemi COVID-19 bagi mereka yang berhenti bekerja.

Tabel II.56
Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal Provinsi Kalimantan Timur, Agustus 2021

Komponen	Jenis Kelamin		Daerah Tempat Tinggal		Total
	Laki-Laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
Pengangguran2 Karena	20.726	6.355	25.731	1.350	27.081

COVID-19					
Bukan Angkatan Kerja (BAK) 3 Karena COVID-19	3.107	6.742	9.511	338	9.849
Sementara Tidak Bekerja Karena COVID-19	12.937	7.149	16.013	4.073	20.086
Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena COVID-19	147.334	96.844	178.181	65.997	244.178
Total	184.104	117.090	229.436	71.758	301.194
Persentase terhadap Penduduk Usia Kerja (PUK)	12,52	8,68	12,10	7,77	10,68

Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2021

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa dari penduduk usia kerja yang mencapai 2,82 juta, terdapat 301 ribu orang yang terdampak COVID-19 atau 10,68 persen. Secara total, jumlah laki-laki yang terdampak COVID-19 lebih besar 1,6 kali lipat dibandingkan perempuan. Penduduk usia kerja yang terdampak di perkotaan sebesar 12,10 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan, yakni 7,77 persen.

Tabel II.57
Data Pekerja Dampak Pandemik COVID-19 Tahun 2020

No	KAB/KOTA	Pekerja Ter-PHK		Pekerja Yang Dirumahkan		Total
		Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja	
1	Paser	2	4	4	29	33
2	KUBAR	8	13	0	0	13
3	KUKAR	4	314	6	1.517	1.831
4	KUTIM	0	0	1	54	54
5	Berau	0	0	3	71	71
6	PPU	0	0	0	0	0
7	MAHULU	0	0	0	0	0
8	Balikpapan	19	1.091	60	5.698	6.789
9	Samarinda	12	420	21	892	1.312
10	Bontang	73	101	125	243	344
Jumlah		118	1.943	220	8.504	10.447

Sumber: DISNAKERTRANS Provinsi KALTIM, 2021

Jumlah tenaga kerja yang yang di PHK pada tahun 2020 sebanyak 1.943 orang dengan jumlah perusahaan 118 yang melakukan PHK terhadap pekerjanya dan Kota Balikpapan adalah dengan jumlah pekerja ter-phk tertinggi dibanding kabupaten/kota lainnya. Jumlah pekerja yang dirumahkan pada tahun 2020 sebanyak 8.504 pekerja dari 220 perusahaan yang merumahkan pekerjanya dan Kota Balikpapan dengan jumlah pekerja yang dirumahkan tertinggi sebanyak 5.698 pekerja.

Salah satu cara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur untuk mengurangi jumlah pengangguran adalah dengan mendata para pencari kerja ke dalam *database* Disnaker, dengan cara para pencari kerja membuat Kartu Tanda Pencari Kerja atau Kartu Kuning yang didalamnya tercantum nomor pencari kerja, nomor kartu identitas atau KTP dan legalisasi dari Disnaker setempat. Lamaran kerja serta berkas yang diserahkan pencari kerja ke Disnaker akan dimasukkan kedalam *database* pencari kerja. *Database* ini nantinya akan dikelompokkan menurut pendidikan dan keahlian. Perusahaan yang mencari pekerja ke Disnaker akan diberikan data pencari kerja sesuai dengan pendidikan dan keahlian yang dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja juga memiliki pusat informasi lowongan pekerjaan serta perusahaan yang sedang membutuhkan pekerja.

Perkembangan persentase penempatan tenaga kerja melalui *database* kartu kuning masih rendah yaitu dibawah 30 persen, namun pada tahun 2021 mencapai 36,42 persen mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 18,03 persen. Salah satu faktor penyebab masih rendahnya persentase penempatan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Timur adalah hanya sebagian pencari kerja yang melaporkan kembali apabila telah diterima bekerja dan sebagian lagi tidak melapor.

Tabel II.58
Persentase Penempatan Tenaga Kerja
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021 (persen)

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pencari Kerja yang Mendaftar (orang)	45.834	49.552	26.148	30.719	22.856
2	Pencari Kerja yang ditempatkan (orang)	10.365	11.266	7.690	5.538	3.531
3	Pencari Kerja yang Belum ditempatkan (orang)	31.879	26.969	36.158	22.819	19.325
4	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	22,61	22,74	29,41	18,03	15,45

Sumber: DISNAKERTRANS Provinsi KALTIM, 2022

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, maka terlihat capaian tertinggi persentase penempatan tenaga kerja pada tahun 2021 adalah Kota Samarinda mencapai 33,59 persen. Capaian yang cukup tinggi kemudian diikuti oleh Kabupaten Berau yang mencapai 29,29 persen dan Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 25,64 persen.

Tabel II.59

Persentase Penempatan Tenaga Kerja menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

No	KAB/KOTA	Pencari Kerja Terdaftar (Orang)	Penempatan Pencari Kerja (Orang)	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)
1	Paser	504	11	2,18
2	KUBAR	3.603	122	3,39
3	KUKAR	3.018	89	2,95
4	KUTIM	-	-	-
5	Berau	6.105	1.788	29,29
6	PPU	433	111	25,64
7	MAHULU	-	-	-
8	Balikpapan	357	70	19,61
9	Samarinda	2.441	820	33,59
10	Bontang	5.897	520	8,82

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

G. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

1) Pelayanan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya memberikan pelayanan prima untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan berbagai fasilitas dan pelayanan pada setiap bidang pembangunan. Hasil dari berbagai program dan kegiatan terkait pelayanan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Survei Kepuasan Masyarakat pada perangkat daerah di Kalimantan Timur pada tahun 2021 meningkat di angka sementara 83,44 dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 82,00. Hal ini mengindikasikan bahwa ada kemajuan dalam kualitas pelayanan publik di Kalimantan Timur walaupun belum stabil sehingga terjadi fluktuasi pada angka IKM.

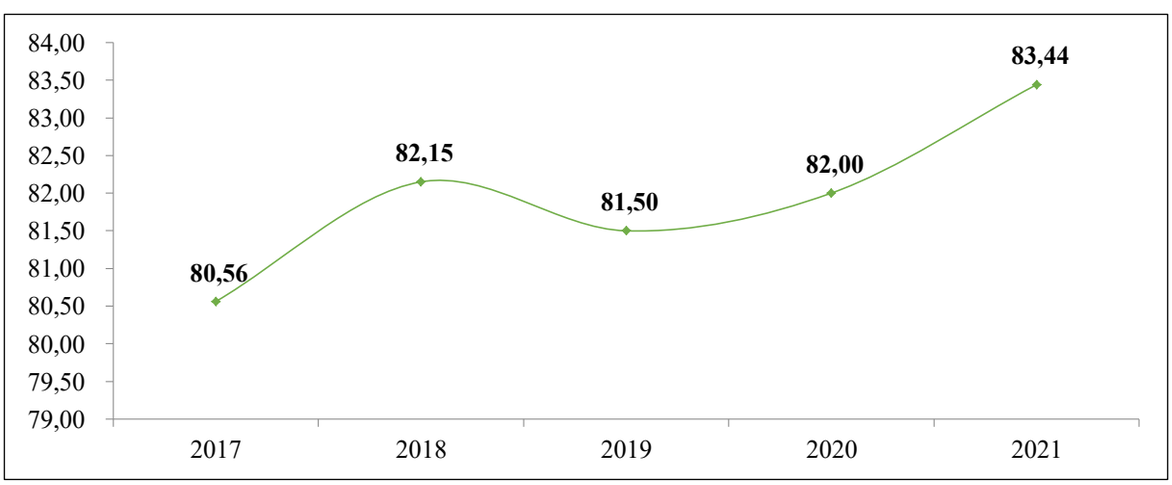

Sumber: Biro Organisasi Provinsi KALTIM

Gambar II.59
Survei Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2017-2021

2) Keuangan Daerah

Urusan keuangan merupakan salah satu urusan yang paling penting karena menjadi penopang penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu indikator untuk mengukur keuangan daerah adalah kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal merupakan gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah. Indeks Kapasitas Fiskal diperoleh dengan membandingkan kapasitas fiskal suatu daerah terhadap kapasitas fiskal seluruh daerah. Capaian indeks kapasitas fiskal Provinsi Kalimantan Timur termasuk kategori tinggi.

Kalimantan Timur berupaya untuk mencapai kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena dana perimbangan cenderung semakin menurun. Namun peningkatan PAD tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Badan Usaha Milik Daerah yang ada belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, Kalimantan Timur perlu upaya keras untuk melakukan transformasi sumber-sumber PAD lainnya secara bertahap, melalui peningkatan kapasitas dan kinerja BUMD, serta pengembangan nilai tambah sektor ekonomi non migas dan batu bara yang berkelanjutan seperti industri pengolahan, pariwisata, perikanan dan pertanian.

Kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui Derajat Kemandirian Fiskal Daerah/Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD). DOFD dihitung melalui perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan dalam APBD pada tahun yang sama tidak termasuk transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal, nilai DOFD Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam kategori sangat baik karena lebih dari 50 persen. Rata-rata DOFD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016-2021 adalah 52,99 persen. Kondisi ini menunjukkan kemandirian keuangan pemerintah daerah cukup tinggi untuk membiayai pembangunan daerah.

Tabel II.60

Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2021

Tahun	PAD (Ribu Rupiah)	Total Pendapatan	DOF (Persen)
2016	4.031.514.706,41	7.987.877.780,77	50,47
2017	4.588.752.896,23	8.154.749.005,92	56,27
2018	5.800.270.286,00	10.669.542.802,00	54,36
2019	6.555.852.805,00	11.775.086.446,00	55,68
2020	4.116.573.388,00	8.763.476.903,00	46,97
Rata-rata	5.018.592.816,33	9.470.146.587,54	52,99

Sumber: BAPENDA Provinsi KALTIM, 2021

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2011 dan pada Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Timur berhasil mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedelapan kalinya, setelah sebelumnya opini WTP diraih pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020. Sempat terjadinya penurunan status opini BPK pada tahun 2013, hal ini menjadi “pekerjaan rumah” bagi pengelolaan keuangan daerah agar meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap setiap penggunaan keuangan daerah. Dalam hal integritas kinerja, Provinsi Kalimantan Timur memperoleh peringkat keempat dari lima provinsi yang memiliki Skor Integritas Tertinggi secara nasional.

3) Akuntabilitas

Salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah prinsip akuntabilitas. Sistem akuntabilitas yang baik menunjukkan berjalannya sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan, hingga evaluasi dan pelaporan dengan baik. Opini BPK merupakan salah satu indikator penting untuk melihat capaian akuntabilitas perencanaan, penggunaan, dan pelaporan anggaran suatu daerah.

Laporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur semakin membaik dan telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2012 sampai 2020. Meskipun demikian, Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan aset daerah terutama terkait dengan belum optimalnya identifikasi dan pengelolaan asset-asset daerah. Hal ini terjadi karena

adanya pelimpahan wewenang berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Selain itu, persoalan lain juga berkaitan dengan belum seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki status opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian, pada tahun 2012 hanya Kabupaten Kutai Kartanegara yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 8 Kabupaten/Kota masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Kabupaten Mahakam Ulu masih belum mendapatkan status opini dari BPK dan pada tahun 2020 seluruh Kabupaten Kota telah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Selain opini BPK, peringkat EKPPD juga menjadi salah satu gambaran akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peringkat EKPPD atau Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan penilaian terhadap dokumen LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) untuk melihat kualitas pelaksanaan otonomi daerah. Peringkat EKPPD Provinsi Kalimantan telah mencapai status skor sangat tinggi dengan peringkat ke tiga nasional. Tingkat akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga dapat dilihat melalui hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan Evaluasi AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 mendapat predikat BB dengan skor 77,82. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur semakin meningkat. Untuk meningkatkan kinerja akuntabilitas pemerintah daerah, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan nilai SAKIP, yaitu meningkatkan konsistensi penentuan indikator perencanaan program dan kegiatan di setiap perangkat daerah.

Tugas dari Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPK adalah pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya. Untuk mengetahui kematangan penyelenggaraan SPIP pada perangkat daerah perlu adanya penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada perangkat daerah. Capaian Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 berada pada Level 3 atau Tingkat Terdefinisi yang artinya pada tingkat ini, Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan pratik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi

yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

H. Lingkungan

Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi oleh sumber daya alam tak terbarukan dengan pengelolaan yang bersifat eksploitatif dan banyak menyebabkan permasalahan kerusakan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator yang digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Secara umum, IKLH Kalimantan Timur lebih tinggi dibandingkan dengan IKLH Nasional.

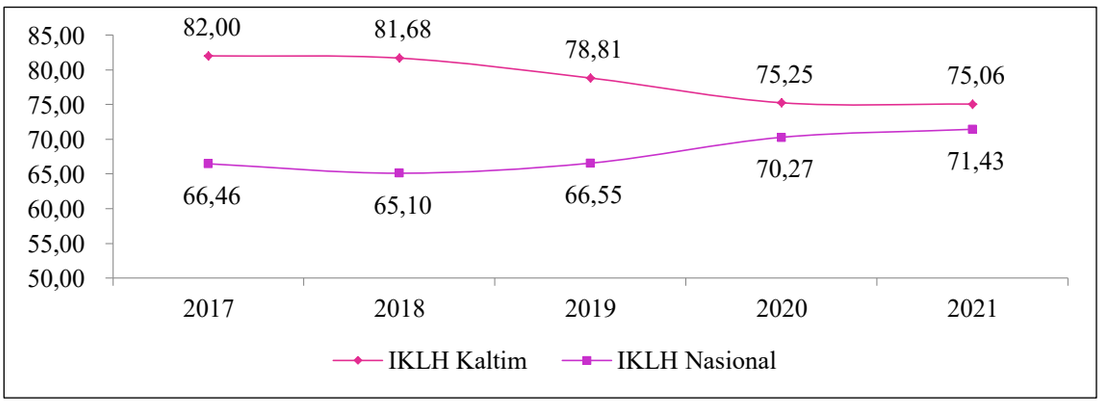

Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.60
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2017-2021

IKLH Kaltim dari tahun 2017 - 2018 mendapat predikat sangat baik (IKLH > 80) yang dipengaruhi oleh capaian indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan yang juga meningkat. Namun, pada tahun 2019, IKLH Kalimantan Timur mengalami penurunan dari 81,68 di tahun 2018 menjadi 78,71 (predikat baik, 70 < IKLH ≤ 80) dan terus menurun pada tahun 2021 menjadi 75,06. Menurunnya IKLH tahun 2021 dapat dipengaruhi oleh penambahan indeks baru yaitu Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan penurunan Indeks Kualitas Air Sungai.

Selanjutnya, Kaltim telah dipilih sebagai lokasi Program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan melalui *Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund* (FCPF-CF) pada Oktober 2015. Program FCPF *Carbon Fund* dilaksanakan pada tahun 2020-2024 di seluruh Kaltim

(12,7 juta hektar) untuk mempertahankan 6,5 juta hektar kawasan berhutan. Apabila dilihat dari pengurangan emisi gas rumah kaca, Provinsi Kaltim terus berusaha untuk melakukan upaya-upaya penurunan emisi.

Tabel II.61
Angka Penurunan Emisi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Penurunan Emisi (juta ton co2eq)	54,12	42,14	34,65	24,41	20,89

Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2021

I. Perhubungan

Gambaran umum mengenai pelayanan perhubungan merefleksikan tingkat akses dan kualitas transportasi di suatu daerah. Bidang urusan ini memiliki fungsi utama untuk memperlancar konektivitas antar wilayah sehingga mempercepat arus mobilisasi orang/barang/jasa di suatu wilayah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan layanan transportasi dibagi atas beberapa aspek yaitu transportasi darat, laut, sungai, danau, penyeberangan dan udara. Akan tetapi, dalam konteks pembagian kewenangan pemerintahan sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah di level provinsi berkaitan dengan urusan perhubungan lebih ditekankan pada pelayanan perhubungan darat, laut, sungai, danau dan angkutan penyeberangan.

Jumlah Penumpang yang terlayani dan jumlah barang yang diangkut terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Pada tahun 2019 jumlah orang yang terlayani sebesar 10.721.656 orang penumpang, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 7.150.906 orang penumpang sehingga menjadi 3.570.750 orang penumpang, kemudian mengalami peningkatan kembali sehingga menjadi 4.677.228 orang penumpang. Pada tahun 2019 jumlah barang yang diangkut sebesar 341.529.297 ton, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 47.041.900 ton sehingga menjadi 294.487.397 Ton. Hal ini disebabkan beberapa negara telah melakukan pembatasan penerbangan untuk mencegah wabah pandemi COVID-19 masuk ke negara tersebut. Pada tahun 2021, seiring dengan mulai pulihnya perekonomian dikarenakan telah berkurangnya pandemi Covid-19 dan telah

dilaksanakannya vaksinasi sehingga jumlah penumpang dan barang yang diangkut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 4.677.228 orang dan 323.233.820 ton.

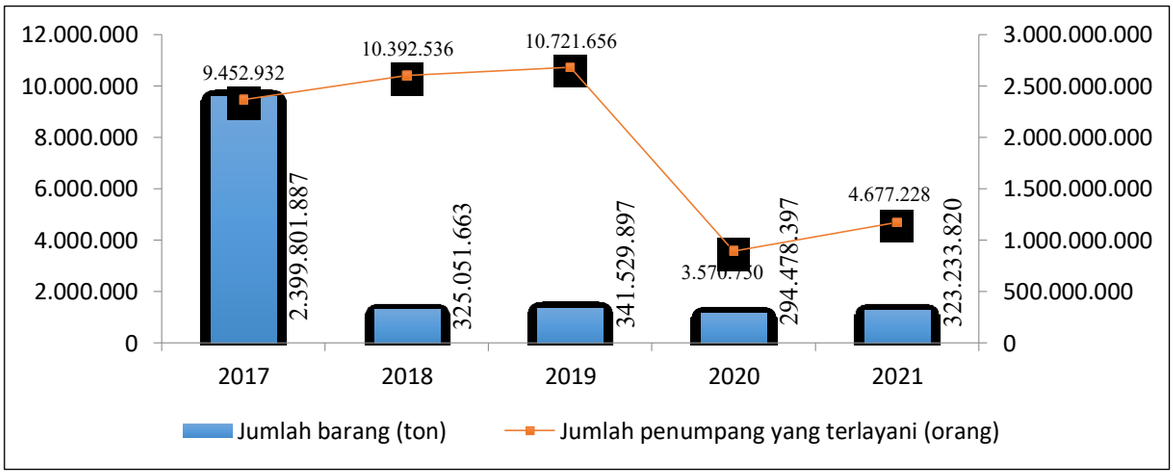

Sumber: DISHUB Provinsi KALTIM, 2022

Gambar II.61
Jumlah Penumpang yang terlayani dan Jumlah Barang
Tahun 2017-2021

Ketersediaan prasarana perhubungan laut juga sudah cukup baik, upaya pengembangan pelabuhan terus berjalan sampai saat ini melalui pengembangan pelabuhan laut yaitu Pelabuhan Terminal Peti Kemas Balikpapan dan Pelabuhan Maloy.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki salah satu Bandar Udara Internasional terbesar di Indonesia yaitu Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan yang terletak di Kota Balikpapan, Bandara Kalimarau di Berau dan Bandara APT Pranoto di Samarinda. Bandara-bandara tersebut mampu melayani penerbangan udara menggunakan pesawat Boeing berkapasitas besar. Selain itu, aktivitas transportasi udara di Provinsi Kalimantan Timur juga ditopang oleh 6 bandara lokal. Saat ini terdapat 13 bandara yang beroperasi yang mampu melayani hampir seluruh kecamatan di dalam provinsi. Meskipun kuantitas bandara dan maskapai tidak mengalami perubahan sejak tahun 2017, namun kebutuhan masyarakat terhadap akses pelayanan perhubungan udara terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan kapasitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Upaya pemerataan pembangunan melalui peningkatan konektivitas transportasi udara khususnya di perbatasan telah dilakukan secara serius

dan komprehensif. Pembangunan bandara dengan panjang runway 1.600 m telah dilakukan di kawasan perbatasan yaitu kecamatan Data Dawai dan di Pulau kecil terluar yaitu Pulau Maratua. Selain itu, telah direncanakan pembangunan bandara perintis yang bisa melayani pesawat ringan/kecil di Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Pertanian

1) Pertanian Tanaman Pangan

Swasembada beras merupakan status yang diupayakan terwujud di Provinsi Kalimantan Timur sejak lama, tetapi belum dapat dicapai hingga saat ini. Produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan pada lahan kering (ladang) dan lahan basah (sawah). Berdasarkan dukungan teknologi, agro-ekosistem sawah hingga saat ini mendapat dukungan teknologi lebih maju dibandingkan dengan ladang sehingga produksi padi sawah lebih banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan, meskipun produksi padi masih belum mencapai swasembada untuk tingkat Provinsi dan masih di bawah target produksi yang ditetapkan.

Secara umum, terjadi penurunan produktivitas padi selama lima tahun terakhir dimana pada tahun 2017 mencapai 4,24 ton per hektar dan menurun hingga 3,56 ton/ha. Selain karena penurunan produksi, menurunnya produktivitas ini juga ternyata dikarenakan fluktuasinya luas panen secara umum. Beberapa upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi padi salah satunya adalah pemberian bantuan saprodi pertanian kepada petani dan Kegiatan Gerakan Tanam yang menjadi motivasi bagi petani untuk menanam padi. Namun program tersebut belum terlalu efektif untuk mewujudkan swasembada pangan.

Tabel II.62
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2017	94.394	400.102	4,24
2018	64.961	262.774	4,04
2019	69.708	253.818	3,64
2020	73.569	262.436	3,57
2021	66.269	244.678	3,69

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Kontribusi sektor pertanian dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2020, kontribusi pertanian mencapai 8,77 persen meningkat dibanding tahun 2020 yang mencapai 7,91 persen. Peningkatan ini tentu saja karena terdampaknya penurunan Kategori unggulan lainnya seperti pertambangan dan penggalian akibat pandemi COVID-19. Sedangkan kategori pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kategori yang minim terdampak dari dampak negatif pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 untuk kontribusi pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 8,48 persen menurun bila dibandingkan tahun sebelumnya.

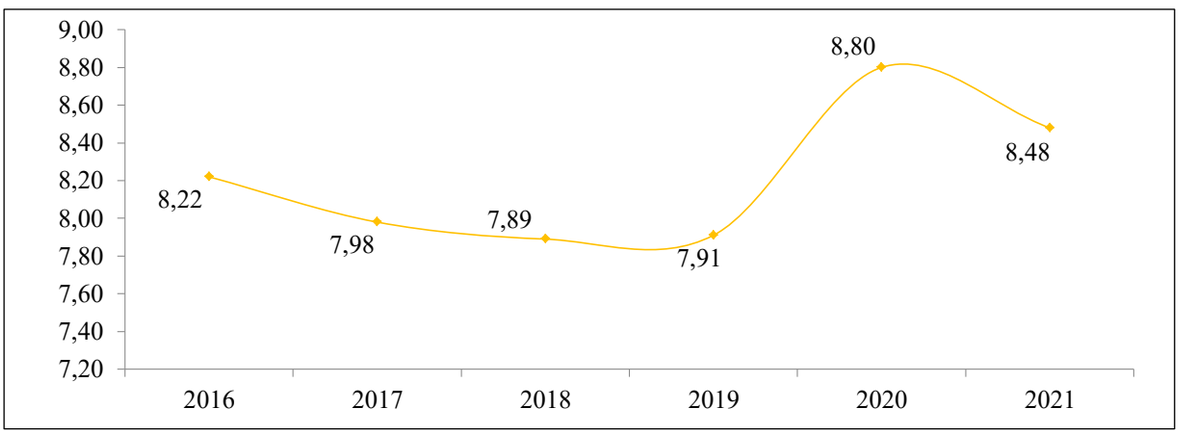

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.62
Kontribusi Sektor Pertanian
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021 (%)

Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan di periode tahun 2017-2021, namun mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 3,91 persen dan pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,12 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh kinerja sub sektor kehutanan dan penebangan kayu yang terkontraksi lebih dalam di tahun 2020 menjadi -7,92 persen. Pada tahun 2021 Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian masih mengalami kontraksi sebesar 0,26 persen sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

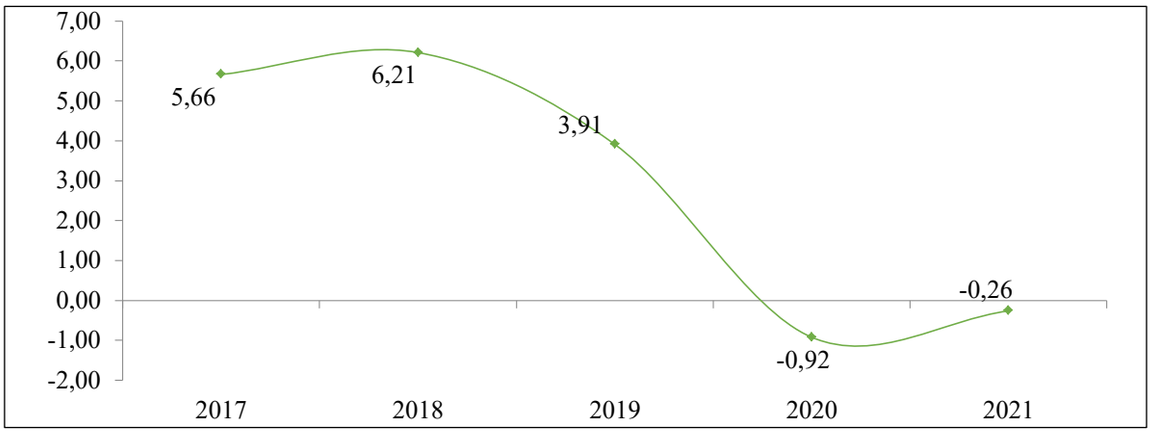

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.63
Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021 (%)

2) Perkebunan

Provinsi Kalimantan Timur memiliki komoditas perkebunan unggulan yang memberikan dampak cukup signifikan dalam pembentukan perekonomian daerah. Komoditas perkebunan yang cukup mendominasi dan menarik banyak investasi luar daerah adalah perkebunan kelapa sawit yang hingga saat ini luas tanamnya mencapai 1,39 juta ha dan memiliki produksi mencapai 17,28 juta ton. Selain itu, komoditas karet juga cukup memberikan sumbangsih dalam perekonomian daerah dengan produksi karet yang cukup tinggi mencapai 68,46 ribu ton pada tahun 2021. Berikut produktivitas komoditas perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel II.63
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Perkebunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

No.	Tahun	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1.	Karet	118.626	68.456	1,28
2.	Kelapa	20.018	10.170	0,63
3.	Kopi	1.488	167	0,25
4.	Lada	8.221	4.173	0,72
5.	Kakao	7.617	2.181	0,51
6.	Kelapa Sawit	1.392.965	17.277.404	16,77

Sumber: DISBUN Provinsi KALTIM, 2022

Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki perkebunan Kelapa Sawit dan Kabupaten Kutai Timur memiliki produksi terbanyak dengan jumlah produksi sebanyak 6,97 juta ton pada tahun

2021, Kabupaten Kutai Barat merupakan penghasil jenis karet sebesar 30,70 Ribu Ton, sedangkan Kab Kutai Kartanegara menjadi kabupaten dengan produksi lada terbesar dengan jumlah produksi 2.432 ton dan Kabupaten Paser menjadi kabupaten dengan penghasil kelapa terbesar dibanding kabupaten/kota lain dengan jumlah produksi sebesar 3.283 ton.

Tabel II.64
Produksi Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur (ton), Tahun 2021

No	KAB/KOTA	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao	Lada
1	Paser	2.014.529	3.283	8.334	72	3	15
2	KUBAR	743.193	208	30.703	21	20	5
3	KUKAR	2.959.954	2.355	14.811	7	39	2.432
4	KUTIM	6.972.556	1.060	1.789	51	1.414	128
5	Berau	4.144.842	1.569	6.950	13	411	457
6	PPU	305.680	1.021	1.498	2	2	1.019
7	MAHULU	127.323	5	-	-	288	-
8	Balikpapan	487	480	4.066	1	1	104
9	Samarinda	8.719	178	305	-	3	13
10	Bontang	121	11	-	-	-	-

Sumber: DISBUN Provinsi KALTIM, 2022

3) Kehutanan

Potensi hutan yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur sangat besar. Luas hutan di Kalimantan Timur mencapai 8,3 juta hektar yang terdiri dari hutan produksi konversi, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan lindung dan KSA/KPA. Pemanfaatan hasil hutan kayu yang dilakukan berasal dari hutan alam dan tanaman. Produksi hasil hutan kayu terus mengalami peningkatan dari 4,3 juta m^3 pada tahun 2017 menjadi 5,2 juta m^3 di tahun 2019 dan pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan menjadi 4,8 juta m^3. Tidak hanya hasil hutan kayu, produksi hasil hutan bukan kayu juga mengalami peningkatan yang signifikan yakni pada tahun 2017 sebesar 6,9 ton menjadi 1.428,65 ton di tahun 2019 dan menurun menjadi 864,9 ton di tahun 2020. Walaupun demikian, masih banyak ditemui lahan kritis di Kalimantan Timur. Sampai dengan tahun 2020 lahan kritis di Kalimantan Timur adalah sebesar 113.015 hektar dan lahan sangat kritis seluas 79.900 hektar. Oleh karena itu, upaya penurunan lahan kritis masih terus ditingkatkan melalui rehabilitasi hutan dan lahan.

Tabel II.65
Data Lahan Kritis Menurut Tingkat Kekritisan Lahan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Fungsi Kawasan	Sangat Kritis	Kritis	Agak Kritis	Potensial Kritis	Tidak Kritis	Total
HPK	536,18	2.242,30	50.847,26	37.748,15	29.333,72	120.707,61
HPT	2.536,14	7.338,38	2.076.115,67	540.395,72	197.048,22	2.823.434,13
HP	72.494,93	60.437,52	1.668.892,82	800.749,59	416.283,11	3.018.857,98
HL	2.566,30	11.785,67	1.266.122,80	382.467,60	109.383,93	1.772.326,30
KSA	1.767,01	31.211,76	137.432,09	200.894,32	65.687,88	436.993,06
TOTAL	79.900,55	113.015,64	5.199.410,65	1.962.255,39	817.736,85	8.172.319,08

Sumber: Dinas Kehutanan KALTIM, 2021

Selain itu, dari sektor kehutanan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perhutanan sosial. Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dapat dikelola oleh masyarakat dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hutan. Perhutanan sosial di Kalimantan Timur pada tahun 2020 terdiri dari 5 (lima) skema, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemitraan dan Hutan Adat. Pada tahun 2020, perkembangan perhutanan sosial mencapai 74 unit dengan luas sebesar 189.974,75 hektar.

4) Perikanan

Kalimantan Timur memiliki wilayah perairan yang sangat luas baik laut seluas 3,99 juta Ha maupun perairan darat dengan potensi perikanan yang juga sangat besar. Kondisi perubahan iklim, kualitas sumber daya manusia, dan kurangnya sarana prasarana penangkapan maupun budidaya menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap produksi perikanan.

Produksi perikanan Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Dalam pencapaian produksi perikanan di Kalimantan Timur masih ditemui permasalahan yang perlu mendapat perhatian yakni masih rendahnya kesadaran penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, belum optimalnya sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan, dan sistem Pemasaran.

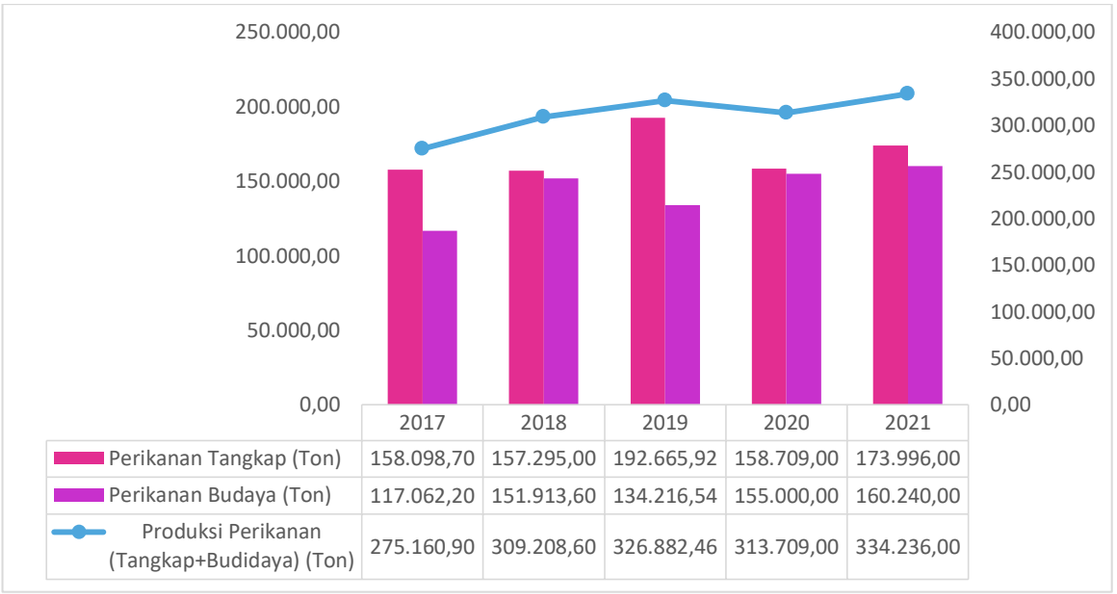

	2017	2018	2019	2020	2021
Perikanan Tangkap (Ton)	158.098,70	157.295,00	192.665,92	158.709,00	173.996,00
Perikanan Budaya (Ton)	117.062,20	151.913,60	134.216,54	155.000,00	160.240,00
Produksi Perikanan (Tangkap+Budidaya) (Ton)	275.160,90	309.208,60	326.882,46	313.709,00	334.236,00

Sumber: DKP Provinsi KALTIM, 2022 (diolah)

Gambar II.64
Produksi Perikanan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 – 2021

5) Peternakan

Peningkatan kuantitas dan kualitas peternakan terus dikembangkan untuk mendukung kelancaran usaha peternakan baik sarana produksi, pengolahan dan pemasaran sehingga dapat memenuhi kebutuhan lokal, populasi ternak di Provinsi Kalimantan Timur didominasi ternak ayam ras pedaging sebanyak 63,97 juta ekor, ayam kampung 4,65 juta ekor dan ayam ras petelur 1.102,99 ribu ekor. Disamping itu, terdapat populasi sapi potong sebanyak 120,45 ribu ekor dan babi sebanyak 82,98 ribu ekor yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

Tabel II.66
Populasi Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ekor), Tahun 2017-2021

No	Hewan	2017	2018	2019	2020	2021*)
1	Sapi Potong	119.123	117.504	119.485	119.974	120.446
2	Sapi Perah	107	110	91	87	94
3	Kambing	61.526	66.378	67.892	69.929	73.426
4	Domba	281	439	590	635	565
5	Babi	85.749	78.968	82.546	83.652	82.980
6	Kerbau	7.055	6.157	6.194	6.552	6.522
7	Kuda	91	97	102	95	97
8	Kelinci	15.005	14.189	8.859	10.830	11.044
9	Ayam Kampung	5.418.086	4.569.169	4.372.415	4.435.205	4.654.618
10	Ayam Ras Pedaging	66.268.201	66.672.445	67.886.566	59.402.832	63.971.068
11	Ayam Ras Petelur	822.533	1.055.432	853.693	1.218.994	1.102.995
12	Itik	219.149	248.978	254.683	254.749	247.956

**) Data Sementara, Sumber: DPKH Provinsi KALTIM, 2021*

Program pengembangan populasi sapi potong yang efisien dan berbasis sumber daya lokal sebagai upaya Provinsi Kalimantan Timur memenuhi kebutuhan daging sapi dalam daerah dan menjadi lumbung ternak sapi nasional. Untuk mendukung dan mencapai upaya tersebut diperlukan suatu program yang dapat dikembangkan di Provinsi Kalimantan Timur yaitu pengembangan peternakan berbasis *Mini Ranch*. *Mini Ranch* adalah sebuah model pengelolaan budidaya sapi pedaging/potong yang dilakukan di lahan pengembalaan yang telah ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya melalui berbagai perlakuan ilmiah. Pola ini mereduksi biaya produksi sehingga produknya memiliki keunggulan komperatif. Sapi-sapi ternak bisa dilepas bebas di kawasan eks lahan tambang dan perkebunan. Dengan program *Mini Ranch* ini diharapkan dapat membuat produksi dari sektor peternakan menjadi lebih baik lagi dan juga bisa membuat lahan-lahan bekas tambang menjadi lebih bermanfaat lagi.

Tabel II.67
Jumlah Miniranch di Provinsi Kalimantan Timur

No	KAB/KOTA	2019	2020	2021
1	Paser	1	2	3
2	KUBAR	1	2	3
3	KUKAR	-	3	5
4	KUTIM	2	-	4
5	Berau		1	5
6	PPU	1	2	3
7	MAHULU	-	2	-
8	Balikpapan	-	-	-
9	Samarinda	-	-	-
10	Bontang	-	-	1
Kalimantan Timur		5	12	24

Sumber: Siranch, DPKH Provinsi KALTIM, 2022

B. Energi Dan Sumber Daya Mineral

Ketenagalistrikan adalah infrastruktur dasar yang menjadi fondasi bagi kegiatan ekonomi di berbagai sektor potensial, khususnya industri. Kondisi ketenagalistrikan di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren yang semakin membaik, namun tetap memerlukan upaya peningkatan agar akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan dapat berjalan dengan optimal. Dari total 1,24 juta KK di Kalimantan Timur, 85,28 persen keluarga yang mendapatkan akses listrik PLN dan 6,70 persen keluarga yang mendapatkan akses listrik non-PLN. Dan sampai dengan tahun 2021 masih

terdapat 99.715 KK yang belum berlistrik. Pada tahun 2021, rasio elektrifikasi Kalimantan Timur mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni dari 90,21 persen pada tahun 2020 menjadi sebesar 91,98 persen.

Dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi agar menjadikan Kalimantan Timur sebagai daerah berdaya saing tinggi, maka sektor energi listrik ini berperan sebagai salah satu kontributor yang cukup besar. Dalam rangka mendukung perwujudan pertumbuhan ekonomi dengan salah satunya adalah pengembangan kawasan industri, maka peran sektor energi listrik ini menjadi cukup penting sebagai penyedia energi bagi kawasan industri baru.

Sistem ketenagalistrikan Kalimantan Timur ditransmisikan dari satu kesatuan sistem interkoneksi yang disebut Sistem Mahakam yang terkoneksi dengan Sistem Barito Kalimantan Selatan. Dengan demikian dalam pemenuhan kebutuhan listrik, Kalimantan Timur tidak hanya ditopang oleh pembangkit listrik yang ada di Kalimantan Timur namun juga Kalimantan Selatan.

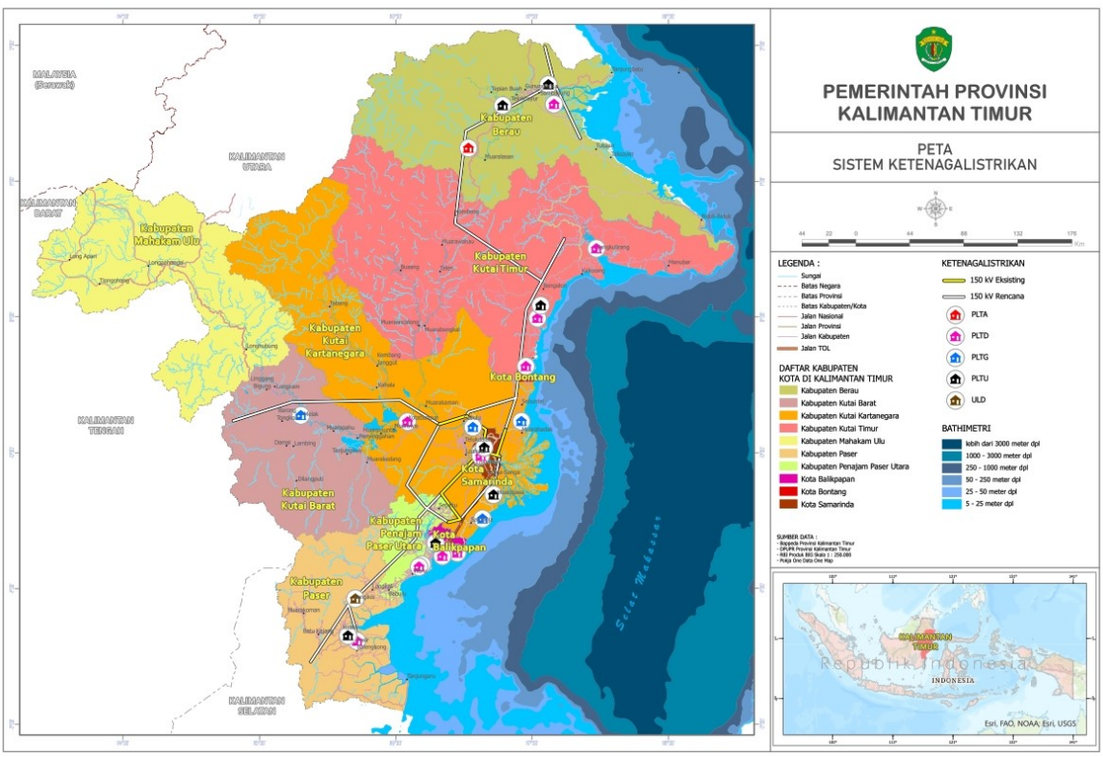

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.65
Peta Sistem Ketenagalistrikan

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian pada pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Timur cenderung fluktuatif. Pada tahun 2021, kontribusinya naik menjadi sebesar 45,05 persen dari tahun sebelumnya sebesar 41,29 persen. Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat maupun industri akibat pandemi COVID-19 yang juga diiringi oleh lemahnya permintaan batu bara dari negara tujuan utama menjadi penyebab penurunan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian. Meski

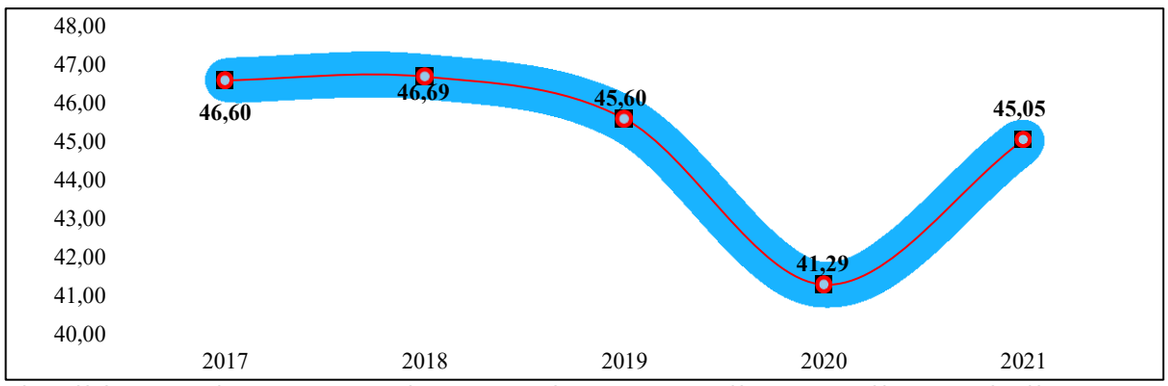

demikian, sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi pangsa utama perekonomian di Kalimantan Timur.

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.66
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021 (persen)

Produksi batubara tahun 2021 adalah sebesar 289,53 juta ton, yang menunjukkan peningkatan sebesar 40,53 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan produksi batubara disebabkan oleh permintaan batubara yang meningkat dari negara tujuan seperti Tiongkok dan India akibat mulai berkurangnya pandemi COVID-19 serta peningkatan yang signifikan pada harga batubara global.

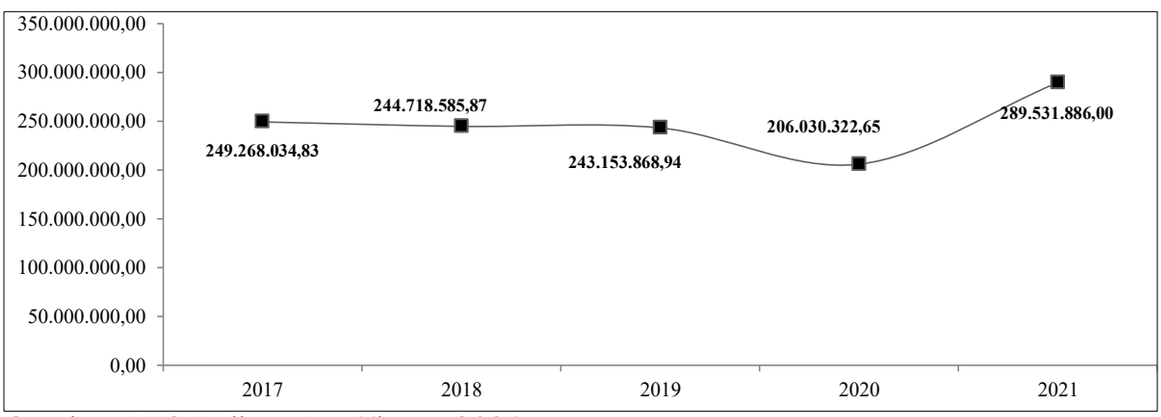

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.67
Produksi Pertambangan Batubara Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2017-2021 (Ton)

Pada tahun 2021 produksi pertambangan unggulan lainnya di Kalimantan Timur terdapat penurunan produksi minyak bumi dan gas bumi. Penurunan produksi migas tak lepas dari pengaruh pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan kinerja aktivitas hulu migas.

Tabel II.68
Produksi Pertambangan Unggulan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021

Tahun	Batubara (Ton)	Minyak Bumi (Ribu Barrel)	Gas Bumi (Ribu MMBTU)
2017	247.302.813,65	29.754,98	449.579,20
2018	244.718.585,87	23.720,00	296.830,00
2019	243.153.868,94	21.038,83	231.067,41
2020	206.030.322,65	19.296,85	203.955,18
2021*)	289.531.886,00	13.068,43	124.585,32

**) Data Sementara; Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021*

C. Jumlah Proyek Investasi Dalam Negeri dan Asing (PMDN/PMA)

Kenaikan jumlah proyek investasi merupakan “angin segar” bagi perekonomian Kalimantan Timur karena selain meningkatkan perekonomian secara makro dan mikro, juga meningkatkan faktor produksi penunjang kegiatan perekonomian.

Tabel II.69
Jumlah Proyek PMDN/PMA
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021

Tahun	PMDN	PMA	Total
2017	357	566	923
2018	520	513	1.033
2019	2.227	903	3.130
2020	3.924	778	4.702
2021	9.291	1.034	10.325

Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2022

Dilihat dari total jumlah proyek PMDN/PMA dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 jumlah proyek PMDN/PMA di Kalimantan Timur sebanyak 10.325 proyek, meningkat jika dibandingkan pada tahun 2020 yang hanya sebanyak 4.702 proyek. Kenaikan jumlah proyek pada investasi Dalam Negeri sebesar 5.367 proyek dan kenaikan proyek pada investasi Asing sebesar 256 proyek. Peningkatan

jumlah proyek baik penanaman modal dalam negeri maupun asing ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih positif pada nilai investasi sehingga mampu menggerakkan perekonomian dengan lebih baik.

D. Nilai Investasi (PMDN/PMA)

Nilai realisasi investasi dalam negeri tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya dari Rp 25,93 triliun menjadi sebesar Rp 30,30 triliun. Sedangkan nilai realisasi investasi asing mengalami peningkatan menjadi 745,19 juta USD. Jika dilihat menurut trennya, nilai investasi Kalimantan Timur sangat berfluktuasi. Berdasarkan rilis resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, total investasi di Kalimantan Timur pada tahun 2021 senilai Rp 41,18 triliun.

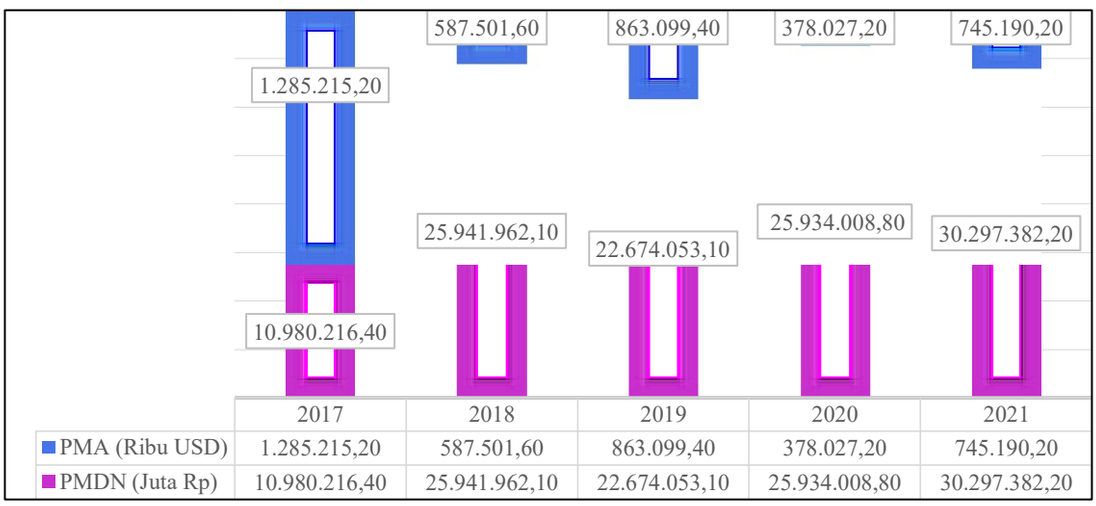

	2017	2018	2019	2020	2021
PMA (Ribu USD)	1.285.215,20	587.501,60	863.099,40	378.027,20	745.190,20
PMDN (Juta Rp)	10.980.216,40	25.941.962,10	22.674.053,10	25.934.008,80	30.297.382,20

Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2022

Gambar II.68
Nilai Investasi PMDN dan PMA Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2017-2021

E. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap memperlihatkan bagaimana investasi yang ditanamkan di Kalimantan Timur mampu menyerap tenaga kerja (penduduk Provinsi Kalimantan Timur maupun migran). Pada tahun 2017-2021, proyek penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing mengalami kenaikan namun rasio daya serap tenaga kerja justru mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya permasalahan dalam penyediaan lapangan kerja yang belum sesuai dengan kualitas dan *skill*

tenaga kerja lokal yang tersedia. Sejalan dengan itu, peralihan investasi dari sektor industri/manufaktur yang padat karya menjadi sektor industri/manufaktur padat modal yang cenderung memiliki serapan tenaga kerja yang lebih sedikit. Pemerintah terus berupaya untuk memberikan peluang dan kesempatan kerja lebih kepada masyarakat lokal melalui peningkatan investasi yang memberikan timbal balik positif bagi masyarakat. Rasio daya serap tenaga kerja dari nilai investasi, baik PMDN maupun PMA, di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.70
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2017-2021

No	Uraian	PMDN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMDN	9.236	12.935	20.837	19.952	21.596
2	Jumlah proyek seluruh PMDN	357	520	2.227	3.924	9.291
3	Rasio daya serap tenaga kerja	25,87	24,88	9,36	5,08	2,32
No	Uraian	PMA				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMA	15.508	12.500	15.166	5.868	5.650
2	Jumlah proyek seluruh PMA	566	513	903	778	1.034
3	Rasio daya serap tenaga kerja	27,40	24,37	16,80	7,54	5,46

Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2021

Berdasarkan sektor usahanya, tenaga kerja di Kalimantan Timur pada tahun 2021 paling banyak diserap oleh sektor perdagangan sebesar 21,99 persen dan sektor pertanian, kehutanan, perikanan sebesar 20,84 persen. Adapun lapangan usaha yang menciptakan nilai tambah terbesar untuk PDRB Kalimantan Timur yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian hanya mampu menyerap 7,10 persen tenaga kerja, sedangkan sektor industri pengolahan hanya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 6,59 persen.

Tabel II.71
Capaian Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 – 2021

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Fokus : Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
1	Pendidikan					
1.1	Jumlah sekolah yang mengembangkan ekstrakurikuler berbasis agama (SMA/SMK/SLB) (%)	n/a	72	25	150	205
1.2	Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri (SMK)	n/a	30	25	55	70
1.3	Angka Partisipasi Murni SMA/MA, SMK, MAK, SMLB (%)	68,23	68,43	68,55	69,00	78,15
1.4	Persentase tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki ijazah diploma dan sarjana (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	95,74
1.5	Jumlah Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS (orang)	- n/a	791	2.178	13.000	48.085
1.5	Jumlah Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa (Siswa)	n/a	635	6.952	2.500	3.369
1.6	Persentase sekolah yang telah menggunakan sistem pendidikan jarak jauh (%)	n/a	0	25	90	85
1.7	Persentase pelayanan pendidikan luar biasa (%)	n/a	60	65	70	60
2	Kesehatan					
2.1	Persentase Kab/Kota yang memiliki ≥ 45% Puskesmas memenuhi 9 tenaga jenis tenaga kesehatan	n/a	n/a	n/a	n/a	60
2.2	Skor Kepuasan Masyarakat terhadap Urusan Bidang Kesehatan (rumah sakit)	n/a	n/a	n/a	n/a	87,66
2.3	Persentase Puskesmas	n/a	n/a	23,50	23,50	23,50

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Minimal Terakreditasi Utama (%)					
2.4	Jumlah Penduduk Miskin dan Kurang Mampu yang Memperoleh Jaminan Pelayanan Kesehatan	n/a	n/a	n/a	n/a	88.707
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
3.1	Persentase Capaian Layanan SDA (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	67,99
3.2	Capaian Akses Air Minum Layak Perpipaan (%)	51,50	54,30	54,59*	62,64	67,48
3.3	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	36.722	51.722	73.481	72.881	72.010
3.4	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	n/a	n/a	n/a	n/a	0,87
4	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat					
4.1	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat (%)	n/a	67,18	61,38	50	67,50
4.2	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana (%)	55	60	60	61,33	66,67
5	Sosial					
5.1	jumlah PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (PMKS)	n/a	300	385	405	23.350
B	Fokus : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar					
1	Tenaga Kerja					
1.1	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	n/a	50	29,41	-0,27	26,04
1.2	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Terserap di pasar kerja (%)	n/a	80	80	80	70
1.3	Persentase Wirausahaan Baru dari Pencari Kerja (%)	30	n/a	0,09	30	31,86
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	56,64	57,53	65,65	65,54	66,64
2.2	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak (%)	n/a	70	70	82	90
2.3	Persentase pelaku ekonomi perempuan (%)	n/a	34	37	62	47,98
2.4	Rasio KDRT (%)	27,11	0,066	18,16	27,20	0,029
2.5	Kampung KB	175	154	160	175	299
3	Lingkungan Hidup					

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
3.1	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	n/a	5,60	25,18	50,72	41,96
3.2	Indeks Kualitas Air Sungai	n/a	n/a	77,09	53,70	51,92
3.3	Indeks Kualitas Udara	n/a	n/a	89,42	89,06	88,84
3.4	Indeks Kualitas Air Laut	n/a	n/a	-	83,51	85,40
3.5	Indeks Kualitas Lahan	n/a	n/a	72,12	79,76	82,21
3.6	Indeks Risiko Bencana	n/a	n/a	154,49	154,02	153,28
4	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
4.1	Indeks Desa Membangun	0,5250	0,5757	0,6238	0,6752	0,7071
4.2	Jumlah desa tertinggal (desa)	393	381	285	128	78
4.3	Meningkatkan jumlah Bumdes yang aktif (Bumdes)	275	320	335	360	390
4.4	Desa berkembang (Desa)	140	289	304	323	27
4.5	Desa yang mampu menjalankan Pemerintah Desa secara optimal (Desa)	n/a	n/a	338	363	30
4.6	Jumlah kampung iklim	n/a	n/a	335	363	35
5	Perhubungan					
5.1	Jumlah penumpang yang terlayani (orang)	9.452.932	10.392.536	10.721.656	3.570.750	3.949.683
5.2	Jumlah barang (ton)	2.399.801.887	325.051.663	341.529.897	294.478.397	313.784.306
5.3	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP (Unit/%)	82	83	83	84	84
5.4	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas (kasus)	1.193	846	570	448	369
6	Komunikasi dan Informatika					
6.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	n/a	2,49	3,04	3,14	2,22
7	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					
7.1	Persentase tercapainya target UKM naik kelas (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	1
7.2	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	2,75
8	Kepemudaan dan Olahraga					
8.1	Indeks Pembangunan Pemuda	57,82	56,33	56,74	57,23	54,83
8.2	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	n/a	n/a	n/a	n/a	0,13

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
9	Kebudayaan					
9.1	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	n/a	n/a	n/a	n/a	45
9.2	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	n/a	n/a	n/a	n/a	65
10	Perpustakaan					
10.1	Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (on line dan on site) (orang)	n/a	137.841	469.997	199.772	110.802
C	Fokus : Urusan Pelayanan Pilihan					
1	Pariwisata					
1.1	Jumlah Destinasi Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya (kawasan)	n/a	2	3	3	2
2	Pertanian					
2.1	Luas lahan kelompok tani tanaman pangan yang difasilitasi (Ha)	n/a	n/a	n/a	n/a	7.000
2.2	Jumlah fasilitas pengembangan prasarana tanaman hortikultura (unit)	n/a	n/a	n/a	n/a	6
2.3	Jumlah produksi padi (Ton)	356.680	262.773	253.820	262.430	244.678
2.4	Jumlah produksi tanaman hortikultura (Ton)	n/a	258.565	126.986	236.414	345.230
2.5	Jumlah aparatur Non aparatur yang dibina (orang)	n/a	n/a	n/a	n/a	91
2.6	Jumlah kelembagaan petani berbasis koorporasi yang dibina (unit lembaga)	n/a	n/a	n/a	n/a	4
2.7	Jumlah Miniranch yang teregister (unit)	n/a	n/a	5	12	24
2.8	Angka Kelahiran Sapi (%)	n/a	19,00	17,49	20,10	19,00
2.9	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (juta Ton CO2eq)	n/a	n/a	n/a	2.916	6,73
2.10	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan (kelompok	n/a	n/a	n/a	n/a	34

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	tani)					
2.11	Luas kebun yang dibangun (Ha)	n/a	n/a	1.389.845	1.389.078	1.551.343
2.12	Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)	13.250.778	13.478.263	18.416.921	16.809.560	17.363.298
2.13	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (lembaga)	n/a	n/a	n/a	n/a	1
2.14	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP) (Jumlah Perusahaan)	n/a	n/a	18	35	41
3	Kehutanan					
3.1	Persentase Tutupan Lahan Meningkat (%)	n/a	n/a	5,66	13,98	14,40
3.2	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat (Ha)	n/a	118.000	31.368	32.000	25.942
3.3	Produksi Hasil Hutan Kayu (M3)	n/a	n/a	5.221.923,52	4.808.965,74	4.798.049,68
3.4	Produksi Hasil Hutan Non Kayu (ton)	n/a	n/a	1.428,65	864,9	694,28
4	Energi dan Sumber Daya Mineral					
4.1	Persentase pemanfaatan EBT (%)	n/a	3,13	4,40	4,80	6,53
4.2	Jumlah KK Berlistrik (KK)	905.821	945.607	1.032.475	1.105.227	1.143.533
5	Perdagangan					
5.1	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US$)	n/a	n/a	2,04	2,23	4,75
5.2	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	n/a	n/a	n/a	n/a	116,56
6	Perindustrian					
6.1	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di Kawasan Peruntukan Industri (industri)	n/a	n/a	2	1	2
7	Kelautan dan Perikanan					
7.1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	173.622	151.918	148.197	155.000	160.240
7.2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	159.345	149.039	176.049	158.709	173.996
7.3	Luas kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan	n/a	n/a	n/a	n/a	289.048

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	yang efektif (Ha)					
7.4	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang mendapat pembinaan dan sertifikasi (UMKM)	n/a	n/a	n/a	n/a	36
7.5	Jumlah izin usaha pengolahan dan pemasaran (IUP)	n/a	n/a	n/a	n/a	36
D	Fokus : Urusan Penunjang					
1	Perencanaan					
1.1	Konsistensi perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan (%)	n/a	n/a	n/a	67,88	78,50
2	Keuangan					
2.2	Pendapatan Daerah (Miliar Rp)	7.986	8.158	11.775	10.132	10.220
2.3	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	92,98
2.4	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	114,69
2.5	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kalimantan Timur (wajib pajak)	497	641	815	758	692
3	Pengawasan					
3.1	Hasil Penilaian Integritas	n/a	60	65	66,67	66,33
3.2	Level kapasitas APIP	2	2	3	3	3
4	Umum/Sekretariat					
4.1	Persentase perangkat daerah nilai SAKIPnya memperoleh predikat Minimal (Baik) (%)	71	71,05	73,68	74,00	75,67
4.2	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria (NSPK) (%)	n/a	86	84	87	92
4.3	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) (%)	n/a	49	13,16	61	83,44
4.4	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP sesuai	n/a	52,63	60,53	60,53	63,04

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	ketentuan/aturan (%)					

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Salah satu indikator dalam melihat kemampuan ekonomi suatu daerah adalah dengan menelaah pengeluaran rata-rata per kapita setiap bulannya. Selama kurun waktu beberapa tahun, pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita per bulan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan yang cukup baik akan tetapi pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan yang mencapai Rp. 1.718.611,- per bulan. Penyebab turunnya pengeluran rata-rata per kapita adalah menurunnya pengeluaran konsumsi makanan di tahun 2021 yang mencapai Rp 736.465 (42,85 persen) dimana pengeluaran untuk tahun 2020 sebesar Rp 790.469 (45,06 persen).

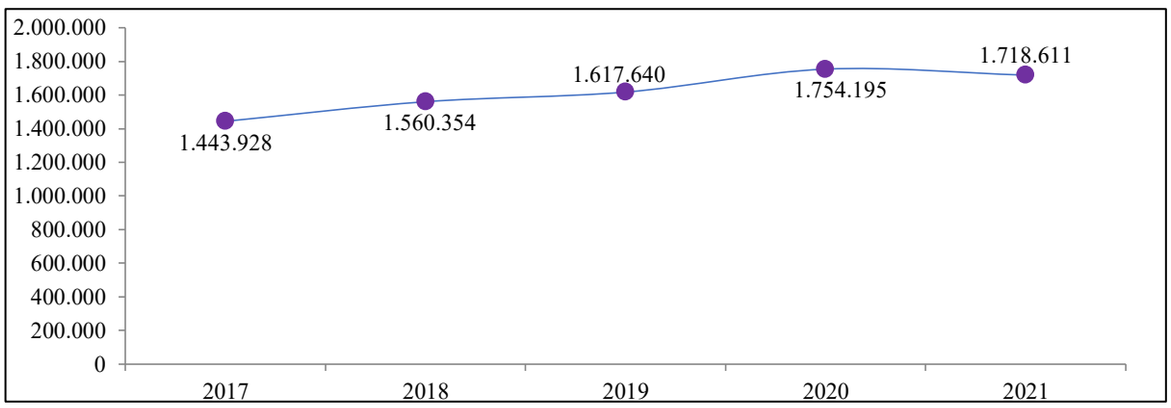

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.69
Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021 (Rupiah)

B. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan (Persentase Konsumsi Rumah Tangga untuk Non Pangan)

Kenaikan persentase konsumsi rumah tangga non makanan di tiap tahunnya, secara umum menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan konsumsi rumah tangga sudah mulai fokus ke pengeluaran barang sekunder maupun tersier yang merupakan kebutuhan penunjang kehidupan dan tidak hanya memikirkan pemenuhan kebutuhan dasarnya (terutama makanan).

Tabel II.72
Konsumsi Rumah Tangga non Makanan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan Non Makanan (Rp)	780.443	857.449	893.217	963.725	982.146
2	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan (Rp)	1.443.928	1.560.354	1.617.640	1.754.195	1.718.611
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan (%)	54,05	54,95	55,22	54,94	57,15

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

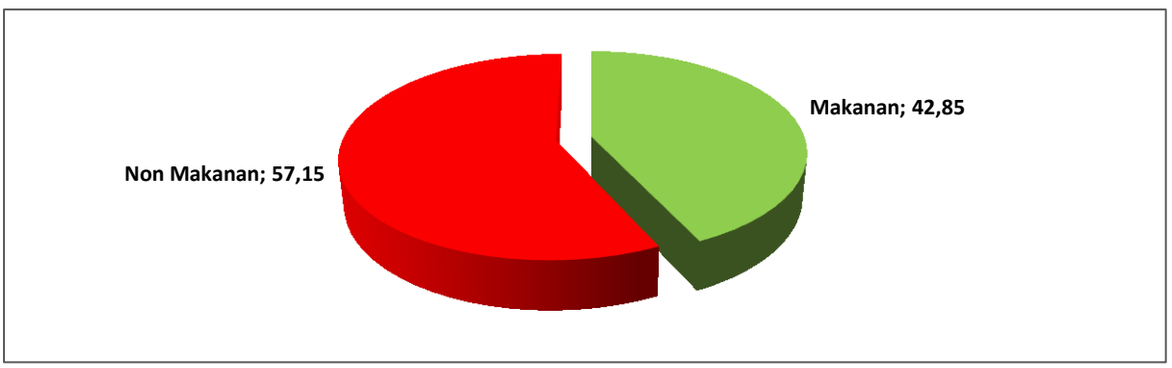

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.70
Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita sebulan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

C. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat daya beli petani di perdesaan. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula daya beli petani. Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, NTP gabungan selalu berada di atas angka 100. Hal ini menunjukkan bahwa indeks harga yang diterima petani lebih besar daripada indeks harga yang dibayarkan petani di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel II.73
Rata-rata Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)	121,96	123,77	107,91	116,96	128,25
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	125,54	128,75	102,41	104,76	106,05
3.	Nilai Tukar Petani (NTP)	97,15	96,14	105,38	111,65	120,94

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Peningkatan NTP tahun 2021 disebabkan meningkatnya NTP pada hampir seluruh sub sektor, kecuali sub sektor tanaman pangan yang mengalami penurunan sebesar 5,83 persen yakni dari NTP 101,18 di tahun 2020 menjadi 95,28 di tahun 2021. NTP sub sektor tanaman perkebunan rakyat mengalami kenaikan drastis sebesar 21,76 persen di tahun 2021 terhadap NTP pada tahun 2020. Selanjutnya, ada tiga sub sektor yang mengalami peningkatan NTP, yaitu subsektor hortikultura, peternakan, dan perikanan.

Tabel II.74
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Subsektor Tahun 2020-2021 (2012=100)

No	Uraian	NTP		% Perubahan
		2020	2021	
NTP Gabungan		111,65	120,94	8,32
1.	Tanaman Pangan	101,18	95,28	-5,83
2.	Hortikultura	105,27	106,07	0,76
3.	Tanaman Perkebunan Rakyat	124,10	151,10	21,76
4.	Peternakan	101,70	104,28	2,54
5.	Perikanan	102,69	103,01	0,31

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Nilai Tukar Petani di regional Kalimantan berada di atas 100 dan berada di atas nasional sebesar 104,64. Namun jika diurutkan, Provinsi Kalimantan Timur memiliki rata-rata NTP tertinggi kedua sebesar 120,94, dibawah Kalimantan Barat sebesar 128,68.

Tabel II.75
Nilai Tukar Petani (NTP) Regional Kalimantan dan Nasional
Menurut Subsektor Tahun 2021

No	Uraian	Kaltim	Kalbar	Kalteng	Kalsel	Kaltara	Nasional
NTP Gabungan		120,94	128,68	118,53	107,59	105,85	104,64
1.	Tanaman Pangan	95,28	94,25	96,32	99,95	99,32	98,21
2.	Hortikultura	106,07	104,86	101,63	101,68	95,61	101,60
3.	Tanaman Perkebunan Rakyat	151,10	147,04	133,99	123,40	133,74	120,97
4.	Peternakan	104,28	99,07	105,70	101,00	104,75	99,19
5.	Perikanan	103,01	106,45	102,48	98,86	104,15	104,69

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

A. Luas Wilayah Produktif

Pengembangan luas wilayah produktif harus terus mendapat kawalan dari instansi terkait mengingat produktifitas pertanian, perkebunan, maupun pemukiman merupakan lahan yang bersentuhan langsung ke masyarakat Kalimantan Timur. Gambaran tentang luas wilayah produktif dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.76
Rasio Luas Wilayah Produktif (Pertanian, Perkebunan, dan Permukiman) terhadap Luas Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

No.	KAB/KOTA	Luas Wilayah Produktif (Ha)	Luas Wilayah Budidaya Non Kehutanan (Ha)	Rasio (%)
1.	Paser	301.226	445.964	67,54
2.	KUBAR dan MAHULU	515.012	862.681	59,70
3.	KUKAR	420.324	936.710	44,87
4.	KUTIM	472.421	942.679	50,11
5.	Berau	370.716	536.320	62,12
6.	PPU	113.402	145.011	78,20
7.	Balikpapan	22.538	34.069	66,15
8.	Samarinda	13.320	68.888	19,34
9.	Bontang	5.643	10.002	56,42
J u m l a h		2.234.602	3.982.325	56,11

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

B. Infrastruktur Pembangunan

Kemajuan pembangunan infrastruktur terkait sarana dan prasarana wilayah diukur dari kemajuan pembangunan yang meliputi: pembangunan jalan, jembatan, transportasi darat dan SDP, transportasi laut, transportasi udara, air baku dan air bersih, jaringan irigasi, serta perumahan dan permukiman.

Gambaran umum penyediaan infrastruktur Kalimantan Timur belum sepenuhnya tercapai secara maksimal. Prasarana Jaringan Jalan provinsi sepanjang 895,09 Km dengan kondisi mantap sampai tahun 2021 mencapai 673,13 km. Berdasarkan kondisi permukaan jalan yaitu kondisi baik

mencapai 257,03 km, kondisi sedang 416,10 km, kondisi rusak ringan 104,30 km, dan kondisi rusak berat 117,67 km. Sedangkan jaringan jalan nasional sepanjang 1.710,96 Km dengan kondisi mantap sampai tahun 2021 mencapai 1.409,94 km. Berdasarkan kondisi permukaan jalan yaitu kondisi baik mencapai 305,83 Km, kondisi sedang 1.104,11 Km, kondisi rusak ringan 223,89 Km, dan kondisi rusak berat 77,12 Km.

Pembangunan infrastruktur dihadapkan pada salah satu permasalahan yaitu rasio panjang jalan terhadap luas wilayah mencapai 149,19 km/1.000 km^2 (terdapat jalan sepanjang 149,19 km di dalam wilayah seluas 1000 km^2) masih di bawah rasio nasional, yaitu 265,47 km/1.000 km^2. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1) Penyebaran penduduk yang tidak merata masih dalam satuan kecil dan terpencil serta kondisi topografi yang berbukit dan bergunung;
2) Permasalahan penyediaan lahan pembangunan yang belum sesuai dengan kebutuhan;
3) Keterbatasan alokasi pendanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan menyebabkan belum terpenuhinya target jalan mantap, baik nasional maupun provinsi, dan belum tuntasnya pembangunan jalan lintas kalimantan;
4) Pembangunan jalan diperbatasan terkendala fungsi pemanfaatan ruang dan status kawasan lindung;
5) Dukungan pendanaan melalui swasta belum optimal;
6) Pengendalian batas maksimal muatan barang yang sesuai kelas jalan belum optimal;
7) Pembangunan jalan belum sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai jalan arteri dan kolektor.

Tabel II.77
Panjang Jalan Menurut Status dan Jenis Permukaan (km)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

No	Status	Panjang (Km)	Aspal	Kerikil	Tanah	Lainnya
1	Nasional	1.710,96	1.428,99	16,25	0	265,72
2	Provinsi	895,09	475,11	141,65	29,19	249,14

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2022

Tabel II.78
Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

No	Status	Baik	Sedang	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Nasional	305,83	1.104,11	223,89	77,12
2	Provinsi	257,03	416,10	104,30	117,67
3	Kabupaten/Kota	6.859,70	2.265,13	2.035,89	2.355,49
TOTAL		7.422,56	3.785,34	2.364,08	2.550,28

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2021

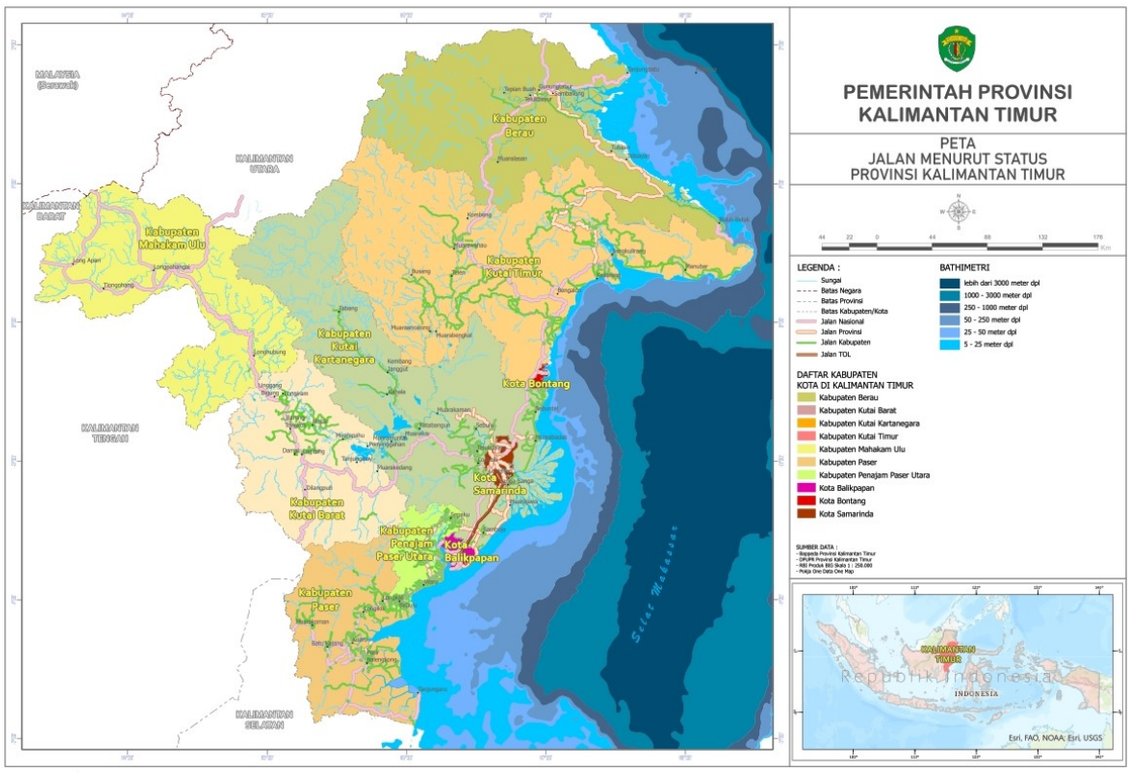

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.71
Peta Jalan Menurut Status Provinsi Kalimantan Timur

Terkait penyelenggaraan layanan transportasi dalam konteks pembagian kewenangan pemerintahan sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah di level provinsi berkaitan dengan urusan perhubungan lebih ditekankan pada pelayanan perhubungan darat, laut, sungai, danau dan angkutan penyeberangan. Di Kalimantan Timur terdapat 6 bandar udara yang terdiri dari 1 bandara yang diusahakan oleh PT. Angkasa Pura I dan 5 bandara dikelola oleh Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU) Kementerian Perhubungan RI. Secara khusus perkembangan bandara APT. Pranoto, saat ini telah beroperasi dengan jumlah 7 (tujuh) maskapai dengan rute penerbangan yaitu Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, Makassar, Berau, Melak, Tanjung Selor, dan Datah Dawai.

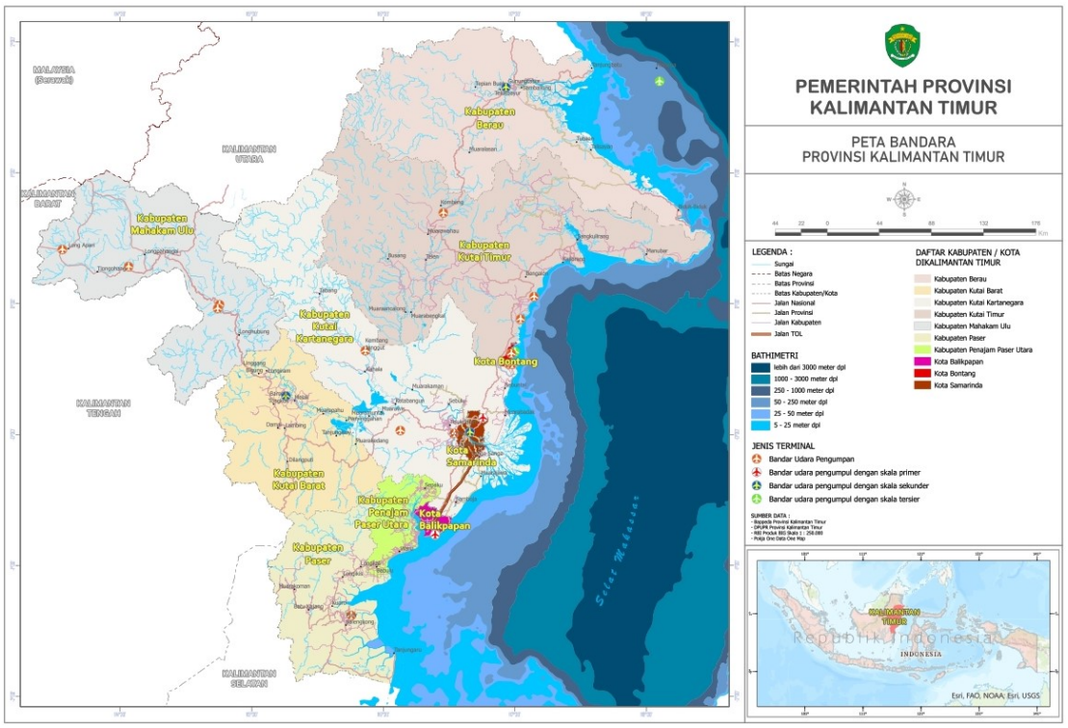

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.72
Peta Bandara Kalimantan Timur

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 432 Tahun 2017 bahwa pendekatan multi-dimensi dalam perumusan kebijakan pelabuhan nasional sebagaimana amanat undang-undang diharapkan mampu mendukung dan menggerakan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas orang, barang dan jasa, membantu menciptakan konektifitas dan pola distribusi nasional yang handal *(reliable)* dan dinamis serta berkontribusi dan menurunkan biaya logistik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan hirarki pelabuhan, di Kalimantan Timur tahun 2017 telah ditetapkan 13 pelabuhan laut yang terdiri 1 (satu) Pelabuhan Utama, 9 (Sembilan) Pelabuhan Pengumpul dan 3 (Tiga) Pelabuhan Regional, dan tahun 2022 penetapan Pelabuhan tersebut menjadi 1 (satu) Pelabuhan Utama, 10 (Sepuluh) Pelabuhan Pengumpul dan 2 (Dua) Pelabuhan Regional yaitu Pelabuhan Mantaritip di Kabupaten Berau dan Pelabuhan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel II.79
Rencana Induk Pelabuhan Nasional
Di Kalimantan Timur Berdasarkan KP 432 Tahun 2017

No.	Penetapan Lokasi Dan Hierarki Pelabuhan						
	KAB/KOTA	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan			
				2017	2022	2027	2037
XXIII. Provinsi Kalimantan Timur							
304	Balikpapan	1	Balikpapan	PU	PU	PU	PU
305	Berau	2	Mataritip	PR	PR	PR	PR
306	Berau	3	Tanjung Redeb	PR	PP	PP	PP
307	Bontang	4	Lhok Tuan	PP	PP	PP	PP
308	Bontang	5	Tanjung Laut	PP	PP	PP	PP
309	KUKAR	6	Kuala Samboja / Sebulu	PP	PP	PP	PP
310	KUKAR	7	Tanjung Santan	PP	PP	PP	PP
311	KUTIM	8	Maloy	PP	PP	PP	PP
312	KUTIM	9	Sangatta	PP	PP	PP	PP
313	KUTIM	10	Sangkulirang	PR	PR	PR	PR
314	Paser	11	Tana Paser / Pondong	PP	PP	PP	PP
315	PPU	12	Penajam Paser	PP	PP	PP	PP
316	Samarinda	13	Samarinda	PP	PP	PP	PP

Sumber: DISHUB Provinsi KALTIM

Untuk pelayanan angkutan penyeberangan telah ditetapkan 7 (tujuh) pelabuhan penyeberangan yang terdapat di Kalimantan Timur yaitu 2 (dua) Pelabuhan Kelas I yang terdiri dari Pelabuhan Kariangau dan Pelabuhan Penajam, 1 (satu) Pelabuhan Kelas II yaitu Pelabuhan Tenggarong, dan 4 (empat) Pelabuhan Kelas IV yang terdiri dari Pelabuhan Desa Sakka, Sungai Meriam, Handil I dan Gunung Tabur.

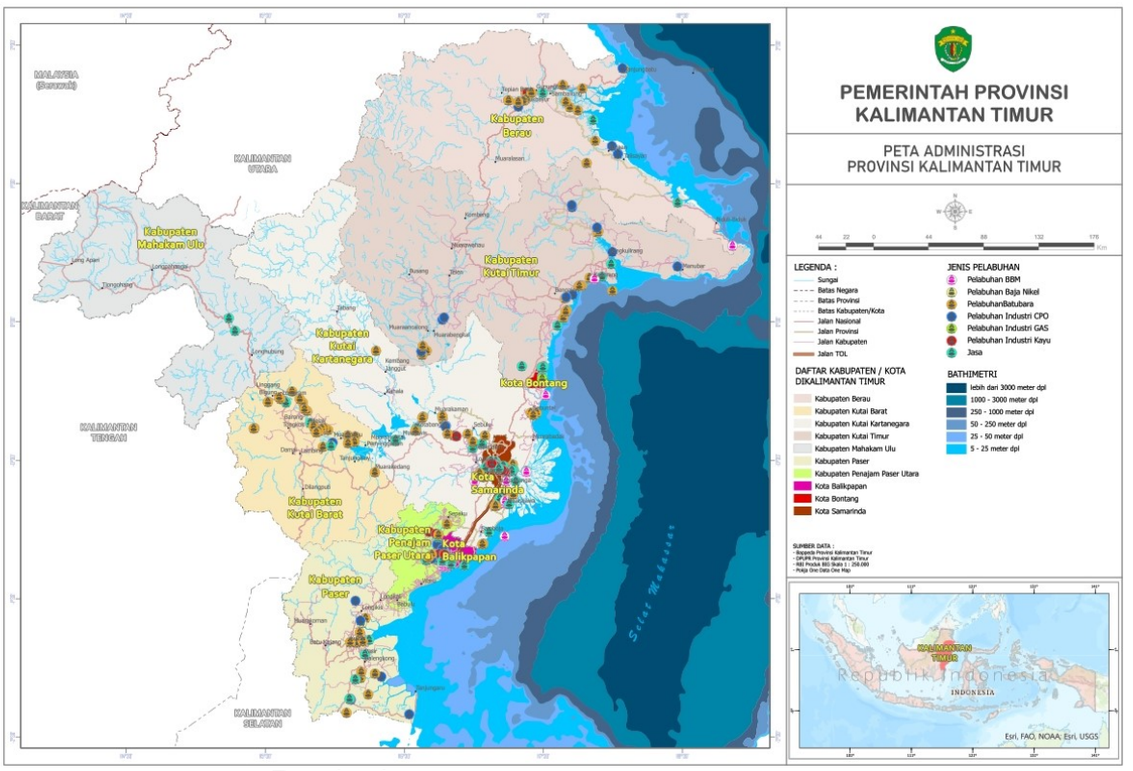

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.73
Peta Pelabuhan Kalimantan Timur

Sedangkan untuk transportasi darat, di Kalimantan Timur terdapat 2 terminal tipe A yang telah beroperasi untuk melayani rute Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yaitu Terminal Tipe A Batu Ampar di Balikpapan, dan Terminal Tipe A Samarinda di Samarinda Seberang serta 7 Terminal Tipe B yang tersebar di 7 Kabupaten/Kota. Namun kondisi kedua terminal tersebut memerlukan peningkatan pelayanan fasilitas.

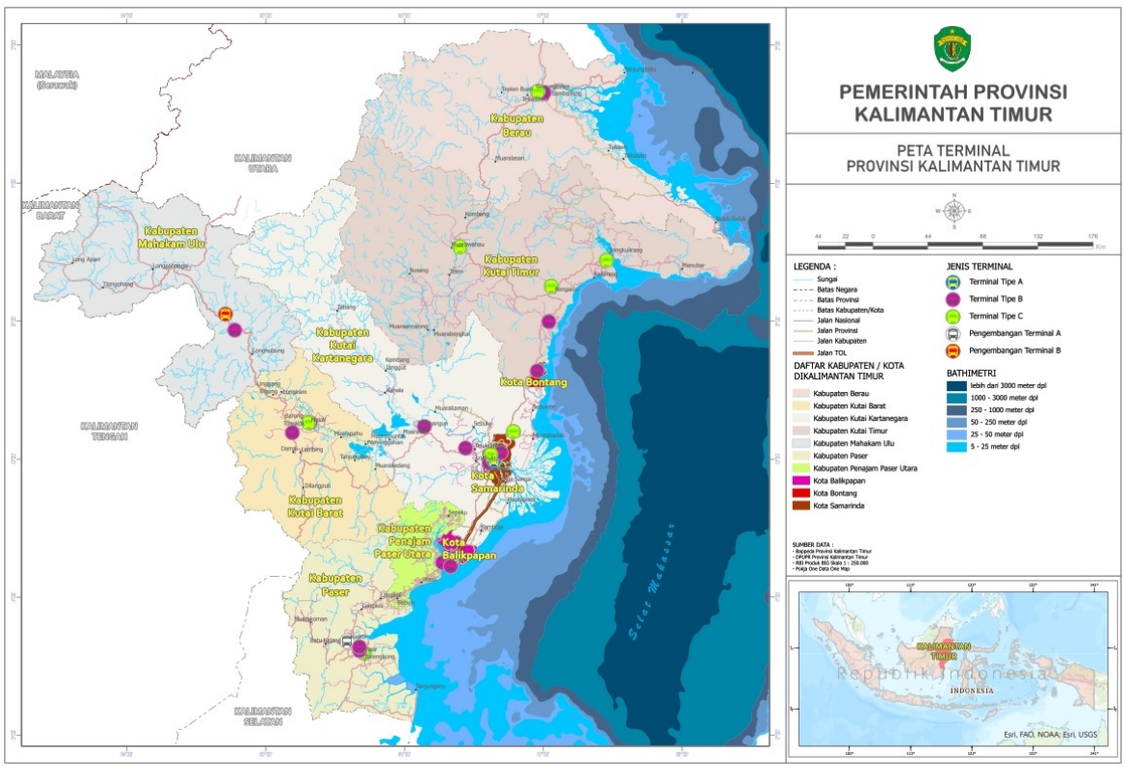

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.74
Peta Terminal Kalimantan Timur

Permasalahan lain yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat adalah masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni di Provinsi Kalimantan Timur. Rumah tidak layak huni merupakan rumah yang belum memenuhi standar minimal dilihat dari kualitas jenis atap, lantai dan dinding rumah. Hingga tahun 2020 tercatat bahwa rumah tidak layak huni mencapai 72.881 unit, mengalami kenaikan sebanyak 10.195 unit dari tahun sebelumnya. Masih tingginya ketidaklayakan rumah tersebut dikarenakan rendahnya segi kualitas fisik rumah maupun kualitas fasilitas rumah. Selain itu, penambahan jumlah RTLH disebabkan karena di updating data RTLH serta penambahan nilai susut bangunan di tahun yang bersangkutan.

Tabel II.80
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH (Unit)	Sumber Data (Verifikasi Pemda)
1	Paser	9.676	Database DPKPP Kab. Paser, BPS 2020
2	KUBAR	0	DISPERKIM Kab. Kubar 2019
3	KUKAR	22.780	e-RTLH Kab. Kukar Th. 2020
4	KUTIM	8.531	DISPERKIM Verifikasi Disdukcapil Kab. Kutai Timur 2020

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH (Unit)	Sumber Data (Verifikasi Pemda)
5	Berau	2.103	Database DISPERKIM Kab. Berau 2020
6	PPU	2.091	BDT & PEMDA Kab. PPU
7	MAHULU	1.603	FORM 1B Kab. Mahulu 2020
8	Balikpapan	382	FORM 1B Kota Balikpapan 2020
9	Samarinda	23.989	FORM 1B Kota Samarinda 2020
10	Bontang	1.726	e-RTLH Kota Bontang
Kalimantan Timur		72.881	

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2021

Tingginya jumlah hunian tidak layak di suatu kawasan berpengaruh kepada kualitas lingkungan permukiman. Kawasan permukiman yang didalamnya terdapat hunian tidak layak huni dapat dikategorikan sebagai kawasan kumuh. Adapun 7 (tujuh) aspek dan kriteria dalam penentuan kawasan kumuh berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No.2/PRT/M/2016, meliputi: kualitas bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, sistem penyediaan air minum dan proteksi kebakaran. Berdasarkan kriteria tersebut, sejumlah kawasan permukiman di Provinsi Kalimantan Timur terindentifikasi sebagai kawasan kumuh yang memerlukan peningkatan kualitas dan penataan kawasan.

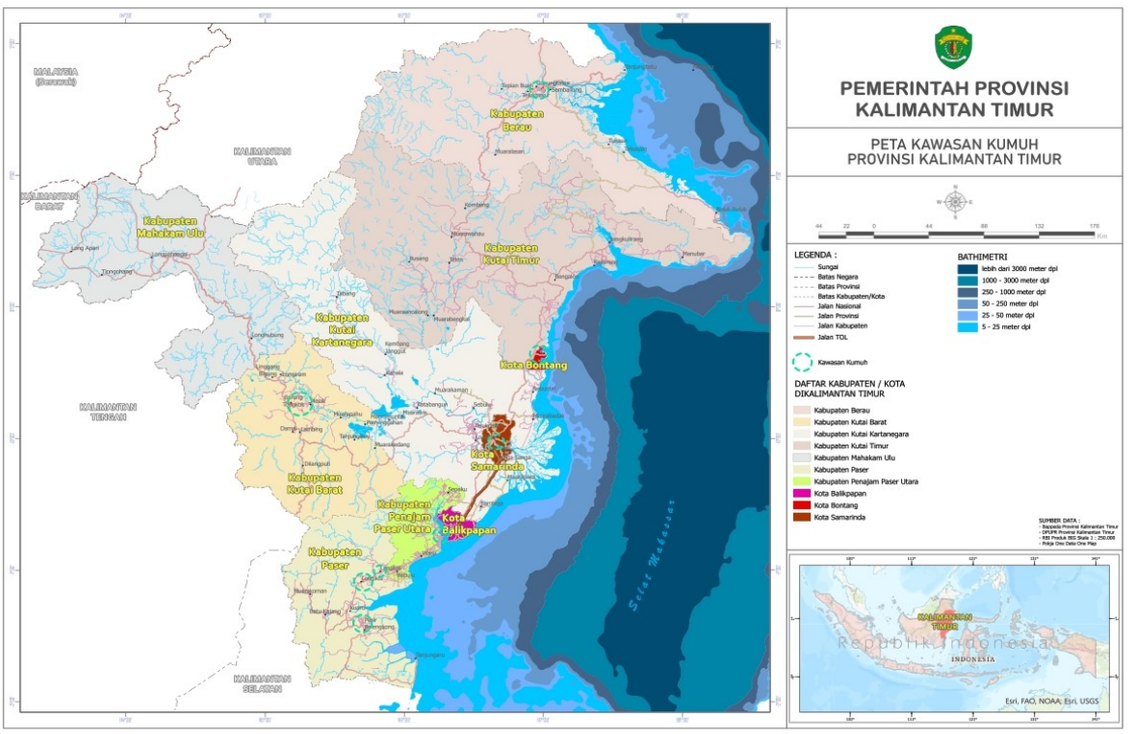

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.75
Peta Sebaran Kawasan Kumuh

Luasan dan sebaran kawasan kumuh di kabupaten/kota dimuat dalam SK Bupati/Walikota, agar menjadi prioritas penanganan sesuai kewenangan yang tercantum dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pemutakhiran SK Bupati/Walikota 2015-2020, kawasan kumuh di Provinsi Kalimantan Timur baik yang menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota adalah seluas 1.371,21 ha yang tersebar di 10 kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel II.81
Luas Kawasan Kumuh di Provinsi Kalimantan Timur

No.	KAB/KOTA	Luas (Ha)	SK Bupati/Walikota
1	Paser	179,56	No. 653/KEP-332/2020
2	KUBAR	488,59	No. 413.2/K.719/2018
3	KUKAR	168,12	No. 454/SK-BUP/HK/2019
4	KUTIM	120,63	No. 050/K.661/2015
5	Berau	28,26	No. 30 Tahun 2020
6	PPU	49,07	No. 593.33/270/2017
7	MAHULU	39,6	No. 050.136.146/K.63/2020
8	Balikpapan	153,3	No. 188.45-326/2020
9	Samarinda	70,52	No. 663/404/HK-KS/XI/2020
10	Bontang	73,56	No. 188.45/509/DPKP2/2020
Kalimantan Timur		1.371,21	

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2021

Dengan adanya penanganan kawasan kumuh seluas 83,39 Ha yang dilaksanakan oleh Pusat dan Daerah, sehingga pada tahun 2020 luasan Kawasan kumuh Kalimantan Timur berkurang menjadi 1.287,82 Ha dari *baseline* data SK Kumuh Bupati/Walikota Tahun 2015-2020.

Khusus Pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dalam rangka Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui jenis pelayanan:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dengan indikator jumlah warga korban bencana yang memperoleh rumah layak huni, pencapaian pada tahun 2020 mencapai 0 persen dikarenakan wilayah Provinsi Kalimantan Timur tidak ada kejadian bencana alam, sehingga tidak ada data korban bencana alam yang belum tertangani. Informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dokumen rencana aksi bencana alam terakhir tersusun tahun 2018 berkaitan dengan bencana tanah

longsor di Kabupaten Kutai Kartanegara. Tahun 2020 ini pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sedang menyusun dokumen rencana aksi bencana sosial. Hal ini yang menyebabkan Provinsi Kalimantan Timur tidak dapat menerapkan jenis pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana. Rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan pendataan perumahan di kawasan rawan bencana sesuai dengan pendataan awal dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pemenuhan SPM ini dilaksanakan melalui Program Pengembangan Perumahan dengan indikator Persentase Hunian Rumah dengan fokus kegiatan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana.

2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi dengan indikator jumlah warga yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni, pencapaiannya sebesar 33,33 persen. Pemenuhan SPM ini dilaksanakan melalui Program Kawasan Permukiman dengan kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha indikator Persentase Hunian Rumah dengan fokus kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni.

Dari segi kelistrikan, infrastruktur listrik di Provinsi Kalimantan Timur memang perlu pembenahan, utamanya dalam pendistribusian listrik

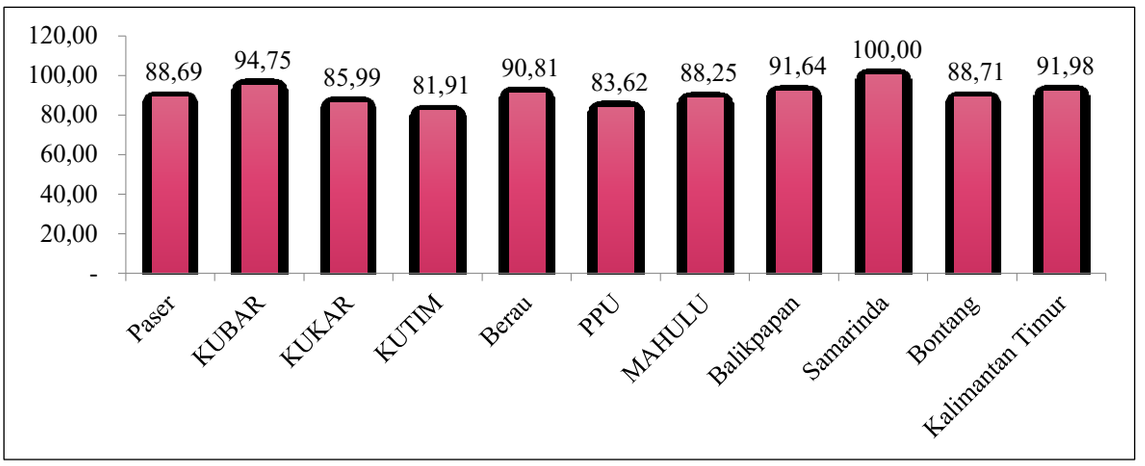

ke seluruh masyarakat. Oleh karena itu, PLN berusaha meningkatkan produksi tenaga listrik mencapai 4.273.525 MWh pada tahun 2019. Jumlah Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 sebanyak 1.038 Desa dan telah memiliki listrik (Desa Berlistrik) yang bersumber dari PLN maupun Non-PLN (Genset, PLTS dan lain-lain). Desa berlistrik yang bersumber dari PLN sebanyak 814 Desa dan yang bersumber dari non-PLN sebanyak 224 Desa, sehingga rasio desa berlistrik pada tahun 2020 telah mencapai 100 persen. Sejalan dengan peningkatan rasio desa berlistrik, rasio elektrifikasi Kalimantan Timur juga mengalami peningkatan yakni sebesar 90,21 persen pada tahun 2020 menjadi 91,98 persen pada tahun 2021.

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.76
Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 (%)

Tabel II.82
Pelanggan Listrik Rumah Tangga Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pelanggan listrik rumah tangga	774.995	832.528	1.018.222	1.089.707	1.163.243
2	Banyaknya tenaga listrik rumah tangga yang terjual (GWh)	1.801,72	1.748,94	2.053,4	2.213,4	2.379,9

Sumber: PT. PLN Wilayah KALTIMRA

Kinerja pengelolaan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Timur masih perlu mendapat perhatian, terutama masih rendahnya luas lahan

sawah yang beririgasi teknis. Hingga tahun 2020, sawah yang mendapat layanan irigasi mencapai 61,37 persen atau sekitar 24.231,80 Ha. Lahan tersebut tersebar di 10 Kabupaten/Kota di Kaltim yang mencakup kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tabel II.83
Luas Lahan Sawah Yang Beririgasi Teknis
di Kalimantan Timur Tahun 2020

No	KAB/KOTA	Sawah Irigasi (Ha)			Sawah Non Irigasi (Ha)		Total Luas Sawah (Ha)
		1x Panen	2x Panen	3x Panen	1x Panen	2x Panen	
1	Paser	545,79	5.999,92	27,33	-	2,99	6.576,03
2	KUBAR	935,89	1.267,92	-	2,88	-	2.206,69
3	KUKAR	158,60	11.247,27	-	442,73	3.456,56	15.305,16
4	KUTIM	411,21	1.020,42	-	975,11	378,07	2.784,81
5	Berau	33,51	940,90	-	447,35	507,32	1.929,08
6	PPU	16,09	1.042,03	-	164,54	8.011,21	9.233,87
7	MAHULU	-	79,42	-	-	-	79,42
8	Balikpapan	-	34,71	-	-	-	34,71
9	Samarinda	0,03	458,57	-	306,08	558,20	1.322,88
10	Bontang	-	12,18	-	-	-	12,18
TOTAL		2.101,12	22.103,35	27,33	2.338,69	12.914,35	39.484,84

Sumber: BPN KANWIL KALTIM, 2021

Bendungan-bendungan yang sudah terbangun belum sepenuhnya terhubung jaringan irigasi ke lahan pertanian, karena jaraknya yang sangat jauh dari lahan pertanian, dan bahkan banyak bendungan yang tidak berfungsi karena adanya alih fungsi lahan pertanian sekitarnya menjadi perkebunan sawit dan pertambangan. Persoalan lain yang menyebabkan belum optimalnya cakupan irigasi adalah rendahnya kualitas air baku untuk irigasi karena tingkat keasaman air yang tinggi dan adanya pencemaran limbah tambang batubara. Peningkatan jaringan irigasi disertai dengan peningkatan ketersediaan air baku yang berkualitas pada bendungan atau waduk sangat dibutuhkan untuk peningkatan produksi hasil pertanian tanaman pangan. Selain sebagai sumber air irigasi, bendungan juga dapat dimanfaatkan untuk budidaya perikanan, pengendali banjir dan sumber air minum. Selain permasalahan jaringan atau distribusi, masalah ketersediaan layanan air minum juga diakibatkan oleh kurangnya pasokan air baku maupun sarana pengolahannya, berikut tabel defisit sarana pengolahan air baku.

Tabel II.84

Defisit Sarana Pengolahan Air Baku

No	KAB/KOTA	Defisit Kebutuhan Air Baku (m^3/Tahun)	
		2018	2023
1	Paser	(13.262.992,45)	(16.823.065,72)
2	KUBAR	(4.109.424,37)	(4.572.610,85)
3	KUKAR	(2.453.614,96)	(13.252.406,91)
4	KUTIM	(16.181.957,16)	(25.275.031,62)
5	Berau	(2.426.389,82)	(6.119.490,31)
6	PPU	(8.472.603,46)	(9.696.067,38)
7	MAHULU	(4.109.424,37)	(4.572.610,85)
8	Balikpapan	(4.512.187,52)	(3.382.418,18)
9	Samarinda	(22.710.346,28)	(18.568.251,44)
10	Bontang	(3.124.422,15)	(5.796.593,97)

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2021

Permasalahan banjir di Kalimantan Timur terjadi secara simultan, karena kondisi geografis DAS yang luas, daerah paparan banjir, pembukaan lahan dan penebangan hutan di daerah hulu sungai, permasalahan drainase kota dan pengaruh pasang surut laut. Hampir semua kota di Kalimantan Timur mengalami permasalahan banjir. Tingginya kejadian banjir mayoritas terjadi pada wilayah perkotaan, yaitu Samarinda, Balikpapan dan Bontang.

Tabel II.85
Daerah Rawan Banjir Kalimantan Timur

No.	KAB/KOTA	DAS	Perkiraan Luas Genangan (Ha)
1	Paser	Longkali/Telakai	1000
		Kandilo	188
2	KUBAR	Sungai Mahakam	500
3	KUKAR	Sungai Mahakam	100
		Merdeka	194
4	KUTIM	Sungai Sanggata	494
		Sungai Bengalon	100
5	Berau	Segah	200
		Bayur	5
6	PPU	Sungai Tunan	20
7	MAHULU	Sungai Mahakam	500
8	Balikpapan	Sungai Ampal	68
		Klandasan	50
		Sepinggan	50
9	Samarinda	Karangmumus	5
		Karangasam Besar	47
		Karangasam Kecil	22
		Loa Bakung	20
		Loa Lah	15

No.	KAB/KOTA	DAS	Perkiraan Luas Genangan (Ha)
		Rapak Dalam	28
		Keledang	5
		Sempaja	20
		Bengkuring	15
		Palaran	30
10	Bontang	Bontang	120
		Guntung	0

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2022

Infrastruktur pengendali banjir yang telah terbangun masih belum mampu mengatasi banjir, dan masih rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam membantu mengurangi risiko banjir. Berbagai macam persoalan dalam menyediakan infrastruktur pengendali banjir disebabkan oleh rumitnya pembebasan lahan untuk pengembangan sistem pengendali luapan air sungai. Selain persoalan tersebut, banyaknya sedimentasi dan penyempitan sungai juga menjadi penyebab infrastruktur pengendali banjir belum maksimal.

Terkait dengan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, salah satu upaya yang terus dilakukan adalah ditingkatkannya pengetahuan masyarakat mengenai hubungan antara upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dengan penurunan risiko banjir. Kegiatan ini lebih kepada ditingkatkannya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Selain irigasi pertanian, permasalahan sumber daya air lainnya di Provinsi Kalimantan Timur adalah belum optimalnya sistem penyediaan air minum kepada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses penyediaan layanan air minum perpipaan yang memadai. Pelayanan air bersih perpipaan belum sepenuhnya menjangkau wilayah Kalimantan Timur khususnya daerah perbatasan seperti di Kabupaten Mahakam Ulu.

Dalam sektor air minum, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di wilayah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih/air minum. Saat ini, terdapat 9 perusahaan daerah air minum tersebar di 9 kabupaten/kota dengan kapasitas desain produksi total terpasang pada tahun 2021 sebesar 9.079 l/dt dengan kapasitas sumber air yang diolah saat ini hanya mampu

memproduksi air sebesar 88,78 persen untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat Kalimantan Timur saat ini.

Tabel II.86
Indikator Kinerja Perusahaan Air Minum Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2017-2021

NO.	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Perusahaan Air Minum	9	9	9	9	9
2.	Kapasitas Produksi Potensial (ltr/detik)	7.354	7.583	8.018	8.395	9.079
3.	Kapasitas Produksi Efektif (ltr/dtk)	6.743	6.919	7.201	7.347	8.061
4.	Efektivitas Produksi (%)	91,69	91,24	89,81	87,51	88,78

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2021

Efektifitas produksi Instalasi Pengolahan Air yang masih <100% menyebabkan timbulnya *idle capacity* yang seringkali menjadi tantangan untuk penyelenggara air minum dalam pemanfaatannya. *Idle capacity* yang besar bila tidak dimanfaatkan segera, akan menyebabkan perluasan layanan SPAM menjadi terhambat. Belum lagi permasalahan tingkat kebocoran/NRW di SPAM yang setiap tahun meningkat, tanpa adanya upaya dalam penangananya akan menyebabkan penyelenggaraan SPAM menjadi tidak efektif dan efisien. Semua itu kemudian berdampak pada hambatan dalam pemenuhan layanan air minum.

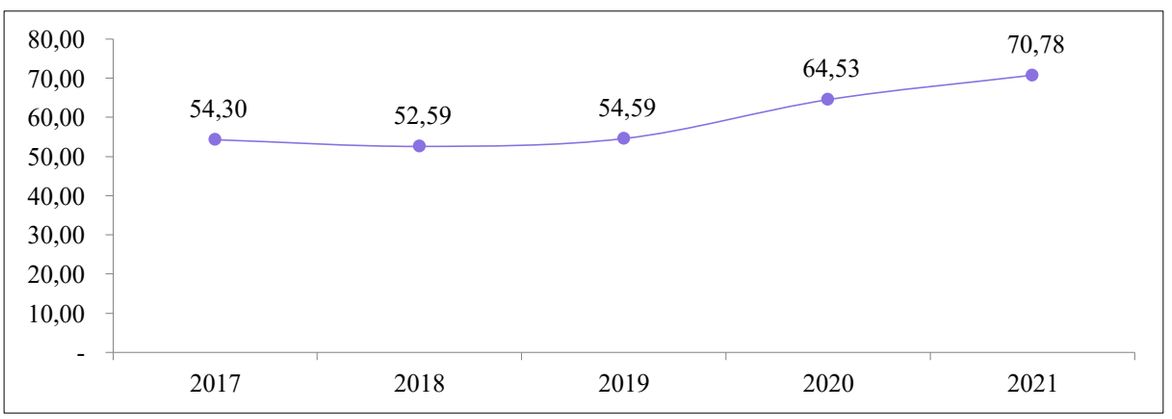

Sumber : BPS, Kalimantan Timur, 2022

Gambar II.77
Rata-Rata Penduduk Terlayani Air Minum Layak
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021

Tabel II.87
Penduduk Terlayani Air Minum Layak Tahun 2017-2021

No	KAB/KOTA	Penduduk Yang Terlayani Air Minum Layak (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Paser	38,29	45,45	37,16	48,56	66,80
2	KUBAR	34,35	22,01	34,24	31,04	72,19
3	KUKAR	63,39	45,07	58,68	51,54	56,64

No	KAB/KOTA	Penduduk Yang Terlayani Air Minum Layak (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
4	KUTIM	33,13	42,76	15,43	40,11	44,20
5	Berau	44,70	45,46	81,59	56,87	72,44
6	PPU	15,87	16,98	34,79	32,14	49,90
7	MAHULU	-	-	-	24,51	13,89
8	Balikpapan	76,98	81,72	79,05	79,79	97,84
9	Samarinda	95,46	83,95	99,29	87,28	79,39
10	Bontang	87,05	89,06	51,10	99,96	81,18
Rata-Rata		54,3	52,59	54,59	64,53	70,78

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2021

Berdasarkan data di atas, jika dilihat dari *trend update* capaian per tahun masing-masing Kabupaten/Kota, maka terlihat inkonsistensi data capaian. Hal ini disebabkan oleh perbedaan paradigma dan konsep perhitungan capaian air minum oleh masing-masing daerah dan Provinsi. Untuk capaian air minum yang terukur dengan baik, maka kedepan diperlukan penyamaan persepsi baseline data perhitungan capaian air minum, seperti penyepakatan jumlah jiwa dalam satuan Sambungan Rumah, keikutsertaan data sektor komersil dalam perhitungan capaian air minum, dan lain-lain sebagainya.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036. Saat ini RTRWP Kalimantan Timur akan melakukan proses revisi yang sejalan dengan masa 5 tahun pertama RTRWP. Tahun 2020, Provinsi Kalimantan Timur mendapat bantuan teknis dari Kementerian ATR/BPN berupa penyusunan Materi Teknis serta mengikuti tahapan Peninjauan Kembali Revisi Perda, dan pada tahun 2021 dilanjutkan proses Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Timur.

Revisi RTRWP Kalimantan Timur memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan yang terjadi baik pada skala nasional maupun regional, penyelarasan terhadap turunan Undang-Undang Cipta Kerja, arah pengembangan pembangunan setelah ditunjuknya Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibukota Negara (IKN) baru, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang semenjak RTRW disahkan sampai dengan saat ini. Berdasarkan hal-hal tersebut maka perlu memperhatikan indikasi program kegiatan pembangunan terhadap muatan RTRW Provinsi Kalimantan Timur yang diselaraskan dengan Program Prioritas Gubernur

untuk sinkronisasi dan harmonisasi Tata Ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peran RTRWP sebagai pedoman pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah provinsi; juga sebagai pedoman perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor. Adanya dinamika dan arah pengembangan pembangunan memberikan dampak intensitas penggunaan dan pemanfaatan ruang yang tinggi. Namun hal ini sering tidak melihat terhadap norma-norma aturan arahan zonasi peruntukan pemanfaatan ruang sehingga menyebabkan permasalahan pada kegiatan perizinan di Kalimantan Timur. Sebagai contoh pemanfaatan ruang, di sektor pertambangan dan penggalian, sektor kehutanan, maupun sektor perkebunan yang tumpang tindih. Pemanfaatan ruang terbesar untuk perizinan adalah pada sektor kehutanan yakni seluas ±5,6 Juta Ha, kemudian sektor pertambangan batubara seluas ±4,8 Juta Ha, dan selanjutnya dari sektor perkebunan seluas ±2,4 Juta Ha (belum termasuk pemanfaatan untuk sektor lainnya), sehingga jika ditotal luas izin sektoral melebihi total luas daratan Kalimantan Timur ±12 Juta Ha. Hal ini mengindikasikan adanya izin yang tidak sesuai atau izin bermasalah terhadap peruntukan pemanfaatannya dan akan berdampak terhadap konflik pemanfaatan ruang.

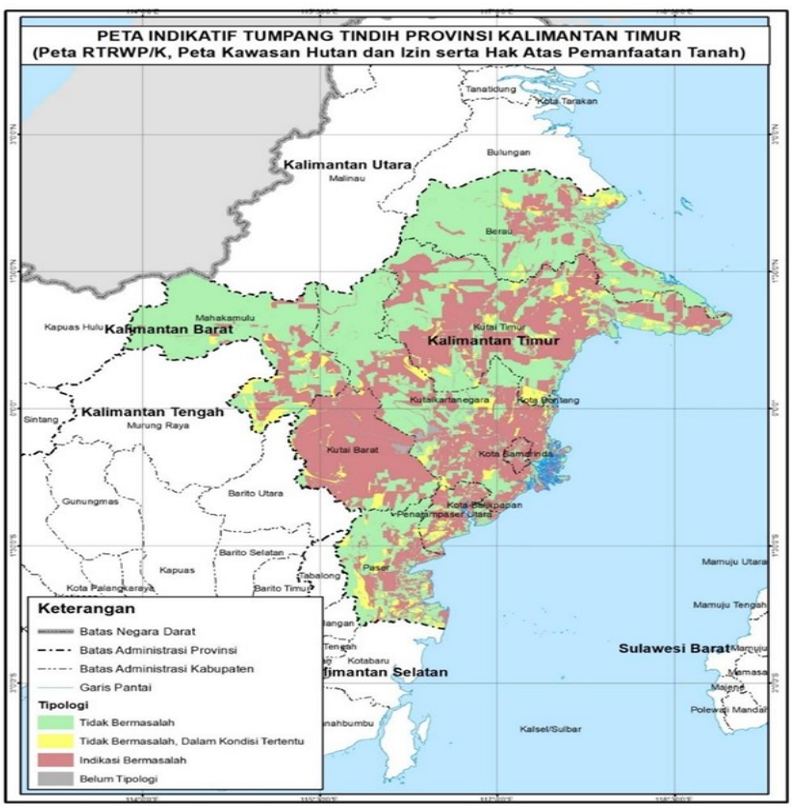

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2020

Gambar II.78
Peta Indikatif Tumpang Tindih Provinsi Kalimantan Timur

Dalam upaya pencegahan terhadap adanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang rencana tata ruang baik berupa alih fungsi lahan dan konflik dalam pemanfaatan ruang, serta dalam upaya menjaga kualitas kawasan yang berfungsi lindung, maka dilakukan kegiatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang. Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan diantaranya adalah memberikan pertimbangan teknis kesesuaian rencana tata ruang, melakukan audit pemanfaatan ruang, serta melaksanakan fasilitasi penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang.

Pemberian pertimbangan teknis kesesuaian rencana tata ruang merupakan salah satu upaya mengendalikan pemanfaatan ruang khususnya terhadap izin-izin sektoral pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan kegiatan lainnya yang memanfaatakan peruntukkan ruang. Pada tahun 2018 pertimbangan teknis yang telah dikeluarkan sebanyak 108, tahun 2019 sebanyak 133 dan tahun 2020 sebanyak 193 pertimbangan teknis kesesuaian rencana tata ruang. Selain memberikan pertimbangan teknis, upaya lain dalam melakukan pengendalian adalah melakukan audit pemanfaatan ruang. Kegiatan audit memberikan gambaran indikasi perbedaan pemanfaatan ruang terhadap peruntukkan dan arahan zonasinya. Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan kajian audit pada 5 (lima) kabupaten/kota. Namun saat ini belum dilaksanakan tindak lanjut audit serta fasilitasi penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.

Tabel II.88
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan Kajian Audit Pemanfaatan Ruang

No.	Kabupaten/Kota	Tahun
1.	Kutai Kartanegara	2014
2.	Balikpapan	2015
3.	Bontang	2016
4.	Paser	2020
5.	Penajam Paser Utara	2020

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2021

Hasil audit diharapkan mampu menjadi landasan dalam merumuskan rekomendasi penyelesaian konflik pemanfaatan ruang serta memberikan masukan terhadap review RTRW Kabupaten/Kota. Adanya alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkan serta menurunnya kualitas ruang pada Kawasan berfungsi lindung, maka kegiatan pengendalian dapat memberikan peran aktif agar setiap ruang di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perda RTRW Kabupaten/Kota maupun RTRW Provinsi Kalimantan Timur.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Keadaan suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap daya tarik investor dalam menanamkan modal usahanya di wilayah tersebut. Iklim investasi yang positif dibangun dari kondusifnya wilayah, baik itu segi keamanan, demokrasi, politik, hingga unsur sosial budaya. Hal ini dikarenakan adanya jaminan keamanan berinvestasi akan menentukan keberlangsungan dan konsistensi gerak perekonomian suatu wilayah sehingga para investor berani menanamkan modal dan pada akhirnya dapat mengembangkan perekonomian wilayah. Salah satu analisis kinerja yang mempengaruhi iklim berinvestasi dapat dilihat pada indikator angka kriminalitas yang menunjukkan kondisi keamanan dan jumlah demonstrasi yang menunjukkan situasi demokrasi suatu wilayah.

A. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas khususnya jumlah tindak pidana di Kalimantan Timur dalam dua tahun terakhir cenderung menurun. Ini terlihat dari jumlah tindak pidana yang tercatat pada Polda Kaltim, yang pada tahun 2018 terdapat 6.715 tindak pidana, yang turun menjadi 5.253 tindak pidana pada 2019, dan turun kembali pada 2020 menjadi 4.368 tindak pidana.

Persentase penyelesaian kasus terhadap peristiwa kejahatan dan pelanggaran yang dilaporkan mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 persentase kasus yang dapat diselesaikan sebesar 87,25 persen, sedangkan pada tahun 2018 persentase kasus yang dapat diselesaikan sebesar 81,71

persen. Pada tahun 2020 persentase tindak kejahatan yang diselesaikan baru mancapai 38,83 persen dengan posisi data masih bersifat sementara ditahun 2020.

Tabel II.89
Angka Kriminalitas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2021

Tahun	Dilaporkan	Tertunggak	Diselesaikan	% Tindak Kejahatan Diselesaikan	Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk
2017	11.705	1.591	8.622	73,66	33,39
2018	6.715	1.228	5.487	81,71	18,90
2019	5.253	670	4.583	87,25	14,47
2020	4.368	506	1.696	87,00	6,01
2021	4.184	506	1.696	85,00	6,01

Sumber: POLDA KALTIM, 2021

B. Demonstrasi

Demonstrasi menunjukkan kebebasan aspirasi masyarakat dalam berpendapat jika dilakukan dengan damai dan tujuan yang jelas. Namun jika demonstrasi dilakukan dengan diiringi kekerasan maka sudah menyalahi konsep dasar sebuah demokrasi. Jumlah demonstrasi meningkat pada beberapa tahun ini mengindikasikan tingginya animo masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pendapatnya. Pada tahun 2021, jumlah demonstrasi secara keseluruhan berjumlah 29 demonstrasi dimana sebanyak 31,03 persen (9 demonstrasi) merupakan demonstrasi terkait ekonomi; 51,72 persen (15 demonstrasi) terkait sosial dan 17,24 persen (5 demonstrasi) terkait politik.

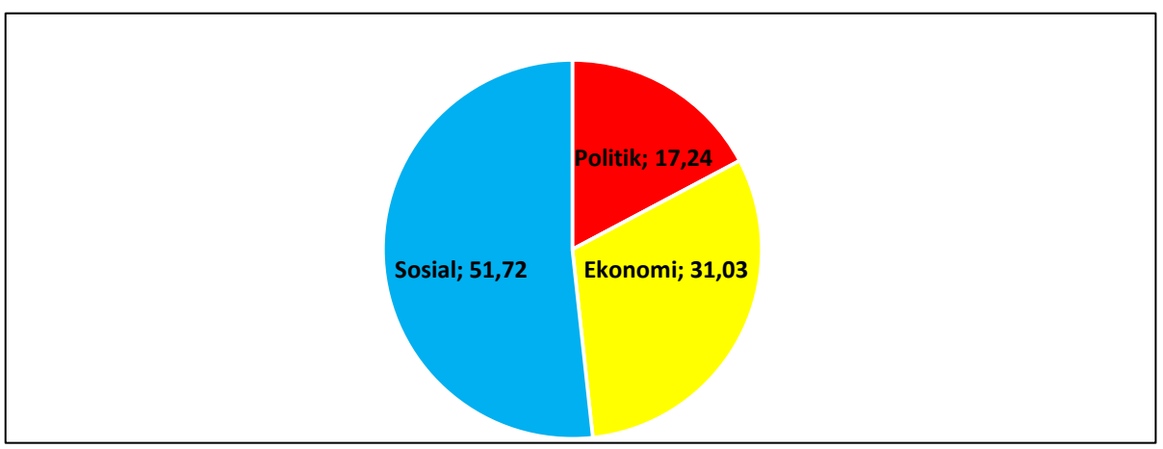

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov Kaltim, 2022

Gambar II.79
Demonstrasi Menurut Jenisnya Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2021 (persen)

Tabel II.90
Jumlah Demontrasi Menurut Jenisnya
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021

Tahun	Jenis Demo			Jumlah
	Politik	Ekonomi	Sosial	
2017	11	15	38	64
2018	2	9	22	33
2019	-	9	15	24
2020	6	1	14	21
2021	5	9	15	29

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov Kaltim, 2022

C. Demokrasi

Provinsi Kalimantan Timur, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib untuk menjalankan sistem demokrasi yang berkeadilan. Jika dilihat dari perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur memiliki kehidupan berdemokrasi yang baik dengan indeksnya mencapai 77,67 persen pada tahun 2019. Dengan capaian tersebut kinerja demokrasi Kalimantan Timur saat ini masih berada pada kategori “sedang”. Meskipun begitu, angka indeks ini masih cukup fluktuatif di setiap tahunnya sehingga pemerintah daerah harus mempertahankan prestasi demokrasi seperti masa sekarang ini. Namun pada tahun 2020 posisi Indeks Demokrasi Indonesia mencapai 81,99 persen.

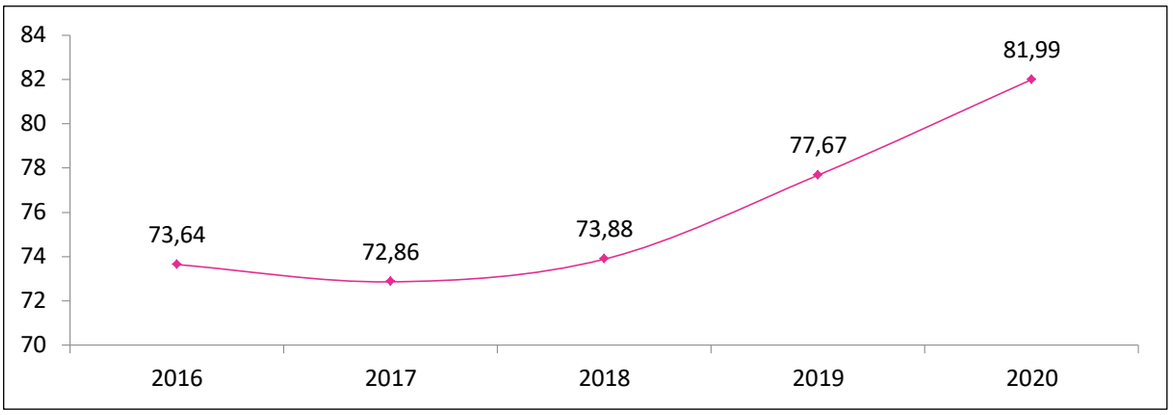

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.80
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2020

D. Iklim Investasi Daerah

Pada tahun 2019 sektor pertambangan merupakan sektor yang paling dominan dalam investasi Penanaman Modal Dalam Negeri, namun sejak pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia sektor yang paling dominan di tahun 2020 adalah sektor industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi yang mencapai Rp 7.965,22 miliar dan meningkat tajam di tahun 2021 hingga mencapai Rp 15.145,34 miliar. Investasi sektor pertambangan juga mengalami peningkatan pada tahun 2021 mencapai Rp 5.859,33 miliar meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp 3.818,59 miliar diikuti sektor Tanaman pangan dan perkebunan yang mencapai Rp 4.828,00 miliar.

Tabel II.91
Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

No.	Sektor Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
I.	Sektor Primer					
1.	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	2.886.876,90	3.747.269,70	4.278.148,30	4.738.083,60	4.828.002,20
2.	Kehutanan	25.144,20	602.835,40	283.625	125.549,60	73.973,60
3.	Perikanan	.	.	.	3,00	0,50
4.	Pertambangan	4.714.508,50	12.559.385,40	8.712.257,70	3.818.587,60	5.859.330,30
II.	Sektor Sekunder					
1.	Industri Makanan	551.959,10	1.687.495,70	569.890,60	1.397.339,40	671.841,30
2.	Industri Tekstil	.	.	.	0	2,00
3.	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	.	.	.	0	-
4.	Industri Kayu	316.482	264.104,30	350.224	97.509,90	5.996,00
5.	Industri Kertas, Barang Kertas, dan Percetakan	.	.	.	0	5,00
6.	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	9.351,90	1.034,70	444.145,60	7.965.221,90	15.145.338,40
7.	Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik	.	.	9.000	70,80	-
8.	Industri Mineral Non-Logam	748,30	17.919,90	292.133,10	95,00	2.351
9.	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	27.566	.	.	5.000	10,30
10.	Industri Instrumen Kedokteran, Presesi, Optik dan Jam	.	.	.	0	39,50
11.	Industri Alat Angkutan dan	.	7.620	151.706,50	3.626,30	9.221,80

No.	Sektor Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
	Transportasi Lainnya					
12.	Industri lainnya	248	.	509,50	70.348,60	5.200,50
III.	Sektor Tersier					
1.	Listrik, Gas, dan Air	2.297.726,20	2.559.556,90	2.021.363,60	759.122,70	298.896,80
2.	Konstruksi	375,30	3.204.289,50	1.223.384,70	5.777.776,90	113.413,70
3.	Perdagangan dan Reparasi	136.787,70	82.557,40	341.327,60	218.379,90	295.260,00
4.	Hotel dan Restoran	530	480	1.086.261,80	25.127	55.384,90
5.	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	4.322,20	165.403,80	940.606,30	459.299,20	1.503.072,30
6.	Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran	2.850	26.874,40	345.944,10	53.687,40	840.351,30
7.	Jasa Lainnya	4.740,10	1.015.135	1.623.524,70	419.150	589.690,80
Total		10.980.216,40	25.941.962,10	22.674.053,10	25.934.008,80	30.297.382,20

Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2022

Sektor usaha pertambangan yang mengalami peranan terbesar di Kalimantan Timur mengalami peningkatan nilai investasi PMA yang mencapai US$ 252.125,20 Ribu dibanding tahun sebelumnya yang mencapai US$ 167,86 Ribu sedangkan sektor yang mengalami peningkatan secara signifikan yaitu pada sektor Industri Makanan yang mencapai US$ 242.430,00 Ribu dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai US$ 41.235,5 Ribu diikuti sektor industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi, sektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan dan sektor transportasi, Gudang dan komunikasi.

Tabel II.92
Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021 (US$)

No	Sektor Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
I.	Sektor Primer					
1.	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	160.567.800	64.114.100	185.796.300	67.781.500	58.097.000
2.	Kehutanan	82.734.000	657.100	2.751.700	2.071.400	2.330.000
3.	Perikanan	.	135.500	.	-	-
4.	Pertambangan	900.503.500	188.763.000	306.457.800	167.858.400	252.125.200
II.	Sektor Sekunder					
1.	Industri Makanan	72.145.900	118.386.600	14.264.600	41.235.500	242.430.000
2.	Industri Tekstil	.	.	.	-	-
3.	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	.	.	.	-	-
4.	Industri Kayu	.	6.600	33.300	-	15.291.200
5.	Industri Kertas, Barang Kertas, dan Percetakan	.	.	.	-	-
6.	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	9.552.500	760.700	60.000	32.861.600	66.411.000
7.	Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik	9.494.000	256.700	561.100	986.400	990.600
8.	Industri Mineral Non-Logam	16.586.100	.	15.809.600	24.840.000	40.020.700
9.	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	3.607.700	22.600	1.879.400	276.400	24.600
10.	Industri Instrumen Kedokteran, Presesi, Optik dan Jam	.	253.200	1.533.400	3.550.700	1.084.700

No	Sektor Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
11.	Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	58.500	.	43.800	-	-
12.	Industri lainnya	.	526.100	134.600	-	-
III.	Sektor Tersier					
1.	Listrik, Gas, dan Air	21.413.400	53.012.000	280.607.900	278.800	-
2.	Konstruksi	.	5.093.100	.	-	-
3.	Perdagangan dan Reparasi	13.289.100	3.738.700	4.258.100	5.618.500	3.804.800
4.	Hotel dan Restoran	704.800	2.245.800	1.297.000	791.000	586.000
5.	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	67.399.200	86.566.000	14.847.700	29.415.000	52.588.300
6.	Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran	1.115.400	301.200	146.900	221.300	9.379.800
7.	Jasa Lainnya	503.900	62.662.600	32.616.200	240.700	26.300
Total		1.285.215.200	587.501.600	863.099.400	378.027.200	745.190.200

Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2022

Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan pada tahun 2017 yang mencapai Rp 11,42 triliun dan mengalami peningkatan ditahun berikutnya hingga mencapai Rp 31,64 triliun pada tahun 2021.

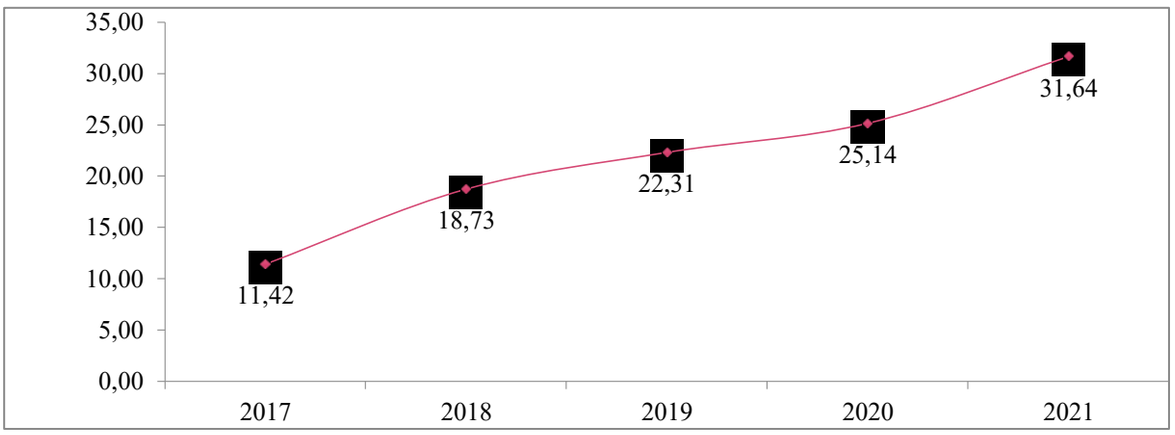

Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2022

Gambar II.81
Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021 (Triliun Rp)

E. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kaltim lebih kecil dibandingkan dengan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Persoalan ini disebabkan oleh masih belum optimalnya daya saing produk dan masih terbatasnya pasar produk, karena kualitas, kuantitas, dan kontinyuitas produk belum optimal dan belum luasnya jangkauan jaringan perdagangan.

Kinerja perdagangan sangat dipengaruhi oleh nilai transaksi, kerjasama pemasaran, pelaku usaha, dan nilai ekspor. Selama periode 2017-2021, neraca perdagangan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan neraca positif karena nilai ekspor lebih besar dari nilai impor. Sementara dilihat dari tren pertumbuhan mengalami surplus perdagangan.

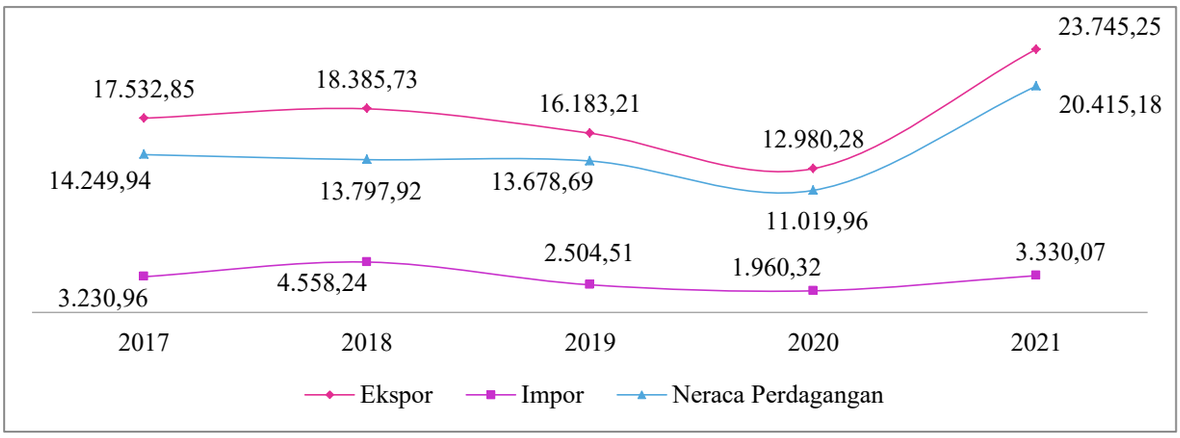

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.82
Nilai Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021

Ekspor Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 82,93 persen dibanding tahun 2020 yaitu dari US$ 12,98 miliar menjadi US$ 23,75 miliar. Peningkatan ekspor tahun 2021 disebabkan oleh naiknya nilai ekspor barang migas maupun non migas, hanya komoditas hasil minyak dan hasil pertanian yang mengalami penurunan. Ekspor barang migas tahun 2021 mencapai US$ 1,61 miliar naik sebesar 39,79 persen dibanding tahun 2020. Sementara ekspor barang non migas mencapai US$ 22,14 miliar naik sebesar 87,12 persen dibanding tahun 2020.

Tabel II.93
Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Kalimantan Timur,
Tahun 2017 – 2021 (Juta US$)

No	Golongan Barang	2017	2018	2019	2020	2021
Migas		3.781,67	4.302,83	3.356,38	2.068,20	1.605,15
1	Minyak Mentah	922,56	334,70	12,63	7,27	-
2	Hasil Minyak	188,97	12,97	224,05	108,64	7,40
3	Gas	3.140,97	2.977,57	1.831,52	1,032,38	1.597,75
Non Migas		10.072,71	13.230,03	15.029,36	14.113,59	22.140,09
1	Hasil Tambang	11.957,04	13.580,80	12.408	9.600,36	17.364,22
2	Hasil Industri	1.266,53	1.445,92	1.696,72	2.222,52	4.769,25
3	Hasil Pertanian	4,82	4,21	8,87	9,11	6,63
Total Ekspor		17.532,85	18.385,73	16.183,21	12.980,28	23.745,24

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Produk Mineral adalah golongan barang yang paling dominan diekspor dari Kalimantan Timur. Pada tahun 2021 produk mineral nilai ekspornya mencapai US$ 17,09 miliar atau sebesar 79,71 persen dari total nilai ekspor Kalimantan Timur meningkat dibanding tahun sebelumnya

yang mencapai US$ 10,75 miliar. Golongan barang dengan nilai ekspor terbesar berikutnya adalah Lemak, Minyak, Malam Nabati dan Hewani sebesar US$ 2,84 miliar mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai US$ 1,3 Juta.

Tabel II.94
Nilai Ekspor Provinsi Kalimantan Timur Menurut Golongan Barang Utama, Tahun 2017 – 2021 (Juta US$)

No	Golongan Barang	2017	2018	2019	2020	2021
1	Produk Mineral	16.261,60	16.933,08	14.135,08	10.748,65	18.969,36
2	Lemak, Minyak, Malam Nabati dan Hewani	584,81	640,79	887,42	1.298,27	3.109,30
3	Produk Industri Kimia	479,71	672,22	746,82	692,61	1.214,16
4	Mesin, Perlengkapan Listrik, Elektronika	190,10	123,04	232,13	28,27	1,66
5	Binatang Hidup, Produk Hewani	5,67	7,71	83,13	60,24	1,28
6	Lainnya	10,96	8,89	98,63	61,99	449,48
Total		17.532,85	18.385,73	16.183,21	12.980,28	23.745,24

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Nilai ekspor komoditas Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir hingga mencapai 6,48 miliar US$ pada tahun 2021 mengalami peningkatan 190,58 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2,23 miliar US$.

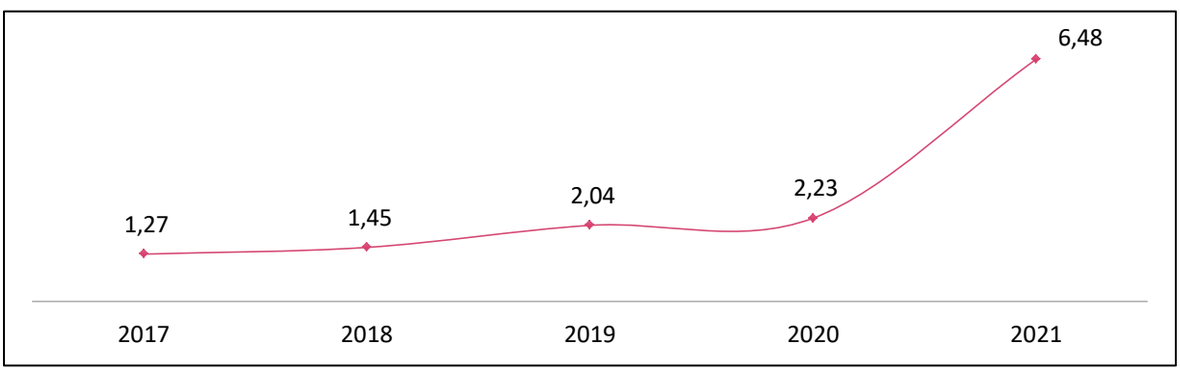

Sumber: DISPERINDAGKOP Prov KALTIM, 2021

Gambar II.83
Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021 (Miliar US$)

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan merupakan pondasi awal dan sebagai tujuan akhir dari pembangunan daerah. Namun untuk mencapai pembangunan yang diinginkan, tidak hanya kuantitas

penduduk saja yang dibutuhkan, melainkan sumber daya manusia berkualitaslah yang menjadi harapan utama penyokong pembangunan suatu daerah.

Indikator paling mudah dalam melihat kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh masyarakat. Selain itu, kelompok umur produktif dan non produktif juga dapat dijadikan acuan dalam menunjang analisis beban kualitas sumber daya manusia. Analisis kinerja atas sumber daya manusia dapat dilakukan terhadap indikator pendidikan penduduk yang telah ditamatkan sehingga akan terlihat kualitas sumber daya manusia serta rasio ketergantungan yang menggambarkan ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk produktif.

A. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Semakin tinggi penduduk mengenyam pendidikan maka semakin berkualitas sumber daya manusia yang ada di suatu daerah. Oleh karena itu, perlu adanya analisis terkait pendidikan penduduk sebagai subyek pembangunan untuk mengetahui seberapa tinggi kualitas potensi sumber daya manusia di suatu wilayah.

Terlihat bahwasanya penduduk yang telah mengenyam pendidikan hingga bangku diploma/sarjana pada tahun 2021 hanya sebesar 7,14 persen, sementara yang lain hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang SMA/MA/SMK (24,56 persen), SLTP/MTs (13,31 persen) dan SD/MI (16,91 persen). Diluar hal tersebut yang penting untuk ditekankan adalah masih cukup tingginya masyarakat yang tidak/belum sekolah/belum tamat SD yang mencapai 38,07 persen, persentase ini meningkat dibandingkan presentase pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini mengindikasikan masih belum optimalnya perhatian pemerintah dalam menggalakkan peningkatan sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur.

Efek dari rendahnya tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan keahlian sebagai modal daya saing tenaga kerja. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah maupun *stakeholder* terkait untuk mengoptimalkan kembali program dan kegiatan

dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur.

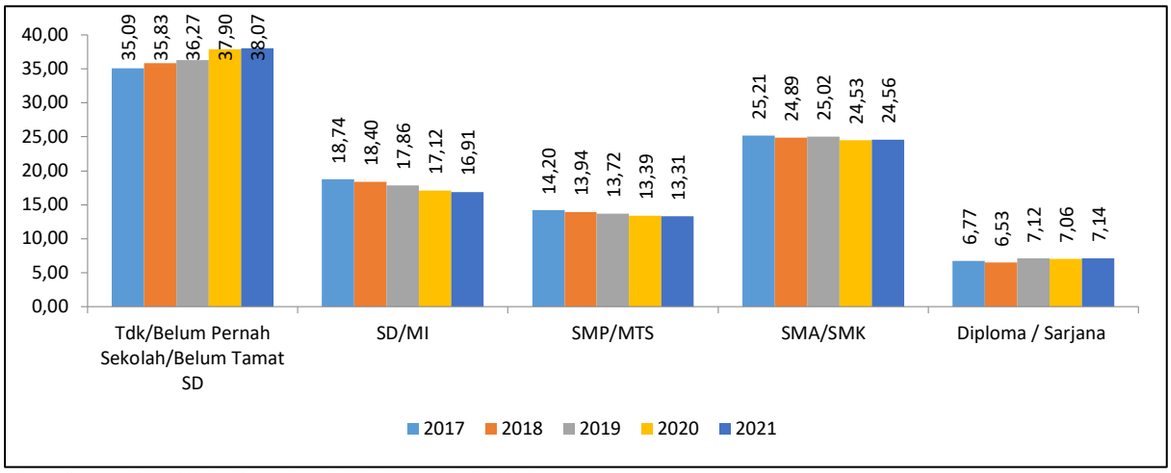

Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.84
Persentase Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021

B. Rasio Ketergantungan

Produktivitas penduduk, selain dari kualitas pendidikan juga ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) dan usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di Provinsi Kalimantan Timur, rasio ketergantungan penduduk non produktif pada tahun 2021 sedikit mengalami peningkatan menjadi sebesar 45,16, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 45-46 orang penduduk usia non produktif.

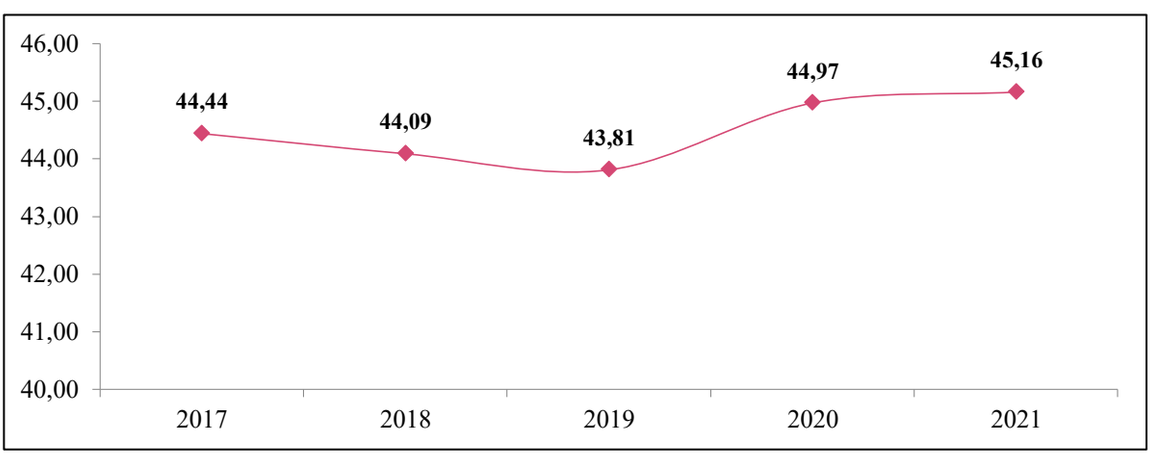

Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.85

Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021

Tabel II.95
Capaian Kinerja Pembangunan Aspek Daya Saing Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 – 2021

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur					
1.1	Tingkat kemantapan jalan provinsi (%)	63,46	52,85	61,45	69,77	75,20
1.2	Jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan kawasan sentra produksi (kawasan)	3	2	2	2	4
1.3	Capaian akses air minum layak (%)	77	71,83	56,84*	64,53*	70,78
1.4	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	15.558,50	13.618,50	13.728,50	13.878,50	14.078,50
1.5	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	n/a	730	641	477	406
1.6	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	459,59	673,42	1.525,47	1.287,82	1.190,14
1.7	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	75,09	73,18	66,46	66,46	75,44
1.10	Rasio elektrifikasi (%)	84,07	84,21	88,93	90,21	91,98
2	Fokus iklim berinvestasi					
2.1	Nilai realisasi investasi (Rp Triliun)	34,73	25,53	35,62	31,38	31,05
2.2	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan (hari)	12	15	14	12	5
2.3	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM (%)	n/a	n/a	100	100	100
3	Fokus Sumber Daya Manusia					
3.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	71	76,55	76,55	76,60	77,82
3.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,56	82,22	81,50	82,00	82,57
3.3	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

**): Perubahan Asumsi rumusan perhitungan (cakupan layanan air minum teknis) menjadi perhitungan capaian akses air minum layak administratif; Perubahan baseline luas kawasan kumuh berdasarkan SK Kawasan Kumuh baru serta penanganan yang telah dilaksanakan oleh APBN, APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota.*

2.5. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Perumusan berbagai dokumen perencanaan tidak akan terlepas dari analisis dan evaluasi kinerja pembangunan pada periode sebelumnya sebagai bagian penting untuk memulai tahapan lanjutan pembangunan daerah. Salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah adalah evaluasi terhadap program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan perencanaan dan mencapai target yang diinginkan. Dengan adanya evaluasi, ketidakcocokan atau kesalahan perumusan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan untuk mencapai target dapat segera diantisipasi dengan berbagai perubahan sehingga arah pembangunan daerah dapat kembali ke koridor sesuai visi dan misi kepala daerah.

Secara umum, hasil evaluasi pada setiap misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur hingga tahun 2021 menunjukkan kecenderungan positif sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi masukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kalimantan Timur Tahun 2023. Berikut hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan Provinsi Kalimantan Timur:

Tabel II.96
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	P-RPJMD		Realisasi Tahun 2021		Perangkat Daerah
	Indikator	Target 2021	Kinerja	(%)	
MISI 1. BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA TERUTAMA PEREMPUAN, PEMUDA DAN PENYANDANG DISABILITAS					
Tujuan 1 : Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,75	76,88	100,17	
Sasaran : 1.1 Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,91	9,84	99,29	
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,91	13,81	99,28	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SMA/SMK (%)	77	78,15	101,49	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Prosentase Peningkatan jangkauan dan kapasitas perpustakaan yang terakreditasi (%)	6,89	8,1	117,56	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Sasaran : 1.2 Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	0,22	0,13	59,09	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pengembangan daya saing keolahragaan (%)	66,60	20,59	30,92	Dinas Pemuda dan Olah Raga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan (%)	0,8	0,13	16,25	Dinas Pemuda dan Olah Raga
Sasaran : 1.3 Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,45	74,61	100,21	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	P-RPJMD		Realisasi Tahun 2021		Perangkat Daerah
	Indikator	Target 2021	Kinerja	(%)	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan oleh kab/kota (%)	100	100	100,00	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kab/Kota yang memiliki ≥45% Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	30	60	200,00	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kab/Kota yang melakukan PHBS (Kab/Kota)	3	3	100,00	Dinas Kesehatan
Sasaran : 1.4 Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	65,63	66,64	101,54	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Implementasi Kelembagaan PUG (Kebijakan)	1	1	100,00	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tujuan 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5	6,54	99,38%	
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,81	6,83	99,71%	
Sasaran : 2.1 Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Indeks Desa Membangun	0,6770	0,7071	104,45	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Desa Berkembang	30	27	90,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara optimal (Desa)	30	30	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Sasaran : 2.2 Meningkatnya daya saing angkatan kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	33,14	26,04	78,58	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	P-RPJMD		Realisasi Tahun 2021		Perangkat Daerah
	Indikator	Target 2021	Kinerja	(%)	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	70	75	107,14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	31	79,07	255,06	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
MISI 2. BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN					
Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	1,5±1	2,48	99,20	
	PDRB per Kapita (Juta Rp)	170	182,54	107,38	
	LPE Non Migas dan Batubara (%)	1,5	2,69	179,33	
	Nilai Tukar Petani	118	120,94	102,49	
Sasaran : 3.1 Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	Pendapatan Daerah (Miliar Rp)	9.590	10.220	105,21	
KEUANGAN					
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100	92,98	92,98	Badan Pendapatan Daerah
	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak)	685	692	101,02	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100	100	100	Badan Pendapatan Daerah
Sasaran : 3.2 Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US$)	1,57	4,75	302,55	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5	115,56	2.311,20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sasaran : 3.3 Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB (%)	9,44	7,97	84,43	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	P-RPJMD		Realisasi Tahun 2021		Perangkat Daerah
	Indikator	Target 2021	Kinerja	(%)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	2	2	100,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sasaran : 3.4 Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,64	0,58	90,63	
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,36	0,36	100,00	
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	5	4,8	96,00	
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,68	1,68	100,00	
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,06	1,16	109,43	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1) Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan Yang Difasilitasi (Ha)	7100	7100	100,00	
	2) Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura (Unit)	6	6	100,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Jumlah produksi padi (ton)	271.356	240.641	88,68	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (ton)	273.070	313.431	114,78	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	P-RPJMD		Realisasi Tahun 2021		Perangkat Daerah
	Indikator	Target 2021	Kinerja	(%)	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang di bina (Orang)	85	91	107,06	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Jumlah Kelembagaan Petani berbasis Koorporasi yang dibina (Lembaga)	4	4	100,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Miniranch yang teregister (unit)	24	24	100,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Angka Kelahiran Sapi (%)	20,5	19	92,68	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)	4,079	6,02	147,59	Dinas Perkebunan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1) Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan (Kelompok)	30	34	113,33	Dinas Perkebunan
	2) Luas Kebun yang dibangun (Ha)	1.425.580	1.540.488	108,06	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas perkebunan (ton)	17.136.849,15	17.792.792	103,83	Dinas Perkebunan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (Lembaga)	1	1	100,00	Dinas Perkebunan
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP) (Perusahaan)	35	41	117,14	Dinas Perkebunan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	P-RPJMD		Realisasi Tahun 2021		Perangkat Daerah
	Indikator	Target 2021	Kinerja	(%)	
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Ha)	289.048	289.048	100,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	158.938	168.964	106,31	Dinas Kelautan Dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	161.216	158.086	98,06	Dinas Kelautan Dan Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan (Jenis)	2	2	100,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32.000	25.942	81,07	Dinas Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1) Produksi Hasil Hutan Kayu (M3)	4.950.000	4.798.049,68	96,93	Dinas Kehutanan
	2) Produksi Hasil Hutan Non Kayu (Ton)	670	694,28	103,62	
Sasaran : 3.5 Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	32,53	31,64	97,26	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Waktu penyelesaian proses perizinan (hari)	12	5	158,33	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM (%)	100	100	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sasaran : 3.6 Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	12,92	15,13	117,10	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	P-RPJMD		Realisasi Tahun 2021		Perangkat Daerah
	Indikator	Target 2021	Kinerja	(%)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase tercapainya target UKM naik kelas (%)	1	1	100,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase tercapainya target Koperasi sehat (%)	Tidak dilaksanakan			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital (%)	3	2,75	91,67	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sasaran : 3.7 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	9,52	10,47	109,98	
	Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)	14,93	16,34	109,44	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan	2	2	100,00	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	Tidak dilaksanakan			Dinas Pariwisata
MISI 3. BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN					
Tujuan 4 : Meningkatkan Pemerataan dan Pengembangan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Gini	0,328	0,334	98,17	
Sasaran : 4.1 Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang	Jumlah Penumpang yang terlayani (Orang)	4.500.000	4.664.922	103,66	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	P-RPJMD		Realisasi Tahun 2021		Perangkat Daerah
	Indikator	Target 2021	Kinerja	(%)	
menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Jumlah barang yang diangkut (Ton)	307.000.000	323.231.994	105,29	
	Jumlah kawasan ekonomi yang terhubungkan (Kawasan)	4	4	100,00	
	Capaian akses air minum layak (%)	66,53	70,78	106,39	
	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	14.028,50	14.078,50	100,36	
	Luas kawasan kumuh (Ha)	1.237,82	1.190,14	104,01	
	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	420	406	103,33%	
	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	75,94	75,94	100,00	
	Rasio elektrifikasi (%)	91,50	91,98	100,52	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP (%)	85	88	103,53	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Lakalantas (kasus)	512	418	118,36%	Dinas Perhubungan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (%)	75,02	75,2	100,24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan (%)	64,64	67,48	104,39	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Capaian Layanan SDA	73,69	74,07	100,52	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	P-RPJMD		Realisasi Tahun 2021		Perangkat Daerah
	Indikator	Target 2021	Kinerja	(%)	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	71.781	70.681	98,47	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik (meter)	2.785	2.180,20	78,28	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,87	0,87	100,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Pemanfaatan EBT (%)	6,08	6,53	107,40	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah KK Berlistrik	1.135.000	1.143.533	100,75	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
MISI 4. BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN					
Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,95	75,06	98,83	
Sasaran : 5.1 Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	27,75	41,96	151,21	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Indeks Kualitas Air Sungai (IKA)	53,75	51,92	96,60	Dinas Lingkungan Hidup
	2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,11	88,84	99,70	
	3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	79,81	82,21	103,01	
	4. Indeks kualitas air laut (IKAL)	83,56	85,40	102,20	
Sasaran : 5.2 Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Risiko Bencana	152,49	154,02	99,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
PROGRAM PENANGGULANGAN	Persentase Desa / Kelurahan	66,67	66,67	100,00	Badan Penanggulangan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	P-RPJMD		Realisasi Tahun 2021		Perangkat Daerah
	Indikator	Target 2021	Kinerja	(%)	
BENCANA	Tangguh Bencana				Bencana Daerah
MISI 5. BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK					
Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	B (71,00)	B (68,47)	96,44	
Sasaran : 6.1 Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,3	82,57	100,33	
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,20	2,24	70,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	persentase peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi (%)	70	70	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
Sasaran : 6.2 Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	76,65	77,67	101,33	
SEKRETARIAT DAERAH					
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	71	83,44	117,52	Sekretariat Daerah
	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	77	75,67	98,27	
	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	92	92	100,00	
Sasaran : 6.3 Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 3	Level 3	100	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	P-RPJMD		Realisasi Tahun 2021		Perangkat Daerah
	Indikator	Target 2021	Kinerja	(%)	
INSPEKTORAT DAERAH					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	85	85	100,00	Inspektorat

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, dari 54 program prioritas di Kalimantan Timur, terdapat 5 (lima) program prioritas yang pencapaian targetnya berada di bawah 80 persen. Program tersebut antara lain: Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan; Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja; Program Penempatan Tenaga Kerja; Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan; Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase.

Dari total 54 (lima puluh empat) program prioritas yang ditetapkan dalam P-RPJMD tahun 2019 – 2023, terdapat sebanyak 65 (enam puluh lima) indikator yang menjadi target kinerja pembangunan yang harus dicapai agar pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dapat dinilai berhasil. Dari total indikator yang telah ditentukan tersebut, sebanyak 48 (empat puluh delapan) indikator yang memiliki pencapaian melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2021, dua indikator tidak dilaksanakan di tahun 2021, dan sebanyak 15 (lima puluh belas) masih belum mencapai target yang telah ditentukan pada tahun 2021.

Terdapat pula 7 (tujuh) program prioritas yang memiliki indikator lebih dari 1 (satu), yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah; Program Penataan Organisasi; Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian; Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program Penyuluhan Pertanian; Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian; Program Pengelolaan Hutan; Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Beberapa hal yang menjadi catatan dalam upaya pencapaian target disetiap program prioritas pembangunan yang telah dijalankan oleh Perangkat Daerah antara lain:

1. Situasi pandemi covid-19 yang mengharuskan siswa/siswi untuk melakukan pembelajaran melalui sistem online.
2. Masih rendahnya daya tampung sekolah di jenjang SMA khususnya di wilayah kabupaten/kota.
3. Belum optimalnya kompetensi layanan pendidikan vokasi/kejuruan untuk masyarakat siap kerja.

4. Belum efektifnya pemerataan pemenuhan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan.
5. Belum optimalnya kapasitas dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan, khususnya dalam pemanfaatan IT.
6. Masih tingginya keterbatasan masyarakat kurang mampu dalam mengenyam Pendidikan.
7. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur pendukung pembelajaran jarak jauh.
8. Belum optimalnya pengembangan perpustakaan yang mendukung sistem pendidikan.
9. Akses pelayanan kesehatan masyarakat belum merata terutama pada daerah 3T.
10. Masih belum optimalnya pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi.
11. Belum optimalnya evaluasi implementasi PPRG.
12. Masih rendahnya partisipasi politik perempuan di parlemen.
13. Masih rendahnya upaya pengarusutamaan gender.
14. Masih kurangnya peran perempuan dalam pembangunan.
15. Belum Optimalnya pemberdayaan masyarakat dan desa.
16. Kualitas pembangunan wilayah perdesaan belum merata.
17. Masih kurangnya dukungan aksesibilitas infrastruktur di wilayah perdesaan.
18. Menurunnya konsumsi masyarakat khususnya di perdesaan.
19. Lemahnya pengembangan kompetensi/keterampilan tenaga kerja.
20. Banyaknya para pencari kerja yang masuk ke Kaltim dan belum mendapatkan pekerjaan.
21. Rendahnya kesempatan kerja.
22. Kurangnya SDM instruktur di BLK.
23. Belum optimalnya kapasitas fiskal dalam pendanaan pembangunan.
24. Rendahnya nilai tambah industri pengolahan non migas bagi perekonomian Kaltim.
25. Belum ada industri pengolahan non migas dan batubara baru yang beroperasional.
26. Menurunnya lahan pertanian akibat banyaknya alih fungsi lahan.
27. Masih banyaknya benih unggul yang belum bersertifikat sehingga produktivitas berkurang.

28. Masih banyak penerapan pengembangan pertanian yang belum bersifat intensifikasi.
29. Pemenuhan daging sapi lokal masih rendah sehingga lebih banyak impor dari daerah lain.
30. Masih rendahnya implementasi Perda terhadap areal perkebunan HCV.
31. Masih belum optimalnya produksi TBS akibat kelangkaan pupuk saat pandemi.
32. Masih rendahnya hilirisasi industri dan pemasaran terhadap produk perkebunan non kelapa sawit.
33. Masih banyaknya pembudidaya ikan yang belum bersertifikat sehingga banyak komoditi perikanan yang belum bisa diekspor.
34. Masih rendahnya pengolahan hasil perikanan yang belum bersertifikat.
35. Belum optimalnya pengelolaan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan dan bukan kayu.
36. Belum optimalnya realisasi nilai investasi di luar sektor pertambangan.
37. Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi terhadap perekonomian daerah akibat pandemi covid-19 (PPKM).
38. Kurangnya kunjungan wisatawan akibat kondisi pandemi covid-19.
39. Kurangnya aksesibilitas menuju destinasi wisata sehingga mengakibatkan tingginya biaya kunjungan wisatawan.
40. Kurangnya SDM pengelola pariwisata.
41. Kurangnya jumlah SDM pelaku Ekraf.
42. Belum maksimalnya pengembangan ekosistem Ekraf sebagai pendukung daya tarik wisata.
43. Belum optimalnya pelayanan infrastruktur dasar perhubungan.
44. Situasi pandemi covid yang mengakibatkan mobilisasi penumpang dan distribusi logistik (non batubara) berkurang.
45. Masih terdapat wilayah yang minim konektivitas dengan pusat kegiatan ekonomi.
46. Efektivitas keterhubungan kawasan ekonomi belum tercapai karena masih tingginya kerusakan Jalan Provinsi terutama di wilayah tengah.

47. Masih rendahnya peningkatan cakupan layanan air minum pada daerah yang rawan air dan daerah terpencil.
48. Keterbatasan wewenang penyelenggaraan SPAM, SPALD, dan Persampahan oleh Pemerintah Provinsi, yakni hanya dibatasi oleh kewenangan lintas Kabupaten/Kota (Regional).
49. Tidak semua sawah terlayani jaringan irigasi teknis.
50. Lemahnya integrasi data lokasi eksisting sawah dengan wilayah irigasi.
51. Belum optimalnya penanganan terhadap kawasan kumuh.
52. Masih tingginya masyarakat yang tinggal pada area permukiman kumuh.
53. Belum tepatnya kriteria penanganan kawasan kumuh yang ditangani oleh Provinsi.
54. Belum optimalnya infrastruktur pengendali bencana banjir.
55. Belum optimalnya penyelenggaraan Penataan Ruang.
56. Masih tingginya tingkat kerusakan jalan akibat dilalui oleh kendaraan yang melebihi kapasitas jalan.
57. Rendahnya ruang fiskal untuk pemerataan infrastruktur yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi.
58. Intervensi bantuan stimulan rumah layak huni belum terlalu besar untuk membantu pengurangan angka kemiskinan.
59. Belum optimalnya pelayanan listrik terhadap masyarakat khususnya di daerah pelosok.
60. Keterbatasan akses pembentukan desa tangguh bencana akibat pandemi covid-19.
61. Belum semua Perangkat Daerah memiliki sumber daya aplikasi pelayanan publik berbasis elektronik.
62. Belum tersusunnya rencana strategik SPBE lingkup provinsi.
63. Rendahnya penilaian pada pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Perangkat Daerah.
64. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pengawasan.
65. Belum optimalnya pelaksanaan SPIP di setiap perangkat daerah.

Tabel II.97
Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2021

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2020	Target RKPD Perubahan Tahun 2021	Capaian TW IV Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022
Tujuan 1 : Mewujudkan Masyarakat yang berkarakter berakhlak mulia dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,24	76,75	76,88	77,25
Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,77	9,91	9,84	10,04
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,72	13,91	13,81	14,02
Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	0,59	0,61	0,13	0,85
Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,33	74,45	74,61	74,60
Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	65,54	65,63	66,64	65,64
Tujuan 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	6,1	6,5	6,54	6,00
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,87	6,81	6,83	6,75
Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Indeks Desa Membangun	0,6752	0,677	0,7071	0,6825
Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)		33,14	26,04	35,00
Tujuan 3 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,85	1,5±1	2,48	3,5±1
	PDRB per Kapita (Juta Rp)	160,11	170	182,54	170,00
	LPE Non Migas dan Batubara (%)	-0,5	1,5	2,69	2,00
	Nilai Tukar Petani	111,65	118	120,94	113
Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	Pendapatan Daerah (Miliar Rp)		9.590	10.220	11.038
Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US$)	2,23	1,57	4,75	1,72

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2020	Target RKPD Perubahan Tahun 2021	Capaian TW IV Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022
Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB (%)	8,24	9,44	7,97	9,64
Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,63	0,64	0,58	0,65
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,36	0,36	0,36	0,37
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	4,94	5	4,8	5,20
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,67	1,68	1,68	1,70
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,13	1,06	1,16	1,07
Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	25,14	32,53	31,64	35,00
Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	15,04	12,92	15,13	13,00
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)		9,52	10,47	9,67
	Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)		14,93	16,34	15,23
Tujuan 4 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Gini	0,328	0,328	0,334	0,313
Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Jumlah Penumpang yang terlayani (Orang)	3.570.750	4.500.000	4.664.922	6.000.000
	Jumlah barang yang diangkut (Ton)	294.478.397	307.000.000	323.231.994	337.000.000
	Jumlah kawasan ekonomi yang terhubungkan (Kawasan)	2	4	4	5

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2020	Target RKPD Perubahan Tahun 2021	Capaian TW IV Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022
	Capaian akses air minum layak (%)	64,53	66,53	70,78	68,53
	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	14.242,61	14.028,50	14.078,50	14.278,50
	Luas kawasan kumuh (Ha)	468,89	1.237,82	1.190,14	1.187,82
	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	477	420	406	374
	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	66,46	75,94	75,94	76,74
	Rasio elektrifikasi (%)	90,21	91,5	91,98	93,00
Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,25	75,95	75,06	76,05
Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	50,72	27,75	41,96	28,50
Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Risiko Bencana	153,49	152,49	154,02	151,49
Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	70,5	B (71,00)	B(68,47)	B (72,00)
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	82,3	82,57	82,50
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,14	3,2	2,20	3,30
Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	76,6	76,65	77,67	78,00
Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

2.6. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.6.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja di tahun 2021, di identifikasi masih terdapat empat permasalahan utama pembangunan yang masih dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Timur, yaitu : tingginya angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks gini, masih rendahnya kualitas lingkungan hidup, serta masih rendahnya birokrasi.

1) Relatif Tingginya Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi 6,54 persen. Secara absolut, jumlah penduduk miskin juga meningkat menjadi sebanyak 241,77 ribu jiwa dibandingkan tahun 2020 yaitu sebanyak 230,26 ribu jiwa. Dimana garis kemiskinan di Kalimantan Timur juga meningkat menjadi sebesar Rp 689.035 yang didominasi untuk memenuhi kecukupan pangan/makanan. Peningkatan angka kemiskinan yang merupakan fenomena nasional ini disebabkan adanya Pandemi COVID-19 yang memberikan pengaruh negatif pada beberapa lapangan usaha. Beberapa kondisi dilakukan dalam menghadapi pandemi ini seperti pengurangan pegawai, penurunan omzet, hingga pembatasan produksi. Adanya keterbatasan-keterbatasan tersebut secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada kesejahteraan masyarat sehingga meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan kabupaten/kota tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2021 masih di Kabupaten Mahakam Ulu yaitu mencapai 11,90 persen, sementara tingkat kemiskinan terendah adalah Kota Balikpapan hanya sebesar 2,89 persen. Sebagai daerah baru dan memiliki wilayah yang sulit diakses, menjadi salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan Mahakam Ulu. Namun dalam perjalanannya, progress positif selalu ditunjukkan dari hasil program pembangunan daerah hingga Pandemi COVID-19 menimpa.

Permasalahan lain berdasarkan identifikasi pilar sosial TPB/SDGs adalah belum maksimalnya penjangkauan dan pemerataan program pengentasan kemiskinan dimana program-program masih

terpusat pada wilayah perkotaan dan hanya sebagian kecil berada di kabupaten/kota, terlebih di sekitar pedesaan. Situasi ini dimungkinkan faktor aksesibilitas akibat kondisi geografis yang relatif sulit dan pemenuhan fasilitas penunjang lainnya, tidak terkecuali jarak dengan pusat pemerintahan dan perekonomian.

2) Relatif Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Timur pada tahun 2021 tercatat sebesar 6,83% atau dibawah capaian target yang ditetapkan sebesar 6,81%. Perkembangan perluasan kesempatan kerja semakin kompleks dan dinamis membutuhkan tenaga kerja bukan saja terlatih tetapi mampu bersaing di tingkat daerah, nasional dan internasional. maka diperlukan sertifikasi kompetensi bertaraf internasional yang mampu berkreasi untuk melakukan inovasi menghadapi tantangan dan mampu menyesuaikan dengan tantangan yang dihadapi. Pemerintah mengkondisikan penciptaan pasar kerja yang sesuai dengan tuntutan global. Dalam hal ini tentu saja amat penting untuk mendorong sektor pendidikan, baik pada tingkat menengah maupun juga pendidikan tinggi, agar mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dalam arti siap kerja ataupun bahkan siap pakai.

Sebagaimana telah disinggung terdahulu, bahwa belum optimalnya integrasi pendidikan vokasi dengan kebutuhan tenaga kerja industri dan sektor ekonomi lainnya, menjadikan rendahnya penyerapan tenaga kerja produktif oleh dunia kerja. Pemerataan sarana dan prasarana Pendidikan dan peningkatan lulusan yang berdaya saing di dunia kerja juga masih terjadi dan perlu memperoleh perhatian lebih dalam program peningkatan sumber daya manusia di Kalimantan Timur. Urutan logisnya, bahwa rendahnya penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap pemerataan pendapatan.

Tidak meratanya pendapatan mengakibatkan gap kesejahteraan antar masyarakat, khususnya apabila dilihat dari tingginya angka kemiskinan di pedesaan dibandingkan dengan angka kemiskinan di perkotaan. Sektor industri berbasis lahan khususnya di sektor Pertambangan dan Perkebunan, justru berada dan tumbuh berkembang di tengah banyak wilayah yang masih relatif belum berkembang optimal/tertinggal, tidak terkecuali pembangunan pendidikannya Pembangunan yang tidak dilakukan secara merata dan menyeluruh

menimbulkan dan memperluas permasalahan yaitu bertambahnya kantong-kantong wilayah miskin dan tertinggal. Kecepatan laju pembangunan di wilayah tertinggal akan semakin sulit dikejar karena pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan peningkatan usaha ekonomi relatif terbatas. Tiga sektor terkait kebutuhan dasar dimaksud perlu menjadi perhatian besar ke depan.

Terbatasnya penciptaan lapangan usaha masyarakat turut berkontribusi pada pembentukan angka pengangguran terbuka. Pemerintah perlu mendorong kewirausahaan dalam upaya menciptakan lapangan pekerjaan baru. Tingkat pengangguran terbuka Kalimantan Timur masih berada di atas nasional sebesar 6,49 persen, dan masih menjadi provinsi tertinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Kalimantan. Sehingga program pembangunan ke depan diharapkan berhasil mengentaskan kemiskinan atau taraf hidup pra sejahtera masyarakat Kalimantan Timur.

3) Masih Adanya Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini Kalimantan Timur pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan angka ketimpangan menjadi 0,334. Sebelumnya indeks gini Kalimantan Timur sebesar 0,328. Jika dibandingkan dengan regional Kalimantan, pada tahun 2021 ketimpangan pendapatan terendah di Kalimantan Utara sebesar 0,292. Sedangkan sisanya menunjukkan level ketimpangan yang serupa pada posisi 0,31-0,35. Dengan capaian indeks gini Kalimantan Timur tersebut, masih berada di bawah tingkat ketimpangan Indonesia yang mencapai 0,384 pada tahun 2021. Cukup tingginya ketimpangan Kalimantan Timur ini dikarenakan terbatasnya konektivitas dan sulitnya aksesibilitas yang menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Timur, khususnya daerah terpelosok dan terdalam. Jika aksesibilitas dan konektivitas sudah baik, maka distribusi alur barang dan jasa akan lebih lancar, perekonomian masyarakat dapat bergerak secara lebih efisien dan produktif, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong kelompok berpendapatan rendah untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya.

4) Potensi Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup

Berdasarkan pemantauan IKLH yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Tahun 2021, diperoleh skor IKLH yang

lebih tinggi dari nasional yaitu 75,06. Namun, angka ini belum mencapai target dari yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021 yaitu 75,95. Berdasarkan hasil identifikasi sumber-sumber emisi di Provinsi Kalimantan Timur, diketahui sumber emisi terbesar berasal dari kegiatan alih fungsi lahan dan hutan, energi, pertanian dan peternakan serta limbah. Upaya-upaya untuk memitigasi dan mengadaptasinya telah ditetapkan dalam Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019 (Tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim) dan sejumlah program/kegiatan/sub kegiatan serta pengangaran telah dialokasikan secara cukup.

Meskipun berbagai kebijakan dan program telah direncanakan, risiko penurunan kualitas lingkungan hidup masih terjadi. Kondisi ini dapat dimengerti mengingat perekonomian Provinsi Kalimantan Timur yang masih didominasi oleh sumber daya tak terbarukan (unrenewable resources), tentunya Sektor Pertambangan. Penurunan kualitas lingkungan hidup jauh lebih mudah dilihat pada dampak yang diakibatkan, khususnya pada kesehatan masyarakat dan bencana hidrometeorologi yang terjadi. Selain itu, tutupan hutan dan lahan sebagai salah satu komponen dalam IKLH mengindikasikan bahwa apabila tutupan hutan semakin berkurang, maka wilayah tangkapan air akan menurun persoalan ini diikuti oleh tingginya kerentanan lahan. Tingginya erosi dan sedimentasi akibat perubahan tutupan hutan, berdampak pada pendangkalan di alur perairan. Selain itu, Tutupan lahan bervegetasi semakin berkurang disebabkan oleh semakin meluasnya 196ystem196 galian tambang batubara yang 196ystem196y menimbulkan/menyisakan lubang-lubang bekas galian tambang, perluasan areal perkebunan dan perluasan 196ystem196 permukiman, sebagai konsekwensi logis dari pembangunan perekonomian berbasis sumber daya alam dan peningkatan populasi penduduknya.

Berdasarkan analisis permasalahan TPB/SDGs, kebijakan terkait energi baru dan terbarukan masih diperlukan, termasuk untuk mendorong berkembangnya 196ystem196y biodiesel yang diharapkan dapat menyediakan sumber energi yang lebih rendah emisi di masa datang bagi Kalimantan Timur. Pemenuhan ketersediaan air bersih, yang memerlukan kualitas baku air dari sungai dan perairan lainnya, disertai dengan perbaikan 196ystem pengelolaan limbah, juga akan

menuju pada perbaikan indeks kualitas air. Upaya pemulihan ekosistem daratan serta penanganan sampah dan polusi, masih menjadi isu prioritas dalam TPB/SDGs. Perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem lautan masih perlu dilakukan lebih optimal.

Hal lain yang masih perlu memperoleh perhatian adalah dengan semakin meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi, menuntut peningkatan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi kejadian bencana. Perencanaan mitigasi bencana perlu disusun dan dipantau setiap tahunnya, yang disertai dengan kapasitas dalam kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Jika diambil kesimpulan terkait dengan isu lingkungan yang masih terjadi di Provinsi Kalimantan Timur, maka resiko penurunan kualitas lingkungan hidup terakumulasi dari permasalahan tingginya potensi peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Belum Optimalnya Ketangguhan Bencana daerah.

5) Masih Rendahnya Reformasi Birokrasi

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Kalimantan Timur pada tahun 2021 tercatat mendapatkan predikat B dengan nilai 68,47 dan masih dibawah capaian target yang ditetapkan sebesar 71,00. Berdasarkan hasil penilaian, komponen penilaian kualitas pelayanan public, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan kinerja organisasi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, berdasarkan hasil antara area perubahan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diperoleh hasil antara terkait nilai ASN profesional yang cukup rendah dan menurun dibandingkan tahun sebelumnya serta nilai kepatuhan pelayanan publik yang masih cukup rendah berada pada kisaran 53,04 dari skala 0-100.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021 ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya pelaksanaan reformasi birokrasi di Kalimantan Timur telah dilakukan secara menyeluruh pada seluruh Perangkat Daerah, namun kualitas implementasi reformasi birokrasi masih belum merata; agen perubahan sudah dibentuk melalui Surat Keputusan Gubernur, namun belum sepenuhnya memberikan dampak nyata untuk menggerakkan perubahan; rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah

disusun oleh Perangkat Daerah belum sepenuhnya selaras dengan *Road map* serta belum dilakukannya pemantauan atas rencana aksi secara berkala.

2.6.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan per-urusan disusun berdasarkan sebab indikatif dari analisis data gambaran umum kondisi daerah dan berbagai data lain, seperti kesepakatan mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) dan kebijakan-kebijakan di level nasional yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema RKPD Kalimantan Timur tahun 2023.

Tabel II.98
Permasalahan Pembangunan Per Urusan

No	Urusan	Sasaran	Masalah
1	Pendidikan	Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Situasi pandemi covid yang menghambat pencapaian harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah
			Masih rendahnya daya tampung sekolah di jenjang SMA khususnya di wilayah kabupaten/kota
			Tingginya anak usia sekolah yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
			Belum optimalnya kompetensi layanan pendidikan vokasi/kejuruan untuk masyarakat siap kerja
			Belum efektifnya pemerataan pemenuhan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan
			Belum optimalnya kapasitas dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan, khususnya dalam pemanfaatan IT
			Masih tingginya keterbatasan masyarakat kurang mampu dalam mengenyam pendidikan
			Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur pendukung pembelajaran jarak jauh
			Belum optimalnya pengembangan

No	Urusan	Sasaran	Masalah
			perpustakaan yang mendukung sistem pendidikan
2	Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Peran pemuda belum terlibat secara nyata dalam membangun kemandirian daerah
3	Kesehatan	Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat	Akses pelayanan kesehatan masyarakat belum merata terutama pada daerah 3T
4	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Masih belum optimalnya pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi
			Belum optimalnya evaluasi implementasi PPRG
			Rendahnya partisipasi politik perempuan di parlemen
			Masih rendahnya upaya pengarusutamaan gender
			Kurangnya peran perempuan dalam pembangunan
5	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Belum Optimalnya pemberdayaan masyarakat dan desa
			Kualitas pembangunan wilayah perdesaan belum merata
			Masih kurangnya dukungan aksesibilitas infrastruktur di wilayah perdesaan
			Menurunnya konsumsi masyarakat khususnya di perdesaan
6	Tenaga Kerja	Meningkatnya daya saing angkatan kerja	Masih rendahnya daya saing sumber daya manusia
			Lemahnya pengembangan kompetensi/keterampilan tenaga kerja
			Banyaknya para pencari kerja yang masuk ke Kaltim dan belum mendapatkan pekerjaan
			PHK akibat pandemi covid
			Rendahnya kesempatan kerja
			Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
			Kurangnya SDM instruktur di BLK
7	Keuangan	Meningkatnya pendanaan pembangunan	Belum optimalnya kapasitas fiskal dalam pendanaan pembangunan

No	Urusan	Sasaran	Masalah
		pemerintah	
8	Perindustrian	Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	Rendahnya nilai tambah industri pengolahan non migas bagi perekonomian Kaltim
			Belum ada industri pengolahan non migas dan batubara baru yang beroperasional
9	Pertanian	Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Menurunnya lahan pertanian akibat banyaknya alih fungsi lahan
			Masih banyaknya benih unggul yang belum bersertifikat sehingga produktivitas berkurang
			Masih banyak penerapan pengembangan pertanian yang belum bersifat intensifikasi
			Permintaan daging sapi/ayam menurun akibat pandemi covid
			Pemenuhan daging sapi lokal masih rendah sehingga lebih banyak impor dari daerah lain
			Masih rendahnya implementasi Perda terhadap areal perkebunan HCV
			Masih belum optimalnya produksi TBS akibat kelangkaan pupuk saat pandemi dan banyaknya petani yang enggan kebun sawit yang diremajakan
			Masih rendahnya hilirisasi industri dan pemasaran terhadap produk perkebunan non kelapa sawit
10	Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Masih banyaknya pembudidaya ikan yang belum bersertifikat sehingga banyak komoditi perikanan yang belum bisa diekspor
			Masih rendahnya pengolahan hasil perikanan yang belum bersertifikat
11	Kehutanan	Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Belum optimalnya pengelolaan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan dan bukan kayu
12	Penanaman Modal	Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	Belum optimalnya realisasi nilai investasi di luar sektor pertambangan
13	Koperasi, Usaha	Meningkatnya	Rendahnya kontribusi UMKM dan

No	Urusan	Sasaran	Masalah
	Kecil dan Menengah	usaha ekonomi koperasi dan UKM	koperasi terhadap perekonomian daerah akibat pandemi covid (PPKM)
14	Pariwisata	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Kurangnya kunjungan wisatawan akibat kondisi pandemi
			Kurangnya aksesibilitas menuju destinasi wisata sehingga mengakibatkan tingginya biaya kunjungan wisatawan
			Kurangnya SDM pengelola pariwisata
			Kurangnya jumlah SDM pelaku Ekraf
			Belum maksimalnya pengembangan ekosistem Ekraf sebagai pendukung daya tarik wisata
15	Perhubungan	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Belum optimalnya pelayanan infrastruktur dasar perhubungan
			Situasi pandemi covid yang mengakibatkan mobilisasi penumpang berkurang
			Masih terdapat wilayah yang minim konektivitas dengan pusat kegiatan ekonomi
			Situasi pandemi covid yang mengakibatkan distribusi logistik (non batubara) berkurang
16	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Efektivitas keterhubungan kawasan ekonomi belum tercapai karena masih tingginya kerusakan Jalan Provinsi
			Keterbatasan wewenang penyelenggaraan SPAM, SPALD, dan Persampahan oleh Pemerintah Provinsi, yakni hanya dibatasi oleh kewenangan lintas Kabupaten/Kota (Regional)
			Masih rendahnya peningkatan cakupan layanan air minum pada daerah yang rawan air dan daerah terpencil
			Belum optimalnya pemerataan infrastruktur sumber daya air
			Tidak semua sawah terlayani jaringan irigasi teknis

No	Urusan	Sasaran	Masalah
			Lemahnya integrasi data lokasi eksisting sawah dengan wilayah irigasi
			Belum optimalnya penanganan terhadap kawasan kumuh
			Masih luasnya kawasan kumuh di Kaltim
			Masih tingginya masyarakat yang tinggal pada area permukiman kumuh
			Belum tepatnya kriteria penanganan kawasan kumuh (provinsi)
			Belum optimalnya infrastruktur pengendali bencana banjir
			Belum optimalnya penyelenggaraan Penataan Ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang)
			Akses konektivitas yang terbatas
			Masih tingginya tingkat kerusakan jalan akibat dilalui oleh kendaraan yang melebihi kapasitas jalan
			Rendahnya ruang fiskal untuk pemerataan infrastruktur yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi
17	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Intervensi bantuan stimulan rumah layak huni belum terlalu besar untuk membantu pengurangan angka kemiskinan
18	Energi dan Sumber Daya Mineral	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Belum optimalnya pelayanan listrik terhadap masyarakat khususnya di daerah pelosok
19	Lingkungan Hidup	Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Terus menurunnya indeks kualitas air dan kualitas udara
20	Ketentraman dan	Meningkatnya	Belum Optimalnya Ketangguhan

No	Urusan	Sasaran	Masalah
	Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Ketangguhan Menghadapi Bencana	Bencana daerah
			Keterbatasan akses pembentukan desa tangguh bencana akibat pandemi covid
21	Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Belum semua Perangkat Daerah memiliki sumber daya aplikasi pelayanan publik berbasis elektronik
			Belum tersusunnya rencana strategik SPBE lingkup provinsi
22	Sekretariat Daerah	Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Rendahnya penilaian pada pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Perangkat Daerah
23	Pengawasan	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pengawasan
			Belum optimalnya pelaksanaan SPIP di setiap perangkat daerah

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan pembiayaan pembangunan yang direncanakan pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang arah kebijakan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur, perkiraan kondisi ekonomi makro yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang akan memberikan pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Dalam rangka mencapai target kinerja makro ekonomi yang direncanakan, kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting dan berpengaruh serta harus dilakukan pencermatan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Analisis kerangka pendanaan memberikan analisis terkait perkiraan besaran pendapatan dari berbagai sumber pendapatan pada sektor-sektor potensial, perkiraan belanja daerah yang akan dilakukan pemerintah, dan pembiayaan untuk pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pandemi COVID-19 yang melanda secara global di seluruh dunia sejak akhir Desember 2019 memberikan negatif pada seluruh lapisan kehidupan, baik terhadap Kesehatan, ekonomi dan sosial. Bagi perekonomian global, berdampak secara signifikan terhadap terjadinya penurunan kinerja yang berpotensi menciptakan resesi ekonomi. Sebagian besar pekerja yang terdampak, berakibat terhadap kehilangannya pekerjaan dan penurunan pendapatan yang akhirnya mengakibatkan terjadinya penurunan kesejahteraan.

Sepanjang sejarah perekonomian di Indonesia sejak krisis ekonomi 2019, pada Tahun 2020 ini perekonomian Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan yang cukup dalam yakni sebesar 2,87 persen. Bahkan selama Tahun 2020, ekonomi Indonesia dapat dikatakan mengalami resesi ekonomi

karena mengalami kontraksi ekonomi selama 3 kuartal berturut-turut sejak kuartal kedua hingga akhir tahun 2020. Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan kinerja sektor-sektor di dalam negeri, serta melemahkan permintaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kinerja perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2021 masih memiliki tren perbaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2021 yang mencapai 2,48 persen yang merupakan pertumbuhan positif kali pertama semenjak pandemi berlangsung. Capaian ini sebagai salah satu dampak *base effect* mulai membaiknya perekonomian di tengah kasus COVID-19 yang terjadi.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur, hampir seluruh provinsi di Kalimantan melanjutkan tren perbaikan kinerja perekonomian meski melambat. Berdasarkan pangsanya, Kalimantan Timur masih menjadi provinsi dengan ekonomi terbesar di Kalimantan dengan pangsa mencapai 49,66 persen terhadap total perekonomian Kalimantan. Selaras dengan hal tersebut, Perbaikan perekonomian nasional juga mengalami tren perbaikan meskipun mengalami perlambatan seperti perekonomian Kalimantan Timur dan Kalimantan. Laju pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2021 mencapai 3,69 persen, setelah pada tahun sebelumnya terkontraksi 2,07 persen.

3.1.1 Kinerja Ekonomi Daerah, Peluang, Tantangan dan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional pada RKP 2023

A. Kinerja Ekonomi Daerah

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami perbaikan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 setelah terkontraksi pada tahun 2016. Namun pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami kontraksi paling dalam hingga 2,85 persen *(y-o-y)* yang dipengaruhi oleh penurunan kinerja beberapa lapangan usaha sebagai dampak pandemi COVID-19 yang terjadi diseluruh dunia. Kinerja perkonomian Kalimantan Timur pada tahun 2021 ini mengalami perbaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 seiring dengan keberhasilan program vaksinasi di seluruh wilayah yang mendorong

pulihnya aktifitas perkonomian masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2021 tercatat mencapai 2,48 persen *(y-o-y)*.

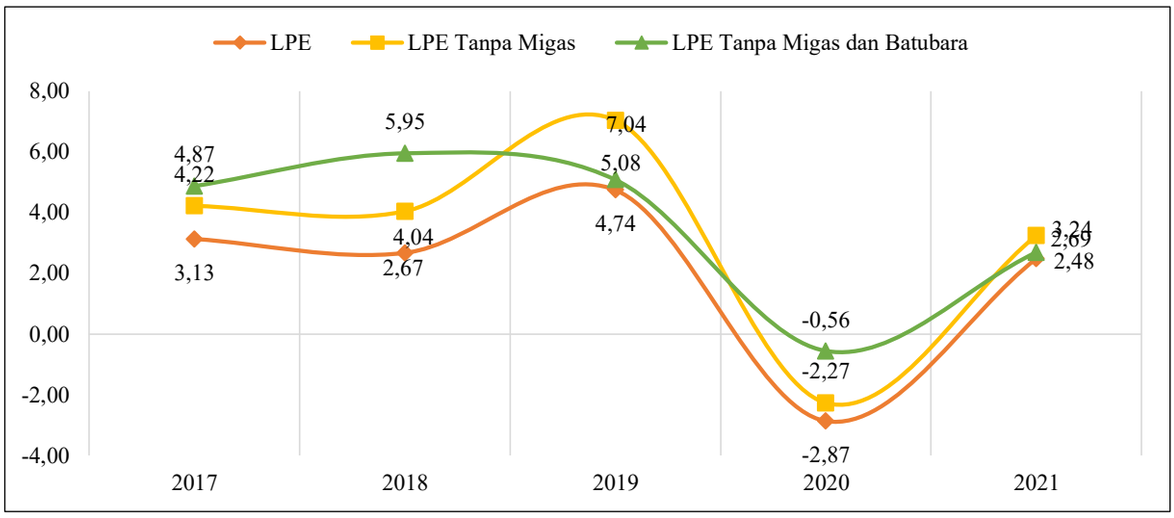

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Gambar III.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (%) *(y-o-y)*

Jika dilihat laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas Tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 2,24 persen, meningkat lebih baik dibandingakan Tahun 2020. Adapun kinerja perekonomian tanpa migas dan batubara juga mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar sebesar 2,69 persen di Tahun 2021.

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian merupakan lapangan usaha yang memberikan andil positif terbesar, yaitu sebesar 1,06 persen. Kemudian diikuti oleh lapangan usaha Industri Pengolahan dengan andil positif sebesar 0,45 persen, lapangan usaha Konstruksi dengan andil positif sebesar 0,33 persen, dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan andil positif sebesar 0,22 persen. Sementara itu, lapangan usaha lainnya memberikan andil positif kurang dari 0,20 persen, kecuali lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Lapangan Usaha Real Estate yang memberikan andil negatif masing-masing sebesar 0,02 persen dan 0,01 persen.

Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi triwulan III-2021 menunjukkan capaian kinerja yang positif di sebagian besar lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,97 persen,

lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,95 persen, dan lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 7,94 persen. Selain itu, kinerja lapangan usaha utama Kalimantan Timur, yaitu Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian pada periode ini juga menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 6,60 persen.

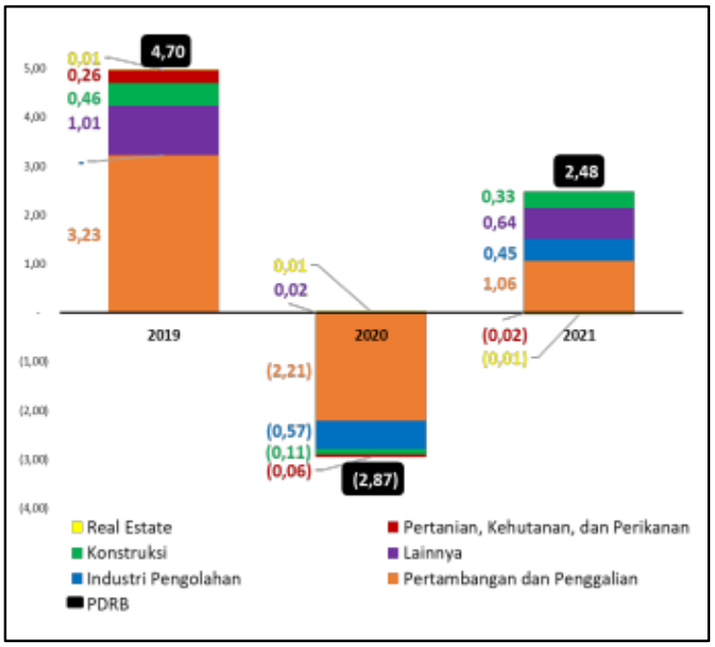

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Gambar III.2
Sumber Pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2019-2021 (persen)

Sedangkan perekonomian Kalimantan Timur pada awal tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,85 persen jika dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya tumbuh negatif sebesar 2,96 *(y-on-y)* persen. Pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2022 yang didorong oleh capaian kinerja yang positif di hampir seluruh lapangan usaha dan berdasarkan sumber pertumbuhan ekonominya, sebagian besar juga lapangan usaha memberikan andil positif seperti Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,34 persen, lalu Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 0,31 persen dan Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 0,28 persen

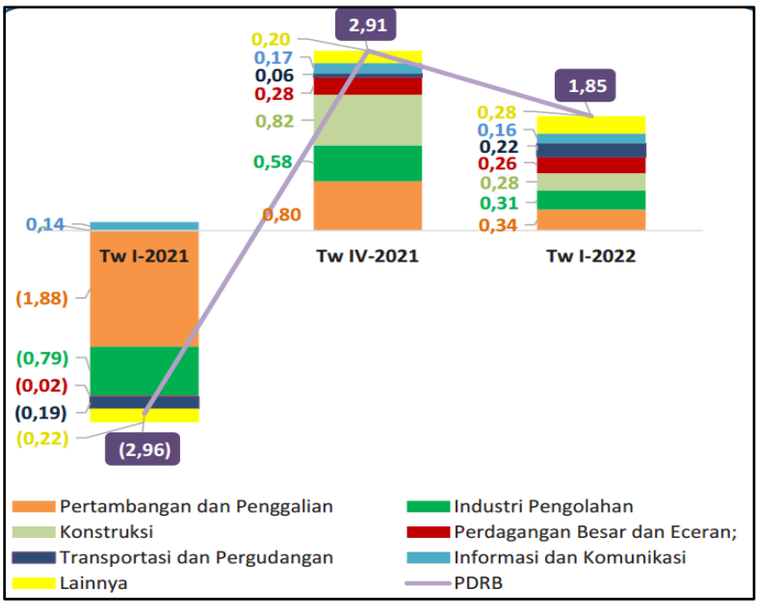

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Gambar III.3
Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Triwulan I-2022 *(y-on-y)* (Persen)

Struktur perekonomian Kalimantan Timur menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 masih didominasi oleh pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 41,42 persen dan industri pengolahan sebesar 18,90 persen. Kemudian disusul sektor konstruksi yang kontribusinya meningkat menjadi sebesar 9,53 persen. Sedangkan kontribusi sektor pertanian yang diharapkan mampu menjadi salah satu sektor yang berkembang di Kalimantan Timur, hanya memberikan kontribusi sebesar 8,77 persen, namun kontribusinya meningkat dibandingkan Tahun 2019 yang sebesar

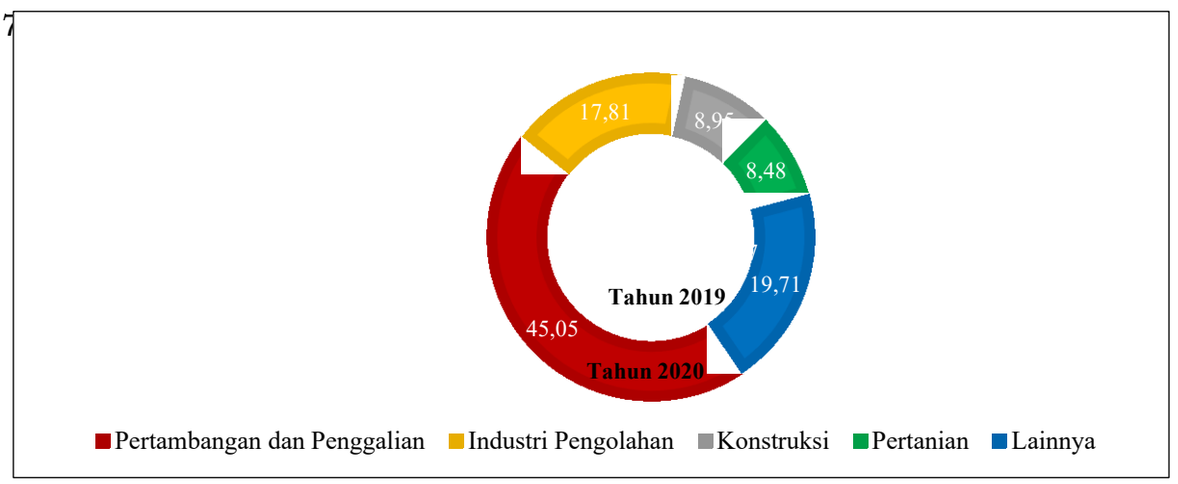

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Gambar III.4
Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2021 (%)

Berdasarkan gambar di atas, dapat terlihat dinamika struktur perekonomian Kalimantan Timur yang mengalami pemulihan. Kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian pada Tahun 2021 mengalami peningkatan diakibatkan oleh tren peningkatan harga minyak dunia dan batubara, serta meningkatnya permintaan hasil pertambangan dari negara tujuan ekspor Kalimantan Timur. Selain itu pula, perbaikan ini diakibatkan oleh peningkatan kinerja *lifting* migas di Kaltim yang bersumber baik dari produksi sumur-sumur eksisiting, hasil produksi sumur-sumur baru dan hasil *artificial lift*.

Lapangan usaha industri pengolahan juga memiliki peran yang cukup besar terhadap kinerja perekonomian Kalimantan Timur dengan kontribusi pada Tahun 2021 lebiih rendah dari tahun 2020 dengan capaian 17,81 persen. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan kinerja CPO merupakan dampak dari hasil panen yang tidak sebaik perkiraan sebelumnya akibat efek cuaca buruk pada tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan struktur PDRB Provinsi Kalimantan Timur menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 masih relatif sama dengan dominasi sektor unggulan yang sama dengan tahun sebelumnya. Terdapat empat lapangan usaha utama yang mendominasi yaitu Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian dengan peranan sebesar 45,05 persen, Industri Pengolahan dengan peranan sebesar 17,81 persen, Konstruksi dengan peranan sebesar 8,95 persen serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan peranan sebesar 8,48 persen.

Distribusi PDRB Kalimantan Timur menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada Tahun 2021 masih didominasi oleh Komponen Net Ekspor dengan peranan sebesar 47,51 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 30,38 persen, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 15,96 persen, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 5,65 persen dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga sebesar 0,49 persen. Dibandingkan tahun sebelumnya, meningkatnya aktivitas perdagangan Kalimantan Timur menyebabkan meningkatnya porsi terhadap pembentukan PDRB dari sisi pengeluaran. Meningkatnya permintaan negara tujuan terhadap migas dan batubara mengakibatkan perubahan pada struktur perekonomian Kalimantan Timur.

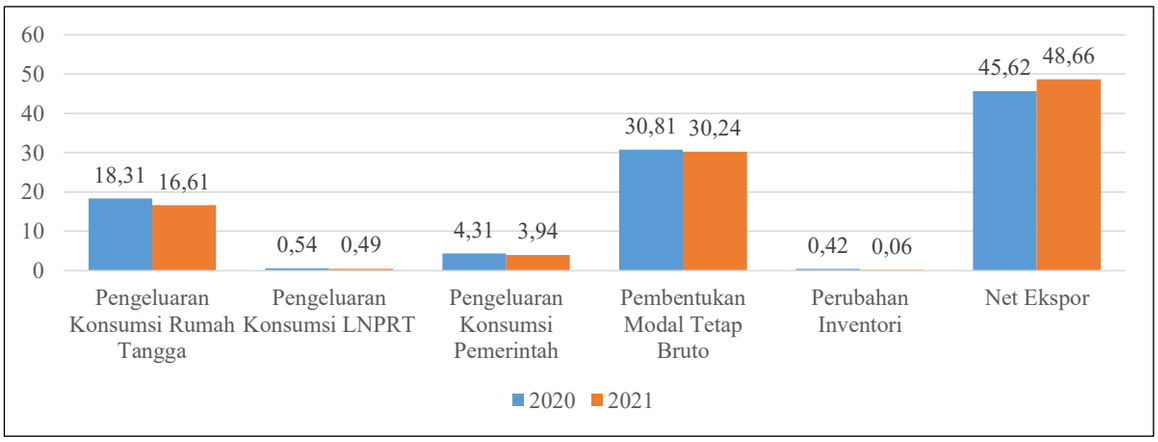

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Gambar III.5
Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020 dan 2021 (%)

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2021 tumbuh positif mencapai 2,48 persen. Hampir seluruh komponen PDRB menurut Pengeluaran mengalami pertumbuhan positif dibandingkan dengan tahun lalu. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mencapai 2,11 persen yang disebabkan oleh adanya peningkatan kegiatan investasi, yang ditunjukkan oleh kenaikan nilai dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pertumbuhan yang positif juga terjadi pada komponen Net Ekspor sebesar 0,25 persen, komponen Konsumsi Rumah Tangga sebesar 0,18 persen dan komponan Pengeluran Konsumsi Pemerintah sebesar 0,06 persen. Sedangkan untuk komponen lainnya terkontraksi sebesar 0,12 persen.

Struktur PDRB Kalimantan Timur menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 masih didominasi oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa yaitu sebesar 114,02 persen, diikuti oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 30,24 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 16,61 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 3,94 persen dan komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga sebesar 0,49 persen. Sementara itu, komponen Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut Pengeluaran memiliki peran sebesar 65,36 persen, sehingga Net Ekspor memberikan kontribusi sebesar 48,66 persen terhadap total ekonomi Kalimantan Timur.

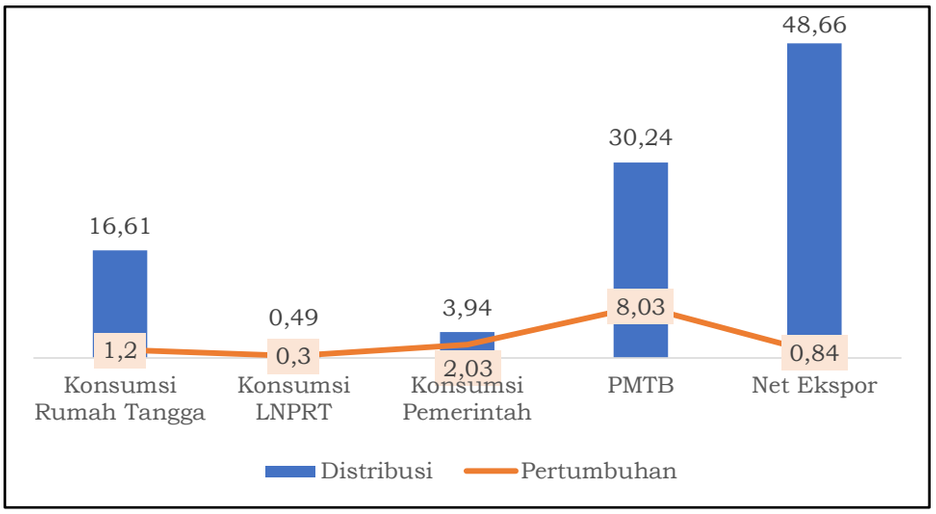

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Gambar III.6
Distribusi dan Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 (%)

Perkembangan PDRB Pengeluaran pada triwulan I tahun 2022 *(y-o-y)*, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh paling tinggi dengan capaian 3,51 persen yang disebabkan oleh peningkatan kegiatan investasi, yang ditunjukkan oleh kenaikan nilai dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pertumbuhan tertinggi berikutnya terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-Pemerintah) sebesar 2,90 persen dan komponen ekspor barang dan jasa tumbuh paling rendah sebesar 0,48 persen.

Jika dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2022 secara *(y-on-y),* maka sumbangan terbesar adalah berasal dari Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yaitu sebesar 0,97 persen. Sementara itu, nilai sumber pertumbuhan dari Komponen Net Ekspor adalah sebesar 0,70 persen, dan Komponen Lainnya memberikan andil negatif sebesar 0,06 persen

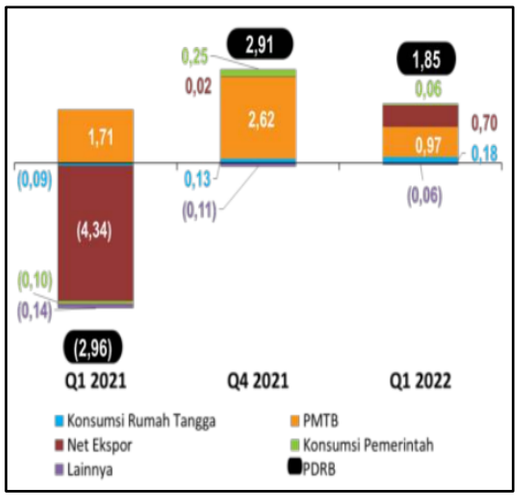

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Gambar III.7
Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran
Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I Tahun 2022 *(y-o-y)* (%)

2) Ekspor dan Impor

Nilai Ekspor Kalimantan Timur pada April 2022 mencapai US$ 3,33 miliar mengalami kenaikan sebesar 9,40 persen dibanding Maret 2022 yang mencapain US$ 3,04 miliar. Secara kumulatif, nilai ekspor Kalimantan Timur pada Januari hingga April 2022 mencapai US$ 9,46 miliar dan capaian ini lebih tinggi dari capaian ekspor pada Januari hingga April tahun 2021 yang memncapai US$ 5,55 miliar. Peningkatan nilai ekspor April 2022 disebabkan oleh meningkatnya nilai ekspor pada semua barang nonmigas. Nilai ekspor nonmigas April 2022 sebesar US$ 3,09 miliar naik sebesar 11,25 persen dibanding nilai ekspor pada Maret 2022. Sedangkan nilai ekspor migas justru mengalami penurunan 9,85 persen jika dibanding dengan nilai ekspor pada Maret 2022. Penurunan ini karena nilai ekspor barang gas alam yang turun 38,48 persen.

Nilai ekspor 10 (sepuluh) golongan barang utama pada April 2022 jika dibandingkan Maret 2022 mengalami peningkatan sebesar 9,4 persen dan hampir semua golongan barang utama mengalami peningkatan. Jika dirinci, peningkatan terbesar terjadi pada golongan barang instrumen dan aparatus optis, Fotografi yang meningkat sebesar 3.002,37 persen, disusul golongan barang aneka produk kimia yang meningkat sebesar 77,53 persen dan golongan barang yang memiliki peran paling besar yakni bahan bakar mineral nonmigas meningkat sebesar 12,23 persen.

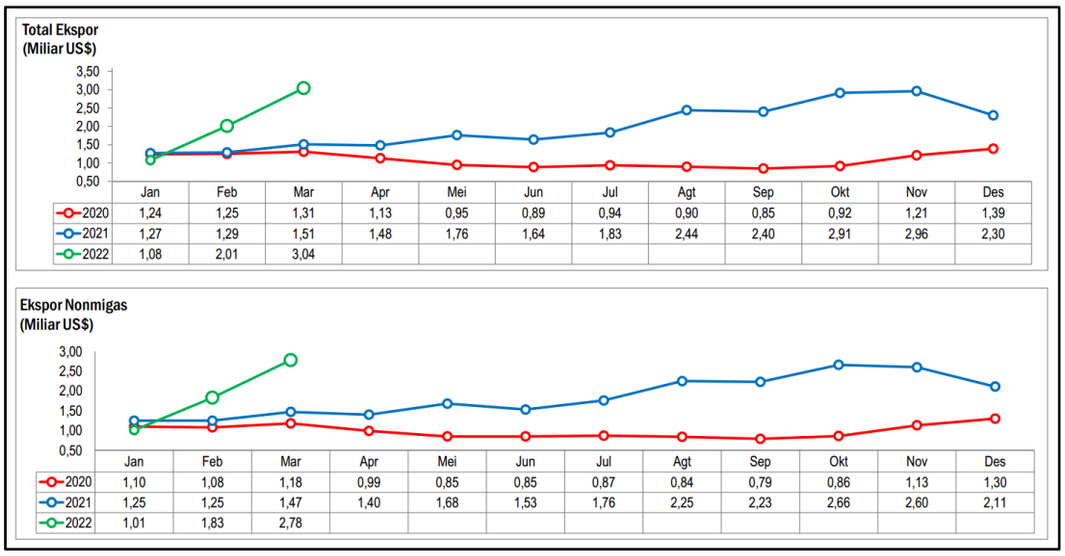

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Gambar III.8
Perkembangan Ekspor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2022

Untuk negara tujuan utama ekspor migas Kalimantan Timur pada April 2022 adalah negara Jepang, Malaysia dan Singapura dengan total nilai ekspor ketiga negara tersebut mencapai US$ 173,35 juta atau 72,03 persen terhadap total ekspor migas Kalimantan Timur. Sedangkan negara tujuan utama ekspor non migas pada April 2022 adalah Tiongkok, India dan Philipina yang berperan dalam ekspor non migas Kalimantan Timur mencapai 57,68 persen.

Impor Kalimantan Timur pada April 2022 mencapai US$ 512,82 juta dan mengalami penurunan 1,83 persen dibanding Maret 2022 serta bila disbanding April 2021 mengalami kenaikan sebesar 128,69 persen. Nilai impor barang migas tercatat mencapai US$ 368,36 juta atau turun 4,41 persen dibanding Maret 2022. Sementara untuk komoditi barang non migas tercatat mencapai US$ 144,46 juta atau naik 5,42 persen disbanding Maret 2022.

Secara kumulatif nilai impor Kalimantan Timur pada Januari hingga April 2022 mencapai US$ 1,56 juta, naik sebesar 130,80 persen dibanding periode yang sama tahun 2021. Peran impor barang migas mencapai 65,41 persen sedangkan peranan impor barang non migas mencapai 34,59 persen.

Jika dibanding dengan Maret 2022, penurunan nilai impor terbesar pada April 2022 terjadi pada golongan barang bahan bakar mineral non migas yang turun 49,12 persen, yaitu dari US$ 0,003 juta, menjadi US$

0,002 juta, kemudian disusul oleh golongan barang mesin dan perlengkapan elektrik yang turun 38,11 persen yaitu dari US$ 9,58 juta menjadi US$ 5,93 juta serta golongan barang dari besi dan baja yang mengalami penurunan 11,53 persen yaitu dari US$ 7,83 juta menjadi US$ 6,92 juta.

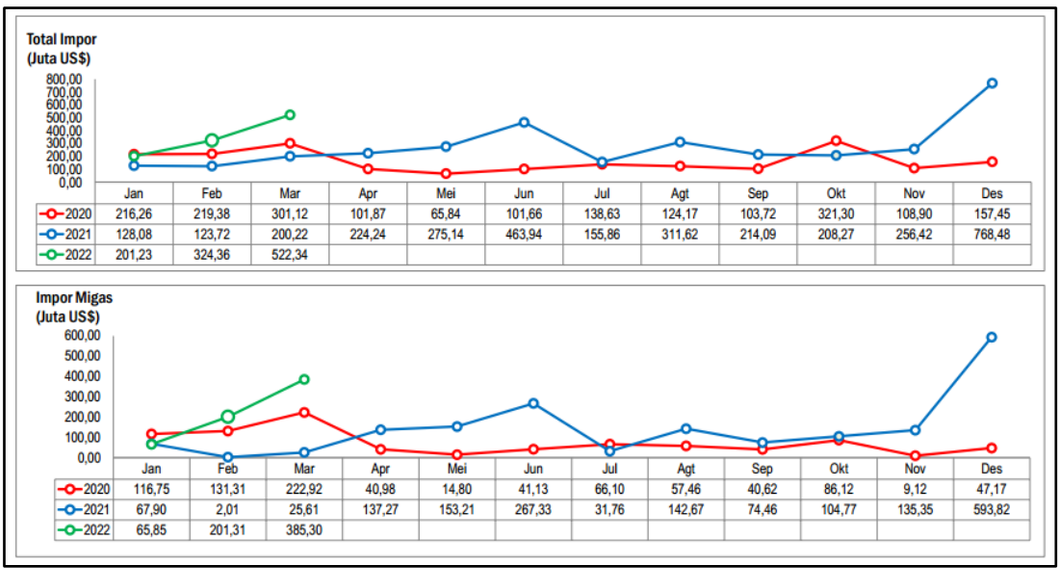

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
2020	216,26	219,38	301,12	101,87	65,84	101,66	138,63	124,17	103,72	321,30	108,90	157,45
2021	128,08	123,72	200,22	224,24	275,14	463,94	155,86	311,62	214,09	208,27	256,42	768,48
2022	201,23	324,36	522,34									

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
2020	116,75	131,31	222,92	40,98	14,80	41,13	66,10	57,46	40,62	86,12	9,12	47,17
2021	67,90	2,01	25,61	137,27	153,21	267,33	31,76	142,67	74,46	104,77	135,35	593,82
2022	65,85	201,31	385,30									

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Gambar III.9
Perkembangan Impor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2022

Neraca perdagangan Kalimantan Timur pada April 2022 menunjukan nilai yang positif (surplus) sebesar US$ 2,82 miliar. Angka ini mengalami peningkatan dibanding neraca perdagangan pada Maret 2022 yang surplus sebesar US$ 2,52 juta. Secara kumulatif dari Januari hingga April 2022 neraca perdagangan Kalimantan Timur tercatat surplus sebesar US$ 7,90 miliar, atau mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan neraca perdagangan pada periode yang sama di tahun 2021 yang surplus sebesar US$ 4,87 miliar.

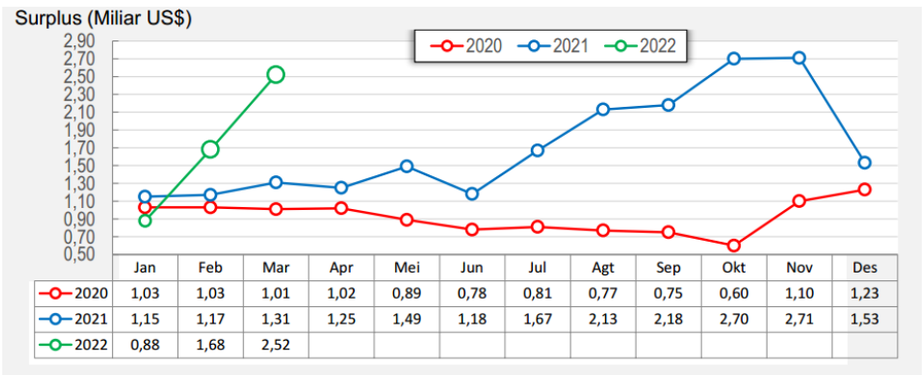

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
2020	1,03	1,03	1,01	1,02	0,89	0,78	0,81	0,77	0,75	0,60	1,10	1,23
2021	1,15	1,17	1,31	1,25	1,49	1,18	1,67	2,13	2,18	2,70	2,71	1,53
2022	0,88	1,68	2,52									

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Gambar III.10

Neraca Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2022

3) Inflasi

Inflasi Kalimantan Timur pada tahun 2021 tetap rendah walau sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 seiring dengan peningkatan permintaan masyarakat, namun tetap berada di sekitar rentang sasaran inflasi nasional. Proses pemulihan ekonomi Kalimantan Timur yang mendorong berangsurnya peningkatan permintaan dan risiko terganggunya distribusi/pasokan menjadi faktor utama yang akan menyebabkan peningkatan tekanan inflasi.

Selain dari sisi peningkatan permintaan, risiko peningkatan inflasi juga bersumber dari keterbatasan pasokan dari daerah sentra produsen yang utamanya disebabkan oleh gangguan cuaca akibat adanya fenomena La Nina. Tekanan inflasi juga berasal dari sektor pangan berasal dari *pricing behavior* pasca COVID-19 sehingga mendorong produsen meningkatkan harga sebagai kompensasi kerugian di tahun 2020. Sementara itu, tekanan inflasi juga berasal dari sektor transportasi yang disebabkan oleh lebih mudahnya persyaratan masyarakat untuk melakukan perjalanan dan juga diiringi fasilitas kesehatan yang lebih memadai serta terjangkau. Lebih lanjut, kenaikan inflasi juga didorong oleh penyesuaian harga sejumlah komoditas yang terpengaruh kebijakan tarif/fiskal pemerintah seperti kenaikan cukai rokok, kenaikan tarif iuran BPJS kelas III, dan tarif bea materai.

Jika melihat dari tingkat inflasi kelompok pengeluaran, lima kelompok pengeluaran yang memiliki tingkat inflasi tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,78 persen, diikuti kelompok transportasi sebesar 1,39 persen, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,39 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,29 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,15 persen, kelompok perumahan.

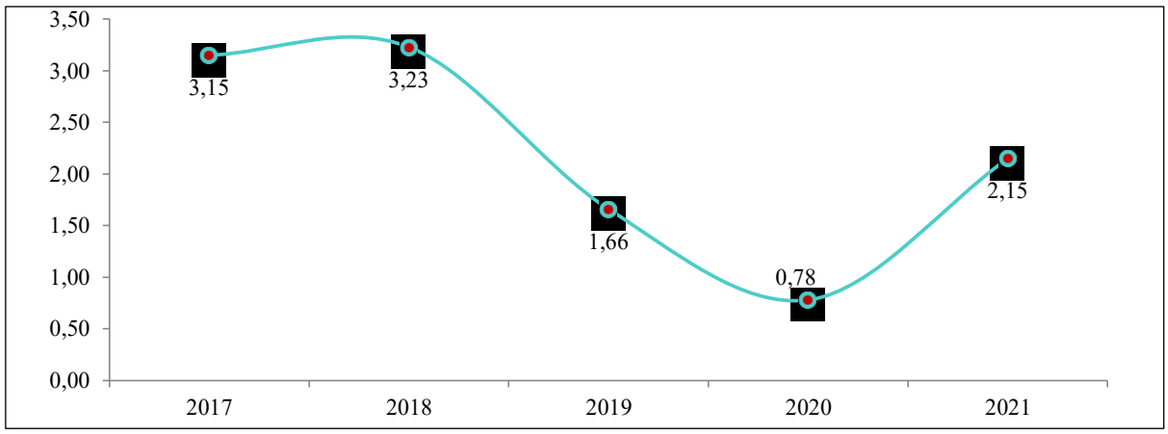

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar III.11
Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021 (%)

4) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT Kalimantan Timur hasil Sakernas Februari 2022 sebesar 6,77 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tujuh orang penganggur. Pada Februari 2022, TPT mengalami penurunan sebesar 0,04 persen poin dibandingkan Februari 2021.

Berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki pada Februari 2022 sebesar 6,89 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 6,56 persen. TPT menurut jenis kelamin memiliki pola yang berkebalikan antara perempuan dan laki-laki, yaitu TPT laki-laki mengalami penurunan dibandingkan Februari 2021 dan perempuan mengalami peningkatan dibandingkan Februari 2021. TPT laki-laki turun 0,29 poin persen, sedangkan TPT Perempuan cenderung naik sebesar 0,44 poin persen.

Jika berdasarkan daerah tempat tinggal, TPT perkotaan mencapai 6,48 persen atau lebih rendah dibanding TPT di daerah perdesaan yang mencapai 7,43 persen. Dibandingkan Februari 2021, TPT perkotaan turun sebesar 1,10 persen dan perdesaan naik sebesar 2,19 persen.

Dampak pandemic COVID-19 terhadap ketenagakerjaan di Kalimantan Timur pada Februari 2022 telah mengalami penurunan yang berarti perkembangan aktifitas usaha yang melibatkan tenaga kerja telah berangsur-angsur pulih. Hal ini tampak dari perkembangan jumlah

pengangguran karena COVID-19 pada Februari 2022 yang turun sebesar 5.763 orang atau 33,45 persen disbanding Februari 2021. Begitu juga halnya dengan penduduk yang sementara tidak bekerja karena Covid-19 dan penduduk yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 juga mengalami penurunan.

5) Tingkat Kemiskinan

Perkembangan tingkat kemiskinan Kalimantan Timur pada periode September 2020 -September 2021 mengalami perbaikan baik dari sisi jumlah maupun presentase. Hal ini menggambarkan pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kalimantan Timur dalam kurun waktu dua tahun terakhir pasca pandemi Covid-19 pertama kali melanda Indonesia dan secara khususus Kalimantan Timur. Namun melihat perkembangan tingkat kemiskinan pada periode ini merupakan capaian tertinggi sejak

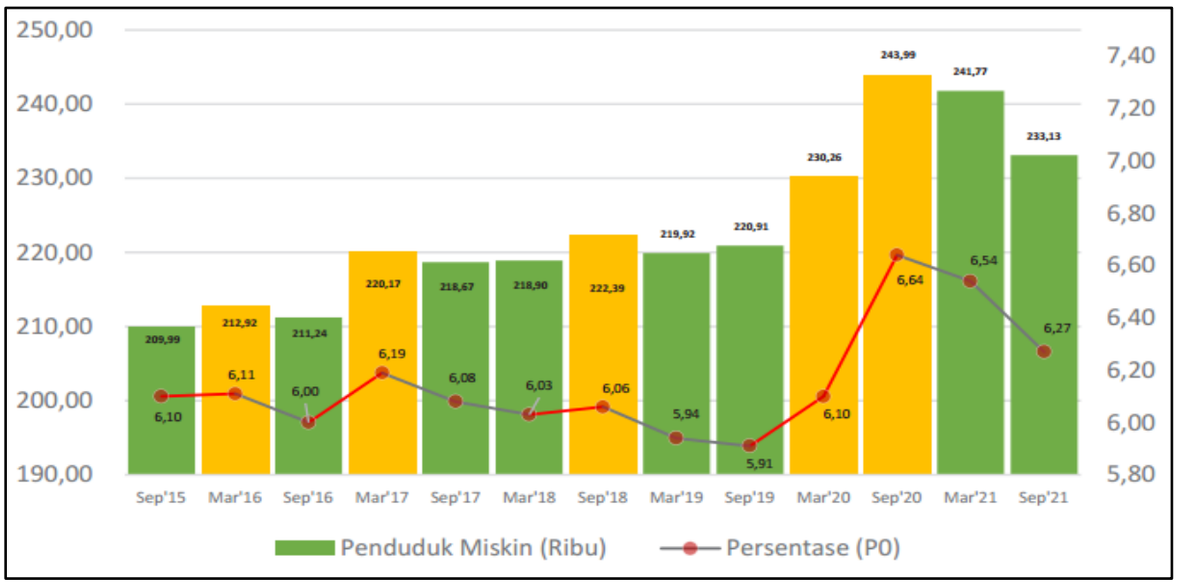

tahun 2015.

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar III.12
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kalimantan Timur September 2015-September 2021

Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur pada September 2021 mencapai 241,77 ribu orang. Dibandingkan Maret 2021, jumlah penduduk miskin turun 8,64 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2020, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 10,86 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2021 tercatat sebesar

6,27 persen, turun 0,27 persen poin terhadap Maret 2021 dan turun 0,37 persen poin terhadap September 2020.

6) Investasi

Nilai investasi Kalimantan Timur pada Tahun 2021 mengalami peningkatan dari nilai investasi Tahun 2020. Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2023 meningkat sebesar Rp. 4,38 triliun dibandingkan tahun 2022 menjadi Rp. 30,3 triliun. Realisasi Investasi paling besar berada di Kota Balikpapan, yaitu mencapai Rp 16,77 triliun atau 55,36 persen, dan Kabupaten Kutai Timur dengan realisasi sebesar Rp 5,28 triliun. Adapun sektor usaha yang mampu menarik investasi PMDN tertinggi adalah sektor usaha sekunder yakni Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi, pertambangan serta tanaman pangan dan perkebunan.

Sedangkan Relisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 sebesar 97,12 persen atau US$ 367,16 juta menjadi US$ 745,190 Juta atau Rp 10,88 triliun. Kabupaten Kutai Timur memberikan kontribusi paling siginifikan dengan nilai US$. 248,36 juta atau 33,33 persen dan Kota Balikpapan mencapai US$ 193,18 juta atau 25,92 persen.

Realisasi PMA berdasarkan sektor usaha, subsektor Pertambangan memiliki realisasi investasi terbesar yaitu US$ 252,13 juta atau sebesar 33,83 persen dan Industri Makanan yaitu sebesar US$ 242,43 juta 32,53persen.

B. Tantangan dan Peluang Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan 2023

1) Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kalimantan Timur masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa Tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara cermat dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup:

a) Perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara yang menjadi mitra dagang utama Kalimantan Timur;

b) Kondisi pandemi COVID-19 yang diperkirakan terus berlangsung dengan munculnya varian baru berakibat akan munculnya kebijakan pembatasan pada aktifitas masyarakat.

c) Isu geopolitik dunia yakni perang dagang Australia- Republik Rakyat Tiongkok, serta Konflik Rusia – Ukraina yang berdampak pada perekonomian global;

d) Kebijakan ekonomi hijau menjadi tuntutan masyarakat global dimana Indonesia untuk mendorong transformasi ekonomi menuju pembangunan yang yang rendah emisi dan ramah lingkungan;

e) Kebijakan pemerintah pusat yang sewaktu-waktu dapat berubah berkaitan dengan ekspor bahan mentah (terutama komoditas batubara);

f) Tren penurunan harga minyak dunia masih berlanjut;

g) Mulai digalakannya implementasi energi baru terbarukan di Kawasan Asia Timur menyebabkan permintaan ekspor berpotensi menurun;

h) Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran yang melambat akibat masih adanya pengaruh pandemi COVID-19 yang menurunkan tingkat konsumsi masyarakat;

2) Peluang

Ekonomi Kaltim Tahun 2021 dan 2022 diperkirakan tetap tumbuh positif namun masih terbatas. Beberapa peluang yang diperkirakan mampu mempertahankan kinerja positif ekonomi Kalimantan Timur sebagai berikut:

a) Momentum dipilihnya Kalimantan Timur sebagai IKN dan telah ditetapkannya RUU tentang Ibukota Negara, diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan sentimen bisnis di daerah serta mempercepat realisasi investasi, terutama dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana IKN Nusantara;

b) Berlanjutnya proyek peningkatan kapasitas kilang minyak Balikpapan/*Refinery Development Master Plan Refinery Unit* V (RDMP RU V Pertamina) dan beberapa proyek swasta lain;

c) Peningkatan kinerja ekspor batu bara seiring dengan berlanjutnya perbaikan ekonomi negara tujuan utama ekspor seperti Tiongkok, India, Jepang, dan Negara Asia lainnya;

d) Beroperasinya sumur migas baru akan mendorong kinerja industri pengolahan LNG dengan adanya peningkatan *supply* bahan baku;

e) Meningkatnya kinerja lapangan usaha konstruksi seiring dengan berlanjutnya pengerjaan proyek strategis *multiyears existing* (RDMP RU V, Bendungan Sepaku – Semoi, Pabrik Amonium Nitrat, Pabrik Coal-Methanol dan realisasi investasi baru korporasi di Kaltim dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi;
f) Optimaliasasi Kebijakan B20 dan B30 dan rencana B40 memberi peluang bagi peningkatan daya serap produk CPO di pasar domestik;
g) Optimalisasi sumur-sumur migas baru dan optimalisasi Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus;
h) Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, yang diharapkan mampu meningkatkan investasi yang implikasinya adalah dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.

C. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional pada tahun 2023

Berdasarkan arahan presiden yang dituangkan pada RPJMN tahun 2020-2024 pembangunan nasional diarahkan berfokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan transformasi ekonomi. Selain itu pula telah ditetapkan 7 agenda pembangunan untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional yakni :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan melalui peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah dengan tujuan akhir yakni peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter;

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik untuk melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara.

Adapun target pembangunan provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 yang ditargetkan pada RPJMN adalah dapat dilihat dalam Tabel III.1 sebagai berikut.

Tabel III.1
Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Uraian		Tahun 2023
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,9
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3-6,0
3	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5-8,5
4	Indeks Gini	0,375-0,378
5	Indeks Pembangunan Manusia	73,31-73,49
6	Nilai Tukar Petani	103-105

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas RI, 2022

Untuk arah kebijakan pembangunan pembangunan yang berpengaruh terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan timur antara lain mempercepat pertumbuhan wilayah melalui diversifikasi kegiatan ekonomi, memenatapkan peran Kalimantan Timur sebagai lumbung energi nasional, mempertahankan peran Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Arah kebijakan nasional ini diharapkan mampu meningkatkan pencapaian target makro ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2023.

Strategi untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2023, pemerintah telah merumuskan strategi pertumbuhan yang dituangkan dalam dokumen RKP tahun 2023 yakni pembangunan IKN dan infrastruktur pendukungnya, meningkatkan investasi dan optimalisasi

pengelolaan kawasan-kawasan strategis, pengembangan sentra produksi pangan (food estate). Selain itu, strategi pemerataan yang direncanakan adalah memperkuat konektifitas wilayah, mengembangkan ekonomi pada kawasan perbatasan, memperluas cakupan SPM dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat pada daerah 3T.

Melalui arah kebijakan, strategi pertumbuhan dan pemerataan yang direncanakan oleh pemerintah pusat, target pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2023 yang tercantum pada RKPD dapat dilihat dalam Tabel III.2 sebagai berikut.

Tabel III.2
Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Uraian		Tahun 2023
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50-6,00
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,89-6,63
3	Tingkat Kemiskinan (%)	4,11-5,30

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas RI, 2022

3.1.2 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur triwulan I tahun 2022 mengalami perbaikan dan tumbuh positif, meskipun lebih rendah daripada triwulan sebelumnya. Secara tahunan, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada triwulan I tahun 2022 mencapai 1,85 persen lebih tinggi daripada triwulan I tahun 2021 yang tekontraksi 2,96 persen. Perbaikan ini disebabkan oleh tingginya produksi lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang mendominasi PDRB Kalimantan Timur seiring dengan meningkatnya permintaan global terhadap batu bara. Selain itu juga keberhasilan pemerintah mengendalikan penyebaran pandemi COVID-19 yang berakibat meningkatnya aktivitas perekonomian lainnya.

Peningkatan daya saing daerah perlu didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini penyediaan kompetensi angkatan kerja yang dapat memenuhi standar pasar kerja industri di Kalimantan Timur. Selain itu, pengendalian investasi di Kalimantan Timur Tahun 2022 dan 2023 perlu diarahkan pada sektor-sektor yang mendukung pengembangan hilirisasi industri dan infrastruktur pendukung penunjang Ibu Kota Negara Baru terlebih setelah ditetapkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru.

A. Sasaran Ekonomi Makro

Pada Tahun 2023, ekonomi makro Kalimantan Timur diharapkan dapat tumbuh positif dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Stabilitas makro sangat penting bagi penciptaan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh semua pihak atau ekonomi yang inklusif. Sasaran ekonomi makro pada Tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel III.3
Sasaran Ekonomi Makro Daerah

Uraian		Target 2022	Target 2023
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5±1	3,5±1
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,75	6,50
3	Tingkat Kemiskinan (%)	6,00	5,90
4	Indeks Pembangunan Manusia	77,25	77,75
5	Indeks Gini	0,313	0,308
6	Inflasi (persen)	-	3±1
7	Investasi (triliun Rp)	-	54

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Pada Tahun 2022, merupakan periode bagi Kalimantan Timur untuk melakukan penguatan daya saing daerah dan meneruskan perbaikan dari sisi perekonmian yang telah dicapai pada tahun 2021 yang diharapkan masih terus berlanjut meskipun situasi pandemi COVID-19 masih berlangsung. Seiring dengan pemulihan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat tersebut, diharapkan pada tahun 2023 terus mengalami perbaikan sehingga target pembangunan yang direncanakan dapat tercapai.

Stabilitas pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 diharapkan terjaga dengan laju pertumbuhan positif pada rentang 3,5±1 persen dan untuk tahun 2023 juga diharapkan mampu tumbuh positif pada rentang 3,5±1 persen. Pertumbuhan ekonomi ini diasumsikan dengan masih terjaganya harga komoditas batubara dan kelapa sawit, berjalannya proyek strategis seperti Refinery Development Master Project (RDMP) RU V Balikpapan, dimulainya proyek infrastruktur Ibu Kota Nusantara beserta dampak ikutannya, dan berbagai proyek lainnya yang bersumber dari APBN dan APBD.

Capaian tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur pada Maret tahun 2021 masih mencapai 6,54 persen atau lebih rendah dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2023 tingkat kemiskinan diharapkan dapat terus ditekan, terutama dengan peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan kualitas angkatan kerja dan optimalisasi penyerapan tenaga kerja. Selain itu, perluasan kesempatan kerja juga perlu dilakukan dengan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang bersifat padat karya, serta melalui pemberian insentif terhadap ekonomi kerakyatan dan kewirausahaan dalam rangka membuka lapangan kerja baru.

Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur pada Tahun 2021 mengalami peningkatan kembali setelah pada tahun 2020 mengalami penurunan. IPM Kalimantan Timur tahun 2021 tercatat tumbuh sebesar 0,84 persen atau meningkat sebesar 0,64 poin dari tahun sebelumnya menjadi 76,88. Hal ini terutama dipicu oleh peningkatan pengeluaran per-kapita/tahun disesuaikan yang tumbuh sebesar 3,31 persen. Pada Tahun 2022 diharapkan IPM dapat meningkat menjadi 77,25 dan Tahun 2023 sebesar 77,75 dengan upaya peningkatan pada seluruh dimensi pembangunan manusia.

Seiring dengan peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat sebagai upaya dalam menekan indeks Gini Kalimantan Timur pada tahun 2023 diharapkan mampu mencapai 0,308. Selain itu pula hal ini akan mampu menjaga inflasi Kalimantan Timur akan terjaga pada 3$\pm$1 persen.

Investasi Kalimantan Timur Tahun 2023 juga diharapkan akan mampu terus meningkat dari capaian tahun 2021 dan tahun 2023 yang diproyeksikan mencapai Rp. 54 triliun. Hal ini dipengaruhi dengan penujukan Kalimantan Timur sebagai IKN yang membuka peluang investasi pada sektor-sektor baru yang dapat dikembangkan. Peningkatan investasi ini juga diharapkan mampu berkontribusi positif bagi pencapaian indikator ekonomi makro lainnya pada tahun 2023.

B. Arah Kebijakan Ekonomi

Untuk mecapai target ekonomi makro daerah yang telah ditetapkan pada tahun 2023, dirumuskan arah kebijakan ekonomi makro yang digambarkan dalam skema sebagai berikut :

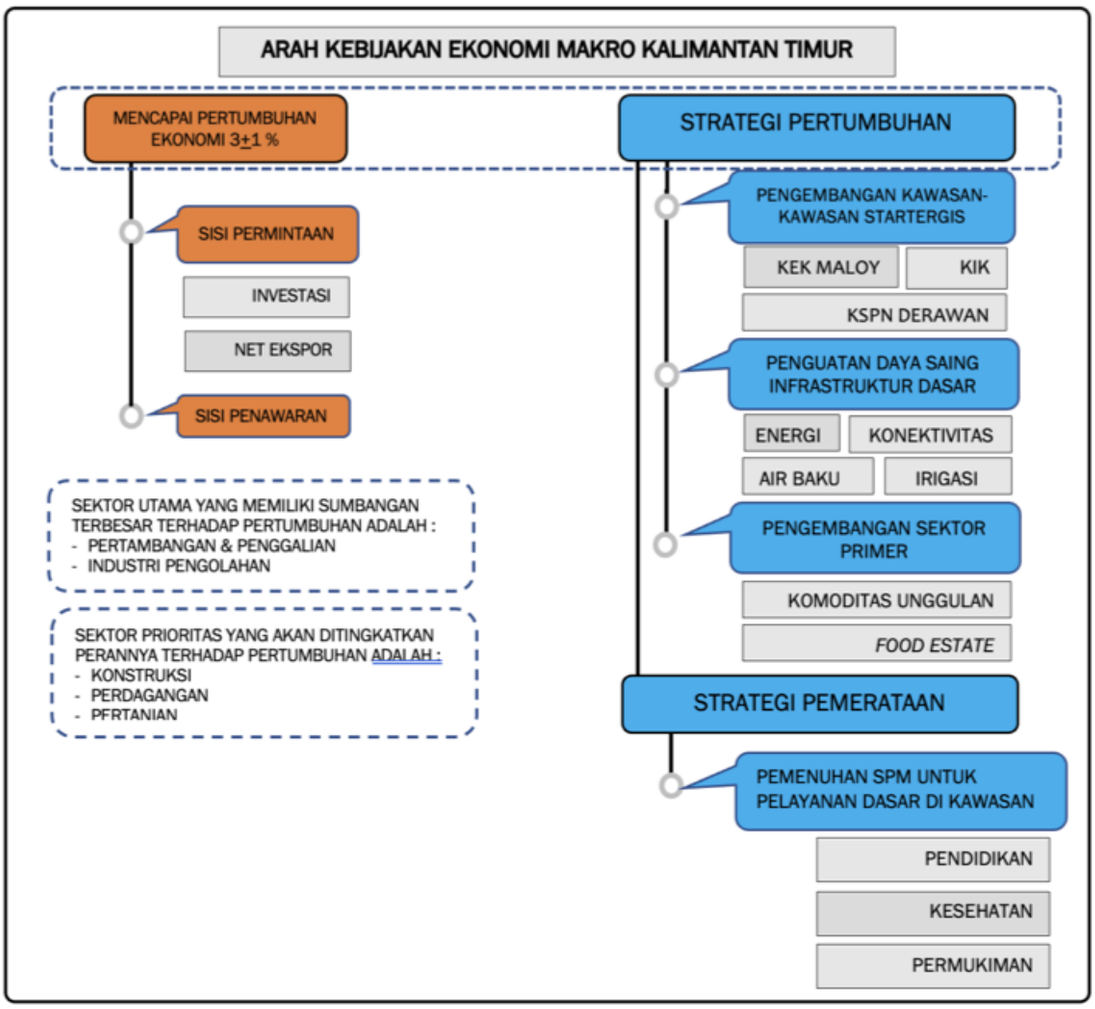

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

Gambar III.13
Arah Kebijakan Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

1. Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 3,5±1 Persen

Penguatan ekonomi Kalimantan Timur setelah diterpa pandemi COVID-19 melanjutkan perbaikan perekonomian tahun 2021 diharapkan terus berlangsung dan memberikan banyak dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur seperti penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Adapun target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat ditempuh melalui :

a) Sisi Permintaan

Kondisi perekonomian negara mitra dagang utama dan pemulihan kehidaupan sosial ekonomi masyarakt dan ketegangan yang terjadi antar negara saat ini akan memberikan pengaruh terhadap sisi permintaan pada beberapa komoditas yang dihasilkan dari Kalimantan Timur. Target pertumbuhan ekonomi 3,5±1 persen

harus didorong oleh peningkatan permintaan domestik melalui Investasi dan Net Ekspor Antar Daerah. Kontribusi investasi yang tercermin melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) diharapkan mampu tumbuh sebesar 8,5-9,2 persen terhadap perekonomian Kalimantan Timur Tahun 2023. PMTB yang diharapkan berkaitan erat dengan keberadaan aset tetap *(fixed asset)* yang dilibatkan dalam proses produksi. Untuk itu, invenstasi yang dilakukan diupayakan untuk diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana pendukung nilai tambah pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung industri pengolahan dalam hal ini yang mendukung hilirisasi industri di Kalimantan Timur.

Net Ekspor Luar Negeri yang dipengaruhi oleh ekspor dan impor juga akan memberikan kontribusi paling terhadap perekonomian Kalimantan Timur di tahun 2023. Ekspor Kalimantan Timur Tahun 2023 diharapkan akan tumbuh sebesar 7,0-7,2 persen dan impor sebagai pengurang diharapkan akan tumbuh 3,1-3,4 persen. Pertumbuhan ini akan mengindikasikan adanya peningkatan pada perdagangan Kalimantan Timur tahun 2023.

b) Sisi Penawaran

Dari sisi penawaran, dua sektor utama yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi cukup besar diharapkan mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor utama yang memiliki kontribusi dominan terhadap perekonomian Kalimantan Timur adalah sektor pertambangan, penggalian dan sektor industri pengolahan. Sektor pertambangan diharapkan akan memiliki pertumbuhan secara (y-o-y) sebesar 4,7-5,1 persen dan penggalian akan tumbuh sebesar 5,9-6,4 persen tahun 2023.

Selain sektor pertambangan dan industri pengolahan, sektor potensial lainnya yang memberikan kontribusi terbesar lainnya adalah sektor pertanian, konstruksi dan perdagangan. Sektor pertanian diharapkan mampu tumbuh sebesar 3,8-4,1 persen seiring dengan arah kebijakan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan yang direncanakan tahun 2023 menjadi prioritas utama dalam pembangunan Kalimantan Timur.

Selain itu, sektor konstruksi juga diharapkan akan tumbuh sebesar 8,6-9,3 persen seiring dengan berjalannya berbagai proyek konstruksi pendukung IKN dan berbagai proyek strategis lainnya. Sektor perdagangan juga diharapkan akan mampu tumbuh sebesar 6,2-6,7 persen pada Tahun 2023.

c) Meningkatkan nilai tambah produk-produk unggulan di Kalimantan Timur yang disertai dengan penguatan rantai pemasaran, kemudahan berusaha, dan insentif investasi. dalam rangka percepatan upaya transformasi ekonomi. Untuk mendukung proses pengembangan hilirsasi industri tersebut, akan dilakukan peningkatan kapasitas SDM dengan meningkatkan daya saing tenaga kerja seperti melalui pendidikan dan perlatihan serta pendidikan vokasi dan menengah. Hal ini dalam rangka menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai dan berkualifikasi serta untuk mendorong investasi dalam negeri. Sehingga penciptaan nilai tambah dari kawasan strategis untuk menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dapat terealisasi.

2. Strategi Pertumbuhan

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur diharapkan mampu menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang akan berdampak dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.

a) Pengembangan Kawasan-Kawasan Strategis guna mempercepat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan berbasis pada sektor-sektor unggulan masing-masing. Dalam mendukung kawasan ini, pemerintah melakukan peningkatan kapasitas SDM dan kemudahan berusaha dan peningkatan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat kerjasama. Optimalisasi pengelolaan kawasan-kawasan strategis dan dukungan dalam peningkatan investasi diharapkan akan mampu menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dapat terealisasi.

b) Penguatan Daya Saing Infrastruktur Dasar di Kalimantan Timur mencakup konektivitas, energi, irigasi dan air baku. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas sentra produksi Kawasan Industri dan Outlet serta penyediaan sarana dan prasarana dasar pendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan

kebutuhan energi, air baku dan penyediaan irigasi sebagai bagian dari mendukung pengembangan kawasan strategis dalam upaya meningkatkan produktivitas. Penguatan daya saiang infrastruktur Kalimantan Timur juga diupayakan akan menjadi pendukung telaksananya pembangunan IKN serta beberapa infrastruktur pendukungnya.

c) Pengembangan Sektor Primer mencakup pengembangan komoditas unggulan wilayah seperti karet, kelap sawit dan perikanan yang berorientasi pada peningkatan produktivitas yang akan menjadi penguatan rantai pasok bagi industri pengolahnya. Selain itu pengembangan sentra produksi pangan *(food estate)* yang didukung dengan korporasi petani juga menjadi strategi pertumbuhan perekonomian Kalimantan Timur.

3. Strategi Pemerataan

Strategi pemerataan perekonomian Kalimantan Timur tahun 2023 dilakukan sebagai upaya mempercepat pengurangan kesenjangan (antar individu dan antar wilayah) melalui peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar dengan mendorong peningkatan perekonomian terutaman pada daerah 3T melalui pengembangan ekonomi kerakyatan, peningkatan peran BUMDes, pengembangan Perhutanan Sosial dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu pemerataan juga dilakukan melalui perluasan cakupan dan peningkatan kualitas penerapan SPM terutama di wilayah 3T khususnnya pada bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Sosial.

4. Strategi Stabilisasi Ekonomi

Perekonomian tahun 2023 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh pandemi karena COVID-19 yang terus bermutasi memunculkan varian baru dan penanganannya masih akan menjadi fokus utama pembangunan daerah di tahun 2023. Penguatan ekonomi Kalimantan Timur menjadi fokus utama perhatian pemerintah dan diyakini dapat tercapai apabila didukung dengan strategi pembangunan ekonomi daerah yang tepat. Adapun beberapa strategi yang dapat dilakukan dari berbagai komponen permintaan yaitu:

a) Menjaga dan meningkatkan iklim investasi di daerah. Komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menjaga iklim investasi dengan memberikan kemudahan pelayanan perizinan, kemudahan investasi dan pemberian insentif khusus bagi rencana investasi pada sektor-sektor usaha yang bersifat padat karya mampu menyerap banyak tenaga kerja *(labour intensive)*. Hal ini juga harus dibarengi dengan komitmen investor untuk memberikan peluang/kesempatan kerja yang lebih besar kepada masyarakat lokal. Pemerintah perlu mendorong realisasi investasi pada sektor-sektor usaha dimaksud melalui perbaikan iklim investasi di daerah, khususnya dari sisi tata kelola perizinan. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan kesiapan kompetensi dari tenaga kerja lokal untuk dapat memenuhi kualifikasi kerja yang dibutuhkan.

b) Optimalisasi belanja konsumsi rumah tangga. Upaya untuk pemulihan ekonomi dapat dilakukan melalui pengendalian konsumsi rumah tangga agar tetap terjaga. Pola pembelanjaan konsumsi rumah tangga diarahkan lebih kepada produk-produk yang telah ada atau disediakan oleh penyedia barang/jasa yang berada di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini tentunya harus didukung oleh kemampuan penyedia barang/jasa untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen, baik secara kuantitas maupun kualitas. Pemerintah dapat mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya sektor UKM dan UMKM, serta koperasi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dimaksud. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong pelaksanaan kegiatan-kegiatan promosi daerah yang mampu menarik minat wisatawan untuk dapat berkunjung ke Kalimantan Timur.

c) Meningkatkan kualitas belanja pemerintah. Belanja pemerintah dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah diarahkan untuk lebih banyak menggunakan produk yang berasal dari wilayah Kalimantan Timur. Sebagian besar pekerjaan konstruksi dalam rangka pembangunan dan peningkatan infrastruktur harus lebih mengutamakan pemanfaatan bahan baku yang telah disediakan oleh pasar lokal. Pemerintah perlu menjamin tersedianya bahan baku yang dibutuhkan melalui pengelolaan rantai suplai/pasok yang informatif dan berkualitas. Belanja pemerintah juga perlu

diarahkan untuk lebih meningkatkan proporsi belanja modal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, agar nilai fisik manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Selain itu, belanja pemerintah juga ditujukan agar dapat menarik orang luar daerah untuk datang dan melakukan aktifitas ekonomi di Kalimantan Timur. Dalam rangka mendorong aktivitas ekonomi masyarakat lokal di daerah, maka penyelenggaraan kegiatan-kegiatan koordinasi dan seremonial yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, akan lebih banyak dilaksanakan di wilayah Kalimantan Timur.

d) Meningkatkan surplus perdagangan antar wilayah. Aktivitas perdagangan antar wilayah perlu ditingkatkan, terlebih dengan adanya peluang ditunujuknya Kalimantan Timur sebagai IKN. Hal tersebut dilakukan dengan mengutamakan pemasaran pada produk-produk lokal hasil olahan yang telah menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Beberapa komoditas unggulan, baik yang berasal dari sektor perkebunan, pertanian tanaman pangan, kehutanan dan pertambangan yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi di daerah, diupayakan untuk tidak diekspor dalam bentuk mentah. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan batasan impor terhadap produk-produk dari luar daerah yang menjadi kompetitor bagi produk-produk lokal, dengan tetap memperhatikan kebutuhan ketersediaan suplai barang di daerah.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Pendapatan Daerah

Perhitungan pendapatan daerah Tahun 2023 pada Rancangan Awal RKPD ini untuk sementara dilakukan dengan asumsi/pendekatan yang telah ditetapkan di dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, yakni sebagai berikut:

1) Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;

2) Dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak. Sedangkan DAU, DAK dan DID diasumsikan sama dengan Tahun 2021 sesuai dengan yang telah diperhitungkan pada Perubahan RPJMD;
3) Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

Untuk meningkatan Pendapatan Daerah di Kalimantan Timur, terus dilakukan pengembangan dan dilakukan terobosan-terobosan untuk peningkatan pendapatan daerah tahun 2023. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

1) Meningkatkan sistem informasi data mengenai objek wajib pajak, manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku;
2) Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui peningkatan dan *perluasan* obyek, intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
3) Pendayagunaan aset daerah;
4) Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya; dan
5) Mengadakan peninjauan kembali *(annual-review)* atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Selanjutnya, dalam rangka pencapaian target penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 pemerintah Kalimantan Timur terus memunculkan inovasi sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah guna meningkatkan PAD. Adapun beberapa kegiatan intensifikasi yang di identifikasi dapat dilakukan, antara lain:

A. Bidang Pajak Daerah

1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan kebijakan:
   a) Membangun Layanan Publik berbasis IT melalui *system online* se-Kalimantan Timur, khususnya pembayaran PKB pada kantor bersama Samsat;
   b) Menyediakan sarana mobilitas Samsat Jelajah;

c) Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan tarif Progresif sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
d) Melakukan intensifikasi dan pemutakhiran data Kendaraan Bermotor pada PDE Dispenda;
e) Penyediaan layanan pembayaran PKB yang membarikan kemudahan pada wajib pajak tanpa harus ke kantor bersama Samsat melalui E-Samsat Kaltim Delivery dan E-Samsat Bhabinkamtibmas yang bekerjasama Polda Kalimantan Timur;
f) Menerbitkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB);
g) Melakukan Kegiatan operasional/razia lapangan pendataan di seluruh Kab/Kota se-Kalimantan Timur.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan kebijakan:

a) Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi tentang perekonomian khususnya fiskal terkait kendaraan bermotor dan suku cadang serta pembiayaan, sehingga dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membeli kendaraan baru;
b) Hasil evaluasi perkembangan potensi obyek pajak dan hasil evaluasi realisasi penerimaan Tahun sebelumnya dan tahun berjalan mengalami perbaikan;
c) Kecenderungan masyarakat Kaltim membeli kendaraan *Low Cost Green Car* (LCGC) baru yang harganya lebih terjangkau;
d) Mendorong perusahaan *leasing* lebih selektif memilih calon pembeli yang lebih produktif;
e) Pertumbuhan ekonomi Kaltim yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro pada Tahun 2022 diperkirakan akan stagnan sehingga berpengaruh terhadap penerimaan di sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
f) Mengintensifikasikan penelitian persyaratan untuk menjaring BBN II terhadap kendaraan yang sudah dipindahtangankan;
g) Melakukan sosialisasi secara berkelanjutan terhadap penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah kepada para dealer dan agen tunggal pemegang merk termasuk badan *leasing*.
h) Melakukan kegiatan penagihan dan pendataan terhadap perusahaan pengguna alat berat/besar yang beroperasi di Kalimantan Timur;

i) Membangun Layanan Publik berbasis IT melalui sistem *online* se-Kalimantan Timur, khususnya pembayaran PKB pada kantor bersama Samsat;
j) Melakukan intensifikasi dan pemutakhiran data Kendaraan Bermotor pada PDE Bapenda;
k) Melakukan kegiatan operasional/razia lapangan pendataan diseluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan kebijakan:

a) Memberlakukan tarif tunggal sebesar 7,5 persen secara penuh sesuai Perda Nomor 01 Tahun 2011;
b) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (BPH-Migas, Kemendagri & Kemenkeu) terhadap penyaluran BBM di Kalimantan Timur;
c) Menginstruksikan kepada seluruh penyedia BBM yang beroperasi di Kalimantan Timur wajib untuk memiliki izin wajib pungut (WAPU) yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Timur;
d) Melakukan audit terhadap seluruh penyedia BBM atas penjualan BBM yang membayar PBBKB;
e) Melakukan kegiatan pendataan dan pemberian nomor NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) bagi setiap agen penjualan BBM
f) Melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan yang berlaku kepada seluruh penyedia BBM secara berkala, termasuk melakukan rekonsiliasi penilaian dan penjualan BBM di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dengan kebijakan:

a) Berkoordinasi dengan pihak Dinas Energi dan Sumber Dyaa Mineral Provinsi dan Kabupaten/Kota;
b) Melakukan kegiatan operasional terpadu secara berkala setiap triwulan;
c) Mengaktifkan tim intensifikasi pada tingkat Kabupaten/Kota.

B. Bidang Retribusi Daerah

1) Merumuskan seluruh kebijakan yang menjadi dasar pungutan;
2) Mengadakan monitoring dan bimbingan teknis pungutan dalam setiap penyetoran;

3) Memberikan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik dalam rangka penertiban pungutan.
4) Melaksanakan koordinasi dan evaluasi atas pungutan bidang Retribusi Daerah dengan instansi;
5) Melakukan sosialisasi pungutan Retribusi Daerah secara terpadu dengan instansi terkait;
6) Memotivasi Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana senantiasa meningkatkan pelayanan yang memberikan kontribusi peningkatan Penerimaan Asli Daerah.

Gambaran mengenai perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan proyeksi tahun 2022 secara umum dapat dilihat pada tabel III.3. Pada kurun waktu dari tahun 2018 hingga 2021 rata-rata realisasi pertumbuhan pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar 0,84 persen. Namun proyeksi pendapatan tahun 2022 dan 2023 diperhitungkan akan mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 6,83 persen. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2022, target pendapatan daerah tahun 2023 dipengaruhi oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 6,86 persen dan pendapatan transfer sebesar 8,2 persen.

Tabel III.4
Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2020 dan Penetapan Tahun 2021-2022

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Penetapan Tahun 2022* (Rp)
4	Pendapatan Daerah	10.671.715.200.487	11.775.086.836.200	9.987.385.879.199	10.220.142.967.274	10.861.802.998.578
4.1	Pendapatan Asli Daerah	5.802.442.683.947	6.555.853.195.408	5.143.521.676.422	6.111.918.272.284	6.585.710.931.582
4.1.01	Pajak Daerah	4.716.694.876.324	4.984.520.517.159	3.900.431.414.629	4.774.890.855.289	5.444.145.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	21.128.021.966	26.492.587.130	10.123.187.099	13.590.719.061	20.961.945.240
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	199.302.498.965	392.379.951.610	110.988.636.348	214.599.338.882	347.177.986.342
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	865.317.286.691	1.152.460.139.510	1.121.978.438.346	1.108.837.359.053	773.426.000.000
4.2	Pendapatan Transfer	4.829.780.659.372	5.186.147.690.792	4.831.865.557.777	4.094.319.639.990	4.263.493.266.996
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.829.780.659.372	5.186.147.690.792	4.831.865.557.777	4.094.319.639.990	4.263.493.266.996
4.2.01.01	Dana Perimbangan	4.829.780.659.372	5.176.264.298.792	4.759.526.731.777	4.056.865.328.990	4.245.684.173.996
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	2.991.231.124.961	3.207.168.795.642	3.544.638.973.637	2.591.967.832.399	2.684.144.500.996
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	767.682.423.000	815.693.641.000	831.404.756.000	828.050.174.361	828.907.266.000
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	233.880.877.259	221.093.462.036	212.147.502.140	247.450.542.385	255.545.404.000
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	836.986.234.152	932.308.400.114	171.335.500.000	389.396.779.845	477.087.003.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	-	9.883.392.000	72.338.826.000	37.454.311.000	17.809.093.000

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Penetapan Tahun 2022* (Rp)
	(DID)					
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	39.491.857.169	33.085.950.000	11.998.645.000	13.905.055.000	12.598.800.000
4.03.01	Hibah	39.491.857.169	33.085.950.000	11.998.645.000	13.905.055.000	12.598.800.000

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, BAPENDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2021

*Keterangan: *) Penetapan APBD TA. 2021 dan Penetapan APBD TA. 2022*

Tabel III.5
Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2020 dan Penetapan Tahun 2021-2022

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Penetapan Tahun 2022*
4	Pendapatan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	54,37%	55,68%	51,50%	59,80%	60,63%
4.1.01	Pajak Daerah	81,29%	76,03%	75,83%	78,12%	82,67%
4.1.02	Retribusi Daerah	0,36%	0,40%	0,20%	0,22%	0,32%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	3,43%	5,99%	2,16%	3,51%	5,27%
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	14,91%	17,58%	21,81%	18,14%	11,74%
4.2	Pendapatan Transfer	45,26%	44,04%	48,38%	40,06%	39,25%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	100,00%	99,81%	98,50%	99,09%	99,58%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	61,93%	61,84%	73,36%	63,89%	63,22%
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	15,89%	15,73%	17,21%	20,41%	19,52%
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	4,84%	4,26%	4,39%	6,10%	6,02%

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Penetapan Tahun 2022*
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	17,33%	17,98%	3,55%	9,60%	11,24%
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00%	0,19%	1,50%	0,91%	0,42%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,37%	0,28%	0,12%	0,12%	0,12%
4.03.01	Hibah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, BAPENDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2021

*Keterangan: *) Penetapan APBD TA. 2021 dan Penetapan APBD TA. 2022*

Proyeksi pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022 mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) Tahun 2022 sebesar 7,39 persen. Peningkatan ini dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah meningkat signifikan sebesar 10,40 persen dan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 8,66 persen. Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2023 masih menjadi penyumbang terbesar terhadap pendapatan daerah sebesar 60,33 persen.

Tabel III.6
Proyeksi dan Proporsi Pendapatan Daerah Pendapatan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Tahun 2023	
		Rp	%
4	Pendapatan Daerah	11.664.354.481.538	100,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	7.037.308.408.827	60,33
4.1.01	Pajak Daerah	6.065.000.000.000	86,18
4.1.02	Retribusi Daerah	22.010.839.159	0,31
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	166.292.569.668	2,36
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	784.005.000.000	11,14
4.2	Pendapatan Transfer	4.613.187.392.711	39,55
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.613.187.392.711	100,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	4.613.187.392.711	100,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	3.287.794.032.257	71,27
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	825.393.360.454	17,89
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	150.000.000.000	3,25
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	350.000.000.000	7,59
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.858.680.000	0,12
4.03.01	Hibah	13.858.680.000	100,00

Sumber: BAPENDA Provinsi KALTIM, 2022

3.2.2 Belanja Wajib dan Mengikat Daerah

Penyusunan kebijakan keuangan daerah perlu didukung dengan analisis proyeksi belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Analisis terhadap pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. Sedangkan belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan rutin dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Tabel III.7
Pengeluaran Wajib dan Mengikat Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

No	Uraian Belanja Wajib Mengikat	Tahun 2023 (Rp)
A	BELANJA OPERASI	9.361.057.176.391
1	Belanja Pegawai (Gaji, Tunjangan dan TTP)	2.215.930.505.608
2	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan & Anggota DPRD serta KDH/WKDH	63.826.943.806
3	Belanja Non PNS	345.416.996.597
4	Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	3.242.500.000.000
5	Operasional Wajib Kantor	104.071.147.871
6	Insentif pemungut Pajak	181.950.000.000
7	Dana Alokasi Khusus (DAK)	500.000.000.000
8	Dana Bagi Hasil Reboisasi (DBH-DR)	202.945.387.865
9	Belanja pajak rokok	67.500.000.000
10	BLUD	703.000.000.000
11	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik/Belanja Hibah kepada Partai Politik	8.123.695.000
12	Bantuan keuangan Umum Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	860.600.000.000
13	Belanja Tidak Terduga	80.357.757.608
14	Belanja Fungsi Pendidikan (diluar belanja	640.137.848.449

No	Uraian Belanja Wajib Mengikat	Tahun 2023 (Rp)
	mengikat)	
15	Belanja Fungsi Kesehatan (diluar belanja mengikat)	96.404.327.772
16	Belanja Pengawasan (diluar belanja mengikat)	30.895.836.100
17	Belanja Peningkatan SDM ASN (diluar belanja mengikat)	17.996.729.715
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	125.000.000.000
1	Pembayaran Pokok Utang	-
2	Penyertaan modal	125.000.000.000
TOTAL BELANJA WAJIB & MENGIKAT		9.486.657.176.391

Sumber: *BAPPEDA Provinsi KALTIM, BAPENDA Provinsi KALTIM, 2022*

Adapun penjelasan terhadap masing-masing komponen belanja mengikat yang menjadi dasar analisis perhitungan adalah sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai yakni belanja Gaji, Tunjangan dan tunjangan tambahan penghasilan (TTP) yang diberikan kepada seluruh PNS;

b) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, dianggap belanja mengikat karena merupakan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan DPRD yang harus dibayarkan (seperti belanja pegawai);

c) Belanja Non PNS merupakan belanja gaji yang diberikan kepada pegawai Non PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

d) Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten Kota merupakan transfer pembagian hasil penerimaan pajak Provinsi Kalimanatan Timur untuk Pemerintah Kabupaten Kota yang diatur pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2018;

e) Belanja operasional wajib kantor, dianggap belanja mengikat karena menjadi pembiayan rutin untuk penyelenggaraan kegiatan perkantoran selama satu tahun, seperti air, listrik, telpon, internet, dan pajak kendaraan;

f) Insentif pemungut pajak, dianggap belanja mengikat karena peruntukkannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 terkait pemberian insentif bagi pemungut pajak;

g) Dana Alokasi Khusus (DAK), dianggap Belanja mengikat karena perolehan dan peruntukannya sudah ditentukan, dan diasumsukan hampir pasti selalu ada di setiap tahunnya;

h) DBH-DR, dianggap Belanja mengikat karena perolehan dan peruntukkannya sudah jelas dan diatur dalam PMK Nomor 230/PMK.07/2017;

i) Belanja pajak rokok, dianggap belanja mengikat karena perolehan dan peruntukkannya sudah jelas dan diatur (Dinkes untuk JPKN, Satpol untuk Penegakan Perda) PMK Nomor 102/PMK.07/2015;

j) BLUD, dianggap belanja mengikat karena perolehan dan peruntukkannya sudah jelas digunakan untuk operasional masing-masing BLUD;

k) Bankeu/Hibah kepada Partai Politik, dianggap Belanja mengikat karena telah diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2018;

l) Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dianggap belanja mengikat karena bersifat rutin di setiap tahunnya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang bersifat prioritas, namun bukan menjadi kewenangan provinsi;

m) Belanja Tidak Terduga, dianggap belanja mengikat karena pengalokasiannya bersifat rutin dan dibutuhkan sebagai antisipasi

n) komponen Belanja Pendidikan, Kesehatan, Inspektorat, dan BPSDM nilainya;

o) Penyertaan Modal diberikan kepada BUMD yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

3.2.3 Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Rencana pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun anggaran 2023 dilakukan dengan mengacu pada potensi dan obyek pendapatan baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perencanaan tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaannya. Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur pada anggaran pendapatan Tahun 2023 sangat bergantung dengan kondisi perekonomian Nasional, daerah, regional maupun lokal, serta ekonomi global yang saat ini sedang terjadi keguncangan perekonomian dan cukup berefek pada skala internasional.

Dalam jangka Panjang, pembangunan Kalimantan Timur berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan dari dana perimbangan, terutama yang bersumber dari Bagi Hasil Bukan Pajak yang diperoleh dari bagi hasil minyak dan gas alam dan royalti dari sektor pertambangan umum. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah mengandalkan pada Pajak Daerah, terutama melalui kebijakan pengembangan lapangan usaha dan kesempatan kerja yang seluas-luasnya pada sektor-sektor potensial. Seiring dengan peningkatan pendapatan penduduk, pemerintah juga melakukan penataan pelayanan dan perluasan obyek pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mempertimbangkan suasana kondusif untuk mendukung berkembangnya investasi di Kalimantan Timur. Berdasarkan data proyeksi pendapatan dan proyeksi data belanja wajib dan mengikat, dapat disusun kapasitas riil keuangan daerah pada Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel III.8
Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2023
1	Pendapatan	11.664.354.481.538
2	Pencairan Dana Cadangan	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	-

NO	URAIAN	TAHUN 2023
Total Penerimaan		11.664.354.481.538
Dikurangi		
4	Belanja dan Pengeluaraan Pembiayaan Wajib dan Mengikat	9.486.657.176.391
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		2.177.697.305.147

Sumber: Bappeda Provinsi KALTIM, 2021

3.2.4 Belanja Daerah

Belanja daerah yang terdapat pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Namun pada pelaksanaan pada APBD tahun 2021 telah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan belanja yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Namun pada realisasi belanja daerah tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang terdiri dari:

1) Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :

   a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa;
   c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran;

d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;

2) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya;

3) Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;

4) Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer dirinci atas jenis:

   a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;
   b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan.

Belanja daerah provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 cenderung fluktuatif namun dengan rata-rata pertumbuhan 8,39 persen. Dalam kurun waktu tersebut, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dikarenakan terjadinya pelimpahan pegawai dari pemerintah kabupaten/kota dan nasional ke provinsi sebagai akibat penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Kebijakan belanja tidak terduga melangalami peningkatan semenjak tahun 2020 dikarenakan pengalokasian belanja daerah disusun dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19.

Peningkatan alokasi belanja tidak terduga ini ditujukan untuk penanganan masalah sosial, kemisikinan dan pengangguran yang diantaranya sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Peningkatan alokasi ini dilakukan dengan mengurangi belanja-belanja yang tidak prioritas dan diperkirakan tidak akan terlaksana dalam tahun berkenaan akibat situasi pandemi.

Realisasi dan proporsi belanja daerah pada kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.9
Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2021 dan Penetapan Tahun 2022

Kode Rek	Uraian	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Penetapan Tahun 2022* (Rp)
5	BELANJA	10.128.810.000.000	12.900.000.000.000	10.683.921.000.001	10.723.529.422.431	11.501.773.960.620
5.01	BELANJA OPERASI	4.945.611.450.933	5.940.390.533.458	5.356.491.717.806	4.983.150.466.273	5.820.946.591.893
5.01.01	Belanja Pegawai	1.956.294.636.510	2.276.292.750.006	2.246.712.057.549	2.105.588.712.918	2.660.033.694.639
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	1.905.863.134.023	2.839.199.050.718	2.870.659.107.195	2.634.941.566.554	2.685.401.965.749
5.01.05	Belanja Hibah	1.077.644.430.400	815.124.182.734	223.050.003.062	228.665.386.800	469.594.931.505
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	5.809.250.000	9.774.550.000	16.070.550.000	13.954.800.000	5.916.000.000
5.02	BELANJA MODAL	2.071.096.668.390	1.825.021.228.128	1.317.417.909.377	1.514.465.189.715	1.750.523.168.727
5.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.333.900.000	25.000.000.000	500.000.000.000	221.409.234.933	272.000.000.000
5.04	BELANJA TRANSFER	3.105.767.980.677	5.109.588.238.414	3.510.011.372.818	4.004.504.531.511	3.658.304.200.000
5.04.01	Belanja Bagi Hasil	2.411.414.151.000	3.087.791.772.893	1.911.308.336.000	2.455.934.232.318	2.798.304.200.000
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	694.353.829.677	2.021.796.465.521	1.598.703.036.818	1.548.570.299.193	860.000.000.000

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2022
*Keterangan: *) Penetapan APBD TA. 2021 dan Penetapan APBD TA. 2022*

Tabel III.10
Proporsi Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2020 dan Penetapan Tahun 2021-2022

Kode Rek	Uraian	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Penetapan Tahun 2021	Penetapan Tahun 2022*
5	BELANJA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.01	BELANJA OPERASI	48,83%	46,05%	50,14%	46,47%	50,61%
5.01.01	Belanja Pegawai	39,56%	38,32%	41,94%	42,25%	45,70%
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	38,54%	47,79%	53,59%	52,88%	46,13%
5.01.05	Belanja Hibah	21,79%	13,72%	4,16%	4,59%	8,07%
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	0,12%	0,16%	0,30%	0,28%	0,10%
5.02	BELANJA MODAL	20,45%	14,15%	12,33%	14,12%	15,22%
5.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	0,06%	0,19%	4,68%	2,06%	2,36%
5.04	BELANJA TRANSFER	30,66%	39,61%	32,85%	37,34%	31,81%
5.04.01	Belanja Bagi Hasil	77,64%	60,43%	54,45%	61,33%	76,49%
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	22,36%	39,57%	45,55%	38,67%	23,51%

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2022
*Keterangan: *) Penetapan APBD TA. 2021 dan Penetapan APBD TA. 2022*

Peran kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Tahun 2023 sangat diperlukan terlebih dengan ruang fiskal daerah yang semakin terbatas. Pada tahun 2023 komponen konsumsi pemerintah terhadap PDRB Kalimantan Timur diharapkan dapat berkontribusi sebesar 5,00 persen dan diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provvinsi Kalimantan Timu pada tahun 2023. Berdasarkan tema pembangunan tahun 2023, arah kebijakan belanja daerah difokuskan untuk mendukung penguatan ketahanan ekonomi malalui pengembangan industri sektor unggulan dan usaha mikro kecil dan menengah, kehidupan sosial masyarakat seperti Kesehatan pendidikan dan lingkungan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Untuk dapat mencapai target tersebut maka arah kebijakan belanja daerah diarahkan pada :

1) Meningkatkan belanja produktif seperti belanja pendidikan, kesehatan, pertanian dan pembangunan infrastruktur mendukung konektivitas antar daerah;
2) Meningkatkan efisiensi dan penajaman pada belanja non-operasional untuk meningkatkan ruang fiskal;
3) Meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial terutama akses pendidikan dan mutu layanan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin;
4) Kebijakan belanja pemerintah daerah diarahkan peningkatan kualitas pelayanan publik;
5) Perkuatan perekonomian utamanya pada sektor terdampak akibat pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga tahun 2021 seperti Pariswisata, Perdagangan, Pertanian dalam arti luas, UMKM dan IKM serta pemulihan kembali daya beli masyarakat ;
6) Pencapaian target, sasaran, *directive gubernur* dan program unggulan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;

7) Memenuhi alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20 persen fungsi pendidikan dan 10 persen fungsi kesehatan. Sedangkan untuk belanja *mandatory* lainnya seperti belanja peninmgkatan SDM ASN dan pengawasan (APIP) disesuaikan dengan potensi besaran anggaran;

8) Transfer ke kabupaten/kota dan Dana Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota diarahkan pada keselarasan untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah provinsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

Proyeksi belanja daerah digunakan untuk memperkirakan segala kebutuhan belanja daerah terkait pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di tahun kedepan. Adapun proyeksi 2023 Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.11
Proyeksi dan Proporsi Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Kode Rek	Uraian	Proyeksi Tahun 2023	
		Rp	%
5	BELANJA	11.539.354.481.538	100
5.01	BELANJA OPERASI	5.800.699.520.865	50,27
5.01.01	Belanja Pegawai	2.637.876.819.275	45,48
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	2.992.589.921.729	51,59
5.01.05	Belanja Hibah	155.373.779.861	2,68
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	14.859.000.000	0,26
5.02	BELANJA MODAL	1.555.197.203.065	13,47
05.02.01	Belanja Modal Tanah	88.165.871.703	5,67
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	232.500.291.025	14,94
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	405.162.171.734	26,05
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	827.593.788.603	53,19
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.775.080.000	0,11
5.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	80.357.757.608	0,70
5.04	BELANJA TRANSFER	4.103.100.000.000	35,55

Kode Rek	Uraian	Proyeksi Tahun 2023	
		Rp	%
5.04.01	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	3.242.500.000.000	79,03
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	860.600.000.000	20,97

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

Selanjutnya untuk memenuhi belanja *mandatory* sesuai dengan peraturan perundang undangan pada proyeksi belanja daerah tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel III.12
Proyeksi Belanja Mandatory
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah	%
A	Belanja Daerah	11.539.354.481.538	
B	Belanja Fungsi Pendidikan	2.398.093.055.169	20,78
1	Belanja pada Dinas Pendidikan	2.304.884.114.369	
	Belanja Operasi	2.039.972.944.056	
	Belanja Modal	264.911.170.313	
2	Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang pelaksanaan fungsi pendidikan, antara lain:	93.208.940.800	
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.590.940.800	
	Program Pembinaan Perpustakaan	2.590.940.800	
	Dinas Pemuda dan Olahraga	36.933.000.000	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	18.550.000.000	
	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	18.383.000.000	
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	30.000.000.000	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah (Bantuan Keuangan bidang pendidikan)	30.000.000.000	
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	15.400.000.000	
	Hibah Sarana Pendidikan Keagamaan	15.400.000.000	
	Sekretariat Daerah	8.285.000.000	
	Hibah Sarana Pendidikan Keagamaan	8.285.000.000	

No	Uraian	Jumlah	%
C	Belanja Fungsi Kesehatan	1.179.664.768.565	10,22
1	Belanja pada Dinas Kesehatan dan RSUD	1.169.423.864.000	
	Belanja Operasi	1.111.348.116.255	
	Belanja Modal	58.075.747.745	
2	Belanja di luar Dinas Kesehatan/RSUD yang menunjang pelaksanaan fungsi Kesehatan, antara lain:	10.240.904.565	
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	10.240.904.565	
	Pembangunan Rumah Sakit	10.240.904.565	
D	Belanja Pengawasan	48.201.504.565	0,42
	Belanja pada Inspektorat	38.960.600.000	
	Belanja pada Dinas PUPR	9.240.904.565	
E	Belanja Peningkatan Kapasitas SDM ASN	33.804.927.000	0,29
	Belanja pada BPSDM	33.804.927.000	

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

3.2.5 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Tabel III.13
Realisasi/Penetapan Pembiayaan APBD Tahun 2018-2022 dan Proyeksi Pembiayaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Uraian	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
A	Penerimaan Pembiayaan			
1	Penerimaan Pembiayaan	541.264.815.482	1.862.060.553.637	2.249.383.814.348
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	541.264.815.482	1.862.060.553.637	2.249.383.814.348
B	Pengeluaran Pembiayaan			
1	Penyertaan Modal	3.690.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.690.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
Jumlah Pembiayaan Netto		611.118.124.747	537.574.815.482	2.149.383.814.348
No	Uraian	Penetapan Tahun 2021*	Penetapan Tahun 2022*	Proyeksi Tahun 2023
A	Penerimaan Pembiayaan			
1	Penerimaan Pembiayaan	2.025.786.000.000	876.592.908.438	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	2.025.786.000.000	876.592.908.438	0
B	Pengeluaran Pembiayaan			
1	Penyertaan Modal	249.856.920.000	236.621.946.400	125.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	249.856.920.000	236.621.946.400	125.000.000.000
Jumlah Pembiayaan Netto		2.099.394.164.475	639.970.962.038	-125.000.000.000

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2022

Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2022 tidak diproyeksikan meskipun memungkinkan terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2022 yang berasal dari pelampauan penerimaan PAD, Pelampauan penerimaan dana perimbangan dan Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, namun angkanya tidak diproyeksikan.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2023 dialokasikan untuk penyertaan modal ke BUMD dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang bertujuan peningkatan pendapatan daerah, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian *(prudential)* berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta telah dilakukannya penyusunan perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.

Dalam rangka mempercepat peran pemerintah dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi di daerah, Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya dalam menggali sumber-sumber pembiayaan yang sesuai dengan potensi daerah yang ada demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah akan diupayakan dengan cara mengoptimalisasi dan mengintegrasikan sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber dari BUMD, swasta, maupun masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan pendapatan dan belanja daerah, arah kebijakan pembiayaan di Tahun 2023 akan diarahkan pada:

1) Membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi bagi masyarakat secara lebih luas;
2) Pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU;
3) Optimalisasi dan integrasi sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) untuk mendukung pencapaian target-target program prioritas Kalimantan

Timur. Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) adalah upaya dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan lingkungan kehidupan masyarakat.

Selain pendanaan pembangunan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdapat juga sumber pendanaan pembangunan lainnya yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari Pemerintah Pusat yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), berupa Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Tabel III.14
Alokasi Dana Dekonsentrasi APBN Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2022

Kementerian / Lembaga / SKPD / Satker		Alokasi Dana Dekonsentrasi (Rp)					Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	
Kementerian Dalam Negeri		670.556.000	206.770.000	11.999.000	-	1.734.585.850	
1	Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur	250.556.000	206.770.000			981.329.000	
2	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Timur	420.000.000					
3	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur					155.364.000	
4	Bappeda Provinsi Kalimantan Timur					418.589.000	
5	Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur			11.999.000		179.303.850	
Kementerian Pertanian		18.380.398.000	21.642.785.000	18.794.027.000	20.679.236.175	13.393.408.741	
6	Dinas Pangan. Tanaman Pangan. Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan	13.074.868.000	19.840.605.000	18.228.447.000	20.125.607.675	12.793.704.741	

Kementerian / Lembaga / SKPD / Satker		Alokasi Dana Dekonsentrasi (Rp)					Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	
	Timur						
7	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	5.305.530.000	1.802.180.000	565.580.000	553.628.500	599.704.000	
Kementerian Perindustrian		1.671.000.000	2.117.760.000	1.545.357.000	949.472.000	-	
8	Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur (Bidang Perindustrian)	1.671.000.000	2.117.760.000	1.545.357.000	949.472.000	-	
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan		6.805.810.000	6.238.512.000			-	
9	Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur	6.805.810.000	6.238.512.000			-	
Kementerian Kesehatan		26.955.894.000	25.558.493.000	7.281.122.000	28.806.928.720	23.014.089.176	
10	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	26.955.894.000	25.558.493.000	7.281.122.000	28.806.928.720	23.014.089.176	
Kementerian Ketenagakerjaan		5.070.470.000	9.261.834.000	3.979.870.000	4.183.766.000	3.982.730.650	
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur	5.070.470.000	9.261.834.000	3.979.870.000	4.183.766.000	3.982.730.650	

Kementerian / Lembaga / SKPD / Satker		Alokasi Dana Dekonsentrasi (Rp)					Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	
Kementerian Sosial		13.830.078.000	14.072.092.000	6.096.879.000	4.888.161.960	-	
12	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	13.830.078.000	14.072.092.000	6.096.879.000	4.888.161.960	-	
Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan		2.233.543.000	825.500.000				
13	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	1.578.925.000	500.500.000			-	
14	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	654.618.000	325.000.000			-	
Kementerian Kelautan Dan Perikanan		3.115.918.000	2.734.233.000	1.758.723.000	2.759.653.232	2.614.101.195	
15	Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur	3.115.918.000	2.734.233.000	1.758.723.000	2.759.653.232	2.614.101.195	
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat		1.143.612.000				-	
16	Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan Provinsi Kalimantan Timur	1.143.612.000				-	
Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		2.459.497.000	1.686.572.000	50.244.000		1.290.000.000	

Kementerian / Lembaga / SKPD / Satker		Alokasi Dana Dekonsentrasi (Rp)					Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	
17	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur	2.459.497.000	1.686.572.000	50.244.000		1.290.000.000	
Kementerian Negara Koperasi Dan UKM		2.488.466.000	2.541.927.000	1.973.897.000	1.822.107.000	9.554.939.000	
18	Dinas Perindag Koperasi Provinsi Kalimantan Timur (Bidang Koperasi dan UMKM)	2.488.466.000	2.541.927.000	1.973.897.000	1.822.107.000	9.554.939.000	
Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		2.300.000.000	1.700.000.000	650.000.000		-	
19	Dinas Kependudukan. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.300.000.000	1.700.000.000	650.000.000		-	
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional		1.006.291.000	1.006.291.000	383.103.000	1.006.291.000	1.006.291.000	
20	Bappeda Prov. Kaltim	1.006.291.000	1.006.291.000	383.103.000	1.006.291.000	1.006.291.000	
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia		1.196.125.000	695.300.000	481.278.000	510.082.000	404.907.000	

Kementerian / Lembaga / SKPD / Satker		Alokasi Dana Dekonsentrasi (Rp)					Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	1.196.125.000	695.300.000	481.278.000	510.082.000	404.907.000	
Badan Koordinasi Penanaman Modal		549.456.000	459.043.000	377.704.000	399.170.000	309.107.000	
22	Dinas Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur	549.456.000	459.043.000	377.704.000	399.170.000	309.107.000	
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi		35.171.462.000	30.825.282.000	21.152.239.000	1.697.500.000	-	
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur	34.968.322.000	30.589.982.000	21.152.239.000	1.697.500.000	-	
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	203.140.000	235.300.000			-	

Kementerian / Lembaga / SKPD / Satker		Alokasi Dana Dekonsentrasi (Rp)					Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	
Arsip Nasional Republik Indonesia		137.846.000	341.560.000			-	
25	Badan Arsip Daerah Prop. Kal-Tim	137.846.000					
26	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur		341.560.000			-	
Kementerian Perdagangan		1.776.815.000	1.958.498.000	945.875.000	1.432.326.000	1.119.897.250	
27	Dinas Perindustrian. Perdagangan. Koperasi Dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur (Bidang Perdagangan)	1.776.815.000	1.958.498.000	945.875.000	1.432.326.000	1.119.897.250	
Kementerian Negara Pemuda Dan Olah Raga		3.494.278.000	2.256.600.000	2.139.118.000	2.198.439.000	1.570.190.000	
28	Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur	3.494.278.000	2.256.600.000	2.139.118.000	2.198.439.000	1.570.190.000	
Jumlah Total		130.457.515.000	126.129.052.000	67.621.435.000	71.333.133.087	59.994.246.862	

Tabel III.15
Alokasi Dana Tugas Pembantuan APBN Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2022

KEMENTERIAN / LEMBAGA / SKPD / SATKER		Alokasi Dana Tugas Pembantuan (Rp)					Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	
KEMENTERIAN PERTANIAN		98.783.559.000	64.358.592.000	49.820.433.000	48.949.215.095	22.100.474.100	
1	Dinas Pangan. Tanaman Pangan. Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	87.421.661.000	48.868.952.000	35.009.259.000	40.753.839.000	15.530.012.600	
2	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	6.809.357.000	7.367.763.000	8.215.875.000	2.932.998.870	2.707.448.500	
3	Dinas Perkebunan Kabupaten Berau		965.424.000	1.386.180.000			
4	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim	4.552.541.000	7.156.453.000	4.133.774.000	5.262.377.225	3.863.013.000	
5	Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara			1.075.345.000			
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN		355.150.000	258.220.000				
6	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Paser	355.150.000	258.220.000				
KEMENTERIAN SOSIAL		2.676.844.000	5.848.040.000	3.859.836.000			
7	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	2.676.844.000	2.950.270.000	3.859.836.000			
8	Dinas Sosial Kabupaten Paser		2.897.770.000				
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN							

KEMENTERIAN / LEMBAGA / SKPD / SATKER		Alokasi Dana Tugas Pembantuan (Rp)					Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	
PERIKANAN						378.825.000	
9	Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur					378.825.000	
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		42.987.367.000		16.083.265.000	44.945.568.000	28.090.909.000	
Bina Marga						*28.090.909.000*	
10	Dinas Pekerjaan Umum. Penataan Ruang. Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur	42.987.367.000		16.083.265.000	44.945.568.000	28.090.909.000	
KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM		1.450.000.000					
11	Dinas Perdagangan. Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kutai Barat	500.000.000					
12	Dinas Perdagangan. Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kutai Barat	950.000.000					
KEMENTERIAN PERDAGANGAN			16.000.000.000	3.000.000.000		11.999.160.840	
13	Dinas Perindustrian. Perdagangan. Koperasi. Usaha Kecil Dan Menengah		4.000.000.000				

KEMENTERIAN / LEMBAGA / SKPD / SATKER		Alokasi Dana Tugas Pembantuan (Rp)					Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	
	Kab Paser						
14	Dinas Koperasi. Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Berau		4.000.000.000				
15	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur	18.000.000.000	4.000.000.000				
16	Dinas Koperasi. Ukm. Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Penajam Paser Utara	12.000.000.000	4.000.000.000			6.000.000.000	
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Samarinda	12.000.000.000				2.999.550.450	
18	Dinas Perdagangan Kota Balikpapan			3.000.000.000			
19	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kab Kutai Kartanegara			3.000.000.000		2.999.610.390	
KEMENTERIAN DESA. PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI		13.598.879.000	7.137.425.000	2.933.620.000	9.018.607.750	7.536.458.840	
20	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur	2.678.644.000	3.482.734.000	912.258.000	2.468.002.000	953.163.000	

KEMENTERIAN / LEMBAGA / SKPD / SATKER		Alokasi Dana Tugas Pembantuan (Rp)					Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	
21	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Paser	7.790.006.000		1.456.376.000	3.617.813.000	3.704.557.840	
22	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Kutai Timur	3.130.229.000	3.654.691.000	564.986.000	2.932.792.750	2.878.738.000	
23	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Samarinda	12.000.000.000				-	
Jumlah Total		201.851.799.000	131.033.918.000	75.697.154.000	102.913.390.845	70.105.827.780	

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan pelaksanaan rencana pembangunan tahun ke-5 (lima) dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 guna mewujudkan konsistensi dan kesinambungan rencana pembangunan daerah. Adapun Visi Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah “Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”. Visi pembangunan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam misi pembangunan dalam 5 (lima) tahun sebagai berikut : (1) Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas; (2) Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan; (3) Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan; (4) Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; (5) Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik. Secara umum, kerangka kebijakan pembangunan Kalimantan Timur untuk Tahun 2019-2023 dapat di lihat seperti pada Gambar IV.1 berikut.

Visi Pembangunan : *"Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat"*	
Fokus Utama	
I. SDM yang Berdaya Saing	II. Kemandirian Ekonomi
1. Pendidikan 2. Kesehatan	1. Pertumbuhan dan kestabilan Ekonomi 2. Perubahan Struktur Ekonomi
Fokus Pendukung/Kondisi Perlu	
III. Daya Saing Infrastruktur	IV. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Fokus Pengarusutamaan Lingkungan Hidup	

Gambar IV.1
Pola Hubungan Antar Fokus Pembangunan RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Berdasarkan misi di atas, maka rumusan tujuan dan sasaran pembangunan yang menjadi pedoman penyusunan sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada rencana tahunan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.1
Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
"Penguatan ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan menuju kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Kalimantan Timur yang Berdaulat"

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023
Misi 1 : Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia Terutama Perempuan, Pemuda Dan Penyandang Disabilitas	Tujuan 1 : Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77,75
	Sasaran 1 : Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,13
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,17
	Sasaran 2 : Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Presentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	%	0,40
	Sasaran 3 : Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,75
	Sasaran 4 : Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	65,70
	Tujuan 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	%	5,90
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,50

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023
	Sasaran 5 : Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,7285
	Sasaran 6: Meningkatnya daya saing angkatan kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	40,00
Misi 2 : Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah Dan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan	Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,5±1
		PDRB per Kapita	Juta Rp	193
		LPE Non Migas dan Batubara	%	2,50
		Nilai Tukar Petani	Angka	120,00
	Sasaran 7 : Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	Pendapatan Daerah	Miliar Rp	12.122
	Sasaran 8 : Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara	Miliar US$	1,89
	Sasaran 9 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Batubara	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB	%	9,86
	Sasaran 10 : Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura	%	0,65

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023
		terhadap PDRB		
		Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB	%	0,37
		Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB	%	5,30
		Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB	%	1,72
		Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB	%	1,08
	Sasaran 11: Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara	Triliun Rp	35,67
	Sasaran 12 : Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB	%	13,50
	Sasaran 13 : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	9,91
		Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB	%	15,68
Misi 3 :	Tujuan 4 :	Indeks Gini	Indeks	0,308

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023
Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar			
	Sasaran 14 : Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Jumlah Penumpang yang terlayani	Orang	8.100.000
		Jumlah barang yang diangkut	Ton	370.000.000
		Jumlah kawasan ekonomi yang terhubungkan	Kawasan	7
		Capaian akses air minum layak	%	70,53
		Luas lahan pertanian yang beririgasi	Ha	14.778,50
		Luas kawasan kumuh	Ha	1.137,82
		Luas genangan banjir perkotaan	Ha	329
		Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	83,10
		Rasio elektrifikasi	%	95,00
Misi 4 : Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan	Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,15
	Sasaran 15 : Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU	%	29,33
	Sasaran 16 : Meningkatnya Ketangguhan	Indeks Risiko Bencana	Indeks	150,49

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023
	Menghadapi Bencana			
Misi 5 : Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih, Profesional Dan Berorientasi Pelayanan Publik	Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B (72,00)
	Sasaran 17 : Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,00
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik (SPBE)	Indeks	3,30
	Sasaran 18 : Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	78,0
	Sasaran 19 : Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level	Level 4

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Selain mempedomani dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023, juga perlu memperhatikan dokumen perencanaan tahunan nasional (RKP) tahun 2023. Berdasarkan hasil Konsultasi Publik RKP Tahun 2023, didapatkan informasi dari hasil evaluasi pembangunan nasional tahun 2021 bahwa permasalahan yang dihadapi adalah berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, rasio gini, indeks pembangunan manusia, emisi gas rumah kaca, nilai tukar petani, dan nilai tukar nelayan.

Tabel IV.2
Capaian Indikator Sasaran RKP Tahun 2021

No	Indikator Sasaran Pembangunan	Target 2021*)	Capaian 2021
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,0	3,69
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	9,2-9,7	10,14 (Maret 2021)
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	7,7-9,1	6,49 (Agustus 2021)
4.	Rasio Gini (nilai)	0,377-0,379	0,384 (Maret 2021)
5.	Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai)	72,78-72,95	72,29
6.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK (%)	23,55-24,05	24,13 (Tw III 2021)
7.	Nilai Tukar Petani/NTP (nilai)	102-104	103,97
8.	Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai)	102-104	104,69

*)*Target 2021 bersumber dari Perpres 122 Pemutakhiran RKP 2021*

Adapun beberapa strategi yang telah dan kedepannya dapat terus dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menyelesaikan permasalahan pembangunan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi, melalui strategi :
   (1) Pemulihan daya beli dan usaha; dan
   (2) Diversifikasi ekonomi;
2. Menekan jumlah penduduk miskin, melalui strategi :
   (1) Penurunan beban pengeluaran; dan
   (2) Peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan;
3. Menekan tingkat pengangguran, melalui upaya :

(1) Penciptaan kesempatan kerja baru sebagai upaya penumbuhan investasi padat pekerja, penguatan konsumsi masyarakat, dan pengembangan UMKM;
(2) Peningkatan keahlian tenaga kerja melalui reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi;
(3) Penguatan sistem informasi pasar kerja yang kredibel sebagai dasar intervensi kebijakan ketenagakerjaan; dan
(4) Penguatan sistem perlindungan sosial bagi pekerja;

4. Menurunkan tingkat ketimpangan, melalui strategi :
(1) Memperkuat afirmasi kelompok 40 persen terbawah melalui reformasi sistem perlindungan sosial yang meliputi pengembangan registrasi sosial ekonomi; peningkatan akurasi penargetan; integrasi dan penyederhanaan program; serta penyaluran secara digital, cepat, dan responsif kebencanaan;
(2) Penguatan kelembagaan pelatihan vokasi;
(3) Peningkatan peran UMKM;
(4) Penguatan kebijakan fiskal untuk redistribusi yang merata;

5. Meningkatkan indeks pembangunan manusia, melalui strategi :
(1) Bantuan sosial dan subsidi kepada masyarakat kelompok berpenghasilan rendah serta insentif kepada dunia usaha dan penganggur;
(2) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada percepatan penurunan kematian ibu dan bayi, perbaikan gizi masyarakat, penguatan upaya promotive dan preventif, serta penguatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah;
(3) Peningkatan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas melalui peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran termasuk pembelajaran jarak jauh dan pemanfaatan teknologi dalam Pendidikan, afirmasi akses di semua jenjang pendidikan, pelaksanaan wajib belajar 12 tahun;

6. Menurunkan emisi gas rumah kaca, melalui upaya :
(1) Pelaksanaan transisi dari kegiatan perekonomian yang intensif karbon menjadi kegiatan perekonomian yang lebih ramah lingkungan serta meminimalkan dampak terhadap peningkatan laju emisi GRK; dan

(2) Peningkatan aksi pembangunan rendah karbon yang memiliki kontribusi signifikan dan berdampak langsung pada penurunan emisi, utamanya pada sektor lahan dan energi;

7. Menjaga nilai tukar petani, melalui kebijakan :
   (1) Jaminan ketersediaan input pertanian;
   (2) Pembentukan korporasi petani dan nelayan;
   (3) Kawasan sentra produksi pangan *(food estate)*;
   (4) Pengembangan sentra produksi pangan berbasis pertanian digital;
   (5) Efisiensi distribusi pangan melalui penguatan konektivitas produksi (jalan usaha tani) dan sistem logistik pangan;
   (6) Percepatan transformasi *platform e-commerce* pertanian/rantai pasok *online*;
   (7) Pengolahan primer produksi pangan dan pertanian;
8. Meningkatkan nilai tukar nelayan, melalui kebijakan :
   (1) Peningkatan produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana pelaku usaha perikanan serta digitalisasi usaha kelautan dan perikanan;
   (2) Penguatan rantai pasok hasil perikanan;
   (3) Pengembangan sentra produksi kelautan dan perikanan melalui pengembangan kampung-kampung perikanan;
   (4) Penguatan kelembagaan pelaku usaha perikanan;
   (5) Perlindungan bagi pelaku usaha perikanan, serta pendampingan dan penyuluhan.

Tema RKP tahun 2023 mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan fokus pembangunan Nasional yang dijabarkan melalui Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023 sebagai berikut:

Prioritas 1: Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.

Prioritas 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Prioritas 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Prioritas 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Prioritas 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Prioritas 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Prioritas 7: Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam mewujudkan pencapaian sasaran dan tema RKP 2023 telah ditetapkan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia: kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi;
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sedangkan target sasaran nasional pada RKP tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel IV.3
Indikator Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2023

No	Sasaran	Target 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,9
2	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5-8,5
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3-6,0
4	Rasio Gini (Indeks)	0,375-0,378
5	Indeks Pembangunan Manusia	73,29-73,35
6	Penurunan Emisi GRK (%)	27,02
7	Nilai Tukar Petani/NTP	103-105
8	Nilai Tukar Nelayan/NTN	105-107

Sumber: Rancangan Awal Sasaran RKP 2023

Selanjutnya besaran target pembangunan Kalimantan Timur pada RKP 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.4
Target RKP Tahun 2023 untuk Kalimantan Timur

No	Sasaran	Target 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,5-6,0
2	Tingkat Kemiskinan (%)	5,30-4,11
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,63-5,89
4	Indeks Pembangunan Manusia	78,17-78,18
5	Rasio Gini	0,328-0,328

Sumber: Rancangan RKP 2023, 2022

Penetapan target makro Kalimantan Timur dalam RKP 2023 merupakan target dengan *range* angka yang optimis, oleh karena itu dalam pencapaian target makro tersebut perlu didorong terutama oleh adanya pengembangan komoditas unggulan pertanian dalam arti luas seperti sawit, karet, lada, pala, cengkeh, kelapa, perikanan tangkap, perikanan budidaya serta perbaikan harga komoditas minyak, gas bumi serta batubara di pasar internasional. Selain itu pula, dorongan untuk melakukan hilirisasi komoditas pertanian, perkebunan dan pertambangan juga terus dilakukan dan ditambah lagi kaitannya dengan proses pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur juga merupakan bagian dari faktor pendorong pencapaian target pembangunan yang ditetapkan.

4.2.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2023

Isu strategis merupakan persoalan pembangunan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Secara metodologis, isu ini disusun berdasarkan analisis situasi capaian pembangunan dan memiliki dampak luas terhadap suatu pembangunan. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Demikian pula sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka Panjang.

Perumusan isu strategis Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, kondisi tahun 2022, arah kebijakan dari RPJMD dan arah kebijakan RKP. Proses penyusunan isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.5
Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Arah Kebijakan RKP 2023	Arah Kebijakan Perubahan RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2021	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan 3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*	1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar kerja 2. Mendorong pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu (Boarding School) 3. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta kemampuan pembelajaran berbasis IT 4. Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu 5. Peningkatan sarpras pendidikan dalam mendukung pembelajaran jarak jauh 6. Pengembangan perpustakaan berbasis IT 7. Pengembangan kewirausahaan pemuda dan difabel berbasis IT 8. Peningkatan kualitas pembinaan pemuda berprestasi di bidang olahraga 9. Pemerataan pelayanan tenaga	1. Situasi pandemi covid yang menghambat pencapaian harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah 2. Masih rendahnya daya tampung sekolah di jenjang SMA khususnya di wilayah kabupaten/kota 3. Belum optimalnya kompetensi layanan pendidikan vokasi/kejuruan untuk masyarakat siap kerja 4. Belum efektifnya pemerataan pemenuhan fasilitas dan sarana prasarana Pendidikan 5. Belum optimalnya kapasitas dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan, khususnya dalam pemanfaatan IT 6. Peran pemuda belum terlibat secara nyata dalam membangun kemandirian daerah 7. Akses pelayanan kesehatan masyarakat belum merata	1. Relatif tingginya tingkat kemiskinan 2. Relatif tingginya tingkat pengangguran terbuka 3. Masih adanya ketimpangan pendapatan 4. Potensi Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup 5. Masih rendahnya reformasi birokrasi	Peningkatan daya saing sumber daya manusia

Arah Kebijakan RKP 2023	Arah Kebijakan Perubahan RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2021	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
	kesehatan medis maupun non medis 10. Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 11. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen Fasyankes maupun fasilitasnya 12. Penguatan fasilitas dan pelayanan kesehatan penanganan wabah penyakit menular 13. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat 14. Penguatan dan pengembangan lembaga pemberdayaan perempuan 15. Peningkatan pengembangan Kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja 16. Peningkatan keterampilan angkatan kerja	terutama pada daerah 3T 8. Masih rendahnya upaya pengarusutamaan gender 9. Lemahnya pengembangan kompetensi/ keterampilan tenaga kerja 10. Rendahnya kesempatan kerja 11. Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja		

Arah Kebijakan RKP 2023	Arah Kebijakan Perubahan RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2021	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
4. Mendorong pemulihan dunia usaha 5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan	1. Pembinaan dan pengembangan kemandirian desa 2. Penguatan kualitas perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan 3. Penguatan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah 4. Pengembangan UKM berorientasi ekspor 5. Peningkatan efisiensi pelayanan, pengamanan dan perlindungan ekspor 6. Pengembangan kawasan industri prioritas provinsi 7. Pengembangan industri hulu agro, aneka dan pangan 8. Pengembangan sumber daya manusia pelaku IKM 9. Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) 10. Peningkatan prasarana pendukung produksi tanaman pangan dan hortikultura 11. Peningkatan Kapasitas	1. Belum Optimalnya pemberdayaan masyarakat dan desa 2. Kualitas pembangunan wilayah perdesaan belum merata 3. Rendahnya nilai tambah industri pengolahan non migas bagi perekonomian Kaltim 4. Belum ada industri pengolahan non migas dan batubara baru yang beroperasional 5. Menurunnya lahan pertanian akibat banyaknya alih fungsi lahan 6. Masih banyaknya benih unggul yang belum bersertifikat sehingga produktivitas berkurang 7. Masih banyak penerapan pengembangan pertanian yang belum bersifat intensifikasi 8. Permintaan daging sapi/ayam menurun akibat pandemi covid 9. Pemenuhan daging sapi lokal masih rendah sehingga lebih banyak impor dari daerah lain 10. Masih belum optimalnya		• Percepatan transformasi ekonomi berbasis SDA tidak terbarukan ke SDA terbarukan secara vertikal maupun horizontal • Reformasi struktural menuju tatanan normal baru pasca COVID-19

Arah Kebijakan RKP 2023	Arah Kebijakan Perubahan RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2021	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
	Kelembagaan dan Keterampilan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura 12. Peningkatan produksi ternak berkualitas 13. Pengembangan Kawasan Peternakan 14. Peningkatan produktivitas Komoditas unggulan perkebunan 15. Pengembangan Komoditas Unggulan Perkebunan Non Sawit 16. Peningkatan kemitraan antara petani swadaya dengan industri hilir 17. Peningkatan nilai tambah dan stabilitas harga di tingkat petani 18. Pengelolaan areal perkebunan yang bernilai konservasi tinggi 19. Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Bidang Perikanan 20. Peningkatan Sarana Prasarana Perbenihan dan Produksi Perikanan 21. Perlindungan dan pengelolaan zona konservasi kelautan dan	produksi TBS akibat kelangkaan pupuk saat pandemi dan banyaknya petani yang enggan kebun sawit yang diremajakan 11. Masih rendahnya hilirisasi industri dan pemasaran terhadap produk perkebunan non kelapa sawit 12. Masih banyaknya pembudidaya ikan yang belum bersertifikat sehingga banyak komoditi perikanan yang belum bisa diekspor 13. Belum optimalnya pengelolaan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan dan bukan kayu 14. Belum optimalnya realisasi nilai investasi di luar sektor pertambangan 15. Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi terhadap perekonomian daerah akibat pandemi covid (PPKM) 16. Kurangnya kunjungan wisatawan akibat kondisi pandemi 17. Kurangnya aksesibilitas menuju		

Arah Kebijakan RKP 2023	Arah Kebijakan Perubahan RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2021	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
	perikanan 22. Penguatan informasi potensi kawasan hutan 23. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu 24. Perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan 25. Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan 26. Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investasi industri non migas dan non batubara 27. Peningkatan kualitas pelayanan terpadu pelaksanaan investasi berbasis elektronik 28. Pemantauan komitmen perizinan 29. Peningkatan pengawasan pelaksanaan perizinan penanaman modal 30. Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM 31. Pengembagan platform pasar koperasi dan UKM berbasis digital 32. Peningkatan kualitas produk	destinasi wisata sehingga mengakibatkan tingginya biaya kunjungan wisatawan 18. Belum maksimalnya pengembangan ekosistem Ekraf sebagai pendukung daya tarik wisata		

Arah Kebijakan RKP 2023	Arah Kebijakan Perubahan RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2021	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
	koperasi dan UKM 33. Fasilitasi permodalan koperasi dan UKM 34. Peningkatan layanan amenitas produk wisata Kaltim 35. Peningkatan layanan pemasaran produk wisata dan sub sektor ekonomi kreatif Kaltim 36. Peningkatan kompetensi SDM pemangku produk wisata Kaltim 37. Implementasi peta jalan pengembangan sub sektor Ekonomi Kreatif Kaltim 38. Penguatan daya saing produk sub sektor ekonomi kreatif Kaltim			
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi 7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara	1. Pembenahan manajemen transportasi, khususnya konektivitas antar moda transportasi 2. Pembangunan, Rekonstruksi dan pemeliharaan jalan 3. Peningkatan sarana dan prasarana air baku 4. Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan serta jaringan distribusi air minum	1. Belum optimalnya pelayanan infrastruktur dasar perhubungan 2. Situasi pandemi covid yang mengakibatkan mobilisasi penumpang berkurang 3. Masih terdapat wilayah yang minim konektivitas dengan pusat kegiatan ekonomi 4. Efektivitas keterhubungan kawasan ekonomi belum		• Peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas serta pengembangan infrastruktur dasar pembangunan • Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) • Pembangunan

Arah Kebijakan RKP 2023	Arah Kebijakan Perubahan RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2021	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
	5. Penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (Regional) 6. Penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh 7. Pembangunan dan pemeliharaan daerah aliran sungai (DAS) dan sub sistemnya 8. Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik serta Energi Baru Terbarukan (EBT) 9. Penyesuaian tata ruang tingkat provinsi dan kabupaten/Kota yang selaras untuk mendukung IKN 10. Menjadikan dokumen tata ruang sebagai rujukan dalam pemanfaatan ruang 11. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. 12. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana 13. Peningkatan kualitas wilayah siaga bencana	tercapai karena masih tingginya kerusakan Jalan Provinsi 5. Keterbatasan wewenang penyelenggaraan SPAM, SPALD, dan Persampahan oleh Pemerintah Provinsi, yakni hanya dibatasi oleh kewenangan lintas Kabupaten/Kota (Regional) 6. Masih rendahnya peningkatan cakupan layanan air minum pada daerah yang rawan air dan daerah terpencil 7. Belum optimalnya pemerataan infrastruktur sumber daya air 8. Belum optimalnya penyelenggaraan Penataan Ruang 9. Masih luasnya kawasan kumuh di Kaltim 10. Intervensi bantuan stimulan rumah layak huni belum terlalu besar untuk membantu pengurangan angka kemiskinan 11. Belum optimalnya pelayanan listrik terhadap masyarakat khususnya di daerah pelosok		Ibukota Negara (IKN)

Arah Kebijakan RKP 2023	Arah Kebijakan Perubahan RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2021	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
		12. Belum Optimalnya Ketangguhan Bencana daerah 13. Keterbatasan akses pembentukan desa tangguh bencana akibat pandemi covid		
8. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim)	1. Peningkatan Kualitas Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dan Perubahan Iklim 2. Peningkatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan	1. Terus menurunnya indeks kualitas air dan kualitas udara		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
	1. Optimalisasi peningkatan kualitas dan ketertiban dalam pengurusan administrasi publik 2. Peningkatan dukungan pelayanan publik berbasis IT 3. Pengembangan E-gov dengan dukungan jaringan dan pengolahan data yang handal dan aman 4. Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur 5. Penguatan tata kelola kelembagaan dan sistem pemerintahan	1. Belum semua Perangkat Daerah memiliki sumber daya aplikasi pelayanan publik berbasis elektronik 2. Belum tersusunnya rencana strategik SPBE lingkup provinsi 3. Rendahnya penilaian pada pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Perangkat Daerah 4. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pengawasan 5. Belum optimalnya pelaksanaan SPIP di setiap perangkat daerah		Pemerintahan yang profesional dan akuntabel

Arah Kebijakan RKP 2023	Arah Kebijakan Perubahan RPJMD 2019-2023	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2021	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
	6. Peningkatan integritas dan komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah			

Sumber perumusan isu strategis:

1. Arah kebijakan RKP Tahun 2023
2. Arah kebijakan P-RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
3. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
4. Permasalahan pembangunan daerah (hasil evaluasi RKPD)

Berdasarkan Tabel IV.5 di atas, maka 8 (delapan) isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia;
2. Percepatan transformasi ekonomi berbasis SDA tidak terbarukan ke SDA terbarukan secara vertikal maupun horizontal;
3. Peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas serta pengembangan infrastruktur dasar pembangunan;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
5. Pemerintahan yang profesional dan akuntabel;
6. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
7. Pembangunan Ibukota Negara (IKN);
8. Reformasi Struktural menuju Tatanan Normal Baru Pasca COVID-19

Adapun penjelasan terhadap masing-masing isu strategis adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Peningkatan daya saing sumber daya manusia perlu dilakukan melalui penyediaan lembaga pendidikan/sekolah vokasi yang berorientasi pada kebutuhan tenaga di sektor pertanian dalam arti luas dan dan industri hilir pengolahan. Selain itu, juga dilakukan penurunan kesenjangan kualitas lembaga pendidikan dan tenaga pendidik, baik melalui peningkatan jumlah maupun pemenuhan kualitas dan standar kompetensi tenaga pendidik. Kesejahteraan tenaga pendidik menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam perencanaan pembangunan ini, melalui pemberian tunjangan dan hal lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan pendidik dan akhirnya diharapkan pada kualitas pendidikan.

Selain itu, pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam memastikan peningkatan daya saing. Keterampilan dalam penggunaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi penting dimiliki untuk dapat bersaing di era revolusi industri 4.0. Disisi lain, peningkatan kualitas Balai Latihan Kerja dengan orientasi industri pertanian dan hasil pertanian dalam arti luas, serta menumbuhkan kewirausahaan baru, juga menjadi bagian penting guna meningkatkan daya saing sumber daya manusia.

Keadilan pendidikan ini juga disertai dengan keadilan kesehatan dan jaminan sosial, agar setiap warga Kalimantan Timur dapat memperoleh kesejahteraan yang berkeadilan. Pengintegrasian nilai keagamaan dan nilai budaya dalam lembaga pendidikan juga menjadi agenda utama dalam memenuhi sumber daya manusia yang berkarakter dan berakhlak mulia. Kelompok-kelompok khusus, seperti perempuan, disabilitas, warga miskin, serta pemuda, menjadi fokus perhatian dalam pembangunan sumber daya manusia mendatang.

2. Percepatan Transformasi ekonomi berbasis SDA tidak terbarukan ke SDA terbarukan secara vertikal maupun horizontal

Mengingat semakin langka dan menurunnya sumber daya alam tidak terbarukan, seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara serta semakin menurunnya harga pasar komoditi tersebut, menjadikan masa depan Provinsi Kalimantan Timur akan sangat tergantung pada percepatan transformasi ekonomi dari sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan sebagai alternatif unggulan ekonomi Kalimantan Timur. Pengembangan ekonomi sumber daya alam terbarukan dilakukan melalui optimasi produktivitas kawasan dengan meningkatkan kemampuan produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan, yang diiringi dengan pengembangan industri hilir pengolahan hasil-hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan. Pengembangan industrialisasi sektor sumber daya alam terbarukan diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan asli daerah, dan menciptakan ekspor non migas yang memberikan nilai tambah perekonomian daerah.

Menggerakkan ekonomi alternatif non-kayu dan bahkan jasa lingkungan serta penggunaan kawasan hutan sebagai produk unggulan kehutanan, yang disertai dengan penguatan pada pengembangan industri pengolahannya (hilirisasi), diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi ekonomi Kalimantan Timur, paling tidak dalam mendukung penciptaan lapangan kerja bagi masyararakatnya. Selain itu, pengurangan kemungkinan kehilangan pendapatan pada jalur distribusi dan perdagangan hasil pertanian dalam arti luas juga menjadi kunci dalam meningkatkan pendapatan daerah, termasuk pendapatan asli daerah (PAD). Pengembangan sentra perikanan modern dan pariwisata pada

kawasan Danau Jempang, Semayang dan Melintang di daerah aliran Sungai Mahakam, dan kawasan sepanjang pesisir timur, dapat menjadi potensi yang besar dalam memberikan kontribusi perekonomian makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkerakyatan menjadi hal penting yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak.

3. Peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas serta pengembangan infrastruktur dasar pembangunan

Penyediaan infrastruktur dasar di Provinsi Kalimantan Timur diarahkan pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat, serta pada memberikan dukungan yang baik terhadap tumbuhnya pusat-pusat produksi pertanian dalam arti luas dan industri pengolahan di Kalimantan Timur. Ketersediaan perumahan yang layak huni, air baku dan air minum bersih, serta listrik, dan disertai dengan infrastruktur jalan dan jembatan, serta fasilitas perhubungan pelayaran, menjadi perhatian penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau.

Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang termuat di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur, dikuatkan oleh infrastruktur yang memadai, menjadi denyut nadi transformasi ekonomi hijau Kalimantan Timur. Rangkaian pembangunan yang terintegrasi sangat diharapkan realisasinya dengan mengoptimalkan aksesibilitas dan penguatan konektivitas wilayah sehingga setiap kawasan ekonomi dapat terhubung dan saling mendukung. Tak hanya sampai disana, pemenuhan infrastruktur dasar ini tentu akan mendukung pembangunan IKN menjadi lebih baik. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam perwujudan infrastruktur yang handal seperti akses air minum layak untuk seluruh masyarakat.

Diperlukan upaya optimal untuk pemerataan akses terhadap sumber air baku yang potensial dimanfaatkan secara bersama. Upaya tersebut akan berjalan melalui skema penyediaan air minum lintas Kabupaten/Kota atau Regional (SPAM Regional). Terdapat beberapa potensi SPAM Regional di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang meliputi SPAM Regional Marangkayu (Kukar-Bontang), SPAM Regional Void Ex Tambang (Kutim- Bontang), SPAM Regional Suka Rahmat (Kutim-Bontang), SPAM Regional Sepaku-Semoi (PPU-Balikpapan), SPAM Regional

Batu Lepek (Kukar Balikpapan), dan SPAM Regional Lambakan (Paser-PPU Balikpapan).

Selain terkait konektivitas wilayah dan akses terhadap sumber air minum, maka pengembangan perumahan dan pemukiman layak huni melalui sanitasi dan drainase yang baik diharapkan mampu menjadikan masyarakat hidup lebih layak, termasuk didalamnya penyediaan listrik, ketahanan bangunan hingga ketersediaan prasarana dan sarana umum (PSU).

4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Kalimantan Timur masih memiliki hutan alam yang cukup luas, yang merupakan benteng pertahanan terakhir bagi ekologi dan sosial-budaya Kalimantan Timur. Kawasan-kawasan berhutan, baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, harus terus dikelola keberadaannya, Pengembangan ekonomi produktif dari pertanian dalam arti luas difokuskan pada lahan-lahan bercadangan karbon rendah, serta pada wilayah yang potensial dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Namun di sisi lain, isu kerusakan lingkungan akibat penambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit, meskipun kedua sektor tersebut merupakan kewenangan pusat, namun dampak yang timbul perlu diantisipasi dengan langkah strategis penanggulangannya.

Pengelolaan dan pemanfaatan limbah industri, termasuk pengembangan energi baru terbarukan dari limbah-limbah pertanian, menjadi alternatif dalam pemenuhan energi dan menurunkan emisi GRK. Adapun dalam hal menurunkan ancaman risiko bencana di Kalimantan Timur, dilakukan peningkatan kapasitas daerah dalam mengantisipasi bencana, diantaranya melalui pembatasan kawasan permukiman dan kegiatan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan bencana, memperbanyak desa tangguh bencana, sekolah/madrasah aman bencana, penguatan sarana-prasarana, serta pengembangan sistem tanggap darurat, dan penguatan kapasitas peringatan dini.

Dari sisi adaptasi, penyiapan sumber daya manusia yang tangguh bencana dan mencintai lingkungan sejak dini juga masih perlu diintervensi melalui sekolah-sekolah berstandar adiwiyata. Dalam skala kampung/desa, mendorong perencanaan tata ruang kampung/desa yang rendah emisi dalam kerangka Kampung Iklim serta percepatan

penyadartahuan urgensi penangangan persampahan juga perlu diperhatikan.

5. Pemerintahan yang profesional dan akuntabel

Tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur telah berada pada kondisi yang cukup baik jika didasarkan pada capaian indikator pembangunan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan, terkait optimalisasi akuntabilitas kinerja baik secara administratif maupun sosial.

Sebagai Provinsi yang dikenal memiliki kekayaan alam melimpah, penyelenggaraan pemerintahan banyak disorot karena memiliki peluang terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan daerah dan kebocoran pendapatan daerah. Pemerintahan Daerah harus mengantisipasi adanya penyimpangan dengan memperkuat sikap politik dalam penegakan hukum yang baik, dan memperkuat profesionalitas pemerintahan. Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur juga hendaknya meningkatkan integritas diri dan integritas lembaga menuju pada wilayah/zona bebas korupsi.

Pemerintahan yang profesional dan akuntabel memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Kondisi ini menjadi konsekwensi logis dari perkembangan teknologi infomrasi yang membuat dan bahkan menuntut keerbukaan dan kesiapan dalam pelayanan publik. Dengan melihat berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi, pemerintahan yang profesional dan akuntabel menjadi isu penting untuk diprioritaskan.

6. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi SPM untuk urusan wajib terutama pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial. Berdasarkan capaian pembangunan daerah, masih banyak urusan wajib yang belum diselesaikan dengan baik dikarenakan keterbatasan sumberdaya. Selain itu, belum seluruh kementerian teknis menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan SPM sebagai acuan. Adapun masalah dan isu strategis dalam penerapan SPM di Kalimantan Timur, antara lain :

a. Kapasitas daerah dalam tahap persiapan rencana pencapaian SPM belum dipetakan secara menyeluruh;

b. Kapasitas daerah dalam pengintegrasiaan rencana dan dokumen perencanaan SPM masih dihadapkan pada masalah lemahnya pemahaman aparatur daerah;

c. Kapasitas daerah dalam pembelanjaan penerapan SPM masih dihadapkan pada terbatasnya kemampuan keuangan daerah;

d. Kapasitas daerah dalam tahap penyampaian informasi masih dihadapkan pada kurangnya data dan informasi pencapaian indikator-indikator kinerja SPM.

7. Pembangunan Ibukota Negara (IKN)

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya ke wilayah yang masuk administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara dipastikan akan berdampak pada banyak aspek kehidupan masyarakat di Kalimantan Timur. Secara umum, persoalan lingkungan, ekonomi, dan kependudukan merupakan yang paling besar mendapatkan pengaruh. Selain aspek sosial yang melibatkan masyarakat adat lokal yang juga berpotensi menimbulkan munculnya beberapa upaya yang adaptif dan bersifat masif. Jika diurutkan dari besarnya pemberian dampak, maka aspek lingkungan dan kependudukan merupakan dua persoalan teratas. Selanjutnya, secara implementatif kedua aspek ini akan mempengaruhi ekonomi wilayah dengan potensi imbas kepada sektor sosial-budaya lainnya.

Persoalan perubahan lingkungan hidup akibat dari pembangunan IKN tentu akan langsung menjadi sorotan, mengingat pemahaman luas selalu mengidentikan Kalimantan Timur sebagai pusat kekayaan dan keaneragaman hayati dunia. Terutama jika mengingat bahwa Kalimantan merupakan lokasi strategis bagi seluruh proyek paru-paru dunia, atau penyerapan dan penyimpanan karbon yang menjadi isu sentral global. Pertambahan secara masif jumlah bangunan dan infrastruktur yang akan dibangun membutuhkan suplai yang sangat banyak dari alam. Sehingga secara alamiah, daya tampung lingkungan hidup secara mendadak akan bertambah beberapa kali lipat. Selain hal-hal alamiah ini, persoalan legal lingkungan hidup juga memiliki potensi yang cukup besar seperti eksekusi lahan yang memiliki Hak Guna usaha/HGU, izin usaha perkebunan, izin

pertambangan, atau lahan-lahan yang telah dipersiapkan sebagai wilayah perlindungan. Selain memberikan dampak yang cukup problematis dan sekaligus dilematis, pemindahan dan pembangunan IKN di Kalimantan Timur juga memiliki potensi yang sangat besar sebagai upaya kampanye Ibukota hijau. Pengembangan IKN yang bisa dikatakan di desain dari nol (sehingga memungkinkan mendapatkan model yang ideal), memungkinkan seluruh proyek pembangunan diarahkan kepada pengarusutamaan pertumbuhan ekonomi hijau. Rangkaian pembangunan atau pertumbuhan ekonomi hijau ini secara gradual akan memberikan efek yang sangat positif bagi Kalimantan Timur secara regional, Indonesia secara nasional, dan menjadi isu internasional.

Persoalan besar yang kedua dari pemindahan IKN adalah perspektif bertambahnya jumlah penduduk secara drastis (paling tidak dari pengalaman Jakarta sebagai ibukota saat ini). Persoalan kependudukan ini dan persoalan lingkungan pada dasarnya saling terkait, terutama dalam pembahasan suplai yang akan diberikan oleh alam. Efek langsung yang akan muncul dengan bertambahnya jumlah penduduk adalah jumlah dan model hunian yang akan dibangun. Infrastruktur-infrastruktur dasar yang akan dibangun secara massal ini memutlakkan penggunaan sumber daya alam yang terus menerus dalam jangka panjang dan dengan bobot yang besar. Seperti halnya para persoalan lingkungan di atas, problem kependudukan juga sebetulnya bisa diselesaikan dengan baik dan menjadi sumber peluang dengan mempersiapkan peta jalan (road map) pembangunan yang dapat disesuaikan dan terlokalisir dengan baik.

Problem ketiga yaitu hal-hal yang berkaitan dengan perekonomian Ibu Kota Baru. Beberapa pembangunan yang telah dilakukan baik di wilayah Kalimantan Timur maupun di provinsi-provinsi tetangga mengandaikan bahwa pemindahan IKN berpotensi surplus. Akan tetapi, pemindahan aparatur negara tentu tidak akan bisa dilakukan secara bersamaan dalam satu atau dua gelombang. Asumsi bahwa keuntungan ekonomis, tidak bisa disimpulkan secara cepat. Terutama jika mengingat akan adanya evaluasi bertahap dan berlapis mengenai hal ini. Perubahan-perubahan rencana sangat memungkinkan untuk terjadi dan dilakukan dalam tahapan yang besar juga.

Problem besar terakhir adalah kesiapan masyarakat dan budaya lokal dalam menerima pemindahan IKN. Irisan paling strategis dari isu

pemindahan IKN adalah bertambahnya marwah Negara dan Bangsa Indonesia di wilayah Internasional terutama pada bagian utara NKRI. Sebagaimana yang telah diketahui, potensi-potensi masalah kebanyakan berasal dari wilayah perbatasan sebelah Utara dan Selatan NKRI. Ditambah dengan jumlah negara dan wilayah dagang potensial yang berada di bagian utara, maka pemindahan IKN ke bagian Utara NKRI adalah langkah yang sangat signifikan dengan kedaulatan negara ke luar. Meski demikian, perubahan yang akan terjadi secara tiba-tiba dengan problem-problem yang tidak sedikit perlu untuk disikapi agar bisa menjadi peluang. Salah satu persoalan paling klasik dari masyarakat dan budaya di wilayah Kalimantan adalah persoalan hunian dan eksploitasi SDA. Secara postulatif, seluruh rangkaian pemindahan IKN ini memiliki kandungan-kandungan persoalan pada dua hal besar tersebut. Dalam kaitan implikasi sosial budaya adalah upaya untuk membangun kerukunan antar suku dan/atau kelompok masyarakat yang dipertimbangkan akan menjadi sangat heterogen dengan terbangunnya IKN di provinsi ini. Pengalaman Panjang Kalimantan Timur yang mampu mengendalikan konflik sosial meskipun industrialisasi sumber daya alam di berbagai bidang selama berdarsawarsa telah menarik berbagai migran ke wilayah ini, menjadi nilai plus dari harapan pencapaian kerukunan dimaksud.

Bagian paling menguntungkan dari pemindahan IKN adalah akan adanya penyeimbangan di berbagai sektor dan secara langsung akan mendukung desentralisasi atau otonomi daerah secara menyeluruh. Pemindahan IKN juga merupakan tantangan yang sangat positif bagi Pemerintah Pusat dan sekaligus Pemerintah Daerah dalam membuat peta dan membentuk desain baru dari seluruh skema pengembangan yang akan dilaksanakan. Bagi Kalimantan Timur secara khusus, dan pulau Kalimantan secara umum, tantangan yang paling besar adalah upaya merebut seluruh peluang yang telah dimulai melalui upaya-upaya pengarusutamaan pembangunan ekonomi hijau.

8. Reformasi Struktural menuju Tatanan Normal Baru Pasca COVID-19

Pandemi COVID-19 merupakan bencana yang bersifat global dan mempengaruhi seluruh struktur juga secara global. Dengan demikian dapat dipastikan seluruh sektor yang terkait dengan kesejahteraan rakyat telah, sedang, dan akan terdampak. Sehingga, secara bertahap penurunan produktivitas di dalam struktur masyarakat akan mengarah pada

kemunculan kerentanan sosial. Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu wilayah yang memiliki dinamika tertentu terutama pada sektor ketenagakerjaan, perindustrian, dan perdagangan tentu saja merasakan dampak yang cukup besar dan luas. Hal-hal yang paling urgen untuk ditindaklanjuti adalah persoalan retribusi dan pajak, alternatif bagi tenaga kerja yang di-PHK, dan kesulitan dalam pasokan bahan baku industri. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sektor industri, ketenagakerjaan, dan perdagangan di atas mengimbau seluruh sektor lainnya. Berkurangnya jumlah penduduk yang bekerja membuat distribusi pangan tidak bisa tersalurkan dengan baik, Selain itu, urgensitas untuk bekerja dari rumah juga menghambat tetap berjalannya produktivitas di bidang pangan yang ditandai oleh banyaknya terjadi gagal panen. Selain sektor pangan, industri-industri kecil juga mendapatkan penurunan pendapatan sehingga melemahkan daya beli masyarakat dan menciptakan kelesuan daya saing.

Salah satu upaya strategis Pemerintah Pusat dalam meredam dampak Pandemi COVID-19 ini adalah dengan melakukan reformasi struktural. Diharapkan reformasi struktural mampu memperbaiki fondasi-fondasi ekonomi Indonesia sehingga dapat mengakselerasi ketertinggalan akibat dampak negatif pandemi. Presiden Joko Widodo memprioritaskan lima hal yang harus menjadi area fokus bagi program reformasi struktural, yaitu: (a) pengembangan SDM, (b) pembangunan infrastruktur, (c) deregulasi, (d) debirokratisasi, dan (e) mentransformasikan ekonomi.

Peluang yang sangat berpotensi muncul dari bencana pandemi COVID-19 ini adalah pada reformasi birokrasi secara regional. Kunci utama dari terjadinya reformasi industri tahap baru ini bisa dimulai dari kesepakatan global masyarakat dunia mengenai perlawanan terhadap COVID-19. Secara mendasar adanya konsensus nasional dan bahkan internasional in akan memudahkan untuk melakukan reshaping aturan dan regulasi serta sistem pelayanan birokrasi, sehingga penanganan problem di seluruh sektor bisa dilakukan. Persoalan-persoalan yang muncul di dalam bidang industri yang melibatkan pasokan bahan baku dari luar negeri akan digantikan dengan pengaturan baru mengenai impor dan ekspor bahan baku terkait. Persoalan ketahanan pangan akan membuka kolaborasi regulatif dari beberapa daerah yang berdekatan untuk saling mengisi pasokan-pasokan pangan yang ada di dalam negeri.

Begitu juga peluang untuk memangkas pengeluaran bagi anggaran secara hibrid akan bisa dicapai melalui pelayanan yang tidak lagi mutlak dilaksanakan secara fisik. Persiapan pada infrastruktur yang sebelumnya bisa saja masih dinilai tidak efektif akan berubah secara pragmatis dikarenakan kebutuhan bersama yang memutlakkan adanya adaptasi sosial. Hal yang mencengangkan juga terjadi di dunia pendidikan dengan mulai terbiasanya masyarakat dalam memanfaatkan media-media daring (online) untuk kegiatan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Struktur penghubung mengenai seluruh hal ini tentu harus diregulasikan agar bersifat mengikat seluruh kalangan.

Peluang paling baik yang mungkin muncul dari bencana pandemi COVID-19 adalah cara pandang masyarakat Indonesia, umumnya dan masyarakat Kalimantan Timur mengenai protokol mendasar kesehatan. Selain itu kesadaran bahwa keberadaan setiap orang sebagai unsur masyarakat melalui pemberdayaan kesehatan, pendidikan, dan sosial-budaya akan meningkat dengan tajam. Peluang-peluang yang akan muncul ini, jika dapat didukung dengan program yang tepat secara kualitatif akan mampu mengimbangi cost yang dikeluarkan dalam bentuk belanja selama menghadapi dan masa pemulihan COVID-19 ke depan.

4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD Kalimantan Timur Tahun 2023

Dengan memperhatikan hasil analisa terhadap arah kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023, arah kebijakan RKP tahun 2023, isu strategis serta permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan tahun 2023, maka tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas Guna Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Kalimantan Timur yang Berdaulat”.

Tema tersebut merupakan arah kebijakan pembangunan tahunan yang dirumuskan pada Perubahan RPJMD dan merupakan strategi tahun kelima untuk mewujudkan Visi RPJMD Povinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yaitu “Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”. Tema RKPD tahun 2023 merupakan arah kebijakan pembangunan yang merupakan tindak lanjut dari tema tahun sebelumnya, dimana setelah pemulihan ekonomi dan reformasi

sosial dilakukan pasca puncak pandemi COVID-19, yang kemudian dilanjutkan dengan reformasi struktural dan penguatan daya saing daerah, maka fokus pembangunan selanjutnya adalah meningkatkan produktivitas untuk menjaga dan terus memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.

Tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 menekankan pada kata kunci peningkatan produktivitas, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 3 (tiga) hal tersebut menjadi perhatian utama untuk pembangunan tahun ke-5 periode RPJMD dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan yaitu masih tingginya tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan kualitas lingkungan hidup. Upaya yang harus dilakukan dalam peningkatan ketahanan sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan adalah penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan produktivitas komoditas unggulan dan industri pengolahan, serta pemenuhan tenaga kerja yang berdaya saing, yang didukung dengan peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur, kemandirian birokrasi, dan pelestarian lingkungan.

Alur Pikir dalam perumusan Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar

Kerangka Pikir Perumusan Prioritas RKPD Kalimantan Timur Tahun 2023

Prioritas Pembangunan pada RKPD merupakan Prioritas Pembangunan yang bersifat Tematik yang ditujukan pada pencapaian sasaran utama pada tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023, dimana RKPD ini juga perlu memperhatikan upaya pencapaian tujuan akhir pembangunan jangka menengah pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 yang telah ditetapkan. Dengan memahami isu strategis dan permasalahan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur serta memperhatikan tema pembangunan daerah tahun 2023, maka Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengembangan angkatan kerja yang kompetitif dan berdaya saing;

   Pasca mewabahnya pandemi COVID-19, kondisi ketenagakerjaan belum sepenuhnya pulih lantaran belum kembali pada posisi sebelum terjadinya COVID-19. Pemerintah Daerah perlu melakukan lompatan SDM dengan menggalakkan investasi terhadap sumber daya manusia yang kompetitif dan berdaya saing agar dampak negatif terhadap ketenagakerjaan dapat diminimalisir. Berkenaan dengan itu, kebijakan provinsi Kalimantan Timur diarahkan pada peningkatan kualitas layanan Pendidikan vokasi dan pemagangan yang langsung membekali diri dengan keterampilan dan kesiapan kerja.

   Proses pembangunan IKN direncanakan menjadi penggerak utama sekaligus faktor pengungkit dalam pembangunan ketenagakerjaan sehingga menuntut pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan akselerasi peningkatan kualitas SDM. Hal ini dilakukan agar peran masyarakat Kalimantan Timur dapat berkontribusi sebagai pelaku utama dalam pembangunan IKN. Upaya yang akan dilakukan adalah meningkatkan keahlian dan/atau membuat masyarakat sekitar memperoleh keahlian baru melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja yang bersertifikasi pada Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) yang tersebar di Provinsi Kalimantan Timur.

2. Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal;

   Berdasarkan data evaluasi, indikator makro kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur terutama tingkat kemiskinan meningkat hingga mencapai 6,54 persen dan indeks gini yang merupakan indikator ketimpangan pendapatan juga meningkat menjadi 0,334 sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu merumuskan kebijakan yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dibutuhkan

upaya penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal yang diarahkan pada pemberdayaan ekonomi lokal dan peningkatan produksi maupun kualitas produk lokal yang dapat terserap pasar melalui pengembangan platform pasar UKM berbasis digital serta pengembangan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif.

3. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan sektor pertanian dalam arti luas;

   Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi cukup besar pada sektor pertanian dalam arti luas dan menjadi salah satu sektor perekonomian yang terus menunjukkan peningkatan kontribusi selama masa pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, sektor pertanian dalam arti luas berperan sebesar 8,48 persen meningkat 0,52 persen dari tahun 2019. Namun belum mampu meningkatkan perekonomian daerah secara signifikan, karena perekonomian Kalimantan Timur masih didominasi oleh sektor pertambangan batubara, industri pengolahan dan konstruksi. Kebijakan yang dirumuskan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah peningkatan produktivitas komoditas unggulan sektor pertanian dalam arti luas. Peningkatan produktivitas dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian dalam arti luas, pemberdayaan dan pendampingan kelompok tani, peningkatan akses pemasaran komoditas unggulan hingga penggunaan teknologi berbasis digital.

4. Peningkatan produktivitas industri pengolahan secara berkelanjutan;

   Provinsi Kalimantan Timur telah mempersiapkan perubahan ekonomi menuju pembangunan yang lebih seimbang, yakni antara pemanfataan potensi sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi dengan jaminan keberlanjutan. Kebijakan transformasi ekonomi masih terus dilakukan yang menekankan pada upaya peningkatan nilai tambah melalui penguatan rantai nilai produksi (hulu-hilir) dengan mengembangkan industri turunan dari sektor pertanian dalam arti luas dan pertambangan.

   Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyusun beberapa kebijakan untuk mendorong peningkatan produktivitas industri pengolahan secara berkelanjutan dalam rangka percepatan transformasi ekonomi adalah pengembangan Kawasan-kawasan industri Kalimantan Timur agar beroperasi secara optimal, fasilitasi pelaku usaha ekspor komoditas

unggulan, dan peningkatan kualitas pelayanan terpadu pelaksanaan investasi berbasis elektronik.

5. Pemerataan dan pemantapan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah;

   Konektivitas memiliki peranan sangat penting dalam mendorong kemajuan dan pemerataan pembangunan daerah. Konektivitas yang baik akan mendorong arus jasa dan orang dari pusat-pusat produksi ke *outlet* atau pasar secara efektif dan efisien. Sampai tahun 2021, rasio jalan mantap provinsi Kalimantan Timur adalah 75,20 persen. Rendahnya rasio jalan mantap ini tentunya akan mengganggu arus barang dan orang di Kalimantan Timur.

   Rencana pemindahan dan pembangunan IKN baru merupakan peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal oleh Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan infrastruktur yang handal harus menjadi perhatian utama. Oleh karena itu kebijakan yang dilakukan pada tahun 2023 adalah Pembangunan, Rekonstruksi dan Pemeliharaan Jalan dalam rangka peningkatan kemantapan jalan. Selain itu peningkatan fungsi dan layanan keselamatan perhubungan dan pembenahan manajemen transprtasi, khusunya konektivitas antar moda perlu untuk menjadi perhatian pemerintah daerah.

6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah.

   Birokrasi yang efektif, efisien, tanggap, cekatan, dengan pelaku (birokrat) yang profesional dan berintegritas akan menciptakan pemerintahan yang baik (berwibawa) dan bersih dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Pemerintahan yang demikian akan memberikan pelayanan publik yang berkualitas agar kesejahteraan dapat dinikmati secara berkelanjutan dan berkeadilan. Untuk mencapai hal tersebut maka aparatur pemerintah harus didorong untuk terus melakukan peningkatan kapasitas dan kinerja. Selain itu integritas yang baik dari para aparatur juga harus terus ditingkatkan.

   Ditengah tantangan kemajuan teknologi informasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Beberapa langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut antara lain peningkatan dukungan pelayanan publik berbasis IT dan penerapan

SPBE dengan dukungan jaringan dan pengolahan data yang handal dan aman.

Perumusan prioritas pembangunan disajikan dengan tetap menjaga keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan P-RPJMD dan permasalahan pembangunan daerah.

Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.6
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Arah Kebijakan
P-RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

No	Prioritas Pembangunan RKPD 2023	Arah Kebijakan Perubahan RPJMD untuk Tahun 2023
1.	Pengembangan angkatan kerja yang kompetitif dan berdaya saing	a. Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar kerja b. Peningkatan pengembangan kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja c. Peningkatan keterampilan angkatan kerja
2.	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal	a. Pembinaan dan pengembangan kemandirian desa b. Penguatan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah c. Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM d. Pengembangan *platform* pasar koperasi dan UKM berbasis digital e. Peningkatan kualitas produk koperasi dan UKM f. Fasilitasi permodalan koperasi dan UKM g. Peningkatan layanan amenitas produk wisata Kaltim h. Peningkatan layanan pemasaran produk wisata dan sub sektor ekonomi kreatif Kaltim i. Peningkatan kompetensi SDM pemangku produk wisata Kaltim j. Implementasi peta jalan pengembangan sub sektor ekonomi kreatif Kaltim k. Penguatan daya saing produk sub sektor ekonomi kreatif Kaltim
3.	Peningkatan produktivitas komoditas unggulan sektor pertanian dalam arti luas	a. Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) b. Peningkatan prasarana pendukung produksi tanaman pangan dan hortikultura c. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan petani tanaman pangan dan hortikultura d. Peningkatan produksi ternak berkualitas e. Pengembangan Kawasan peternakan f. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan perkebunan

No	Prioritas Pembangunan RKPD 2023	Arah Kebijakan Perubahan RPJMD untuk Tahun 2023
		g. Pengembangan komoditas unggulan perkebunan non sawit h. Peningkatan kemitraan antara petani swadaya dengan industri hilir i. Peningkatan nilai tambah dan stabilitas harga di tingkat petani j. Pengelolaan areal perkebunan yang bernilai konservasi tinggi k. Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha bidang perikanan l. Peningkatan sarana dan prasarana perbenihan dan produksi perikanan m. Perlindungan dan pengelolaan zona konservasi kelautan dan perikanan n. Penguatan informasi potensi Kawasan hutan o. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu p. Perlindungan dan rehabilitasi Kawasan hutan q. Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan
4.	Peningkatan produktivitas industri pengolahan secara berkelanjutan	a. Pengembangan Kawasan industri prioritas provinsi b. Pengembangan industri hulu agro, aneka dan pangan c. Pengembangan sumber daya manusia pelaku IKM d. Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investasi industri non migas dan non batubara
5.	Pemerataan dan pemantapan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah	a. Peningkatan fungsi layanan dan keselamatan perhubungan b. Pembenahan manajemen transportasi, khususnya konektivitas antar moda transportasi c. Pembangunan, rekonstruksi dan pemeliharaan jalan d. Peningkatan sarana dan prasarana air baku e. Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan serta jaringan distribusi air minum f. Penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (Regional) g. Penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh h. Pembangunan dan pemeliharaan daerah aliran sungai (DAS) dan sub sistemnya i. Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik serta Energi Baru Terbarukan (EBT) j. Penyesuaian tata ruang tingkat provinsi dan kabupaten/Kota yang selaras untuk mendukung IKN k. Menjadikan dokumen tata ruang sebagai rujukan dalam pemanfaatan ruang l. Peningkatan pengawasan dan pengendalian

No	Prioritas Pembangunan RKPD 2023	Arah Kebijakan Perubahan RPJMD untuk Tahun 2023
		pemanfaatan ruang
6.	Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	a. Optimalisasi peningkatan kualitas dan ketertiban dalam pengurusan administrasi publik b. Peningkatan dukungan pelayanan publik berbasis IT c. Pengembangan E-gov dengan dukungan jaringan dan pengolahan data yang handal dan aman d. Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur e. Penguatan tata kelola kelembagaan dan sistem pemerintahan f. Peningkatan integritas dan komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah

Tabel IV.7
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Prioritas Pembangunan RKPD 2023
1.	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	a. Masih rendahnya daya saing sumber daya manusia b. Lemahnya pengembangan kompetensi/keterampilan tenaga kerja c. Banyaknya para pencari kerja yang masuk ke Kaltim dan belum mendapatkan pekerjaan d. Rendahnya kesempatan kerja e. Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja f. Kurangnya SDM instruktur di BLK	PP-1: Pengembangan angkatan kerja yang kompetitif dan berdaya saing
2.	Percepatan Transformasi ekonomi berbasis SDA tidak terbarukan ke SDA terbarukan secara vertikal maupun horizontal	a. Rendahnya nilai tambah industri pengolahan non migas bagi perekonomian Kaltim b. Belum ada industri pengolahan non migas dan batubara baru yang beroperasional c. Masih rendahnya hilirisasi industri dan pemasaran terhadap produk perkebunan non kelapa sawit d. Belum optimalnya pengelolaan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan dan bukan kayu e. Belum optimalnya realisasi nilai investasi di luar sektor pertambangan	1. PP-2: Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal; 2. PP-3: Peningkatan produktivitas komoditas unggulan sektor pertanian dalam arti luas 3. PP-4: Peningkatan produktivitas industri pengolahan secara berkelanjutan

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Prioritas Pembangunan RKPD 2023
3.	Peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas serta pengembangan infrastruktur dasar pembangunan	a. Belum optimalnya pelayanan infrastruktur dasar perhubungan b. Masih terdapat wilayah yang minim konektivitas dengan pusat kegiatan ekonomi c. Efektivitas keterhubungan kawasan ekonomi belum tercapai karena masih tingginya kerusakan Jalan Provinsi d. Belum optimalnya pemerataan infrastruktur sumber daya air minum e. Masih rendahnya ketersediaan sarana prasarana air minum f. Belum optimalnya pemerataan infrastruktur sumber daya air g. Tidak semua sawah terlayani jaringan irigasi teknis h. Lemahnya integrasi data lokasi eksisting sawah dengan wilayah irigasi i. Belum optimalnya penanganan terhadap kawasan kumuh j. Masih luasnya kawasan kumuh di Kaltim k. Masih tingginya masyarakat yang tinggal pada area permukiman kumuh l. Kemampuan penganggaran untuk menangani backlog (kesenjangan jumlah rumah yang direhab dengan yang dibutuhkan) m. Belum tepatnya kriteria penanganan kawasan kumuh (provinsi) n. Belum optimalnya infrastruktur pengendali bencana banjir o. Belum optimalnya penyelenggaraan Penataan Ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang) p. Akses konektivitas yang terbatas q. Masih tingginya tingkat	PP-5: Pemerataan dan pemantapan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Prioritas Pembangunan RKPD 2023
		kerusakan jalan akibat dilalui oleh kendaraan yang melebihi kapasitas jalan r. Penyediaan sarana prasarana air minum belum merata khususnya di wilayah perdesaan dan perbatasan s. Rendahnya ruang fiskal untuk pemerataan infrastruktur yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi t. Belum optimalnya pelayanan listrik terhadap masyarakat khususnya di daerah pelosok	
4.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Terus menurunnya indeks kualitas air dan kualitas udara	PP-4: Peningkatan produktivitas industri pengolahan secara berkelanjutan
5.	Pemerintahan yang profesional dan akuntabel	a. Belum semua Perangkat Daerah memiliki sumber daya aplikasi pelayanan publik berbasis elektronik b. Belum tersusunnya rencana strategik SPBE lingkup provinsi c. Rendahnya penilaian pada pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Perangkat Daerah d. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pengawasa e. Belum optimalnya pelaksanaan SPIP di setiap perangkat daerah	PP-6: Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah
6.	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	a. Belum efektifnya pemerataan pemenuhan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan b. Belum optimalnya kapasitas dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan, khususnya dalam pemanfaatan IT c. Akses pelayanan kesehatan masyarakat belum merata terutama pada daerah 3T d. Masih rendahnya ketersediaan sarana prasarana air minum e. Penyediaan sarana prasarana air minum belum merata khususnya di wilayah	1. PP-5: Pemerataan dan pemantapan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah 2. PP-6: Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Prioritas Pembangunan RKPD 2023
		perdesaan dan perbatasan f. Intervensi bantuan stimulan rumah layak huni belum terlalu besar untuk membantu pengurangan angka kemiskinan g. Belum semua Perangkat Daerah memiliki sumber daya aplikasi pelayanan publik berbasis elektronik	
7.	Pembangunan Ibukota Negara (IKN)	a. Efektivitas keterhubungan kawasan ekonomi belum tercapai karena masih tingginya kerusakan Jalan Provinsi b. Akses konektivitas yang terbatas c. Masih tingginya tingkat kerusakan jalan akibat dilalui oleh kendaraan yang melebihi kapasitas jalan	PP-5: Pemerataan dan pemantapan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah
8.	Reformasi Struktural menuju Tatanan Normal Baru Pasca COVID-19	a. PHK akibat pandemi covid b. Permintaan daging sapi/ayam menurun akibat pandemi covid (suplai > demand) c. Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi terhadap perekonomian daerah akibat pandemi covid (PPKM) d. Kurangnya kunjungan wisatawan akibat kondisi pandemi e. Situasi pandemi covid yang mengakibatkan mobilisasi penumpang berkurang f. Situasi pandemi covid yang mengakibatkan distribusi logistik (non batubara) berkurang g. Keterbatasan akses pembentukan desa tangguh bencana akibat pandemi covid	1. PP-1: Pengembangan angkatan kerja yang kompetitif dan berdaya saing 2. PP-2: Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal; 3. PP-3: Peningkatan produktivitas komoditas unggulan sektor pertanian dalam arti luas 4. PP-4: Peningkatan produktivitas industri pengolahan secara berkelanjutan 5. PP-5: Pemerataan dan pemantapan konektivitas dan aksesibilitas

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Prioritas Pembangunan RKPD 2023
			infrastruktur wilayah 6. PP-6: Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah

Untuk mendukung prioritas pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, maka disusun strategi dan arah kebijakan tahunan yang mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang dapat dilihat pada tabel IV.8.

Tabel IV.8
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan RKPD
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI 1. Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia Terutama Perempuan, Pemuda Dan Penyandang Disabilitas		
Tujuan 1: Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia		
Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar kerja
		2. Mendorong pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu (Boarding School)
		3. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta kemampuan pembelajaran berbasis IT
		4. Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu
		5. Peningkatan sarpras pendidikan dalam mendukung pembelajaran jarak jauh
		6. Pengembangan perpustakaan berbasis IT
Sasaran 2: Meningkatnya Peran Pemuda dalam	Peningkatan daya saing generasi muda	1. Pengembangan kewirausahaan pemuda dan difabel berbasis IT
		2. Peningkatan kualitas pembinaan pemuda berprestasi di bidang

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Pembangunan		olahraga
Sasaran 3: Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	1. Pemerataan pelayanan tenaga kesehatan medis maupun non medis
		2. Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
		3. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen Fasyankes maupun fasilitasnya
		4. Penguatan fasilitas dan pelayanan kesehatan penanganan wabah penyakit menular
		5. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat
Sasaran 4: Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Optimalisasi pengarusutamaan gender	Penguatan dan pengembangan lembaga pemberdayaan perempuan
Tujuan 2: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		
Sasaran 5: Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Pemerataan pembangunan wilayah perdesaan	1. Pembinaan dan pengembangan kemandirian desa
		2. Penguatan kualitas perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan
Sasaran 6: Meningkatnya daya saing angkatan kerja	Perluasan kesempatan kerja	1. Peningkatan pengembangan Kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja
		2. Peningkatan keterampilan angkatan kerja
MISI 2. Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan		
Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas		
Sasaran 7: Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	1. Peningkatan pendapatan, pelayanan dan pengawasan sumber-sumber penerimaan pajak daerah, retribusi daerah
		2. Penambahan atas potensi penerimaan daerah yang bersumber dari usaha/ badan usaha yang beroperasi di Kalimantan Timur
Sasaran 8: Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas	Peningkatan daya saing komoditas non migas dan batubara di	1. Penguatan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah
		2. Pengembangan UKM Berorientasi

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
dan Batubara	pasar internasional	Ekspor
		3. Peningkatan efisiensi pelayanan, pengamanan dan perlindungan ekspor
Sasaran 9: Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	Pengembangan industri unggulan provinsi	1. Pengembangan kawasan industri prioritas provinsi
		2. Pengembangan industri hulu agro, aneka dan pangan
		3. Pengembangan sumber daya manusia pelaku IKM
Sasaran 10: Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	1. Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
		2. Peningkatan prasarana pendukung produksi tanaman pangan dan hortikultura
		3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak	1. Peningkatan produksi ternak berkualitas
		2. Pengembangan Kawasan Peternakan
	Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas sub sektor perkebunan secara berkelanjutan	1. Peningkatan produktivitas Komoditas unggulan perkebunan
		2. Pengembangan Komoditas Unggulan Perkebunan Non Sawit
		3. Peningkatan kemitraan antara petani swadaya dengan industri hilir
		4. Peningkatan nilai tambah dan stabilitas harga di tingkat petani
		5. Pengelolaan areal perkebunan yang bernilai konservasi tinggi
	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor perikanan secara berkelanjutan	1. Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Bidang Perikanan
		2. Peningkatan Sarana Prasarana Perbenihan dan Produksi Perikanan
		3. Perlindungan dan pengelolaan zona konservasi kelautan dan perikanan
	Peningkatan produksi dan produktifitas hasil hutan kayu dan non kayu yang	1. Penguatan informasi potensi kawasan hutan
		2. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	berkelanjutan	3. Perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan
		4. Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan
Sasaran 11: Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Non migas dan non batubara	1. Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investasi industri non migas dan non batubara
		2. Peningkatan kualitas pelayanan terpadu pelaksanaan investasi berbasis elektronik
		3. Pemantauan komitmen perizinan
		4. Peningkatan pengawasan pelaksanaan perizinan penanaman modal
Sasaran 12: Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Revitalisasi pembinaan dan pengelolaan koperasi dan UKM	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM
		2. Pengembagan platform pasar koperasi dan UKM berbasis digital
		3. Peningkatan kualitas produk koperasi dan UKM
		4. Fasilitasi permodalan koperasi dan UKM
Sasaran 13: Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Pengembangan Produk Wisata Kalimantan Timur	1. Peningkatan layanan amenitas produk wisata Kaltim
		2. Peningkatan layanan pemasaran produk wisata dan sub sektor ekonomi kreatif Kaltim
		3. Peningkatan kompetensi SDM pemangku produk wisata Kaltim
	Pengembangan ekonomi kreatif	1. Implementasi peta jalan pengembangan sub sektor Ekonomi Kreatif Kaltim
		2. Penguatan daya saing produk sub sektor ekonomi kreatif Kaltim
MISI 3. Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan		
Tujuan 4: Meningkatkan Pemerataan dan Pengembangan Pelayanan Infrastruktur Dasar		
Sasaran 14: Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar perhubungan	1. Peningkatan fungsi layanan dan keselamatan perhubungan
		2. Pembenahan manajemen transportasi, khususnya konektivitas antar moda transportasi
	Penguatan konektivitas antar daerah, kawasan dan IKN	Pembangunan, Rekonstruksi dan pemeliharaan jalan

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Peningkatan infrastruktur sumber daya air	1. Peningkatan sarana dan prasarana air baku
		2. Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan serta jaringan distribusi air minum
		3. Penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (Regional)
	Pembenahan infrastruktur kawasan kumuh	Penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh
	Peningkatan infrastruktur pengendali banjir	Pembangunan dan pemeliharaan daerah aliran sungai (DAS) dan sub sistemnya
	Peningkatan Akses ketenagalistrikan dan penggunaan energi berbasis potensi lokal	Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik serta Energi Baru Terbarukan (EBT)
	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	1. Penyesuaian tata ruang tingkat provinsi dan kabupaten/Kota yang selaras untuk mendukung IKN
		2. Menjadikan dokumen tata ruang sebagai rujukan dalam pemanfaatan ruang
		3. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
MISI 4. Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan		
Tujuan 5: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		
Sasaran 15: Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	1. Peningkatan Kualitas Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dan Perubahan Iklim
		2. Peningkatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan
Sasaran 16: Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana
		2. Peningkatan kualitas wilayah siaga bencana
MISI 5. Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		
Tujuan 6: Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik		
Sasaran 17: Terwujudnya	Peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Optimalisasi peningkatan kualitas dan ketertiban dalam pengurusan

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	berbasis teknologi informasi	administrasi publik
		2.Peningkatan dukungan pelayanan publik berbasis IT
		3. Pengembangan E-gov dengan dukungan jaringan dan pengolahan data yang handal dan aman
Sasaran 18: Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah	1. Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur
		2. Penguatan tata kelola kelembagaan dan sistem pemerintahan
Sasaran 19: Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis risiko	Peningkatan integritas dan komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah

Prioritas pembangunan daerah dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, indikator kinerja tujuan dan sasaran, program prioritas, indikator kinerja untuk masing-masing program prioritas, target kinerja program serta pagu anggaran program prioritas dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.9

Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah Dalam Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB	DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Tujuan 1 : Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia								
Sasaran 1 : Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,13	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK (%)	85	1.026.102.881.246	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PP - 1
	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	10,17	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan jangkauan dan kapasitas perpustakaan yang terakreditasi (%)	11,49	2.590.940.800	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	PP - 1
Sasaran 2 : Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	0,4	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pengembangan daya saing keolahragaan (%)	80	18.383.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga	PP - 1
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan (%)	1,2	18.550.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga	PP - 1
Sasaran 3 : Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,75	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan oleh kab/kota (%)	100	77.038.453.298	Dinas Kesehatan	PP - 1
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Kab/Kota yang memiliki ≥45% Puskesmas	50	4.248.558.000	Dinas Kesehatan	PP - 1

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB	DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
			KESEHATAN	memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan (%)				
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan PHBS (kab/kota)	4	375.340.000	Dinas Kesehatan	PP - 1
Sasaran 4 : Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	65,7	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Implementasi Kelembagaan PUG (kebijakan)	1	1.300.000.000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PP - 1
Tujuan 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat								
Sasaran 5 : Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Indeks Desa Membangun	0,6900	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Desa Berkembang (desa)	30	1.750.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	PP - 1
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara optimal (desa)	45	3.629.224.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	PP - 1
Sasaran 6 : Meningkatnya daya saing angkatan kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	40,00	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja (%)	70	11.946.633.760	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PP - 1
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	31	1.009.086.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PP - 1

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB	DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Tujuan 3 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas								
Sasaran 7 : Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	Pendapatan Daerah (Miliar Rp)	12.122	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya (%);	100	1.292.370.000	Badan Pendapatan Daerah	PP - 2
				Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak)	777			
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100	16.110.722.000	Badan Pendapatan Daerah	PP - 2
Sasaran 8 : Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US$)	1,89	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara (%)	5	792.800.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	PP - 4
Sasaran 9 : Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB (%)	9,86	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri (industri)	2	1.983.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	PP - 4

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB	DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Sasaran 10 : Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,65	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan Yang Difasilitasi (ha)	8.500	2.504.403.840	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PP - 3
				2. Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura (unit)	7			
				3. Jumlah Bangunan Yang Dibangun / Dipelihara (Unit)	1			
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Jumlah produksi padi (ton)	289846	37.477.240.015	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PP - 3
				2. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (ton)	292383			
				3. Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang di indentifikasi (Jumlah)	249			
				4. Pengawasan Jumlah pestisida dan pupuk (Kali)	50			
				5. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber TPH yang	82/252			

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB	DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
				Bersertifikat (%/Unit)				
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang di bina (orang)	441	3.077.558.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PP - 3
				2. Jumlah Kelembagaan Petani berbasis Koorporasi yang dibina (lembaga)	4			
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,37	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Miniranch yang teregister (unit)	30	5.101.338.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PP - 3
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Angka Kelahiran Sapi (%)	22	24.365.183.396	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PP - 3
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	5,3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)	4,044	1.827.790.000	Dinas Perkebunan	PP - 3
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan (kelompok)	30	7.428.634.000	Dinas Perkebunan	PP - 3

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB	DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
				2. Luas Kebun yang dibangun (ha)	1.500.674			
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas perkebunan (ton)	18.313.874,25	10.676.852.900	Dinas Perkebunan	PP - 3
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (lembaga)	1	2.473.097.400	Dinas Perkebunan	PP - 3
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP) (perusahaan)	35	1.050.000.000	Dinas Perkebunan	PP - 3
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,72	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (ha)	297.805,90	4.526.482.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan	PP - 3
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	182730	13.642.457.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan	PP - 3
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	178961	8.653.365.753	Dinas Kelautan Dan Perikanan	PP - 3

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB	DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan (jenis)	4	1.744.279.500	Dinas Kelautan Dan Perikanan	PP - 3
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,08	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (ha)	32000	39.615.603.350	Dinas Kehutanan	PP - 3
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu (m^3)	5050000	162.457.134.003	Dinas Kehutanan	PP - 3
				2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu (ton)	730			
Sasaran 11 : Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	35,67	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Waktu penyelesaian proses perizinan (hari)	10	2.600.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PP – 4
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM (%)	100	1.500.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PP - 4

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB	DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Sasaran 12 : Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	13,5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase tercapainya target UKM naik kelas (%)	1	463.700.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	PP - 2
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase tercapainya target Koperasi sehat (%)	10	583.040.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	PP - 2
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital (%)	3	327.600.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	PP - 2
Sasaran 13 : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	9,91	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan (destinasi)	3	6.303.672.860	Dinas Pariwisata	PP - 2
	Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)	15,68	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan (%)	23,5	2.000.000.000	Dinas Pariwisata	PP - 2

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB	DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Tujuan 4 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar								
Sasaran 14 : Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Jumlah Penumpang yang terlayani (Orang)	8.100.000	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP (%)	88	5.707.600.452	Dinas Perhubungan	PP - 5
	Jumlah barang yang diangkut (Ton)	370.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Lakalantas (kasus)	342	29.793.373.335	Dinas Perhubungan	PP - 5
	Jumlah kawasan ekonomi yang terhubungkan (Kawasan)	7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (%)	78,27	787.428.739.996	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP - 5
	Capaian akses air minum layak (%)	70,53	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan (%)	68,64	19.437.332.348	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP - 5
	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	14.778,50	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Capaian Layanan SDA (%)	78,91	150.587.930.352	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP - 5
	Luas Kawasan kumuh (Ha)	1.137,82	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (unit)	69681	81.953.815.518	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP - 5
	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	329	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik (meter)	3455	23.045.205.014	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan	PP - 5

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB	DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
							Rakyat	
	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	83,1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	1	8.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP - 5
	Rasio elektrifikasi (%)	95	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Pemanfaatan EBT (%)	8,40	5.395.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PP - 5
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah KK Berlistrik (KK)	1200000	54.220.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PP - 5
Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup								
Sasaran 15 : Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	29,33	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Indeks Kualitas Air Sungai (IKA)	53,85	5.175.485.000	Dinas Lingkungan Hidup	PP - 4
				2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,21			
				3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	79,91			
				4. Indeks kualitas air laut (IKAL)	83,66			
Sasaran 16 : Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Risiko Bencana	150,49	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana (%)	100	3.079.630.500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PP - 5
Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik								

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB	DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Sasaran 17 : Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi (%)	70	13.147.814.120	Dinas Komunikasi dan Informatika	PP - 6
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,3						
Sasaran 18 : Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	78	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) (%)	89	4.555.000.000	Sekretariat Daerah	PP - 6
				Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal (BAIK) (%)	81			
				Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) (%)	97			
Sasaran 19 : Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemda sesuai dengan	95	11.311.831.600	Inspektorat	PP - 6

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS	TARGET	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB	DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
				Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (%)				

Dalam upaya penyelesaian permasalahan maupun isu strategis pembangunan daerah, pelaksanaan program pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur tidak hanya melibatkan Perangkat Daerah namun juga dari *stakeholders* lainnya diluar Perangkat Daerah yakni dengan melakukan kerjasama dengan Badan Usaha atau swasta. Dalam mensinergikan program pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan perusahaan-perusahaan yang berada dalam wilayah Kalimantan Timur telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut dijelaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan dibidang usaha dan/atau jasa wajib melaksanakan TJSL dan PKBL. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2021 terdapat 2 (dua) program prioritas yaitu Program Rumah Layak Huni dan Program Pangan untuk Penghijauan dimana Program tersebut sudah dibentuk Badan Pengelolanya masing-masing yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan arahan pelaksanaan program prioritas tahunan kepada masyarakat.
2. Melakukan validasi dan menyepakati rencana program da kegiatan yang diusulkan Perusahaan, serta menyinergikan dengan program pembangunan daerah.
3. Melakukan identifikasi lokasi dan calon penerima bantuan
4. Mengusulkan rencana program dan kegiatan.
5. Melakukan penilaian terhadap perusahaan pelaksana.
6. Mengusulkan pemberian penghargaan pelaksana program prioritas terbaik oleh Gubernur
7. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan kepada Perusahaan.
8. Membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan terkait program Program Rumah Layak Huni dan Program Pangan untuk Penghijauan.

Selanjutnya, pelaksanaan program pembangunan melalui program-program prioritas Kalimantan Timur tahun 2023 juga dilaksanakan untuk

mendukung pencapaian sasaran pada Prioritas Nasional, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendukung Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

    a. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
    b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
    c. Program Pengembangan Ekspor
    d. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
    e. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
    f. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
    g. Program Penyuluhan Pertanian
    h. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
    i. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
    j. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
    k. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
    l. Program Perizinan Usaha Pertanian
    m. Program Penyuluhan Pertanian
    n. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
    o. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
    p. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
    q. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
    r. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
    s. Program Pengelolaan Hutan
    t. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
    u. Program Pelayanan Penanaman Modal
    v. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
    w. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
    x. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
    y. Program Pengembangan UMKM
    z. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
    aa. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

2. Untuk mendukung Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, maka program prioritas daerah yang dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

3. Untuk mendukung Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

   a. Program Pengelolaan Pendidikan
   b. Program Pembinaan Perpustakaan
   c. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
   d. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
   e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
   f. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
   g. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
   h. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
   i. Program Peningkatan Kerjasama Desa
   j. Program Administrasi Pemerintahan Desa
   k. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
   l. Program Penempatan Tenaga Kerja

4. Untuk mendukung Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

   a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

5. Untuk mendukung Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

   a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
   b. Program Pengelolaan Pelayaran
   c. Program Penyelenggaraan Jalan
   d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
   e. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
   f. Program Kawasan Permukiman
   g. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
   h. Program Pengelolaan Energi Terbarukan

i. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

6. Untuk mendukung Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

   a. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
   b. Program Penanggulangan Bencana

7. Untuk mendukung Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

   a. Program Penataan Organisasi
   b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

Selanjutnya Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan 8 (delapan) direktif/arahan utama pembangunan Provinsi Kalimantan Timur pada periode pembangunan jangka menengah tahun 2019-2023. Direktif/arahan yang merupakan target kinerja dedikatif akhir masa jabatan Gubernur/Wakil tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan rohaniawan;
2. Pemberian 6.500 Beasiswa Tuntas per-tahun;
3. 250.000 lapangan kerja;
4. Pengembangan 1 Juta Ha lahan pertanian;
5. Pembangunan 500 Km jalan produksi;
6. Penyaluran 100 Milyar modal usaha;
7. Pemberian bantuan rumah layak huni untuk Keluarga Pra Sejahtera 25.000 unit;
8. Peningkatan sumber pembiayaan pembangunan daerah khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rencana pembangunan daerah tahun 2023 juga untuk mewujudkan implementasi Program Unggulan Kalimantan Timur yaitu:

1. Pengembangan nilai -nilai keagamaan dan budaya
2. Pengembangan Anjungan Kaltim di TMII sebagai etalase seni budaya Kalimantan Timur

3. Peningkatan Puskesmas Kecamatan menjadi Puskesmas terakreditasi minimal utama.
4. Pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu bertaraf internasional (Boarding School)
5. Pemberian Beasiswa Kaltim Tuntas untuk percepatan pembangunan perdesaan
6. Peningkatan insentif guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/MA
7. Optimalisasi SMK dan BLK untuk mencetak tenaga kerja handal
8. Peningkatan kapasitas perempuan, pemuda dan disabilitas
9. Peningkatan perlindungan anak
10. Optimalisasi sarana dan prasarana olahraga yang telah terbangun
11. Pemberian penghargaan bagi atlet dan pekerja seni yang berprestasi ditingkat nasional dan Internasional
12. Pembinaan bagi usaha kecil dan menengah dengan pola pendampingan
13. Pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan dan potensi daerah
14. Peningkatan peran BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa
15. Pemberian bantuan rumah layak huni untuk keluarga pra sejahtera
16. Memperluas lapangan kerja baru dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal pada sektor industri hilir migas dan pertambangan
17. Pengembangan lahan pertanian, perkebunan dan peternakan baru pada lahan kritis untuk rakyat
18. Pemberian kemudahan berinvestasi di sektor industri dan pertanian dalam arti luas
19. Pengembangan Sentra Perikanan laut dan perikanan darat
20. Penerapan tata niaga BBM yang mendukung stabilitas ketersediaan BBM di seluruh wilayah Kaltim
21. Tersedianya listrik di seluruh desa berbasis potensi lokal
22. Tersedianya akses telekomunikasi dan internet di pusat desa
23. Terpenuhinya kebutuhan air baku dan air bersih untuk Kota Balikpapan, Bontang dan Samarinda
24. Penanganan banjir di Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang
25. Membangun dan meningkatkan kelas jalan Provinsi dan jalan produksi di Kalimantan Timur
26. Meningkatkan pengembangan pelabuhan Internasional Kariangau di Teluk Balikpapan sebagai Pelabuhan Ekspor
27. Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan Pulau Balang

28. Pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang yang rasional dan harmonis
29. Penerapan regulasi eksploitasi Sumber Daya Alam yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat
30. Pengembangan Danau Jempang, Semayang dan Melintang berfungsi untuk pengendalian banjir sekaligus untuk pengembangan perikanan dan pariwisata
31. Rehabilitasi hutan lindung dan pencegahan kerusakan dan kebakaran hutan
32. Pengendalian lingkungan dalam rangka penurunan pencemaran tanah, air dan udara
33. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
34. Harmonisasi dan sinkronisasi pemerintah Provinsi dan Kab/Kota terutama dalam urusan-urusan strategis
35. Peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN)
36. Peningkatan PAD melalui peningkatan hasil usaha daerah
37. Peningkatan pelayanan publik khususnya perizinan
38. Pencegahan dan pemberantasan korupsi

4.2.4 Sinkronisasi dan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2023

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 telah selaras dengan kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD Tahun 2019-2023), mendukung Prioritas Pembangunan Nasional seperti yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan kebijakan pembangunan nasional disajikan dalam tabel-tabel berikut.

Tabel IV.10
Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2023 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2023

No	Prioritas Nasional RKP Tahun 2023	Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2023
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	a. Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal b. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan sektor

No	Prioritas Nasional RKP Tahun 2023	Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2023
		pertanian dalam arti luas c. Peningkatan produktivitas industri pengolahan secara berkelanjutan
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	a. Pemerataan dan pemantapan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah b. Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pengembangan angkatan kerja yang kompetitif dan berdaya saing
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pengembangan angkatan kerja yang kompetitif dan berdaya saing
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pemerataan dan pemantapan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	a. Peningkatan produktivitas industri pengolahan secara berkelanjutan b. Pemerataan dan pemantapan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah

Tabel IV.11
Persandingan antara Sasaran Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2023
dengan Sasaran Prioritas Nasional RKP Tahun 2023

Sasaran PN RKP Tahun 2023		Sasaran RKPD Tahun 2023	
S1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	S7	Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah
		S12	Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM
		S13	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah
S2	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	S8	Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara
		S9	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Batubara
		S11	Meningkatnya realisasi investasi

Sasaran PN RKP Tahun 2023		Sasaran RKPD Tahun 2023	
			sektor Non Migas dan non Batu Bara
S3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)	S5	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan
		S10	Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)
S4	Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)		
S5	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	S17	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
S6	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	S5	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan
S7	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	S1	Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat
		S3	Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat
S8	Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda	S2	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan
		S4	Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan
S9	Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	S5	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan
S10	Meningkatnya produktivitas dan daya saing	S6	Meningkatnya daya saing angkatan kerja
S11	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	S2	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan
S12	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	S2	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan
S13	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	S2	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan
		S4	Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan
S14	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	S2	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan
S15	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa	S2	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan
		S4	Meningkatnya partisipasi aktif

Sasaran PN RKP Tahun 2023		Sasaran RKPD Tahun 2023	
			perempuan dalam pembangunan
S16	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	S1	Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat
S17	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	S14	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan
S18	Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	S14	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan
S19	Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	S14	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan
S20	Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan	S14	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan
S21	Meningkatnya layanan infrastruktur TIK	S17	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
S22	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	S15	Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
S23	Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim	S16	Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana
S24	Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline	S15	Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
S25	Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara secara Optimal	S17	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
		S18	Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien
		S19	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel
S26	Optimalnya Kebijakan Luar Negeri	S18	Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien
S27	Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap	S19	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel
S28	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	S17	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
S29	Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	S16	Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana

Adapun keterkaitan indikator sasaran prioritas nasional dengan indikator sasaran pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel IV.12
Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2023
dengan Sasaran Prioritas Nasional RKP Tahun 2023

Indikator Sasaran PN RKP Tahun 2023	Indikator Sasaran RKPD Tahun 2023
Porsi EBT dalam bauran energi nasional (%)	Rasio elektrifikasi (%)
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (nilai)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)
Pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan (WPP)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)
Rasio kewirausahaan nasional (%)	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)
Pertumbuhan PDB pertanian (%)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)
Pertumbuhan PDB perikanan (%)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)
Pertumbuhan PDB industri pengolahan (9.2.1) (%)	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB (%)
Kontribusi PDB industri pengolahan (9.2.1a)) (%)	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB (%)
Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c))a) (miliar US$)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)
Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1)a) (%)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)
Penyediaan lapangan kerja per tahun (juta orang)	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)
Pertumbuhan investasi (PMTB) (%)	Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)
Pertumbuhan ekspor industri pengolahan (%)	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US$)
Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa (%)	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US$)
Rasio perpajakan terhadap PDB (17.1.1(a)) (%)	Pendapatan Daerah (Miliar Rp)
Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI (%/tahun)	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB (%)
IPM KTI (nilai min–maks)	Rata-Rata Lama Sekolah
Persentase penduduk miskin KTI (%)	Indeks Desa Membangun (IDM)
Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (per wanita usia subur usia 15–49 tahun)	Usia Harapan Hidup (Tahun)

Indikator Sasaran PN RKP Tahun 2023	Indikator Sasaran RKPD Tahun 2023
Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) (%)	Indeks Kepuasan Masyarakat
Proporsi penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial (%)	Indeks Desa Membangun (IDM)
Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	Usia Harapan Hidup (Tahun)
Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)	Usia Harapan Hidup (Tahun)
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Usia Harapan Hidup (Tahun)
Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Usia Harapan Hidup (Tahun)
Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	Usia Harapan Hidup (Tahun)
Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta (kabupaten/kota)	Usia Harapan Hidup (Tahun)
Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)	Usia Harapan Hidup (Tahun)
Persentase merokok penduduk usia 10–18 tahun (%)	Usia Harapan Hidup (Tahun)
Nilai rata-rata hasil PISA	Rata-Rata lama sekolah (Tahun)
Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	Rata-Rata lama sekolah (Tahun)
Harapan lama sekolah (tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Usia Harapan Hidup (Tahun)
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pemberdayaan Gender
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Presentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan (%)
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (%)	Indeks Desa Membangun (IDM)
Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%)	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)
Jumlah PT yang masuk ke dalam world class university (PT)	Rata-Rata lama sekolah (Tahun)
Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (%)	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)
Peringkat Global Innovation Index	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)
Indeks Capaian Revolusi Mental (nilai)	Presentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan (%)
Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila (nilai)	Presentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan (%)
Indeks Pembangunan Kebudayaan (nilai)	Presentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan (%)
Indeks Pembangunan Masyarakat (nilai)	Presentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan (%)
Indeks Kerukunan Umat Beragama (nilai)	Presentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan (%)
Indeks Pembangunan Keluarga (nilai)	Presentase Pemuda dalam Pembinaan

Indikator Sasaran PN RKP Tahun 2023	Indikator Sasaran RKPD Tahun 2023
	Kepemudaan (%)
Median Usia Kawin Pertama Perempuan (tahun)	Indeks Pemberdayaan Gender
Nilai Budaya Literasi (nilai)	Rata-Rata lama sekolah (Tahun)
Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)	Luas kawasan kumuh (Ha)
Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 (%)	Jumlah kawasan ekonomi yang terhubungkan
Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif, %)	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)
Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif, %)	Capaian akses air minum layak (%)
Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100 km)	Jumlah kawasan ekonomi yang terhubungkan
Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop) (%)	Jumlah kawasan ekonomi yang terhubungkan
Kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2 (%)	Jumlah kawasan ekonomi yang terhubungkan
Persentase capaian On Time Performance (OTP) transportasi udara (%)	Jumlah Penumpang yang terlayani (orang)
Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota)	Jumlah Penumpang yang terlayani (orang)
Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan (%)	Luas kawasan kumuh (Ha)
Rasio elektrifikasi (%)	Rasio elektrifikasi (%)
Rata-rata pemenuhan kebutuhan (Konsumsi) listrik (kWh/Kapita)	Rasio elektrifikasi (%)
Penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)
Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) (%)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik (SPBE)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (nilai)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)
Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB (%)	Indeks Risiko Bencana
Persentase penurunan emisi GRK (%)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)
Persentase penurunan intensitas emisi GRK (%)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)
Indeks Demokrasi Indonesia) (nilai)	Indeks Kepuasan Masyarakat
Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Konten dan Akses Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah) (%)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik (SPBE)
Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di	Nilai Akuntabilitas Kinerja

Indikator Sasaran PN RKP Tahun 2023	Indikator Sasaran RKPD Tahun 2023
Dunia Internasional) (nilai)	
Indeks Pembangunan Hukum (nilai)	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda
Indeks Pelayanan Publik Nasional (nilai)	Indeks Kepuasan Masyarakat
Persentase Luas Wilayah NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya (%)	Indeks Risiko Bencana

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mempersiapkan program-program pembangunan daerah Tahun 2022 agar target-target pada indikator TPB/SDGs baik nasional maupun daerah dapat tercapai secara optimal. Berikut program-program pembangunan yang mendukung kebijakan pengarusutamaan TPB/SDGs:

Tabel IV.13
Persandingan Program Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2023 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2023
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	
Goal 1 Tanpa Kemiskinan Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap	• Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi • Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti • Program Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti • Program Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti • Program Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti • Program Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi • Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi • Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2023
kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Provinsi • Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana • Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana • Program Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi • Program Penanggulangan BencanaProgram Perencanaan Tenaga Kerja • Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Goal 2 Tanpa Kelaparan Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makananskala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian. Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan	• Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat • Program Penanganan Kerawanan Pangan • Program Pengawasan Keamanan Pangan • Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana Pertanian • Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2023
bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan. Target 2.5 Pada tahun 2021, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pertanian	
Goal 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. Target 3.8 Pada tahun 2030, mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan • Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan • Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) • Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2023
aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. Target 3.a Memperkuat pelaksanaanthe Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat. Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	
Goal 4 Pendidikan Berkualitas Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas. Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi	• Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pengembangan Kurikulum • Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2023
rentan. Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	
Goal 5 Kesetaraan Gender Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	• Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan • Program Perlindungan Perempuan • Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak • Program Perlindungan Khusus Anak
Goal 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk	• Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah • Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2023
mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita	
Goal 7 Energi Bersih dan Terjangkau Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern. Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global. Target 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	• Program Pengelolaan Energi Terbarukan (EBT) • Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
Goal 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan Target 8.6 Pada tahun 2021, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan. Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua	• Program Penempatan Tenaga Kerja • Program Hubungan Industrial • Program Pengawasan Ketenagakerjaan • Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal • Program Promosi Penanaman Modal • Program Pelayanan Penanaman Modal • Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata • Program Pemasaran Pariwisata • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
Goal 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk	• Program Penyelenggaraan Jalan • Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) • Program Pengelolaan Pelayaran

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2023
mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing. Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2021.	• Program Pengelolaan Perkeretaapian • Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik • Program Pengelolaan Aplikasi Informatika • Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Goal 10 Berkurangnya Kesenjangan Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	• Program Perlindungan dan Jaminan Sosial • Program Penataan Desa • Program Peningkatan Kerjasama Desa • Program Administrasi Pemerintahan Desa • Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Goal 11 Kota dan Pemukiman Berkelanjutan Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan	• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase • Program Penyelenggaraan Penataan Ruang • Program Pengembangan Perumahan • Program Kawasan Pemukiman • Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) • Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi • Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2023
fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	
Goal 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab Target 12.4 Pada tahun 2021 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	• Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) • Program Pengelolaan Persampahan
Goal 13 Penanganan Perubahan Iklim Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.	• Program Penanggulangan Bencana • Program Penanganan Bencana • Program Perencanaan Lingkungan Hidup • Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati • Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) • Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2023
Goal 14 Ekosistem Lautan Target 14.2 Pada tahun 2021, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif. Target 14.5 Pada tahun 2021, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (*small-scale artisanal fishers*) terhadap sumber daya laut dan pasar	• Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Program Pengelolaan Perikanan Tangkap • Program Pengelolaan Perikanan Budidaya • Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan • Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Goal 15 Ekosistem Daratan Target 15.1 Pada tahun 2021, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional. Target 15.3 Pada tahun 2021, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi. Target 15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Target 15.9 Pada tahun 2021, mengitegrasikan nilai- nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan. Target 15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.	• Program Pengelolaan Hutan • Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya • Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan • Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2023
Goal 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	• Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum • Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum • Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Goal 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. Target 17.2 Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (Official Development Assistance-ODA), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0.7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari oDA/GNI untuk negara kurang berkembang. Target 17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber. Target 17.4 Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang. Target 17.5 Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang.	• Program Pengembangan Ekspor • Program Perekonomian dan Pembangunan • Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2023
Target 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitas teknologi global. Target 17.7 Meningkatkan pengembangan, transfer, diseminasi dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan kepada negara berkembang berdasarkan ketentuan yang menguntungkan, termasuk ketentuan konsesi dan preferensi yang disetujui bersama. Target 17.8 Mengoperionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Target 17.9 Meningkatkan dukungan internasioal untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular. Target 17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda Target 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020. Target 17.12 Merealisasikan pelaksanaan tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota tanpa batas waktu untuk semua negara kurang berkembang, sesuai dengan keputusan World Trade Organization termasuk dengan	

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2023
menjamin bahwa penetapan aturan keaslian (rules of origin) yang dapat diterapkan terhadap impor dari negara kurang berkembang tersebut transparan dan sederhana, serta berkontribusi pada kemudahan akses pasar. Target 17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan. Target 17.14 Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan. Target 17.15 menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan dari setiap negara untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan Target 17.16 Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang. Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama. Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografi dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional. Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	

Tabel IV.14

Tingkat Dukungan Program Pembangunan Daerah Terhadap Masing-Masing Kegiatan Prioritas pada Prioritas Nasional Tahun 2023

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah
PN-01 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP-01 - Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	01 - Akselerasi Pengembangan Pembangkit Energi Terbarukan	1. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
		02 - Peningkatan Pasokan Bahan Bakar Nabati	
		03 - Peningkatan Pelaksanaan Konservasi dan Efisiensi Energi	1. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
		04 - Peningkatan Pemenuhan Energi Domestik	1. Program Pengelolaan Energi Terbarukan 2. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
		05 - Pengembangan Industri Pendukung EBT	
	PP-02 - Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01 - Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	1. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
		02 - Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1. Program Pengelolaan Hutan
		03 - Penyediaan Air untuk Pertanian	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		04 - Penyediaan Air Baku untuk Kawasan Prioritas	1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		05 - Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau	1. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
	PP-03 - Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	01 - Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		02 - Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas	

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah
		pasokan dan harga kebutuhan pokok	4. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 6. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 7. Program Penyuluhan Pertanian
		03 - Peningkatan Produktivitas, Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Perikanan dan Kepastian Pasar	
		04 - Peningkatan Keberlanjutan Produktivitas Sumber Daya Pertanian, dan Digitalisasi Pertanian	
		05 - Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional	
	PP-04 - Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan	01 - Peningkatan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir serta Pengelolaan Ruang Laut	1. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
		02 - Peningkatan Ekosistem Kelautan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan 4. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 5. Program Penyuluhan Pertanian
		03 - Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standardisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan	
		04 - Peningkatan Fasilitasi Usaha, Pembiayaan, dan Akses Perlindungan Usaha Kelautan dan Perikanan Skala Kecil serta Akses terhadap Pengelolaan Sumber Daya	
		05 - Peningkatan SDM dan Riset Kemaritiman dan Kelautan Serta Database Kelautan dan Perikanan	
	PP-05 - Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi	01 - Peningkatan Kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM
		02 - Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Pembiayaan Bagi Wirausaha	
		03 - Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi Koperasi	1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah
			2. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 3. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
		04 - Peningkatan Penciptaan Start-Up dan Peluang Usaha	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM 2. Program Pengembangan UMKM
		05 - Peningkatan Nilai Tambah Usaha Sosial	
	PP-06 - Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	01 - Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		02 - Peningkatan Industrialisasi Berbasis Hilirisasi Sumber Daya Alam, Termasuk Melalui Pengembangan Smelter dan Kawasan Industri Terutama di Luar Jawa	
		03 - Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Program Pemasaran Pariwisata
		04 - Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk dan Usaha Kreatif dan Digital	1. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		05 - Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		06 - Pengembangan Industri Halal	1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah
	PP-07 - Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	01 - Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa	1. Program Pengembangan Ekspor
		02 - Peningkatan Akses dan Pendalaman Pasar Ekspor	
		03 - Pengelolaan Impor	1. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		04 - Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif	
		05 - Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global	1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
		06 - Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif	1. Program Pemasaran Pariwisata
		07 - Peningkatan Efektivitas Prefrential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi	
	PP-08 - Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	01 - Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		02 - Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industri 4.0	1. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
		03 - Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga	1. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
		04 - Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah
		06 - Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital	1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
PN-02 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PP-01 - Pembangunan Wilayah Sumatera	03 - Pengembangan Kawasan Perkotaan	
		04 - Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	
		05 - Kelembagaan dan Keuangan Daerah	
	PP-02 - Pembangunan Wilayah Jawa-Bali	03 - Pengembangan Kawasan Perkotaan	
		04 - Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	
		05 - Kelembagaan dan Keuangan Daerah	
	PP-03 - Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara	01 - Pengembangan Kawasan Strategis	
		04 - Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	
		05 - Kelembagaan dan Keuangan Daerah	
	PP-04 - Pembangunan Wilayah Kalimantan	03 - Pengembangan Kawasan Perkotaan	1. Program Penataan Bangunan Gedung 2. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
		04 - Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	1. Program Peningkatan Kerja Sama Desa 2. Program Administrasi Pemerintahan Desa 3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
		05 - Kelembagaan dan Keuangan Daerah	1. Program Penataan Organisasi
	PP-05 - Pembangunan Wilayah	03 - Pengembangan Kawasan Perkotaan	

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah
	Sulawesi	04 - Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	
		05 - Kelembagaan dan Keuangan Daerah	
	PP-06 - Pembangunan Wilayah Maluku	04 - Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	
		05 - Kelembagaan dan Keuangan Daerah	
	PP-07 - Pembangunan Wilayah Papua	02 - Pengembangan Sektor Unggulan	
		03 - Pengembangan Kawasan Perkotaan	
		04 - Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	
		05 - Kelembagaan dan Keuangan Daerah	
PN-03 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	PP-01 - Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan	01 - Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan	1. Program Pendaftaran Penduduk 2. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		02 - Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan	
		03 - Pendampingan dan Layanan Terpadu	
		04 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk	
	PP-02 - Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	01 - Sistem Jaminan Sosial Nasional	1. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 2. Program Pemberdayaan Sosial
		02 - Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran	
		04 - Kesejahteraan Sosial	
	PP-03 - Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	01 - Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB), dan Kesehatan Reproduksi	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		02 - Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah
		03 - Peningkatan Pengendalian Penyakit	
		04 - Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	
		05 - Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan	
	PP-04 - Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	01 - Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 3. Program Pengembangan Kurikulum
		02 - Afirmasi Akses dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	
		03 - Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
		04 - Penjaminan Mutu Pendidikan	
		05 - Peningkatan Tata Kelola Pendidikan	
	PP-05 - Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	01 - Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 2. Program Perlindungan Khusus Anak
		02 - Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, dan Perlindungan Perempuan	1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
		03 - Kualitas Pemuda	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	PP-06 - Pengentasan Kemiskinan	02 - Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	1. Program Pemberdayaan Sosial
		03 - Reforma Agraria	1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		04 - Perhutanan Sosial	1. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
	PP-07 - Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	01 - Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah
		02 - Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas	1. Program Pengelolaan Pendidikan
		03 - Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 2. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		04 - Prestasi Olahraga	1. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
PN-04 - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP-01 - Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	01 - Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong, dan Budi Pekerti	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum
		03 - Revolusi Mental dalam Sistem Sosial untuk Memperkuat Ketahanan, Kualitas dan Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter	1. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
		04 - Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental	
		05 - Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
		06 - Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme	
	PP-02 - Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	01 - Revitalisasi dan Aktdualisasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal	1. Program Pengembangan Kebudayaan 2. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
		02 - Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk Memperkuat Karakter Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat	
		03 - Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk Memperkuat	

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah
		Kebudayaan yang Inklusif	
		04 - Pengembangan Diplomasi Budaya untuk Memperkuat Pengaruh Indonesia dalam Perkembangan Peradaban Dunia	
		05 - Pengembangan Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan	
	PP-03 - Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	01 - Penguatan Cara Pandang, Sikap, dan Praktik Beragama dalam Perspektif Jalan Tengah untuk Memantapkan Persaudaraan dan Kebersamaan di Kalangan Umat Beragama	1. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
		02 - Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama	
		03 - Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya	
		04 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	
		05 - Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan	
	PP-04 - Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter	01 - Peningkatan Budaya Literasi	1. Program Pembinaan Perpustakaan
		02 - Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa dan Aksara Daerah, serta Sastra	
		04 - Penguatan Institusi Sosial Penggerak Literasi dan Inovasi	
PN-05 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan	PP-01 - Infrastruktur Pelayanan Dasar	01 - Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau	1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Kawasan Permukiman 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah
Dasar		02 - Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		03 - Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		04 - Keselamatan dan Keamanan Transportasi	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		05 - Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	1. Program Penanggulangan Bencana
		06 - Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	PP-02 - Infrastruktur Ekonomi	01 - Konektivitas Jalan	1. Program Penyelenggaraan Jalan
		02 - Konektivitas Kereta Api	1. Program Pengelolaan Perkeretaapian
		03 - Konektivitas Laut	1. Program Pengelolaan Pelayaran
		04 - Konektivitas Udara	
		05 - Konektivitas Darat	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 2. Program Penyelenggaraan Jalan
	PP-03 - Infrastruktur Perkotaan	01 - Transportasi Perkotaan	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		02 - Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		04 - Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan	1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Kawasan Permukiman 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
	PP-04 - Energi dan Ketenagalistrikan	01 - Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan	1. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah
		02 - Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan	
		03 - Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik	
	PP-05 - Transformasi Digital	01 - Penuntasan Infrastruktur TIK	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		02 - Pemanfaatan Infrastruktur TIK	
		03 - Fasilitas Pendukung Transformasi Digital	
PN-06 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP-01 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01 - Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		02 - Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
		03 - Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
		04 - Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
	PP-02 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	01 - Penanggulangan Bencana	1. Program Penanggulangan Bencana
		02 - Peningkatan Ketahanan Iklim	
	PP-03 - Pembangunan Rendah Karbon	01 - Pembangunan Energi Berkelanjutan	1. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
		02 - Pemulihan Lahan Berkelanjutan	1. Program Pengelolaan Hutan
		04 - Pengembangan Industri Hijau	1. Program Pengelolaan Hutan
		05 - Rendah Karbon Pesisir dan Laut	1. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
PN-07 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan	PP-01 - Konsolidasi Demokrasi	01 - Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	1. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan
		02 - Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah
Publik		03 - Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
	PP-02 - Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	01 - Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	
		02 - Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional	
	PP-03 - Penegakan Hukum Nasional	01 - Penataan Regulasi	1. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum
		04 - Peningkatan Akses terhadap Keadilan	
	PP-05 - Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	01 - Penguatan Keamanan Dalam Negeri	1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
		03 - Penguatan Keamanan Laut	
		04 - Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	
		05 - Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber	

4.3 Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang antara lain diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Reses. Pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebagai masukan dalam rencana pembangunan daerah tahun 2022 meliputi aspek umum, bidang pendidikan dan Kesehatan.

Tabel IV.15
Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

No.	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Hasil Penelahaan
1.	Umum a. Pelaksanaan Musrenbang diharapkan dapat memuat kegiatan-kegiatan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, industri kreatif masyarakat dan pertanian dalam arti luas; b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat menerbitkan peraturan teknis berupa Peraturan Gubernur terhadap beberapa Peraturan Daerah yang belum memiliki payung hukum sebagai turunan seperti Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas, Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, dan Perda Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah.	. Program/Kegiatan prioritas di berbagai bidang pembangunan yang telah disusun di dalam RKPD telah memperhatikan saran, masukan, dan aspirasi yang diperoleh dari pelaksanaan Musrenbang dengan tetap mempedomani upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD; . Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menerbitkan beberapa Peraturan Gubernur sebagai turunan dari Peraturan Daerah dimaksud (misalnya Peraturan Gubernur tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas). Namun untuk beberapa Peraturan Daerah yang saat ini sedang dalam proses pengkajian kembali akibat adanya penyesuaian terhadap perubahan peraturan perundangan diatasnya, maka penetapan Peraturan Gubernur turunannya belum dapat dilaksanakan karena terlebih dahulu harus menunggu penyesuaian kembali Peraturan Daerah dimaksud (misalnya penyesuaian Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah akibat terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah

No.	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Hasil Penelahaan
		Pusat dan Daerah).
2.	Pendidikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat mengkaji kebijakan zonasi yang diterapkan dalam menjaring peserta didik baru serta mengevaluasi sebaran pendidikan berupa Gedung sekolah SMA.	Kebijakan zonasi merupakan ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat melalui Kemendikbudristek. Kebijakan tersebut dapat di intervensi oleh daerah melalui kesepakatan dan rekomendasi yang diperoleh dari hasil Musyawarah/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja terhadap pola Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang selanjutnya dilaksanakan oleh DISDIKBUD Provinsi melalui penerbitan Petunjuk Teknis PPDB di daerah.
3.	Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat menempatkan dokter spesialis yang memiliki kualifikasi yang memadai disertai dengan insentif bersifat stimulus.	Kebijakan penempatan dokter spesialis di daerah beserta pemberian insentifnya merupakan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota. Namun, Pemerintah Provinsi akan secara intensif berkoordinasi dengan Pemerintah kabupaten/kota berkenaan dengan usulan dimaksud agar masyarakat dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang memadai. Pemerintah Provinsi juga akan terus berupaya memberikan dukungan berupa peningkatan kompetensi dokter melalui program pendidikan beasiswa dokter spesialis, pelatihan, dan lain-lain.

4.3.1 Penyampaian Usulan Aspirasi Langsung (Masyarakat) dan Aspirasi Reses (Pokir)

Usulan list aspirasi langsung (kabupaten/kota dan masyarakat) dan aspirasi reses (pokok-pokok pikiran DPRD) yang disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui tautan (https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah) adalah sebanyak 3.954 usulan yang terdiri dari aspirasi langsung (kabupaten/kota dan masyarakat) sebanyak 3.456 usulan dan aspirasi reses (pokok-pokok pikiram DPRD) sebanyak 498 usulan. Usulan tersebut disampaikan dengan mempedomani

Kamus Usulan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prioritas pembangunan daerah dan program prioritas di tahun 2023. Adapun rincian jumlah usulan yang disampaikan melalui Menu Aspirasi dalam aplikasi SIPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.16
Jumlah Usulan Aspirasi Langsung (Masyarakat) Berdasarkan Kabupaten/Kota

No	KabKota	Usulan
1	Bontang	136
2	Balikpapan	171
3	Samarinda	633
4	Berau	222
5	Paser	680
6	PPU	406
7	Kukar	744
8	Kutim	119
9	Kubar	285
10	Mahulu	60
Total		3456

Tabel IV.17
Jumlah Usulan Aspirasi Reses (Pokir) Berdasarkan Fraksi DPRD

No	KabKota	Usulan
1	Demokrat-Nasdem	125
2	Gerindra	78
3	Golkar	50
4	PAN	149
5	PDI-P	46
6	PKB	11
7	PKS	29
8	PPP	10
Total		498

4.3.2 Akomodasi Usulan Aspirasi Langsung

Dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, telah dilakukan proses verifikasi terhadap 3.456 usulan aspirasi langsung yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota maupun dari Lembaga/Institusi/Organisasi melalui aplikasi SIPD. Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat 1.361 usulan aspirasi langsung yang disetujui. Usulan aspirasi langsung yang telah lolos proses verifikasi berdasarkan jenis belanjanya dapat dilihat pada gambar berikut.

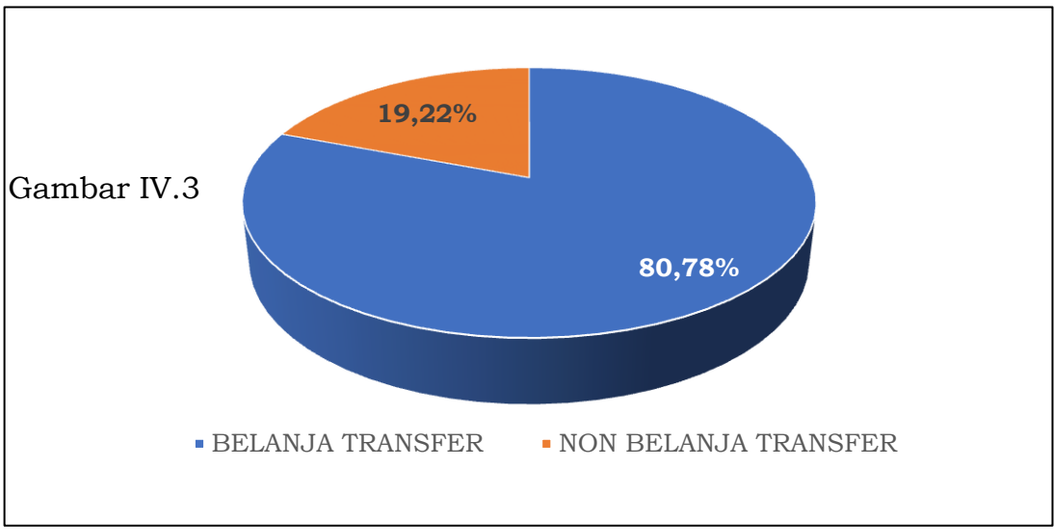

Usulan Aspirasi Langsung yang Lolos Verifikasi Berdasarkan Jenis Belanja (Belanja Non Transfer dan Belanja Transfer)

Sebagian besar usulan aspirasi langsung yang disetujui adalah berjenis belanja transfer, yakni sebanyak 1.079 usulan. Hal ini berbanding lurus dengan kuantitas usulan yang disampaikan yang didominasi oleh usulan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota. Meskipun berjenis belanja transfer, namun usulan yang disetujui dinilai dapat menunjang pencapaian target dan sasaran pembangunan provinsi. Pola pendanaan terhadap usulan yang berjenis belanja transfer ini adalah melalui mekanisme Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota yang nilainya telah dirumuskan di dalam kerangka pendanaan. Adapun pemetaan terhadap usulan aspirasi langsung yang berjenis belanja transfer berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

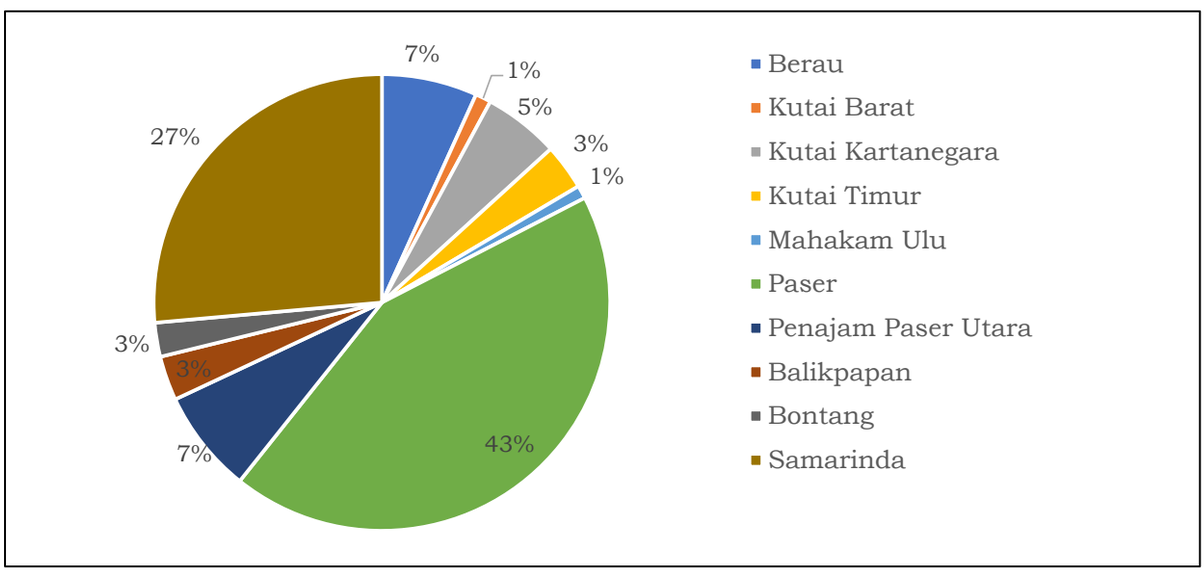

Gambar IV.4
Usulan Aspirasi Langsung Berjenis Belanja Transfer yang Lolos Verifikasi Berdasarkan Kabupaten/Kota

Selain dari kewenangan kabupaten/kota, terdapat pula usulan aspirasi langsung yang ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi merupakan kewenangan provinsi atau bersifat hibah, yakni total sebanyak 282 usulan. Sebagai informasi, bahwa usulan aspirasi langsung yang menjadi kewenangan provinsi secara umum juga telah dibahas di dalam forum Rakortekrenbang dan Musrenbang. Adapun pemetaan terhadap usulan aspirasi langsung yang berjenis belanja non transfer berdasarkan tujuan Perangkat Daerahnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

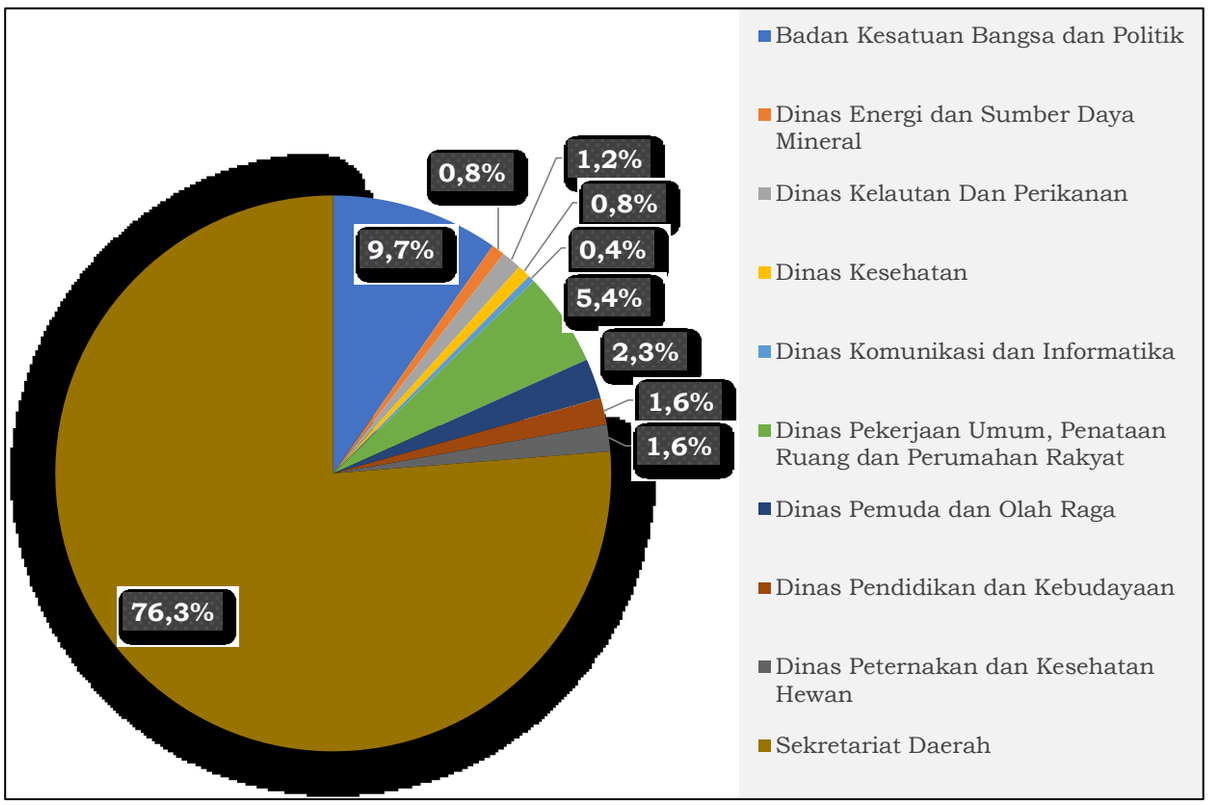

Gambar IV.5
Usulan Aspirasi Langsung Berjenis Belanja Non Transfer yang Lolos Verifikasi Berdasarkan Perangkat Daerah Tujuan

4.3.3 Akomodasi Usulan Aspirasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD

Dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, telah dilakukan proses verifikasi terhadap 498 usulan aspirasi pokir yang disampaikan oleh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan hasil reses melalui aplikasi SIPD. Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi, terdapat 178 usulan yang disetujui. Usulan aspirasi pokir DPRD yang telah lolos proses validasi dan verifikasi berdasarkan fraksi dapat dilihat pada gambar berikut.

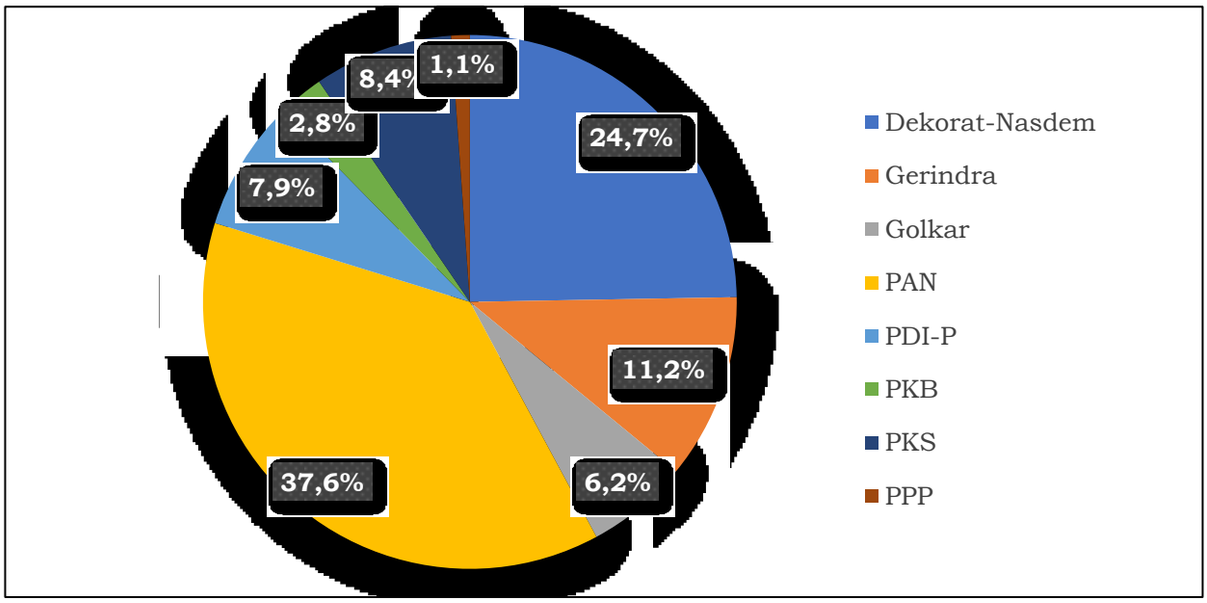

Gambar IV.6
Usulan Aspirasi Pokir DPRD yang Lolos Validasi dan Verifikasi
Berdasarkan Fraksi

Usulan aspirasi pokir DPRD yang disetujui adalah pada kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Selaras dengan tema pembangunan daerah yang menekankan pada peningkatan produktivitas dalam rangka penguatan ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial, usulan pokir DPRD yang disetujui lebih dominan kuantitasnya pada bidang urusan perekonomian serta bidang urusan pembangunan manusia. Adapun pembagian usulan aspirasi pokir DPRD yang disetujui berdasarkan bidang urusannya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

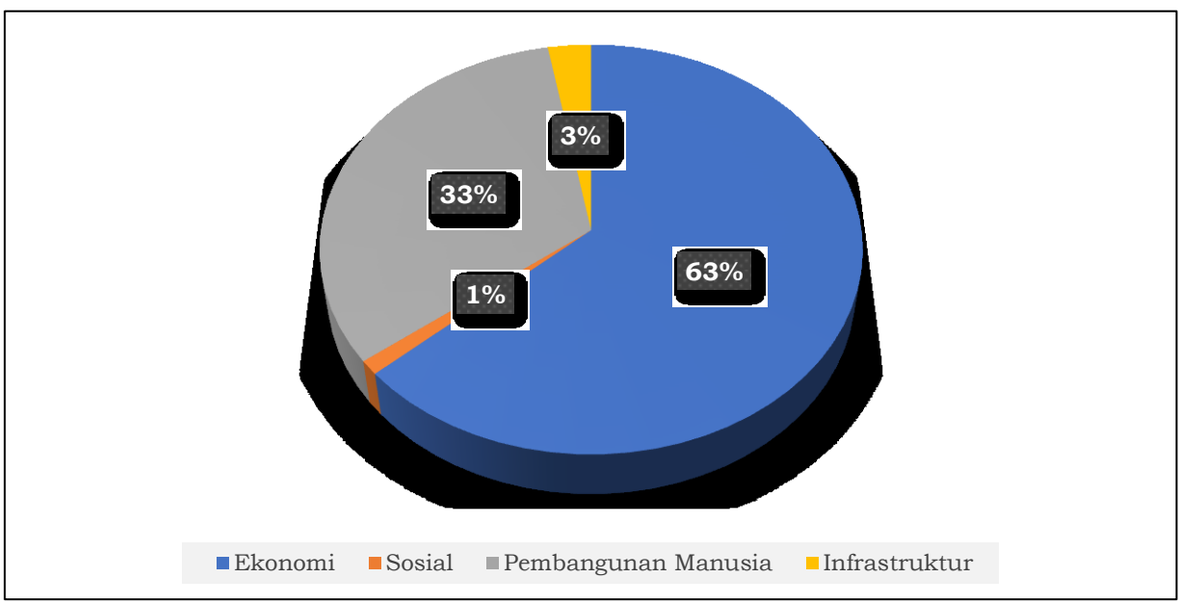

Gambar IV.7
Usulan Aspirasi Pokir DPRD yang Lolos Validasi dan Verifikasi Berdasarkan
Bidang Urusan

Jika dilihat secara lebih rinci, secara kuantitas proprosi usulan aspirasi pokir DPRD yang telah disetujui di dalam tahap penyusunan RKPD paling banyak ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Sedangkan untuk usulan aspirasi pokir DPRD di bidang infrastruktur, hanya difokuskan pada ruas Jalan Provinsi yang dinilai memiliki daya ungkit paling besar untuk mendukung aksesibilitas jalur dari sentra produksi menuju pusat pemasaran. Adapun usulan aspirasi pokir DPRD yang telah lolos proses validasi dan verifikasi berdasarkan Perangkat Daerah tujuannya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

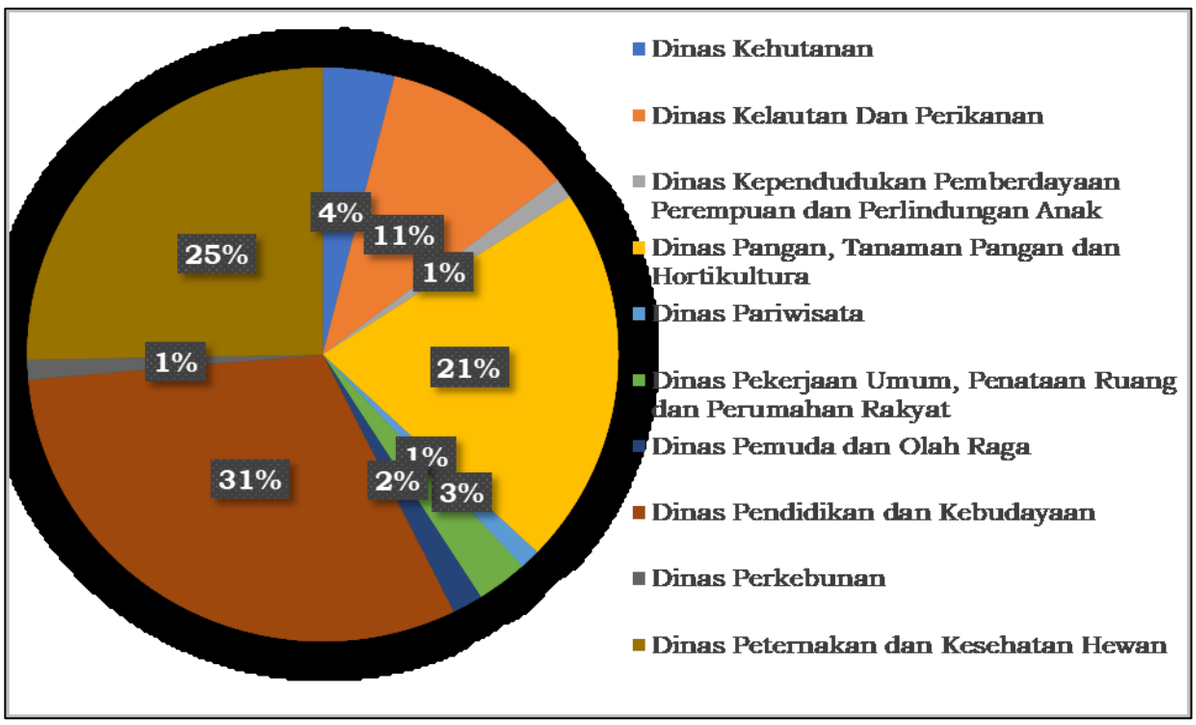

Gambar IV.8
Usulan Aspirasi Pokir DPRD yang Lolos Validasi dan Verifikasi
Berdasarkan Perangkat Daerah Tujuan

Seluruh usulan aspirasi yang telah lolos proses validasi dan verifikasi (usulan aspirasi langsung dan aspirasi pokir DPRD) kemudian di sinkronisasi dan di internalisasi kedalam masing-masing rencana Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi di Tahun 2023. Adapun informasi terhadap usulan-usulan aspirasi yang telah disetujui di dalam proses penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 secara rinci dapat dilihat di dalam aplikasi SIPD.

4.4 Inovasi Pembangunan Daerah

Selain program/kegiatan yang diuraikan pada sub bab sebelumnya, dalam rangka percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah dan prioritas yang telah diuraikan, dikembangkan pula program-program inovasi, Beberapa program inovasi yang dikembangkan di Kalimantan Timur antara lain sebagai berikut:

4.4.1 Toko Kebun Kaltim

Toko Kebun Kaltim merupakan inisiasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu upaya yang hadir untuk memberikan solusi dengan berorientasi pasar yakni menjadikan Toko Kebun Kaltim sebagai platform pusat promosi dan pemasaran produk olahan komoditas perkebunan di Kaltim yang berfokus pada pengembangan produk hilir untuk peningkatan nilai tambah produk. Toko Kebun Kaltim juga menjadi hub distribusi produk dan peningkatan kapasitas promosi dan pemasaran bagi petani/pelaku usaha sektor perkebunan. Toko Kebun Kaltim akan membantu memfasilitasi kemitraan petani/pelaku usaha produk olahan komoditas perkebunan dengan target pertama dan utama ialah perluasan akses pasar ke pasar modern dan industri perhotelan di kota-kota besar di Kaltim dengan sasaran peningkatan produktivitas produk petani/pelaku usaha dan berkelanjutan melalui peningkatan daya saing produk dan SDM sehingga pada akhirnya akan terjadi peningkatan pendapatan dan harga produk yang lebih kompetitif.

Toko Kebun Kaltim melakukan pendekatan dengan mengikat para petani/pelaku usaha produk olahan komoditas perkebunan melalui MoU Kerjasama promosi dan pemasaran agar pembinaan dan evaluasi dapat dilakukan dengan fokus dan berkelanjutan. Toko Kebun Kaltim sebagai *platform* toko tidak hanya menghadirkan *showcase* toko secara *offline (store),* namun juga memanfaatkan *platform e-commerce* yang ada, yakni promosi dan pemasaran melalui Tokopedia, Instagram, dan Fanpage Facebook dengan menghimpun produk olahan pengusahaan para petani/pelaku usaha binaan untuk menjamin ketersediaan produk. Toko Kebun Kaltim juga melakukan perluasan akses pemasaran produk olahan pengusahaan para petani/pelaku usaha binaan dengan melakukan kerjasama konsinyasi produk kepada pasar modern (swalayan) di kota-kota besar di Kaltim dan kepada industri perhotelan di Kaltim.

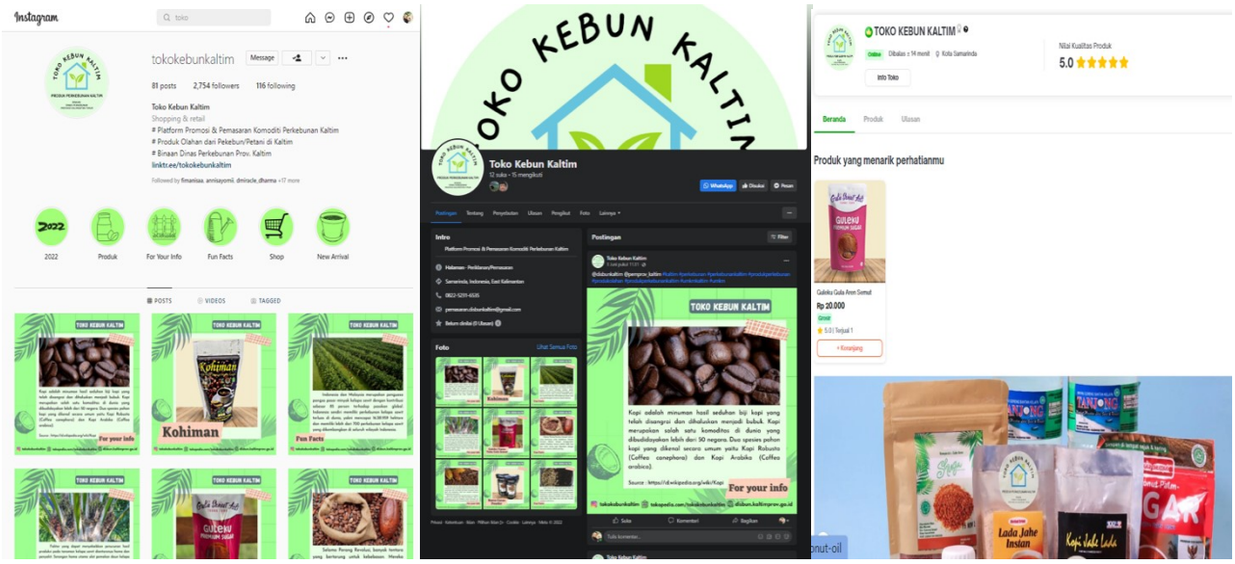

Gambar IV.9
Toko Kebun Kaltim di berbagai *Platform e-Commerce*

Toko Kebun Kaltim diharapkan menjadi *pioneer* skala Provinsi dalam hal pembentukan, pembinaan, dan evaluasi pemberdayaan petani/pelaku usaha yang berfokus pada sektor perkebunan dalam rangka mewujudkan transformasi ekonomi di Kaltim. Konsep dan metode yang ada dalam pengembangan Toko Kebun Kaltim sangatlah berpeluang untuk diterapkan pada level Kabupaten/Kota di Kaltim. Dinas yang membawahi sektor perkebunan di Kab/Kota yang secara wilayah kerja dekat secara langsung dengan petani/pelaku usaha dapat melakukan hal yang sama untuk pemberdayaan mereka.



Gambar IV.10
MoU dengan Hotel Four Points By Sheraton Balikpapan

4.4.2 Sistem Informasi *Mini Ranch* (SIRANCH)

Produksi daging sapi provinsi kalimantan timur masih belum bisa memenuhi kebutuhan daging sapi Provinsi Kalimantan Timur sehingga masih

mendatangkan daging sapi dari luar Provinsi Kalimantan Timur. Agar tujuan pembangunan peternakan tercapai yaitu meningkatkan populasi ternak, tersedianya pangan asal hewan, dan kesejahteraan peternak maka diperlukan peningkatan kapasitas pemeliharaan sapi di tingkat peternak rakyat. Salah satu upaya pemeliharaan yang dapat dikembangkan di Provinsi Kalimantan Timur yaitu pemeliharaan sapi berbasis *Mini Ranch*. Pembuatan Aplikasi SIRANCH (Sistem Informasi Mini Ranch) Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur berbasis web merupakan gagasan baru sebagai strategi penguatan Data dan Pelayanan dilingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan se-Kalimantan Timur. Piranti pendukung penguatan informasi data yang terintegrasi tersebut dilaksanakan untuk mengoptimalkan kegiatan pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan data serta sebagai media dalam pengiriman proposal Mini Ranch secara online yang berbentuk SIRANCH berbasis web yang sistematik, mudah diakses, memiliki tingkat keamanan yang optimal dan meningkatkan kecepatan penyebaran hasil pengolahan data, serta media bagi masyarakat dalam mengirimkan proposal Mini Ranch secara *online* yang menjadi lebih transparan, mudah, cepat, tepat, akurat dan tanpa biaya.



Gambar IV.11
Launching Aplikasi SIRANCH oleh Gubernur Kaltim



Gambar IV.12
Portal Aplikasi SIRANCH

Aplikasi SIRANCH kedepannya diharapkan sebagai fasilitator Kabupaten/Kota dalam menyampaikan proposal seluruh kegiatan pembangunan peternakan dan Kesehatan hewan secara *online*, sehingga semua proposal yang masuk dari Kabupaten/Kota akan terkoordinir dalam satu layanan aplikasi SIRANCH yang akan diteruskan ke bidang-bidang pengampu kegiatan. Harapn kedepannya aplikasi SIRANCH dapat terintegrasi dengan website one data one map (Bappeda) dan aplikasi SIRANCH dapat berkembang menjadi berbasis android sehingga memudahkan pengguna dalam mengkakses aplikasi SIRANCH.

4.4.3 Siap Kerja

UPTD BLKI Balikpapan menghadapi tantangan besar dalam melakukan pelatihan berbasis kompetensi bagi lulusan SMA/SMK sederajat. Hal ini disebabkan para peserta merupakan generasi milenial yang sangat tergantung dengan teknologi. Dalam menghadapi tantangan tersebut, UPTD BLKI Balikpapan berupaya mengembangkan model pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran klasikal dengan pembelajaran non klasikal yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Salah satu inovasi yang dibuat UPTD BLKI Balikpapan adalah membuat aplikasi Siap Kerja. Siap Kerja adalah sistem aplikasi pembelajaran pelatihan kerja yang berfungsi sebagai panduan dalam mengikuti pembelajaran pelatihan berbasis kompetensi yang ada di UPTD BLKI Balikpapan. Aplikasi Siap Kerja digunakan untuk mempermudah akses peserta pelatihan dalam mempelajari dan memahami materi pelatihan kerja. Dengan adanya aplikasi Siap Kerja, tidak ada batasan dalam belajar karena peserta dapat mengakses aplikasi Siap Kerja dimanapun dan kapanpun. Tujuan dari Siap Kerja ini adalah mempermudah akses peserta dalam belajar. Jadi, sasaran utama dalam inovasi ini adalah peserta pelatihan. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah peserta dalam belajar baik secara waktu, biaya, maupun tempat sehingga bisa optimal dalam menyerap materi pembelajaran sehingga peserta lebih produktif dan dapat dinyatakan kompeten.

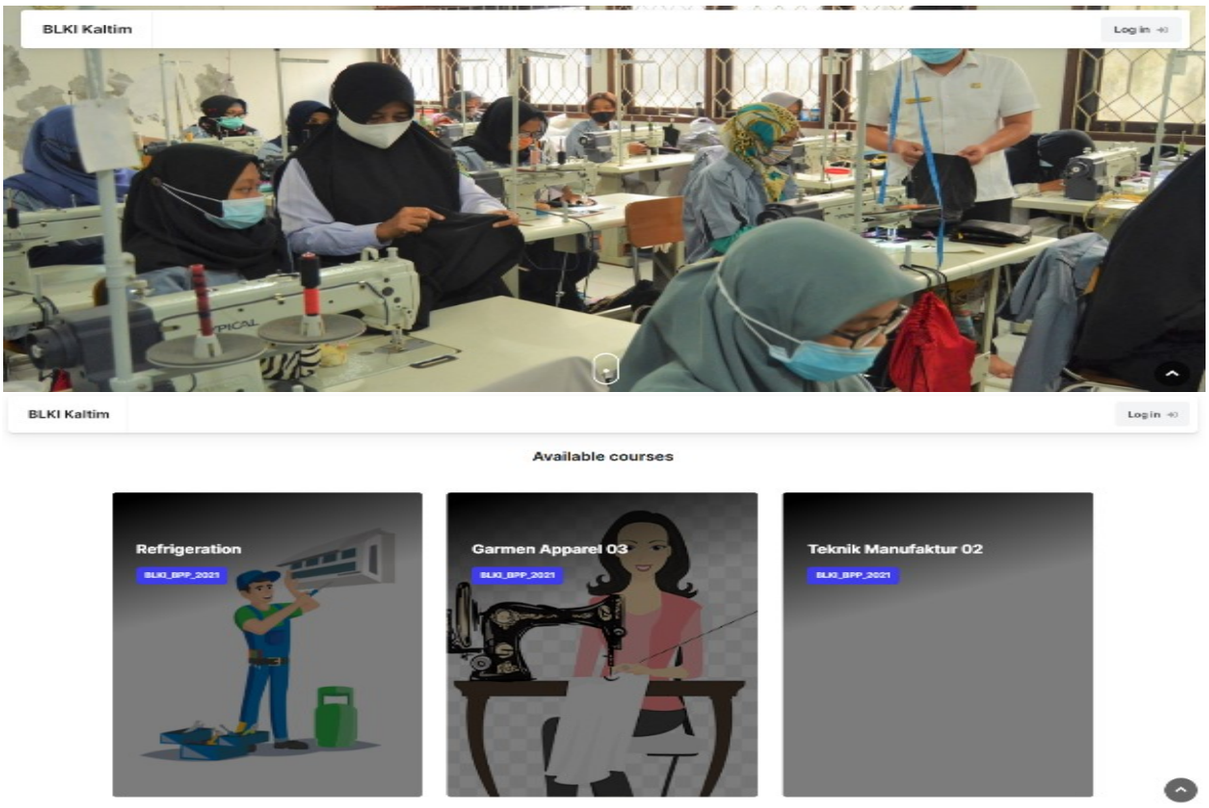

Gambar IV.13
Portal Aplikasi Siap Kerja

Aplikasi Siap Kerja ini dapat dengan mudah diadopsi oleh BLK Lain yang ada di Kaltim, dikarenakan fiturnya sederhana dan mudah dalam pengoperasiannya. Dalam rangka keberlanjutan inovasi ini, nantinya UPTD BLKI Balikpapan akan berusaha mengembangkan aplikasi Siap Kerja yang dapat terhubung dengan seksi-seksi yang ada di UPTD BLKI Balikpapan maupun Disnakertrans Kaltim. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan dapat tersaji data terkait ketenagakerjaan di Kaltim melalui data-data yang ada di tiap seksi di Disnakertrans Kaltim.

4.4.4 Pelaksanaan Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur

Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Di Provinsi Kalimantan Timur merupakan turunan dari Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan

Lingkungan Perseroan Terbatas Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Di Provinsi Kalimantan Timur. Pergub ini bertujuan untuk:

a. Mendorong peran serta perusahaan/perseorangan/pihak lainnya, dalam meningkatkan percepatan dan pemerataan pembangunan Daerah melalui Program Prioritas yang terarah dan terpadu serta bersinergi dengan program pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Tersedianya mekanisme pembentukan atau terbentuknya Badan Pengelola sebagai wadah koordinasi dan penyedia tata kelola program prioritas di Daerah; dan
c. Sebagai bentuk kepedulian, tanggung jawab dan penghargaan Perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar atas dampak aktivitas yang telah dilakukan.

Dalam Pergub mengharuskan perusahaan yang menjalankan usaha di Kalimantan Timur membangun Rumah Layak Huni (RLH) dan mengembangkan pangan untuk penghijauan sebagai program prioritas. Program prioritas tersebut nantinya diintegrasikan dalam program perusahaan dengan tidak mengurangi program lainnya yang merupakan kewajiban perusahaan. Sedangkan yang dimaksud dengan perusahaan, sesuai Pasal 1 ayat 4 adalah Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik daerah (BUMD), Koperasi dan Perusahaan Asing yang menjalankan usaha di Kaltim.

Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Sedangkan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan usaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil agar menjadi tangguh dan mandiri, serta pemberdayaan dan peningkatan kualitas terhadap kondisi sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh BUMN dan BUMD, melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN dan BUMD tersebut.

Rumah layak huni (RLH) yang dibangun Perusahaan, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 5 harus sesuai dengan Petunjuk Teknis sebagaimana diatur dalam Pergub. Pembangunan RLH dapat dilakukan oleh

Perusahaan bersama masyarakat dan/atau pihak lain. Untuk pelaksanaan Program Pangan untuk Penghijauan, persyaratan dan tahap-tahapannya disesuaikan dengan Petunjuk Teknis Pangan untuk Penghijauan yang sudah ada di lampiran Pergub Nomor 27 Tahun 2021, begitu pula dengan tanaman kayu-kayuan dan/atau tanaman serbaguna *(multi purpose trees species).* Pelaksanaan program pangan untuk penghijauan dapat dilakukan oleh Perusahaan bersama masyarakat dan/atau Pihak lainnya. Sedangkan lokasi dan luas proram pangan untuk penghijauan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Dalam Pergub di Pasal 7 juga disebutkan, dalam rangka mendukung dan meningkatkan pengelolaan Program Prioritas (RLH dan Pangan Untuk Penghijauan), gubernur membentuk badan Pengelola untuk masing-masing program prioritas. Badan Pengelola ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Masing-masing Badan Pengelola terdiri dari 5 personil, terdiri dari ketua dan anggota yang bertanggungjawab kepada gubernur. Badan Pengeloa dalam melaksanakan kegiatannya dibantu dibantu oleh kesekretariatan.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1 Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2023

Capaian kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota tahun 2021 telah dilakukan evaluasi seperti capaian indikator makro pembangunan yang terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Persentase Penduduk Miskin, Indeks Gini dan PDRB per Kapita. Selanjutnya, hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tersebut menjadi pertimbangan dalam menetapkan target indikator makro pembangunan daerah kabupaten/kota pada tahun 2023.

5.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur kemajuan atau keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu daerah. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian IPM Kabupaten/Kota Tahun 2021 dibandingkan capaian tahun 2020, maka capaian IPM Kabupaten/Kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel V.1
Kategori Capaian IPM Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM LEBIH RENDAH dan Progress Pertumbuhan IPM LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
II		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM dan Progress Pertumbuhan IPM LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM dan Progress Pertumbuhan IPM LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM LEBIH TINGGI dan Progress Pertumbuhan IPM LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2022

Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten dengan capaian IPM lebih rendah dan progress pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Timur.

Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kota dengan capaian IPM dan progress pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kota Kota Balikpapan.

Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian IPM dan progress pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Berau.

Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kota dengan capaian IPM lebih tinggi dan progress pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kota Samarinda dan Kota Bontang.

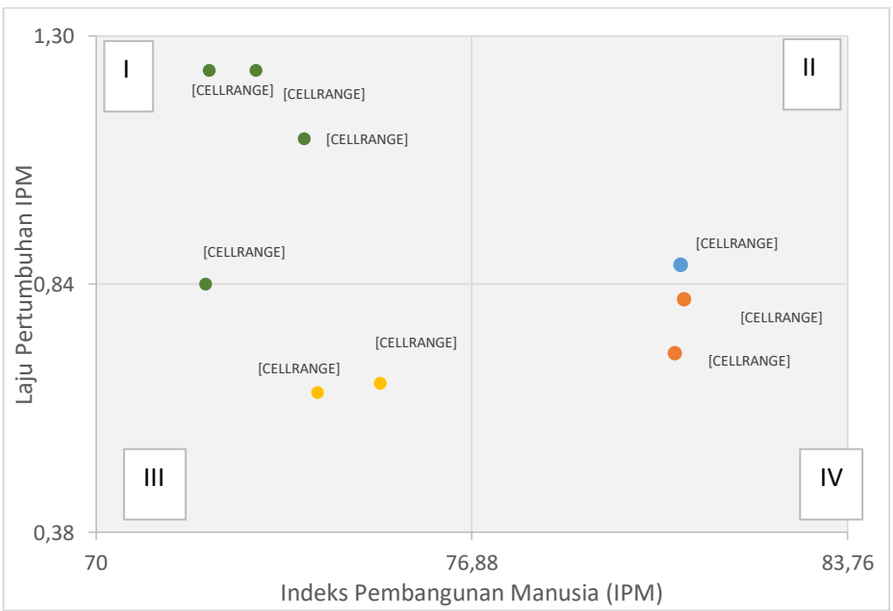

Gambar V.1
Analisis Kuadran Capaian IPM dan Progress Pertumbuhan IPM
Kabupaten/Kota Tahun 2021
(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2022)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 mencapai 76,88 meningkat 0,64 poin dibandingkan capaian tahun 2020 yang mencapai 76,24. Perbaikan

kemajuan pembangunan manusia Kalimantan Timur pada tahun 2021 ditandai oleh peningkatan angka IPM sebesar 0,84 persen, setelah sebelumnya sempat tumbuh negatif sebesar 0,48 persen pada tahun 2020. Peningkatan IPM tahun 2021 disebabkan oleh peningkatan yang terjadi disemua komponen penyusunnya. Berbeda dengan kondisi pada tahun 2020, di mana pandemi COVID-19 telah menyebabkan kinerja pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan yang disebabkan oleh turunnya nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita yang disesuaikan naik 3,31 persen dibanding tahun 2020.

Sebagai upaya dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dalam aspek pembangunan manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur perlu upaya yang sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tujuan pembangunan mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2023 sebesar 77,75 dengan kategori “Tinggi”. Adapun upaya yang dilakukan adalah pemerataan kualitas pelayanan pendidikan pada semua jenjang melalui penyediaan infrastruktur pendidik, peningkatan kualifikasi pendidik/tenaga kependidikan serta pemberian beasiswa.

Tabel V.2
Penetapan Target Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota
Tahun 2023

No	KAB/KOTA	Realisasi		Target	
		2020	2021	2022	2023
1	Paser	72,04	72,93	73,03	73,77
2	KUBAR	71,19	72,07	72,30	73,05
3	KUKAR	73,59	74,06	75,34	75,12
4	KUTIM	73,00	73,81	74,56	75,10
5	Berau	74,71	75,20	75,10	75,50
6	PPU	71,41	72,01	72,27	72,50
7	MAHULU	67,09	67,95	70,29	68,70
8	Balikpapan	80,01	80,71	80,11	81,00
9	Samarinda	80,11	80,76	81,39	81,80
10	Bontang	80,02	80,59	81,00	81,20
Kalimantan Timur		76,24	76,88	77,25	77,75

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2022

5.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu negara/daerah serta hasil dari pembangunan dilakukan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah negara/ daerah. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian LPE kabupaten/kota tahun 2021 dibandingkan capaian tahun 2020, maka capaian LPE non batubara kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel V.3
Kategori Capaian LPE Non Batubara Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE Non Batubara LEBIH RENDAH dan Rata-rata LPE Non Batubara LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
II		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE Non Batubara dan Rata-rata LPE Non Batubara LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE Non Batubara dan Rata-rata LPE Non Batubara LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE Non Batubara LEBIH TINGGI dan Rata-rata LPE Non Batubara LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2022

Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian LPE lebih rendah dan rata-rata LPE lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat.

Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kota dengan capaian LPE dan rata-rata LPE lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Balikpapan dan Kota Bontang.

Kuadran III. Pada kelompok ini tidak terdapat kabupaten/kota dengan capaian LPE dan rata-rata LPE lebih rendah dibanding capaian provinsi.

Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten/kota dengan capaian LPE lebih tinggi dan rata-rata LPE lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Samarinda.

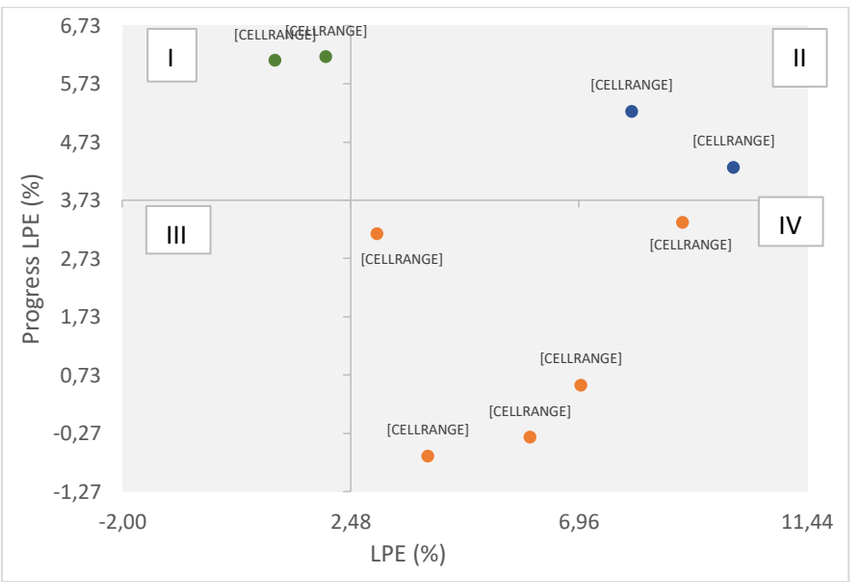

Gambar V.2
Analisis Kuadran Capaian dan Rata-Rata LPE Kabupaten/Kota
Tahun 2021
(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2022)

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2021 tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2021 merupakan agregat dari pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kalimantan Timur menggambarkan bahwa produksi dan kinerja perekonomian wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Timur, terutama pada daerah yang memiliki peranan besar terhadap perekonomian Kalimantan Timur. Dari 10 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur terdapat 2 kabupaten yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun 2020. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Kabupaten Paser, dari -0,72 persen menjadi 5,41 persen.

Dalam rangka memacu pemerataan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, upaya yang dilakukan yakni mendorong peningkatan kualitas infrastruktur yang mendukung tumbuh dan menguatnya sektor perekonomian di Kabupaten/Kota, menjaga iklim investasi daerah dan serta mendorong muculnya hilirasi industri. Adapun target perekonomian Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota Tahun 2023 ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi ekonomi daerah.

Tabel V.4
Penetapan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2023

No	KAB/KOTA	Realisasi		Target	
		2020	2021	2022	2023
1	Paser	-2,86	5,41	1,30	4,50
2	KUBAR	-2,86	4,18	4,03	4,24
3	KUKAR	-4,21	2,67	1,06	2,11
4	KUTIM	-3,10	-1,01	2,05	2,10
5	Berau	-3,32	5,36	2,29	3,79
6	PPU	-2,34	-1,69	1,33±1	2,85
7	MAHULU	-0,23	1,27	2,49	2,49
8	Balikpapan	-0,93	4,56	4,10	4,60
9	Samarinda	-0,99	2,76	2,84	3,44
10	Bontang	-2,74	1,60	-1,44	2,50
Kalimantan Timur		-2,87	2,48	3,5±1	3±1

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2022

5.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan jumlah pengangguran dalam angkatan kerja. Angka TPT yang tinggi menunjukkan tingginya angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian TPT kabupaten/kota tahun 2021 dibandingkan capaian tahun 2020, maka capaian kinerja TPT kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel V.5
Kategori Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I	●	Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT LEBIH RENDAH dan Progress pertumbuhan TPT LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
II	●	Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT dan Progress pertumbuhan TPT LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi

Kuadran	Simbol	Interpretasi
III	●	Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT dan Progress pertumbuhan TPT LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi
IV	●	Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT LEBIH TINGGI dan Progress pertumbuhan TPT LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2022

Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten dengan capaian TPT lebih rendah dan progress pertumbuhan TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Berau.

Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kota dengan capaian TPT dan progress pertumbuhan TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kota tersebut adalah Kota Bontang.

Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten dengan capaian TPT dan progress pertumbuhan TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur da Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kota dengan capaian TPT lebih tinggi dan progress pertumbuhan TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kota Samarinda dan Kota Balikpapan.

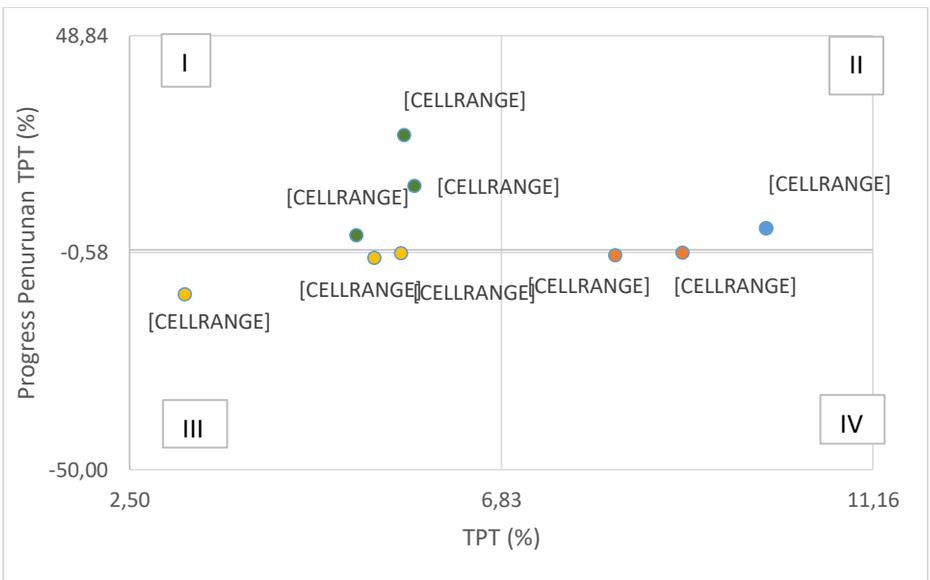

Gambar V.3

Analisis Kuadran Capaian dan Progress Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2021
(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2022)

Pada umumnya, permasalahan masih cukup tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Timur disebabkan oleh tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang belum diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Daya serap pasar tenaga kerja belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang ada.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka dengan penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor juga dengan meningkatkan kompetensi dan daya saing sehingga angkatan kerja dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja. Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompeten akan menjadikan Kalimantan Timur sebagai provinsi yang berdaya saing tinggi. Penyelarasan target TPT Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 diselaraskan dengan target Kabupaten/Kota, sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai.

Tabel V.6
Penetapan Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota
Tahun 2023

No	KAB/KOTA	Realisasi		Target	
		2020	2021	2022	2023
1	Paser	4,52	5,77	3,45	4,50
2	KUBAR	4,97	5,14	4,63	4,46
3	KUKAR	5,70	5,66	4,94	5,30
4	KUTIM	5,45	5,35	5,73	5,00
5	Berau	5,08	5,82	4,84	4,73
6	PPU	6,22	2,95	5,59	2,95
7	MAHULU	3,49	3,14	3,68	2,90
8	Balikpapan	9,00	8,94	9,00	8,46
9	Samarinda	8,26	8,16	8,09	6,55
10	Bontang	9,46	9,92	8,70	9,20
Kalimantan Timur		6,87	6,83	6,75	6,50

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2022

5.1.4 Persentase Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin menunjukkan kelompok masyarakat dengan pengeluaran per kapita sebulannya berada dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota tahun 2021 dibandingkan

capaian tahun 2020, maka capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel V.7
Kategori Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian persentase penduduk miskin LEBIH RENDAH dan Progress pertumbuhan angka miskin LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
II		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian persentase penduduk miskin dan Progress pertumbuhan angka miskin LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian persentase penduduk miskin dan Progress pertumbuhan angka miskin LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian persentase penduduk miskin LEBIH TINGGI dan Progress pertumbuhan angka miskin LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2022

Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian persentase penduduk miskin lebih rendah dan progress pertumbuhan angka miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Berau dan Kota Balikpapan.

Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian persentase penduduk miskin dan progress pertumbuhan angka miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat.

Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kota dengan capaian persentase penduduk miskin dan progress pertumbuhan angka miskin lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kota Bontang dan Kota Samarinda.

Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten dengan capaian persentase penduduk miskin lebih tinggi dan progress

pertumbuhan angka miskin lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Mahakam Ulu.

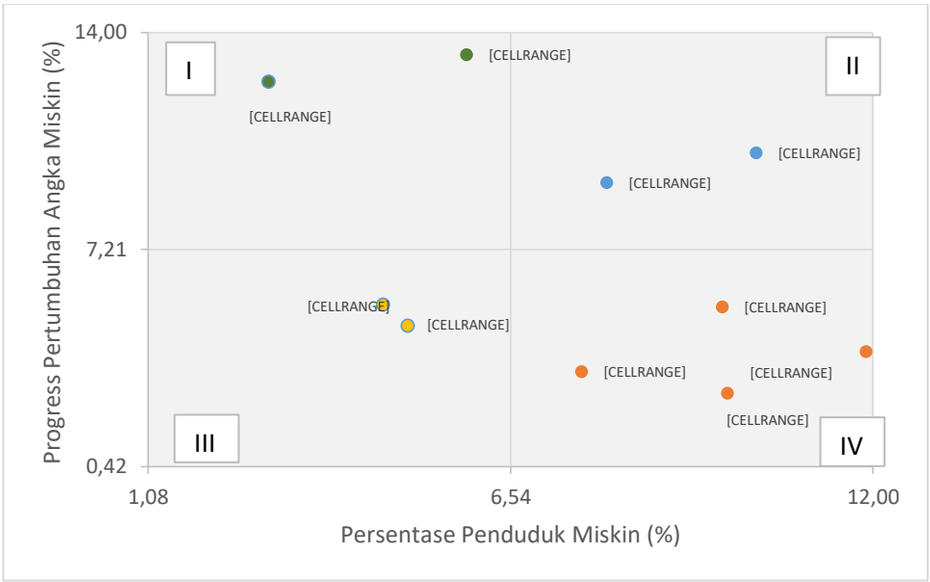

Gambar V.4
Analisis Kuadran Capaian dan Progress Pertumbuhan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2021
(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2022)

Persentase penduduk miskin di Kalimantan Timur pada tahun 2021 mengalami kenaikan dari jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin. Kenaikan ini terjadi merupakan efek dari pandemic Covid-19 yang masuk ke Kalimantan Timur. Permasalahan kemiskinan umumnya dialami oleh kabupaten dengan karakteristik wilayah didominasi perdesaan. Untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur fokus mengurangi tingkat kemiskinan melalui program-program peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat.

Sebagai upaya menurunkan jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur tahun 2023, penentuan target ditentukan dengan mensinergikan target Kabupaten/Kota tahun 2023 dengan analisis yang mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang diperkirakan akan semakin kondusif seiring dengan progres transisi pandemi COVID-19 menuju fase endemi.

Tabel V.8
Penetapan Target Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota
Tahun 2023

No	KAB/KOTA	Realisasi		Target	
		2020	2021	2022	2023
1	Paser	9,23	9,73	8,00	8,80
2	KUBAR	9,29	10,24	9,17	9,11
3	KUKAR	7,31	7,99	6,90	7,10
4	KUTIM	9,55	9,81	9,66	9,57
5	Berau	5,19	5,88	5,07	5,01
6	PPU	7,36	7,61	6,50	6,50
7	MAHULU	11,44	11,90	9,90	10,50
8	Balikpapan	2,57	2,89	2,42	2,39
9	Samarinda	4,76	4,99	5,24	4,93
10	Bontang	4,38	4,62	4,03	4,03
Kalimantan Timur		6,10	6,54	6,00	5,90

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2022

5.1.5 Indeks Gini

Indeks Gini yang tinggi menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian Indeks Gini kabupaten/kota tahun 2021 dibandingkan capaian tahun 2020, maka capaian Indeks Gini kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel V.9
Kategori Capaian Indeks Gini Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian Indeks Gini LEBIH RENDAH dan Progress pertumbuhan Indeks Gini LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
II		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian Indeks Gini dan Progress pertumbuhan Indeks Gini LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian Indeks Gini dan Progress pertumbuhan Indeks Gini LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian Indeks Gini LEBIH TINGGI dan Progress pertumbuhan Indeks Gini LEBIH RENDAH

		dibanding capaian provinsi

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2022

Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian Indeks Gini lebih rendah dan progress pertumbuhan Indeks Gini lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Balikpapan.

Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian Indeks Gini dan progress pertumbuhan Indeks Gini lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Berau.

Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 6 (enam) kabupaten/kota dengan capaian Indeks Gini dan progress pertumbuhan Indeks Gini lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Samarinda.

Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kota dengan capaian persentase Indeks Gini lebih tinggi dan progress pertumbuhan Indeks Gini lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kota Bontang.

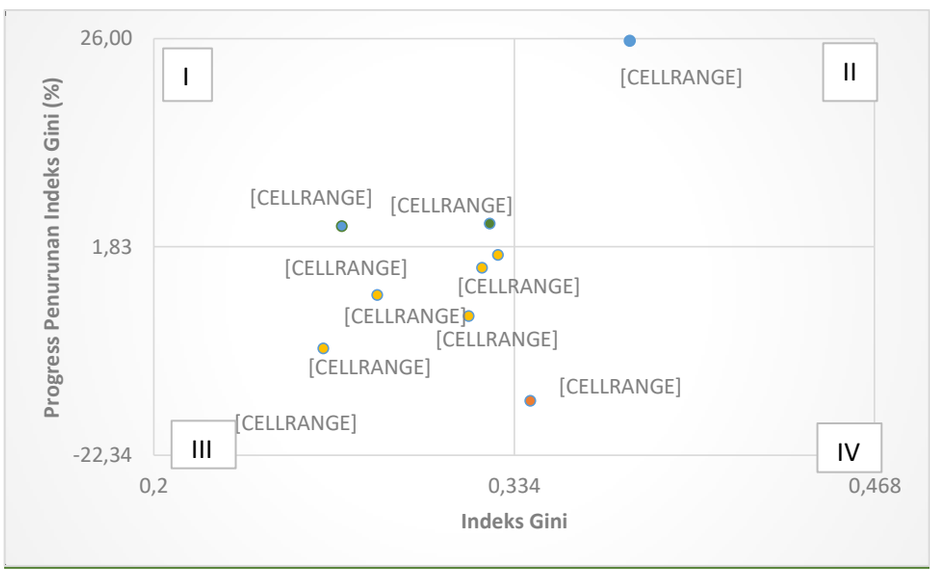

Gambar V.5
Analisis Kuadran Capaian dan Progress Pertumbuhan Indeks Gini Kabupaten/Kota Tahun 2021

(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2022)

Indeks Gini daerah perkotaan jauh lebih tinggi dari daerah perkotaan. Tercatat, pada tahun 2021 ketimpangan perkotaan mencapai 0,339 sedangkan untuk daerah perdesaan 0,288. Rendahnya Indeks Gini di daerah perdesaan tidak serta merta dapat menggeneralisasi bahwa kesejahteraan di daerah perdesaan lebih baik. Hal ini lebih menggambarkan keberagaman pekerjaan di daerah perkotaan yang lebih tinggi dibandingkan perdesaan, yang mengakibatkan *gap* antar lapisan penduduk diperkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan.

Guna pemerataan pendapatan pada masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan langkah bersama untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya dan tidak didominasi oleh golongan tertentu. Penentuan target indeks gini tahun 2023 dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang berpengaruh terhadap penurunan target indeks gini.

Tabel V.10
Penetapan Target Indeks Gini Kabupaten/Kota Tahun 2023

No	KAB/KOTA	Realisasi		Target	
		2020	2021	2022	2023
1	Paser	0,290	2,880	0,275	0,270
2	KUBAR	0,338	0,317	0,333	0,330
3	KUKAR	0,294	0,283	0,290	0,280
4	KUTIM	0,325	0,328	0,344	0,325
5	Berau	0,300	0,377	0,300	0,305
6	PPU	0,292	0,263	0,289	0,288
7	MAHULU	0,259	0,270	0,237	0,237
8	Balikpapan	0,311	0,325	0,300	0,300
9	Samarinda	0,324	0,322	0,290	0,290
10	Bontang	0,405	0,340	0,330	0,320
Kalimantan Timur		0,328	0,331	0,313	0,308

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2022

5.1.6 PDRB per Kapita

PDRB per Kapita adalah salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk disuatu daerah/wilayah, yang merupakan hasil bagi antara nilai

tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian PDRB per Kapita kabupaten/kota tahun 2021 dibandingkan capaian tahun 2020, maka capaian PDRB per Kapita kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel V.11
Kategori Capaian PDRB per Kapita Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian PDRB per Kapita LEBIH RENDAH dan Progress pertumbuhan PDRB per Kapita LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
II		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian PDRB per Kapita dan Progress pertumbuhan PDRB per Kapita LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian PDRB per Kapita dan Progress pertumbuhan PDRB per Kapita LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian PDRB per Kapita LEBIH TINGGI dan Progress pertumbuhan PDRB per Kapita LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2022

Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian PDRB per Kapita lebih rendah dan progress pertumbuhan PDRB per Kapita lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Berau.

Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten dengan capaian PDRB per Kapita dan progress pertumbuhan PDRB per Kapita lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten/kota dengan capaian PDRB per Kapita dan progress pertumbuhan PDRB per Kapita lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.

Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 2 (satu) kabupaten/kota dengan capaian persentase PDRB per Kapita lebih tinggi dan progress pertumbuhan PDRB per Kapita lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang.

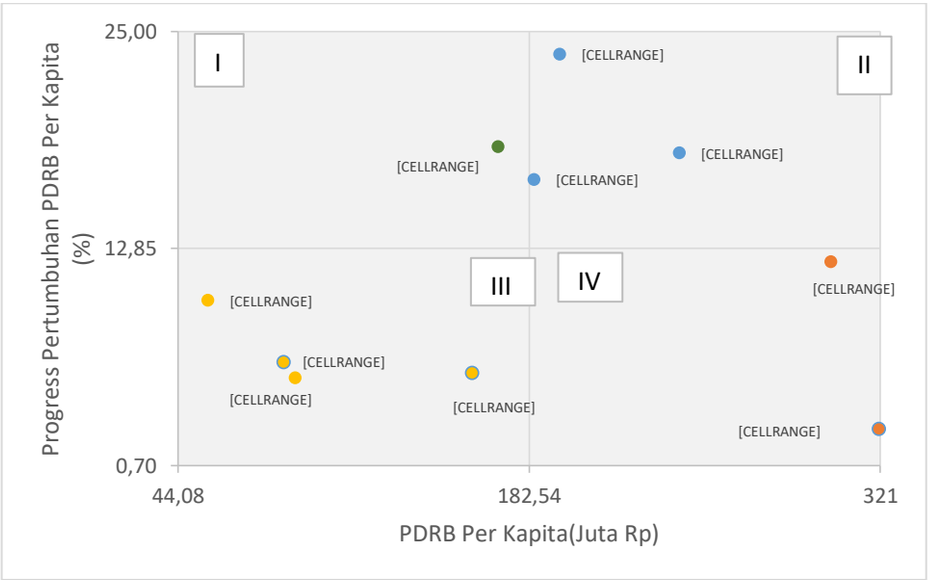

Gambar V.6
Analisis Kuadran Capaian dan Progress Pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2021
(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2022)

PDRB per Kapita Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dikarenakan kondisi pandemi yang sudah mulai terkendali seiring dengan ditemukannya vaksin serta diselenggarakannya program vaksinasi Covid-19 yang cukup masif diberbagai daerah di Indonesia.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian indikator makro kabupaten/kota tahun 2021 dengan pendekatan analisis kuadran (*important performance analysis*), diperoleh rangkuman hasil evaluasi yang mengindikasikan masih adanya kesenjangan (disparitas) kemajuan pembangunan antar kabupaten/kota baik dari aspek pembangunan ekonomi maupun aspek pembangunan manusia.

Guna mengurangi disparitas pembangunan antar kabupaten/kota, maka fokus pembangunan daerah diarahkan pada percepatan dan pemerataan hasil pembangunan melalui sinkronisasi prioritas daerah dan program prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota tahun 2023.

Penentuan target PDRB Perkapita ditentukan dengan analisis yang mempertimbangkan potensi perekonomian yang mendorong pertumbuhan PDRB serta proyeksi pertumbuhan penduduk di Kabupaten/Kota yang akan berkontribusi terhadap pencapaian target Kalimantan Timur Tahun 2023.

Tabel V.12
Penetapan Target PDRB Perkapita Kabupaten/Kota Tahun 2023

No	KAB/KOTA	Realisasi		Target	
		2020	2021	2022	2023
1	Paser	157,20	194,51	0,00	197,00
2	KUBAR	158,05	184,46	193,35	198,29
3	KUKAR	204,50	241,70	187,21	244,00
4	KUTIM	268,81	301,40	0,00	315,00
5	Berau	143,66	170,29	154,04	165,00
6	PPU	50,79	55,84	58,08	59,10
7	MAHULU	85,37	90,16	110,60	110,60
8	Balikpapan	151,20	160,10	168,06	175,54
9	Samarinda	80,36	85,58	87,09	89,60
10	Bontang	311,88	320,44	321,50	329,54
Kalimantan Timur		161,76	182,54	172,00	193,00

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2022

5.1.7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator yang digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Indeks ini dihitung dari nilai komposit berupa indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan dan indeks kualitas air laut. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian IKLH kabupaten/kota tahun 2021 dibandingkan capaian tahun 2020, maka capaian IKLH kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel V.13
Kategori Capaian IKLH Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I	●	Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IKLH LEBIH RENDAH dan Progress pertumbuhan IKLH LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
II	●	Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IKLH dan Progress pertumbuhan IKLH LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi

Kuadran	Simbol	Interpretasi
III	●	Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IKLH dan Progress pertumbuhan IKLH LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi
IV	●	Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IKLH LEBIH TINGGI dan Progress pertumbuhan IKLH LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2022

Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 5 (satu) kabupaten/kota dengan capaian IKLH lebih rendah dan progress pertumbuhan IKLH lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian IKLH dan progress pertumbuhan IKLH lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Mahakam Ulu.

Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian IKLH dan progress pertumbuhan IKLH lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang.

Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten/kota dengan capaian persentase IKLH lebih tinggi dan progress pertumbuhan IKLH lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Berau.

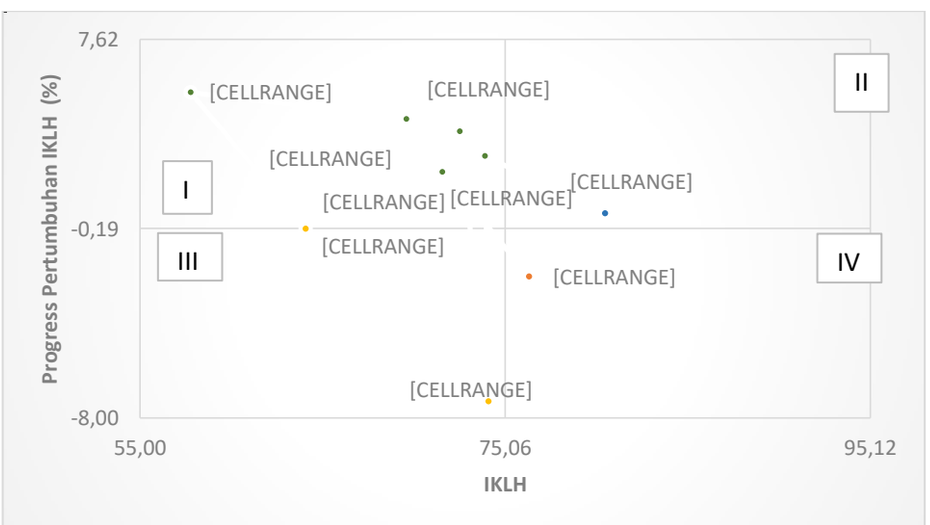

Gambar V.7

Analisis Kuadran Capaian dan Progress Pertumbuhan IKLH Kabupaten/Kota Tahun 2021

(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2022)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh penambahan indeks baru yaitu Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan penurunan Indeks Kualitas Air Sungai.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian indikator makro kabupaten/kota tahun 2021 dengan pendekatan analisis kuadran (*important performance analysis*), diperoleh rangkuman hasil evaluasi yang mengindikasikan masih adanya kesenjangan (disparitas) kemajuan pembangunan dalam aspek lingkungan antar kabupaten/kota. Diperlukan kebijakan pembangunan yang selaras antara Provinsi dan Kabupaten/Kota agar target pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat tercapai. Penentuan target IKLH Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota Tahun 2023 berdasarkan analisis terhadap aspek yang mempengaruhi kualitas pengeloaan lingkungan.

Tabel V.14
Penetapan Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Tahun 2023

No	KAB/KOTA	Realisasi		Target	
		2020	2021	2022	2023
1	Paser	71,17	73,97	71,43	74,56
2	KUBAR	81,47	74,15	75,76	75,95
3	KUKAR	68,76	72,58	68,52	73,47
4	KUTIM	69,47	71,62	69,97	72,21
5	Berau	78,53	76,37	-	76,81
6	PPU	70,01	-	73,18	73,59
7	MAHULU	80,12	80,56	83,94	83,94
8	Balikpapan	65,33	69,66	68,15	69,70
9	Samarinda	52,36	57,78	59,25	60,26
10	Bontang	64,29	64,09	65,33	64,69
Kalimantan Timur		75,25	75,06	76,05	76,15

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2022

5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan di tahun 2021 menunjukkan bahwa masih terdapat 4 (empat) permasalahan utama pembangunan yang harus diselesaikan, yakni tingkat kemiskinan, tingkat

pengangguran, indeks gini, dan kualitas lingkungan. Permasalahan tingkat kemiskinan dilihat dari daerah tempat tinggal menunjukkan bahwa penduduk miskin lebih banyak di daerah pedesaan dibandingkan daerah perkotaan, terutama di wilayah kabupaten yakni wilayah Kabupaten Mahulu dengan tingkat kemiskinan sebesar 11,9 persen, Kabupaten Kutai Barat sebesar 10,24 persen, dan Kabupaten Kutai Timur sebesar 9,81 persen. Sedangkan permasalahan tingkat pengangguran paling banyak di wilayah kota yakni Kota Bontang sebesar 9,92 persen, Kota Balikpapan sebesar 8,94 persen dan Kota Samarinda sebesar 8,16 persen. Sementara itu, indeks gini yang merupakan pengukuran dari tingkat ketimpangan pendapatan apabila dilihat berdasarkan tempat tinggal mengalami kenaikan baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Selanjutnya untuk permasalahan kualitas lingkungan hidup yang diukur melalui IKLH menunjukkan bahwa masih perlu upaya lebih terhadap perbaikan kualitas lingkungan dan udara.

Berdasarkan pertimbangan ke empat permasalahan tersebut, maka perlu strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan kabupaten/kota yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang inklusif dan berkelanjutan, dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran, yang berdampak positif pada pengurangan kesenjangan antar wilayah. Hal ini sejalan dengan tema RKPD Tahun 2023, yaitu *"Peningkatan Produktivitas Guna Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Kalimantan Timur yang Berdaulat",* yang menekankan pada peningkatan produktivitas untuk mewujudkan ketahanan sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pembangunan wilayah kabupaten/kota. Adapun arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota beserta lokasi khusus pelaksanaannya dengan mempertimbangkan permasalahan pembangunan, target sasaran pembangunan daerah, serta sektor potensial di masing-masing kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

Tabel V.15
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota Tahun 2023

NO	KAB/KOTA	ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS
1.	Paser	1) Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan	Kec. Tanah Grogot
		2) Peningkatan pelayanan kesehatan dan akreditasi puskesmas	Kec. Long Kali (1 Utama), Kec. Long Ikis (1 Utama), Kec. Kuaro (1 Paripurna), Kec. Batu Sopang (1 Utama), Kec. Muara Komam (1 Utama), Kec. Tanah Grogot (1 Utama)
		3) Peningkatan ekonomi desa melalui pengembangan BUMDes	Kec. Muara Samu (Ds. Rantau Bintungan, Ds. Muara Andeh), Kec. Batu Sopang (Ds. Rantau Buta), Kec. Long Kali (Ds. Perkuwen, Ds. Pinang Jatus, Ds. Muara Lambakan, Ds. Kepala Telake, Ds. Muara Adang II)
		4) Peningkatan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat dan koordinasi penanganan paska bencana	Ds. Muara Toyu, Ds. Kepala Telake
		5) Penguatan jaringan internet	Kab. Paser
		6) Penanganan prasarana jalan dan jembatan	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan di Ruas Jl. Janju - Jone - Pondong Baru
		7) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder	Kab. Tanah Grogot (Daerah Irigasi Sulilіran)
		8) Pemberian bantuan stimulan rumah layak huni bagi keluarga pra sejahtera	Kec. Long Ikis dan Kec. Muara Komam
		9) Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman padi	Kec. Paser Belengkong (Ds. Laburan, Ds. Sulilіran, Ds.Sangkuriman), Kec. Tanah Grogot,

NO	KAB/KOTA	ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS
			Kec. Long Kali, Kec. Long Ikis
		10) Penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan	a. Perikanan Tangkap: Kec. Tanjung Harapan (Ds. Selengot), Kec. Kuaro (Ds. Pasir Mayang, Ds. Harapan Baru), Kec. Batu Engau, Kec. Tanah Grogot, Kec. Paser Belengkong b. Perikanan Budidaya: Kec. Long Ikis, Kec. Paser Belengkong
		11) Sertifikasi pelaku usaha perikanan budidaya	Kec. Long Kali (Ds.Maruat, Ds. Muara Telake), Kec. Long Ikis, Kec. Paser Belengkong
		12) Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan non sawit (karet, kelapa dalam, aren)	a. Karet: Kec. Muara Komam b. Kelapa Dalam: Kec. Longkali (Ds. Makmur Jaya, Ds. Mendik, Ds. Longkali), Kec. Muara Samu (Ds. Rantau Atas, Ds. Suweto, Ds. Luan/Dilibinti), Kec. Batu Sopang (Ds. Sungai Terik, Ds. Busui, Ds. Rantau Layung) c. Aren: Kec. Longkali (Ds. Makmur Jaya, Ds. Mendik, Ds. Longkali), Kec. Long Ikis (Ds. Krayan Sentosa, Ds. Kayungo Sari, Ds. Samuntai)
		13) Peningkatan produksi hasil peternakan sapi lokal melalui penyediaan sarana dan prasarana	Kec. Batu Engau (Ds. Tempakan), Kec. Long Kali (Ds. Perkuwen dan Ds. Pinang Jatus), Kec. Long Ikis (Ds. Belimbing), Kec. Muara Komam (Ds. Binangon dan Ds. Muara Kuaro)

NO	KAB/KOTA	ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS
		14) Pengembangan ekonomi kreatif	Kec. Tanah Grogot
		15) Pengembangan kelompok perhutanan sosial	KPHP Telake (Ds. Waru, Ds. Pinang Jatus, Ds. Belimbing, Ds. Binangon) dan KPHP Kendilo (Ds. Busui, Ds. Selerong, Ds. Muara Langon, Ds. Luan, Ds. Suweto, Ds. Rantau Atas, Ds. Tanjung Pinang, Ds. Kerang Dayo, Ds. Muara Andeh, Ds. Saing Prupuk, Ds. Libur Dinding)
		16) Pembangunan dan Revitalisasi PLTS	a. Dusun Mului Desa Swan Sluntung Kecamatan Muara Komam Paser. b. Labuan Kalo, Tanjung Harapan Paser (Revitalisasi PLTS)
		17) Penyediaan infrastruktur air bersih	Kec. Long Kali, Kec.Kuaro
2.	KUBAR	1) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Kec. Bongan
		2) Peningkatan pelayanan kesehatan dan akreditasi puskesmas	Kec. Barong Tongkok (1 Utama), Kec. Damai (1 Utama), Kec. Muara Lawa (1 Utama), Kec. Muara Pahu (1 Utama), Kec. Penyinggahan (1 Utama), Kec. Long Iram (1 Utama), Kec. Bongan (1 Utama), Kec. Mook Manor Bulatn (1 Paripurna)
		3) Peningkatan ekonomi desa melalui pengembangan BUMDes	Kec. Damai (Ds. Bermai dan Ds. Kelian), Kec. Muara Pahu (Ds. Jerang Dayak dan Ds. Mendung), Kec. Bongan (Ds. Deraya), Kec. Bentian Besar (Ds. Randa Empas dan Ds. Anan

NO	KAB/KOTA	ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS
			Jaya), Kec. Nyuatan (Ds. Sentalar), Kec. Siluq Ngurai (Ds. Tendiq dan Ds. Penawang), Kec. Tering (Ds. Linggang Muyub Ilir)
		4) Pengembangan ekonomi masyarakat melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi PMKS Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Kec. Barong Tongkok
		5) Penguatan jaringan internet	Kab. Kutai Barat
		6) Penanganan prasarana jalan dan jembatan	Pembangunan Jalan Tering - Ujoh Bilang
		7) Penyediaan infrastruktur air bersih	SPAM Sendawar
		8) Pemberian bantuan stimulan rumah layak huni bagi keluarga pra sejahtera	Kec. Mook Manor Bulatn (Ds. Rambayan, Ds. Muara Batuq, Ds. Jengan, Ds. Sakaq Tada), Kec. Muara Pahu (Ds. Gunung Bayan, Ds. Muara Beloan, Ds. Muara Baroh), Kec. Linggang Bigung (Ds. Linggang Amer), Kec. Bongan (Ds. Perang Talik) Kec. Nyuatan (Ds. Jontai).
		9) Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman padi	Kec. Mook Manor Bulatn (Ds. Tondoh), Kec. Tering (Ds. Tering Lama Ulu, Ds. Tukul, Ds. Tering Lama), Kec. Muara Pahu (Ds. Jerang Dayak, Ds. Dasaq, Ds. Tanjung Pagar), Kec. Penyinggahan (Ds. Penyinggahan Ulu, Ds. Loa Deras, Ds. Penyinggahan Ilir, Ds. Tanjung Haur, Ds. Bakung), Kec. Bongan, Kec. Barong Tongkok, Kec. Linggang Bigung, Kec. Long Iram, Kec.

NO	KAB/KOTA	ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS
			Nyuatan, Kec. Mook Manor bulatn (Ds. Tondoh), Kec. Tering (Ds. Tering Lama Ulu, Ds. Tukul, Ds. Tering Lama)
		10) Penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan	Perikanan budidaya/hatchery dan keramba apung: Kec. Penyinggahan (Ds. Tanjung Haur, Ds. Penyinggahan Ulu, Ds. Bakung, Ds. Tanjung Haur), Kec. Jempang (Ds. Muara Ohong)
		11) Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan non sawit (karet)	Karet: Kec. Barong Tongkok (Ds. Barong Tongkok), Kec. Long Iram (Ds. Suko Mulyo), Kec. Sekolaq Darat (Ds. Sekolaq Oday), Kec. Tering (Ds. Muara Mujan), Kec. Linggang Bigung, Kec. Mook Manor Bulatn, Kec. Tering, Kec. Bentian Besar
		12) Pengembangan pengelolaan sapras pariwisata destinasi wisata 3 danau	Danau Jempang Kec. Jempang
		13) Pengembangan kelompok perhutanan sosial	KPHP Damai (Kec. Melak, Ds. Sembuan, Ds. Besi, Ds. Bermai, Ds. Intu Lingau, Ds. Juaq Asa, Ds. Muara Tae, Ds. Ongko, Ds. Penarung, Ds. Lahang, Ds. Loa Murahann, Ds. Long Belawan), KPHP Bongan (Kec. Bongan, Kampung Soke), KPHP Mook Manor Bulatn (Ds. Long Merang)
		14) Pembangunan PLTS	Ds. Lemper dan Ds. Deraya Kec. Bongan
		15) Peningkatan SDM pelaku UMKM	Kec. Linggang Bigung, Kec. Damai, Kec. Barong Tongkok, Kec. Melak, Kec. Linggang Melapeh

NO	KAB/KOTA	ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS
3.	KUKAR	1) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Kec. Muara Kaman, Kec. Marang Kayu, Kec. Kota Bangun
		2) Peningkatan pelayanan kesehatan dan akreditasi puskesmas	Kec. Muara Muntai (1 Utama), Kec. Loakulu (1 Paripurna), Kec. Muara Jawa (1 Utama), Kec. Samboja (1 Paripurna), Kec. Loa Janan (1 Utama), Kec. Marangkayu (1 Utama), Kec. Sebulu (1 Utama 1 Paripurna), Kec. Muara Kaman (1 Paripurna), Kec. Kota Bangun (1 Utama)
		3) Peningkatan ekonomi desa melalui pengembangan BUMDes	Kec. Kota Bangun (Ds. Benua Baru), Kec. Muara Kaman (Ds. Tunjungan, Ds. Menamang Kiri, Ds. Kupang Baru, Ds. Liang Buaya), Kec. Marangkayu (Ds. Santan Tengah), Kec. Tabang (Ds. Ma. Kebaq)
		4) Pengembangan ekonomi masyarakat melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi PMKS Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Kec. Sebulu Kec Muara Kaman
		5) Penguatan jaringan internet	Kab. Kutai Kartanegara
		6) Penanganan prasarana jalan dan jembatan	a. Rekontruksi Jalan: (1) Patung Lembuswana - Sebulu (2) Simp. Samboja - Simp. Muara Jawa b. Pembangunan Jalan: (1) Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

NO	KAB/KOTA	ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS
			Ruas Jalan Km. 38 - Simp. Samboja (2) Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Ruas Simp. 3 Sambera - Muara Badak (3) Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Ruas Jalan Patung Lembuswana - Sebulu c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan jembatan di kewenangan UPTD Wilayah II PUPR d. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi (Marka, Rambu, dll)
		7) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder	a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Marangkayu b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Buluh c. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Buluh (DAK)
		8) Peningkatan sarana dan prasarana air baku	Pembangunan Sumur Dalam dan Instalasi Pengolahan Air di Balai Benih Induk Hortikultura: Kec. Muara Badak
		9) Pemberian bantuan stimulan rumah layak huni bagi keluarga pra sejahtera	Kec. Muara Badak dan Kec. Loa Kulu
		10) Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman padi	Kec. Tenggarong (Ds. Jahab, Ds. Buana Jaya), Kec. Loa Kulu (Ds. Jonggon Desa), Kec. Tenggarong Seberang (Ds. Buana Jaya), Kec. Loa Kulu (Ds. Jonggon), Kec. Sebulu, Kec. Muara Kaman, Kec. Marangkayu

NO	KAB/KOTA	ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS
		11) Penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan	a. Perikanan Tangkap: Kec. Muara Badak (Ds. Muara Badak Ilir), Kec. Anggana (Ds. Muara Pantuan, Ds. Sepatin, Ds. Tani Baru), Kec. Sanga-sanga b. Perikanan Budidaya: Kec. Anggana (Ds. Muara Pantuan, Ds. Muara Kembang), Kec. Muara Badak (Ds. Muara Badak Ilir, Ds. Tanjung Limau), Kec. Kota Bangun (Ds. Pela), Kec. Kenohan (Ds. Semayang), Kec. Muara Wis (Ds. Jantur, Ds. Jantur Baru, Ds. Jantur Selatan), Kec. Muara Muntai (Ds. Melintang)
		12) Sertifikasi pelaku usaha perikanan budidaya dan olahan	Kec. Anggana (Ds. Muara Pantuan, Ds. Tani Baru), Kec. Muara Badak (Ds. Muara Badak Ilir)
		13) Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan non sawit (karet, lada)	a. Karet: Kec. Muara Muntai (Ds. Muara Leka), Kec. Marangkayu (Ds. Santan Ulu, Ds. Bunga Putih, Ds. Ngudi Rahayu, Ds. Mekar Baru), Kec. Kota Bangun (Ds. Kota Bangun II, Ds. Sukabumi), Kec. Muara Badak (Ds. Salo Cela, Ds. Badak Mekar, Ds. Rejo Makmur), Kec. Handil (Ds. Nilam Lestari) b. Lada: Kec. Loa Janan (Ds. Batuah, Ds. Tani Harapan)
		14) Peningkatan produksi hasil peternakan sapi lokal melalui penyediaan sarana dan prasarana	Kec. Tenggarong Seberang (Ds. Bukit Pariaman, Ds. Kertabuana), Kec. Loa Janan (Ds. Batuah, Ds. Tani Bakti), Kec. Tenggarong (Ds. Loa Tebu),

NO	KAB/KOTA	ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS
			Kec. Samboja (Ds. Wonotirto), Kec. Kota Bangun (Ds. SP2), Kec. Loa Kulu (Ds. Jonggon)
		15) Pengembangan pengelolaan sapras pariwisata destinasi wisata 3 danau	Danau Semayang Kec. Kenohan dan Danau Melintang Kec. Muara Wis
		16) Pengembangan kelompok perhutanan sosial	KPHP DAS Belayan (Ds. Selimbingan, Ds. Tuana Tuha, Ds. Muara Siran, Ds. Genting Tanah, Ds. Beluk Muda, Ds. Muhuran, Ds. Muara Belinau, Ds. Muara Kebak, Ds. Muara Tiq, Ds. Muara Tuboq, Ds. Umaq Bequay, Ds. Kelekat, Ds. Muay Kec. Kembang Janggut), KPHP Delta Mahakam (Ds. Muara Pantuan, Ds. Kutai Lama, Ds. Tani Baru, Ds. Muara Jawa), KPHP Meratus (Ds. Bakungan, Ds. Sungai Merdeka), KPHP Santan (Ds. Menamang Kiri, Ds. Menamang Kanan, Ds. Sungai Bawang, Ds. Suka Damai, Ds. Kertabuana), KPHP Bukit Soeharto (Ds. Batuah, Kel. Bukit Merdeka, Kel. Sungai Merdeka, Ds. Batuah, Kel. Bukit Merdeka, Kel. Sungai Merdeka)
		17) Peningkatan SDM pelaku UMKM	Ds. Handil Terusan Kec. Anggana
		18) Dukungan terhadap pembangunan IKN	Kab. Kutai Kartanegara khususnya Kec. Samboja, Kec. Loa Kulu, Kec. Loa Janan, Kec. Muara Jawa, dan Kec. Sanga-Sanga

NO	KAB/KOTA	ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS
4.	KUTIM	1) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Kec. Rantau Pulung, Kec. Batu Ampar
		2) Peningkatan pelayanan kesehatan dan akreditasi Puskesmas	Kec. Sangatta Selatan (1 Utama), Kec. Sangatta Utara (2 Utama), Kec. Kaliorang (1 Utama), Kec. Sandaran (1), Kec. Muara Wahau (2 Utama), Kec. Telen (1), Kec. Muara Ancalong (1 Utama), Kec. Teluk Pandan (1 Utama), Kec. Kaubun (1 Utama), Kec. Karangan Dalam (1), Kec. Batu Ampar (1 Paripurna)
		3) Peningkatan ekonomi desa melalui pengembangan BUMDes	Kec. Muara Ancalong (Ds. Long Nah, Ds. Muara Dun, Ds. Teluk Baru), Kec. Telen (Ds. Long Noran), Kec. Batu Ampar (Ds. Mugi Rahayu), Kec. Bengalon (Ds. Tebangan Lembak)
		4) Peningkatan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat dan koordinasi penanganan paska bencana	Ds. Suka Rahmat dan Ds. Teluk Lingga
		5) Penguatan jaringan internet	Kab. Kutai Timur
		6) Penanganan prasarana jalan dan jembatan	a. Rekonstruksi Jalan Simp. 4 Kaliorang - Talisayan b. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Ruas Jalan Simp. 4 Kaliorang - Talisayan c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan jembatan di Ruas Jalan Simp. 4 Kaliorang – Talisayan d. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan

NO	KAB/KOTA	ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS
			Provinsi
		7) Normalisasi/restorasi sungai	Normalisasi Sungai Sangatta
		8) Pembangunan pengaman pantai	Pantai Sandaran
		9) Penyediaan infrastruktur air bersih	Pemasangan jaringan pipa: Kec. Kongbeng
		10) Pemberian bantuan stimulan rumah layak huni bagi keluarga pra sejahtera	Kec. Sangatta Utara dan Kec. Sangatta Selatan
		11) Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman padi	Kec. Sangatta Selatan (Ds. Sangatta Selatan), Kec. Kaubun (Ds. Bumi Rapak, Kec. Kaliorang (Ds. Citra Manunggal Jaya), Kec. Teluk Pandan (Ds. Teluk Pandan), Kec. Kongbeng (Ds. Miau Baru)
		12) Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan	Perikanan Tangkap: Kec. Sangkulirang (Ds. Banua Baru Ilir), Kec. Kaliorang, Kec. Sangatta Utara, Kec. Sangatta Selatan (Ds. Sangkima)
		13) Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan non sawit (kakao)	Kec. Karangan (Ds. Karangan Sebrang), Kec. Busang (Ds. Rantau Setosa, Ds. Long Bentuk), Kec. Sandaran (Ds. Manubar, Ds. Tanjung Mangkalihat)
		14) Peningkatan produksi hasil peternakan sapi lokal melalui penyediaan sarana dan prasarana	Kec. Teluk Pandan (Ds. Teluk Pandan), Kec. Rantau Pulung (Ds. Mukti Jaya)

NO	KAB/KOTA	ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS
		15) Pengembangan ekonomi kreatif	Kec. Bengalon dan Kec. Sangatta Utara
		16) Pengembangan kelompok perhutanan sosial	KPHP Bengalon (Ds. Batu Ampar, Ds. Karangan Dalam, Ds. Karangan Ilir, Ds. Batu Lepoq, Ds. Rantau Pulung, Ds. Batu Ampar), KPHP Kelinjau (Ds. Miau Baru, Ds. Longnah, Ds. Senyiur, Ds. Longnah, Ds. Kelinjau Ulu, Ds. Bianhes), KPHP Santan (Ds. Suka Rahmat, Ds. Danau Redan), KPHP Manubar (Ds. Tepian Terap, Ds. Batu Lepoq)
		17) Pembangunan PLTS	Ds. Tanjung Mangkalihat Kec. Sandaran
		18) Peningkatan SDM pelaku UMKM	Kec. Sangatta Utara, Kec. Sangatta Selatan, Kec. Bengalon, Kec. Teluk Pandan, dan Kec. Rantau Pulung
		19) Pengembangan KEK MBTK	Kec. Kaliorang
5.	Berau	1) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Kec. Tanjung Redeb
		2) Peningkatan pelayanan kesehatan dan akreditasi Puskesmas	Kec. Gunung Tabur (2 Utama), Kec. Sambaliung (2 Utama), Kec. Teluk Bayur (1 Utama), Kec. Pulau Derawan (1 Utama, 1 Paripurna), Kec. Talisayan (1), Kec. Batu Putih (1), Kec. Biduk-biduk (1), Kec. Kelay (1 Paripurna)

NO	KAB/KOTA	ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS
		3) Peningkatan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat dan koordinasi penanganan paska bencana	Ds. Tanjung Batu, Kec. Teluk Bayur
		4) Penguatan jaringan internet	Kab. Berau
		5) Penanganan prasarana jalan dan jembatan	a. Rekonstruksi Jalan Tanjung Redeb – Talisayan b. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Ruas Jalan Tanjung Redeb – Talisayan c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan jembatan di Ruas Jalan Tanjung Redeb – Talisayan
		6) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder	Rehab DI. Merancang, Semurut - Buyung-Buyung, Biatan, Labanan
		7) Pembangunan pengaman pantai	Pantai Biduk-Biduk
		8) Pemberian bantuan stimulan rumah layak huni bagi keluarga pra sejahtera	Kec. Sambaliung dan Kec. Talisayan
		9) Peningkatan kualitas kawasan kumuh	Sei Kuyang Kec. Teluk Bayur, Sungai di Kampung Sambaliung Kec. Sambaliung
		10) Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman padi	Kec. Segah (Ds. Pandan Sari, Ds. Siduung Indah), Kec. Gunung Tabur (Ds. Tasuk, Ds. Melati Jaya), Kec. Sambaliung (Ds. Bangun Bebanir, Ds. Sukan Tengah)
		11) Penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan	a. Perikanan Tangkap: Kec. Batuputih (Ds.

NO	KAB/KOTA	ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS
			Balikukup), Kec. Biatan, Kec. P.Derawan, Kec. Biduk-biduk, Kec. Sambaliung, Kec. Talisayan b. Perikanan Budidaya: Kec. Maratua (Kp. Bohe Selian) dan Kec. Sambaliung (Ds. Pilanjau)
		12) Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan non sawit (kelapa dalam, kakao, lada, pala)	a. Kakao: Kec. Sambaliung (Ds. Pesayan, Ds. Sukan Tengah, Ds. Suaran), Kec. Kelay (Ds. Sido Bangen, Ds. Muara Lesan, Ds. Merasa) b. Lada: Kec. Gunung Tabur (Ds. Melati Jaya, Ds. Merancang Ilir, Ds. Merancang Ulu), Kec. Biatan (Ds. Biatan Lempake, Ds. Manunggal Jaya), Kec. Talisayan c. Pembangunan kolam perendaman lada: Ds. Merancang Kec. Gunung Tabur, Ds. Pilanjau Kec. Sambaliung, Ds. Mantaritip Kec. Sambaliung d. Pengadaan Pengering Lada Tenaga Matahari: Ds. Bukit Makmur Jaya Kec. Biatan e. Pengadaan Pengering biji Kakao Tenaga Matahari: Ds. Suaran Kec. Sambaliung, Ds. Long Lanuk Kec. Sambaliung
		13) Peningkatan produksi hasil peternakan sapi lokal melalui penyediaan sarana dan prasarana	Kec. Teluk Bayur (Ds. Labanan Makarti), Kec. Segah (Bukit Makmur), Kec. Talisayan, Kec. Sambaliung, Kec. Biatan
		14) Pengembangan kelompok perhutanan sosial	KPHP Berau Tengah (Kp. Merabu, Kp. Long

NO	KAB/KOTA	ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS
			Lanuk, Kp. Pesayan, Kp. Tabalar Hulu), Berau Barat (Kp. Long Lai, Kp. Long Ayat, Kp. Pandan Sari, Kp. Labanan Makarti, Kp. Merasa), Berau Pantai (Ds. Dumaring, Ds. Biatan Ulu, Ds. Biatan Ilir, Ds. Ampenmedang), Berau Utara (Ds. Pegat Betumbuk, Ds. Kampung Birang, Ds. Bakungan, Ds. Maluang)
		15) Pembangunan dan revitalisasi PLTS	Ds. Pegat Betumbuk (seberang) Pulau Derawan dan Ds. Long Sului Kec. Kelai
		16) Peningkatan SDM pelaku UMKM	Ds. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur
6.	PPU	1) Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan	Kec. Babulu, Kec. Penajam
		2) Peningkatan pelayanan kesehatan dan akreditasi Puskesmas	Puskesmas Waru, Puskesmas Petung, Puskesmas Babulu, Puskesmas Gunung Intan, Puskesmas Penajam, Puskesmas Sotek dan Puskesmas Maridan
		3) Peningkatan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat dan koordinasi penanganan paska bencana	Kel. Lawe-Lawe, Ds. Bukit Raya
		4) Penguatan jaringan internet	Kab. PPU
		5) Pembangunan pengaman pantai	Pantai Tanjung Jumlai
		6) Pemberian bantuan stimulan rumah layak huni bagi keluarga pra sejahtera	Kab. PPU

NO	KAB/KOTA	ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS
		7) Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman padi	Kec. Babulu (Ds. Babulu Laut, Ds. Gunung Makmur)
		8) Penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan	a. Perikanan Tangkap: Kec. Penajam (Ds. Pantai Lango) b. Perikanan Budidaya: Kec. Babulu (Ds. Babulu Laut)
		9) Sertifikasi pelaku usaha perikanan budidaya	Kec. Babulu (Ds. Babulu Laut), Kec. Waru (Ds. Api-Api), Kec. Penajam
		10) Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan non sawit (kelapa dalam, lada)	a. Kelapa Dalam: Kec. Penajam (Ds. Sotek, Ds. Kampung Baru) b. Lada: Kec. Sepaku (Ds. Semoi Dua, Ds. Argomulyo)
		11) Peningkatan produksi hasil peternakan sapi lokal melalui penyediaan sarana dan prasarana	Kec. Penajam (Ds. Gersik), Kec. Babulu (Ds. Gunung Intan)
		12) Pengembangan kelompok perhutanan sosial	KPHP Bongan (Kec. Penajam, Kel. Waru, Kel. Sotek, Ds. Bukit Subur, Kel. Sepan), KPHP Meratus (Ds. Karya Utama)
		13) Peningkatan SDM pelaku UMKM	Ds. Babulu Laut Kec. Babulu
		14) Pendampingan UKM pangan olahan	Ds. Api-api Kec. Waru
		15) Dukungan terhadap pembangunan IKN	Kab. PPU khususnya Kec. Sepaku
7.	MAHULU	1) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Kec. Long Hubung, Kec. Long Bangun, Long Pahangai, Kec. Mamahaq Besar

NO	KAB/KOTA	ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS
		2) Peningkatan pelayanan kesehatan dan akreditasi Puskesmas	Kec. Long Hubung (1 Paripurna), Kec. Laham (1 Utama)
		3) Peningkatan ekonomi desa melalui pengembangan BUMDes	Kec. Long Bagun (Ds. Long Hurai), Kec. Long Apari (Ds. Long Penaneh I, Ds. Long Penaneh II, Ds. Long Penaneh III), Kec. Laham (Ds. Nyaribungan), Kec. Long Pahangai (Ds. Long Pakaq), Kec. Long Hubung (Ds. Long Hubung Ulu, Ds. Sirau, Ds. Wana Pariq, Ds. Tri Pariq Makmur)
		4) Peningkatan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat dan koordinasi penanganan paska bencana	Kec. Ujoh Bilang
		5) Penguatan jaringan internet	Kab. Mahakam Ulu
		6) Penanganan prasarana jalan dan jembatan	a. Pembangunan Jalan Ujoh Bilang - Long Bagun - Long Pahangai b. Pembangunan Jalan Tering - Ujoh Bilang
		7) Pemberian bantuan stimulan rumah layak huni bagi keluarga pra sejahtera	Kab. Mahakam Ulu
		8) Pengembangan kelompok perhutanan sosial	KPHL Batu Rook (Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Ds. Noha Silat, Ds. Long Apari), KPHP Batu Ayau (Ds. Noha Silat, Ds. Long Tuyoq, Ds. Batu Keloq), KPHP Manoor Bulatn (Ds. Batoq Keloq, Ds. Lutan, Ds. Long Lurai, Ds. Mamahak, Ds. Matalibaq, Ds. Ujoh Bilang), KPHP Damai (Ds. Mamahak Teboq)

NO	KAB/KOTA	ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS
		9) Pembangunan PLTS	Ds. Matalibaq Kec. Long Hubung
		10) Peningkatan SDM pelaku UMKM	Ds. Memahak Teboq Kec. Long Hubung
8.	Balikpapan	1) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Kec. Balikpapan Timur, Kec. Balikpapan Utara, Kec. Balikpapan Selatan
		2) Peningkatan pelayanan kesehatan dan akreditasi Puskesmas	Kec. Balikpapan Timur (3 Utama), Kec. Balikpapan Selatan (1 Paripurna), Kec. Balikpapan Kota (1 Utama), Kec. Balikpapan Tengah (2 Paripurna), Kec. Balikpapan Utara (1 Paripurna), Kec. Balikpapan Barat (2 Utama)
		3) Penanganan prasarana jalan dan jembatan	a. Rekonstruksi Jalan: KM.5.5 Balikpapan - Kariangau b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan jembatan di Ruas Jl. Mulawarman (Balikpapan) c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan jembatan di Ruas Km.5.5 Balikpapan - Kariangau
		4) Peningkatan prasarana pengendali banjir	Depsos Atas
		5) Pemberian bantuan stimulan rumah layak huni bagi keluarga pra sejahtera	Kota Balikpapan
		6) Sertifikasi pelaku usaha olahan hasil perikanan	Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat
		7) Pengembangan kelompok perhutanan sosial	KPHL Balikpapan (Kel. Karang Joang, Kel.

NO	KAB/KOTA	ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS
			Lamaru, Kel. Manggar)
		8) Pengembangan industri Kariangau	Kawasan Industri Kariangau
		9) Dukungan terhadap pembangunan IKN	Kota Balikpapan
9.	Samarinda	1) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Kec. Samarinda Utara
		2) Peningkatan pelayanan kesehatan dan akreditasi Puskesmas	Kec. Palaran (2 Paripurna), Kec. Samarinda Ulu (3 Paripurna), Kec. Samarinda Utara (2 Paripurna), Kec. Samarinda Kota (1 Paripurna), Kec. Samarinda Seberang (1 Paripurna), Kec. Sei. Kunjang (2 Paripurna), Kec. Loa Janan Ilir (2 Utama)
		3) Peningkatan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat dan koordinasi penanganan paska bencana	Kel. Air Putih, Kel. Lok Bahu
		4) Penanganan prasarana jalan dan jembatan	a. Rekontruksi dan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Samarinda Seberang - Sanga sanga b. Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan: Pengadaan Lahan Ruas Jalan Sp. 4 Outer Ring Road IV - Bandara Samarinda Baru c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan jembatan di kewenangan UPTD Wilayah II PUPR d. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

NO	KAB/KOTA	ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS
		5) Peningkatan sarana dan prasarana air baku	Intake Bengkuring
		6) Peningkatan prasarana pengendali banjir	Sistem Karang Asam Besar, Karangmumus, Sentosa-Remaja-A.Yani (SEMANI), Loa Janan dan Rapak Dalam
		7) Peningkatan kualitas kawasan kumuh	Karang Mumus 2 (Kel. Temindung Permai, Kel. Sempaja Selatan), Sei. Kapih (Kel. Selili)
		8) Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman padi	Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara
		9) Peningkatan SDM pelaku UMKM	Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara
		10) Dukungan terhadap pembangunan IKN	Kota Samarinda
10.	Bontang	1) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Kec. Bontang Selatan
		2) Peningkatan pelayanan kesehatan dan akreditasi Puskesmas	Kec. Bontang Selatan (1 Utama, 2 Paripurna), Kec. Bontang Utara (2 Paripurna), Kec. Bontang Barat (1 Paripurna)
		3) Peningkatan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat dan koordinasi penanganan paska bencana	Kel. Bontang Lestari, Kel. Guntung
		4) Peningkatan infrastruktur	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal type B Bontang
		5) Peningkatan prasarana pengendali banjir	Normalisasi Sungai Bontang
		6) Pemberian bantuan stimulan rumah layak huni bagi keluarga pra sejahtera	Kampung Pesisir (Kec. Bontang Selatan), Kampung Kuala Bahari (Kec. Bontang Utara),

NO	KAB/KOTA	ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS
			Tanjung Limau (Kec. Bontang Utara)
		7) Penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan	a. Perikanan Tangkap: Berbas Pantai Kec. Bontang Selatan (Ds.Tanjung Laut Indah) b. Perikanan Budidaya: Kec. Bontang Selatan (Kel. Bontang Lestari, Kel. Tanjung Laut Indah)
		8) Sertifikasi pelaku usaha perikanan budidaya	Kec. Bontang Selatan (Kel. Bontang Lestari, Kel. Tanjung Laut Indah)
		9) Pengembangan ekonomi kreatif	Kel. Lok Tuan Kec. Bontang Utara
		10) Pengembangan kelompok perhutanan sosial	KPHP Santan (Kota Bontang)
		11) Pendampingan UKM pangan olahan rumput laut	Kel. Bontang Kuala
		12) Penyediaan infrastruktur air bersih	Kanaan Kec. Bontang Barat

BAB VI
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 ini berisikan program dan kegiatan prioritas Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 beserta pendanaannya yang mengimplementasikan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur secara sinergis. Pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya memiliki fokus/tema pembangunan yang berbeda. Strategi tahunan ini diterapkan dengan harapan agar pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilaksanakan secara optimal, maksimal, serta mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Tema yang diusung pada pelaksanaan pembangunan periode tahun 2023 adalah *"Peningkatan Produktivitas Guna Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Kalimantan Timur yang Berdaulat"*.

Guna merealisasikan fokus/tema pembangunan yang telah dicanangkan, perencana pembangunan daerah harus merumuskan program dan kegiatan prioritas daerah sebagai *ultimate job* dari pelaksanaan pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan ini merupakan tindakan untuk mencapai visi dan misi gubernur, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), serta penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, penyusunan program dan kegiatan pembangunan ini melibatkan *stakeholders* yang bersangkutan karena subyek pelaksana program dan kegiatan adalah unsur-unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki kepentingan di dalamnya dengan tetap melibatkan masyarakat secara aktif.

Agar hasil pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat menunjukkan capaian kinerja masing-masing prioritas daerah maka dalam setiap arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus memberikan arahan dalam penentuan program dan kegiatan yang tepat. Apabila capaian kinerja suatu program atau kegiatan yang telah direncanakan tidak memberikan peningkatan *outcome* yang positif, pada periode selanjutnya harus dilakukan evaluasi serta kajian ulang atas perencanaan program dan kegiatan prioritas yang tidak tepat sasaran.

Perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 merujuk pada program prioritas dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sehingga alur dokumen RKPD mampu selaras dan tidak tumpang tindih dengan RPJMD. Perencanaan pada dokumen RKPD Tahun 2023, sesuai dengan peruntukannya, dirancang berdasar perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor dalam Perangkat Daerah (PD) provinsi maupun kabupaten/kota. Berbagai bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan ini akan dijabarkan dalam indikator kinerja program sehingga dapat dilihat penentuan target capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkan. Poin terpenting yang harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah kemampuan pendanaan (pagu indikatif) Provinsi Kalimantan Timur. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis PD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

6.1 Pagu Indikatif Perangkat Daerah

Penyusunan kerangka pendanaan daerah pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 (untuk keperluan Konsultasi Publik) masih menggunakan proyeksi yang ditetapkan di dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Berdasarkan pendekatan tersebut, Anggaran belanja Pemerintah dalam RKPD tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 11,664,354,481,538,- dengan rincian pembagian pagu indikatif per-Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel VI.1
Pagu Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Perangkat daerah	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2,304,884,114,369
2	Dinas Kesehatan	153,088,290,000
3	RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda	595,315,219,000
4	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	359,701,030,000
5	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	61,619,325,000
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	1,363,459,679,000
7	Satuan Polisi Pamong Praja	21,442,384,000
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17,203,039,000

No	Perangkat daerah	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)
9	Dinas Sosial	64,860,169,000
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	59,451,868,000
11	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	23,566,115,000
12	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	113,724,778,915
13	Dinas Lingkungan Hidup	34,138,313,000
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	31,150,092,000
15	Dinas Perhubungan	72,539,547,000
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	60,143,532,000
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28,648,663,000
17	Dinas Pemuda dan Olah Raga	77,339,821,000
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	27,673,881,000
19	Dinas Kelautan Dan Perikanan	77,854,238,000
20	Dinas Pariwisata	30,475,357,000
21	Dinas Perkebunan	53,197,790,000
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	69,247,398,646
23	Dinas Kehutanan	432,031,495,000
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	86,382,432,000
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	48,739,761,000
26	Sekretariat Daerah	293,272,025,000
27	Sekretariat DPRD	200.000.000.000
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	54,381,973,000
29	Badan Pendapatan Daerah	271,575,433,000
30	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4,267,804,583,608
31	Badan Kepegawaian Daerah	36,152,880,000
32	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	33,804,927,000
33	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	19,727,019,000
34	Badan Penghubung Provinsi	20,046,709,000
35	Inspektorat	38,960,600,000
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35,750,000,000
	Jumlah	11,539,354,481,538
	Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal BUMD)	125.000.000.000
	Jumlah Belanja	11,664,354,481,538

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 akan menyajikan daftar program dan kegiatan yang meliputi nama program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja program *(outcome)*, target setiap program dan kegiatan prioritas, pendanaan yang dibutuhkan, serta instansi/dinas/PD penanggungjawab program dan kegiatan prioritas. Prioritas Pembangunan menitikberatkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (meliputi urusan: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial) dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar (meliputi urusan: Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan). Kemudian, Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi 8 urusan, yaitu Kelautan dan perikan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.

6.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah

Data dan informasi rencana kerja Perangkat Daerah pada tahap rancangan awal telah di-*input* melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hal ini dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah melalui tautan https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah. Pengambilan data bersumber dari Menu “Renja” pada aplikasi SIPD di tahap Penetapan RKPD, dimana untuk indikator dan target kinerja Program dan Kegiatan yang tercantum di dalamnya berasal dari Menu “RPJMD” dan Menu “RENSTRA” yang didasarkan pada Perubahan RPJMD dan Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah.

Tabel VI.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Belanja Langsung Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			2,227,182,112,449			2,653,311,435,838	
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	1,194,754,283,961		100 %	1,117,836,592,339	
1	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokuman Perencanaan	100 %	5,294,466,573		100 %	5,823,913,230	
1	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	1,800,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	1,980,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	239 Dokumen	475,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	239 Dokumen	522,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	239 Dokumen	475,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	239 Dokumen	522,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	239 Dokumen	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	239 Dokumen	550,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	239 Dokumen	490,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	239 Dokumen	539,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	239 Laporan	470,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	239 Laporan	517,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	239 Laporan	1,084,466,573	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	239 Laporan	1,192,913,230	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	990,009,431,860		12 Bulan	866,462,177,065	
1	1	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/ Bulan	984,918,064,860	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110 Orang/ Bulan	858,853,445,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	2,449,206,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	3,840,848,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	1	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	114,249,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	136,674,395	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	50 Dokumen	250,642,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Dokumen	550,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2,277,270,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	3,081,209,670	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Data Aset	12 Bulan	576,550,000		12 Bulan	640,198,240	
1	1	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	576,550,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	640,198,240	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	8,374,242,930		12 Bulan	9,620,018,298	
1	1	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	3,108,592,930	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	3,827,449,923	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1000 Orang	5,265,650,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000 Orang	5,792,568,375	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	3,135,093,000		12 Bulan	3,790,939,282	
1	1	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	99,978,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	226,982,796	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1,297,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	1,143,120,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	500 Paket	514,452,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Paket	566,333,286	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	99,983,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	156,720,300	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,123,680,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1,697,782,900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	16,864,928,400		12 Bulan	18,449,020,535	
1	1	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	75 Unit	6,434,617,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Unit	7,078,079,745	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	800,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Paket	550,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	7,484,948,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	8,233,443,790	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2,145,362,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	2,587,497,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	166,187,476,908		12 Bulan	207,615,903,906	
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	142,972,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24,081,697,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	3,241,347,413	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	272,888,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	300,300,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	141,797,891,808	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	203,931,283,993	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	1,419,680,290		12 Bulan	3,403,132,893	
1	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	75 Unit	742,494,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Unit	824,996,040	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	217,532,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	547,827,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	1	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	309,673,890	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	1,865,317,300	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	149,980,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	164,992,053	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	1.14		Fasilitasi Keprotokolan	Tersedianya Fasilitas Dan Kordinasi Yang Baik Dalam Pelaksanaan Acara	100 %	2,892,414,000		100 %	2,031,288,890	
1	1	1	1.14	1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	12 Laporan	2,892,414,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	2,031,288,890	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,016,911,010,088		85 %	1,527,206,343,259	
1	1	2	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Laporan Kegiatan	30 Laporan	578,646,863,945		30 Laporan	1,107,773,505,249	
1	1	2	1.01	1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	23,953,540,350	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	110,777,700,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	1	2	1.01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	15 Ruang	15,089,561,128	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Ruang	27,103,204,128	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	1.01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Sekolah	3,210,927,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Sekolah	3,532,019,700	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	1.01	4	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	11 Sekolah	3,796,675,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Sekolah	6,858,556,100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	1.01	5	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun	9 Sekolah	5,157,008,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Sekolah	5,672,708,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	1	2	1.01	6	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	10 Sekolah	5,718,025,999	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Sekolah	6,289,828,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	1.01	7	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	15 Sekolah	3,580,818,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Sekolah	17,573,859,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	1.01	8	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Dibangun	10 Sekolah	992,650,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Sekolah	1,091,915,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	1.01	10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	7 Sekolah	2,396,116,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Sekolah	2,635,727,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan,			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Semua Kelurahan			
1	1	2	1.01	11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Sekolah	390,879,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Sekolah	484,667,700	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	1	2	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13 Sekolah	4,607,670,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Sekolah	35,957,816,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	1.01	17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	883,220,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	971,542,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	1	2	1.01	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17 Sekolah	36,816,713,868	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Sekolah	16,970,091,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	1.01	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Sekolah	2,479,161,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Sekolah	2,727,077,100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	1	2	1.01	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Sekolah	175,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Sekolah	282,799,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	1	2	1.01	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Sekolah	1,016,801,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Sekolah	1,118,481,100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	1	2	1.01	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Sekolah	318,639,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Sekolah	350,502,900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	1	2	1.01	25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Sekolah	720,386,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Sekolah	792,424,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	1	2	1.01	28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	779,431,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Ruang	857,374,100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	1	2	1.01	30	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Sekolah	455,334,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Sekolah	500,867,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	1.01	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	8 Sekolah	5,258,986,544	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Sekolah	34,957,411,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	76871 Peserta didik	247,554,312,252	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76871 Peserta didik	705,072,500,352	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	1.01	46	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	219 Paket	14,457,158,225	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	219 Paket	26,075,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	229 Satuan Pendidikan	3,242,257,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	229 Satuan Pendidikan	6,010,424,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3600 Peserta Didik	4,238,493,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3600 Peserta Didik	8,411,375,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	1	2	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 Orang	3,569,562,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000 Orang	11,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	25 Satuan Pendidikan	13,218,643,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Satuan Pendidikan	1,325,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	1.01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	229 Satuan Pendidikan	146,835,395,079	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	229 Satuan Pendidikan	27,271,630,769	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	1.01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	2000 Orang	27,733,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2000 Orang	45,100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Laporan Kegiatan	20 Laporan	409,698,386,990		20 Laporan	297,296,257,685	
1	1	2	1.02	1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	10 Unit	12,947,665,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	27,500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	1	2	1.02	2	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang	14,473,296,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Ruang	6,600,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	1	2	1.02	4	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	20 Ruang	4,865,384,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Ruang	27,500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	1.02	5	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	4 Ruang	4,000,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Ruang	4,400,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	1	2	1.02	6	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	1,962,191,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Ruang	2,200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	1	2	1.02	7	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	1,000,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Ruang	1,100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	1	2	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	20 Unit	27,723,111,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Unit	11,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	1.02	15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	22 Ruang	2,547,934,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22 Ruang	13,200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	1	2	1.02	16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang	2,000,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Ruang	2,200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	1	2	1.02	17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	4 Ruang	2,200,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Ruang	2,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	1	2	1.02	18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	1,000,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Ruang	1,100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	1.02	23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	6 Unit	1,399,300,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Unit	1,100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	1	2	1.02	33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	40 Paket	55,410,030,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Paket	66,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	78.456 Peserta didik	96,354,984,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78.456 Peserta didik	5,500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	1.02	39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	221 Satuan Pendidikan	5,536,482,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	221 Satuan Pendidikan	11,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	221 Satuan Pendidikan	299,996,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	221 Satuan Pendidikan	3,300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	11,058,719,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000 Peserta Didik	8,250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1200 Orang	3,607,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1200 Orang	14,300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	1.02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	221 Satuan Pendidikan	134,805,543,290	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	221 Satuan Pendidikan	41,746,257,685	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	1.02	47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	2200 Orang	26,506,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2200 Orang	47,300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	28,565,759,153		80 %	122,136,580,325	
1	1	2	1.03	2	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	3 Ruang	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Ruang	1,100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	1.03	18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang	2,192,099,906	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	5 Ruang	2,411,310,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	1	2	1.03	19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang	1,176,779,938	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Ruang	1,294,458,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	1	2	1.03	20	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang	181,649,934	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Ruang	199,815,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	1.03	21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang	428,989,838	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Ruang	471,889,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	1.03	23	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Unit	718,199,998	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	790,020,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	1.03	24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	5 Unit	5,645,789,908	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	5,990,369,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	1	2	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2498 Peserta Didik	1,805,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2498 Peserta Didik	97,887,050,732	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	3,062,057,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Peserta Didik	3,368,262,871	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	633,007,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Orang	3,300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	1.03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	34 Satuan Pendidikan	8,389,685,631	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34 Satuan Pendidikan	1,990,905,722	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	1.03	53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	300 Orang	3,332,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Orang	3,332,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	86 %	11,516,818,400		86 %	7,168,500,240	
1	1	3	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	86 %	8,283,600,000		86 %	3,611,960,000	
1	1	3	1.01	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	1 Dokumen	2,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2,200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	3	1.01	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya	219 Orang	6,283,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	219 Orang	1,411,960,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	3	1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	86 %	3,233,218,400		86 %	3,556,540,240	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	1	3	1.02	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	1 Dokumen	2,180,735,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2,398,808,940	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	3	1.02	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	1 Dokumen	1,052,483,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1,157,731,300	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	100 %	4,000,000,000		100 %	1,100,000,000	
1	1	4	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Presentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana	100 %	4,000,000,000		100 %	1,100,000,000	
1	1	4	1.01	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	10 Laporan	4,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	1,100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			8,437,625,500			11,982,723,500	
2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	85 %	2,181,203,500		85 %	2,445,723,500	
2	22	2	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kesenian trasional yang dilestarikan	60 %	1,764,352,500		60 %	1,100,000,000	
2	22	2	1.01	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	50 Objek	1,764,352,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Objek	1,100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	2	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Meningkatnya pengetahuan tentang kesenian trasional	70 %	416,851,000		70 %	1,345,723,500	
2	22	2	1.02	3	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	116 Sertifikat	416,851,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	116 Sertifikat	1,345,723,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	65 %	2,960,487,000		65 %	4,180,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	2 2	3	1.0 1		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengetahuan tentang kesenian trasional	70 %	2,960,487,000		70 %	4,180,000,000	
2	2 2	3	1.0 1	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	400 Orang	1,094,007,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 Orang	1,760,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	2 2	3	1.0 1	2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	100 Sertifikat	891,140,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Sertifikat	1,100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	2 2	3	1.0 1	3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	975,340,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Lembaga	1,320,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	2 2	4			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina	75 %	768,067,000		75 %	1,430,000,000	
2	2 2	4	1.0 1		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Presentase jumlah sejarah lokal yang dibina	70 %	768,067,000		70 %	1,430,000,000	
2	2 2	4	1.0 1	3	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	100 Dokumen	768,067,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Dokumen	1,430,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	2 2	5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	55 %	2,122,918,000		55 %	3,267,000,000	
2	2 2	5	1.0 1		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan dan Dikelola	70 %	512,350,000		70 %	1,320,000,000	
2	2 2	5	1.0 1	2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	12 Objek	512,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Objek	1,320,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	2 2	5	1.0 2		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan dan Dikelola	70 %	1,610,568,000		70 %	1,947,000,000	
2	2 2	5	1.0 2	3	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	40 Objek	795,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Objek	1,320,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	2 2	5	1.0 2	4	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	220 Orang	815,168,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	220 Orang	627,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	2 2	6			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	45 %	404,950,000		45 %	660,000,000	
2	2 2	6	1.0 1		Pengelolaan Museum Provinsi	Persentase Pengelolaan Museum Provinsi	70 %	404,950,000		70 %	660,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	2 2	6	1.0 1	3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	404,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	660,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			7,004,685,288			2,155,120,250	
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	7,004,685,288		100 %	2,155,120,250	
1	1	1	1.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	207,960,000		12 Bulan	250	
1	1	1	1.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	207,960,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	250	UPTD Taman Budaya
1	1	1	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	820,568,600		12 Bulan	459,800,000	
1	1	1	1.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	53,409,600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	60,500,000	UPTD Taman Budaya
1	1	1	1.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	300,159,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	82,500,000	UPTD Taman Budaya
1	1	1	1.0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Paket	8,800,000	UPTD Taman Budaya
1	1	1	1.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	459,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	308,000,000	UPTD Taman Budaya
1	1	1	1.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	923,708,000		12 Bulan	79,200,000	
1	1	1	1.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	923,708,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	79,200,000	UPTD Taman Budaya
1	1	1	1.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	1,818,298,688		12 Bulan	1,396,120,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6,200,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	6,820,000	UPTD Taman Budaya
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	120,494,800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	150,700,000	UPTD Taman Budaya
1	1	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	85,400,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	94,600,000	UPTD Taman Budaya
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,606,203,888	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	1,144,000,000	UPTD Taman Budaya
1	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	3,234,150,000		12 Bulan	220,000,000	
1	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	169,704,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	77,000,000	UPTD Taman Budaya
1	1	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	3,064,446,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	143,000,000	UPTD Taman Budaya
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			5,409,460,000			3,047,000,000	
2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	85 %	5,409,460,000		85 %	3,047,000,000	
2	22	2	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kesenian trasional yang dilestarikan	60 %	2,000,000,000		60 %	1,925,000,000	
2	22	2	1.01	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	40 Objek	2,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Objek	1,925,000,000	UPTD Taman Budaya
2	22	2	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Meningkatnya pengetahuan tentang kesenian trasional	70 %	3,409,460,000		70 %	1,122,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	2 2	2	1.0 2	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	12 Objek	3,409,460,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Objek	1,122,000,000	UPTD Taman Budaya
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			7,777,117,152			58,854,636,257	
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	5,182,603,152		100 %	35,203,449,214	
1	1	1	1.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	148,200,000		12 Bulan	225,495,600	
1	1	1	1.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	148,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	225,495,600	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
1	1	1	1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	83,324,000		12 Bulan	116,841,230	
1	1	1	1.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	83,324,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Paket	116,841,230	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
1	1	1	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	3,435,176,000		12 Bulan	13,173,715,461	
1	1	1	1.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	16,690,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	18,149,954	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
1	1	1	1.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	468,751,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Paket	11,327,379,257	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
1	1	1	1.0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	130 Paket	65,715,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130 Paket	153,670,000	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
1	1	1	1.0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,920,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	3,660,250	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
1	1	1	1.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2,882,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1,670,856,000	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
1	1	1	1.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	131,163,000		12 Bulan	168,746,025	
1	1	1	1.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	131,163,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	168,746,025	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	1,044,319,152		12 Bulan	20,954,670,618	
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	4,719,000	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	263,442,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	20,204,683,349	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	770,877,152	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	745,268,269	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
1	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	340,421,000		12 Bulan	563,980,280	
1	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	71,421,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	79,101,600	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
1	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	27,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	30,247,800	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
1	1	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	242,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	454,630,880	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2,594,514,000		85 %	23,651,187,043	
1	1	2	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	1,384,182,000		100 %	8,621,250,000	
1	1	2	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 Orang	1,384,182,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000 Orang	8,621,250,000	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
1	1	2	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	1,210,332,000		80 %	15,029,937,043	
1	1	2	1.03	46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	239 Satuan Pendidikan	1,210,332,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	239 Satuan Pendidikan	15,029,937,043	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			5,355,200,000			4,367,000,000	
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	5,355,200,000		100 %	4,367,000,000	
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	218,180,000		12 Bulan	385,000,000	
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	218,180,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	385,000,000	UPTD Museum Negeri Mulawarman
1	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	14,700,000		12 Bulan	55,000,000	
1	1	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	14,700,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Paket	55,000,000	UPTD Museum Negeri Mulawarman
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	764,378,180		12 Bulan	726,000,000	
1	1	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	64,828,180	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	110,000,000	UPTD Museum Negeri Mulawarman
1	1	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	70,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Paket	77,000,000	UPTD Museum Negeri Mulawarman
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	90 Paket	15,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Paket	99,000,000	UPTD Museum Negeri Mulawarman
1	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	614,550,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	440,000,000	UPTD Museum Negeri Mulawarman
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	2,460,067,820		12 Bulan	2,816,000,000	
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	11,000,000	UPTD Museum Negeri Mulawarman
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	706,666,800	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	12 Laporan	990,000,000	UPTD Museum Negeri Mulawarman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	1	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	557,191,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	165,000,000	UPTD Museum Negeri Mulawarman
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,186,210,020	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	1,650,000,000	UPTD Museum Negeri Mulawarman
1	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	1,897,874,000		12 Bulan	385,000,000	
1	1	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	180,874,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	165,000,000	UPTD Museum Negeri Mulawarman
1	1	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1,717,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	220,000,000	UPTD Museum Negeri Mulawarman
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			2,128,000,000			3,732,520,000	
2	22	6			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	45 %	2,128,000,000		45 %	3,732,520,000	
2	22	6	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	Meningkatnya Mutu dan Kapasitas SDM Permuseuman	12 Bulan	2,128,000,000		12 Bulan	3,732,520,000	
2	22	6	1.01	1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	40 Unit	552,564,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Unit	525,756,000	UPTD Museum Negeri Mulawarman
2	22	6	1.01	2	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	50 Orang	328,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	1,980,000,000	UPTD Museum Negeri Mulawarman
2	22	6	1.01	3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	5 Unit	987,436,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	876,260,000	UPTD Museum Negeri Mulawarman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	2 2	6	1.0 1	4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	2 Unit	260,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	350,504,000	UPTD Museum Negeri Mulawarman
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			2,822,685,536			2,357,988,403	
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	2,822,685,536		100 %	2,357,988,403	
1	1	1	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	711,000,000		12 Bulan	623,382,210	
1	1	1	1.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	711,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	623,382,210	Dinas Pendidikan Wilayah I
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	1	1	1.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	1,363,021,000		12 Bulan	940,500,000	
1	1	1	1.0 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	34 Unit	1,363,021,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34 Unit	940,500,000	Dinas Pendidikan Wilayah I
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	1	1	1.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	670,238,536		12 Bulan	741,856,924	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	153,385,300	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	168,782,900	Dinas Pendidikan Wilayah I
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	516,853,236	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	573,074,024	Dinas Pendidikan Wilayah I
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	78,426,000		12 Bulan	52,249,269	
1	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	78,426,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	52,249,269	Dinas Pendidikan Wilayah I
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			1,775,000,000			1,952,500,000	
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	1,408,997,842		100 %	632,500,000	
1	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	79,500,000		12 Bulan	88,000,000	
1	1	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	79,500,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Paket	88,000,000	Dinas Pendidikan Wilayah II
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	92,662,000		12 Bulan	165,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	1	1	1.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	92,662,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	165,000,000	Dinas Pendidikan Wilayah II
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	1,236,835,842		12 Bulan	379,500,000	
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	93,658,500	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	137,500,000	Dinas Pendidikan Wilayah II
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,143,177,342	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	242,000,000	Dinas Pendidikan Wilayah II
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	366,002,158		85 %	1,320,000,000	
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	366,002,158		100 %	1,320,000,000	
1	1	2	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	366,002,158	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Orang	1,320,000,000	Dinas Pendidikan Wilayah II
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			3,595,929,528			3,956,816,600	
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	2,524,840,528		100 %	2,777,616,600	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	99,984,000		12 Bulan	110,000,000	
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	99,984,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	110,000,000	Dinas Pendidikan Wilayah III
1	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	79,805,000		12 Bulan	88,000,000	
1	1	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	79,805,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Paket	88,000,000	Dinas Pendidikan Wilayah III
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	830,000,000		12 Bulan	913,000,000	
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	30,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Paket	33,000,000	Dinas Pendidikan Wilayah III
1	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	800,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	880,000,000	Dinas Pendidikan Wilayah III
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	1,320,092,328		12 Bulan	1,452,116,600	
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	79,996,800	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	88,000,000	Dinas Pendidikan Wilayah III
1	1	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	638,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	701,800,000	Dinas Pendidikan Wilayah III
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	602,095,528	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	662,316,600	Dinas Pendidikan Wilayah III
1	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	194,959,200		12 Bulan	214,500,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	94,998,200	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	104,500,000	Dinas Pendidikan Wilayah III
1	1	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	99,961,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	110,000,000	Dinas Pendidikan Wilayah III
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,071,089,000		85 %	1,179,200,000	
1	1	2	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	399,885,000		100 %	440,000,000	
1	1	2	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	249,963,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250 Peserta Didik	275,000,000	Dinas Pendidikan Wilayah III
1	1	2	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	149,922,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	165,000,000	Dinas Pendidikan Wilayah III
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	599,210,000		100 %	660,000,000	
1	1	2	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	249,350,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250 Peserta Didik	275,000,000	Dinas Pendidikan Wilayah III
1	1	2	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	150,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	165,000,000	Dinas Pendidikan Wilayah III
1	1	2	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	15 Satuan Pendidikan	199,860,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Satuan Pendidikan	220,000,000	Dinas Pendidikan Wilayah III
1	1	2	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Presentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	80 %	71,994,000		80 %	79,200,000	
1	1	2	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	71,994,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Peserta Didik	79,200,000	Dinas Pendidikan Wilayah III

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			2,944,442,856			3,239,043,505	
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	1,577,851,856		100 %	1,735,791,563	
1	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	33,800,000		12 Bulan	37,237,200	
1	1	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	14 Paket	33,800,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Paket	37,237,200	Dinas Pendidikan Wilayah IV
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	789,225,000		12 Bulan	868,147,520	
1	1	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	25,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Paket	27,500,020	Dinas Pendidikan Wilayah IV
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	764,225,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	840,647,500	Dinas Pendidikan Wilayah IV
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	53,640,000		12 Bulan	59,004,000	
1	1	1	1.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	53,640,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	59,004,000	Dinas Pendidikan Wilayah IV
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan,			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Semua Kelurahan			
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	677,748,856		12 Bulan	745,530,843	
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	11,000,000	Dinas Pendidikan Wilayah IV
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	74,204,392	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	81,626,160	Dinas Pendidikan Wilayah IV
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	1	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	34,906,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	38,396,732	Dinas Pendidikan Wilayah IV
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	558,638,464	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	614,507,951	Dinas Pendidikan Wilayah IV
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	23,438,000		12 Bulan	25,872,000	
1	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	4,320,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	4,752,000	Dinas Pendidikan Wilayah IV
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	1	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	19,118,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	21,120,000	Dinas Pendidikan Wilayah IV

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,366,591,000		85 %	1,503,251,942	
1	1	2	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	687,437,000		100 %	756,180,858	
1	1	2	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	487,437,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Peserta Didik	536,180,858	Dinas Pendidikan Wilayah IV
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	1	2	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	200,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	220,000,000	Dinas Pendidikan Wilayah IV
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	679,154,000		100 %	747,071,084	
1	1	2	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	479,154,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Peserta Didik	527,071,084	Dinas Pendidikan Wilayah IV
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	1	2	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	200,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	220,000,000	Dinas Pendidikan Wilayah IV
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			4,184,587,822			4,593,500,000	
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas	100 %	2,634,812,822		100 %	2,898,500,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
					PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pendidikan						
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	100,000,000		12 Bulan	110,000,000	
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	100,000,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	110,000,000	Dinas Pendidikan Wilayah V
1	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualtias Pelayanan Dan Kerja Pegawai	12 Bulan	269,979,000		12 Bulan	297,000,000	
1	1	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	69,979,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Paket	77,000,000	Dinas Pendidikan Wilayah V
1	1	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	200,000,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	220,000,000	Dinas Pendidikan Wilayah V
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	1,035,000,000		12 Bulan	1,138,500,000	
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	35 Paket	35,000,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 Paket	38,500,000	Dinas Pendidikan Wilayah V
1	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,000,000,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1,100,000,000	Dinas Pendidikan Wilayah V
1	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	500,000,000		12 Bulan	550,000,000	
1	1	1	1.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	500,000,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	550,000,000	Dinas Pendidikan Wilayah V
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	579,833,822		12 Bulan	638,000,000	
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	40,000,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	44,000,000	Dinas Pendidikan Wilayah V
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	69,989,950	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	77,000,000	Dinas Pendidikan Wilayah V
1	1	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20,000,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	22,000,000	Dinas Pendidikan Wilayah V
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	449,843,872	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	495,000,000	Dinas Pendidikan Wilayah V

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	150,000,000		12 Bulan	165,000,000	
1	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	150,000,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	165,000,000	Dinas Pendidikan Wilayah V
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	1,549,775,000		85 %	1,695,000,000	
1	1	2	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	799,775,000		100 %	880,000,000	
1	1	2	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	300,000,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Peserta Didik	330,000,000	Dinas Pendidikan Wilayah V
1	1	2	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	299,775,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	330,000,000	Dinas Pendidikan Wilayah V
1	1	2	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	12 Satuan Pendidikan	200,000,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Satuan Pendidikan	220,000,000	Dinas Pendidikan Wilayah V
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	750,000,000		100 %	815,000,000	
1	1	2	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	250,000,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Peserta Didik	265,000,000	Dinas Pendidikan Wilayah V
1	1	2	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	300,000,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	330,000,000	Dinas Pendidikan Wilayah V
1	1	2	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	12 Satuan Pendidikan	200,000,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Satuan Pendidikan	220,000,000	Dinas Pendidikan Wilayah V
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			4,744,784,876			5,219,263,424	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	2,500,884,876		100 %	1,818,294,424	
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai	12 Bulan	194,770,000		12 Bulan	220,000,000	
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	194,770,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	220,000,000	Dinas Pendidikan Wilayah VI
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	1,219,542,000		12 Bulan	952,354,112	
1	1	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3,977,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	16,302,000	Dinas Pendidikan Wilayah VI
1	1	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket	8,365,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Paket	20,236,112	Dinas Pendidikan Wilayah VI
1	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,207,200,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	915,816,000	Dinas Pendidikan Wilayah VI
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	952,476,876		12 Bulan	498,005,932	
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7,500,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	6,479,000	Dinas Pendidikan Wilayah VI
1	1	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	608,802,500	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	345,435,932	Dinas Pendidikan Wilayah VI
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	336,174,376	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	146,091,000	Dinas Pendidikan Wilayah VI
1	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan	12 Bulan	134,096,000		12 Bulan	147,934,380	
1	1	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	104,996,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	113,971,880	Dinas Pendidikan Wilayah VI
1	1	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	29,100,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	33,962,500	Dinas Pendidikan Wilayah VI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	85 %	2,243,900,000		85 %	3,400,969,000	
1	1	2	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Program Pendidikan	100 %	2,243,900,000		100 %	3,400,969,000	
1	1	2	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	34 Satuan Pendidikan	2,243,900,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34 Satuan Pendidikan	3,400,969,000	Dinas Pendidikan Wilayah VI
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			3,069,289,940			1,815,263,408	
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	3,069,289,940		100 %	1,815,263,408	
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	3,069,289,940		12 Bulan	1,815,263,408	
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,069,289,940	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	1,815,263,408	SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			2,453,193,796			2,453,193,796	
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	2,453,193,796		100 %	2,453,193,796	
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	2,453,193,796		12 Bulan	2,453,193,796	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,453,193,796	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	2,453,193,796	SMK-SPP Negeri Samarinda
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			15,999,999,626			16,000,000,000	
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan	100 %	15,999,999,626		100 %	16,000,000,000	
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	12 Bulan	15,999,999,626		12 Bulan	16,000,000,000	
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15,999,999,626	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	16,000,000,000	SMAN Khusus Olahragawan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			117,588,290,000			135,107,640,000	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan	85 %	43,482,031,900		85 %	47,952,840,000	
1	2	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	1,647,540,000		100 %	1,450,000,000	
1	2	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	1,172,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	10 Dokumen	1,100,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	475,540,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	8 Laporan	350,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	34,129,021,400		100 %	38,868,840,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	194 Orang/Bulan	33,760,181,400	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	194 Orang/Bulan	38,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	318,840,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	12 Dokumen	318,840,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	1 Laporan	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	10,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	1 Laporan	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	20,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksnaan kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	100 %	407,653,000		100 %	594,000,000	
1	2	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	157,653,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	1 Paket	158,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	250,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	50 Orang	436,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3,167,817,500		100 %	2,840,000,000	
1	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	1 Paket	40,000,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	873,802,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	5 Paket	700,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	60,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	40,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	12 Dokumen	40,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2,164,015,500	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	12 Laporan	2,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang diadakan	1 Laporan	500,000,000		1 Laporan	500,000,000	
1	2	1	1.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	500,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	2 unit	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	3,130,000,000		12 Bulan	3,130,000,000	
1	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	12 Laporan	20,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	710,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	12 Laporan	710,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,400,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	12 Laporan	2,400,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang dan Jasa Milik Daerah	1 Laporan	500,000,000		1 Laporan	570,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 unit	175,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	25 unit	180,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	150,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	1 unit	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	175,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	1 unit	190,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan oleh Kab/Kota	100 %	72,656,130,100		100 %	85,992,800,000	
1	2	2	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial	85 %	933,288,000		85 %	4,885,000,000	
1	2	2	1.01	6	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak. Gugus Pulau. Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine . dll) yang Dilakukan Pengembangan	1 Layanan	33,600,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	1 Layanan	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang TerpeliharaSesuai Standar	25 unit	98,410,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	25 unit	165,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	506,750,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	2 Dokumen	670,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	10 Paket	294,528,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	10 Paket	3,900,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya layanan Kesehatan Perorangan dan layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar oleh Kab/Kota	2 Layanan	71,222,742,100		2 Layanan	80,557,800,000	
1	2	2	1.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	833578 Orang	193,456,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	833578 Orang	200,000,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	2	2	1.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	75 Orang	371,751,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	75 Orang	650,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2 Dokumen	480,810,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	2 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	482,850,900	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	1 Dokumen	6,750,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	367,149,100	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	1 Dokumen	264,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	375,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	580,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	1 Dokumen	505,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	1,049,435,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	2 Dokumen	1,300,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	224,776,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	1 Dokumen	188,800,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	84,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	65,016,009,600	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	1 Dokumen	68,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.02	18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	248,311,500	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	2 Dokumen	838,558,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	2 Dokumen	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.02	20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	2 Dokumen	161,442,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	2 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.02	21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	8 Dokumen	96,600,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	8 Dokumen	100,000,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	2	2	1.02	23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia. Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5 Unit	56,645,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	5 Unit	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.02	25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12 Paket	20,793,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	12 Paket	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.02	27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	575,155,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	1 Dokumen	400,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	100 %	458,100,000		100 %	450,000,000	
1	2	2	1.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3 Dokumen	458,100,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	3 Dokumen	450,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan. Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit	42,000,000		1 Unit	100,000,000	
1	2	2	1.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan. Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit	42,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	1 Unit	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kab/Kota yang memiliki ≥45% Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	50 %	888,750,000		50 %	700,000,000	
1	2	3	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pejabat Fungsional Kesehatan yang mengikuti uji kompetensi naik jenjang jabatan	200 Orang	888,750,000		200 Orang	700,000,000	
1	2	3	1.02	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	400 Orang	764,050,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	400 Orang	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	1.02	2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	124,700,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial	94 %	186,038,000		94 %	262,000,000	
1	2	4	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang PAK yang mendapatkan Sertifikat Distribusi	100 %	165,942,000		100 %	250,000,000	
1	2	4	1.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan	30 Sarana	165,942,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air	30 Sarana	250,000,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
					PBF Cabang dan Cabang PAK	dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan			Hitam			
1	2	4	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase Sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang mendapatkan Sertifikat Produksi UKOT	100 %	20,096,000		100 %	12,000,000	
1	2	4	1.02	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	2 Sarana	20,096,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	2 Sarana	12,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan PHBS	4 Kab/Kota	375,340,000		4 Kab/Kota	200,000,000	
1	2	5	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase saluran media yang digunakan untuk Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) PHBS	100 %	263,400,000		100 %	150,000,000	
1	2	5	1.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	263,400,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	5	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	100 %	111,940,000		100 %	50,000,000	
1	2	5	1.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil BJumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBMimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	111,940,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4,000,000,000			5,070,000,000	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan	100 %	3,369,142,000		100 %	4,420,000,000	
1	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	93,120,000		100 %	120,000,000	
1	2	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	93,120,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	12 Dokumen	120,000,000	UPTD Balai Latihan Kesehatan
1	2	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut yang Terpenuhi	80 Stel	215,860,000		80 Stel	245,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	2	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Attribut Kelengkapannya	2 Paket	66,700,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	2 Paket	70,000,000	UPTD Balai Latihan Kesehatan
1	2	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 orang	149,160,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	32 orang	175,000,000	UPTD Balai Latihan Kesehatan
1	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Kebutuhan Barang Yang Terpenuhi	12 Bulan	600,118,325		12 Bulan	950,000,000	
1	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	12 Paket	39,337,700	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	12 Paket	75,000,000	UPTD Balai Latihan Kesehatan
1	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	2 Paket	170,757,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	2 Paket	175,000,000	UPTD Balai Latihan Kesehatan
1	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	1 Paket	11,300,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	1 Paket	300,000,000	UPTD Balai Latihan Kesehatan
1	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	43 Paket	40,519,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	43 Paket	50,000,000	UPTD Balai Latihan Kesehatan
1	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	2 Paket	43,604,625	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	2 Paket	50,000,000	UPTD Balai Latihan Kesehatan
1	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106 Laporan	294,600,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	106 Laporan	300,000,000	UPTD Balai Latihan Kesehatan
1	2	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	1 Paket	10,300,000		1 Paket	500,000,000	
1	2	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	1 Paket	10,300,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	1 Paket	500,000,000	UPTD Balai Latihan Kesehatan
1	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	12 Bulan	1,855,044,675		12 Bulan	1,965,000,000	
1	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	162 Laporan	10,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	162 Laporan	15,000,000	UPTD Balai Latihan Kesehatan
1	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Yang Disediakan	12 Laporan	724,316,583	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	12 Laporan	750,000,000	UPTD Balai Latihan Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	1,120,728,092	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	12 Laporan	1,200,000,000	UPTD Balai Latihan Kesehatan
1	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, dan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	594,699,000		12 Bulan	640,000,000	
1	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	11 Unit	40,075,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	11 Unit	75,000,000	UPTD Balai Latihan Kesehatan
1	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	195 Unit	154,674,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	195 Unit	165,000,000	UPTD Balai Latihan Kesehatan
1	2	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	22 Unit	399,950,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	22 Unit	400,000,000	UPTD Balai Latihan Kesehatan
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan	100 %	630,858,000		100 %	650,000,000	
1	2	3	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pelatihan Bagi Tenaga Kesehatan Dilaksanakan dalam Waktu 1 Tahun	5 Kegiatan	630,858,000		5 Kegiatan	650,000,000	
1	2	3	1.02	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	270 Orang	630,858,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	270 Orang	650,000,000	UPTD Balai Latihan Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			9,900,000,000			11,900,000,680	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Administrasi Tugas ASN	100 %	8,900,401,000		100 %	10,900,000,680	
1	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi	12 Bulan	4,032,990,850		12 Bulan	4,053,018,680	
1	2	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	4,032,990,850	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	12 Dokumen	4,053,018,680	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1	2	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 orang	27,000,000		9 orang	54,000,000	
1	2	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 orang	27,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	18 orang	54,000,000	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Bahan Logostik Kantor	5 Item	299,789,000		5 Item	278,657,000	
						Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Item			3 Item		
1	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	27,209,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	5 Paket	0	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Paket	96,355,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	5 Paket	0	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	55,325,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	3 Paket	55,325,000	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Laporan	120,900,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	4 Laporan	223,332,000	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1	2	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Mebel Yang Diadakan	4 Unit	401,000		4 Unit	1,000,000,000	
1	2	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	401,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Paket	1,000,000,000	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kebutuhan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	493,820,150		12 Bulan	514,325,000	
1	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	493,820,150	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	4 Laporan	514,325,000	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	46,400,000		11 Unit	0	
1	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	22,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	9 Unit	0	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1	2	1	1.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	24,400,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	48 Unit	0	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1	2	1	1.1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Pelayanan dan Penunjang BLUD	12 Bulan	4,000,000,000		12 Bulan	5,000,000,000	
1	2	1	1.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit Kerja	4,000,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Unit Kerja	5,000,000,000	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	98 %	999,599,000		98 %	1,000,000,000	
1	2	2	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	2 Item	999,599,000		2 Item	1,000,000,000	
1	2	2	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	1 Unit	999,599,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	1 Unit	1,000,000,000	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			8,500,000,000			8,500,000,000	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Kesehatan	85 %	8,499,000,000		85 %	8,499,000,000	
1	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Julmah Bulan Penyediaan Jasa Sumber Daya Listrik	12 Bulan	1,801,000,000		12 Bulan	1,801,000,000	
1	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	259,482,936	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	12 Bulan	259,482,936	UPTD Laboratorium Kesehatan
1	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Bulan	1,541,517,064	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	13 Bulan	1,541,517,064	UPTD Laboratorium Kesehatan
1	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	198,000,000		12 Bulan	198,000,000	
1	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	990 M2	198,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	990 M2	198,000,000	UPTD Laboratorium Kesehatan
1	2	1	1.1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Pelaksanaan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	12 Bulan	6,500,000,000		12 Bulan	6,500,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	2	1	1.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	6,500,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1 Unit Kerja	6,500,000,000	UPTD Laboratorium Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Kesehatan	85 %	1,000,000		85 %	1,000,000	
1	2	2	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan / Peralatan Laboratorium Kesehatan Sesuai Standar	1 Unit	1,000,000		1 Unit	1,000,000	
1	2	2	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	1 Unit	1,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1 Unit	1,000,000	UPTD Laboratorium Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			13,100,000,000			26,682,469,975	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Kesehatan	85 %	9,670,376,647		85 %	14,845,000,000	
1	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	110,880,000		100 %	140,000,000	
1	2	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	110,880,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	12 Dokumen	140,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1	2	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tercapainya kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	100 %	170,000,000		100 %	565,000,000	
1	2	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	170,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	565,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Kegiatan Administrasi Umum Rumah Sakit	100 %	936,006,229		100 %	2,100,000,000	
1	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30,529,580	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1 Paket	45,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	146,624,049	Kota Samarinda, Samarinda Kota,	2 Paket	935,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Sungai Pinang Luar			
1	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	JumlahPaket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	163,214,400	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	2 Paket	140,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	164,838,200	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	2 Paket	180,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	430,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	800,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1	2	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	510,000,000		100 %	1,250,000,000	
						Tercapainya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %			100 %		
						Tersedianya Mebel	4 Paket			4 Paket		
1	2	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	510,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	2 Paket	1,250,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tercapainya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5,957,091,308		100 %	6,500,000,000	
1	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi.Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	650,833,276	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	12 Laporan	700,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5,306,258,032	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	12 Laporan	5,800,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Kegiatan Pemeliharaan Barang dan Jasa Milik Daerah secara rutin/berkala	100 %	267,174,800		100 %	290,000,000	
1	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	30,750,200	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1 Unit	40,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	126,290,800	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	8 Unit	130,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	110,133,800	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	60 Unit	120,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1	2	1	1.1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Tercapainya Pelayanan dan Pendukung pelayanan BLUD	100 %	1,719,224,310		100 %	4,000,000,000	
1	2	1	1.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	1,719,224,310	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Unit Kerja	4,000,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Rata-rata Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	95 %	1,701,623,353		95 %	9,611,949,975	
1	2	2	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tercapainya Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	1,390,070,953		100 %	9,075,587,335	
1	2	2	1.01	1	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	5,897,195	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1 Unit	500,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1	2	2	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	9 Unit	1,002,383,388	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	9 Unit	6,176,809,455	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1	2	2	1.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei. Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1 Paket	530,600,400	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1	2	2	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara	30 Unit	81,782,800	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	30 Unit	93,195,080	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1	2	2	1.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	1 Unit	50,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1 Unit	274,982,400	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1	2	2	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	2 Paket	200,007,570	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	2 Paket	1,500,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1	2	2	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tercapainya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100 %	214,052,400		100 %	299,422,640	
1	2	2	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	214,052,400	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	12 Dokumen	299,422,640	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	2	2	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Tercapainya Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	100 %	97,500,000		100 %	236,940,000	
1	2	2	1.03	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia	1 Paket	97,500,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1 Paket	236,940,000	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	90 %	1,728,000,000		90 %	2,225,520,000	
1	2	3	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	90 %	1,728,000,000		90 %	2,225,520,000	
1	2	3	1.01	1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Orang	1,728,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	12 Orang	2,225,520,000	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			595,315,219,000			652,006,934,730	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan	100 %	592,688,123,350		100 %	626,911,642,721	
1	2	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	78 Nilai	381,470,000		78 Nilai	419,617,000	
1	2	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	260,220,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	10 Dokumen	286,242,000	RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
1	2	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42 Laporan	121,250,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	42 Laporan	133,375,000	RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
1	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan RS	80 %	171,121,349,342		80 %	171,048,299,071	
1	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	854 Orang/ Bulan	170,670,339,071	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	854 Orang/ Bulan	170,670,339,071	RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
1	2	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	346,680,271	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	24 Dokumen	326,172,000	RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	2	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	21 Dokumen	104,330,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	21 Dokumen	51,788,000	RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
1	2	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase capaian jumlah laporan administrasi barang RS	100 %	7,170,000		100 %	7,887,000	
1	2	1	1.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	7,170,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	2 Laporan	7,887,000	RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
1	2	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Kepegawaian RS	85 %	67,120,000		85 %	76,032,000	
1	2	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	10,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	3 Paket	11,000,000	RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
1	2	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	53,460,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	8 Orang	61,006,000	RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
1	2	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	3,660,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	40 Orang	4,026,000	RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
1	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan administrasi RS	90 %	999,019,500		90 %	1,670,155,300	
1	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	274 Paket	229,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	274 Paket	292,600,000	RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
1	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	61,947,500	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	1 Paket	67,798,500	RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
1	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63 Laporan	708,072,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	63 Laporan	1,309,756,800	RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
1	2	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketepatan Pengadaan Sesuai perencanaan	100 %	1,041,030,000		100 %	777,961,250	
1	2	1	1.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	523,750,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	3 Unit	220,000,000	RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
1	2	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	206,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	3 Unit	220,000,000	RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	2	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29 Paket	59,740,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	29 Paket	63,800,000	RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
1	2	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	251,540,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	50 Unit	274,161,250	RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
1	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian jasa penunjang rumah sakit	100 %	10,000,000		100 %	10,000,000	
1	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	12 Laporan	10,000,000	RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
1	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana RS yang berfungsi dengan baik	100 %	1,060,964,508		100 %	2,901,691,100	
1	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit	277,656,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	31 Unit	307,913,100	RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
1	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	317,700,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	10 Unit	2,087,778,000	RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
1	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	465,608,508	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	1 Unit	506,000,000	RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
1	2	1	1.1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase capaian hasil kinerja BLUD	80 %	418,000,000,000		80 %	450,000,000,000	
1	2	1	1.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	418,000,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	1 Unit Kerja	450,000,000,000	RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Capaian IKU Rumah Sakit Sesuai Standar (RS AWS)	80 %	1,637,145,650		80 %	22,706,147,009	
1	2	2	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan RS yang dimanfaatkan	100 Persen	661,335,650		100 Persen	21,713,804,009	
1	2	2	1.01	1	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	294,859,750	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	1 Unit	300,000,000	RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	2	2	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	139 Unit	259,025,900	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	139 Unit	14,148,458,185	RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
1	2	2	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1299 Unit	10,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	1299 Unit	4,306,345,824	RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
1	2	2	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	1 Paket	97,450,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	1 Paket	2,959,000,000	RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
1	2	2	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal [SPM] RS	88 %	288,200,000		88 %	320,001,000	
1	2	2	1.02	9	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 Dokumen	5,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	5 Dokumen	5,500,000	RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
1	2	2	1.02	28	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Penelitian Kesehatan	11 Dokumen	283,200,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	11 Dokumen	314,501,000	RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
1	2	2	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Pelaksanaan Sistem informasi RS	80 %	189,190,000		80 %	144,100,000	
1	2	2	1.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3 Dokumen	2,500,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	3 Dokumen	2,750,000	RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
1	2	2	1.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	2,500,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	2 Dokumen	2,750,000	RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
1	2	2	1.03	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia	1 Unit	184,190,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	1 Unit	138,600,000	RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
1	2	2	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase capaian tata kelola dan mutu pelayanan Rumah Sakit	85 %	498,420,000		85 %	528,242,000	
1	2	2	1.04	2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit	138,420,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	1 Unit	125,092,000	RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
1	2	2	1.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	1 Unit	360,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu,	1 Unit	403,150,000	RSUD A. Wahab Syahranie di

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
						Pelayanan Kesehatan			Sidodadi			Samarinda
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Peningkatan Kapasitas SDM RS (RS AWS)	85 %	989,950,000		85 %	2,389,145,000	
1	2	3	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Sistem informasi RS	65 %	989,950,000		65 %	2,389,145,000	
1	2	3	1.02	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	386 Orang	989,950,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	386 Orang	2,389,145,000	RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			359,701,030,000			382,335,292,969	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS Kanudjoso)	80 %	359,677,992,805		80 %	359,747,866,512	
1	2	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	126,293		4 Laporan	70,000,000	
1	2	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	126,293	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	4 Laporan	70,000,000	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
1	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	565 Orang/Bulan	107,677,866,512		565 Orang/Bulan	107,677,866,512	
1	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	611 Orang/ Bulan	107,677,866,512	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	611 Orang/ Bulan	107,677,866,512	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
1	2	1	1.1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	194.9 Kunjungan	252,000,000,000		194.9 Kunjungan	252,000,000,000	
1	2	1	1.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	194900 Kunjungan	252,000,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	194900 Kunjungan	252,000,000,000	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Akreditasi Pelayanan RS (SNARS) - (RS Kanudjoso)	1 Sertifikat	23,037,195		1 Sertifikat	22,587,426,457	
1	2	2	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	90 %	23,037,195		90 %	22,587,426,457	
1	2	2	1.01	3	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	5,897,195	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	1 Unit	5,088,442,000	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
1	2	2	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	50 Unit	17,140,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	50 Unit	17,498,984,457	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			61,619,325,000			71,734,682,616	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS Atma Husada)	86,25 %	61,588,407,000		86,25 %	65,842,436,327	
1	2	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Kinerja RSJD Atma Husada Mahakam	1 Laporan	9,000,000		1 Laporan	27,000,000	
1	2	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	9,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	5 Laporan	27,000,000	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tepat Waktu	100 %	30,091,346,678		100 %	30,377,790,996	
1	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2366 Orang/ Bulan	29,909,426,678	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	2366 Orang/ Bulan	29,909,430,996	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1	2	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	160,320,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	12 Dokumen	367,560,000	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1	2	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	21,600,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir,	4 Dokumen	100,800,000	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Sungai Dama			Mahakam
1	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	36,950,350		100 %	705,700,000	
1	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,033,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	1 Paket	195,000,000	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	17,952,350	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	3 Paket	255,000,000	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	8,965,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	1 Paket	255,700,000	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1	2	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketepatan Pengadaan Sesuai Perencanaan	100 %	5,650,000		100 %	936,850,000	
1	2	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5,650,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	1 Unit	936,850,000	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai survei kepuasan pegawai terhadap kenyamanan ditempat kerja.	78 %	11,931,578,040		78 %	11,931,578,040	
1	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1,998,812,016	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	12 Laporan	1,998,812,016	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9,932,766,024	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	12 Laporan	9,932,766,024	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung dan Sarana/Prasarana Yang Berfungsi Dengan Baik	26 Gedung	13,881,932		26 Gedung	1,363,517,291	
1	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Gedung	13,881,932	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	4 Gedung	1,363,517,291	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1	2	1	1.1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pendapatan Terhadap Target	100 %	19,500,000,000		100 %	20,500,000,000	
1	2	1	1.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja	19,500,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	25 Unit Kerja	20,500,000,000	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Capaian nilai indikator mutu pelayanan (Atma Husada)	92 %	19,918,000		92 %	4,678,021,289	
1	2	2	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Aspak	85 %	8,851,000		85 %	4,178,021,289	
1	2	2	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	910,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	1 Unit	3,622,621,289	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1	2	2	1.01	16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	1 Unit	961,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	1 Unit	175,400,000	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1	2	2	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	40 Unit	6,980,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	40 Unit	380,000,000	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1	2	2	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa	100 %	11,067,000		100 %	500,000,000	
1	2	2	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	11,067,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	1 Dokumen	500,000,000	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM terlatih 20 jam pertahun (Atma Husada)	86,5 %	11,000,000		86,5 %	1,214,225,000	
1	2	3	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Bimtek yang Dilaksanakan	1 Bidang	11,000,000		1 Bidang	1,214,225,000	
1	2	3	1.02	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	2 Orang	11,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	2 Orang	1,214,225,000	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			39,500,000,000			60,224,569,700	
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	90 %	5,787,874,050		90 %	6,261,660,000	
1	3	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100 %	551,520,000		100 %	629,280,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	3	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Laporan	551,520,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	629,280,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	3	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Kualitas Kepegawaian	100 %	299,700,000		100 %	300,000,000	
1	3	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21 Orang	299,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 Orang	300,000,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	3	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	682,005,000		100 %	1,275,828,654	
1	3	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11,360,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	57,972,674	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	3	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	228,890,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Paket	441,660,900	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	3	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	106,744,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	277,578,335	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	3	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	39,091,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	37,096,745	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	3	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	11,520,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72 Dokumen	11,520,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	3	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	284,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	450,000,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	3	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	158,420,000		100 %	150,000,000	
1	3	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	158,420,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	150,000,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	3	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	2,511,881,240		100 %	2,699,683,346	
1	3	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	12,000,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	3	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	281,844,400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	268,202,946	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	3	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,218,036,840	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	2,419,480,400	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	3	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	1,584,347,810		100 %	1,206,868,000	
1	3	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	436,124,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32 Unit	229,870,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	3	1	1.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	58 Unit	525,320,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58 Unit	550,000,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	3	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	129 Unit	38,960,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	129 Unit	39,000,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	3	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	583,943,810	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	387,998,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Capaian Layanan SDA	78,91 %	6,938,432,740		78,91 %	8,901,920,800	
1	3	2	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana SDA yang ditangani	16 unit	549,418,100		16 unit	556,376,800	
1	3	2	1.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	549,418,100	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	556,376,800	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	3	2	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	8894 meter	6,389,014,640		8894 meter	8,345,544,000	
1	3	2	1.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	40 KM	6,389,014,640	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 KM	8,345,544,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	3455 meter	5,453,485,014		3455 meter	4,800,000,000	
1	3	6	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah sistem drainase yang terhubung di kawasan strategis dan sistem sungai provinsi Kalimantan Timur	5 sistem	5,453,485,014		5 sistem	4,800,000,000	
1	3	6	1.01	6	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Terpelihara	8 Unit	5,453,485,014	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Unit	4,800,000,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	78,27 %	21,320,208,196		78,27 %	40,260,988,900	
1	3	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	700.61 Km	21,320,208,196		700.61 Km	40,260,988,900	
1	3	10	1.01	9	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 KM	9,931,168,872	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 KM	24,581,882,090	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	10 KM	6,040,539,527	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 KM	7,632,952,840	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	3	10	1.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	3674 M	5,348,499,797	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3674 M	8,046,153,970	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			4,878,837,000			5,994,240,000	
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90,00 %	4,878,837,000		90,00 %	5,994,240,000	
1	3	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100 %	159,240,000		100 %	159,240,000	
1	3	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	159,240,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	12 Dokumen	159,240,000	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	3	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Kualitas Kepegawaian	100 %	254,525,000		100 %	300,000,000	
1	3	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	254,525,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	4 Paket	300,000,000	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	3	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	1,306,176,900		100 %	1,350,000,000	
1	3	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	40,253,500	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	4 Paket	50,000,000	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	3	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	62,513,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	10 paket	100,000,000	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	3	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Unit Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	27 Unit	180,350,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	27 Unit	100,000,000	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	3	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	98 Paket	99,650,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	98 Paket	150,000,000	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	3	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	49,331,900	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	12 Paket	100,000,000	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	3	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	184,028,500	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	12 Paket	100,000,000	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	3	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127 Laporan	690,050,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	127 Laporan	750,000,000	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	3	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	663,953,000		100 %	1,410,000,000	
1	3	1	1.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	342,000,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	1 Unit	410,000,000	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	3	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	71 Unit	321,953,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	71 Unit	1,000,000,000	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	3	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	1,865,558,400		100 %	2,275,000,000	
1	3	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	20,000,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	12 laporan	25,000,000	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	3	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	281,012,700	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	12 Laporan	250,000,000	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	3	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,564,545,700	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	12 Laporan	2,000,000,000	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	3	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	629,383,700		100 %	500,000,000	
1	3	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	133,333,700	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	9 Unit	150,000,000	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	3	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	88 Unit	158,900,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	88 Unit	200,000,000	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	3	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	337,150,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	2 Unit	150,000,000	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1,621,163,000			2,000,000,000	
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi (Lab)	70 %	1,621,163,000		70 %	2,000,000,000	
5	5	2	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Meningkatnya Pengguna Pelayanan Pengujian Laboratorium	70 %	1,621,163,000		70 %	2,000,000,000	
5	5	2	1.03	9	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	10 Dokumen	1,621,163,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	2,000,000,000	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			1,118,590,741,692			1,149,414,495,344	
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pekerjaan umum	90,00 %	94,115,162,708		90,00 %	94,019,162,708	
1	3	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program/Kegiatan ke-PU-an	100 %	1,932,857,000		100 %	1,932,857,000	
1	3	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1,300,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	1,300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	632,857,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	632,857,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100 %	61,645,005,070		100 %	65,750,678,794	
1	3	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4020 Orang/ Bulan	61,204,845,070	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4020 Orang/ Bulan	64,635,038,794	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	440,160,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	1,115,640,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Kualitas Kepegawaian	100 %	1,317,620,000		100 %	1,083,120,000	
1	3	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	1,079,560,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	921,120,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	238,060,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Orang	162,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	6,348,489,703		100 %	3,703,925,950	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	3	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	155,910,903	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Paket	108,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	2,073,194,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23 Paket	1,567,143,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	241,528,800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	188,782,950	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	300 Paket	210,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Paket	180,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	386,416,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Paket	160,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	381 Laporan	3,281,440,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	381 Laporan	1,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	626,930,000		100 %	627,230,000	
1	3	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	626,930,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Unit	627,230,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	17,020,411,175		100 %	16,316,397,256	
1	3	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	64,350,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	40,500,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	2,234,088,985	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	2,100,600,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	14,721,972,190	Kota Samarinda, Semua Kecamatan,	2 Laporan	14,175,297,256	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Semua Kelurahan			Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharannya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	5,223,849,760		100 %	4,604,953,708	
1	3	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	116 Unit	947,460,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	116 Unit	450,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	457 Unit	957,050,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	457 Unit	268,880,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	653,138,760	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Unit	1,538,252,708	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2,666,201,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	2,347,821,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Capaian Layanan SDA (%)	78,91 %	127,386,763,984		78,91 %	130,581,631,984	
1	3	2	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana SDA yang ditangani	11 unit	88,733,173,984		11 unit	91,928,041,984	
1	3	2	1.01	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	9 Dok	6,579,337,184	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka	9 Dok	6,579,244,184	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
									Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Sebuntal			
									Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Suka Rahmat			
									Kota Bontang, Bontang Barat, Kanaan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	3	2	1.01	3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	9 Dokumen	7,353,540,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Dokumen	9,840,180,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
									Kab. Berau, Talisayan, Dumaring			
									Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar			
									Kota Bontang, Bontang Barat, Kanaan			
									Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih			
									Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam			
1	3	2	1.01	4	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	1,060,875,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1,060,875,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	2	1.01	7	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	4 Titik	14,691,720,000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	4 Titik	15,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ilir			
									Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala			
									Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur			
1	3	2	1.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	1.18 Km	30,193,790,000	Kab. Berau, Biduk-Biduk, Pantai Harapan	1.18 Km	30,193,790,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Kutai Timur, Sandaran, Manubar			
									Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Salo Loang			
1	3	2	1.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	4.57 Km	25,365,857,400	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	4.57 Km	25,365,857,400	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
									Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Tengah			
									Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu			
									Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus			
1	3	2	1.01	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	759,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1,159,041,400	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	2	1.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	6 Lembaga	2,101,755,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Lembaga	2,101,755,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	2	1.01	62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	349,985,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	349,985,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	2	1.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	277,314,400	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	1 Lembaga	277,314,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
												Rakyat
1	3	2	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	8894 meter	38,653,590,000		8894 meter	38,653,590,000	
1	3	2	1.02	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	3 Dokumen	1,368,080,000	Kab. Berau, Gunung Tabur, Merancang Ulu	3 Dokumen	1,368,080,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
									Kab. Berau, Biatan, Biatan Lempake			
									Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Sebuntal			
1	3	2	1.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	6.92 KM	32,887,580,000	Kab. Berau, Gunung Tabur, Merancang Ulu	6.92 KM	32,887,580,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
									Kab. Berau, Teluk Bayur, Labanan Makmur			
									Kab. Berau, Tabalar, Semurut			
									Kab. Berau, Biatan, Biatan Lempake			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka			
									Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Sebuntal			
1	3	2	1.02	16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	1.97 KM	4,397,930,000	Kab. Paser, Paser Belengkong, Suliliran	1.97 KM	4,397,930,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	68,64 %	19,437,332,348		68,64 %	202,559,313,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
					PENYEDIAAN AIR MINUM							
1	3	3	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	68.64 %	19,437,332,348		68.64 %	202,559,313,000	
1	3	3	1.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	1 Dokumen	813,038,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	813,038,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	3	1.01	2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan /Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM Regional	1 dokumen	1,115,625,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	1,115,625,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	3	1.01	3	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	150 Liter/detik	16,878,019,348	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Liter/detik	200,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	3	1.01	7	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi kerjasama penyelenggaraan SPAM	10 Kab/Kota	513,175,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Kab/Kota	513,175,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	3	1.01	8	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM	1 Kab/Kota	117,475,000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kab/Kota	117,475,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	4			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Capaian akses penanganan sampah domestik	71,37 %	1,475,975,000		71,37 %	1,475,975,000	
1	3	4	1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Teknis Persampahan	25 orang	1,475,975,000		25 orang	1,475,975,000	
1	3	4	1.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	975,975,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	975,975,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	3	4	1.01	8	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	10 Kelompok Masyarakat	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Kelompok Masyarakat	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Capaian akses limbah domestik layak	87,27 %	1,912,213,000		87,27 %	1,912,213,000	
1	3	5	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase progres penyelenggaraan Air Limbah Domestik Regional	45 %	1,912,213,000		45 %	1,912,213,000	
1	3	5	1.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun	2 Dokumen	1,712,213,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	1,712,213,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	5	1.01	6	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	10 Kelompok Masyarakat	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Kelompok Masyarakat	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	3455 meter	17,591,720,000		3455 meter	17,591,720,000	
1	3	6	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah sistem drainase yang terhubung di kawasan strategis dan sistem sungai provinsi Kalimantan Timur	4 sistem	17,591,720,000		4 sistem	17,591,720,000	
1	3	6	1.01	2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	4 Dok	1,591,720,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh	4 Dok	1,591,720,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
									Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar			
									Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam			
									Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Rapak Dalam			
1	3	6	1.01	5	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan	4 Unit	16,000,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh	4 Unit	16,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
									Kota Balikpapan, Balikpapan Utara,			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Batu Ampar			
									Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam			
									Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Rapak Dalam			
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Bangunan gedung yang tertata	100 %	148,705,326,160		100 %	47,005,326,160	
1	3	8	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Tercapainya jumlah bangunan gedung yang ditata	5 unit	148,705,326,160		5 unit	47,005,326,160	
1	3	8	1.01	1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	5 Dokumen	3,613,619,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	3,613,619,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	8	1.01	2	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	4 Unit	144,678,757,160	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Unit	42,978,757,160	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	8	1.01	4	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	1 Dokumen	295,475,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	295,475,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	8	1.01	11	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang	1 dokumen	117,475,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	117,475,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	100 %	8,369,153,492		100 %	8,369,153,492	
1	3	9	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya jumlah bangunan dan lingkungan yang ditata	1 unit	8,369,153,492		1 unit	8,369,153,492	
1	3	9	1.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	273,825,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	273,825,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	3	9	1.01	2	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3 Dokumen	2,240,176,602	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	2,240,176,602	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	9	1.01	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3 Kawasan	5,555,157,690	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Kawasan	5,555,157,690	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	9	1.01	6	Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota	1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	9	1.01	7	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1 Dokumen	199,994,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	199,994,200	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	78,27 %	685,597,095,000		78,27 %	625,800,000,000	
1	3	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	700.61 KM	685,597,095,000		700.61 KM	625,800,000,000	
1	3	10	1.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	18 Dokumen	12,958,307,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Dokumen	14,323,379,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan,			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Semua Kelurahan			
1	3	10	1.01	2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	194350 M²	82,336,814,519	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	194350 M²	84,291,055,500	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	10	1.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen	2,949,583,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	2,866,063,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	10	1.01	5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	12.7 KM	140,079,265,864	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.7 KM	139,652,930,500	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	10	1.01	8	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	26.32 KM	321,452,932,500	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.32 KM	283,196,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	10	1.01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	150 M	101,621,456,717	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 M	80,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	10	1.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	26 Dokumen	24,198,735,400	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26 Dokumen	20,970,572,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
												Rakyat
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat	46159 orang	6,000,000,000		46159 orang	12,000,000,000	
1	3	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga ahli yang bersertifikat	355 orang	3,642,720,000		355 orang	7,150,000,000	
1	3	11	1.01	1	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	1 Dokumen	91,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	211,560,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	11	1.01	2	Penyiapan Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan	Jumlah Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	25 Orang	176,619,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	271,260,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	11	1.01	3	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	3 Dokumen	25,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	11	1.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	330 Orang	1,501,203,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	330 Orang	2,345,164,200	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	3	11	1.01	5	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1 Dokumen	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	11	1.01	6	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi	355 Orang	1,286,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	355 Orang	1,450,500,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	11	1.01	7	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	160 Orang	512,298,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	160 Orang	2,721,515,800	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	11	1.01	8	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	1 Dokumen	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Tersusunnya Data dan Informasi Jasa Konstruksi	1 dokumen	347,280,000		1 dokumen	830,000,000	
1	3	11	1.02	1	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1 Laporan	124,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	11	1.02	2	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1 Dokumen	32,293,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	11	1.02	3	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	30 Orang	115,587,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	180,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	11	1.02	4	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Jumlah Dokumen Hasil Data dan Infromasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan Dengan Skema KPDBU	1 Dokumen	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	11	1.02	5	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan pengawasan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi	1 dokumen	2,010,000,000		1 dokumen	4,020,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	3	1 1	1.0 3	1	Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	1,285,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2,570,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	1 1	1.0 3	2	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	1 Laporan	700,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1,400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	1 1	1.0 3	3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kab/Kota	1 Laporan	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	1 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks penyelenggaraan tata ruang	1 Indeks	8,000,000,000		1 Indeks	8,100,000,000	
1	3	1 2	1.0 1		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Prosentase Penetapan RTRW	100 %	1,376,690,000		100 %	1,450,000,000	
1	3	1 2	1.0 1	3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	1 Dokumen	1,083,490,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1,150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	1 2	1.0 1	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	293,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	1 2	1.0 2		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1 dokumen	1,273,310,000		1 dokumen	1,200,000,000	
1	3	1 2	1.0 2	3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	12 Dokumen	831,380,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	750,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	1 2	1.0 2	4	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	1 Laporan	441,930,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	450,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	1 2	1.0 3		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1 dokumen	2,200,000,000		1 dokumen	2,200,000,000	
1	3	1 2	1.0 3	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1,800,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1,800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	1 2	1.0 3	2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	1 2	1.0 4		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1 dokumen	3,150,000,000		1 dokumen	3,250,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	3	1 2	1.0 4	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	712,309,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	750,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	3	1 2	1.0 4	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4 Dokumen	2,437,690,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	2,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			89,500,000,000			90,000,000,000	
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyelenggaraan SPM Perumahan	3,33 %	1,886,720,000		3,33 %	1,886,720,000	
1	4	2	1.0 1		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Kegiatan Pendataan SPM Perumahan	3 Kegiatan	1,886,720,000		3 Kegiatan	1,886,720,000	
1	4	2	1.0 1	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	943,360,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	943,360,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	4	2	1.01	2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	943,360,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	943,360,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	69681 Unit	81,953,815,518		69681 Unit	75,453,815,518	
1	4	3	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Koordinasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	2 Kegiatan	949,846,400		2 Kegiatan	949,846,400	
1	4	3	1.01	9	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Laporan	949,846,400	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	949,846,400	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	4	3	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	0 unit	81,003,969,118		0 unit	74,503,969,118	
1	4	3	1.02	1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2 Dokumen	769,520,000	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Badak Baru	2 Dokumen	769,520,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	4	3	1.02	3	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	2047 Unit Rumah	60,946,911,213	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2047 Unit Rumah	58,446,911,213	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	4	3	1.02	7	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang DIremajakan/Dipugar	7 Ha	19,287,537,905	Kab. Berau, Sambaliung, Sambaliung	7 Ha	15,287,537,905	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
									Kab. Berau, Teluk Bayur, Teluk Bayur			
									Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih			
									Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus			
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Penyelenggaraan PSU permukiman	3,29 %	5,659,464,482		3,29 %	12,659,464,482	
1	4	5	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	PSU Permukiman yang Dibangun	3000 meter	5,659,464,482		3000 meter	12,659,464,482	
1	4	5	1.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	2 Lokasi	5,659,464,482	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Bakung	2 Lokasi	12,659,464,482	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
									Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			28,868,937,308			41,744,050,788	
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	90 %	6,518,443,880		90 %	8,501,479,480	
1	3	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100 %	280,920,000		100 %	282,480,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	3	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	280,920,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	282,480,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
1	3	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Kualitas Kepegawaian	100 %	280,950,000		100 %	274,650,000	
1	3	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	109,950,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	103,650,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
1	3	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	171,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Orang	171,000,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
1	3	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	915,225,690		100 %	915,238,000	
1	3	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25,187,690	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	25,200,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
1	3	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	181,753,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Paket	181,753,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
1	3	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	39,285,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	39,285,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
1	3	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	9,600,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	9,600,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
1	3	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	659,400,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	659,400,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
1	3	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	951,191,000		100 %	2,805,010,000	
1	3	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	110,010,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	110,010,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
												Wilayah I
1	3	1	1.07	3	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	591,347,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	2,500,000,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
1	3	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	249,834,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	195,000,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
1	3	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	1,924,195,760		100 %	1,955,259,980	
1	3	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	10,000,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
1	3	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	282,402,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	313,466,220	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,631,793,760	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1,631,793,760	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
1	3	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	2,165,961,430		100 %	2,268,841,500	
1	3	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	103,429,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Unit	105,039,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
1	3	1	1.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	17 Unit	903,285,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Unit	798,802,500	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
1	3	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76 Unit	94,870,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76 Unit	300,000,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1,064,377,430	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Unit	1,065,000,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Capaian Layanan SDA	78,91 %	9,850,553,628		78,91 %	6,242,571,308	
1	3	2	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana SDA yang ditangani	11 unit	2,335,160,656		11 unit	1,647,163,308	
1	3	2	1.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	3 Unit	515,737,308	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	3 Unit	515,737,308	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
1	3	2	1.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	500 M	631,425,615	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Giri Mukti	500 M	631,426,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
1	3	2	1.01	54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	800 M	1,187,997,733	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800 M	500,000,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	3	2	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	8894 meter	7,515,392,972		8894 meter	4,595,408,000	
1	3	2	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	787943.803732439 M2	7,515,392,972	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	787943.803732439 M2	4,595,408,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
									Kab. Paser, Paser Belengkong, Suliliran			
									Kab. Paser, Paser Belengkong, Laburan			
									Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Bangunan gedung yang tertata	100 %	500,000,000		100 %	500,000,000	
1	3	8	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Tercapainya jumlah bangunan yang ditata	5 unit	500,000,000		5 unit	500,000,000	
1	3	8	1.01	1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1 Dokumen	500,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	1 Dokumen	500,000,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
						Sarana dan Prasarana yang Direhabilitasi	90 M2			90 M2		
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	78,27 %	11,999,939,800		78,27 %	26,500,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	3	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	700.61 Km	11,999,939,800		700.61 Km	26,500,000,000	
1	3	10	1.01	9	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang direhabilitasi	5 KM	4,999,943,252	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 KM	10,000,000,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	15 KM	5,999,996,500	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 KM	15,000,000,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	10	1.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	120 M	1,000,000,048	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120 M	1,500,000,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
					DASAR							
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			80,500,000,000			37,500,000,000	
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pekerjaan Umum	90 %	5,576,323,000		90 %	5,576,323,000	
1	3	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100 %	244,540,000		100 %	244,540,000	
1	3	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	244,540,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	244,540,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Kualitas Kepegawaian	100 %	247,350,000		100 %	247,350,000	
1	3	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	48,600,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	48,600,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	198,750,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Orang	198,750,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	876,378,000		100 %	876,378,000	
1	3	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	38,394,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	38,394,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	3	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30,900,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	30,900,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	61,416,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	61,416,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	51 Paket	51,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51 Paket	51,000,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20,828,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	20,828,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5,040,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5,040,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	668,800,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	668,800,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	3	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	40,680,000		100 %	40,680,000	
1	3	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	40,680,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	40,680,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	2,892,600,302		100 %	2,892,600,302	
1	3	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8,547,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	8,547,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	227,881,734	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	227,881,734	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,356,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1,356,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,654,815,568	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	2,654,815,568	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	1,274,774,698		100 %	1,274,774,698	
1	3	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	83,750,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47 Unit	83,750,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	1	1.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	26 Unit	734,323,815	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26 Unit	734,323,815	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	63,861,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 Unit	63,861,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	347,777,383	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Unit	347,777,383	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	45,062,500	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Unit	45,062,500	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Capaian Layanan SDA (%)	78,91 %	6,412,180,000		78,91 %	3,412,180,000	
1	3	2	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	8894 meter	6,412,180,000		8894 meter	3,412,180,000	
1	3	2	1.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.58 KM	2,577,900,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.58 KM	889,000,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	2	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	57.49 KM	3,834,280,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57.49 KM	2,523,180,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	78,27 %	68,511,497,000		78,27 %	28,511,497,000	
1	3	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	700.61 Km	68,511,497,000		700.61 Km	28,511,497,000	
1	3	10	1.01	9	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2 KM	15,498,452,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 KM	4,997,452,483	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	82 KM	51,013,045,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 KM	22,014,044,517	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
												Wilayah III
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	3	10	1.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	950 M	2,000,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	950 M	1,500,000,000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			21,442,384,000			23,051,492,199	
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas Satpol PP	98 %	19,942,623,000		98 %	21,401,491,979	
1	5	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Satpol PP	6 Dokumen	373,730,000		6 Dokumen	411,103,000	
1	5	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	275,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	123,730,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	136,103,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Satpol PP	12 Bulan	12,636,507,324		12 Bulan	13,365,000,000	
1	5	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang	12,350,547,324	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 Orang	12,980,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	285,960,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	385,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelaksanaan Administrasi Umum Satpol PP	12 Bulan	520,455,000		12 Bulan	637,824,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	5	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	365,575,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Paket	453,684,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	50,520,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	52,140,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	104,360,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 Orang	132,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelaksanaan Administrasi Umum Satpol PP	12 Bulan	1,322,347,000		12 Bulan	1,262,589,884	
1	5	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13,894,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	15,400,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	330,628,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	317,689,884	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	51,375,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	49,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	926,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	880,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit/buah/set Hasil Pengadaan BMD Satpol PP	10 Unit	310,952,800		10 Unit	377,822,500	
1	5	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	39 Unit	310,952,800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39 Unit	377,822,500	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Satpol PP	12 Bulan	4,406,144,876		12 Bulan	4,942,352,595	
1	5	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	186,878,972	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	266,889,059	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4,219,265,904	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	4,675,463,536	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	5	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Yang Dikelola Satpol PP	12 Bulan	372,486,000		12 Bulan	404,800,000	
1	5	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	10,203,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	16,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	123,597,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 Unit	124,300,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95 Unit	39,520,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Unit	44,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	199,166,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	220,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda dan Pergub, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Satlinmas yang Terlatih dan Poskamling yang Aktif	95 %	1,299,761,000		95 %	1,430,000,220	
1	5	2	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terpenuhinya Pelaksanaan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	12 Bulan	826,669,000		12 Bulan	909,370,000	
1	5	2	1.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	2 Kasus	331,956,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kasus	365,153,800	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	1.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	114,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	126,060,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	1.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	185,202,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	203,641,900	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	1.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	30 Orang	185,032,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	203,641,900	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	5	2	1.01	9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan	9,878,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	10,872,400	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Terpenuhinya Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	12 Bulan	306,290,000		12 Bulan	337,218,200	
1	5	2	1.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	2 Laporan	104,360,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	114,974,200	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	1.02	2	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	2 Laporan	101,948,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	112,180,200	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	1.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	2 Laporan	99,982,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	110,063,800	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Kalimantan Timur	12 Bulan	166,802,000		12 Bulan	183,412,020	
1	5	2	1.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	2 Laporan	47,224,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	52,021,200	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	1.03	2	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang dapat disidangkan di tempat, dan penerapan secara aktif operasional Sekretariat Bersama PPNS oleh Dinas Satpol PP	2 Dokumen	119,578,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	131,390,820	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase daerah rawan bencana	95 %	200,000,000		95 %	220,000,000	
1	5	4	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Terpenuhinya Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	12 Bulan	200,000,000		12 Bulan	220,000,000	
1	5	4	1.01	1	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	2 Dokumen	57,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	55,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	4	1.01	2	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	2 Dokumen	51,024,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	55,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	4	1.01	3	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Laporan	41,888,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	55,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	5	4	1.01	4	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	2 Dokumen	49,738,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	55,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			17,203,039,000			17,840,820,696	
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana	98 %	14,123,408,500		98 %	14,276,311,064	
1	5	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100 Persen	742,800,000		100 Persen	742,800,000	
1	5	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	271,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	271,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	318,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	318,800,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	153,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	153,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	9,327,309,672		100 Persen	9,468,130,368	
1	5	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan	8,899,049,672	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Orang/ Bulan	9,155,410,368	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	5	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	312,720,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	312,720,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	45,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	69,840,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	53,100,000		100 Persen	53,780,000	
1	5	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	53,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	53,780,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1,050,067,000		100 Persen	1,050,614,288	
1	5	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	174,815,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	175,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	130,652,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	130,664,288	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	744,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Laporan	744,950,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2,014,986,408		100 Persen	2,014,986,408	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	5	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	340,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	340,800,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,674,186,408	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	1,674,186,408	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 Persen	935,145,420		100 Persen	946,000,000	
1	5	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	346,000,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	346,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	239,144,820	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Unit	250,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	350,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	100 %	3,079,630,500		100 %	3,564,509,632	
1	5	3	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Pelayanan Pemenuhan Informasi Kebencanaan	100 Persen	61,232,000		100 Persen	320,000,000	
1	5	3	1.01	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	61,232,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	320,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 persen	1,452,634,500		100 persen	1,476,265,000	
1	5	3	1.02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	12 Dokumen	266,267,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	290,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	1.02	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	318 Unit	118,768,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	318 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan,			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	5	3	1.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	13 Kawasan	665,072,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Kawasan	760,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	5	3	1.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	30 orang	302,527,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 orang	326,265,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	1.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi	2 Laporan	100,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	100 Persen	608,191,000		100 Persen	655,744,632	
1	5	3	1.03	2	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	12 Laporan	361,255,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	385,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	1.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi	240 Orang	246,936,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	240 Orang	270,744,632	Badan Penanggulangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
						Korban Bencana			Semua Kelurahan			Bencana Daerah
1	5	3	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 Persen	957,573,000		100 Persen	1,112,500,000	
1	5	3	1.04	2	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	100,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	1.04	4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Dokumen	112,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	112,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	1.04	5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	2 Laporan	190,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	250,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	1.04	7	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1 Dokumen	555,073,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	650,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			45,713,202,063			52,947,120,000	
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	39,242,526,828		90 %	39,397,120,000	
1	6	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 Persen	798,377,000		90 Persen	700,000,000	
1	6	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	798,377,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Dokumen	700,000,000	Dinas Sosial
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	6	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	168 Orang	33,498,399,028		168 Orang	33,000,000,000	
1	6	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	168 Orang	30,939,400,972	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	168 Orang	30,000,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	2,558,998,056	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	3,000,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	5 Orang	12,000,000		5 Orang	12,000,000	
1	6	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	12,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Orang	12,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya	5 Paket	1,685,413,000		5 Paket	1,700,000,000	
1	6	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	65,283,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	50,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	165,180,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	400,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	271,900,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	250,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1,183,050,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	1,000,000,000	Dinas Sosial
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	6	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	32 Unit	1,204,038,500		32 Unit	1,650,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	6	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	794,010,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	1,400,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	146,109,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	50,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	263,919,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27 Unit	200,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95 %	490,803,300		95 %	585,120,000	
1	6	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	52,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	35,120,000	Dinas Sosial
1	6	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	438,803,300	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	550,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah Sesuai Kebutuhan	213 Unit	1,553,496,000		213 Unit	1,750,000,000	
1	6	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	26,831,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	30,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	10,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	20,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	585,015,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Unit	500,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	931,650,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	1,200,000,000	Dinas Sosial
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Lembaga Sosial yang diberdayakan	4 Lembaga	421,070,000		4 Lembaga	500,000,000	
1	6	2	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Tersedianya Lembaga / Orsos dalam Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	4 Lembaga	421,070,000		4 Lembaga	500,000,000	
1	6	2	1.02	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	103 Orang	421,070,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103 Orang	500,000,000	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	1138 Orang	2,546,712,610		1138 Orang	9,050,000,000	
1	6	4	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Tersedianya pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar	250 Orang	1,893,341,610		250 Orang	8,000,000,000	
1	6	4	1.01	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	200 Orang	241,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Orang	1,200,000,000	Dinas Sosial
1	6	4	1.01	4	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	90 Orang	227,400,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Orang	300,000,000	Dinas Sosial
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	6	4	1.01	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	250 Orang	1,244,741,610	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250 Orang	500,000,000	Dinas Sosial
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	6	4	1.01	9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	20 Orang	180,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	6,000,000,000	Dinas Sosial
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	6	4	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Tersedianya bantuan sosial bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar Luar Panti	200 Orang	215,620,000		200 Orang	350,000,000	
1	6	4	1.02	2	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	200 Orang	80,480,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Orang	150,000,000	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	6	4	1.02	8	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	200 Orang	135,140,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Orang	200,000,000	Dinas Sosial
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	6	4	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Tersedianya bantuan sosial bagi Lansia terlantar	270 Orang	168,690,000		270 Orang	200,000,000	
1	6	4	1.03	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	270 Orang	129,260,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	270 Orang	150,000,000	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	6	4	1.03	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	270 Orang	39,430,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	270 Orang	50,000,000	Dinas Sosial
1	6	4	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Tersedianya bantuan sosial bagi PMKS diluar HIV/AIDS dan Napza	38 Orang	269,061,000		38 Orang	500,000,000	
1	6	4	1.05	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	38 Orang	269,061,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38 Orang	500,000,000	Dinas Sosial
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Keluarga Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar	200 KPM	1,645,908,000		200 KPM	2,000,000,000	
1	6	5	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Tersedianya bantuan sosial bagi Keluarga Fakir Miskin	200 KPM	1,645,908,000		200 KPM	2,000,000,000	
1	6	5	1.02	2	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	UEP PKH, WRSE dan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin yang mandiri (KUBE dan WRSE) Kabupaten/Kota	200 KPM	1,645,908,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 KPM	2,000,000,000	Dinas Sosial
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Korban Bencana Sosial dan Bencana Alam yang mendapatkan perlindungan sosial	1118 Orang	1,222,354,125		1118 Orang	1,300,000,000	
1	6	6	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Tersedianya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1118 Orang	1,222,354,125		1118 Orang	1,300,000,000	
1	6	6	1.01	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	1118 Orang	469,640,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1118 Orang	500,000,000	Dinas Sosial
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	6	6	1.01	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	200 Orang	172,040,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Orang	200,000,000	Dinas Sosial
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	6	6	1.01	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	200 orang	580,674,125	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 orang	600,000,000	Dinas Sosial
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 TMP	634,630,500		1 TMP	700,000,000	
1	6	7	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Tersedianya kualitas pemeliharaan dan pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1 Dokumen	634,630,500		1 Dokumen	700,000,000	
1	6	7	1.01	1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Dokumen	634,630,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	700,000,000	Dinas Sosial
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			5,535,792,982			6,795,200,000	
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	2,774,171,382		90 %	3,540,000,000	
1	6	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Dokumen	1,547,119,232		1 Dokumen	2,000,000,000	
1	6	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1,547,119,232	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2,000,000,000	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	6	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas	1 Paket	54,900,000		1 Paket	75,000,000	
1	6	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	54,900,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	75,000,000	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1	6	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya	1 Paket	508,804,000		1 Paket	650,000,000	
1	6	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	31,983,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	50,000,000	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1	6	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	146,425,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	250,000,000	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1	6	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40,596,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	50,000,000	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1	6	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	289,800,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	300,000,000	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	6	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedinya Jasa Komunikasi, air dan listrik serta surat meyurat kantor	1 Laporan	278,044,400		1 Laporan	315,000,000	
1	6	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	271,964,400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	300,000,000	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1	6	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6,080,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	15,000,000	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1	6	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor setiap bulannya	312 Unit	385,303,750		312 Unit	500,000,000	
1	6	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	40,719,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Unit	50,000,000	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1	6	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	305 Unit	144,584,750	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	305 Unit	200,000,000	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1	6	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	250,000,000	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	1138 Orang	2,761,621,600		1138 Orang	3,255,200,000	
1	6	4	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Tersedianya bantuan sosial bagi Lansia terlantar	110 Orang	2,761,621,600		110 Orang	3,255,200,000	
1	6	4	1.03	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	110 Orang	2,044,664,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110 Orang	2,000,000,000	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1	6	4	1.03	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	110 Orang	3,640,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110 Orang	5,000,000	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1	6	4	1.03	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	110 Orang	100,143,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110 Orang	150,000,000	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1	6	4	1.03	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	110 Orang	171,724,600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110 Orang	200,000	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1	6	4	1.03	7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	110 Orang	370,200,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110 Orang	400,000,000	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	6	4	1.03	12	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	25 Orang	71,250,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	700,000,000	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			4,206,495,830			4,385,769,656	
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	2,511,725,830		90 %	2,385,769,656	
1	6	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Dokumen	1,005,769,656		1 Dokumen	1,005,769,656	
1	6	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1,005,769,656	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1,005,769,656	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
1	6	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya	1 Paket	527,806,768		1 Paket	320,000,000	
1	6	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,019,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	15,000,000	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
1	6	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	294,139,418	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	100,000,000	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
1	6	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7,112,350	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	5,000,000	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
1	6	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	217,536,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	200,000,000	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	6	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Komunikasi, air dan listrik serta surat meyurat kantor	1 Laporan	232,372,406		1 Laporan	255,000,000	
1	6	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,400,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	5,000,000	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
1	6	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	228,972,406	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	250,000,000	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
1	6	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor setiap bulannya	53 Unit	745,777,000		53 Unit	805,000,000	
1	6	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	112,583,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	150,000,000	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
1	6	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	38,300,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Unit	35,000,000	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
1	6	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	594,894,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	620,000,000	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	1138 Orang	1,694,770,000		1138 Orang	2,000,000,000	
1	6	4	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Tersedianya bantuan sosial bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar Luar Panti	80 Orang	1,694,770,000		80 Orang	2,000,000,000	
1	6	4	1.02	2	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	1,168,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Orang	1,300,000,000	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
1	6	4	1.02	3	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	285,900,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Orang	400,000,000	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
1	6	4	1.02	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	129,670,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Orang	150,000,000	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
1	6	4	1.02	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	85,700,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Orang	100,000,000	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
1	6	4	1.02	9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	25,500,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Orang	50,000,000	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			4,207,094,840			5,075,000,000	
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	2,323,531,840		90 %	2,885,000,000	
1	6	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1,306,621,040		1 Dokumen	1,500,000,000	
1	6	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1,306,621,040	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1,500,000,000	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
1	6	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Paket	37,600,000		1 Paket	50,000,000	
1	6	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	47 Stel	37,600,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47 Stel	50,000,000	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
1	6	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya	1 Paket	427,907,800		1 Paket	565,000,000	
1	6	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11,769,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	15,000,000	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
1	6	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	118,718,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	200,000,000	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
1	6	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23,220,800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	50,000,000	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
1	6	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	274,200,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	300,000,000	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	6	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Operasional	1 Paket	6,180,000		1 Paket	15,000,000	
1	6	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dJumlah Paket Mebel yang Disediakaniadakan	1 Paket	6,180,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	15,000,000	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
1	6	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya 12 Bulan	1 Laporan	232,949,000		1 Laporan	280,000,000	
1	6	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,500,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	15,000,000	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
1	6	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	162,777,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	200,000,000	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
1	6	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	64,672,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	65,000,000	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
1	6	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor setiap bulannya	40 Unit	312,274,000		40 Unit	475,000,000	
1	6	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	66,455,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Unit	75,000,000	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
1	6	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	47,389,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Unit	50,000,000	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
1	6	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	198,430,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	350,000,000	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	1138 Orang	1,883,563,000		1138 Orang	2,190,000,000	
1	6	4	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	80 Orang	1,883,563,000		80 Orang	2,190,000,000	
1	6	4	1.02	2	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	1,235,950,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Orang	1,400,000,000	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
1	6	4	1.02	3	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun	80 Orang	225,975,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan,	80 Orang	300,000,000	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
						Kewenangan Provinsi			Semua Kelurahan			
1	6	4	1.02	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	205,163,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Orang	250,000,000	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
1	6	4	1.02	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	71,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Orang	80,000,000	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
1	6	4	1.02	9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	145,475,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Orang	160,000,000	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			3,778,795,636			4,467,040,000	
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	2,027,496,600		90 %	2,441,040,000	
1	6	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Dokumen	1,032,579,816		1 Dokumen	1,200,000,000	
1	6	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1,032,579,816	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1,200,000,000	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
1	6	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas	1 Paket	54,000,000		1 Paket	75,000,000	
1	6	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	54,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	75,000,000	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
1	6	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya	1 Paket	489,289,200		1 Paket	705,000,000	
1	6	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19,932,200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	25,000,000	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
1	6	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	162,555,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	350,000,000	UPTD Panti Sosial Bina Remaja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	6	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24,802,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	30,000,000	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
1	6	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	282,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	300,000,000	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	6	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Komunikasi, air dan listrik serta surat meyurat kantor	2 Laporan	153,764,648		2 Laporan	160,040,000	
1	6	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	9,960,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	10,040,000	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
1	6	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	143,804,648	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	150,000,000	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
1	6	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor setiap bulannya	58 Unit	297,862,936		58 Unit	301,000,000	
1	6	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	30,846,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	30,000,000	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
1	6	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	80,125,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Unit	75,000,000	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
1	6	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	186,891,936	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	196,000,000	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	1138 Orang	1,751,299,036		1138 Orang	2,026,000,000	
1	6	4	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Tersedianya bantuan sosial bagi Anak Terlntar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar Dalam Panti	75 Orang	1,751,299,036		75 Orang	2,026,000,000	
1	6	4	1.02	2	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	75 Orang	756,391,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Orang	856,000,000	UPTD Panti Sosial Bina Remaja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	6	4	1.02	3	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	75 Orang	111,172,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Orang	120,000,000	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
1	6	4	1.02	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	75 Orang	23,160,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Orang	120,000,000	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
1	6	4	1.02	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	75 Orang	683,126,036	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Orang	750,000,000	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
1	6	4	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	60 Orang	177,450,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Orang	180,000,000	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			1,418,787,649			1,447,500,000	
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	903,806,649		90 %	1,132,500,000	
1	6	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Dokumen	507,984,224		1 Dokumen	600,000,000	
1	6	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	507,984,224	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	600,000,000	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
1	6	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulann	1 Paket	128,019,775		1 Paket	205,000,000	
1	6	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,154,575	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	15,000,000	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
1	6	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40,430,200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	35,000,000	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
1	6	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3,435,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	5,000,000	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	6	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	81,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	150,000,000	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	6	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedinya Jasa Komunikasi, air dan listrik serta surat meyurat kantor	1 Laporan	73,716,750		1 Laporan	120,000,000	
1	6	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	73,716,750	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	120,000,000	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
1	6	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor setiap bulannya	31 Unit	194,085,900		31 Unit	207,500,000	
1	6	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	4,500,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	7,500,000	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
1	6	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	39,585,900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Unit	35,000,000	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
1	6	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	165,000,000	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	1138 Orang	514,981,000		1138 Orang	315,000,000	
1	6	4	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Tersedianya bantuan sosial bagi PMKS diluar HIV/AIDS dan Napza	35 Orang	514,981,000		35 Orang	315,000,000	
1	6	4	1.05	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	35 Orang	220,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 Orang	100,000,000	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
1	6	4	1.05	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	35 Orang	244,841,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 Orang	150,000,000	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
1	6	4	1.05	9	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	35 Orang	5,140,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan,	35 Orang	15,000,000	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
						Kewenangan Provinsi			Semua Kelurahan			Mulia
1	6	4	1.05	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	10 Orang	45,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	50,000,000	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									kab. Tenggarong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			45,818,251,902			96,750,000,000	
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	83 %	40,387,320,642		83 %	66,450,000,000	
2	7	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi	10 Dokumen	1,438,791,000		10 Dokumen	3,050,000,000	
2	7	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	769,791,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	3 Dokumen	1,250,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	103,640,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	2 Dokumen	550,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	565,360,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	5 Dokumen	1,250,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	1 Laporan	36,502,420,866		1 Laporan	40,435,000,000	
2	7	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/Bulan	33,145,322,666	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	200 Orang/Bulan	36,035,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	3,263,378,200	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	12 Dokumen	3,500,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
									Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam			
2	7	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	30,600,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	1 Laporan	200,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	7	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	41,520,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	1 Laporan	350,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	21,600,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	1 Dokumen	350,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	243,580,000		12 Bulan	1,000,000,000	
2	7	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	190 Paket	153,580,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	190 Paket	500,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	90,000,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	4 Orang	500,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1,276,634,000		12 Bulan	17,270,000,000	
2	7	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	17,000,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	6 Paket	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	49,268,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	5 Paket	15,000,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	211,366,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	15 Paket	600,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
									Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam			
2	7	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	54,000,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	12 Paket	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	7	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	945,000,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	30 Laporan	1,500,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	382,688,200		12 Bulan	425,000,000	
2	7	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10,000,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	1 Laporan	5,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	372,688,200	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	3 Laporan	420,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	543,206,576		12 Bulan	1,270,000,000	
2	7	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	111,949,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	2 Unit	170,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	103,309,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	3 Unit	200,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	1	1.09	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	2 Unit	90,862,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	2 Unit	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	237,086,576	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	1 Unit	750,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	70 %	1,086,847,760		70 %	9,150,000,000	
2	7	3	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	90 Orang	864,427,760		90 Orang	7,750,000,000	
2	7	3	1.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	100 Orang	831,517,760	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	100 Orang	7,000,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	7	3	1.01	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	10 Lembaga	32,910,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	10 Lembaga	750,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	3	1.02		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang diAkreditasi	10 LPK	57,720,000		10 LPK	500,000,000	
2	7	3	1.02	1	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	10 LPK	57,720,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	10 LPK	500,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	3	1.03		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Jumlah Tenaga Kerja yang ditingkatkan Produktivitasnya	30 Orang	69,840,000		30 Orang	350,000,000	
2	7	3	1.03	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	30 Perusahaan	69,840,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	30 Perusahaan	350,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	3	1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	20 Orang	94,860,000		20 Orang	550,000,000	
2	7	3	1.04	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditingkatkan Produktifitasnya	20 Orang	94,860,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	20 Orang	550,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	31 %	1,009,086,000		31 %	10,000,000,000	
2	7	4	1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	3000 Orang	414,976,000		3000 Orang	6,550,000,000	
2	7	4	1.01	1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	40 Orang	44,160,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	40 Orang	250,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	4	1.01	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500 Orang	52,296,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	500 Orang	450,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	7	4	1.01	4	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	700 Orang	55,080,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	700 Orang	350,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	4	1.01	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	80 Orang	263,440,000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok	80 Orang	5,500,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
									Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			
									Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam			
									Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai			
2	7	4	1.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LPTKS yang mendapatkan izin	20 LPTKS	88,800,000		20 LPTKS	700,000,000	
2	7	4	1.02	1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi	5 Lembaga	44,160,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	5 Lembaga	350,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	4	1.02	2	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	5 Lembaga	44,640,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	5 Lembaga	350,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	4	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Tersedia nya Pelayanan Informasi Pasar Kerja Online	1 Aplikasi	411,350,000		1 Aplikasi	1,450,000,000	
2	7	4	1.03	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	41,040,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	1 Dokumen	350,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	4	1.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online	50000 Orang	54,360,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	50000 Orang	350,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	4	1.03	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	315,950,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	100 Orang	750,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	7	4	1.05		Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	40 Orang	40,320,000		40 Orang	550,000,000	
2	7	4	1.05	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	40 Orang	40,320,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	40 Orang	550,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	4	1.06		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	40 Orang	53,640,000		40 Orang	750,000,000	
2	7	4	1.06	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	40 Orang	53,640,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Orang	750,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	20 %	1,640,400,000		20 %	4,150,000,000	
2	7	5	1.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan	100 Surat keputusan	271,800,000		100 Surat keputusan	1,100,000,000	
2	7	5	1.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	20 Perusahaan	144,000,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	20 Perusahaan	600,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	7	5	1.01	2	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	20 Perusahaan	37,800,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	20 Perusahaan	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	5	1.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	1 Laporan	90,000,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	1 Laporan	350,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	5	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Pembinaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial PPHI	1 dokumen	430,200,000		1 dokumen	1,300,000,000	
2	7	5	1.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Perkara	169,200,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	1 Perkara	300,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	5	1.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	20 Perkara	88,200,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	20 Perkara	300,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	5	1.02	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	1 Serikat Pekerja	126,000,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	1 Serikat Pekerja	350,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	5	1.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	4 Lembaga	46,800,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	4 Lembaga	350,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	5	1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah SK Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota	11 Surat keputusan	938,400,000		11 Surat keputusan	1,750,000,000	
2	7	5	1.0	1	Penetapan Upah Minimum Provinsi	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	916,800,000	Kota Samarinda,	1 Surat	1,250,000,000	Dinas Tenaga Kerja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
			3		(UMP)				Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Keputusan		dan Transmigrasi
2	7	5	1.03	3	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK	10 Surat Keputusan	21,600,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	10 Surat Keputusan	500,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	6			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Perusahaan yang dibina dan diawasi	300 Perusahaan	1,694,597,500		300 Perusahaan	7,000,000,000	
2	7	6	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	jumlah perusahaan yang diawasi terkait norma ketenagakerjaan	150 perusahaan	1,694,597,500		150 perusahaan	7,000,000,000	
2	7	6	1.01	1	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	30 Perusahaan	530,640,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Perusahaan	2,000,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	7	6	1.01	2	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	30 Perusahaan	610,920,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Perusahaan	1,500,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	7	6	1.01	3	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	20 Perusahaan	553,037,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Perusahaan	3,500,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
									Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			681,906,000			5,530,000,000	
3	32	2			PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	Kawasan Transmigrasi	1 Kimtrans	250,818,000		1 Kimtrans	2,880,000,000	
3	32	2	1.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	kawasan transmigrasi	1 kimtrans	250,818,000		1 kimtrans	2,880,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	3 2	2	1.0 1	1	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	2 Dokumen	51,618,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	995,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	3 2	2	1.0 1	2	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	121,800,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kawasan Transmigrasi	535,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	3 2	2	1.0 1	3	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	0 Hektar	48,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Hektar	850,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	3 2	2	1.0 1	4	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	29,400,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	500,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	3 2	3			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya Masyarakat Transmigrasi Mandiri	1 Kimtrans	244,200,000		1 Kimtrans	1,450,000,000	
3	3 2	3	1.0 1		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Perjanjian Kerja sama antar daerah asal transmigran dan daerah tujuan transmigran	1 kimtrans	244,200,000		1 kimtrans	1,450,000,000	
3	3 2	3	1.0 1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	99,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	350,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
									Kab. Berau, Maratua, Payung-Payung			
									Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Embalut			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	3 2	3	1.0 1	2	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang	1 Dokumen	73,200,000	Kab. Berau, Maratua, Semua	1 Dokumen	550,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
					Setempat dan Transmigran	Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)			Kelurahan			
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan			
3	32	3	1.01	4	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	15 Kepala Keluarga	71,400,000	Kab. Berau, Maratua, Semua Kelurahan	15 Kepala Keluarga	550,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan			
3	32	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kesepakatan bersama dengan provinsi lain	1 Kimtrans	186,888,000		1 Kimtrans	1,200,000,000	
3	32	4	1.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Transmigran Mandiri	1 kimtrans	186,888,000		1 kimtrans	1,200,000,000	
3	32	4	1.01	1	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	15 Kepala Keluarga	85,008,000	Kab. Berau, Maratua, Payung-Payung	15 Kepala Keluarga	750,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
									Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Embalut			
									Kab. Paser, Tanjung Harapan, Keladen			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semoi Dua			
3	32	4	1.01	2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Satuan Permukiman	101,880,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Satuan Permukiman	450,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			11,067,240,098			23,100,000,000	
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	83 %	1,068,254,098		83 %	4,350,000,000	
2	7	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	1 Laporan	900,972,244		1 Laporan	850,000,000	
2	7	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	900,972,244	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	12 Bulan	850,000,000	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
2	7	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggara nya Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	129,500,000		12 Bulan	595,000,000	
2	7	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	7,500,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	5 Paket	30,000,000	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
2	7	1	1.0	2	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	17,000,000	Kota Balikpapan,	12 Bulan	150,000,000	UPTD Balai Latihan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
			6		Perlengkapan Kantor	yang Disediakan			Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru			Kerja Industri Balikpapan
2	7	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	10,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	12 Bulan	50,000,000	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
2	7	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	5,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	15 Paket	15,000,000	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
2	7	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	90,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	12 Bulan	350,000,000	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
2	7	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	15,810,000		12 Bulan	205,000,000	
2	7	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1,500,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	12 Bulan	5,000,000	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
2	7	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	14,310,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	12 Bulan	200,000,000	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
2	7	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	21,971,854		12 Bulan	1,200,000,000	
2	7	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	10,450,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	1 Unit	350,000,000	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
2	7	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Bulan	11,521,854	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	12 Bulan	850,000,000	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan (BLKI Balikpapan)	85 %	9,998,986,000		85 %	18,750,000,000	
2	7	3	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	1008 Orang	9,998,986,000		1008 Orang	18,750,000,000	
2	7	3	1.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	1008 Orang	9,984,946,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	1008 Orang	17,000,000,000	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	7	3	1.01	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	10 Lembaga	14,040,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	10 Lembaga	500,000,000	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			1,884,470,000			9,673,000,000	
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	83 %	1,023,670,000		83 %	2,673,000,000	
2	7	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	1 Laporan	975,000,000		1 Laporan	800,000,000	
2	7	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	975,000,000	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	12 Dokumen	800,000,000	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
2	7	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggara nya Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	42,002,000		12 Bulan	845,000,000	
2	7	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	3,000,000	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	9 Paket	15,000,000	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
2	7	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	11,602,000	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	4 Paket	200,000,000	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
2	7	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5,000,000	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	5 Paket	50,000,000	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
2	7	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	5,000,000	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	9 Paket	30,000,000	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
2	7	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	17,400,000	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	9 Laporan	550,000,000	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
2	7	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	6,668,000		12 Bulan	203,000,000	
2	7	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,000,000	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	1 Laporan	3,000,000	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	7	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	1,668,000	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	3 Laporan	200,000,000	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan (BLKI Bontang)	85 %	860,800,000		85 %	7,000,000,000	
2	7	3	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	160 orang	860,800,000		160 orang	7,000,000,000	
2	7	3	1.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi	160 Orang	860,800,000	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	160 Orang	7,000,000,000	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			20,917,765,000			23,762,400,000	
2	8	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kependudukan, Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak	100 %	16,840,565,000		100 %	18,170,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	8	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan dan pengannggran DKP3A yang tepat waktu dan tepat proses	100 %	440,000,000		100 %	345,000,000	
2	8	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	150,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 dokumen	55,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	2 dokumen	120,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	125,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	8	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	10,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	15,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	100,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	95,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	55,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	8	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran DKP3A Provinsi Kaltim	100 %	10,577,000,204		100 %	11,040,000,000	
2	8	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	10,535,000,204	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 orang/bulan	11,000,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	8	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	15,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	15,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	8	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 laporan	27,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 laporan	25,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	8	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kedisiplinan pegawai	100 %	733,960,000		100 %	800,000,000	
2	8	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	227,300,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 paket	250,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 orang	506,660,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 orang	550,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1,971,256,500		100 %	2,260,000,000	
2	8	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 komponen	11,340,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 komponen	25,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	179,637,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 paket	350,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	93,144,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 paket	150,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	8	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1680 eksplembar	13,440,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1680 eksplembar	35,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	185,025,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	150,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1,488,670,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	1,550,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	8	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	20 %	480,550,000		20 %	550,000,000	
2	8	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 paket	480,550,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 paket	550,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	2,232,312,296		100 persen	2,375,000,000	
2	8	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	11,660,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	20,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	400,005,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	450,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	49,750,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	55,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
												Perlindungan Anak
2	8	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1,770,897,296	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	1,850,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	405,486,000		100 %	800,000,000	
2	8	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	205,486,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 unit	250,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Tahun	200,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	550,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Implementasi Kelembagaan PUG	1 Kebijakan	1,300,000,000		1 Kebijakan	1,700,000,000	
2	8	2	1.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Penguatan kelembagaan PUG	1 kebijakan	550,000,000		1 kebijakan	650,000,000	
2	8	2	1.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	350,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	350,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	1 dokumen		Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen		
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	8	2	1.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	35 Perangkat Daerah	100,000,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 Perangkat Daerah	150,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	35 perangkat daerah		Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 perangkat daerah		
2	8	2	1.01	4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti/mendapatkan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	35 perangkat daerah	100,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 perangkat daerah	150,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender(PUG)termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	35 Perangkat Daerah		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 Perangkat Daerah		
2	8	2	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Pengembangan SDM Perempuan Bidang Politik dan hukum	1 dokumen	350,000,000		1 dokumen	450,000,000	
2	8	2	1.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	200,000,000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	8	2	1.02	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang mengikuti/mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota	30 Organisasi	150,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Organisasi	200,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	8	2	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 dokumen	400,000,000		1 dokumen	600,000,000	
2	8	2	1.03	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	10 lembaga	137,440,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 lembaga	250,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	8	2	1.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100 Orang	135,630,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	150,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	8	2	1.03	3	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	1 dokumen	126,930,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	200,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kebijakan Perlindungan Perempuan	4 Kebijakan	1,142,400,000		4 Kebijakan	2,100,000,000	
2	8	3	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan SDM yang memahami pencegahan kekerasan terhadap perempuan	0.038 %	442,400,000		0.038 %	500,000,000	
2	8	3	1.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan Provinsi	1 dokumen	221,200,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	1 dokumen	250,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	1.01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah Provinsi dan lintas Daerah Kab/Kota	40 orang	221,200,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	40 orang	250,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	1 dokumen	700,000,000		1 dokumen	1,600,000,000	
2	8	3	1.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	50 Orang	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	700,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	8	3	1.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	40 Layanan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Layanan	900,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Capaian Data Gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan Data Pilah	75 %	692,400,000		75 %	850,000,000	
2	8	5	1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Capaian Data Gender dan Anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan data pilah	80 %	692,400,000		80 %	850,000,000	
						Capaian Data Gender dan Anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan Data Pilah	80 %			80 %		
						Persentase data gender dan anak yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan	80 %			80 %		
2	8	5	1.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	3 Dokumen	472,400,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	550,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan			
2	8	5	1.01	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	1 Dokumen	220,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan			
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Penguatan Pemenuhan Hak Anak	3 Kebijakan	442,400,000		3 Kebijakan	442,400,000	
2	8	6	1.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Penguatan pelembagaan PHA	1 Kab/Kota	240,000,000		1 Kab/Kota	240,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	8	6	1.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha	30 organisasi	120,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 organisasi	120,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	8	6	1.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen	120,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	120,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	8	6	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Penguatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	1 dokumen	202,400,000		1 dokumen	202,400,000	
2	8	6	1.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	100,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	8	6	1.02	4	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	102,400,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	102,400,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Hak Anak	90 %	500,000,000		90 %	500,000,000	
2	8	7	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	dokumen pencegahan kekerasan terhadap anak	1 dokumen	250,000,000		1 dokumen	250,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
						Jumlah Peserta yang mendapatkan KIE	100 peserta			100 peserta		
						Peserta yang mengikuti sosialisasi	100 peserta			100 peserta		
2	8	7	1.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	250,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	8	7	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus anak	1 dokumen	250,000,000		1 dokumen	250,000,000	
2	8	7	1.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 dokumen	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	250,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN			1,200,150,000			1,424,150,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
					PENCATATAN SIPIL							
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kebijakan terkait dengan pendaftaran penduduk	6 Kebijakan	624,150,000		6 Kebijakan	624,150,000	
2	12	2	1.01		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	jumlah kebijakan terkait pelayanan pendaftaran penduduk Kab/Kota Se-Kaltim	1 kebijakan	624,150,000		1 kebijakan	624,150,000	
2	12	2	1.01	1	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	6 dokumen	624,150,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 dokumen	624,150,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan,			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Semua Kelurahan			
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kebijakan terkait pencatatan sipil	6 Kebijakan	278,000,000		6 Kebijakan	400,000,000	
2	12	3	1.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kebijakan teknis di bidang pencatatan sipil yang ditetapkan	1 Dokumen	278,000,000		1 Dokumen	400,000,000	
2	12	3	1.01	1	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan	6 dokumen	278,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 dokumen	400,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kebijakan terkait pengelolaan administrasi kependudukan	5 Kebijakan	298,000,000		5 Kebijakan	400,000,000	
2	12	4	1.01		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah data kependudukan	3 dokumen	298,000,000		3 dokumen	400,000,000	
2	12	4	1.01	2	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	6 dokumen	298,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 dokumen	400,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			1,448,200,000			865,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kebijakan tentang pengendalian penduduk	1 Kebijakan	277,400,000		1 Kebijakan	350,000,000	
2	14	2	1.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	kebijakan tentang pengendalian penduduk	5 dokumen	277,400,000		5 dokumen	350,000,000	
2	14	2	1.01	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	3 laporan	277,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 laporan	350,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Peningkatan SDM yang mendapatkan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	50 %	217,500,000		50 %	265,000,000	
2	14	3	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Peningkatan jumlah peserta KB	1 dokumen	217,500,000		1 dokumen	265,000,000	
2	14	3	1.01	5	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Dokumen	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	85,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	3	1.01	7	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	85,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	3	1.01	8	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	1 laporan	77,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	95,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Peningkatan SDM Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Kebijakan	953,300,000		1 Kebijakan	250,000,000	
2	14	4	1.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1 dokumen	953,300,000		1 dokumen	250,000,000	
2	14	4	1.01	3	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 laporan	953,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	1 laporan	250,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Semua Kelurahan			Perempuan dan Perlindungan Anak
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			56,077,101,041			57,308,881,839	
2	9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian	82 Skor	49,349,641,197		82 Skor	50,498,669,539	
2	9	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	1,123,548,000		24 Dokumen	1,118,753,000	
2	9	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	718,748,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	718,113,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	3,200,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	4,400,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	4,400,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	4,400,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	12 Laporan	87,840,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	83,640,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	300,560,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	300,600,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	40,981,154,125		12 Bulan	40,955,353,015	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	9	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	231 Orang/Bulan	40,432,434,125	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	231 Orang/Bulan	40,432,433,015	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	415,320,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	415,320,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	127,880,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	102,080,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	3,120,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	3,120,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	2,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Laporan	2,400,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	39,320,000		1 Laporan	39,320,000	
2	9	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	2,860,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2,860,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	36,460,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	36,460,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	181 Orang	551,968,000		181 Orang	261,705,000	
2	9	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	1 Paket	422,968,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	132,705,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	129,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Orang	129,000,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1,059,782,500		12 Bulan	1,166,982,500	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	9	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	31,481,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	31,481,500	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang disediakan	4 Paket	13,440,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	13,440,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	61,665,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	61,665,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	840,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	947,700,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	112,696,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	112,696,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	1 Unit	1,396,450,000		1 Unit	2,021,223,000	
2	9	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1,026,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	1,026,000,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	86 Unit	370,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Unit	995,223,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	2,932,615,232		12 Bulan	2,770,719,024	
2	9	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	38,010,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	38,000,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	452,363,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	424,551,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2,442,241,832	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	2,308,168,024	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,264,803,340		12 Bulan	2,164,614,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
					Daerah							
2	9	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	115,025,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	1,266,155,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	404,749,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28 Unit	379,707,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	179,958,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	183,408,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	464,771,340	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	265,944,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	100,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Unit	69,400,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan ; 2. Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi	97.5/91 Skor/Skor	4,440,272,883		97.5/91 Skor/Skor	3,037,824,900	
2	9	3	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	12 Laporan	801,556,883		12 Laporan	620,754,600	
2	9	3	1.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2 Laporan	232,350,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	232,366,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	9	3	1.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen	142,439,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	142,592,200	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	9	3	1.01	5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	1 Unit	426,767,883	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	245,796,400	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	9	3	1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Cadangan Pangan yang tersedia	210 Ton	1,583,203,000		210 Ton	397,158,000	
2	9	3	1.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	156,380,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	147,125,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	9	3	1.02	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	2 Laporan	1,294,020,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	117,230,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	9	3	1.02	4	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	210 Ton	132,803,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	210 Ton	132,803,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	9	3	1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Jumlah Media Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Media	2,055,513,000		1 Media	2,019,912,300	
2	9	3	1.04	1	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal berbasis sumber daya lokal	1 Dokumen	899,242,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	899,242,300	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	3	1.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan	588,758,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	556,157,700	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	3	1.04	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	567,512,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	564,512,300	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Desa Rawan Pangan	50 Desa	1,092,699,961		50 Desa	2,577,899,800	
2	9	4	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Laporan FSVA dan SKPG	3 Laporan	466,054,000		3 Laporan	463,011,600	
2	9	4	1.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	4 Dokumen	466,054,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	463,011,600	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	9	4	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Desa Rawan Pangan yang Ditangani	10 Desa	626,645,961		10 Desa	2,114,888,200	
2	9	4	1.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	1 Dokumen	342,365,961	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	326,033,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	9	4	1.02	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	284,280,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1,788,855,200	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan aman di kalimantan timur	92 %	1,194,487,000		92 %	1,194,487,600	
2	9	5	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah registrasi, sertifikasi dan rekomendasi keamanan pangan segar	17 Dokumen	1,194,487,000		17 Dokumen	1,194,487,600	
2	9	5	1.01	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi yang Dibina	1 Dokumen	523,816,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	523,816,200	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	5	1.01	2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	11 Sertifikat	124,138,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Sertifikat	124,138,600	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	5	1.01	3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	117,379,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	117,379,800	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	5	1.01	4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	104,558,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	104,559,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	5	1.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	1 Dokumen	324,594,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	324,594,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			37,263,493,855			14,342,559,248	
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Jumlah produksi padi ; 2. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	289846/292383 Ton/Ton	34,759,090,015		289846/292383 Ton/Ton	11,376,630,068	
						Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang di indentifikasi	249 Jumlah			249 Jumlah		
						Pengawasan Jumlah pestisida dan pupuk	50 Kali			50 Kali		
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber TPH yang Bersertifikat	82%			82%		
3	27	2	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas Tanaman Hortikultura	3.7 Ton	34,759,090,015		3.7 Ton	11,376,630,068	
3	27	2	1.01	1	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	2 laporan	33,238,763,415	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 laporan	10,494,415,068	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	2	1.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Petanian	2 dokumen	1,520,326,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	882,215,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan Yang Difasilitasi ; 2. Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	8500/7 Ha/Unit	2,504,403,840		8500/7 Ha/Unit	2,965,929,180	
						Jumlah Bangunan Yang Dibangun/Dipelihara	1 Unit			1 Unit		
3	27	3	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah kel. tani yang menerima bantuan tanaman pangan	228 Kel.Tani	2,504,403,840		228 Kel.Tani	2,965,929,180	
						Jumlah kel.tani yang menerima fasilitasi hortikultura	7 Unit			7 Unit		
3	27	3	1.01	1	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pembangunan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	2 dokumen	514,210,340	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	1,094,496,180	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	3	1.01	2	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	2 dokumen	1,219,276,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	1,065,995,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	3	1.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	2 dokumen	182,930,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	226,650,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	3	1.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	2 dokumen	186,045,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	227,595,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	27	3	1.01	9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 laporan	401,942,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 laporan	351,193,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			1,882,170,948			1,866,701,826	
2	9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian	82 Skor	1,882,170,948		82 Skor	1,866,701,826	
2	9	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	81,600,000		12 Bulan	78,960,000	
2	9	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Laporan	81,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	78,960,000	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	24 Orang	114,000,000		24 Orang	75,600,000	
2	9	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	114,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Orang	75,600,000	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	181,792,000		12 Bulan	206,988,000	
2	9	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	2,192,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	3,099,000	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	57,258,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	99,584,000	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	13,526,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	9,265,000	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	2,448,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	4 Laporan	1,440,000	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Semua Kelurahan			Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	106,368,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	93,600,000	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	31 Unit	253,976,000		31 Unit	230,879,000	
2	9	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia	28 Unit	253,976,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28 Unit	230,879,000	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	894,651,416		12 Bulan	896,097,416	
2	9	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	6,800,000	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	146,500,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	144,646,200	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	744,651,216	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	744,651,216	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	356,151,532		12 Bulan	378,177,410	
2	9	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasinal atau Lapngan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanya	38 Unit	66,894,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38 Unit	66,894,000	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	25,940,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	16,450,000	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	263,317,532	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	294,833,410	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			822,036,000			848,535,500	
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Jumlah produksi padi ; 2. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	289846/292383 Ton/Ton	822,036,000		289846/292383 Ton/Ton	848,535,500	
						Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang di indentifikasi	249 Jumlah			249 Jumlah		
						Pengawasan Jumlah pestisida dan pupuk	50 Kali			50 Kali		
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber TPH yang Bersertifikat	82/252 %/Unit			82/252 %/Unit		
3	27	2	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah produsen benih tanaman pangan dan hortikultura yang diterbitkan sertifikat kompetensi/rekomendasi	78 Sertifikat	768,301,000		78 Sertifikat	799,171,500	
3	27	2	1.02	1	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	85 sertifikat	346,243,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 sertifikat	411,407,000	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	2	1.02	2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1 laporan	208,477,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	181,805,000	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	2	1.02	3	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	1 dokumen	213,581,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	205,959,500	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	2	1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah varietas daerah yang di identifikasi	3 Varietas	53,735,000		3 Varietas	49,364,000	
3	27	2	1.03	2	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	1 VUB	53,735,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 VUB	49,364,000	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			3,180,191,961			2,469,549,176	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian	82 Skor	3,180,191,961		82 Skor	2,469,549,176	
2	9	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	78,120,000		12 Bulan	78,120,000	
2	9	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	78,120,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	78,120,000	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	85 Orang	170,001,200		85 Orang	170,782,000	
2	9	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	170,001,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	170,782,000	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1,164,898,000		12 Bulan	541,428,200	
2	9	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	39,341,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	39,986,000	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	266,533,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	190,439,000	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	11,592,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	11,683,200	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peratuiran Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	1,920,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	1,920,000	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	17,280,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	8,400,000	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	828,232,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	289,000,000	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,312,119,961		12 Bulan	1,412,926,126	
2	9	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	1 Laporan	5,000,000	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Semua Kelurahan			Hortikultura
2	9	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	89,534,505	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	108,733,670	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1,217,585,456	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	1,299,192,456	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	455,052,800		12 Bulan	266,292,850	
2	9	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	67,977,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	66,799,850	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	387,075,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	199,493,000	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			1,340,308,000			856,604,000	
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Jumlah produksi padi ; 2. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	289846/292383 Ton/Ton	421,092,000		289846/292383 Ton/Ton	262,086,000	
						Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang di indentifikasi	249 Jumlah			249 Jumlah		
						Pengawasan Jumlah pestisida dan pupuk	50 Kali			50 Kali		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber TPH yang Bersertifikat	82/252 %/Unit			82/252 %/Unit		
3	27	2	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah pupuk dan pestisida yang diawasi	20 Jenis	186,000,000		20 Jenis	51,000,000	
3	27	2	1.01	1	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	1 laporan	186,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	51,000,000	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	2	1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah pos pelayanan agens hayati (PPAH) yang dikembangkan	40 Kali	235,092,000		40 Kali	211,086,000	
3	27	2	1.03	4	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1 Laporan	235,092,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	211,086,000	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas Penanganan OPT DPI	30000 Ha	919,216,000		30000 Ha	594,518,000	
3	27	5	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas pengendalian OPT dan penanganan DPI	1500 Ha	919,216,000		1500 Ha	594,518,000	
3	27	5	1.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	6150 Ha	689,302,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6150 Ha	418,598,000	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	5	1.01	2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani	1000 Ha	229,914,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000 Ha	175,920,000	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			5,584,463,292			8,496,862,153	
2	9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian	82 Skor	5,584,463,292		82 Skor	8,496,862,153	
2	9	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	115,680,000		12 Bulan	116,520,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	9	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	115,680,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	116,520,000	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	136 Orang	204,705,000		136 Orang	129,890,000	
2	9	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	1 Paket	54,705,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	84,890,000	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Orang	45,000,000	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	169,693,000		12 bulan	169,682,000	
2	9	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	9,601,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	9,601,000	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,983,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	9,985,000	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2,496,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	2,496,000	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	9	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	147,613,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	147,600,000	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	5 Unit	3,092,335,303		5 Unit	6,114,896,383	
2	9	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia	5 Unit	115,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	61,360,000	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	2,160,283,803	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Unit	2,160,303,303	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	816,251,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	3,893,233,080	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,749,087,989		12 Bulan	1,719,281,770	
2	9	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	3,000,000	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	137,558,473	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	107,602,254	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	9,900,000	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	9	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,598,779,516	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1,598,779,516	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	252,962,000		12 Bulan	246,592,000	
2	9	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	81,484,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Unit	75,114,000	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	29,478,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	29,478,000	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	9	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	142,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	142,000,000	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			1,475,022,000			1,475,022,000	
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Jumlah produksi padi ; 2. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	289846/292383 Ton/Ton	1,475,022,000		289846/292383 Ton/Ton	1,475,022,000	
						Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang di indentifikasi	249 Jumlah			249 Jumlah		
						Pengawasan Jumlah pestisida dan pupuk	50 Kali			50 Kali		
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber TPH yang Bersertifikat	82/252 %/Unit			82/252 %/Unit		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	27	2	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Luas lahan yang menggunakan benih bersertifikat	940 Ha	1,475,022,000		940 Ha	1,475,022,000	
3	27	2	1.02	2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1 laporan	810,980,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	810,980,000	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	2	1.02	3	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	1 dokumen	664,042,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	664,042,000	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			3,022,433,818			4,775,015,636	
2	9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pertanian	82 Skor	3,022,433,818		82 Skor	4,775,015,636	
2	9	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	111,960,000		12 Bulan	114,240,000	
2	9	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	111,960,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	114,240,000	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
2	9	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	270,949,500		12 Bulan	281,780,000	
2	9	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	40,837,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	45,580,000	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
2	9	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	230,112,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	236,200,000	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
2	9	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	5 Unit	1,034,373,686		5 Unit	2,788,726,580	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	9	1	1.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	904,895,686	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	944,884,840	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
2	9	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	129,478,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	1,843,841,740	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
2	9	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1,303,895,632		12 Bulan	1,298,974,556	
2	9	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	17,192,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	89,443,000	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
2	9	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	156,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	173,527,920	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
2	9	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5,464,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	53,087,000	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
2	9	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,124,839,632	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	982,916,636	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
2	9	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	301,255,000		12 Bulan	291,294,500	
2	9	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	129,237,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Unit	130,894,500	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	9	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	172,018,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	160,400,000	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			3,077,558,000			3,111,982,000	
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang di bina ; 2. Jumlah Kelembagaan Petani berbasis Koorporasi yang dibina	441/4 Orang/Lembaga	3,077,558,000		441/4 Orang/Lembaga	3,111,982,000	
3	27	7	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh yang mendapat pembinaan dan diklat	456 Orang	989,301,000		456 Orang	1,055,392,000	
3	27	7	1.01	1	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	150 orang	989,301,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 orang	1,055,392,000	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
3	27	7	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian	291 Orang	1,432,557,000		291 Orang	1,800,020,000	
3	27	7	1.02	1	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Disemenisasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 dokumen	582,527,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	942,990,000	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
3	27	7	1.02	2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	7 kelompok	850,030,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 kelompok	857,030,000	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
3	27	7	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan dan sekolah lapang yang dilaksanakan	6 Unit	655,700,000		6 Unit	256,570,000	
3	27	7	1.03	1	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	1 unit	508,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	37,770,000	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
3	27	7	1.03	4	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	3 unit	147,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 unit	218,800,000	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
												Sumber Daya Manusia Pertanian
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			34,138,313,000			34,150,539,000	
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasam terhadap pelayanan urusan bidang lingkungan hidup	84 Indeks	22,338,213,000		84 Indeks	22,350,439,000	
2	11	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	100 Persen	1,070,000,000		100 Persen	1,070,000,000	
2	11	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	60,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	2 Dokumen	60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	140,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan	100 Persen	14,249,046,458		100 Persen	14,239,046,460	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	11	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	826 Orang/Bulan	13,130,286,458	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	826 Orang/Bulan	13,130,286,460	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	1,118,760,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	1,108,760,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian	100 Persen	280,000,000		100 Persen	280,385,000	
2	11	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	110 Paket	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110 Paket	80,385,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Orang	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administasi umum	100 Persen	1,561,380,306		100 Persen	1,559,000,000	
2	11	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	238,632,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Paket	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	87,334,502	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25 Dokumen	9,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Dokumen	9,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	1,226,413,804	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Laporan	1,250,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan	100 Persen	1,828,459,000		100 Persen	1,820,539,000	
2	11	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	1,142,535,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Paket	1,170,539,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	425,624,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit	260,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Unit	450,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	11	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 Persen	2,891,926,236		100 Persen	2,881,468,540	
2	11	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	387,627,876	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2,504,298,360	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	2,381,468,540	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	457,401,000		100 Persen	500,000,000	
2	11	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Kendaraan	257,384,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Kendaraan	300,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	200,017,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	2			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kebijakan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah	100 %	1,095,000,000		100 %	1,095,000,000	
						Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah	100 %			100 %		
2	11	2	1.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Presentase pelaksanaan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap dokumen perencanaan LH	100 Persen	440,000,000		100 Persen	440,000,000	
2	11	2	1.01	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	220,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	220,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	2	1.01	2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	220,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	220,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	2	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Presentase penyelenggaraan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup Strategis	100 Persen	655,000,000		100 Persen	655,000,000	
2	11	2	1.02	1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	2	1.02	2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	275,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	275,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	1 1	2	1.0 2	3	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen KLHS RZWP3K Provinsi/Reviu	1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah kab/kota yang dilakukan sosialisasi dan pembinaan Hasil KLHS RZWP3K	7 Kab/Kota			7 Kab/Kota		
2	1 1	2	1.0 2	4	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	1 Dokumen	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1 1	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Indeks Kualitas Air Sungai (IKA) ; 2. Indeks Kualitas Udara (IKU) ; 3 Indeks Kualitas Lahan (IKL) ; 4 Indeks kualitas air laut (IKAL)	53,85/89,21/79,91/83, 66 Indeks/Indeks	5,175,485,000		53,85/89,21/79, 91/83,66 Indeks /Indeks	5,175,485,000	
2	1 1	3	1.0 1		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	53 Dokumen	1,550,000,000		53 Dokumen	1,550,000,000	
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan serta pengendalian perubahan iklim	7 Singkronisasi			7 Singkronisasi		
2	1 1	3	1.0 1	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	53 Dokumen	775,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 Dokumen	775,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1 1	3	1.0 1	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	775,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	775,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1 1	3	1.0 2		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran (Status Mutu Air)	8 Tercemar Sedang	2,955,485,000		8 Tercemar Sedang	2,955,485,000	
2	1 1	3	1.0 2	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	1,755,485,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1,755,485,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1 1	3	1.0 2	2	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	200 Lokasi	1,200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Lokasi	1,200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1 1	3	1.0 3		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemulihan lingkungan	52.64 Persen	670,000,000		52.64 Persen	670,000,000	
2	1 1	3	1.0 3	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	1 Dokumen	120,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	120,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	11	3	1.03	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	1.03	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	15 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Dokumen	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	1.03	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	4 Dokumen	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase Perangkat (Dokumen dan Sistem) Keanekaragaman Hayati Daerah yang Terintegrasi ke dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah (RTRW beserta Rencana Rinci, RPJMD dan RPJPD	100 %	500,000,000		100 %	500,000,000	
2	11	4	1.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan keanekaragaman hayati provinsi	5 Kegiatan	500,000,000		5 Kegiatan	500,000,000	
2	11	4	1.01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	4	1.01	2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	650 Ha	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	650 Ha	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	4	1.01	5	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	532.143 Ha	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	532.143 Ha	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	4	1.01	6	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	60 Orang	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Orang	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	1. Persentase Pengurangan penggunan B3 (dari penggunaan merkuri tahun sebelumnya); 2. Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah (dari total limbah B3 yang dihasilkan)	8/50 %/%	550,000,000		8/50 %/%	550,000,000	
2	11	5	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha	23 Usaha	550,000,000		23 Usaha	550,000,000	
2	11	5	1.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	5	1.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan,	7 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Dokumen	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
					Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya						
2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup yang diawasi	100 %	1,030,000,000		100 %	1,030,000,000	
2	11	6	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan kegiatan usaha dan atau kegiatan yang telah dilakukan pengawasan dan pembinaan	12 Laporan	1,030,000,000		12 Laporan	1,030,000,000	
2	11	6	1.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	1 Dokumen	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	75,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6	1.01	2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	35 Orang	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 Orang	75,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6	1.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	100 Laporan	680,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Laporan	680,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6	1.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	50 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Dokumen	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan kelompok masyarakat terkait lingkungan hidup	52 %	940,000,000		52 %	940,000,000	
2	11	8	1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan lembaga /lembaga terkait lingkungan hidup	165 Pembinaan	940,000,000		165 Pembinaan	940,000,000	
2	11	8	1.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan	Jumlah Lembaga/ Kelompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	80 Lembaga	740,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Lembaga	740,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	8	1.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang	60 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	60 Dokumen	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
						Dilaksanakan			Semua Kelurahan			
2	11	9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan	84,42 %	250,000,000		84,42 %	250,000,000	
2	11	9	1.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase masyarakat/ lembaga pendidikan/ dunia usaha yang memenuhi syarat untuk diberikan penghargan dari hasil pembinaan	86.42 Persen	250,000,000		86.42 Persen	250,000,000	
2	11	9	1.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	295 Entitas	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	295 Entitas	250,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang diselesaikan	100 %	950,000,000		100 %	950,000,000	
2	11	10	1.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti	100 Persen	950,000,000		100 Persen	950,000,000	
2	11	10	1.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Diitangani	16 Dokumen	650,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Dokumen	650,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	1.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	11 Dokumen	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Dokumen	300,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah sesuai jakstrada	72 %	1,309,615,000		72 %	1,309,615,000	
2	11	11	1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Capaian penanganan sampah di kab/kota se-Kaltim	72 Persen	1,309,615,000		72 Persen	1,309,615,000	
2	11	11	1.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	1.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	2 Dokumen	499,615,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	499,615,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	1.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	1 Dokumen	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	11	11	1.01	6	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	180000 Ton	260,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	180000 Ton	260,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
									kab. Tenggarong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			31,150,092,000			2,823,000,000	
2	13	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa	100 %	21,856,334,000		100 %	0	
2	13	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	68 Nilai	1,264,991,000		68 Nilai	0	
2	13	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	340,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	17,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	812,991,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	9,699,978,000		12 Bulan	0	
2	13	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Bulan	8,885,298,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air	45 Bulan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Putih			Pemerintahan Desa
2	13	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	349,680,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	12 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	800 Dokumen	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	260,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	13	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	70,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	35,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	35,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	15,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah	1 Tahun	54,000,000		1 Tahun	0	
2	13	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	54,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum PD	12 Bulan	2,288,309,000		12 Bulan	0	
2	13	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	11 Paket	228,220,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	13	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang di sediakan	2 Paket	11,646,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	8 Paket	522,635,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	60,208,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,455,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan barang Milik daerah Penunjuang Urusan PD	12 Bulan	5,724,875,900		12 Bulan	0	
2	13	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	1,518,610,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	3 Paket	5,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4,201,265,900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjuang Urusan PD	12 bulan	2,656,157,100		12 bulan	0	
2	13	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	1 Laporan	384,661,295	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 Laporan	370,307,125	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	1 Laporan	1,886,188,680	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	1 Tahun	168,023,000		1 Tahun	0	
2	13	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	103,099,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
					Dinas Jabatan							
2	13	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	64,682,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	242,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	2			PROGRAM PENATAAN DESA	Kabupaten yang telah melaksanakan penataan desa	7 Kab	100,000,000		7 Kab	120,000,000	
2	13	2	1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah Kabupaten yang telah melaksanakan penataan desa	7 Kabupaten	100,000,000		7 Kabupaten	120,000,000	
2	13	2	1.01	3	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen	100,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	120,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	13	3			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Desa Berkembang	30 Desa	1,750,000,000		30 Desa	0	
2	13	3	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Desa Berkembang	30 Desa	1,750,000,000		30 Desa	0	
2	13	3	1.01	1	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1,150,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	13	3	1.01	2	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	1 Dokumen	100,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	13	3	1.01	3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal (Desa)	45 Desa	3,629,224,500		45 Desa	2,703,000,000	
2	13	4	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahahan desa secara optimal	45 Desa	3,629,224,500		45 Desa	2,703,000,000	
2	13	4	1.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	1 Dokumen	50,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	51,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	13	4	1.01	2	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	50,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	51,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	13	4	1.01	4	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	2 Dokumen	327,749,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	4	1.01	5	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	763,275,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	800,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	13	4	1.01	6	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	100,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	13	4	1.01	7	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	167 Orang	75,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	167 Orang	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	13	4	1.01	8	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	350,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	400,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	13	4	1.01	10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	45 Orang	400,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Orang	450,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	13	4	1.01	11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	45 Orang	275,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Orang	300,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	13	4	1.01	15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	3 Dokumen	900,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	13	4	1.01	16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	200,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	13	4	1.01	19	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Dokumen	50,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	51,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	13	4	1.01	21	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	1 Laporan	88,200,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan	30 Desa	3,814,533,500		30 Desa	0	
2	13	5	1.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal yg lembaga kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPN, dan pokmas yang berhasil menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan	30 desa	3,814,533,500		30 desa	0	
2	13	5	1.01	1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen	415,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	13	5	1.01	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,	3 dokumen	300,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
					Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	13	5	1.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	20 lembaga	407,540,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 lembaga	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	13	5	1.01	4	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Unit	500,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	13	5	1.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	500,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	13	5	1.01	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	50,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan,			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									kab. Tenggarong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	13	5	1.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	jumlah laporan hasil fasilitas tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	5 Laporan	1,641,993,500	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			50,156,521,884			51,577,976,150	
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %	31,502,305,349		100 %	34,382,060,696	
2	15	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	75.5 %	2,162,653,500		75.5 %	1,177,433,800	
2	15	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	872,150,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	399,980,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	277,395,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	278,653,800	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	709,822,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Laporan	334,300,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	303,286,500	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	164,500,000	Dinas Perhubungan
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	15	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapaianya Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	15,265,426,005		100 %	18,453,708,714	
2	15	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/ Bulan	14,564,326,005	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	84 Orang/ Bulan	17,847,088,714	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	701,100,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan,	12 Dokumen	606,620,000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Semua Kelurahan			
2	1 5	1	1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya ASN yang memiliki standar kompetensi	25 orang	453,863,000		25 orang	248,780,000	
2	1 5	1	1.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	152,100,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1 Paket	152,780,000	Dinas Perhubungan
2	1 5	1	1.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	65 Orang	301,763,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	65 Orang	96,000,000	Dinas Perhubungan
2	1 5	1	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Umum	12 Bulan	2,047,341,300		12 Bulan	2,040,829,335	
2	1 5	1	1.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	49,998,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Paket	49,998,353	Dinas Perhubungan
2	1 5	1	1.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	175 Paket	175,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	175 Paket	175,164,400	Dinas Perhubungan
2	1 5	1	1.0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	199,275,300	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Paket	199,275,582	Dinas Perhubungan
2	1 5	1	1.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1,623,068,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	1,616,391,000	Dinas Perhubungan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	15	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah	60 %	3,555,165,500		60 %	3,335,427,430	
2	15	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	1,448,312,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Unit	1,353,975,310	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	255 Unit	2,106,853,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	255 Unit	1,981,452,120	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	1 5	1	1.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	3,812,587,789		12 Bulan	5,199,339,154	
2	1 5	1	1.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	25,460,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	12 Laporan	25,468,361	Dinas Perhubungan
2	1 5	1	1.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	987,457,369	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	12 Laporan	2,374,198,784	Dinas Perhubungan
2	1 5	1	1.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,799,670,420	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	12 Laporan	2,799,672,009	Dinas Perhubungan
2	1 5	1	1.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100 %	4,205,268,255		100 %	3,926,542,263	
2	1 5	1	1.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	120,354,900	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	2 Unit	120,359,300	Dinas Perhubungan
2	1 5	1	1.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	294,940,450	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 Unit	294,941,710	Dinas Perhubungan
2	1 5	1	1.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	639 Unit	234,080,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	639 Unit	204,890,000	Dinas Perhubungan
2	1 5	1	1.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3,555,892,905	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1 Unit	3,306,351,253	Dinas Perhubungan
2	1 5	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Lakalantas	342 kasus	11,500,299,783		342 kasus	11,111,749,018	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	15	2	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan	80 %	5,443,061,853		80 %	3,914,492,828	
2	15	2	1.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	525 Unit	3,347,089,453	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	525 Unit	2,739,450,707	Dinas Perhubungan
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	15	2	1.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	40 Unit	2,095,972,400	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Unit	1,175,042,121	Dinas Perhubungan
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	15	2	1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Perencanaan Pembangunan Terminal	4 Perencanaan	746,800,000		4 Perencanaan	1,230,000,000	
2	15	2	1.03	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1 Dokumen	746,800,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1,230,000,000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	1 5	2	1.0 5		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Prosentase Kepatuhan Rekomendasi MRLL	100 %	2,074,997,680		100 %	2,114,985,000	
2	1 5	2	1.0 5	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	10 Laporan	114,150,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	114,985,000	Dinas Perhubungan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	1 5	2	1.0 5	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	8 Laporan	1,703,438,680	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Laporan	1,700,000,000	Dinas Perhubungan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	1 5	2	1.0 5	5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	2 Laporan	257,409,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	300,000,000	Dinas Perhubungan
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	1 5	2	1.0 6		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah izin andalalin yang di keluarkan	30 Izin Andalalin	384,356,000		30 Izin Andalalin	549,000,000	
2	1 5	2	1.0 6	4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	2 Laporan	384,356,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	549,000,000	Dinas Perhubungan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	1 5	2	1.0 7		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	85 %	640,027,000		85 %	599,617,390	
2	1 5	2	1.0 7	2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	9 Laporan	90,410,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Laporan	50,000,000	Dinas Perhubungan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	15	2	1.07	3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	6 Laporan	99,617,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	99,617,390	Dinas Perhubungan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	15	2	1.07	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	2 Laporan	220,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	220,000,000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	15	2	1.07	5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	3 Laporan	230,000,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	230,000,000	Dinas Perhubungan
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	15	2	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum dan/atau Barang yang tersedia	20 Unit	529,850,000		20 Unit	501,535,000	
2	15	2	1.08	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	20 Unit	400,850,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Unit	350,000,000	Dinas Perhubungan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	15	2	1.08	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	3 Laporan	129,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	151,535,000	Dinas Perhubungan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	15	2	1.09		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penetapan Kawasan	1 Penetapan	149,999,600		1 Penetapan	500,000,000	
2	15	2	1.09	1	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	149,999,600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	500,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Angkutan Orang yang dikeluarkan	75 Izin	892,670,900		75 Izin	902,078,800	
2	15	2	1.13	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	75 Unit	299,890,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Unit	385,340,200	Dinas Perhubungan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	15	2	1.13	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	3 Laporan	592,780,900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	516,738,600	Dinas Perhubungan
2	15	2	1.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin Angkutan Taksi yang Dikeluarkan	75 Izin	389,600,000		75 Izin	549,000,000	
2	15	2	1.14	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	75 Unit	151,300,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Unit	200,000,000	Dinas Perhubungan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	15	2	1.14	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	40 Laporan	238,300,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Laporan	349,000,000	Dinas Perhubungan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	15	2	1.15		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Trayek yang telah ditetapkan besaran Tarif	35 Trayek	248,936,750		35 Trayek	251,040,000	
2	15	2	1.15	1	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Dokumen	248,936,750	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	251,040,000	Dinas Perhubungan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	15	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	88 %	5,707,600,452		88 %	4,887,850,000	
2	15	3	1.03		Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASDP	300 Izin	443,200,000		300 Izin	789,850,000	
2	15	3	1.03	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	300 Unit	131,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Unit	189,850,000	Dinas Perhubungan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	15	3	1.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	312,200,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	600,000,000	Dinas Perhubungan
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	15	3	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Studi Pengembangan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan	1 Dokumen	200,000,000		1 Dokumen	200,000,000	
2	15	3	1.05	1	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	200,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	3	1.06		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan	Jumlah Izin Jasa Pelayaran	100 Izin	512,400,000		100 Izin	700,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
					Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas							
2	15	3	1.06	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100 Dokumen	212,400,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Dokumen	300,000,000	Dinas Perhubungan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	15	3	1.06	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	2 Laporan	300,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	400,000,000	Dinas Perhubungan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	15	3	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Peningkatan Fasilitas/Fasilitasi Pelabuhan Pengumpan Regional	97.5 %	4,552,000,452		97.5 %	3,198,000,000	
2	15	3	1.09	2	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	1 Unit	4,552,000,452	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	3,198,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	5			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Kabupaten/Kota yang tersosialisasikan perencanaan, peraturan dan kebijakan perkeretaapian	80 %	1,446,316,300		80 %	1,196,316,436	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	15	5	1.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	1,446,316,300		1 Dokumen	1,196,316,436	
2	15	5	1.01	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	1,250,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Perhubungan
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	15	5	1.01	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	196,316,300	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	196,316,436	Dinas Perhubungan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			22,383,025,116			21,091,901,850	
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %	4,089,951,564		100 %	3,900,526,786	
2	15	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Umum	12 Bulan	693,241,600		12 Bulan	595,024,707	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	15	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	24,176,600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 paket	58,393,207	UPTD Terminal
2	15	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket	35,366,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27 Paket	28,328,000	UPTD Terminal
2	15	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	82,299,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Paket	82,303,500	UPTD Terminal
2	15	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	551,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	426,000,000	UPTD Terminal
									Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	15	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah	50 %	726,351,200		50 %	392,938,025	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	1 5	1	1.0 7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	157,810,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	112,939,370	UPTD Terminal
2	1 5	1	1.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	165 Unit	568,541,200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	165 Unit	279,998,655	UPTD Terminal
2	1 5	1	1.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	2,494,515,764		12 Bulan	2,673,075,704	
2	1 5	1	1.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	16,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	16,000,000	UPTD Terminal
2	1 5	1	1.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	110,942,500	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	292,955,140	UPTD Terminal
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	15	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,367,573,264	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	2,364,120,564	UPTD Terminal
2	15	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	30 %	175,843,000		30 %	239,488,350	
2	15	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	24,593,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Unit	21,438,350	UPTD Terminal
2	15	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	151,250,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Unit	218,050,000	UPTD Terminal
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Lakalantas	342 kasus	18,293,073,552		342 kasus	17,191,375,064	
2	15	2	1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Penumpang Terminal yang Terlayani	750000 Orang	18,293,073,552		750000 Orang	17,191,375,064	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	15	2	1.03	2	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	1 Unit	1,406,041,807	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	922,834,532	UPTD Terminal
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2	15	2	1.03	3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan	1 Unit	16,887,031,745	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	16,268,540,532	UPTD Terminal
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			54,291,671,500			46,057,736,001	
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas dan Diskominfo	100 Persen	27,042,924,380		100 Persen	21,007,736,000	
2	16	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan sesuai dengan Pedoman	12 Dokumen	460,780,000		12 Dokumen	490,000,000	
2	16	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	272,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	290,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	187,980,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	200,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib administrasi keuangan	12 bulan	12,119,774,815		12 bulan	11,567,615,682	
2	16	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/ Bulan	11,067,624,815	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 Orang/ Bulan	11,067,615,682	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200 Dokumen	1,052,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Dokumen	500,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib administrasi BMD pada SKPD	12 bulan	5,950,000		12 bulan	10,000,000	
2	16	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	10,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	124 orang	235,500,000		124 orang	350,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	16	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	187,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	300,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	48,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	1,926,991,000		12 bulan	1,785,000,000	
2	16	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14,335,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	15,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25,320,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	20,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	91,392,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	1,795,944,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	1,700,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor	1 Perangkat Daerah	7,986,946,037		1 Perangkat Daerah	1,963,120,318	
2	16	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	760,430,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	500,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	166,640,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	114,312,159	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	2,065,851,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Unit	1,234,496,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	1.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4,994,025,037	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	114,312,159	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	3,507,387,528		12 bulan	3,892,000,000	
2	16	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	12,040,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	12,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	16	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	375,690,008	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	450,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	171,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	30,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2,948,507,520	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	3,400,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan / rehabilitasi gedung dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	12 bulan	799,595,000		12 bulan	950,000,000	
2	16	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	271,187,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Unit	400,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	199,408,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	150,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	329,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	400,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase desiminasi informasi program dan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah melalui media komunikasi publik	80 Persen	14,100,933,000		80 Persen	14,250,000,000	
2	16	2	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah diseminasi informasi program dan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah melalui media komunikasi publik	80 Persen	14,100,933,000		80 Persen	14,250,000,000	
2	16	2	1.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	299,040,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	1.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	550,944,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	550,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	1.01	3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	399,834,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	400,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	16	2	1.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	650,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	650,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	1.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	2,707,125,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	4,000,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	1.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	4,550,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	4,200,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	1.01	7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Layanan	500,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	1.01	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1,100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	1.01	9	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 Dokumen	243,990,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	45 Orang	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Orang	350,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	2,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	900,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	950,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pengamanan dan Layanan Informasi	70 Persen	13,147,814,120		70 Persen	10,800,000,001	
2	16	3	1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah persentase layanan domain	80 Persen	6,167,644,120		80 Persen	3,500,000,000	
2	16	3	1.01	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	2,000,010,720	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2,000,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	1.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	38 Unit	4,167,633,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38 Unit	1,500,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	16	3	1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Persentase Implementasi e-government yang dilaksanakan	70 Persen	6,980,170,000		70 Persen	7,300,000,001	
2	16	3	1.02	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1,088,784,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	700,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	1.02	2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	1,010,944,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	700,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	1.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	20 Unit	2,294,070,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Unit	1,000,000,001	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	1.02	4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	487,321,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	1.02	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	281,444,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	1.02	6	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	22 Perangkat Daerah	484,960,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22 Perangkat Daerah	1,000,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	1.02	8	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	432,640,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Layanan	1,000,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	900,006,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	900,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			3,999,950,000			3,000,000,000	
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Elemen Data Statistik Sektoral dilingkup Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrakstruktur	70 Persen	3,999,950,000		70 Persen	3,000,000,000	
2	20	2	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah Persentase Elemen Data Statistik Sektoral Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrakstruktur di Pemprov. Kaltim	70 Persen	3,999,950,000		70 Persen	3,000,000,000	
2	20	2	1.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	549,995,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	550,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	2	1.01	2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	12 Orang	249,984,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Orang	250,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	20	2	1.01	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	699,988,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	700,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	2	1.01	4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	100 Orang	849,996,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	600,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	2	1.01	5	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	1,649,986,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	900,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			1,851,910,500			5,000,000,000	
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)	3 indeks	1,851,910,500		3 indeks	5,000,000,000	
2	21	2	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	27 Perangkat Daerah	1,536,313,000		27 Perangkat Daerah	4,000,000,000	
2	21	2	1.01	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	1 Dokumen	349,490,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	2	1.01	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	276,672,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1,000,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	2	1.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	512,051,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1,000,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	2	1.01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	27 Perangkat Daerah	398,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27 Perangkat Daerah	1,000,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	2	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Pemanfaatan Jaring Komunikasi Sandi untuk Pengamanan Informasi Publik yang dikecualikan	1 Kegiatan	315,597,500		1 Kegiatan	1,000,000,000	
2	21	2	1.02	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	27 Perangkat Daerah	315,597,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27 Perangkat Daerah	1,000,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			28,648,663,000			34,420,020,000	
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Penanaman Modal	86 %	19,748,663,000		86 %	20,970,020,000	
2	18	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	71 Nilai AKIP	1,100,000,000		71 Nilai AKIP	2,000,000,000	
2	18	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	700,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	1,000,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	24 Dokumen	12,970,783,422		24 Dokumen	13,515,765,754	
2	18	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang / Bulan	9,563,355,206	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 Orang / Bulan	10,115,765,754	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85 Dokumen	3,007,428,216	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Dokumen	3,000,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000 Dokumen	400,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah orang pengurusan dan invetarisir barang milik daerah	2 Orang	27,600,000		2 Orang	61,800,000	
2	18	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17 Laporan	27,600,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Laporan	61,800,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah melaksanakan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Pegawai	437,520,000		100 Pegawai	212,070,000	
2	18	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	353,520,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	127,070,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	84,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	85,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	18	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana	12 Bulan	905,167,500		12 Bulan	1,028,706,855	
2	18	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	24,704,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Paket	24,714,144	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	160,280,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Paket	261,823,544	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	84,999,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	5,975,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen	19,200,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Dokumen	19,200,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109 Laporan	612,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	109 Laporan	712,200,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	3,984,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	4,794,167	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	76 Unit/ Tahun	1,942,596,700		76 Unit/ Tahun	797,590,000	
2	18	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	342,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	220,020,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	36 Paket	187,412,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Paket	49,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	38 Unit	1,413,184,700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38 Unit	528,070,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	12 Bulan	729,026,000		12 Bulan	961,365,591	
2	18	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	372,820,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	515,500,041	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15,450,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	105,843,550	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	18	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	340,756,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	340,022,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasrana milik daerah yang terpelihara	6 Kegiatan	1,635,969,378		6 Kegiatan	2,392,721,800	
2	18	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	402,738,200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Unit	398,775,800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	214,500,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Unit	219,936,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	868,251,178	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	1,644,930,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	150,480,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	129,080,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah dokumen Kajian dan Kebijakan Penanaman Modal	2 Dokumen	2,000,000,000		2 Dokumen	3,000,000,000	
2	18	2	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah dokumen RUPM dan peta potensi	2 Dokumen	2,000,000,000		2 Dokumen	3,000,000,000	
2	18	2	1.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	700,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1,500,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	2	1.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1 Dokumen	1,300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1,500,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Provinsi	11 Laporan	2,000,000,000		11 Laporan	3,500,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	18	3	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan	11 Kegiatan	2,000,000,000		11 Kegiatan	3,500,000,000	
2	18	3	1.01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi	3 Dokumen	800,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	1,500,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	3	1.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	7 Dokumen	1,200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Dokumen	2,000,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan	10 Hari	2,600,000,000		10 Hari	3,700,000,000	
2	18	4	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah penyelesaian penerbitan izin/ non izin	1450 Izin/ Non Izin	2,600,000,000		1450 Izin/ Non Izin	3,700,000,000	
2	18	4	1.02	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	80 Pelaku Usaha	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Pelaku Usaha	700,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4	1.02	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	2 Kegiatan Usaha	1,100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kegiatan Usaha	2,000,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4	1.02	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	5 Orang	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Orang	500,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4	1.02	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	6 Kegiatan Usaha	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Kegiatan Usaha	500,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM	100 %	1,500,000,000		100 %	2,250,000,000	
2	18	5	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	8 Perusahaan	1,500,000,000		8 Perusahaan	2,250,000,000	
2	18	5	1.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	1000 Kegiatan Usaha	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000 Kegiatan Usaha	750,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	18	5	1.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	10 Pelaku Usaha	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Pelaku Usaha	750,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5	1.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	2 Kegiatan Usaha	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kegiatan Usaha	750,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah kegiatan percepatan pengurusan pelayanan perizinan	4 Kegiatan	800,000,000		4 Kegiatan	1,000,000,000	
2	18	6	1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Media eletronik yang tersedia	3 Media	800,000,000		3 Media	1,000,000,000	
2	18	6	1.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen	800,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			62,339,821,182			84,110,000,000	
2	19	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	95 Persen	23,356,821,182		95 Persen	23,260,000,000	
2	19	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	348,790,000		13 Dokumen	290,000,000	
2	19	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	211,030,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	6 Dokumen	170,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	30,004,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	29,996,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	19	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	57,760,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	2 Laporan	30,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	20,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	4 Laporan	30,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	15 Dokumen	16,447,342,852		15 Dokumen	18,000,000,000	
2	19	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/ Bulan	16,034,902,852	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	78 Orang/ Bulan	17,500,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	412,440,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	1 Dokumen	500,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi BMD	1 Laporan	34,716,500		1 Laporan	50,000,000	
2	19	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	34,716,500	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	1 Laporan	50,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2,205,997,350		12 Bulan	790,000,000	
2	19	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,314,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	1 Paket	40,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	286,859,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	15 Paket	125,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	179,053,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	1 Paket	45,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	99,750,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	1 Paket	30,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	96,471,350	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	1 Paket	25,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1,389,550,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	300,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	19	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10000 Dokumen	72,500,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	10000 Dokumen	150,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	66,500,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	1 Dokumen	75,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	436,686,000		12 Bulan	0	
2	19	1	1.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	436,686,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	4 Unit	0	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2,803,503,480		12 Bulan	3,000,000,000	
2	19	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	459,370,800	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	12 Laporan	500,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2,344,132,680	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	1 Laporan	2,500,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,079,785,000		12 Bulan	1,130,000,000	
2	19	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	125,827,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	22 Unit	135,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	104,412,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	6 Unit	75,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	1	1.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	531,800,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	30 Unit	500,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	199,650,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	1 Unit	250,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	118,096,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	1 Unit	170,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan	1.20 %	18,550,000,000		1.20 %	20,240,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	19	2	1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	12370 Orang	16,550,000,000		12370 Orang	18,590,000,000	
2	19	2	1.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	630 Orang	2,750,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	630 Orang	3,300,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	2	1.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	10000 Orang	8,400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10000 Orang	9,075,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	2	1.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	940 Orang	1,850,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	940 Orang	2,200,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	2	1.01	4	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	500 Orang	2,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Orang	2,750,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	2	1.01	6	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	7 Dokumen	650,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Dokumen	715,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	2	1.01	9	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	300 Orang	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Orang	550,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	2	1.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pemuda yang terlibat dalam organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan Daerah Tingkat Provinsi	600 Orang	2,000,000,000		600 Orang	1,650,000,000	
2	19	2	1.02	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	6 Dokumen	2,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	1,650,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	80 Persen	18,383,000,000		80 Persen	28,500,000,000	
						Presentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	80 %			80 %		
2	19	3	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah atlet yang dibina dan dikembangkan melalui olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dalam Kewenangan Provinsi	3000 Orang	1,800,000,000		3000 Orang	2,250,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	19	3	1.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	2 Unit	1,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	1,500,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	3	1.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	2 Dokumen	300,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	750,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	3	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah atlet daerah yang mengikuti penyelenggaraan kejuaraan olahraga	7000 Orang	6,000,000,000		7000 Orang	8,500,000,000	
2	19	3	1.02	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	10 Dokumen	3,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	4,000,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	3	1.02	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	500 Orang	3,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Orang	4,500,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	3	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah atlet, pelatih, juri dan wasit yang mengikuti kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional	1000 Orang	5,509,000,000		1000 Orang	10,000,000,000	
2	19	3	1.03	2	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Pelatda	1,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Pelatda	2,500,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	3	1.03	3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	500 Orang	2,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Orang	3,500,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	3	1.03	4	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	200 Orang	503,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Orang	1,500,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	3	1.03	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	1,006,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2,500,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	3	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan	300 Orang	5,074,000,000		300 Orang	7,750,000,000	
2	19	3	1.04	1	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	2,200,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2,750,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	3	1.04	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	1,116,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	2,000,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Semua Kelurahan			
2	19	3	1.04	3	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	1 Dokumen	1,758,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	3,000,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	8 %	2,050,000,000		8 %	12,110,000,000	
2	19	4	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pramuka yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan organisasi	5000 Orang	2,050,000,000		5000 Orang	12,110,000,000	
2	19	4	1.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan termanfaatkan	10 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	110,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	4	1.01	5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	1 Laporan	2,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	12,000,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			14,999,999,818			16,789,339,600	
2	19	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	95 %	14,999,999,818		95 %	16,789,339,600	
2	19	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1,494,254,470		12 Bulan	1,335,339,600	
2	19	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	398,157,070	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	1 Paket	150,339,600	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
2	19	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	221,494,900	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	1 Paket	300,000,000	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
2	19	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	101,195,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	1 Paket	220,000,000	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
2	19	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	78,407,500	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	1 Paket	125,000,000	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
2	19	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	1 Paket	90,000,000	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
2	19	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	675,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	450,000,000	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	19	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	220,020,000		12 Bulan	260,000,000	
2	19	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	220,020,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	260,000,000	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
2	19	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	8,241,408,383		12 Bulan	8,300,000,000	
2	19	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2,796,532,863	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	12 Laporan	2,300,000,000	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
2	19	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	513,420,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	500,000,000	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
2	19	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4,931,455,520	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	1 Laporan	5,500,000,000	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
2	19	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	5,044,316,965		12 Bulan	6,894,000,000	
2	19	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	103,384,500	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	1 Unit	175,000,000	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
2	19	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	18,250,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	1 Unit	19,000,000	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
2	19	1	1.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2,572,913,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	4 Unit	2,700,000,000	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
2	19	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	2,349,769,465	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	4 Unit	4,000,000,000	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			25,943,914,400			30,219,375,583	
2	23	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Arsip	100 %	23,352,973,600		100 %	26,169,375,583	
2	23	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	67 Skor	250,033,500		67 Skor	300,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	23	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	50,033,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 laporan	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Arsip	100 %	17,426,000,396		100 %	19,072,968,108	
2	23	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang	17,000,000,396	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Orang	18,522,968,108	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	312,600,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	350,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	61,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	52,200,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	60,600,000		100 %	75,000,000	
2	23	1	1.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	60,600,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	75,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 %	132,075,000		100 %	225,000,000	
2	23	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	84,075,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	125,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	48,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	100 %	1,743,449,000		100 %	2,132,994,700	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	23	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	34,892,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Paket	50,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	439,358,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Paket	506,154,700	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Paket	250,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	49,959,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Paket	75,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	51,840,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Dokumen	51,840,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	1,117,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	1,200,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang Perangkat daerah	100 %	2,498,090,704		100 %	2,643,817,475	
2	23	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	27,740,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	27,740,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	716,078,064	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	716,077,475	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,754,272,640	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1,900,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana penunjang Perangkat daerah	100 %	1,242,725,000		100 %	1,719,595,300	
2	23	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	294,745,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33 Unit	165,627,300	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	700,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	650,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	247,980,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Unit	903,968,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi	11,49 %	2,590,940,800		11,49 %	4,050,000,000	
2	23	2	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana pembelajar sepanjang hayat	100 %	2,340,940,800		100 %	3,650,000,000	
2	23	2	1.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service	5 Perpustakaan	349,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Perpustakaan	350,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	2	1.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	20 Perpustakaan	450,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Perpustakaan	500,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	2	1.01	3	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	500 Eksemplar	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Eksemplar	300,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	2	1.01	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	60 Orang	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Orang	200,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	2	1.01	7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	5 Layanan	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Layanan	1,000,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	2	1.01	8	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Perpustakaan	500,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	2	1.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1600 Eksemplar	590,941,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1600 Eksemplar	800,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	2	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Gerakan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	2 Kegiatan	250,000,000		2 Kegiatan	400,000,000	
2	23	2	1.02	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	12 Orang	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Orang	150,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	2	1.02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Perpustakaan	250,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			1,729,966,600			2,500,000,000	
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase kualitas pengelolaan tertib arsip	100 %	1,479,979,000		100 %	2,100,000,000	
2	24	2	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Tercapainya penyelenggaraan kearsipan pada LKD Kabupaten / Kota sesuai dengan Peraturan Kearsipan	47 OPD/LKD	679,999,900		47 OPD/LKD	1,000,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	24	2	1.01	3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	20 laporan	679,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 laporan	1,000,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	24	2	1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya	100 %	299,980,000		100 %	500,000,000	
2	24	2	1.02	2	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	950 Arsip	299,980,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	950 Arsip	500,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	24	2	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Pelaksanaan simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada Daerah	1 opd	499,999,100		1 opd	600,000,000	
2	24	2	1.03	1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	945 Pengguna	299,999,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	945 Pengguna	300,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	24	2	1.03	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	1 Laporan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	300,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	24	3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Tingkat Penyelamatan, Pengolahan, Perlindungan serta Pelestarian Arsip	100 %	249,987,600		100 %	400,000,000	
2	24	3	1.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Penyelamatan arsip OPD akibat penggabungan, pembubaran dan pemekaran organisasi	1 opd	249,987,600		1 opd	400,000,000	
2	24	3	1.03	1	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	1 Daftar	249,987,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Daftar	400,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			68,525,592,697			68,835,000,000	
3	25	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	84 %	40,503,472,697		84 %	40,850,000,000	
3	25	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	70 Nilai	2,260,234,800		70 Nilai	2,700,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	25	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	983,664,800	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Dokumen	1,100,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	905,944,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	1,100,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	25	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	370,626,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	500,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	23,982,523,065		100 %	26,000,000,000	
3	25	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123 Orang/Bulan	22,850,697,065	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	123 Orang/Bulan	25,000,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	661,440,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	750,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	225,744,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	75,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	152,372,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	75,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	92,270,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	100,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	195,000,000		20 %	2,000,000,000	
3	25	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	195,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Orang	2,000,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2,113,354,000		12 Bulan	1,720,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	25	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	27,500,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	30,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	121,180,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	80,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	190,908,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	250,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	36,886,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	40,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	540 Dokumen	18,240,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	540 Dokumen	20,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,718,640,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1,300,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	2 Jenis	3,217,400,000		2 Jenis	700,000,000	
3	25	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	2,241,372,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	50,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	976,028,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	650,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	7,636,289,388		3 Jenis	6,915,000,000	
3	25	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	23,750,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	15,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2,060,931,036	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1,900,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5,551,608,352	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	5,000,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	4 Jenis	1,098,671,444		4 Jenis	815,000,000	
3	25	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	479,082,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	500,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	156,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Unit	165,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	463,589,444	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	150,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	2			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	297.805,90 Ha	4,526,482,000		297.805,90 Ha	4,830,000,000	
3	25	2	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Kawasan	1,499,397,000		1 Kawasan	1,510,000,000	
3	25	2	1.01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	1 Dokumen	620,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	550,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25	2	1.01	2	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	3982.3 Ha	644,397,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3982.3 Ha	670,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25	2	1.01	3	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	5 Ha	160,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Ha	190,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25	2	1.01	4	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	30 Orang	75,000,000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	100,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25	2	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	4 Izin	1,457,967,000		4 Izin	1,550,000,000	
3	25	2	1.02	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	2 Rekomendasi	255,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Rekomendasi	280,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	2	1.02	3	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	385,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Rekomendasi	400,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	2	1.02	4	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Rekomendasi	120,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25	2	1.02	5	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	1 Dokumen	717,967,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	750,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25	2	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	13 Kelompok Masyarakat	1,569,118,000		13 Kelompok Masyarakat	1,770,000,000	
3	25	2	1.03	1	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	60 Orang	120,607,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Orang	270,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	2	1.03	2	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8 Kelompok	481,214,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Kelompok	500,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	2	1.03	3	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	50 Orang	217,500,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	220,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	2	1.03	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	749,797,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Kelompok	780,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	182730 ton	13,642,457,000		182730 ton	12,970,000,000	
3	25	3	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3 Kegiatan	5,022,524,000		3 Kegiatan	3,250,000,000	
3	25	3	1.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	225,719,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25	3	1.01	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	66 Unit	4,796,805,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66 Unit	3,000,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	3	1.02		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2 Kegiatan	946,826,000		2 Kegiatan	970,000,000	
3	25	3	1.02	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen	240,894,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25	3	1.02	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	12 Unit	705,932,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Unit	720,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	3	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	175 Dokumen	688,600,000		175 Dokumen	750,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	25	3	1.03	3	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	175 Dokumen	688,600,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	175 Dokumen	750,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	3	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	300 Dokumen	558,725,000		300 Dokumen	600,000,000	
3	25	3	1.05	2	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	300 Dokumen	558,725,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Dokumen	600,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25	3	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	4 Lokasi	6,425,782,000		4 Lokasi	7,400,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	25	3	1.06	2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	300 Unit	5,869,300,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Unit	6,500,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	3	1.06	3	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	6 Layanan	556,482,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Layanan	900,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	178961 ton	4,859,320,500		178961 ton	4,330,000,000	
3	25	4	1.02		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal	Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	3 Rekomendasi	174,000,000		3 Rekomendasi	180,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
					Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing							
3	25	4	1.02	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	3 Rekomendasi	174,000,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Rekomendasi	180,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25	4	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	10 Lokasi	4,685,320,500		10 Lokasi	4,150,000,000	
3	25	4	1.05	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	247,615,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25	4	1.05	3	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Payau (HDPE)	1 Unit	763,519,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	950,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25	4	1.05	4	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit	694,700,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	200,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25	4	1.05	5	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Benih Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	30 Pokdakan	1,553,227,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Pokdakan	1,500,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
						Jumlah Sarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	5000 Benih		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5000 Benih		
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	4	1.05	6	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	70 Dokumen	480,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Dokumen	500,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25	4	1.05	7	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	195 Orang	946,259,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	195 Orang	750,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25	5			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Cakupan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diawasi dai IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan	47,06 %	3,543,455,000		47,06 %	4,330,000,000	
3	25	5	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	100 %	2,228,905,000		100 %	2,800,000,000	
3	25	5	1.01	1	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	3 Dokumen	789,161,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25	5	1.01	2	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	7 Dokumen	766,822,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	5	1.01	3	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	2 Dokumen	419,200,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	500,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	5	1.01	4	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	20 Kelompok	253,722,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Kelompok	300,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25	5	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100 %	1,314,550,000		100 %	1,530,000,000	
3	25	5	1.02	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	3 Dokumen	362,875,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	400,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	5	1.02	2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	3 Dokumen	428,800,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	500,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan,			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	5	1.02	3	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	6 Dokumen	522,875,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	630,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	4 Jenis	1,450,405,500		4 Jenis	1,525,000,000	
3	25	6	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2 Kegiatan	615,237,500		2 Kegiatan	650,000,000	
3	25	6	1.01	2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Rekomendasi	149,737,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Rekomendasi	150,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	25	6	1.01	3	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	4 Dokumen	465,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	500,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25	6	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah UKM Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	20 UMKM	650,430,500		20 UMKM	725,000,000	
3	25	6	1.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	20 Unit Usaha	490,105,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Unit Usaha	560,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25	6	1.02	2	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	2 Unit Usaha	160,325,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit Usaha	165,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	6	1.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Lokasi	184,737,500		1 Lokasi	150,000,000	
3	25	6	1.03	3	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	1 Dokumen	184,737,500	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			1,352,357,928			1,850,500,000	
3	25	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	84 %	1,058,483,928		84 %	1,450,500,000	
3	25	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	69,480,000		100 %	110,000,000	
3	25	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	69,480,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	110,000,000	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	25	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	91,560,000		20 %	110,000,000	
3	25	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	91,560,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Orang	110,000,000	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3	25	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	378,158,000		12 Bulan	428,500,000	
3	25	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	3,917,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Paket	5,000,000	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3	25	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	29,715,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	15,000,000	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3	25	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	4,796,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Paket	6,000,000	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3	25	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	18,129,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	20,000,000	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3	25	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Dokumen	1,920,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120 Dokumen	2,500,000	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3	25	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	319,680,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	380,000,000	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3	25	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	422,692,128		3 Jenis	482,000,000	
3	25	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,700,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	2,000,000	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3	25	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	121,185,384	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	180,000,000	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3	25	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	297,806,744	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	300,000,000	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3	25	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	1 Jenis	96,593,800		1 Jenis	320,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	25	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	57,613,800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	70,000,000	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3	25	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	38,980,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Unit	250,000,000	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Hasil Bahan Uji Perikanan yang Dilakukan Pemeriksaan	240 Sampel	293,874,000		240 Sampel	400,000,000	
3	25	6	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Sampel Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	240 Sampel	293,874,000		240 Sampel	400,000,000	
3	25	6	1.02	2	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	10 Unit Usaha	293,874,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit Usaha	400,000,000	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			5,321,826,063			6,512,500,000	
3	25	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	84 %	2,279,649,490		84 %	2,562,500,000	
3	25	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	98,760,000		100 %	150,000,000	
3	25	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	98,760,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	150,000,000	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3	25	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	91,873,000		20 %	100,000,000	
3	25	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	91,873,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Orang	100,000,000	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3	25	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	747,550,000		12 Bulan	810,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	25	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,759,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	10,000,000	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	171,906,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	200,000,000	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25,863,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	30,000,000	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3	25	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,230,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	15,000,000	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3	25	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	240 Dokumen	3,840,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	240 Dokumen	5,000,000	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3	25	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	527,952,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	550,000,000	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	589,494,490		3 Jenis	602,500,000	
3	25	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,131,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	2,500,000	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	25	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	259,354,882	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	250,000,000	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3	25	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	328,008,608	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	350,000,000	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3	25	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	1 Jenis	751,972,000		1 Jenis	900,000,000	
3	25	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	96,499,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	120,000,000	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3	25	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	205,473,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	280,000,000	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3	25	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	450,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	500,000,000	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	3 Milyar Ekor	3,042,176,573		3 Milyar Ekor	3,950,000,000	
3	25	4	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	3 Milyar	3,042,176,573		3 Milyar	3,950,000,000	
3	25	4	1.05	3	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana UPTD SPAPAL Manggar Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang direhab	2 Unit	399,999,573	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	450,000,000	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	25	4	1.05	5	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih	Jumlah Penyediaan Sarana UPTD SPAPAL Manggar Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	2 Unit	2,642,177,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	3,500,000,000	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
					Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota							Manggar
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			2,654,461,312			2,797,000,000	
3	25	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	84 %	1,902,592,632		84 %	2,027,000,000	
3	25	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	86,280,000		100 %	110,000,000	
3	25	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	86,280,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	110,000,000	UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu
3	25	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	117,450,000		20 %	135,000,000	
3	25	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	117,450,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Orang	135,000,000	UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu
3	25	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	384,408,330		12 Bulan	575,000,000	
3	25	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21,509,380	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	250,000,000	UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu
3	25	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	26,829,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	30,000,000	UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu
3	25	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	26,493,950	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	30,000,000	UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	25	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	15,000,000	UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu
3	25	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	297,576,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	250,000,000	UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu
3	25	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	727,727,992		3 Jenis	667,000,000	
3	25	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	2,000,000	UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu
3	25	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	68,903,377	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	65,000,000	UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu
3	25	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	656,824,615	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	600,000,000	UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu
3	25	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	586,726,310		3 Jenis	540,000,000	
3	25	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	86,024,800	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	80,000,000	UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu
3	25	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	58,180,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	60,000,000	UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu
3	25	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	442,521,510	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	400,000,000	UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang Galah/Ikan Air Laut (Ekor)	3847000 Ekor	751,868,680		3847000 Ekor	770,000,000	
3	25	4	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Payau/Laut/Tawar (Ekor)	3797000 Ekor	751,868,680		3797000 Ekor	770,000,000	
3	25	4	1.05	3	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang	Jumlah Prasarana UPTD SPAPAL Sebulu Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	1 Unit	60,820,480	Kab. Kutai Kartanegara, Semua	1 Unit	70,000,000	UPTD Sentra Pembenihan Air Payau

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
					Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	yang direhab			Kecamatan, Semua Kelurahan			dan Air Laut Sebulu
3	25	4	1.05	5	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Sarana UPTD SPAPAL Sebulu Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	104 Unit	691,048,200	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	104 Unit	700,000,000	UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			30,475,357,000			36,290,000,000	
3	26	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Pariwisata	95 %	16,481,684,140		95 %	19,590,000,000	
3	26	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	11 Dokumen	1,170,000,000		11 Dokumen	1,420,000,000	
3	26	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	777,060,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	1,200,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	198,890,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	120,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	194,050,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	100,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji, tunjangan dan jasa administrasi kantor	12 Bulan	9,556,638,167		12 Bulan	13,350,000,000	
3	26	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	9,031,758,167	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Orang	12,500,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	524,880,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	850,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2,569,124,200		12 Bulan	2,100,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	26	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	21,959,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Paket	50,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	1,480,483,200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Paket	1,200,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	179,784,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	150,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	74,498,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Paket	100,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	812,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Laporan	600,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	3,055,527,773		12 Bulan	2,520,000,000	
3	26	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	299,442,733	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	250,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	471,980,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	170,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2,284,105,040	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	2,100,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah	12 Bulan	130,394,000		12 Bulan	200,000,000	
						Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12 Bulan			12 Bulan		
3	26	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	130,394,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Unit	200,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan	3 Destinasi	6,303,672,860		3 Destinasi	7,250,000,000	
3	26	2	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Produk wisata yang dikelola	5 Produk Wisata	3,939,182,860		5 Produk Wisata	4,400,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	26	2	1.01	2	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	3 Dokumen	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	700,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	2	1.01	3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	4 Lokasi	3,439,182,860	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Lokasi	3,700,000,000	Dinas Pariwisata
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	26	2	1.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Produk Wisata dalam Kawasan strategis pariwisata yang dikelola	2 Produk Wisata	924,270,000		2 Produk Wisata	900,000,000	
3	26	2	1.02	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2 Unit	674,270,000	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Enggelam	2 Unit	600,000,000	Dinas Pariwisata
									Kab. Kutai Barat, Jempang, Tanjung Isuy			
3	26	2	1.02	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3 Laporan	250,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Melintang	3 Laporan	300,000,000	Dinas Pariwisata
									Kab. Kutai Barat, Jempang, Tanjung Isuy			
									Kab. Kutai Barat, Jempang, Tanjung Jan			
3	26	2	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola produk wisatanya	3 Destinasi Pariwisata	1,010,560,000		3 Destinasi Pariwisata	1,200,000,000	
3	26	2	1.03	5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	2	1.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	3 Laporan	760,560,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	900,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	2	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Pariwisata yang di bina	15 Usaha Pariwisata	429,660,000		15 Usaha Pariwisata	750,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	26	2	1.04	3	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	1 Laporan	135,142,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	250,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	2	1.04	4	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	10 Laporan	148,768,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	250,000,000	Dinas Pariwisata
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	26	2	1.04	5	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	5 Unit Usaha	145,750,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit Usaha	250,000,000	Dinas Pariwisata
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Wisman-Wisnus)	2.310.000 Orang	2,700,000,000		2.310.000 Orang	3,250,000,000	
3	26	3	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah jangkauan pemasaran produk wisata Kaltim	6 Daerah/Kota	2,700,000,000		6 Daerah/Kota	3,250,000,000	
3	26	3	1.01	1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Dokumen	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	650,000,000	Dinas Pariwisata
									Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Buah			
3	26	3	1.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Laporan	500,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	4 Laporan	600,000,000	Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidomulyo			
3	26	3	1.01	3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Dokumen	700,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	800,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	3	1.01	4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	5 Dokumen	1,000,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	5 Dokumen	1,200,000,000	Dinas Pariwisata
									Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara			
									Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sungai Siring			
									Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi			
3	26	4			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	23.5 Persen	2,000,000,000		23.5 Persen	2,500,000,000	
3	26	4	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah kota kreatif yang dikembangkan	3 Kota Kreatif	1,800,000,000		3 Kota Kreatif	2,200,000,000	
3	26	4	1.01	1	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	8 Unit	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Unit	700,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	4	1.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	8 Laporan	1,400,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	8 Laporan	1,500,000,000	Dinas Pariwisata
									Kab. Kutai Barat, Jempang, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan			
3	26	4	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Jenis Ekosistem ekraf yang dikembangkan	3 Jenis	200,000,000		3 Jenis	300,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	26	4	1.02	7	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	100,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	2 Dokumen	150,000,000	Dinas Pariwisata
									Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan			
3	26	4	1.02	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	7 Dokumen	100,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kelurahan	7 Dokumen	150,000,000	Dinas Pariwisata
									Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan			
3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase tercapainya jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi	97 %	2,990,000,000		97 %	3,700,000,000	
3	26	5	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf yang di Bina	9 Kegiatan	2,990,000,000		9 Kegiatan	3,700,000,000	
						Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	700 Orang			700 Orang		
3	26	5	1.01	1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	40 Orang	349,240,000	Kab. Kutai Barat, Jempang, Tanjung Isuy	40 Orang	350,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	5	1.01	2	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah SDM Usaha Pariwisata yang difasilitasi	34 Orang	270,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34 Orang	350,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	5	1.01	3	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	20 Orang	170,760,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	20 Orang	500,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	5	1.01	8	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	3 Laporan	300,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Melintang	3 Laporan	400,000,000	Dinas Pariwisata
									Kab. Kutai Barat, Jempang, Tanjung Isuy			
3	26	5	1.01	9	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	610 Orang	1,900,000,000	Kab. Berau, Maratua, Semua Kelurahan	610 Orang	2,100,000,000	Dinas Pariwisata
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			43,618,793,138			44,522,290,650	
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92 %	24,072,561,738		92 %	24,596,457,650	
3	27	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	74 %	1,275,323,500		74 %	1,774,925,300	
3	27	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	648,757,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	802,771,000	Dinas Perkebunan
3	27	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	626,566,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	972,154,300	Dinas Perkebunan
3	27	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	15,280,723,258		12 Bulan	15,359,114,750	
3	27	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/ Bulan	14,906,203,258	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 Orang/ Bulan	14,906,274,750	Dinas Perkebunan
3	27	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	374,520,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	452,840,000	Dinas Perkebunan
3	27	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	392,570,000		20 %	936,032,000	
3	27	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	282,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	352,032,000	Dinas Perkebunan
3	27	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	110,070,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	584,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	5 Unit	1,738,342,000		5 Unit	1,716,947,254	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	27	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	35,902,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	35,991,708	Dinas Perkebunan
3	27	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	117,262,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	167,310,000	Dinas Perkebunan
3	27	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	439,938,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	352,514,181	Dinas Perkebunan
3	27	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	52,640,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	69,731,365	Dinas Perkebunan
3	27	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	9,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	9,600,000	Dinas Perkebunan
3	27	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,083,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1,081,800,000	Dinas Perkebunan
3	27	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	13 Jenis	1,388,704,000		13 Jenis	1,212,627,500	
3	27	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	985,220,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	2 Unit	985,220,000	Dinas Perkebunan
3	27	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	403,484,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Unit	227,407,500	Dinas Perkebunan
3	27	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	2,926,567,488		3 Jenis	2,634,801,146	
3	27	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	31,210,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	30,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	479,967,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	494,401,410	Dinas Perkebunan
3	27	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	336,242,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	304,192,000	Dinas Perkebunan
3	27	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2,079,147,688	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1,806,207,736	Dinas Perkebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	27	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	1,070,331,492		3 Jenis	962,009,700	
3	27	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	271,654,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Unit	400,217,700	Dinas Perkebunan
3	27	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	396,708,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	349,932,000	Dinas Perkebunan
3	27	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	401,969,092	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 Unit	211,860,000	Dinas Perkebunan
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas perkebunan	18.313.874,25 Ton	6,766,710,000		18.313.874,25 Ton	6,965,557,600	
3	27	2	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis	20.03 Ton/Ha	6,766,710,000		20.03 Ton/Ha	6,965,557,600	
3	27	2	1.01	1	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	6,766,710,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	6,965,557,600	Dinas Perkebunan
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1) Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan ; 2) Luas Kebun yang dibangun	30/1.500.674 Kelompok/Ha	7,428,634,000		30/1.500.674 Kelompok/Ha	7,222,948,500	
3	27	3	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas kebun yang diperluas	545 Ha	7,428,634,000		545 Ha	7,222,948,500	
3	27	3	1.01	1	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	7,428,634,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	7,222,948,500	Dinas Perkebunan
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	4,044 Juta Ton CO2eq	1,827,790,000		4,044 Juta Ton CO2eq	1,120,000,000	
3	27	5	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi Mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	137 Pelaku Usaha	1,827,790,000		137 Pelaku Usaha	1,120,000,000	
3	27	5	1.01	2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	9317 Ha	1,027,790,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9317 Ha	585,660,000	Dinas Perkebunan
3	27	5	1.01	3	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	150 Ha	800,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Ha	534,340,000	Dinas Perkebunan
3	27	6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan	1,050,000,000		35 Perusahaan	1,200,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	27	6	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan	107 Perusahaan	1,050,000,000		107 Perusahaan	1,200,000,000	
3	27	6	1.01	3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan	1,050,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1,200,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	1 lembaga	2,473,097,400		1 lembaga	3,417,326,900	
3	27	7	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya	25 Orang	187,295,700		25 Orang	312,046,900	
3	27	7	1.01	1	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	187,295,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Orang	312,046,900	Dinas Perkebunan
3	27	7	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya	31 KT	1,057,437,900		31 KT	1,440,624,000	
						Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan	7 Unit			7 Unit		
						Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan	1 Unit			1 Unit		
3	27	7	1.02	1	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	656,480,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	906,799,000	Dinas Perkebunan
3	27	7	1.02	2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	10 Kelompok	400,957,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Kelompok	533,825,000	Dinas Perkebunan
3	27	7	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI	4 KT	1,228,363,800		4 KT	1,664,656,000	
						Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk	20 Lembaga			20 Lembaga		
3	27	7	1.03	1	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	1 Unit	210,455,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	552,475,000	Dinas Perkebunan
3	27	7	1.03	2	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	1 Laporan	693,228,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	718,428,000	Dinas Perkebunan
3	27	7	1.03	3	Penilain Kelayakan dan Standarisasi Manajamen Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dinilai Kelayakan dan Standarisasi Manajemennya	1 Unit	157,293,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	157,293,000	Dinas Perkebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	27	7	1.03	4	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1 Unit	167,386,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	236,460,000	Dinas Perkebunan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			2,779,000,968			2,484,331,345	
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92 %	1,773,599,068		92 %	1,448,161,045	
3	27	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	93,120,000		12 Bulan	92,520,000	
3	27	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	93,120,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	92,520,000	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3	27	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	158,990,000		20 %	158,990,000	
3	27	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	158,990,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Orang	158,990,000	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3	27	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	586,467,800		3 Unit	294,022,117	
3	27	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	14,792,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	4,500,000	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3	27	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	48,431,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	24,980,000	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3	27	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	58,574,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	61,701,617	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3	27	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5,430,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	7,000,500	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3	27	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3,840,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	3,840,000	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3	27	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	455,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	192,000,000	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	27	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	6 Jenis	170,752,500		6 Jenis	334,506,200	
3	27	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	170,752,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Unit	334,506,200	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3	27	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	533,642,768		3 Jenis	423,362,128	
3	27	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	2,400,000	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3	27	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	122,738,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	75,000,000	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3	27	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	239,943,360	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	188,750,000	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3	27	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	165,461,408	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	157,212,128	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3	27	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	230,626,000		3 Jenis	144,760,600	
3	27	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	22,406,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	35,910,600	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3	27	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	180,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Unit	90,000,000	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3	27	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	28,220,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Unit	18,850,000	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah benih yang beredar	6.000.000 benih	1,005,401,900		6.000.000 benih	1,036,170,300	
3	27	2	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi	6000000 Benih	1,005,401,900		6000000 Benih	1,036,170,300	
3	27	2	1.02	1	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	150 Sertifikat	508,790,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	150 Sertifikat	461,297,250	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Semua Kelurahan			
3	27	2	1.02	4	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1 Laporan	496,611,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	574,873,050	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			2,799,999,446			3,197,333,000	
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92 %	1,767,778,446		92 %	1,944,904,600	
3	27	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	93,120,000		12 Bulan	92,520,000	
3	27	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	93,120,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	92,520,000	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
3	27	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	90,000,000		20 %	95,200,000	
3	27	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Orang	95,200,000	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
3	27	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	358,353,200		3 Unit	309,980,917	
3	27	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9,139,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	10,699,946	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
3	27	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3,420,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	17,600,000	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
3	27	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	69,604,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	77,777,300	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
3	27	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	20,230,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	24,783,671	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
3	27	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5,760,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	5,120,000	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	27	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	250,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	174,000,000	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
3	27	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	5 Jenis	186,971,000		5 Jenis	367,934,800	
3	27	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17 Unit	186,971,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Unit	367,934,800	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
3	27	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	507,555,848		3 Jenis	495,410,883	
3	27	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	3,950,000	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
3	27	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	172,825,440	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	185,782,355	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
3	27	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	164,069,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	148,466,400	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
3	27	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	165,461,408	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	157,212,128	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
3	27	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	531,778,398		3 Jenis	583,858,000	
3	27	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	12,203,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	35,510,000	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
3	27	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	499,065,398	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	509,328,000	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
3	27	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	20,510,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	39,020,000	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT	774.940.000 Rp	1,032,221,000		774.940.000 Rp	1,252,428,400	
3	27	5	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas serangan berat OPT yang dikendalikan	156 Ha	1,032,221,000		156 Ha	1,252,428,400	
3	27	5	1.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	156 Ha	1,032,221,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	156 Ha	1,252,428,400	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			3,999,996,448			3,999,996,448	
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92 %	1,095,255,448		92 %	1,095,255,448	
3	27	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	82,560,000		12 Bulan	82,560,000	
3	27	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	82,560,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	82,560,000	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	80,010,000		20 %	80,010,000	
3	27	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	80,010,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Orang	80,010,000	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	281,015,000		3 Unit	281,015,000	
3	27	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2,918,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	2,918,000	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	2,200,000	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	65,224,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	65,224,000	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14,953,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	14,953,000	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1,920,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	1,920,000	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	193,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	193,800,000	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	2 Jenis	95,090,000		2 Jenis	95,090,000	
3	27	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	95,090,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Unit	95,090,000	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	27	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	518,997,448		3 Jenis	518,997,448	
3	27	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	3,000,000	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	79,549,320	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	79,549,320	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	136,958,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	136,958,000	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	299,490,128	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	299,490,128	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	37,583,000		3 Jenis	37,583,000	
3	27	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	12,203,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	12,203,000	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	25,380,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Unit	25,380,000	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	85 %	2,904,741,000		85 %	2,904,741,000	
3	27	2	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan	50000 Benih	2,904,741,000		50000 Benih	2,904,741,000	
3	27	2	1.02	4	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1 Laporan	2,904,741,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	2,904,741,000	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			60,684,514,408			49,224,290,000	
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan	82 %	26,728,525,290		82 %	29,003,166,000	
3	27	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	79.3 Nilai	1,676,326,000		79.3 Nilai	1,790,800,000	
3	27	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	886,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	1,100,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	27	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	790,326,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	690,800,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	80 %	17,428,333,344		80 %	19,124,950,000	
3	27	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 orang/bulan	16,558,363,344	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 orang/bulan	18,214,073,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	628,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	682,572,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	241,970,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	228,305,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	80 %	412,038,000		80 %	461,366,000	
3	27	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	184,720,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	207,592,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	227,318,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Orang	253,774,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	80 %	1,899,033,500		80 %	2,004,545,000	
3	27	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	23,465,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	25,812,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	448,770,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Paket	554,177,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	136,210,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Paket	149,832,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3840 Dokumen	17,280,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3840 Dokumen	19,008,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	1,273,308,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Laporan	1,255,716,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	27	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 %	930,394,000		80 %	1,023,434,000	
3	27	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	930,394,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Unit	1,023,434,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	3,230,131,172		80 %	3,561,304,000	
3	27	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	115,625,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	120,334,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	355,040,300	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	386,722,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	27	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,759,465,872	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	3,054,248,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	1,152,269,274		80 %	1,036,767,000	
3	27	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	63 Unit	41,500,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63 Unit	45,650,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	177 unit	418,433,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	177 unit	396,077,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	692,336,274	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Unit	595,040,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Angka Kelahiran Sapi	22 %	22,799,183,396		22 %	8,309,224,000	
3	27	2	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah unit usaha yang memasarkan produk hasil peternakan	76 Unit Usaha	1,335,998,600		76 Unit Usaha	1,470,100,000	
3	27	2	1.01	1	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	545,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	600,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	27	2	1.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen	790,998,600	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	870,100,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	27	2	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Calving Interval	16.5 Bulan	2,045,616,500		16.5 Bulan	2,413,024,000	
3	27	2	1.04	1	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan,	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1,105,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1,215,500,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
					serta Pakan Kewenangan Provinsi							
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	27	2	1.04	2	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2 Laporan	629,570,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	860,024,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	27	2	1.04	3	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	20 Orang	311,046,500	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	337,500,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	27	2	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu	40 Sampel	419,650,000		40 Sampel	463,100,000	
3	27	2	1.05	1	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	1 Laporan	179,480,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	197,450,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	27	2	1.05	2	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar	100000 Ton	240,170,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100000 Ton	265,650,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	27	2	1.06		Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu	13 Sampel	685,532,150		13 Sampel	605,000,000	
3	27	2	1.06	1	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	2 Laporan	406,909,150	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	495,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	27	2	1.06	2	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan	165 Kasus	278,623,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	165 Kasus	110,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	27	2	1.07		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah kelompok penerima ternak	10 Kelompok	18,312,386,146		10 Kelompok	3,358,000,000	
3	27	2	1.07	1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	1359 Ekor	18,312,386,146	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1359 Ekor	3,358,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan,			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Miniranch yang teregister	30 Unit	5,101,338,000		30 Unit	5,610,000,000	
3	27	3	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah miniranch sapi potong	30 Unit	5,101,338,000		30 Unit	5,610,000,000	
3	27	3	1.01	1	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	5,101,338,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5,610,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular	70 %	3,770,604,950		70 %	3,687,200,000	
3	27	4	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah pengendalian penyakit jembrana, rabies, dan AI	10 Kab/Kota	1,176,967,500		10 Kab/Kota	990,100,000	
3	27	4	1.01	1	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	2 Laporan	730,096,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	685,600,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu,			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	27	4	1.01	2	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	244,804,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	226,900,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	27	4	1.01	3	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	2 Laporan	202,067,500	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	77,600,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan,			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	27	4	1.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Check point yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan	3 Check point	1,572,637,450		3 Check point	1,367,300,000	
3	27	4	1.02	1	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	1 Laporan	198,100,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	165,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	27	4	1.02	2	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	2 Laporan	684,653,450	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	220,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan,			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	27	4	1.02	3	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	2 Laporan	689,884,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	982,300,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	27	4	1.04		Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	2 Unit Usaha	371,000,000		2 Unit Usaha	633,200,000	
3	27	4	1.04	1	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	2 Sertifikat	371,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Sertifikat	633,200,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	27	4	1.05		Kesejahteraan Hewan	Jumlah unit usaha yang menerapkan kesrawan	11 Unit Usaha	650,000,000		11 Unit Usaha	696,600,000	
3	27	4	1.05	2	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	750 Kasus	650,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	750 Kasus	696,600,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	27	6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha	75 %	1,131,862,772		75 %	1,346,400,000	
3	27	6	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha peternakan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penerapan perizinan	35 Unit Usaha	873,999,900		35 Unit Usaha	961,400,000	
3	27	6	1.01	3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan	873,999,900	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	961,400,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	27	6	1.03		Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah rekomendasi izin usaha pengecer obat hewan	2 Rekomendasi	257,862,872		2 Rekomendasi	385,000,000	
3	27	6	1.03	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	2 Laporan	139,720,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	110,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	27	6	1.03	2	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Diawasi	2 Laporan	118,142,872	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	275,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan,			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan binaan kelompok ternak	45 %	1,153,000,000		45 %	1,268,300,000	
3	27	7	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyebaran informasi peternakan	12 Kali	600,000,000		12 Kali	660,000,000	
3	27	7	1.02	1	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	4 Dokumen	600,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	660,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	27	7	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelompok ternak yang teregistrasi	25 Kelompok	553,000,000		25 Kelompok	608,300,000	
3	27	7	1.03	1	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	1 Unit	553,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	608,300,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			5,104,999,990			5,619,786,000	
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan	82 %	3,538,999,990		82 %	3,897,786,000	
3	27	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	80 %	125,640,000		80 %	127,000,000	
3	27	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	125,640,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	127,000,000	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3	27	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80 %	64,500,000		80 %	84,000,000	
3	27	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	24,750,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	25,000,000	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3	27	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	39,750,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Orang	59,000,000	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3	27	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	80 %	539,170,200		80 %	430,000,000	
3	27	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	22,073,200	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	22,000,000	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	27	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	158,311,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	12,000,000	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3	27	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10,714,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	12,000,000	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3	27	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5,760,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	7,000,000	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3	27	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	342,312,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Laporan	377,000,000	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	27	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 %	856,688,000		80 %	44,000,000	
3	27	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	856,688,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	44,000,000	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3	27	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	1,677,050,510		80 %	1,844,786,000	
3	27	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	28,530,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	31,383,000	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3	27	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	97,949,070	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	107,744,000	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	27	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,550,571,440	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	1,705,659,000	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3	27	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	275,951,280		80 %	1,368,000,000	
3	27	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	12,590,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 Unit	14,000,000	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3	27	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	206,017,400	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56 Unit	154,000,000	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3	27	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	57,343,880	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	1,200,000,000	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Angka Kelahiran Sapi	22 %	1,566,000,000		22 %	1,722,000,000	
3	27	2	1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Populasi ternak sapi bibit	80 Ekor	1,566,000,000		80 Ekor	1,722,000,000	
						Produksi HPT (Segar)	825 Ton			825 Ton		
3	27	2	1.03	3	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	12 Laporan	645,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	708,000,000	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3	27	2	1.03	4	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	12 Laporan	921,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	1,014,000,000	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			3,457,884,248			6,995,420,000	
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan	82 %	1,987,884,248		82 %	5,378,420,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	27	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	80 %	119,640,000		80 %	147,000,000	
3	27	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	119,640,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	147,000,000	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80 %	11,430,000		80 %	11,220,000	
3	27	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	11,430,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Orang	11,220,000	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	80 %	355,989,000		80 %	384,600,000	
3	27	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,715,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	4,100,000	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	67,654,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Paket	71,000,000	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	18,038,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	17,400,000	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3,840,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Dokumen	4,300,000	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
												Veteriner
3	27	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	207,792,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Laporan	224,000,000	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
									Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	27	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	54,950,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	63,800,000	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 %	492,192,000		80 %	3,731,800,000	
3	27	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	392,504,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan,	1 Unit	431,800,000	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Semua Kelurahan			Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27	1	1.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor UPTD. LKK	1 Dokumen	99,688,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	3,300,000,000	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	899,633,748		80 %	985,100,000	
3	27	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	26,540,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	25,400,000	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	162,023,548	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	177,600,000	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	711,070,200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	782,100,000	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	108,999,500		80 %	118,700,000	
3	27	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	7,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	7,700,000	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	101,999,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Unit	111,000,000	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	14 %	1,470,000,000		14 %	1,617,000,000	
						Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular	70 %			70 %		
3	27	4	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Peningkatan pemeriksaan sampel penyakit hewan dan produk asal hewan	15 %	1,470,000,000		15 %	1,617,000,000	
3	27	4	1.03	1	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	4 Unit	737,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua	4 Unit	810,700,000	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
					Penyakit				Kelurahan			Kesehatan Masyarakat Veteriner
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	27	4	1.03	3	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	105 Dokumen	733,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105 Dokumen	806,300,000	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			222,911,673,740			208,672,053,883	
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	166,658,530,335		84 %	160,555,098,328	
3	28	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	70 Nilai AKIP	1,713,200,000		70 Nilai AKIP	1,350,000,000	
3	28	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	917,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Dokumen	700,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	795,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	650,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	150,450,426,892		12 Laporan	155,370,000,000	
3	28	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	585 Orang/ Bulan	148,820,001,892	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	585 Orang/ Bulan	154,000,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	629,160,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	620,000,000	Dinas Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Semua Kelurahan			
3	28	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,001,265,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	750,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	636,631,000		12 Laporan	500,500,000	
3	28	1	1.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	304,054,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	250,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan	332,577,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Laporan	250,500,000	Dinas Kehutanan
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	391,565,000		12 Laporan	290,000,000	
3	28	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	127,400,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	2 Paket	110,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	93,405,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	1 Dokumen	0	Dinas Kehutanan
3	28	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	170,760,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Orang	180,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2,220,292,000		12 Bulan	387,000,000	
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20,016,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	12 Paket	22,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	50,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	50 Paket	60,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	175,023,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	12 Paket	75,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	119,133,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	12 Paket	100,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	11,520,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	12 Dokumen	0	Dinas Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1,632,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	0	Dinas Kehutanan
3	28	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	59,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	Dinas Kehutanan
3	28	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	153,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	130,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	2 Unit	7,699,291,515		2 Unit	0	
3	28	1	1.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	540,070,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	1 Unit	0	Dinas Kehutanan
3	28	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	4,132,270,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	9 Unit	0	Dinas Kehutanan
3	28	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	288 Unit	3,026,951,515	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	288 Unit	0	Dinas Kehutanan
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Ururusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	2,620,469,528		12 Bulan	2,457,598,328	
3	28	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	12 Laporan	15,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	603,839,032	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	12 Laporan	539,172,832	Dinas Kehutanan
3	28	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	97,500,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	1 Laporan	0	Dinas Kehutanan
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,904,130,496	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	12 Laporan	1,903,425,496	Dinas Kehutanan
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	39 Unit	926,654,400		39 Unit	200,000,000	
3	28	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	126,629,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Unit	0	Dinas Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	654,435,400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47 Unit	0	Dinas Kehutanan
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	166 Unit	145,590,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	166 Unit	200,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	31,963,341,705		5050000/730 M3/ton	23,273,019,705	
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	2 Dokumen	365,852,000		2 Dokumen	672,200,000	
3	28	3	1.02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	7 Dokumen	365,852,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Dokumen	672,200,000	Dinas Kehutanan
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	1611386.43 Ha	5,575,720,000		1611386.43 Ha	5,275,720,000	
3	28	3	1.03	1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	9 Dokumen	800,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Dokumen	800,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	3	1.03	2	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	200,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	3	1.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	2,300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2,000,000,000	Dinas Kehutanan
						Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	59 Laporan			59 Laporan		
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi PNBP dan Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan	11 Laporan			11 Laporan		
						Jumlah PBPH menerapkan RIL / RIL C	6 Unit Manajemen			6 Unit Manajemen		
3	28	3	1.03	6	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	50 Dokumen	2,275,720,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Dokumen	2,275,720,000	Dinas Kehutanan
						Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	70 Laporan			70 Laporan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	475 Ha	14,575,755,000		475 Ha	4,440,910,000	
3	28	3	1.04	1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) dan Dokumen Rancangan Teknis	6 Dokumen	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	0	Dinas Kehutanan
3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	435 Ha	10,260,437,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	435 Ha	0	Dinas Kehutanan
3	28	3	1.04	5	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	100 Unit	1,266,949,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Unit	1,266,949,000	Dinas Kehutanan
3	28	3	1.04	8	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	23 Laporan	2,548,369,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23 Laporan	3,173,961,000	Dinas Kehutanan
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	6 Kasus	6,081,549,705		6 Kasus	7,594,450,705	
3	28	3	1.05	3	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	6 Operasi	810,975,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Operasi	810,975,000	Dinas Kehutanan
3	28	3	1.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	1,614,116,384	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	2,222,078,384	Dinas Kehutanan
3	28	3	1.05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	3,656,458,321	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Laporan	4,561,397,321	Dinas Kehutanan
3	28	3	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Pembinaan dan pemenuhan komitmen pada unit manajemen	13 UM	2,249,526,000		13 UM	2,174,800,000	
3	28	3	1.07	1	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	48 Unit Managemen	779,486,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48 Unit Managemen	904,760,000	Dinas Kehutanan
3	28	3	1.07	2	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	28 Dokumen	798,080,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28 Dokumen	798,080,000	Dinas Kehutanan
3	28	3	1.07	3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	13 Unit Managemen	671,960,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Unit Managemen	471,960,000	Dinas Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	3	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Izin usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit terdaftar	138 Lap;Sertf;UnitUsaha	3,114,939,000		138 Lap;Sertf;UnitUsaha	3,114,939,000	
3	28	3	1.09	1	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	23 Unit Usaha,Laporan	1,175,922,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23 Unit Usaha,Laporan	1,175,922,000	Dinas Kehutanan
						Jumlah Pertimbangan Teknis Pengadaan dan Pengedaran benih/bibit terdaftar yang diterbitkan	23 Unit Usaha, Laporan		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23 Unit Usaha, Laporan		
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.09	2	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	20 Sertifikat	826,208,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Sertifikat	826,208,000	Dinas Kehutanan
						Jumlah Sertifikat Sumber Benih Yang Diterbitkan	20 Sertifikat		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	20 Sertifikat		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.09	5	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	95 Laporan, Unit Usaha	1,112,809,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Laporan, Unit Usaha	1,112,809,000	Dinas Kehutanan
						Jumlah Laporan pengawasan peredaran benih dan bibit	95 Laporan, Unit Usaha		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Laporan, Unit Usaha		
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	4			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	<1 %	1,554,293,100		<1 %	1,804,776,250	
3	28	4	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	6000 Ha	1,554,293,100		6000 Ha	1,804,776,250	
3	28	4	1.03	5	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/ Masyarakat yang Diberdayakan	330 orang	807,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	330 orang	804,776,250	Dinas Kehutanan
3	28	4	1.03	6	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	6000 Ha	747,293,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6000 Ha	1,000,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	20,601,233,600		32000 Ha	21,400,581,600	
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	15 Laporan	20,601,233,600		15 Laporan	21,400,581,600	
3	28	5	1.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	40 Orang	14,111,411,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Orang	14,783,611,600	Dinas Kehutanan
3	28	5	1.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	17 Kelompok	1,275,385,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Kelompok	2,688,970,000	Dinas Kehutanan
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	35000 Ha	5,214,437,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35000 Ha	3,928,000,000	Dinas Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan Meningkat	13.98 %	2,134,275,000		13.98 %	1,638,578,000	
3	28	6	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pelaksanaan pengelolaan DAS	17 Laporan	2,134,275,000		17 Laporan	1,638,578,000	
3	28	6	1.01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang ditetapkan	1 Dokumen	495,697,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	500,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	6	1.01	2	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	6 Dokumen	411,720,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	411,720,000	Dinas Kehutanan
3	28	6	1.01	4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	200 Orang	1,109,239,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Orang	609,239,600	Dinas Kehutanan
3	28	6	1.01	6	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Jumlah Laporan Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	1 Laporan	117,618,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	117,618,400	Dinas Kehutanan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			13,694,596,000			19,533,184,480	
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,441,466,124		84 %	2,532,679,480	
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	159,720,000		12 Laporan	175,692,000	
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	159,720,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	12 Dokumen	175,692,000	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	312,165,000		12 Laporan	547,681,500	
3	28	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	162,165,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	2 Paket	247,681,500	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
3	28	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	300,000,000	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	316,238,500		12 Bulan	311,538,300	
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	11,052,500	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	12 Paket	12,157,750	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	11,784,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	12 Paket	12,889,250	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
3	28	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	65,510,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	12 Paket	40,622,050	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10,452,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	12 Paket	11,557,250	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
3	28	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3,840,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	12 Dokumen	4,312,000	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	213,600,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	12 Laporan	230,000,000	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	14 Unit	115,227,000		14 Unit	160,000,000	
3	28	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	115,227,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	2 Unit	160,000,000	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Ururan Pemerintah Daerah	12 Bulan	820,699,424		12 Bulan	933,147,380	
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	190,219,800	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	12 Laporan	216,158,800	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	630,479,624	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	12 Laporan	716,988,580	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	85 Unit	717,416,200		85 Unit	404,620,300	
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62 Unit	499,494,200	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	62 Unit	174,199,300	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	73,110,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	44 Unit	80,421,000	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
3	28	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	144,812,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	1 Unit	150,000,000	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	218,563,276		5050000/730 M3/ton	280,000,000	
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	218,563,276		1 Dokumen	280,000,000	
3	28	3	1.02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	218,563,276	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan	1 Dokumen	280,000,000	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu			
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah			
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ilir			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Jaya			
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Tengin Baru			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Argo Mulyo			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semoi Dua			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Suko Mulyo			
3	28	4			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	<1 %	9,664,566,600		<1 %	14,813,505,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	4	1.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas Kawasan Hutan Tahura yang dikelola	64864 Ha	9,440,216,600		64864 Ha	14,463,505,000	
3	28	4	1.01	1	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Jumlah Laporan Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	5 Laporan	2,600,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan	5 Laporan	6,000,000,000	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu			
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah			
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ilir			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Jaya			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Tengin Baru			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Argo Mulyo			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semoi Dua			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Suko Mulyo			
3	28	4	1.01	2	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	12 Operasi	1,331,328,000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan	12 Operasi	1,000,000,000	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu			
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ilir			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Jaya			
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Tengin Baru			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Argo Mulyo			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semoi Dua			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Suko Mulyo			
3	28	4	1.01	3	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	64914.98 Ha	206,288,600	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan	64914.98 Ha	300,000,000	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu			
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah			
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ilir			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut			
									Kab. Kutai Kartanegara,			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Samboja, Ambarawang Darat			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Jaya			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Tengin Baru			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Argo Mulyo			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semoi Dua			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Suko Mulyo			
3	28	4	1.01	5	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	400 Ha	4,338,700,000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	400 Ha	6,000,000,000	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
3	28	4	1.01	8	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	5 Desa	739,550,000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan	5 Desa	813,505,000	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu			
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah			
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ilir			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Jaya			
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Tengin Baru			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Argo Mulyo			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semoi Dua			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Suko Mulyo			
3	28	4	1.01	9	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga Tahura	5 Laporan	224,350,000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan	5 Laporan	350,000,000	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu			
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah			
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ilir			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang			
									Kab. Kutai Kartanegara,			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Samboja, Tanjung Harapan			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Jaya			
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Tengin Baru			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Argo Mulyo			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semoi Dua			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Suko Mulyo			
3	28	4	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	972.21 Ha	224,350,000		972.21 Ha	350,000,000	
3	28	4	1.03	3	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah	1 Dokumen	224,350,000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan	1 Dokumen	350,000,000	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu			
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah			
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ilir			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Jaya			
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Tengin Baru			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Argo Mulyo			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semoi Dua			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Suko			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Mulyo			
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,370,000,000		32000 Ha	1,907,000,000	
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	8 Laporan	1,370,000,000		8 Laporan	1,907,000,000	
3	28	5	1.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	370,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan	2 Kelompok	407,000,000	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu			
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah			
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ilir			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang			
									Kab. Kutai Kartanegara,			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Samboja, Tanjung Harapan			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Jaya			
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Tengin Baru			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Argo Mulyo			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semoi Dua			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Suko Mulyo			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	20 Ha	1,000,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan	20 Ha	1,500,000,000	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
						Luas Usaha Permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan dan HA	100 Hektar		Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu	100 Hektar		
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah			
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ilir			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Jaya			
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Tengin Baru			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Argo Mulyo			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semoi Dua			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Suko Mulyo			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			10,917,243,870			8,526,182,200	
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	1,982,642,200		84 %	1,982,642,200	
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	152,880,000		12 Laporan	144,720,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	152,880,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	144,720,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	199,270,000		12 Laporan	230,922,200	
3	28	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	25,600,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	24,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3	28	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	173,670,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	206,922,200	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	455,026,400		12 Bulan	455,000,000	
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	9,996,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	10,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	64,030,400	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	64,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	6,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	375,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	375,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	14 Unit	109,472,000		14 Unit	100,000,000	
3	28	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	64,197,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Unit	60,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3	28	1	1.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	45,275,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	40,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Ururan Pemerintah Daerah	12 Bulan	472,974,272		12 Bulan	517,000,000	
3	28	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	5,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	100,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	367,974,272	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	412,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	30 Unit	593,019,528		30 Unit	535,000,000	
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	116,433,200	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Unit	110,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	36,640,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Unit	25,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3	28	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	20,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	20,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3	28	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	419,946,328	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	380,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	7,786,061,670		5050000/730 M 3/ton	5,395,000,000	
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	3 Dokumen	1,901,210,000		3 Dokumen	2,000,000,000	
3	28	3	1.01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	2 Unit	1,901,210,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	2,000,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	110790 Ha	392,750,000		110790 Ha	400,000,000	
3	28	3	1.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	12 Dokumen	392,750,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	400,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	100 Ha	3,311,101,670		100 Ha	630,000,000	
3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	10 Ha	2,981,101,670	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Ha	300,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3	28	3	1.04	8	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	8 Laporan	330,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Laporan	330,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	3 Kasus	2,181,000,000		3 Kasus	2,365,000,000	
3	28	3	1.05	2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	786021 Ha	230,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	786021 Ha	300,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3	28	3	1.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	640,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	640,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3	28	3	1.05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	11 Laporan	1,311,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Laporan	1,425,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,148,540,000		32000 Ha	1,148,540,000	
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	2 Laporan	1,148,540,000		2 Laporan	1,148,540,000	
3	28	5	1.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	5 Orang	100,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Orang	100,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3	28	5	1.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	293,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Kelompok	293,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	3000 Ha	755,540,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3000 Ha	755,540,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			9,273,846,100			9,166,505,904	
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,411,071,100		84 %	2,483,750,904	
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	138,720,000		12 Laporan	150,000,000	
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	138,720,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	150,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	146,300,000		12 Laporan	135,000,000	
3	28	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	104,050,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	75,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3	28	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	42,250,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Orang	60,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	721,994,971		12 Bulan	841,860,000	
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	25,215,250	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	24,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	214,168,721	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Paket	327,600,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	36,375,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	24,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	35,500,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	35,500,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3	28	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5,760,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	5,760,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	404,976,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 Laporan	425,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urursan Pemerintah Daerah	12 Bulan	785,385,129		12 Bulan	731,890,904	
3	28	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	17,500,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	17,500,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	140,505,761	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	150,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	627,379,368	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	564,390,904	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	29 Unit	618,671,000		29 Unit	625,000,000	
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	373,498,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33 Unit	425,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	43,193,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Unit	50,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3	28	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	201,980,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	150,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	6,188,250,000		5050000/730 M 3/ton	5,798,755,000	
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	5 Dokumen	1,128,175,000		5 Dokumen	1,128,175,000	
3	28	3	1.01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	7 Unit	1,128,175,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Unit	1,128,175,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	320,000,000		1 Dokumen	320,000,000	
3	28	3	1.02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	320,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	320,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	93859 Ha	660,000,000		93859 Ha	550,000,000	
3	28	3	1.03	1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	300,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	300,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	360,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	250,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	6 Kasus	2,576,800,000		6 Kasus	2,750,800,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	2 8	3	1.0 5	2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	335746 Ha	450,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	335746 Ha	450,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	2 8	3	1.0 5	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	100,800,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	100,800,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	2 8	3	1.0 5	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	30 Laporan	2,026,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Laporan	2,200,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	2 8	3	1.0 6		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pembinaan dan pemenuhan komitmen pada unit manajemen	1 Unit	911,525,000		1 Unit	500,000,000	
3	2 8	3	1.0 6	3	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen	911,525,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit Managemen	500,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	2 8	3	1.0 9		Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Izin usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit terdaftar	1 Unit	591,750,000		1 Unit	549,780,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	3	1.09	1	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	2 Unit Usaha	591,750,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit Usaha	549,780,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	674,525,000		32000 Ha	884,000,000	
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	4 Laporan	674,525,000		4 Laporan	884,000,000	
3	28	5	1.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	269,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kelompok	410,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	600 Ha	405,525,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600 Ha	474,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			11,840,066,100			14,023,630,380	
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,250,229,300		84 %	2,815,227,880	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	129,000,000		12 Laporan	129,000,000	
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	129,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	3 Dokumen	129,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen			3 Dokumen		
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	56,700,000		12 Laporan	50,000,000	
3	28	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	56,700,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	2 Paket	50,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	755,135,200		12 Bulan	885,000,000	
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	4,854,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	1 paket	10,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	83,858,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	2 paket	150,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket			2 Paket		
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	20,113,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	4 paket	15,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket			4 Paket		
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	7,478,200	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	2 paket	10,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			2 Paket		
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	638,832,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	700,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	6 Unit	174,076,585		6 Unit	435,000,000	
3	28	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	19,780,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	5 Unit	250,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3	28	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	154,296,585	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	1 Unit	185,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit			1 unit		
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urursan Pemerintah Daerah	12 Bulan	525,929,815		12 Bulan	566,227,880	
3	28	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	4,700,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	2 Laporan	5,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan			2 Laporan		
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	110,001,935	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	3 Laporan	150,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	411,227,880	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	3 Laporan	411,227,880	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	77 Unit	609,387,700		77 Unit	750,000,000	
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 unit	545,867,700	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	42 unit	600,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit			42 Unit		
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79 unit	63,520,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	79 unit	150,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	8,472,326,800		5050000/730 M 3/ton	10,208,402,500	
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	1,111,555,000		1 Dokumen	1,500,000,000	
						Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen			1 Dokumen		
3	28	3	1.01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	9 unit	1,111,555,000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan	9 unit	1,500,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
						Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	9 Unit		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	9 Unit		
									Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kedang Ipil			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka			
									Kab. Kutai Barat, Bongan, Pereng Taliq			
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	1,033,765,800		1 Dokumen	1,000,000,000	
3	28	3	1.02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	1,033,765,800	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	2 Dokumen	1,000,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
						Jumlah Dokumen RPH yang disusun	1 Dokumen		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen		
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	21362 Ha	1,059,616,000		21362 Ha	1,561,200,000	
3	28	3	1.03	1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	382,416,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	200,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	28 Dokumen	435,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Jonggon Desa	28 Dokumen	361,200,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
									Kab. Kutai Barat, Bongan, Muara Gusik			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Sepaku			
3	28	3	1.03	9	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	4 Dokumen	242,200,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	1,000,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	50 Ha	913,987,500		50 Ha	1,100,000,000	
3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	438,656,000	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Wono Sari	50 Ha	500,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Karang Jinawi			
3	28	3	1.04	6	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Luas areal Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	130 Ha	475,331,500	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130 Ha	600,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	2,305,800,000		2 Kasus	3,000,000,000	
3	28	3	1.05	2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	50 Ha	305,400,000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Jembayan	50 Ha	400,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
						Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	50 Ha		Kab. Kutai Barat, Bongan, Muara Gusik	50 Ha		
									Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Sepaku			
3	28	3	1.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	5 Dokumen	500,400,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	600,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
									Kab. Kutai Barat, Bongan, Muara Gusik			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan	1,500,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	5 Laporan	2,000,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
						Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10 Laporan		Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kelurahan	10 Laporan		
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu	1 Unit	2,047,602,500		1 Unit	2,047,202,500	
3	28	3	1.06	3	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	370 Unit Managemen	2,047,602,500	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	370 Unit Managemen	2,047,202,500	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,117,510,000		32000 Ha	1,000,000,000	
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	10 Laporan	1,117,510,000		10 Laporan	1,000,000,000	
3	28	5	1.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	6 Orang	407,710,000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan	6 Orang	500,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Wono Sari			
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	50 Ha	709,800,000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Karya Utama	50 Ha	500,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
						Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	50 Ha		Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	50 Ha		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			9,107,704,000			9,502,104,000	
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,150,941,000		84 %	2,053,114,000	
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	129,000,000		12 Laporan	129,000,000	
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	129,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	12 Dokumen	129,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	136,200,000		12 Laporan	136,200,000	
3	28	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	43,200,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	1 Paket	43,200,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
3	28	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan koordinasi dan Pelaksanaan SIK	5 Laporan	21,000,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	21,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	5 ASN	21,000,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 ASN	21,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 ASN	51,000,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 ASN	51,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	362,036,776		12 Bulan	357,860,000	
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,970,800	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	1 Paket	10,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,445,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	1 Paket	17,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	19,923,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	1 Paket	20,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9,777,976	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	1 Paket	8,940,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
3	28	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1,920,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	12 Dokumen	1,920,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300,000,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	300,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	60 Unit	377,703,000		60 Unit	280,054,000	
3	28	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah unit Pengadaan Mebel	50 Paket	129,275,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Paket	130,054,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36 Paket	248,428,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Paket	150,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Ururusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	774,488,624		12 Bulan	775,000,000	
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	110,561,200	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	12 Laporan	110,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	663,927,424	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	12 Bulan	665,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Unit barang yang diperlihara	41 Unit	371,512,600		41 Unit	375,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
					Daerah							
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	20 Unit	201,067,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	20 Unit	200,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	21,520,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	20 Unit	25,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
3	28	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan / Rehabilitasi	1 Unit	148,925,600	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	1 Unit	150,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	6,380,290,700		5050000/730 M3/ton	6,872,508,200	
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	3,296,641,700		1 Dokumen	2,957,956,050	
3	28	3	1.01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resort dan Kantor Resort Kesatuan Pengelolaan Hutan Yang Terbangun	52 Unit	3,296,641,700	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 Unit	2,957,956,050	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	169,997,450		1 Dokumen	170,000,000	
3	28	3	1.02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	169,997,450	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	170,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	137495 Ha	253,374,750		137495 Ha	526,763,150	
3	28	3	1.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPH di kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	124,493,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	216,720,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	3	1.03	9	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	1 Pemanfaatan	128,881,750	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Pemanfaatan	310,043,150	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	50 Ha	1,301,520,000		50 Ha	1,651,520,000	
3	28	3	1.04	1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	56,472,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	100,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	1,041,624,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Ha	1,301,520,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.04	8	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	203,424,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	250,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	869,712,000		2 Kasus	1,049,996,000	
3	28	3	1.05	2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	100 Ha	200,000,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Ha	200,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	249,976,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	249,996,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	20 Laporan	419,736,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Laporan	600,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	3	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	1 Unit	489,044,800		1 Unit	516,273,000	
3	28	3	1.06	1	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	10 ton	148,283,350	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 ton	175,505,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.06	3	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Manajemen	340,761,450	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit Manajemen	340,768,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
						Jumlah unit Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	1 Unit		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit		
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	576,472,300		32000 Ha	576,481,800	
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	10 Laporan	576,472,300		10 Laporan	576,481,800	
3	28	5	1.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 Orang	105,600,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Orang	105,600,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	5	1.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang mandiri yang mengikuti Penguatan dan Pendampingan kelembagaan	10 Kelompok	289,174,300	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Kelompok	289,180,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
						Jumlah KTH/KUPS terregistrasi (KTH)	10 KTH		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 KTH		
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	20 Ha	181,698,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Ha	181,701,800	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
						Luas Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	2 Usulan		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Usulan		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			9,874,594,000			9,950,000,000	
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,361,809,000		84 %	2,750,000,000	
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	129,000,000		12 Laporan	200,000,000	
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	129,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	200,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	439,400,000		12 Laporan	250,000,000	
3	28	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	80,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	100,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3	28	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	359,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	150,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	737,289,600		12 Bulan	900,000,000	
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	26,301,900	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	100,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	65,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	100,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	14,614,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	100,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21,223,700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	100,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	610,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Laporan	500,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	593,816,510		12 Bulan	650,000,000	
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	94,524,446	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	150,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	499,292,064	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	500,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	2 Unit	462,302,890		2 Unit	750,000,000	
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	71 Unit	262,405,450	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71 Unit	400,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3	28	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	199,897,440	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	350,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	7,293,935,000		5050000/730 M3/ton	6,700,000,000	
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	2,858,549,000		1 Dokumen	1,300,000,000	
3	28	3	1.01	2	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	305,028,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	300,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	215 Unit	2,553,521,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	215 Unit	1,000,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan,			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	267068 Ha	171,600,000		267068 Ha	150,000,000	
3	28	3	1.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	11 Dokumen	171,600,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Dokumen	150,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	57 Ha	1,937,036,000		57 Ha	2,000,000,000	
3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	702,571,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Ha	1,000,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.04	8	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	3 Laporan	1,234,465,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	1,000,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	2,326,750,000		2 Kasus	3,250,000,000	
3	28	3	1.05	2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	267068 Ha	246,600,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	267068 Ha	250,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	359,475,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	500,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	53 Laporan	1,720,675,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 Laporan	2,500,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	218,850,000		32000 Ha	500,000,000	
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	10 Laporan	218,850,000		10 Laporan	500,000,000	
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Ha	218,850,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Ha	500,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan,			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Semua Kelurahan			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			12,099,846,000			11,181,890,480	
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	3,309,600,204		84 %	3,295,030,480	
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	141,240,480		12 Laporan	141,240,480	
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	141,240,480	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	141,240,480	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	98,370,000		12 Laporan	98,370,000	
3	28	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	98,370,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	98,370,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	304,141,100		12 Laporan	253,220,000	
3	28	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	139,841,100	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	88,920,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	164,300,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Orang	164,300,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1,438,183,804		12 Bulan	1,318,800,000	
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,640,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	10,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket	987,494,204	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27 Paket	900,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4,982,600	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	5,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	39,267,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	50,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	400,800,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	353,800,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Ururan Pemerintah Daerah	12 Bulan	728,849,820		12 Bulan	730,005,000	
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	128,506,560	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	129,661,740	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	600,343,260	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	600,343,260	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	15 Unit	598,815,000		15 Unit	753,395,000	
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	342,555,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 Unit	257,272,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit	136,260,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 Unit	60,780,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	120,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	435,343,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	7,568,507,296		5050000/730 M 3/ton	6,754,413,000	
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	950,942,296		1 Dokumen	500,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	3	1.01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	4 Unit	950,942,296	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Unit	500,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	343,450,000		1 Dokumen	350,000,000	
3	28	3	1.02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	343,450,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	350,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	272566 Ha	745,990,000		272566 Ha	868,510,000	
3	28	3	1.03	1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	281,340,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	500,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	3	1.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	216,310,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	118,510,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	3	1.03	6	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	1 Dokumen	248,340,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	250,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	100 Ha	1,637,048,000		100 Ha	1,447,950,000	
3	28	3	1.04	1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	190,450,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	197,950,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	75 Ha	1,200,948,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Ha	750,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	3	1.04	8	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	245,650,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	500,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	3,238,693,000		2 Kasus	2,887,953,000	
3	28	3	1.05	2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	997384.08 Ha	253,060,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	997384.08 Ha	200,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	3	1.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	378,700,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	487,290,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	3	1.05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	3 Laporan	2,606,933,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	2,200,663,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	3	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Izin usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit terdaftar	1 Lap;Sertf;UnitUsaha	652,384,000		1 Lap;Sertf;Unit Usaha	700,000,000	
3	28	3	1.09	1	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	3 Unit Usaha	652,384,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit Usaha	700,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,221,738,500		32000 Ha	1,132,447,000	
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	3 Laporan	1,221,738,500		3 Laporan	1,132,447,000	
3	28	5	1.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	5 Orang	187,500,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Orang	0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	5	1.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	143,670,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kelompok	532,447,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Ha	890,568,500	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5000 Ha	600,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			13,813,080,500			8,275,000,000	
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,150,305,500		84 %	1,900,000,000	
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	135,480,000		12 Laporan	130,000,000	
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	135,480,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	1 Dokumen	130,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	200,000,000		12 Laporan	100,000,000	
3	28	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	38 Orang	200,000,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	38 Orang	100,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	566,319,580		12 Bulan	520,000,000	
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6,400,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	3 Paket	10,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	149,919,580	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	12 Paket	100,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	10,000,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	3 Paket	10,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	400,000,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	12 Laporan	400,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	1 Unit	99,838,000		1 Unit	100,000,000	
3	28	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	99,838,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	12 Unit	100,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Ururan Pemerintah Daerah	12 Bulan	611,378,920		12 Bulan	650,000,000	
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	207,215,400	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	4 Laporan	200,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	404,163,520	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	12 Laporan	450,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	33 Unit	537,289,000		33 Unit	400,000,000	
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	438,839,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	33 Unit	250,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	98,450,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kelurahan	40 Unit	150,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	10,564,245,000		5050000/730 M 3/ton	5,125,000,000	
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	866,628,500		1 Dokumen	700,000,000	
3	28	3	1.01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	866,628,500	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	1 Unit	700,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
									Kab. Kutai Timur, Karangan, Batu Lepoq			
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	309,485,000		1 Dokumen	400,000,000	
3	28	3	1.02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	309,485,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	1 Dokumen	400,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	641969 Ha	300,000,000		641969 Ha	200,000,000	
3	28	3	1.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	300,000,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	200,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
									Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara			
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	400 Ha	6,328,662,500		400 Ha	575,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	450 Ha	6,328,662,500	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	450 Ha	575,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
									Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara			
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	2,759,469,000		2 Kasus	3,250,000,000	
3	28	3	1.05	1	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	50 Ha	450,000,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Ha	250,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
									Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara			
3	28	3	1.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 Dokumen	300,000,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	450,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
									Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara			
3	28	3	1.05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	8 Laporan	2,009,469,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Laporan	2,550,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
									Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara			
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,098,530,000		32000 Ha	1,250,000,000	
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	8 Laporan	1,098,530,000		8 Laporan	1,250,000,000	
3	28	5	1.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	135,600,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Orang	150,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
									Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara			
3	28	5	1.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	650,000,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Kelompok	750,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara			
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	50 Ha	312,930,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Ha	350,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
									Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			9,582,120,400			9,582,120,400	
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,360,831,400		84 %	2,202,985,400	
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	149,244,000		12 Laporan	74,244,000	
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	96,720,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	46,920,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9,582,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	9,582,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	42,942,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	17,742,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	44,124,000		12 Laporan	31,524,000	
3	28	1	1.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3 Laporan	26,382,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	13,782,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	17,742,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	17,742,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Laporan	164,372,700		1 Laporan	154,060,000	
3	28	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	75,142,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	90,874,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Laporan	23,502,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	36,102,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	13,542,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Orang	17,742,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	52,186,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Orang	9,342,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	559,607,633		12 Bulan	450,100,938	
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	11,179,433	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	11,119,738	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket	75,551,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27 Paket	76,251,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Paket	8,247,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Paket	8,200,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan,			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Semua Kelurahan			
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	21,470,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Paket	21,470,200	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46 Laporan	443,160,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46 Laporan	333,060,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit	6 Unit	98,031,605		6 Unit	98,000,000	
3	28	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	46,076,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Unit	46,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	51,955,605	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	52,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Ururusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	875,965,342		12 Bulan	875,965,342	
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	175,343,094	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	175,343,094	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	2 8	1	1.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	700,622,248	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Laporan	700,622,248	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	2 8	1	1.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	25 Unit	469,486,120		25 Unit	519,091,120	
3	2 8	1	1.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	264,395,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Unit	367,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	2 8	1	1.0 9	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	7,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Unit	35,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75,389,880	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	75,389,880	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	34,701,240	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	34,701,240	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	6,343,562,000		5050000/730 M3/ton	6,527,510,000	
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	1,425,788,200		1 Dokumen	2,024,986,000	
3	28	3	1.01	1	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	6 Dokumen	193,315,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	275,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.01	2	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	221,644,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	25,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan,			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	219 Unit	1,010,828,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	219 Unit	1,724,986,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	265,048,000		1 Dokumen	242,694,000	
3	28	3	1.02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	265,048,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	242,694,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	69911 Ha	868,827,800		69911 Ha	418,170,000	
3	28	3	1.03	1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan	2 Dokumen	334,486,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	2 Dokumen	83,160,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
					Produksi	Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala			Semua Kelurahan			Produksi Batu Ayau
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03	2	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	4 Dokumen	196,293,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	83,160,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	6 Dokumen	193,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	176,850,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03	9	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	3 Laporan	144,248,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	75,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	20 Ha	2,277,058,000		20 Ha	2,212,625,000	
3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	60 Ha	2,030,810,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Ha	2,030,810,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.04	8	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	6 Laporan	246,248,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	181,815,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan,			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1,454,840,000		2 Kasus	1,577,035,000	
3	28	3	1.05	2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	1000 Ha	86,630,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000 Ha	199,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	14 Dokumen	730,580,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Dokumen	730,580,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan,			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	28 Laporan	637,630,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28 Laporan	647,455,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	1 Unit	52,000,000		1 Unit	52,000,000	
3	28	3	1.06	3	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen	52,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit Managemen	52,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	877,727,000		32000 Ha	851,625,000	
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	2 Laporan	877,727,000		2 Laporan	851,625,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	5	1.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	342,887,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Orang	290,680,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	5	1.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	286,080,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Kelompok	299,985,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 HA	248,760,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5000 HA	260,960,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			9,186,142,200			8,330,392,200	
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,123,381,500		84 %	2,074,392,200	
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	164,880,000		12 Laporan	166,800,000	
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	122,160,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	124,800,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	42,720,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	42,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	42,720,000		12 Laporan	42,000,000	
3	28	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	42,720,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	42,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	142,930,000		12 Laporan	110,000,000	
3	28	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	84,700,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	60,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	58,230,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 orang	50,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	535,942,648		12 Bulan	487,938,000	
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,384,900	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	20,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	79,191,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	100,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12,190,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	15,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	20,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16,576,748	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	22,938,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	401,600,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	310,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	16 Unit	314,984,700		16 Unit	212,654,200	
3	28	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	49,210,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 paket	60,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	16,750,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Unit	15,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	249,024,700	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	137,654,200	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	661,034,152		12 Bulan	705,000,000	
3	28	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	5,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	76,326,600	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	80,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	580,707,552	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	620,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	32 Unit	260,890,000		32 Unit	350,000,000	
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	176,210,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22 Unit	250,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	24,680,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Unit	25,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	75,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	5,985,992,700		5050000/730 M 3/ton	4,956,000,000	
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	617,133,200		1 Dokumen	1,000,000,000	
3	28	3	1.01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	617,133,200	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	1,000,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	215,820,000		1 Dokumen	350,000,000	
3	28	3	1.02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	215,820,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	350,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	312160 Ha	337,130,000		312160 Ha	506,000,000	
3	28	3	1.03	1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 dokumen	131,130,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	300,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28	3	1.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	7 Dokumen	206,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Dokumen	206,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	35 Ha	2,130,936,000		35 Ha	400,000,000	
3	28	3	1.04	1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	99,540,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	150,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	35 Hektar	2,031,396,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 Hektar	250,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	2,575,893,500		2 Kasus	2,550,000,000	
3	28	3	1.05	2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Pengamanan Hutan Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli	44126 Ha	299,869,600	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44126 Ha	300,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28	3	1.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Laporan	276,010,700	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	250,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28	3	1.05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	70 Laporan	2,000,013,200	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Laporan	2,000,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28	3	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Pembinaan dan Pemenuhan Komitmen pada unit manajemen	1 Unit Manajemen	109,080,000		1 Unit Manajemen	150,000,000	
3	28	3	1.07	2	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	7 Dokumen	109,080,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Dokumen	150,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,076,768,000		32000 Ha	1,300,000,000	
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	3 Laporan	1,076,768,000		3 Laporan	1,300,000,000	
3	28	5	1.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 Orang	138,522,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Orang	100,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28	5	1.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	426,289,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Kelompok	700,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Hektar	511,957,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Hektar	500,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			8,777,817,200			8,904,625,000	
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,042,412,200		84 %	2,104,625,000	
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	197,520,000		12 Laporan	200,000,000	
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	119,520,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	120,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
3	28	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	78,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	80,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Laporan	51,600,000		4 Laporan	55,000,000	
3	28	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	51,600,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	55,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	223,800,000		12 Laporan	230,000,000	
3	28	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	45,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	50,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
3	28	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	8 Orang	178,800,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Orang	180,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	377,583,300		12 Bulan	378,625,000	
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	38,817,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Paket	40,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
3	28	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	45,141,300	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	45,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
												Tengah
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	293,625,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	293,625,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	JUMLAH UN	45 Unit	229,147,000		45 Unit	230,000,000	
						Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	45 Unit			45 Unit		
3	28	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	49,440,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	50,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
3	28	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	179,707,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Unit	180,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	669,074,900		12 Bulan	671,000,000	
3	28	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	6,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90,754,700	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	95,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	573,320,200	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	570,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	11 Unit	293,687,000		11 Unit	340,000,000	
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	233,687,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Unit	240,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	100,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	6,197,629,000		5050000/730 M 3/ton	6,200,000,000	
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	1,424,036,000		1 Dokumen	800,000,000	
3	28	3	1.01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Unit	1,424,036,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	800,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	147,480,000		1 Dokumen	150,000,000	
3	28	3	1.02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	147,480,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	150,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	301650 Ha	216,720,000		301650 Ha	220,000,000	
3	28	3	1.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	216,720,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	220,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
						Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	6 UM			6 UM		
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	50 Ha	1,387,642,000		50 Ha	1,600,000,000	
3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	27 Ha	1,306,822,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27 Ha	1,500,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
3	28	3	1.04	8	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	4 Laporan	80,820,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	100,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	2,633,125,000		2 Kasus	2,930,000,000	
3	28	3	1.05	2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	300 Ha	346,260,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Ha	360,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
3	28	3	1.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Laporan	439,111,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	570,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
3	28	3	1.05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	1,847,754,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	2,000,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
3	28	3	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1 Unit	388,626,000		1 Unit	500,000,000	
3	28	3	1.06	3	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen	388,626,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit Managemen	500,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	537,776,000		32000 Ha	600,000,000	
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	4 Laporan	537,776,000		4 Laporan	600,000,000	
3	28	5	1.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	230,820,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Kelompok	250,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Ha	306,956,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Ha	350,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			8,725,567,200			9,195,500,000	
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,171,232,200		84 %	2,225,500,000	
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	124,800,000		12 Laporan	130,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	124,800,000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	12 Dokumen	130,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	100,500,000		12 Laporan	110,000,000	
3	28	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	42,900,000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	2 Paket	50,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
3	28	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	57,600,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Orang	60,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	416,556,702		12 Bulan	420,500,000	
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	40,483,952	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	6 Paket	40,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
3	28	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	42,672,750	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	12 Paket	45,500,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	333,400,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	335,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	15 Unit	716,016,250		15 Unit	710,000,000	
3	28	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	55,276,000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	2 Paket	60,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
3	28	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	337,175,000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua	30 Unit	300,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kelurahan			Produksi Berau Pantai
3	28	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	323,565,250	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	1 Unit	350,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	617,529,248		12 Bulan	635,000,000	
3	28	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,000,000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	12 Laporan	5,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100,100,400	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	12 Laporan	110,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
3	28	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20,235,000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	12 Laporan	25,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	492,193,848	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	12 Laporan	495,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	1 Unit	195,830,000		1 Unit	220,000,000	
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	195,830,000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	20 Unit	220,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	4,824,985,000		5050000/730 M3/ton	5,230,000,000	
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	3 Dokumen	690,207,030		3 Dokumen	500,000,000	
3	28	3	1.01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	11 Unit	690,207,030	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kelurahan	11 Unit	500,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
									Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan			
									Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kelurahan			
									Kab. Berau, Biatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	JUMLAH DO	3 Dokumen	569,350,000		3 Dokumen	600,000,000	
3	28	3	1.02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	569,350,000	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	600,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
									Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan			
									Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kelurahan			
									Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kelurahan			
									Kab. Berau, Biatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	132335 Ha	231,000,000		132335 Ha	250,000,000	
3	28	3	1.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	6 Dokumen	231,000,000	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	250,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
									Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan			
									Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kelurahan			
									Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Berau, Biatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	27 Ha	1,061,840,000		27 Ha	1,100,000,000	
3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	1,061,840,000	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kelurahan	25 Ha	1,100,000,000	Dinas Kehutanan
									Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kelurahan			
									Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kelurahan			
									Kab. Berau, Biatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	2,272,587,970		2 Kasus	2,780,000,000	
3	28	3	1.05	2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	152098 Ha	202,680,000	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kelurahan	152098 Ha	230,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
									Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan			
									Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kelurahan			
									Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kelurahan			
									Kab. Berau, Biatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	921,870,000	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	1,250,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
									Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan			
									Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kelurahan			
									Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kelurahan			
									Kab. Berau, Biatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	32 Laporan	1,148,037,970	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kelurahan	32 Laporan	1,300,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
									Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan			
									Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kelurahan			
									Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kelurahan			
									Kab. Berau, Biatan, Semua Kelurahan			
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,729,350,000		32000 Ha	1,740,000,000	
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	5 Laporan	1,729,350,000		5 Laporan	1,740,000,000	
3	28	5	1.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	6 Orang	90,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Orang	90,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	5	1.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	173,100,000	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kelurahan	3 Kelompok	200,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
									Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kelurahan			
									Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kelurahan			
									Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kelurahan			
									Kab. Berau, Biatan, Semua Kelurahan			
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2833 Ha	1,466,250,000	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kelurahan	2833 Ha	1,450,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
									Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan			
									Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kelurahan			
									Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kelurahan			
									Kab. Berau, Biatan, Semua Kelurahan			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			9,819,426,500			10,460,094,664	
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	3,033,761,684		84 %	2,412,327,664	
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	125,880,000		12 Laporan	147,000,000	
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	125,880,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	147,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	100,500,000		12 Laporan	170,200,000	
3	28	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	31,500,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	70,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	69,000,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Orang	100,200,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	943,281,000		12 Bulan	1,129,000,000	
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,366,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	10,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	45,629,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	110,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	8,046,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kelurahan	2 Paket	5,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
3	28	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	5,240,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	54,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	881,000,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	950,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79 Unit	960,893,000		79 Unit	0	
3	28	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 Paket	28,080,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Paket	0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
3	28	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	932,813,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	65 Unit			65 Unit		
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	687,262,684		12 Bulan	786,127,664	
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150,713,580	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	175,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	536,549,104	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	611,127,664	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	66 Unit	215,945,000		66 Unit	180,000,000	
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	181,345,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26 Unit	180,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	34,600,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Unit	0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	6,036,107,766		5050000/730 M 3/ton	7,067,767,000	
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	2,461,522,200		1 Dokumen	1,952,850,000	
3	28	3	1.01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	2,461,522,200	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	1,952,850,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Tersusunnya dokumen RPHJP/Revisi RPHJP /dokumen perencanaan lainnya	3 Dokumen	509,083,800		3 Dokumen	545,856,000	
3	28	3	1.02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	3 dokumen	509,083,800	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 dokumen	545,856,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	75 Ha	1,264,615,000		75 Ha	1,738,371,000	
3	28	3	1.04	2	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	75 Ha	1,264,615,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Ha	1,738,371,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	1 Kasus	1,800,886,766		1 Kasus	2,830,690,000	
3	28	3	1.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	673,805,816	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	1,279,240,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
3	28	3	1.05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	1,127,080,950	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	1,551,450,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	749,557,050		32000 Ha	980,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
					BIDANG KEHUTANAN							
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Terlaksananya pelaksanaan penyuluhan kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2 Laporan	749,557,050		2 Laporan	980,000,000	
3	28	5	1.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	517,846,800	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kelompok	790,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	25 Ha	231,710,250	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Ha	190,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			11,486,208,000			10,636,048,000	
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,150,009,000		84 %	2,082,049,000	
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	129,000,000		12 Laporan	129,000,000	
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	129,000,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	1 Dokumen	129,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	66,579,000		12 Laporan	134,400,000	
3	28	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	40,827,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	84,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
3	28	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	25,752,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	1 Dokumen	50,400,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
									Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	727,654,722		12 Bulan	545,000,000	
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	147,791,922	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	6 Paket	100,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8,446,800	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	2 Paket	10,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	571,416,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	12 Laporan	435,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
									Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	8 Unit	349,889,000		8 Unit	275,000,000	
3	28	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	129,205,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	4 Paket	50,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
3	28	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	220,684,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	8 Unit	225,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	600,314,278		12 Bulan	635,000,000	
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150,647,350	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	12 Laporan	160,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	449,666,928	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	12 Laporan	475,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	32 Unit	276,572,000		32 Unit	363,649,000	
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	240,772,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	31 Unit	313,649,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	35,800,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara,	8 Unit	50,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Sangatta Utara			Produksi Kelinjau
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	8,808,699,000		5050000/730 M3/ton	8,026,499,000	
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	3,218,233,500		1 Dokumen	1,450,000,000	
3	28	3	1.01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	7 Unit	3,218,233,500	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	7 Unit	1,450,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	127,600,000		1 Dokumen	127,600,000	
3	28	3	1.02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	127,600,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	1 Dokumen	127,600,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	9400 Ha	378,509,500		9400 Ha	345,200,000	
3	28	3	1.03	1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	135,567,500	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kelurahan	1 Dokumen	95,200,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
									Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	242,942,000	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kelurahan	1 Dokumen	250,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
									Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	100 Ha	3,455,449,000		100 Ha	3,455,449,000	
3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	3,455,449,000	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kelurahan	100 Ha	3,455,449,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
									Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	3 Kasus	1,559,145,000		3 Kasus	2,398,250,000	
3	28	3	1.05	2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	239700 Ha	250,000,000	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kelurahan	239700 Ha	250,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
									Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	300,000,000	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kelurahan	2 Dokumen	300,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
									Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	3	1.05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	2 Laporan	1,009,145,000	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kelurahan	2 Laporan	1,848,250,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
									Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu	1 UM	69,762,000		1 UM	250,000,000	
3	28	3	1.07	2	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan. Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	69,762,000	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kelurahan	2 Dokumen	250,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
									Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kelurahan			
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	527,500,000		32000 Ha	527,500,000	
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	8 Laporan	527,500,000		8 Laporan	527,500,000	
3	28	5	1.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	5 Orang	227,500,000	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kelurahan	5 Orang	227,500,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kelurahan			
3	28	5	1.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	50,000,000	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kelurahan	2 Kelompok	50,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
									Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kelurahan			
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	250,000,000	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kelurahan	1000 Ha	250,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			10,344,326,500			12,913,576,500	
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,497,595,000		84 %	2,497,595,000	
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	148,800,960		12 Laporan	200,000,000	
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	148,800,960	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	12 Dokumen	200,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	128,700,000		12 Laporan	130,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannnya	4 Paket	128,700,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	130,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	426,334,000		12 Bulan	325,000,000	
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1 Paket	15,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
3	28	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	50,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	30 Paket	50,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12,334,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1 Paket	10,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	349,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	250,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	1 Unit	289,332,000		1 Unit	297,595,000	
3	28	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	10 Unit	47,552,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	47,595,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
3	28	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Unit	241,780,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Unit	250,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,032,034,786		12 Bulan	1,020,000,000	
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	143,770,482	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	120,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	888,264,304	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	900,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	1 Unit	472,393,254		1 Unit	525,000,000	
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	50,760,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28 Unit	45,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	221,680,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28 Unit	230,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
3	28	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	199,953,254	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	250,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	6,437,885,000		5050000/730 M3/ton	8,915,981,500	
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	1,200,000,000		1 Dokumen	1,000,000,000	
3	28	3	1.01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	80 Unit	1,200,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	80 Unit	1,000,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	500,000,000		1 Dokumen	500,000,000	
3	28	3	1.02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	500,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	1 Dokumen	500,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	37578 Ha	850,000,000		37578 Ha	2,150,000,000	
3	28	3	1.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	150,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	1 Dokumen	150,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03	9	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	1 Dokumen	700,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2,000,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	100 Ha	1,734,591,500		100 Ha	1,734,591,500	
3	28	3	1.04	1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	75,260,000	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	1 Dokumen	75,260,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	1,659,331,500	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua	100 Ha	1,659,331,500	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kelurahan			Mahakam
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1,621,903,500		2 Kasus	3,000,000,000	
3	28	3	1.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	500,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	2 Dokumen	1,000,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	4 Laporan	1,121,903,500	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	4 Laporan	2,000,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu	1 Unit	531,390,000		1 Unit	531,390,000	
3	28	3	1.06	3	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	2 Unit Managemen	531,390,000	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	2 Unit Managemen	531,390,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	4			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	< 1 %	100,000,000		< 1 %	100,000,000	
3	28	4	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Jumlah Laporan Pelaksanaan pengelolaan KBEP	1 Laporan	100,000,000		1 Laporan	100,000,000	
3	28	4	1.03	4	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	50 Ha	100,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	50 Ha	100,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan			
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,308,846,500		32000 Ha	1,400,000,000	
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	8 Laporan	1,308,846,500		8 Laporan	1,400,000,000	
3	28	5	1.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	12 Orang	208,846,500	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Orang	200,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	1,100,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	1000 Ha	1,200,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			10,509,945,750			8,120,987,000	
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	3,403,963,800		84 %	2,821,522,000	
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	201,600,000		12 Laporan	201,600,000	
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	148,800,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	148,800,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
3	28	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	52,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	52,800,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	52,800,000		2 Laporan	52,800,000	
3	28	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	52,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	52,800,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	194,400,000		12 Laporan	194,400,000	
3	28	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	112,800,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	112,800,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
3	28	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	81,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Orang	81,600,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	712,118,392		12 Bulan	697,522,742	
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9 Paket	12,229,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Paket	12,229,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	108,863,742	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Paket	119,707,742	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 Paket	21,376,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 Paket	21,376,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	52,249,650	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Paket	60,410,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	517,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	483,800,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25 Unit	972,764,800		25 Unit	660,640,000	
3	28	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	509,410,000	Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu	1 Unit	511,690,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
3	28	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	52 Unit	186,834,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 Unit	148,950,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
3	28	1	1.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	276,520,800	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	JUMLAH BULAN	12 Bulan	798,145,608		12 Bulan	804,010,008	
3	28	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	3,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	99,948,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	105,812,400	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	695,197,608	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	695,197,608	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Unit barang yang diperlihara	13 Unit	472,135,000		13 Unit	210,549,250	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
					Daerah							
3	28	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	177,545,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	201,818,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Unit	210,549,250	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
3	28	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	92,772,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	5,576,601,950		5050000/730 M3/ton	3,019,485,000	
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	2 Dokumen	268,420,200		2 Dokumen	267,440,000	
3	28	3	1.01	2	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	129,100,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	138,845,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
3	28	3	1.01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	16 Unit	139,320,200	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Unit	128,595,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	3 Dokumen	327,000,000		3 Dokumen	425,000,000	
3	28	3	1.02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	327,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	425,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	132792 Ha	437,170,000		132792 Ha	250,000,000	
3	28	3	1.03	1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	7 Dokumen	132,900,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Dokumen	0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03	2	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	54,270,000	Kab. Kutai Barat, Nyuatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
3	28	3	1.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	13 Dokumen	250,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Dokumen	250,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	173 Ha	2,425,541,750		173 Ha	0	
3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	143.4 Ha	2,178,039,250	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	143.4 Ha	0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
3	28	3	1.04	8	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	15 Laporan	247,502,500	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Laporan	0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	2,118,470,000		2 Kasus	2,077,045,000	
3	28	3	1.05	2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	541626.08 Ha	250,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	541626.08 Ha	0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	13 Dokumen	684,120,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Dokumen	690,310,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	3	1.05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	15 Laporan	1,184,350,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Laporan	1,386,735,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,529,380,000		32000 Ha	2,279,980,000	
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	jumlah pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	32 Laporan	1,529,380,000		32 Laporan	2,279,980,000	
3	28	5	1.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	15 Orang	328,500,000	Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu	15 Orang	286,500,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
3	28	5	1.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	306,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Kelompok	983,400,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	400 Ha	894,880,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 Ha	1,010,080,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			10,728,279,000			10,728,279,000	
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	3,109,602,550		84 %	3,109,602,550	
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	139,200,000		12 Laporan	139,200,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	139,200,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	139,200,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	185,420,000		12 Laporan	185,420,000	
3	28	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	70,500,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	70,500,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	114,920,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Orang	114,920,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	674,927,816		12 Bulan	679,163,816	
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,895,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	4,895,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	49,984,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	49,984,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	27,943,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Paket	27,943,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	14,975,816	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	15,011,816	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	577,130,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Laporan	581,330,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	66 Unit	849,729,720		66 Unit	845,493,720	
3	28	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	41,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	41,200,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	95 Unit	213,270,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Unit	213,270,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28	1	1.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	225,659,720	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	221,423,720	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 Unit	369,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Unit	369,600,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	760,083,864		12 Bulan	760,083,864	
3	28	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	3,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	93,722,200	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	93,722,200	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	663,361,664	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	663,361,664	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	40 Unit	500,241,150		40 Unit	500,241,150	
3	28	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	135,078,550	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	135,078,550	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	124,898,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Unit	124,898,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	20,300,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Unit	20,300,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan,	1 Unit	60,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Semua Kelurahan			Produksi Mook Manor Bulatn
3	28	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	159,964,600	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	159,964,600	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	6,460,716,450		5050000/730 M 3/ton	6,460,716,450	
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	2 Dokumen	1,745,674,950		2 Dokumen	1,701,444,950	
3	28	3	1.01	2	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	195,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	195,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	1,550,674,950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	1,506,444,950	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	198,290,000		1 Dokumen	198,290,000	
3	28	3	1.02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	198,290,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	198,290,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	85751 Ha	378,000,000		85751 Ha	378,000,000	
3	28	3	1.03	1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	158,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	158,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	220,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	220,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
					Hutan Produksi							Bulatn
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	80 Ha	2,643,875,000		80 Ha	2,643,875,000	
3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	135 Ha	2,238,973,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	135 Ha	2,238,973,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28	3	1.04	8	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	3 Laporan	404,902,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	404,902,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1,494,876,500		2 Kasus	1,539,106,500	
3	28	3	1.05	2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	410738.46 Ha	142,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	410738.46 Ha	142,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	354,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	354,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28	3	1.05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan	998,876,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	1,043,106,500	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,157,960,000		32000 Ha	1,157,960,000	
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	12 Laporan	1,157,960,000		12 Laporan	1,157,960,000	
3	28	5	1.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	73,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Orang	73,400,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	5	1.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	505,560,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Kelompok	505,560,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	300 Ha	579,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Ha	579,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			10,282,649,840			9,959,818,440	
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,123,298,000		84 %	2,123,298,000	
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	213,720,000		12 Laporan	213,720,000	
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	148,800,000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	3 Dokumen	148,800,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
3	28	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	64,920,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	12 Laporan	64,920,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	27,120,000		12 Laporan	27,120,000	
3	28	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	27,120,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	6 Laporan	27,120,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	127,920,000		12 Laporan	127,920,000	
3	28	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	24,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	30 Paket	24,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
3	28	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	4 Dokumen	27,120,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	4 Dokumen	27,120,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
3	28	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	76,800,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota,	8 Orang	76,800,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Semua Kelurahan			Produksi Telake
									Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	403,110,664		12 Bulan	400,205,422	
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	7,842,200	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	2 Paket	7,842,200	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	53,693,584	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	12 Paket	52,059,022	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	95,354,880	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	2 Paket	94,084,200	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	18,700,000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	3 Paket	18,700,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
3	28	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1,920,000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	12 Dokumen	1,920,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	225,600,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	225,600,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42 Unit	182,273,000		42 Unit	182,273,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	88,053,000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	3 Paket	88,053,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
3	28	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	94,220,000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	16 Unit	94,220,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	775,916,912		12 Bulan	775,916,912	
3	28	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,500,000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	12 Laporan	2,500,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	69,206,600	Kab. Paser, Kuaro, Kuaro	12 Laporan	69,206,600	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
									Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru			
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	704,210,312	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	12 Laporan	704,210,312	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	44 Unit	393,237,424		44 Unit	396,142,666	
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	145,837,000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	29 Unit	145,837,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	14,940,000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	15 Unit	14,940,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
3	28	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	232,460,424	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	1 Unit	235,365,666	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	7,166,012,440		5050000/730 M3/ton	7,145,372,440	
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 Dokumen	2,935,266,600		1 Dokumen	2,881,866,600	
3	28	3	1.01	2	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	189,477,000	Kab. Paser, Kuaro, Modang	1 Unit	152,915,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Paser, Long Ikis, Samuntai			
3	28	3	1.01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	6 Unit	2,745,789,600	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	6 Unit	2,728,951,600	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	87,160,000		2 Dokumen	87,160,000	
3	28	3	1.02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	87,160,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	87,160,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dapat dikelolah	96.298 Ha	392,760,000		96.298 Ha	390,720,000	
3	28	3	1.03	1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	184,440,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	182,400,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
3	28	3	1.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	5 Dokumen	51,840,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	51,840,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03	8	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di KPH	1 Dokumen	156,480,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	156,480,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Rehabilitasi Lahan Keritis diluar Kawasan Hutan	100 Ha	2,501,465,840		100 Ha	2,501,465,840	
3	28	3	1.04	1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	128,946,250	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sepan	2 Dokumen	128,946,250	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	2,317,319,590	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Ha	2,317,319,590	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.04	8	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	6 Laporan	55,200,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sepan	6 Laporan	55,200,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
									Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Riko			
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah indak Pidana Kehutanan yang ditangani	3 Kasus	1,249,360,000		3 Kasus	1,284,160,000	
3	28	3	1.05	1	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pembatasan Kerusakan Hutan	4 Kegiatan	170,656,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Kegiatan	170,656,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
3	28	3	1.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	185,960,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	202,760,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	6 laporan	892,744,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 laporan	910,744,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	993,339,400		32000 Ha	691,148,000	
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat dibidang Kehutanan	15 Laporan	993,339,400		15 Laporan	691,148,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	5	1.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	12 Orang	80,480,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Orang	120,080,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1200 Ha	912,859,400	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1200 Ha	571,068,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			9,421,958,100			9,421,958,100	
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,152,271,100		84 %	2,152,271,100	
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	174,960,000		12 Laporan	174,960,000	
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	123,240,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	123,240,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
3	28	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	51,720,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	51,720,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	165,500,000		12 Laporan	165,500,000	
3	28	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	96,700,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	96,700,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
3	28	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	68,800,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Orang	68,800,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	564,340,000		12 Bulan	564,340,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	10,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Paket	10,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	200,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	200,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	8,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	8,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	10,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	336,340,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	336,340,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	31 Unit	145,493,424		31 Unit	145,493,424	
3	28	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	100,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
3	28	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	45,493,424	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	45,493,424	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	827,095,676		12 Bulan	827,095,676	
3	28	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7,500,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	7,500,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	164,265,900	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	164,265,900	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	655,329,776	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	655,329,776	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	31 Unit	274,882,000		31 Unit	274,882,000	
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	251,532,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31 Unit	251,532,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan LainnyaJumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	23,350,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Unit	23,350,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	5,472,871,250		5050000/730 M3/ton	5,472,871,250	
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	3,897,871,250		1 Dokumen	3,897,871,250	
3	28	3	1.01	2	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	3 Unit	419,281,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	419,281,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	53 Unit	3,478,590,250	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 Unit	3,478,590,250	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	250,000,000		1 Dokumen	250,000,000	
3	28	3	1.02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	250,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	250,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	350 Ha	250,000,000		350 Ha	250,000,000	
3	28	3	1.03	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	100,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03	9	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	2 Unit	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	150,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	825,000,000		2 Kasus	825,000,000	
3	28	3	1.05	2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	10000 Ha	175,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10000 Ha	175,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	250,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	250,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	400,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	12 Laporan	400,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
					Kebakaran Hutan dan Lahan				Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Izin usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit terdaftar	1 Lap;Sertf;UnitUsaha	250,000,000		1 Lap;Sertf;Unit Usaha	250,000,000	
3	28	3	1.09	1	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	1 Unit Usaha	250,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit Usaha	250,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	4			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	1 %	100,000,000		1 %	100,000,000	
						Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	<1 %			<1 %		
3	28	4	1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species)	1 Laporan	100,000,000		1 Laporan	100,000,000	
3	28	4	1.02	1	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	100,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	300,000,000		32000 Ha	300,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	4 Laporan	300,000,000		4 Laporan	300,000,000	
3	28	5	1.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Kelompok	150,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Ha	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Ha	150,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan Meningkat	13,98 %	1,396,815,750		13,98 %	1,396,815,750	
3	28	6	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	4 Dokumen	1,396,815,750		4 Dokumen	1,396,815,750	
3	28	6	1.01	2	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	4 Dokumen	1,396,815,750	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	1,396,815,750	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			9,634,404,000			10,145,501,000	
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,123,854,000		84 %	2,061,826,000	
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	133,440,000		12 Laporan	175,000,000	
3	2	1	1.0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 dokumen	133,440,000	Kab. Kutai Barat,	12 dokumen	175,000,000	UPTD Kesatuan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
	8		2		Tugas ASN	Pelaksanaan Tugas ASN			Melak, Melak Ulu			Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	50,400,000		2 Laporan	50,400,000	
3	28	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	50,400,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	50,400,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Laporan	347,060,700		1 Laporan	304,600,000	
3	28	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	120,860,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 paket	100,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	55,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	52,200,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	170,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32 Orang	152,400,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	649,681,000		12 Bulan	542,797,000	
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	10,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 paket	10,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 paket	79,048,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34 paket	45,797,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	40,604,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	30,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	30,509,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 paket	25,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	489,520,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	432,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	30 Unit	141,000,000		30 Unit	175,000,000	
3	28	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5 Paket	42,480,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Paket	75,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	98,520,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Unit	100,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	554,132,060		12 Bulan	567,029,000	
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	50,423,852	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	60,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	503,708,208	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	507,029,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	2 Unit	248,140,240		2 Unit	247,000,000	
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atrau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	185,007,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Unit	185,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 unit	22,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32 unit	22,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30,000,000	Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu	1 Unit	30,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	11,132,640	Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu	1 Unit	10,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	6,710,550,000		5050000/730 M3/ton	7,083,675,000	
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	2 Dokumen	1,454,000,000		2 Dokumen	1,454,000,000	
3	28	3	1.01	2	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 Unit	429,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	429,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	15 Unit	1,025,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Unit	1,025,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	2 Dokumen	450,000,000		2 Dokumen	450,000,000	
3	28	3	1.02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	450,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	450,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	25 Ha	1,879,675,000		25 Ha	1,879,675,000	
3	28	3	1.03	2	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	450,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	450,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan,			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan. Pengendalian. dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	3 Dokumen	399,375,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	399,375,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03	8	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	1 Dokumen	330,800,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	330,800,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03	9	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan yang dimanfaatkan	2 Dokumen	699,500,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	699,500,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	15 Ha	1,327,875,000		15 Ha	1,550,000,000	
3	28	3	1.04	1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	200,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	15 Ha	750,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Ha	850,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.04	8	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	427,875,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	500,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1,599,000,000		2 Kasus	1,750,000,000	
3	28	3	1.05	2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	649761.85 Ha	299,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,	649761.85 Ha	300,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Semua Kelurahan			Lindung Batu Rook
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	400,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	450,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10 Laporan	900,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	1,000,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan			
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	800,000,000		32000 Ha	1,000,000,000	
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	7 Laporan	800,000,000		7 Laporan	1,000,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	28	5	1.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 Orang	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Orang	150,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan			
3	28	5	1.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	300,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Kelompok	500,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan			
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Ha	350,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Ha	350,000,000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			86,382,432,000			90,059,814,000	
3	29	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	84 %	22,999,966,000		84 %	23,985,800,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	29	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	6 Dokumen	1,409,900,000		6 Dokumen	1,850,000,000	
3	29	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	476,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	650,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7,500,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	17,500,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7,500,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	12,500,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1 Laporan	20,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan	873,500,000	Kab. Berau, Kelay, Long Duhung	18 Laporan	1,100,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
									Kab. Berau, Kelay, Long Lamcin			
									Kab. Berau, Pulau Derawan, Teluk Semanting			
									Kab. Berau, Maratua, Teluk Alulu			
									Kab. Kutai Barat, Long Iram, Ujoh Halang			
									Kab. Kutai Timur, Bengalon, Tepian Indah			
									Kab. Kutai Timur, Sandaran, Sandaran			
									Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Tepian Makmur			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kab. Paser, Batu Sopang, Rantau Buta			
									Kab. Paser, Batu Sopang, Rantau Layung			
3	29	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Akuntable	1 Dokumen	16,478,753,978		1 Dokumen	16,661,800,000	
3	29	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/ Bulan	16,099,793,978	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	74 Orang/ Bulan	16,000,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	378,960,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1 Dokumen	661,800,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN	131 Pegawai	304,800,000		131 Pegawai	450,000,000	
3	29	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	104,800,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	3 Paket	200,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Orang	250,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai	12 Bulan	1,548,255,000		12 Bulan	1,609,000,000	
3	29	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	35,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	11 Paket	35,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket	77,684,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	45 Paket	78,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	19,998,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1 Paket	25,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	30,568,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	4 Paket	31,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	23,040,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air	1 Dokumen	24,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Putih			
3	29	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	6,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	6 Paket	10,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	106,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	12 Laporan	106,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	1,249,965,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Laporan	1,300,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	33 Unit	201,582,000		33 Unit	265,000,000	
3	29	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	73 Unit	63,732,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	73 Unit	80,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	137,850,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	30 Unit	185,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa kegiatan kantor	12 Bulan	2,532,186,140		12 Bulan	2,604,000,000	
3	29	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	23,600,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	12 Laporan	24,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	225,242,500	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	12 Laporan	280,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,283,343,640	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	12 Laporan	2,300,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah secara berkala	33 Unit	524,488,882		33 Unit	546,000,000	
3	29	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	271,721,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	39 Unit	291,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	109,492,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	17 Unit	110,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	143,275,882	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	3 Unit	145,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	29	2			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan	38,38 %	2,394,290,000		38,38 %	2,863,862,000	
3	29	2	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang ditetapkan	1 Dokumen	1,944,290,000		1 Dokumen	2,338,862,000	
3	29	2	1.01	1	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	934,290,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1,200,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	29	2	1.01	2	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	60,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	95,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	29	2	1.01	3	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	950,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1,043,862,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	2	1.02		Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan pemilik sumur bor air tanah yang mematuhi aturan	120 Perusahaan	320,000,000		120 Perusahaan	525,000,000	
3	29	2	1.02	2	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Rekomendasi Teknis perizinan pemanfaatan air tanah	100 rekomtek	160,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 rekomtek	200,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	2	1.02	3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah perusahaan pemilik sumur bor air tanah yang mematuhi	120 perusahaan	160,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120 perusahaan	325,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	2	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumah Aturan tekait Nilai Perolehan Air Tanah	1 SK	130,000,000		1 SK	0	
3	29	2	1.03	2	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	130,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	3			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	50 %	1,373,176,000		50 %	1,840,152,000	
3	29	3	1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	1 WIUP	100,000,000		1 WIUP	120,000,000	
3	29	3	1.01	3	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Laporan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	120,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	3	1.02		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan	Inventarisasi Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara	3 Dokumen	342,960,000		3 Dokumen	411,552,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
					12 Mil Laut							
3	29	3	1.02	3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah perusahaan yang memenuhi standar K3 dan Lingkungan	15 IUP	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 IUP	120,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	3	1.02	4	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah perusahaan yang mengikuti kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan perundangan yang berlaku	16 Perusahaan	242,960,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Perusahaan	291,552,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	3	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Surat Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam atau Batuan	3 Dokumen	338,600,000		3 Dokumen	338,600,000	
3	29	3	1.03	3	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	1 Laporan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	100,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	3	1.03	5	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik	16 Laporan	238,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Laporan	238,600,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	29	3	1.04		Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Verifikasi Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	4 Dokumen	92,616,000		4 Dokumen	120,000,000	
3	29	3	1.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	1 Laporan	92,616,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	120,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	3	1.05		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama	Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi Khusus Untuk Pengelolaan dan pemurnian	20 Perusahaan	159,000,000		20 Perusahaan	250,000,000	
3	29	3	1.05	3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengelolaan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya berada dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama	20 Perusahaan	159,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Perusahaan	250,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	3	1.07		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Standarisasi Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	10 Kab/Kota	340,000,000		10 Kab/Kota	600,000,000	
3	29	3	1.07	1	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	1 Dokumen	125,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	3	1.07	2	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	3	1.07	3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	20 Laporan	115,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Laporan	200,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	5			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Pemanfaatan EBT	8,40 %	5,395,000,000		8,40 %	5,170,000,000	
3	29	5	1.01		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur	Jumlah potensi dan pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan	1 Dokumen	400,000,000		1 Dokumen	900,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
					dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Kepulauan						
3	29	5	1.01	2	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah Dokumen rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	1 Dokumen	400,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	900,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	29	5	1.03		Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah potensi dan pemanfaatan Biofuel sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun	1 Dokumen	500,000,000		1 Dokumen	775,000,000	
3	29	5	1.03	3	Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1 Laporan	500,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	775,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
									Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan,			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	29	5	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Penerbitan Instruksi, Edaran, Himbauan Tentang Penghematan Energi dan Air	1 Dokumen	4,495,000,000		1 Dokumen	3,495,000,000	
3	29	5	1.04	1	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Pembuatan Dokumen Peraturan Gubernur	2 Dokumen	55,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	75,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	5	1.04	3	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Kegiatan Sosialisasi Penghematan Energi	4 Sekolah	150,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Sekolah	200,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
						Kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur	2 Kegiatan		Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kegiatan		
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	29	5	1.04	4	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Pembangunan Instalasi Biogas	28 Unit	4,120,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28 Unit	3,000,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
						Pembangunan PJUTS	100 Unit		Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Unit		
						Pembangunan PLTS Atap	1 Unit			1 Unit		
						Perencanaan DED PLTS Atap	1 Paket			1 Paket		
3	29	5	1.04	7	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengawasan Konservasi Energi dan Pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi	3 Kegiatan	170,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Kegiatan	220,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	29	6			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah KK Berlistrik	1200000 KK	54,220,000,000		1200000 KK	56,200,000,000	
3	29	6	1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	20 Perusahaan	300,000,000		20 Perusahaan	300,000,000	
3	29	6	1.01	3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	300,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	300,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	29	6	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	50 Perusahaan	800,000,000		50 Perusahaan	1,300,000,000	
3	29	6	1.02	2	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan pemegang IUPTLS yang dilakukan pembinaan	20 perusahaan	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 perusahaan	300,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
						Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	30 perusahaan			30 perusahaan		
3	29	6	1.02	3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	30 Laporan	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Laporan	1,000,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	6	1.05		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	20 Perusahaan	300,000,000		20 Perusahaan	300,000,000	
3	29	6	1.05	2	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya	12 Dokumen	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	300,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
					Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri						
3	29	6	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah data verifikasi kategori masyarakat tidak mampu daerah terpencil dan perdesaan	1 Dokumen	52,820,000,000		1 Dokumen	54,300,000,000	
3	29	6	1.06	3	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Laporan	840,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1,500,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	6	1.06	4	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Dokumen	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	500,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	6	1.06	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	20 Laporan	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Laporan	300,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	6	1.06	6	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Lokasi Pembangunan PLTS	5 Lokasi	51,180,000,000	Kab. Berau, Pulau Derawan, Pegat Batumbuk	5 Lokasi	52,000,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
						Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	5 Unit		Kab. Kutai Barat, Bongan, Deraya	5 Unit		
									Kab. Kutai Barat, Bongan, Lemper			
									Kab. Kutai Timur, Sandaran, Tanjung Mangkaliat			
									Kab. Mahakam Ulu, Long Hubung, Matalibaq			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			33,815,598,750			35,043,431,855	
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	90 %	31,565,598,750		90 %	30,443,431,855	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	17	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitasi Kinerja PD	73 nilai	1,408,585,000		73 nilai	1,108,585,000	
2	17	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	718,985,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	550,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	689,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	558,585,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase Laporan yang disusun sesuai Ketentuan	100 %	20,592,501,279		100 %	19,753,171,619	
2	17	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 orang/bulan	14,948,802,995	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	80 orang/bulan	15,119,766,635	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25 Dokumen	5,604,058,784	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	25 Dokumen	4,593,404,984	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	10,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	2 Laporan	10,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaandan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	9,930,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	3 Dokumen	10,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	19,709,500	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	14 Laporan	20,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	60 orang	1,212,200,000		60 orang	650,000,000	
2	17	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	212,500,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1 paket	250,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 orang	999,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 orang	400,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	17	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	674,937,000		12 bulan	568,000,000	
2	17	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	106,864,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	3 paket	90,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8000 paket	390,083,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8000 paket	300,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	150,000,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	2 paket	150,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1920 Dokumen	27,990,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	1920 Dokumen	28,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	25 unit	4,024,099,000		25 unit	5,753,675,236	
2	17	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	494,410,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	2 unit	20,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	2,988,670,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	1,000,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	535,937,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	1 unit	200,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	1.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	5,082,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	2 unit	4,533,675,236	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	12 bulan	2,146,680,576		12 bulan	1,910,000,000	
2	17	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	10,000,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	12 laporan	10,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
												Kecil Menengah
2	17	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	814,134,576	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	36 Laporan	800,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,322,546,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	12 laporan	1,100,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	12 bulan	1,506,595,895		12 bulan	700,000,000	
2	17	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	35 unit	546,589,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	35 unit	400,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	960,006,895	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	20 unit	300,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	10 %	583,040,000		10 %	600,000,000	
2	17	3	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan	30 Koperasi	583,040,000		30 Koperasi	600,000,000	
2	17	3	1.01	2	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	20 unit usaha	583,040,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 unit usaha	600,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih (DAK)	520 Koperasi dan UKM	1,000,000		520 Koperasi dan UKM	2,400,000,000	
2	17	5	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah peserta Pelatihan Koperasi dan UKM (DAK)	500 orang	1,000,000		500 orang	2,400,000,000	
2	17	5	1.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (DAK)	500 orang	1,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	500 orang	2,400,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
					Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				Semua Kelurahan			Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi berkualitas	10 Koperasi	874,660,000		10 Koperasi	650,000,000	
2	17	6	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah Koperasi yang Melakukan RAT	25 koperasi	874,660,000		25 koperasi	650,000,000	
2	17	6	1.01	2	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	JJumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	150 unit usaha	874,660,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 unit usaha	650,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	7			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	1 %	463,700,000		1 %	450,000,000	
2	17	7	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Wira Usaha Pemula	10 Wirausaha Pemula	463,700,000		10 Wirausaha Pemula	450,000,000	
2	17	7	1.01	1	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	200 unit usaha	463,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 unit usaha	450,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	3 %	327,600,000		3 %	500,000,000	
2	17	8	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah wira usaha mandiri	1 wirausaha	327,600,000		1 wirausaha	500,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	17	8	1.01	1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	50 unit usaha	327,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 unit usaha	500,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			4,650,000,000			4,650,000,000	
3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Eksportir yang aktif menggunakan SKA	260 Eksportir	208,820,000		260 Eksportir	200,000,000	
3	30	2	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	jumlah SKA yang diterbitkan	4000 lembar	208,820,000		4000 lembar	200,000,000	
3	30	2	1.04	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	3500 Dokumen	208,820,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3500 Dokumen	200,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga bapokting	80 %	968,489,000		80 %	1,050,000,000	
3	30	4	1.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Laporan Ketersediaan Bapokting	12 bulan	345,382,000		12 bulan	400,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	30	4	1.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	6 kegiatan	345,382,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 kegiatan	400,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	4	1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Komoditi Bapokting yang Dipantau	21 jenis komoditi	623,107,000		21 jenis komoditi	650,000,000	
3	30	4	1.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan	538,182,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	500,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	4	1.02	2	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Laporan	84,925,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	150,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5 %	792,800,000		5 %	850,000,000	
3	30	5	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor (orang)	2 orang	792,800,000		2 orang	850,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	30	5	1.01	3	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha	421,610,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Pelaku Usaha	500,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	5	1.01	5	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	2 pelaku usaha	371,190,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 pelaku usaha	350,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan pengawasan barang beredar dan/atau jasa SNI wajib yang diawasi	15 %	2,000,000,000		15 %	2,000,000,000	
3	30	6	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	konsumen yang telah diberikan edukasi	1000 orang	1,462,000,000		1000 orang	1,500,000,000	
3	30	6	1.01	1	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	3 BPSK	780,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 BPSK	800,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	6	1.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	20 Pengaduan	682,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Pengaduan	700,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	6	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	jumlah barang dan jasa yang sesuai Ketentuan	27 jenis	538,000,000		27 jenis	500,000,000	
3	30	6	1.03	1	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	3 Laporan	538,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	500,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan Jumlah Produk Dalam Negeri Yang difasilitasi pemasaran	5 Produk	679,891,000		5 Produk	550,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	30	7	1.02		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Pemasaran	10 pelaku usaha	679,891,000		10 pelaku usaha	550,000,000	
3	30	7	1.02	1	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	14 UMKM	679,891,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 UMKM	550,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			3,185,000,000			3,185,000,000	
3	31	2			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	2 Industri	1,983,000,000		2 Industri	1,995,000,000	
3	31	2	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5 Dokumen	1,983,000,000		5 Dokumen	1,995,000,000	
3	31	2	1.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 Dokumen	316,402,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	240,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	31	2	1.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	112,890,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	115,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	31	2	1.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Dokumen	1,417,294,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	1,500,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	31	2	1.01	6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	136,414,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	140,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pengendalian izin usaha sektor industri terhadap jumlah industri yang terdata	5 %	721,000,000		5 %	700,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	31	3	1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah industri yang dilakukan pemantauan dan pengawasan dalam penerbitan perizinan	22 industri	721,000,000		22 industri	700,000,000	
3	31	3	1.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	7 Dokumen	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Dokumen	250,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	31	3	1.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danSinkronisasi Pengawasan Perizinan Di BidangIndustri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri,Perizinan Perluasan Usaha Industri, PerizinanKawasan Industri dan Perizinan PerluasanKawasan Industri Kewenangan Provinsi	10 Dokumen	471,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	450,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah industri daerah yang dapat dipantau perkembangannya	10 Industri	481,000,000		10 Industri	490,000,000	
3	31	4	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	jumlah industri yang memiliki IUI, IPUI,IUKI dan IPKI kewenangan provinsi	10 industri	481,000,000		10 industri	490,000,000	
3	31	4	1.01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4 Dokumen	117,008,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	120,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	31	4	1.01	2	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1 Dokumen	97,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	31	4	1.01	3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	5 Dokumen	266,992,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	270,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			4,035,264,308			4,417,668,145	
3	30	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	90 %	2,606,248,308		90 %	2,888,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	30	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase laporan yang disusun sesuai ketentuan	100 %	1,394,337,248		100 %	1,400,000,000	
3	30	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	183 Dokumen	1,394,337,248	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	183 Dokumen	1,400,000,000	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
3	30	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	10 Orang	100,800,000		10 Orang	100,000,000	
3	30	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	100,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 orang	100,000,000	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
3	30	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	148,172,440		12 bulan	227,000,000	
3	30	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	10,290,810	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	1 paket	12,000,000	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
3	30	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 paket	68,856,630	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	20 paket	100,000,000	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
3	30	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1500 paket	20,160,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	1500 paket	45,000,000	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
3	30	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 paket	45,025,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	30 paket	46,000,000	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
3	30	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	3,840,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	5 Dokumen	24,000,000	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
3	30	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	25 unit	138,946,380		25 unit	300,000,000	
3	30	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 paket	138,946,380	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	1 paket	300,000,000	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	30	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	12 bulan	460,539,800		12 bulan	510,000,000	
3	30	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	10,000,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	50 Laporan	10,000,000	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
3	30	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	150,558,800	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	36 Laporan	150,000,000	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
3	30	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	299,981,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	350,000,000	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
3	30	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	12 bulan	363,452,440		12 bulan	351,000,000	
3	30	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	80,249,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	5 unit	76,000,000	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
3	30	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	126,870,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	10 unit	25,000,000	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
3	30	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	156,333,440	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	4 unit	250,000,000	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase capaian target sertifikat mutu barang	100 %	1,429,016,000		100 %	1,529,668,145	
3	30	6	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk	100 %	1,429,016,000		100 %	1,529,668,145	
3	30	6	1.02	1	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	3 komoditi	297,624,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 komoditi	400,000,000	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
3	30	6	1.02	2	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	60 Dokumen	259,884,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Dokumen	450,000,000	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
3	30	6	1.02	3	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	1 Sertifikat	271,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Sertifikat	400,000,000	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
3	30	6	1.02	4	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	2215 Sertifikat	600,508,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2215 Sertifikat	279,668,145	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			3,053,897,942			3,053,900,000	
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	90 %	2,553,061,942		90 %	2,453,900,000	
2	17	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase laporan yang disusun sesuai ketentuan	100 %	1,409,397,792		100 %	1,420,000,000	
2	17	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1,409,397,792	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	12 Dokumen	1,420,000,000	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
2	17	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS/NONPNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	25 orang	59,804,000		25 orang	50,000,000	
2	17	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	59,804,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	7 Orang	50,000,000	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
2	17	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	131,305,750		12 bulan	100,900,000	
2	17	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	21,510,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	12 paket	21,000,000	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
2	17	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	67,955,750	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang	7 paket	38,000,000	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Dalam			
2	17	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	38,000,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	4 paket	38,000,000	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
2	17	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3,840,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	24 Dokumen	3,900,000	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
2	17	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	25 unit	99,375,000		25 unit	81,000,000	
2	17	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 unit	99,375,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	21 unit	81,000,000	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
2	17	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	12 bulan	194,990,800		12 bulan	195,000,000	
2	17	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	4,000,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	400 Laporan	4,000,000	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
2	17	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	190,990,800	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	12 Laporan	191,000,000	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
2	17	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Disperindagkop	12 bulan	658,188,600		12 bulan	607,000,000	
2	17	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	71,006,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	3 unit	71,000,000	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
2	17	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 unit	85,705,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	80 unit	76,000,000	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
2	17	1	1.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 unit	501,477,600	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	2 unit	460,000,000	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih	300 Koperasi dan UKM	500,836,000		300 Koperasi dan UKM	600,000,000	
2	17	5	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah Koperasi dan UKM yang Mengikuti Pelatihan	300 Koperasi dan UKM	500,836,000		300 Koperasi dan UKM	600,000,000	
2	17	5	1.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	240 orang	500,836,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	240 orang	600,000,000	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4	1				SEKRETARIAT DAERAH			184,843,468,000			188,792,752,073	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Umum	84 %	184,843,468,000		84 %	188,792,752,073	
4	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Biro Umum	100 %	556,298,000		100 %	550,000,000	
4	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	556,298,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	550,000,000	Biro Umum
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
4	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Biro Umum terlaksana dengan baik	100 %	80,023,539,568		100 %	90,297,521,241	
4	1	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	373 Orang/Bulan	77,827,745,568	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	373 Orang/Bulan	88,503,031,841	Biro Umum
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
4	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2,195,794,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	1,794,489,400	Biro Umum
4	1	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik daerah pada Biro Umum	100 %	1,266,620,000		100 %	1,240,278,600	
4	1	1	1.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan. Pengawasan. dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	354,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	579,095,000	Biro Umum
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
4	1	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	912,620,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	661,183,600	Biro Umum
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
4	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Biro Umum	100 %	2,250,007,000		100 %	2,277,017,600	
4	1	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	494,950,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	550,000,000	Biro Umum
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
4	1	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	1,187,477,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	1,342,017,600	Biro Umum
4	1	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	225 Orang	567,580,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	225 Orang	385,000,000	Biro Umum
4	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Penunjang Administrasi Umum pada Biro Umum	100 %	24,872,815,863		100 %	19,949,171,019	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
4	1	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	600,753,645	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Paket	385,000,000	Biro Umum
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
4	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	645,103,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Paket	675,793,800	Biro Umum
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
4	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	500 Paket	7,889,512,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Paket	2,750,000,000	Biro Umum
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
4	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	736,700,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Paket	762,520,000	Biro Umum
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
4	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1000 Orang/Perjalan	13,743,625,363	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000 Orang/Perjalan	14,275,857,219	Biro Umum
4	1	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	730,341,415	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	660,000,000	Biro Umum
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
4	1	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	526,780,440	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	440,000,000	Biro Umum
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
4	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Umum	100 %	9,271,797,030		100 %	8,250,000,000	
4	1	1	1.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12 Unit	4,825,940,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Unit	5,500,000,000	Biro Umum
4	1	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	150 Unit	4,445,857,030	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Unit	2,750,000,000	Biro Umum
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
4	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Biro Umum	100 %	26,715,690,869		100 %	23,071,252,073	
4	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	82,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	88,000,000	Biro Umum
4	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9,400,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	9,491,752,073	Biro Umum
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
4	1	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2,550,641,600	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	841,500,000	Biro Umum
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
4	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14,683,049,269	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	12,650,000,000	Biro Umum
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
4	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	16,749,820,882		100 %	15,451,450,873	
4	1	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	150 Unit	7,411,670,050	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Unit	5,605,355,140	Biro Umum
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
4	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	1,714,667,800	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Unit	1,100,000,000	Biro Umum
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
4	1	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	7,339,333,032	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Unit	8,141,095,733	Biro Umum
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
4	1	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150 Unit	284,150,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Unit	605,000,000	Biro Umum
4	1	1	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan baik	100 %	11,186,418,788		100 %	12,306,060,667	
4	1	1	1.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	250,252,396	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Orang/Bulan	275,277,636	Biro Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
4	1	1	1.1 1	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	187,600,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	207,360,000	Biro Umum
4	1	1	1.1 1	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	870,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Orang	957,000,000	Biro Umum
4	1	1	1.1 1	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Dana Penunjang Operasional KDH WKDH	12 Laporan	9,878,566,392	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	10,866,423,031	Biro Umum
4	1	1	1.1 2		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	11,950,460,000		100 %	15,400,000,000	
4	1	1	1.1 2	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	90 Paket	5,120,061,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Paket	4,950,000,000	Biro Umum
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
4	1	1	1.1 2	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	90 Paket	4,923,145,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Paket	4,950,000,000	Biro Umum
4	1	1	1.1 2	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	100 Paket	1,907,254,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Paket	5,500,000,000	Biro Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4	1				SEKRETARIAT DAERAH			13,793,261,000			10,658,593,000	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Adpim	85 %	13,793,261,000		85 %	10,658,593,000	
4	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	816,358,000		5 Dokumen	919,023,000	
4	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	724,658,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	816,358,000	Biro Administrasi Pimpinan
4	1	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	91,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	102,665,000	Biro Administrasi Pimpinan
4	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	158,520,000		12 Dokumen	253,920,000	
4	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	158,520,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	253,920,000	Biro Administrasi Pimpinan
4	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	588,404,000		20 Orang	427,980,947	
4	1	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 dokumen	418,404,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 dokumen	314,972,000	Biro Administrasi Pimpinan
4	1	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	170,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	113,008,947	Biro Administrasi Pimpinan
4	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	150 Paket	1,645,006,198		150 Paket	946,291,821	
4	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"	150 Paket	129,248,050	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Paket	228,725,350	Biro Administrasi Pimpinan
4	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	123,312,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Paket	115,048,000	Biro Administrasi Pimpinan
4	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	26,304,274	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Paket	125,865,000	Biro Administrasi Pimpinan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
4	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	1,366,141,874	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Laporan	476,653,471	Biro Administrasi Pimpinan
4	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	107,200,000		20 Unit	693,363,000	
4	1	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit	107,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 unit	693,363,000	Biro Administrasi Pimpinan
4	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,524,477,232		12 Laporan	1,524,477,232	
4	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25,700,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	25,700,400	Biro Administrasi Pimpinan
4	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,498,776,832	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	1,498,776,832	Biro Administrasi Pimpinan
4	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	148,219,000		10 Unit	68,173,000	
4	1	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	49,419,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 unit	40,703,000	Biro Administrasi Pimpinan
4	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	98,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 unit	27,470,000	Biro Administrasi Pimpinan
4	1	1	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12 Dokumen	6,830,660,000		12 Dokumen	5,101,650,000	
4	1	1	1.13	1	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12 dokumen	580,680,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 dokumen	300,153,000	Biro Administrasi Pimpinan
4	1	1	1.13	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	6 Laporan	3,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	2,422,010,000	Biro Administrasi Pimpinan
4	1	1	1.13	3	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	2,749,980,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	2,379,487,000	Biro Administrasi Pimpinan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
4	1	1	1.14		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan	1,974,416,570		12 Laporan	723,714,000	
4	1	1	1.14	1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	12 Laporan	1,035,380,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	281,220,000	Biro Administrasi Pimpinan
4	1	1	1.14	2	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 Laporan	686,028,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	308,550,000	Biro Administrasi Pimpinan
4	1	1	1.14	3	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan	253,008,570	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	133,944,000	Biro Administrasi Pimpinan
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4	1				SEKRETARIAT DAERAH			5,555,666,000			5,555,666,000	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Layanan Biro Hukum	84 %	1,555,666,000		84 %	1,461,666,000	
4	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	2 Dokumen	5,540,000		2 Dokumen	4,410,000	
4	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	2 Dokumen	5,540,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	4,410,000	Biro Hukum
4	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Biro Hukum	1 Laporan	103,920,000		1 Laporan	103,920,000	
4	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan dokumen penatausahaan administrasi keuangan	12 Laporan	103,920,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	103,920,000	Biro Hukum
4	1	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan BMD	12 Laporan	7,680,000		12 Laporan	7,680,000	
4	1	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD	12 Laporan	7,680,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	7,680,000	Biro Hukum
4	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan/Bimtek/Diklat	2 Orang	72,000,000		2 Orang	50,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
4	1	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	72,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Orang	50,000,000	Biro Hukum
4	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan ATK	12 Laporan	732,054,656		12 Laporan	642,887,551	
4	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	101,906,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	61,875,351	Biro Hukum
4	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan Porsi Makanan dan Minuman yang disediakan	400 Porsi	66,920,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 Porsi	60,952,000	Biro Hukum
4	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Laporan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Laporan	27,428,656	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	20,060,200	Biro Hukum
4	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	45 Laporan	535,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Laporan	500,000,000	Biro Hukum
4	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Hukum	100 Persentase	108,912,000		100 Persentase	169,255,505	
4	1	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	108,912,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Unit	169,255,505	Biro Hukum
4	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Hukum)	100 Persentase	500,009,344		100 Persentase	458,762,944	
4	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang disediakan	500 Lembar	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Lembar	5,000,000	Biro Hukum
4	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis	12 Dokumen	495,009,344	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	453,762,944	Biro Hukum
4	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Hukum)	100 Persentase	25,550,000		100 Persentase	24,750,000	
4	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25,550,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Unit	24,750,000	Biro Hukum
4	1	5			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase terlaksana Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi, Kab/Kota serta Penanganan Litigasi dan Non Litigasi dan HAM	100 %	4,000,000,000		100 %	4,094,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
4	1	5	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Provinsi dan Kab/Kota	100 Persentase	2,600,000,000		100 Persentase	2,650,000,000	
4	1	5	1.01	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	90 Dokumen	900,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Dokumen	850,000,000	Biro Hukum
4	1	5	1.01	2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	650 Dokumen	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	650 Dokumen	400,000,000	Biro Hukum
4	1	5	1.01	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	740 Dokumen	600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	740 Dokumen	600,000,000	Biro Hukum
4	1	5	1.01	4	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	350 Dokumen	800,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350 Dokumen	800,000,000	Biro Hukum
4	1	5	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah dokumen penanganan perkara/sengketa hukum	10 Dokumen	1,400,000,000		10 Dokumen	1,444,000,000	
4	1	5	1.02	1	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	10 Kasus	900,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Kasus	900,000,000	Biro Hukum
4	1	5	1.02	2	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	5 Kasus	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Kasus	544,000,000	Biro Hukum
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4	1				SEKRETARIAT DAERAH			6,472,183,000			11,337,007,220	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Organisasi	84 %	1,917,183,000		84 %	4,562,670,655	
4	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Laporan	110,000,000		1 Laporan	216,990,310	
4	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	110,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	216,990,310	Biro Organisasi
4	1	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara	100 %	10,000,000		100 %	41,400,000	
4	1	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	41,400,000	Biro Organisasi
4	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	108,960,000		7 Orang	261,650,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
4	1	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	27,200,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	27,200,000	Biro Organisasi
4	1	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	81,760,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Orang	234,450,000	Biro Organisasi
4	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Biro Organisasi	100 %	1,176,984,000		100 %	3,330,530,165	
4	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	55,121,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	37,000,000	Biro Organisasi
4	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	281,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	300,000,000	Biro Organisasi
4	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21,028,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	49,700,585	Biro Organisasi
4	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	31,980,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	24,980,000	Biro Organisasi
4	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	708,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	2,839,694,580	Biro Organisasi
4	1	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	79,155,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	79,155,000	Biro Organisasi
4	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Biro Organisasi)	100 %	104,760,000		100 %	250,000,000	
4	1	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	104,760,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Unit	250,000,000	Biro Organisasi
4	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Dokumen	335,923,000		12 Dokumen	433,403,280	
4	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	17,000,000	Biro Organisasi
4	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	330,923,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	416,403,280	Biro Organisasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
4	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 %	70,556,000		100 %	28,696,900	
4	1	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	32,406,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Unit	13,956,900	Biro Organisasi
4	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	38,150,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41 Unit	14,740,000	Biro Organisasi
4	1	2			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nua memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	81 %	4,555,000,000		81 %	6,774,336,565	
						Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	97 %			97 %		
						Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	89 %			89 %		
4	1	2	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang Kelembagaan Organisasinya sesuai ketentuan	100 %	1,605,000,000		100 %	2,567,851,565	
						Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	96 %			96 %		
4	1	2	1.01	1	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	1 Dokumen	750,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1,145,703,125	Biro Organisasi
4	1	2	1.01	2	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	425,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	631,548,440	Biro Organisasi
4	1	2	1.01	3	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	1 Dokumen	430,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	790,600,000	Biro Organisasi
4	1	2	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan sesuai aturan / Ketentuan	100 %	2,950,000,000		100 %	4,206,485,000	
4	1	2	1.02	1	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1,000,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1,320,000,000	Biro Organisasi
4	1	2	1.02	2	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	900,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1,201,825,000	Biro Organisasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
4	1	2	1.02	3	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	250,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	300,000,000	Biro Organisasi
4	1	2	1.02	4	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen	300,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	500,000,000	Biro Organisasi
4	1	2	1.02	5	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	500,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	884,660,000	Biro Organisasi
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4	1				SEKRETARIAT DAERAH			5,673,269,000			6,408,363,728	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	84 %	1,996,516,528		84 %	2,193,363,728	
4	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	5,696,000		100 %	6,200,000	
4	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5,696,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	6,200,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Biro POD	100 %	147,960,000		100 %	177,000,000	
4	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	147,960,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	177,000,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Biro POD	100 %	12,150,000		100 %	13,400,000	
4	1	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	12,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Orang	13,400,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Biro POD	100 %	955,890,390		100 %	1,079,300,000	
4	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	82,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	90,200,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
4	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	45,290,390	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	52,100,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	828,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Laporan	937,000,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Biro POD)	100 %	200,214,410		100 %	230,000,000	
4	1	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	200,214,410	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Unit	230,000,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro POD)	100 %	596,713,728		100 %	597,363,728	
4	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,850,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	4,500,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	592,863,728	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan	592,863,728	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro POD)	100 %	77,892,000		100 %	90,100,000	
4	1	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Unit	11,400,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	68,392,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Unit	78,700,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	1	3			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase pengendalian penerapan SPM	100%	3,676,752,472		100%	4,215,000,000	
						Persentase terlaksananya koordinasi dalam bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	90%			90%		
						Persentase meningkatnya kualitas Pemerintahan Daerah	90%			90%		
4	1	3	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase meningkatnya kualitas Pemerintahan Daerah	90 %	1,056,674,472		90 %	1,210,000,000	
4	1	3	1.01	2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	606,674,472	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	715,000,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
4	1	3	1.01	3	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	4 Dokumen	450,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	495,000,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	1	3	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase terlaksananya koordinasi dalam bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	90 %	1,620,078,000		90 %	1,820,000,000	
4	1	3	1.02	1	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	3 Dokumen	450,033,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	495,000,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	1	3	1.02	2	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	4 Dokumen	600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	715,000,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	1	3	1.02	3	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	570,045,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	610,000,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	1	3	1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase dokumen kerja sama dan laporan evaluasi kerja sama	100 %	1,000,000,000		100 %	1,185,000,000	
4	1	3	1.03	1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Dokumen	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	520,000,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	1	3	1.03	2	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Dokumen	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	275,000,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	1	3	1.03	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	2 Laporan	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	390,000,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4	1				SEKRETARIAT DAERAH			57,729,985,000			47,951,000,000	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat	84 %	2,762,112,264		84 %	2,401,000,000	
4	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentese Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tepat waktu	100 %	149,934,000		100 %	116,000,000	
4	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	26,724,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	26,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
4	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	52,116,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	25,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
4	1	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	22,178,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	25,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
4	1	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	48,916,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	40,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
4	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentese Realisasi Keuangan	92 %	277,960,000		92 %	355,000,000	
4	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	259,262,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	340,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
4	1	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	18,698,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	15,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
4	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	31,260,000		100 %	35,000,000	
4	1	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	31,260,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Orang	35,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
4	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Palaksanaan Administrasi Umum	12 Bulan	1,415,893,000		12 Bulan	960,000,000	
4	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	53 Paket	607,725,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 Paket	150,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	60,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	60,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	748,168,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	750,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Palaksanaan Jasa Penunjang	12 Bulan	776,340,264		12 Bulan	785,000,000	
4	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	20,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	44,880,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	15,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17 Laporan	711,460,264	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Laporan	750,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Kategori Baik	90 %	110,725,000		90 %	150,000,000	
4	1	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	89,705,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	125,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	21,020,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Unit	25,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat
4	1	4			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	90 %	54,967,872,736		90 %	45,550,000,000	
4	1	4	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Prosentase rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual yang ditindaklanjuti	90 %	33,125,907,861		90 %	38,500,000,000	
4	1	4	1.01	1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	100 Unit	25,444,021,861	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Unit	30,000,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat
4	1	4	1.01	2	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 Lembaga	7,681,886,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Lembaga	8,500,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
4	1	4	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Prosentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	90 %	17,942,274,000		90 %	3,700,000,000	
4	1	4	1.02	1	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	13 Dokumen	1,366,242,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Dokumen	2,000,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat
4	1	4	1.02	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	12 Dokumen	749,910,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	850,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat
4	1	4	1.02	3	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	13 Dokumen	15,826,122,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Dokumen	850,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat
4	1	4	1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Prosentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	90 %	3,899,690,875		90 %	3,350,000,000	
4	1	4	1.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	13 Dokumen	1,896,502,875	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Dokumen	1,300,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat
4	1	4	1.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	20 Dokumen	1,332,084,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Dokumen	1,300,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat
4	1	4	1.03	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	12 Dokumen	671,104,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	750,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4	1				SEKRETARIAT DAERAH			4,228,717,000			5,287,951,472	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Perekonomian	84 %	1,668,717,000		84 %	2,097,951,472	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
4	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan (Biro Perekonomian)	8 Dokumen	45,322,000		8 Dokumen	60,338,300	
4	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	4 dokumen	34,462,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 dokumen	48,392,300	Biro Perekonomian
4	1	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	10,860,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 laporan	11,946,000	Biro Perekonomian
4	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Laporan	112,650,000		1 Laporan	131,175,000	
4	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	112,650,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 dokumen	131,175,000	Biro Perekonomian
4	1	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Barang Milik Daerah Biro Perekonomian yang disusun sesuai Ketentuan	100 %	13,440,000		100 %	14,784,000	
4	1	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	13,440,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	14,784,000	Biro Perekonomian
4	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100 %	30,900,000		100 %	26,553,872	
4	1	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	24 dokumen	1,200,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 dokumen	1,320,000	Biro Perekonomian
4	1	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 orang	29,700,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 orang	25,233,872	Biro Perekonomian
4	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Biro Perekonomian	100 %	728,296,000		100 %	968,713,600	
4	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	39 paket	39,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39 paket	51,788,000	Biro Perekonomian
4	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1250 paket	30,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1250 paket	33,300,000	Biro Perekonomian
4	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	18,016,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 paket	19,817,600	Biro Perekonomian
4	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 eksemplar	7,680,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 eksemplar	8,448,000	Biro Perekonomian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
4	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 laporan	633,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120 laporan	855,360,000	Biro Perekonomian
4	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Biro Perekonomian)	100 %	51,164,000		100 %	138,415,520	
4	1	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 unit	51,164,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 unit	138,415,520	Biro Perekonomian
4	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Perekonomian)	100 %	632,930,000		100 %	698,554,680	
4	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	4,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	1,452,000	Biro Perekonomian
4	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	628,730,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 dokumen	697,102,680	Biro Perekonomian
4	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Perekonomian)	100 %	54,015,000		100 %	59,416,500	
4	1	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	35,765,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	39,341,500	Biro Perekonomian
4	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	18,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Unit	20,075,000	Biro Perekonomian
4	1	6			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian	100 %	2,560,000,000		100 %	3,190,000,000	
4	1	6	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1 Dokumen	640,000,000		1 Dokumen	797,500,000	
4	1	6	1.01	1	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 dokumen	320,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	398,750,000	Biro Perekonomian
4	1	6	1.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 dokumen	320,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	398,750,000	Biro Perekonomian
4	1	6	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	1 Dokumen	960,000,000		1 Dokumen	1,196,250,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
4	1	6	1.02	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	3 dokumen	320,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 dokumen	398,750,000	Biro Perekonomian
4	1	6	1.02	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 dokumen	320,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	398,750,000	Biro Perekonomian
4	1	6	1.02	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 dokumen	320,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	398,750,000	Biro Perekonomian
4	1	6	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1 Dokumen	960,000,000		1 Dokumen	1,196,250,000	
4	1	6	1.03	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 Dokumen	320,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	398,750,000	Biro Perekonomian
4	1	6	1.03	2	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	320,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	398,750,000	Biro Perekonomian
4	1	6	1.03	4	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	320,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	398,750,000	Biro Perekonomian
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4	1				SEKRETARIAT DAERAH			7,411,495,000			8,479,362,000	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan	84 %	2,629,907,464		84 %	2,869,362,000	
4	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Biro Administrasi Pembangunan	1 Dokumen	195,000,000		1 Dokumen	213,000,000	
4	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	195,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	213,000,000	Biro Administrasi Pembangunan
4	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Biro Administrasi Pembangunan	100 %	84,200,000		100 %	135,000,000	
4	1	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	33 Paket	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33 Paket	15,000,000	Biro Administrasi Pembangunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
4	1	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	14,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 orang	100,000,000	Biro Administrasi Pembangunan
4	1	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	54,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	20,000,000	Biro Administrasi Pembangunan
4	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Administrasi Umum	100 %	816,231,180		100 %	865,000,000	
4	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	6,781,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Paket	15,000,000	Biro Administrasi Pembangunan
4	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	809,449,380	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Laporan	850,000,000	Biro Administrasi Pembangunan
4	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang	85 %	175,351,900		85 %	200,000,000	
4	1	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	175,351,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Unit	200,000,000	Biro Administrasi Pembangunan
4	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1,181,332,384		12 Laporan	1,115,800,000	
4	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	15,000,000	Biro Administrasi Pembangunan
4	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	47,344,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	40,000,000	Biro Administrasi Pembangunan
4	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,131,988,184	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	1,060,800,000	Biro Administrasi Pembangunan
4	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	85 %	177,792,000		85 %	340,562,000	
4	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	17,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	40,562,000	Biro Administrasi Pembangunan
4	1	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	121,482,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	250,000,000	Biro Administrasi Pembangunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
4	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	39,310,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Unit	50,000,000	Biro Administrasi Pembangunan
4	1	8			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang infrastruktur fisik, administrasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan	100 %	4,781,587,536		100 %	5,610,000,000	
						Persentase pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan	80 %			80 %		
4	1	8	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	3,488,787,536		3 Dokumen	4,110,000,000	
4	1	8	1.01	1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	12 Laporan	528,234,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	610,000,000	Biro Administrasi Pembangunan
4	1	8	1.01	2	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	12 Laporan	456,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	500,000,000	Biro Administrasi Pembangunan
4	1	8	1.01	3	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I, Wilayah II dan Wilyah III	6 Laporan	2,504,053,536	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	3,000,000,000	Biro Administrasi Pembangunan
4	1	8	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	1,292,800,000		3 Dokumen	1,500,000,000	
4	1	8	1.02	1	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen	346,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	500,000,000	Biro Administrasi Pembangunan
4	1	8	1.02	2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	634,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	600,000,000	Biro Administrasi Pembangunan
4	1	8	1.02	3	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	312,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	400,000,000	Biro Administrasi Pembangunan
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4	1				SEKRETARIAT DAERAH			7,563,981,000			7,557,107,708	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Pengadaan Barang & Jasa	84 %	2,362,838,100		84 %	3,302,107,708	
4	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya laporan keuangan yang akuntabel	90 %	134,278,000		90 %	134,278,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
4	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	134,278,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	134,278,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas pegawai	80 %	217,600,000		80 %	514,680,000	
4	1	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	56,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	31,500,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	1	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	85,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 orang	420,000,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	1	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 orang	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 orang	63,180,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningatnya pelayanan Administarsi Umum	90 %	565,061,500		90 %	566,460,500	
4	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	140,890,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	176,988,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	55,799,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	16,902,500	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	368,372,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Laporan	372,570,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	meningkatnya pelayanan kantor	85 %	243,300,000		85 %	851,251,651	
4	1	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	68 Unit	243,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68 Unit	851,251,651	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningatnya pelayanan Administarsi Umum	85 %	1,141,399,600		85 %	1,131,521,557	
4	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	5,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	5,250,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	82,767,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	77,013,800	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
4	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	1,053,382,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	1,049,257,757	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	85 %	61,199,000		85 %	103,916,000	
4	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	14,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	38,000,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	1	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	13,499,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	32,216,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	33,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22 Unit	33,700,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	1	7			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	PKP-PB Pro Aktif Level	5,201,142,900		PKP-PB Pro Aktif Level	4,255,000,000	
4	1	7	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa	90 %	1,462,430,000		90 %	1,347,256,600	
4	1	7	1.01	1	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	356,640,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	354,634,600	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	1	7	1.01	2	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	725,990,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	607,830,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	1	7	1.01	3	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	379,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	384,792,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	1	7	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase layanan Pengadaan secera elektronik	95 %	1,604,340,400		95 %	1,388,528,400	
4	1	7	1.02	1	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	2 Laporan	808,640,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	700,040,400	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	1	7	1.02	2	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	312,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	330,300,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	1	7	1.02	3	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Laporan	483,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	3 Laporan	358,188,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Semua Kelurahan			
4	1	7	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	87.5 %	2,134,372,500		87.5 %	1,519,215,000	
4	1	7	1.03	1	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	200 orang	776,140,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 orang	421,440,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	1	7	1.03	2	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	677,215,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	629,815,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	1	7	1.03	3	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	681,017,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	467,960,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4	2				SEKRETARIAT DPRD			200,000,000,000			223,831,219,743	
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Sekretariat DPRD	81 00	117,838,471,000		81 00	129,622,317,868	
4	2	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1,306,492,400		100 %	1,437,141,640	
4	2	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	263,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Dokumen	290,290,000	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
4	2	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	21,219,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	23,341,560	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	47,720,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	52,492,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	20,994,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	23,093,400	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	33,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	36,960,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	449,059,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	493,964,900	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	469,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	516,999,780	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	13,854,483,362		100 %	15,239,931,464	
4	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	980 Orang/ Bulan	12,307,643,762	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	980 Orang/ Bulan	13,538,407,904	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	948,640,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	1,043,504,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	260,395,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	286,435,380	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	337,803,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	371,584,180	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara	100 %	689,100,000		100 %	758,010,000	
4	2	1	1.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	64 Dokumen	689,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64 Dokumen	758,010,000	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
4	2	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	845,280,000		100 %	929,808,000	
4	2	1	1.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	290 Unit	65,385,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	290 Unit	71,923,500	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	9,745,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	10,719,500	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	127,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	139,920,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41 orang	510,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41 orang	561,495,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	132,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	145,750,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1,559,215,500		100 %	1,715,137,050	
4	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	250 Paket	199,993,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250 Paket	219,992,300	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14,835,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	16,318,500	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	20,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	22,660,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	712 Paket	717,565,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	712 Paket	789,321,500	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Paket	275,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	11,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	346,222,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	380,844,750	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
4	2	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	6,884,455,740		100 %	7,572,901,314	
4	2	1	1.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	1,549,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Unit	1,704,725,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	183,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	201,685,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	5,135,314,740	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	5,648,846,214	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10,170,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	11,187,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5,871,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	6,458,100	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	16,336,824,016		100 %	17,970,506,419	
4	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24000 Laporan	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24000 Laporan	11,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4,571,859,744	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	5,029,045,719	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	55,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	11,704,964,272	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	12,875,460,700	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Pemerintah Daerah yang dipelihara	100 %	8,065,723,964		100 %	8,872,296,361	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
4	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	45 Unit	318,080,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Unit	349,888,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	152 Unit	1,848,917,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	152 Unit	2,033,809,580	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	9,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	10,725,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	276 Unit	2,322,735,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	276 Unit	2,555,008,720	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	1,470,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	3,030,713,400	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1,293,294,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	9,900,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	2,200,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	800,046,964	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	880,051,661	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	52,640,525,018		100 %	57,904,577,520	
4	2	1	1.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	770 Orang/ Bulan	51,650,525,018	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	770 Orang/ Bulan	56,815,577,520	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	55 Paket	440,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 Paket	484,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55 Orang	550,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 Orang	605,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	100 %	15,656,371,000		100 %	17,222,008,100	
4	2	1	1.16	1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	12 Dokumen	837,795,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	921,574,500	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
4	2	1	1.16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	197,482,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	217,230,200	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	9,571,170,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	10,528,287,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.16	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	48 Paket	5,049,924,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48 Paket	5,554,916,400	Sekretariat DPRD
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD	82 00	82,161,529,000		82 00	94,208,901,875	
4	2	2	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang di Fasilitasi	100 %	19,753,915,000		100 %	21,729,306,500	
4	2	2	1.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dokumen	18,008,420,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	19,809,262,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.01	2	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	1 Dokumen	225,650,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	248,215,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	656,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	721,864,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.01	4	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	591,705,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	650,875,500	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.01	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	271,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	299,090,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Kebijakan Anggaran yang dibahas	100 %	723,490,000		100 %	794,667,500	
4	2	2	1.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	158,345,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	176,550,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	158,345,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	175,862,500	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.02	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	165,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	179,547,500	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
4	2	2	1.02	4	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	165,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	179,547,500	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.02	5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	75,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	83,160,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	1,828,516,000		100 %	5,411,379,600	
4	2	2	1.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	5 Laporan	278,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	305,910,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	5 Laporan	278,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	305,910,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	6 Laporan	317,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	348,810,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	6 Laporan	278,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	3,438,567,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.03	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	5 Laporan	174,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	192,170,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	67,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	323,730,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	6 Dokumen	68,016,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	74,817,600	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	367,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	421,465,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	16,736,175,000		100 %	18,390,281,250	
4	2	2	1.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	110 Dokumen	1,386,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110 Dokumen	2,423,025,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	300 Dokumen	7,697,205,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	300 Dokumen	7,511,996,250	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Semua Kelurahan			
4	2	2	1.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	16 Orang	1,040,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Orang	1,144,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	520,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Orang	572,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.04	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	6 Dokumen	5,866,570,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	6,453,227,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	226,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	286,033,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang dilakukan oleh Anggota DPRD	100 %	28,862,052,000		100 %	31,748,257,200	
4	2	2	1.05	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	11,524,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	12,677,280,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 Dokumen	76,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	84,480,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	165 Dokumen	17,260,452,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	165 Dokumen	18,986,497,200	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100 %	244,190,000		100 %	309,417,075	
4	2	2	1.06	1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	196,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	239,522,250	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.06	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	47,690,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	69,894,825	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang dibahas	100 %	616,848,000		100 %	1,099,282,800	
4	2	2	1.07	1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi. Verifikasi. dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	10 Dokumen	264,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	711,150,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.07	2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	9 Dokumen	352,848,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Dokumen	388,132,800	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
4	2	2	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi	100 %	13,396,343,000		100 %	14,726,309,950	
4	2	2	1.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	13,122,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	14,434,200,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.08	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Laporan	54,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	49,732,650	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	24 Dokumen	220,343,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Dokumen	242,377,300	Sekretariat DPRD
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5	1				PERENCANAAN			54,381,973,000			47,671,053,753	
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BAPPEDA	90 %	31,338,747,940		90 %	28,820,995,219	
5	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran Bappeda yang tepat waktu, tepat proses	95 %	606,750,000		95 %	391,584,500	
5	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	87,810,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Dokumen	37,506,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	31,101,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	70,315,500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	36,358,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	73,740,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	132,027,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	185,471,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	319,454,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	24,552,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov. Kaltim	96 %	18,259,201,608		96 %	18,259,161,030	
5	1	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/Bulan	17,321,401,608	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Orang/Bulan	17,420,961,030	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	933,121,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	833,521,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	4,679,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Laporan	4,679,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	50 %	667,040,000		50 %	150,000,000	
5	1	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	277,040,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	390,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi baik	95 %	3,080,108,000		95 %	2,613,210,500	
5	1	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	267,843,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Paket	120,136,500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	302,648,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Paket	748,375,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	383,156,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	347,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	185,953,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Paket	159,227,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	59,520,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	59,520,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	24,912,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	24,912,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,485,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	940,200,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	370,476,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	213,340,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana	12 Bulan	546,797,100		12 Bulan	500,000,000	
5	1	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	546,797,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	500,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	95 %	6,082,224,232		95 %	5,874,014,189	
5	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	10,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1,465,312,560	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1,417,598,664	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4,601,911,672	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	4,446,415,525	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang digunakan dan berfungsi baik	90 %	2,096,627,000		90 %	1,033,025,000	
5	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	79,998,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	64,130,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	908,276,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47 Unit	338,750,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	19,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Unit	19,200,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	53,865,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	53,865,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	1	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	704,318,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	226,280,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	330,970,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Unit	330,800,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan	80 %	12,593,225,060		80 %	10,190,058,534	
5	1	2	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	95 %	4,758,439,000		95 %	2,864,116,034	
5	1	2	1.01	1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJPD/RPJMD	1 Dokumen	408,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	207,116,034	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	1.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3 Berita Acara	591,431,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Berita Acara	227,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	1.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara	662,181,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Berita Acara	362,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	1.01	6	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5 Dokumen	3,096,227,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	2,068,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan	98 %	1,699,999,900		98 %	1,434,192,500	
5	1	2	1.02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis data pembangunan	2 Dokumen	670,098,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	610,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	1.02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	92 Orang	578,618,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 Orang	479,818,500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	1.02	3	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	30 Orang	276,818,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	114,666,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	1.02	4	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen profil pembangunan daerah	3 Dokumen	174,465,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	229,708,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti dalam penyusunan dokumen perencanaan	90 %	6,134,786,160		90 %	5,891,750,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	1	2	1.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	4,407,195,160	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	4,442,505,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	1.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	806,985,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	900,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	1.03	4	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang difasilitasi/dievaluasi	4 Dokumen	920,606,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	549,245,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase program/kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	95 %	10,450,000,000		95 %	8,660,000,000	
5	1	3	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase program/kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	100 %	2,950,000,000		100 %	3,760,000,000	
5	1	3	1.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	670,809,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	577,762,005	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	1.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	10 Perangkat Daerah	259,457,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Perangkat Daerah	382,237,995	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	1.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	169,734,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	1.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	925,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	1,400,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	1.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	925,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1,400,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA Dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA, & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	97 %	4,600,000,000		97 %	2,400,000,000	
5	1	3	1.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir	2 Dokumen	638,974,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	2 Dokumen	445,910,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
					Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)			Semua Kelurahan			
5	1	3	1.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	9 Perangkat Daerah	182,146,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Perangkat Daerah	296,322,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	1.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	928,880,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	807,768,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	1.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	327,330,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	298,175,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	1.02	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3 Perangkat Daerah	176,970,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Perangkat Daerah	102,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	1.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Dokumen	2,345,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	449,825,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Program/kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD,RKPD,RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	97 %	2,900,000,000		97 %	2,500,000,000	
5	1	3	1.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	934,709,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	800,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	1.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah	1,032,891,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Perangkat Daerah	900,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	1.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	932,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	800,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5	2				KEUANGAN			231,703,892,702			212,049,244,525	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	218,164,592,702		100 Persen	200,549,244,525	
						Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan keuangan	90 Persen			90 Persen		
5	2	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, Radalok, Tepra, LKJiP, Evaluasi Renja dan Renstra	25 Dokumen	726,375,000		25 Dokumen	726,405,000	
5	2	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	200,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	3 Dokumen	200,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	58,625,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1 Dokumen	58,625,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	58,325,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1 Dokumen	58,325,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9,225,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1 Dokumen	9,255,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6,725,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1 Dokumen	6,725,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	286,350,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	17 Laporan	286,350,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	107,125,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	3 Laporan	107,125,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen laporan akhir tahun, daftar gaji dan tunjangan	13 Dokumen/ Laporan	161,214,817,507		13 Dokumen/ Laporan	161,195,892,507	
5	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	387 Orang / Bulan	161,008,617,507	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	387 Orang / Bulan	161,008,617,507	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan	206,200,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	15 Laporan	187,275,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen administrsi barang milik daerah	12 Dokumen	600,600,000		12 Dokumen	225,000,000	
5	2	1	1.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik	10 Laporan	320,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air	10 Laporan	110,000,000	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
						Daerah SKPD			Putih			
5	2	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	280,600,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	10 Laporan	115,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan pengelolaan Retribusi Daerah	10 Dokumen/ Laporan	2,066,220,000		10 Dokumen/ Laporan	2,351,592,800	
5	2	1	1.04	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	456,390,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	2 Dokumen	358,142,800	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.04	2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	300,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1 Dokumen	506,975,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.04	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	4 Laporan	400,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	4 Laporan	350,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.04	5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	410,375,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1 Laporan	416,875,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.04	6	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	3 Dokumen	310,357,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	3 Dokumen	534,836,500	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	189,098,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	4 Laporan	184,763,500	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Monev, laporan bimtek dan pakaian dinas diadakan	1000 Dokumen/ Stel	2,272,500,000		1000 Dokumen/ Stel	1,162,600,000	
5	2	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	700,400,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	3 Paket	504,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 Dokumen	1,121,100,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	10 Dokumen	150,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	451,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	60 Orang	508,600,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan fasilitas pelayanan kantor	291 Buah	7,103,318,625		291 Buah	3,708,212,242	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	75,787,920	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1 Paket	50,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Paket	1,080,562,500	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	6 Paket	472,690,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	2,421,960,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	2 Paket	1,665,122,242	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	240 Dokumen	19,200,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	240 Dokumen	20,400,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63 Laporan	3,505,808,205	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63 Laporan	1,500,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kendaraan dinas operasional, mebelair, peralatan gedung, gedung kantor dan sarana prasarana gedung diadakan	103 Unit	33,121,000,890		103 Unit	22,125,000,000	
5	2	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	6 Unit	2,052,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	6 Unit	1,325,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	692,898,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	4 Paket	800,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	64 Unit	3,575,695,800	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	64 Unit	2,500,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2 Unit	24,206,969,650	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	15,000,000,000	Badan Pendapatan Daerah
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
5	2	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2 Unit	2,593,437,440	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	2 Unit	2,500,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	9,316,167,680		6 Jenis Jasa	7,664,541,976	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	12 Laporan	10,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1,715,856,120	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	12 Laporan	1,548,800,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	7,590,311,560	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	5 Laporan	6,105,741,976	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	359 Unit	1,743,593,000		359 Unit	1,390,000,000	
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	378,795,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	25 Unit	190,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	236 Unit	764,880,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	236 Unit	600,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	599,918,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	4 Unit	600,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim	777 Wajib Pajak	1,292,370,000		777 Wajib Pajak	1,750,000,000	
						Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100 Persen			100 Persen		
5	2	2	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan penerimaan lain-lain	4 Dokumen	554,520,000		4 Dokumen	750,000,000	
5	2	2	1.03	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	554,520,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	4 Dokumen	750,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	2	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan Dana Bagi Hasil	3.525 Triliun Rupiah	737,850,000		3.525 Triliun Rupiah	1,000,000,000	
						Jumlah dokumen pengelolaan dana transfer	4 Dokumen			4 Dokumen		
5	2	2	1.05	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4 Laporan	737,850,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	4 Laporan	1,000,000,000	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	12,246,930,000		100 Persen	9,750,000,000	
5	2	4	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	30 Dokumen/ Laporan	12,246,930,000		30 Dokumen/ Laporan	9,750,000,000	
5	2	4	1.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	260,200,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	2 Dokumen	400,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	1.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	1 Dokumen	700,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1 Dokumen	1,000,000,000	Badan Pendapatan Daerah
						Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan			1 Laporan		
5	2	4	1.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	9 Laporan	636,820,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	9 Laporan	250,000,000	Badan Pendapatan Daerah
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	9 Laporan			9 Laporan		
5	2	4	1.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	1,326,510,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	3 Laporan	1,000,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	1.01	7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen	1,200,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	12 Dokumen	1,000,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	1.01	8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	2 Laporan	6,123,400,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	2 Laporan	4,000,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	1.01	9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	4 Dokumen	400,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	4 Dokumen	400,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	1.01	11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	5 Dokumen	400,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	5 Dokumen	400,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	1 Dokumen LHP	800,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1 Dokumen LHP	800,000,000	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	9 Laporan			9 Laporan		
5	2	4	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	9 Laporan	400,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	9 Laporan	500,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5	2				KEUANGAN			6,731,478,412			5,945,600,000	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	6,155,726,412		100 Persen	5,445,600,000	
						Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen			90 Persen		
5	2	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen RKA	2 Dokumen	60,000,000		2 Dokumen	23,500,000	
5	2	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	30,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	1 Dokumen	11,750,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	2	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	30,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	1 Dokumen	11,750,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	2	1	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan pengelolaan Retribusi Daerah	17 Dokumen/ Laporan	45,624,000		17 Dokumen/ Laporan	60,000,000	
5	2	1	1.04	5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	18,144,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	4 Laporan	30,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	2	1	1.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	27,480,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	12 Laporan	30,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	2	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan mengikuti bimtek	2 Laporan	26,400,000		2 Laporan	50,000,000	
5	2	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	26,400,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	2 Orang	50,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan fasilitas pelayanan umum kantor	5 Fasilitas	513,383,300		5 Fasilitas	310,600,000	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	6,919,200	Kota Samarinda, Samarinda Utara,	1 Paket	7,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
						Disediakan			Sempaja Selatan			Samarinda
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	215,576,100	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	2 Paket	150,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	1 Paket	50,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1,920,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	12 Dokumen	3,600,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	238,968,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	10 Laporan	100,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	2	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mebelair dan peralatan diadakan	8 Paket/Unit	204,910,000		8 Paket/Unit	300,000,000	
5	2	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	130,100,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	1 Paket	100,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	2	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	74,810,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	7 Unit	200,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	4,997,485,112		6 Jenis Jasa	4,301,500,000	
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,500,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	12 Laporan	1,500,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1,006,601,160	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	12 Laporan	900,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	3,988,383,952	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	5 Laporan	3,400,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	50 Unit	307,924,000		50 Unit	400,000,000	
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	112,392,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	10 Unit	100,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	45,500,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	50 Unit	100,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	150,032,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	2 Unit	200,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	575,752,000		100 Persen	500,000,000	
5	2	4	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28 Dokumen/ Laporan	575,752,000		28 Dokumen/ Laporan	500,000,000	
5	2	4	1.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	106,912,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	12 Laporan	200,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	2	4	1.01	8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	258,840,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	4 Laporan	100,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	210,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	12 Dokumen	200,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5	2				KEUANGAN			6,136,446,024			4,985,600,000	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	5,656,296,024		100 Persen	4,485,600,000	
						Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen			90 Persen		
5	2	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen RKA	2 Dokumen	21,000,000		2 Dokumen	23,500,000	
5	2	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12,600,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	1 Dokumen	11,750,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	2	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8,400,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	1 Dokumen	11,750,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
5	2	1	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan pengelolaan Retribusi Daerah	17 Dokumen	69,600,000		17 Dokumen	100,000,000	
5	2	1	1.04	4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	25,800,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	1 Dokumen	40,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
5	2	1	1.04	5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	17,400,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	4 Laporan	30,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
5	2	1	1.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 l	26,400,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	12 l	30,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
5	2	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan mengikuti bimtek	2 Laporan	34,800,000		2 Laporan	50,000,000	
5	2	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	34,800,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	2 Orang	50,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan fasilitas pelayanan umum kantor	5 Fasilitas	701,066,900		5 Fasilitas	310,600,000	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,390,500	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	1 Paket	7,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	465,984,900	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	6 Paket	150,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24,755,500	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	1 Paket	50,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3,840,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	12 Dokumen	3,600,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	201,096,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	14 Laporan	100,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
5	2	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mebelair dan peralatan diadakan	7 Paket/Unit	129,668,000		7 Paket/Unit	300,000,000	
5	2	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	66,218,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	1 Paket	100,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
5	2	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	63,450,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	6 Unit	200,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	3,917,748,854		6 Jenis Jasa	3,301,500,000	
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	18,050,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	12 Laporan	1,500,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1,007,364,770	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	12 Laporan	900,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	2,892,334,084	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	5 Laporan	2,400,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	125 Unit	782,412,270		125 Unit	400,000,000	
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	283,660,500	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	16 Unit	100,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	83 Unit	87,204,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	83 Unit	100,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	411,547,770	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	3 Unit	200,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	480,150,000		100 Persen	500,000,000	
5	2	4	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28 Dokumen/ Laporan	480,150,000		28 Dokumen/ Laporan	500,000,000	
5	2	4	1.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	111,850,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	12 Laporan	200,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
5	2	4	1.01	8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	57,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	4 Laporan	100,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	311,300,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	12 Dokumen SSPD	200,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5	2				KEUANGAN			3,660,699,588			2,900,000,000	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	3,433,409,588		100 Persen	2,475,000,000	
						Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen			90 Persen		
5	2	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen RKA	2 Dokumen	41,500,000		2 Dokumen	41,500,000	
5	2	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20,750,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	1 Dokumen	20,750,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	2	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20,750,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	1 Dokumen	20,750,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	2	1	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan pengelolaan Retribusi Daerah	17 Dokumen/ Laporan	167,960,000		17 Dokumen/ Laporan	100,000,000	
5	2	1	1.04	4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	56,200,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	1 Dokumen	40,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	2	1	1.04	5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	42,160,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	4 Laporan	30,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	2	1	1.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	69,600,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	12 Laporan	30,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	2	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan mengikuti bimtek	2 Laporan	43,800,000		2 Laporan	40,000,000	
5	2	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	43,800,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	2 Orang	40,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan fasilitas pelayanan umum kantor	5 Fasilitas	456,216,500		5 Fasilitas	338,600,000	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	23,408,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	1 Paket	5,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	159,524,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	3 Paket	100,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	41,600,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	2 Paket	30,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10,080,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	12 Dokumen	3,600,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 Laporan	221,604,500	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	23 Laporan	200,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	2	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mebelair dan peralatan diadakan	26 Paket/Unit	262,382,000		26 Paket/Unit	228,400,000	
5	2	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	76,070,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	1 Paket	50,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	2	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit	186,312,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	28 Unit	178,400,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	1,904,065,088		6 Jenis Jasa	1,501,500,000	
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,000,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	12 Laporan	1,500,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	874,552,800	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	12 Laporan	550,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1,024,512,288	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	5 Laporan	950,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	71 Paket/Unit	557,486,000		71 Paket/Unit	225,000,000	
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	280,096,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	13 Unit	75,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	126,140,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	60 Unit	50,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	151,250,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	1 Unit	100,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	227,290,000		100 Persen	425,000,000	
5	2	4	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28 Dokumen/ Laporan	227,290,000		28 Dokumen/ Laporan	425,000,000	
5	2	4	1.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	81,150,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	12 Laporan	175,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	2	4	1.01	8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	73,800,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	4 Laporan	75,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	72,340,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	12 Dokumen SSPD	175,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5	2				KEUANGAN			3,747,368,222			3,447,600,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	3,322,580,222		100 Persen	3,022,600,000	
						Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen			90 Persen		
5	2	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen RKA	2 Dokumen	30,400,000		2 Dokumen	41,500,000	
5	2	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	13,100,000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	1 Dokumen	20,750,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
5	2	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	17,300,000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	1 Dokumen	20,750,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
5	2	1	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan pengelolaan Retribusi Daerah	17 Dokumen/ Laporan	81,600,000		17 Dokumen/ Laporan	100,000,000	
5	2	1	1.04	4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	37,800,000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	1 Dokumen	40,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
5	2	1	1.04	5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	18,000,000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	4 Laporan	30,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
5	2	1	1.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	25,800,000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	12 Laporan	30,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
5	2	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan mengikuti bimtek	2 Laporan	42,000,000		2 Laporan	45,000,000	
5	2	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	42,000,000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	2 Orang	45,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan fasilitas pelayanan umum kantor	5 Fasilitas	432,134,000		5 Fasilitas	399,600,000	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,000,000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	1 Paket	6,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	150,860,000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	2 Paket	150,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19,932,500	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	1 Paket	40,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3,840,000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	12 Dokumen	3,600,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19 Laporan	251,501,500	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	19 Laporan	200,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
5	2	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mebelair dan peralatan diadakan	16 Paket/Unit	247,149,000		16 Paket/Unit	250,000,000	
5	2	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	74,699,000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	1 Paket	75,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
5	2	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	172,450,000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	15 Unit	175,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	2,035,049,522		6 Jenis Jasa	1,861,500,000	
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,000,000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	12 Laporan	1,500,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	575,951,602	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	12 Laporan	460,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1,454,097,920	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	5 Laporan	1,400,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	55 Paket/Unit	454,247,700		55 Paket/Unit	325,000,000	
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	229,999,700	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	15 Unit	100,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	74,450,000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	29 Unit	75,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	149,798,000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	1 Unit	150,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	424,788,000		100 Persen	425,000,000	
5	2	4	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28 Dokumen/ Laporan	424,788,000		28 Dokumen/ Laporan	425,000,000	
5	2	4	1.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	174,880,000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	12 Laporan	175,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
5	2	4	1.01	8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	74,920,000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	4 Laporan	75,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	174,988,000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	12 Dokumen SSPD	175,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5	2				KEUANGAN			5,640,399,528			4,485,000,000	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	5,214,709,528		100 Persen	3,985,000,000	
						Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen			90 Persen		
5	2	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen RKA	2 Dokumen	18,851,500		2 Dokumen	31,500,000	
5	2	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10,451,500	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	1 Dokumen	15,750,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
5	2	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8,400,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	1 Dokumen	15,750,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
5	2	1	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan pengelolaan Retribusi Daerah	17 Dokumen/ Laporan	97,200,000		17 Dokumen/ Laporan	100,000,000	
5	2	1	1.04	4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	58,200,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	1 Dokumen	40,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
5	2	1	1.04	5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	22,200,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	4 Laporan	30,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
5	2	1	1.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	16,800,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	12 Laporan	30,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	2	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan mengikuti bimtek	2 Laporan	24,090,000		2 Laporan	45,000,000	
5	2	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	24,090,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	3 Orang	45,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan fasilitas pelayanan umum kantor	5 Fasilitas	617,776,000		5 Fasilitas	357,000,000	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,401,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	1 Paket	7,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	173,170,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	2 Paket	150,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	29,885,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	1 Paket	50,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	409,320,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	25 Laporan	150,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
5	2	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mebelair dan peralatan diadakan	46 Paket/Unit	320,824,276		46 Paket/Unit	200,000,000	
5	2	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	46 Unit	320,824,276	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	46 Unit	200,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	3,192,722,752		6 Jenis Jasa	2,851,500,000	
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1,500,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	12 Laporan	1,500,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1,149,790,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	12 Laporan	1,000,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	2,041,432,752	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	5 Laporan	1,850,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	107 Paket/Unit	943,245,000		107 Paket/Unit	400,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	413,085,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	8 Unit	100,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98 Unit	130,860,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	98 Unit	100,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	399,300,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	2 Unit	200,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	425,690,000		100 Persen	500,000,000	
5	2	4	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28 Dokumen/ Laporan	425,690,000		28 Dokumen/ Laporan	500,000,000	
5	2	4	1.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	77,370,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	12 Laporan	200,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
5	2	4	1.01	8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	84,160,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	4 Laporan	100,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	264,160,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	12 Dokumen SSPD	200,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5	2				KEUANGAN			3,433,199,864			2,616,600,000	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	3,078,859,864		100 Persen	2,191,600,000	
						Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen			90 Persen		
5	2	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen RKA	2 Dokumen	26,400,000		2 Dokumen	31,500,000	
5	2	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	13,200,000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	1 Dokumen	15,750,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
5	2	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	13,200,000	Kota Bontang, Bontang Utara,	1 Dokumen	15,750,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
						Perubahan RKA-SKPD			Gunung Elai			Bontang
5	2	1	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan pengelolaan Retribusi Daerah	17 Dokumen/ Laporan	25,200,000		17 Dokumen/ Laporan	100,000,000	
5	2	1	1.04	4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	8,400,000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	1 Dokumen	40,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
5	2	1	1.04	5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	8,400,000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	4 Laporan	30,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
5	2	1	1.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	8,400,000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	12 Laporan	30,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
5	2	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan mengikuti bimtek	2 Laporan	44,400,000		2 Laporan	45,000,000	
5	2	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	44,400,000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	2 Orang	45,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan fasilitas pelayanan umum kantor	5 Fasilitas	781,000,000		5 Fasilitas	288,600,000	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,250,000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	1 Paket	5,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	284,692,000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	3 Paket	100,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	53,930,000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	1 Paket	30,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3,840,000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	12 Dokumen	3,600,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19 Laporan	432,288,000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	19 Laporan	150,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
5	2	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mebelair dan peralatan diadakan	18 Paket/Unit	170,641,000		18 Paket/Unit	150,000,000	
5	2	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	170,641,000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	18 Unit	150,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	1,556,740,164		6 Jenis Jasa	1,351,500,000	
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,000,000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	12 Laporan	1,500,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	315,567,300	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	12 Laporan	250,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1,238,172,864	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	5 Laporan	1,100,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	55 Paket/Unit	474,478,700		55 Paket/Unit	225,000,000	
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	183,078,700	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	10 Unit	75,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	36,500,000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	48 Unit	50,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	254,900,000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	2 Unit	100,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	354,340,000		100 Persen	425,000,000	
5	2	4	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28 Dokumen/ Laporan	354,340,000		28 Dokumen/ Laporan	425,000,000	
5	2	4	1.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	60,940,000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	12 Laporan	175,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
5	2	4	1.01	8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	129,600,000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	4 Laporan	75,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	163,800,000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	12 Dokumen SSPD	175,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	2				KEUANGAN			3,458,209,449			2,616,600,000	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	2,936,889,449		100 Persen	2,266,600,000	
						Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen			90 Persen		
5	2	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen RKA	2 Dokumen	25,200,000		2 Dokumen	31,500,000	
5	2	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	16,800,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	1 Dokumen	15,750,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	2	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8,400,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	1 Dokumen	15,750,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	2	1	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan pengelolaan Retribusi Daerah	17 Dokumen/ Laporan	25,200,000		17 Dokumen/ Laporan	60,000,000	
5	2	1	1.04	5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	12,600,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	4 Laporan	30,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	2	1	1.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12,600,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	12 Laporan	30,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	2	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan mengikuti bimtek	2 Laporan	54,000,000		2 Laporan	45,000,000	
5	2	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	54,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	2 Orang	45,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan fasilitas pelayanan umum kantor	5 Fasilitas	804,660,469		5 Fasilitas	288,600,000	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,131,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	1 Paket	5,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	378,961,469	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	6 Paket	100,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	61,562,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	1 Paket	30,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3,840,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam,	12 Dokumen	3,600,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Nenang			Penajam Paser Utara
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	356,166,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	20 Laporan	150,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	2	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mebelair dan peralatan diadakan	10 Paket/Unit	60,116,000		10 Paket/Unit	200,000,000	
5	2	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	4,520,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	1 Paket	50,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	2	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	55,596,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	8 Unit	150,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	1,519,048,980		6 Jenis Jasa	1,441,500,000	
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	12 Laporan	1,500,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	390,512,820	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	12 Laporan	390,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1,114,536,160	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	5 Laporan	1,050,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	62 Paket/Unit	448,664,000		62 Paket/Unit	200,000,000	
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	102,925,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	11 Unit	50,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	145,289,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	51 Unit	50,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200,450,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	1 Unit	100,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	521,320,000		100 Persen	350,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	2	4	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28 Dokumen/ Laporan	521,320,000		28 Dokumen/ Laporan	350,000,000	
5	2	4	1.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	185,600,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	12 Laporan	150,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	2	4	1.01	8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	153,360,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	4 Laporan	50,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	182,360,000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	12 Dokumen SSPD	150,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5	2				KEUANGAN			3,522,599,772			2,792,600,000	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	3,093,129,772		100 Persen	2,367,600,000	
						Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen			90 Persen		
5	2	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen RKA	2 Dokumen	20,800,000		2 Dokumen	41,500,000	
5	2	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10,400,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	1 Dokumen	20,750,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
5	2	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10,400,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	1 Dokumen	20,750,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
5	2	1	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan pengelolaan Retribusi Daerah	17 Dokumen/ Laporan	16,800,000		17 Dokumen/ Laporan	60,000,000	
5	2	1	1.04	5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	8,400,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	4 Laporan	30,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
5	2	1	1.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	8,400,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	12 Laporan	30,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
5	2	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan mengikuti bimtek	2 Laporan	41,400,000		2 Laporan	45,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	2	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	41,400,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	2 Orang	45,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan fasilitas pelayanan umum kantor	5 Fasilitas	987,401,500		5 Fasilitas	374,600,000	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16,201,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	1 Paket	6,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	238,328,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	4 Paket	125,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	381,226,500	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	1 Paket	40,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2,080,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	12 Dokumen	3,600,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	349,566,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	25 Laporan	200,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
5	2	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mebelair dan peralatan diadakan	10 Paket/Unit	20,600,000		10 Paket/Unit	75,000,000	
5	2	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	20,600,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	1 Paket	75,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	1,585,109,072		6 Jenis Jasa	1,471,500,000	
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	12 Laporan	1,500,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	605,586,100	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	12 Laporan	620,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	974,522,972	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	5 Laporan	850,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	73 Paket/Unit	421,019,200		73 Paket/Unit	300,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	164,829,200	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	18 Unit	75,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	61,190,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	54 Unit	75,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	195,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	1 Unit	150,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	429,470,000		100 Persen	425,000,000	
5	2	4	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28 Dokumen/ Laporan	429,470,000		28 Dokumen/ Laporan	425,000,000	
5	2	4	1.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	46,600,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	12 Laporan	175,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
5	2	4	1.01	8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	153,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	4 Laporan	75,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	229,870,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	12 Dokumen SSPD	175,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5	2				KEUANGAN			3,541,139,439			3,247,076,571	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	3,116,147,439		100 Persen	2,963,716,571	
						Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen			90 Persen		
5	2	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen RKA	2 Dokumen	41,472,000		2 Dokumen	42,000,000	
5	2	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20,736,000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	1 Dokumen	21,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	2	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20,736,000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	1 Dokumen	21,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
5	2	1	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan pengelolaan Retribusi Daerah	17 Dokumen/ Laporan	99,984,000		17 Dokumen/ Laporan	101,790,000	
5	2	1	1.04	4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	39,990,000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	1 Dokumen	39,990,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
5	2	1	1.04	5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	29,994,000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	4 Laporan	30,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
5	2	1	1.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	30,000,000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	12 Laporan	31,800,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
5	2	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan mengikuti bimtek	2 Laporan	40,000,000		2 Laporan	40,000,000	
5	2	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	40,000,000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	2 Orang	40,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan fasilitas pelayanan kantor	5 Fasilitas	516,658,000		5 Fasilitas	441,388,500	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,000,000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	1 Paket	6,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	125,000,000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	1 Paket	120,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	182,144,000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	1 Paket	35,468,500	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3,520,000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	12 Dokumen	3,600,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	199,994,000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	35 Laporan	276,320,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
5	2	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mebelair dan peralatan diadakan	76 Paket/Unit	466,908,500		76 Paket/Unit	250,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	2	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	70,350,000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	1 Paket	75,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
5	2	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit	396,558,500	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	31 Unit	175,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa	1,443,093,139		6 Jenis Jasa	1,429,062,371	
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	16,000,000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	12 Laporan	4,400,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	327,162,371	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	12 Laporan	324,662,371	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1,099,930,768	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	5 Laporan	1,100,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	52 Unit	508,031,800		52 Unit	659,475,700	
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	177,643,800	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	18 Unit	201,454,800	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 Unit	74,980,000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	96 Unit	73,290,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	255,408,000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	1 Unit	384,730,900	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	424,992,000		100 Persen	283,360,000	
						Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen			90 Persen		
5	2	4	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28 Dokumen/ Laporan	424,992,000		28 Dokumen/ Laporan	283,360,000	
5	2	4	1.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	175,000,000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	12 Laporan	33,360,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
5	2	4	1.01	8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	75,000,000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	4 Laporan	75,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
												Berau
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	174,992,000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	12 Dokumen	175,000,000	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau
						Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD			12 Dokumen SSPD		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5	2				KEUANGAN			4,267,804,583,608			4,226,843,522,366	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Keuangan	90 %	65,935,182,000		90 %	40,938,044,697	
5	2	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1,900,000,000		100 %	1,056,464,271	
5	2	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	575,930,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	422,585,709	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	207,120,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	70,430,951	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	80,860,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	70,430,951	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	220,880,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	70,430,951	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	109,080,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	70,430,951	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	354,210,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	140,861,903	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	351,920,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Laporan	211,292,855	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	25,953,126,113		100 %	14,803,861,401	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 Orang/ Bulan	23,375,186,113	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	124 Orang/ Bulan	12,718,485,442	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	400 Dokumen	1,827,960,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 Dokumen	1,557,143,820	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400 Dokumen	149,636,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 Dokumen	70,430,952	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	105,672,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	105,646,428	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	74,620,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	70,430,952	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	286,104,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	211,292,855	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	81,548,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	35,215,476	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	52,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	35,215,476	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	724,800,000		100 %	422,565,989	
5	2	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	724,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	422,565,989	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	850,006,000		100 %	1,170,858,647	
5	2	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	249,315,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	140,527,356	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	96,912,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	96,912,708	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	140 Orang	331,570,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	140 Orang	688,702,016	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	2	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140 Orang	172,208,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	140 Orang	244,716,567	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	11,219,312,900		100 %	14,825,538,534	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	60,744,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	10,555,780	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8,498,220,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	13,933,224,567	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	439,812,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	17,044,291	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	113,080,415	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	103,836,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	132,410,189	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	312,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	368,494,739	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	1,604,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	250,728,553	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,298,108,000		100 %	640,759,668	
5	2	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1,242,424,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	540,043,407	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	55,684,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Unit	100,716,261	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	14,486,504,607		100 %	3,837,511,562	
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	68,480,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	68,475,437	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9,999,998,775	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	2,426,931,077	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	35,592,304	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	35,179,134	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4,382,433,528	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	1,306,925,914	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	9,503,324,380		100 %	4,180,484,625	
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	98,820,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Unit	58,151,245	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	487,687,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Unit	401,478,962	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	716,818,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Unit	137,340,356	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	8,199,998,680	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	3,583,514,062	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Perda dan PerGub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	80 %	4,196,557,757,608		80 %	4,177,745,006,621	
5	2	2	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	4,273,191,000		100 %	4,561,478,400	
5	2	2	1.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Koordinasi Penyusunan KUA PPAS	12 Bulan	160,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	176,330,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS	12 Bulan	151,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	167,090,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi RKA SKPD	12 Bulan	804,180,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	884,598,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	12 Bulan	568,632,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	12 Bulan	625,495,200	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Semua Kelurahan			Daerah
						Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen			37 Dokumen		
5	2	2	1.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	130,356,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 Dokumen	143,391,600	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
						Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	12 Bulan			12 Bulan		
5	2	2	1.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	12 Bulan	121,956,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	134,151,600	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD dan Perda tentang Penjabaran APBD	12 Bulan	181,460,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	199,606,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang Perubahan APBD dan Perda tentang Penjabaran Perubahan APBD	12 Bulan	173,060,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	190,366,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	12 Bulan	221,760,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	243,936,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12 Bulan	1,671,847,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	1,700,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah dan Pemerintah Provinsi	12 Bulan	87,740,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	96,514,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	665,924,000		100 %	553,793,835	
5	2	2	1.02	2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD KAb/Kota dan Rancangan Perda tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	12 Bulan	132,180,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	145,398,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.02	3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Perda tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota	12 Bulan	132,344,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	145,578,400	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	2	2	1.02	4	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 Laporan	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	96,277,435	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.02	6	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	12 Bulan	151,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	166,540,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	3,299,991,900		100 %	1,361,837,789	
5	2	2	1.03	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	269,520,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	62,114,474	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.03	2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	101,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	43,480,132	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.03	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	460 Dokumen	163,080,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	460 Dokumen	62,114,474	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.03	4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	109,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	62,114,474	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.03	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	16 Dokumen	571,370,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Dokumen	293,468,838	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.03	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen	263,340,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	217,400,658	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.03	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	339,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	186,343,421	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	2	2	1.03	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Dokumen	277,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	155,286,185	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.03	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12000 Dokumen	622,163,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12000 Dokumen	62,114,474	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.03	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	345,658,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	155,286,185	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.03	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Orang	236,860,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	62,114,474	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	3,750,000,000		100 %	1,779,579,676	
5	2	2	1.04	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	77,643,093	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.04	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	84 Dokumen	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Dokumen	248,457,895	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.04	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	125,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	46,585,856	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.04	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	48 Laporan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48 Laporan	93,171,711	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.04	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	106 Dokumen	800,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	106 Dokumen	245,352,171	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.04	6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6 Dokumen	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	124,228,948	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
					APBD							
5	2	2	1.04	8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	576 Dokumen	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	576 Dokumen	46,585,856	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.04	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	62,114,474	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.04	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	62,114,474	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.04	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	480 Orang	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	480 Orang	170,814,803	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.04	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	6 Lembaga	275,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Lembaga	602,510,395	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	4,183,657,765,708		100 %	4,168,486,343,421	
5	2	2	1.05	2	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2 Laporan	200,008,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	186,343,421	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.05	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	10 Laporan	860,600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	860,800,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.05	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	21 Laporan	80,357,757,608	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 Laporan	200,000,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.05	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	16 Laporan	3,242,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Laporan	3,107,500,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.06		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100 %	910,885,000		100 %	1,001,973,500	
5	2	2	1.06	2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	12 Bulan	910,885,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	1,001,973,500	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase jumlah barang milik daerah yang dikelola dengan baik	90 %	5,311,644,000		90 %	8,160,471,048	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	2	3	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5,311,644,000		100 %	8,160,471,048	
5	2	3	1.01	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	455,644,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	652,489,693	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	1.01	2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	108,748,283	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	1.01	3	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	108,748,283	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	1.01	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	149,060,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	163,122,424	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	1.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	108,748,283	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	1.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	434,993,129	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	1.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	1,730,109,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	3,375,546,674	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	1.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 Laporan	314,904,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	163,122,424	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	1.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	217,496,565	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	20 Dokumen	1,221,527,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Dokumen	1,304,979,385	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	1.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	8 Laporan	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Laporan	434,993,129	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	1.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	652,489,693	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	2	3	1.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	190,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	434,993,083	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5	3				KEPEGAWAIAN			33,752,880,000			35,068,032,398	
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	92 Nilai	21,741,216,500		92 Nilai	9,402,549,479	
5	3	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	59 dokumen	340,000,000		59 dokumen	475,000,000	
5	3	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	60,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	3 Dokumen	85,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	280,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	390,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	1 Dokumen	14,562,094,000		1 Dokumen	1,000,000,000	
5	3	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang / bulan	14,562,094,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Orang / bulan	1,000,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur	100 %	98,943,500		100 %	447,966,933	
5	3	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	86 Stel	83,943,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Stel	384,500,266	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 Orang	15,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Orang	63,466,667	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	3,184,487,000		100 %	1,796,184,459	
5	3	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 paket	2,054,837,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 paket	299,500,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	29,650,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 paket	100,000,000	Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	3	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	1,100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	1,396,684,459	Badan Kepegawaian Daerah
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDan (untuk rapat, kegiatan/pelatihan dan tamu)	2 Laporan			2 Laporan		
5	3	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan administrasi yang diselesaikan tepat waktu	2 Laporan	2,274,810,000		2 Laporan	3,142,398,087	
5	3	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	21,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	20,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	600,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	100,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,653,810,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	3,022,398,087	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang layak pakai	90 %	1,280,882,000		90 %	2,541,000,000	
5	3	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	34,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 unit	41,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	1,246,882,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 unit	2,500,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Berbasis Skor Indeks Merit	100 %	12,011,663,500		100 %	25,665,482,919	
5	3	2	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	95 %	2,640,000,000		95 %	3,980,672,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	3	2	1.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	693,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1,000,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2	1.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	207,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	200,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2	1.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	320,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	360,672,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2	1.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	900,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Lembaga	1,500,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2	1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	69,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	300,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2	1.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	451,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	620,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2	1.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan	88 %	1,370,000,000		88 %	1,704,898,089	
5	3	2	1.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi. Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1 Dokumen	420,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	509,710,589	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2	1.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Laporan	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	545,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2	1.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	650,187,500	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang telah dikembangkan kompetensinya	85 %	6,501,663,500		85 %	5,373,383,052	
5	3	2	1.03	3	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	653,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	248,204,250	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2	1.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen	5,398,663,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	4,733,305,102	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2	1.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1 Dokumen	450,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	391,873,700	Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	3	2	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang berkinerja baik	90 %	1,500,000,000		90 %	14,606,529,778	
5	3	2	1.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	950,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	8,585,938,053	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2	1.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang	180,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	5,000,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2	1.04	5	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	200 Orang	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Orang	150,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2	1.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 orang	55,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 orang	370,591,725	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2	1.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	108,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	200,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2	1.04	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	135,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	300,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5	3				KEPEGAWAIAN			2,400,000,000			2,779,400,000	
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah (SKM)	92 Nilai	1,900,000,000		92 Nilai	2,279,400,000	
5	3	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur	100 %	73,500,000		100 %	112,400,000	
5	3	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	15 stel	28,500,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 stel	12,400,000	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
5	3	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	45,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	100,000,000	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
5	3	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	650,000,000		100 %	740,000,000	
5	3	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	300,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 paket	300,000,000	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	3	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 paket	40,000,000	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
5	3	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	400,000,000	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
5	3	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan administrasi yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan	729,500,000		1 Laporan	850,000,000	
5	3	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,800,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	100,000,000	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
5	3	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	160,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	160,000,000	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
5	3	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	566,700,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	590,000,000	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
5	3	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang layak pakai	100 %	447,000,000		100 %	577,000,000	
5	3	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	47,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	47,000,000	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
5	3	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	400,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	530,000,000	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Berbasis Skor Indeks Merit	100 %	500,000,000		100 %	500,000,000	
5	3	2	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang telah dinilai kompetensinya	8 %	500,000,000		8 %	500,000,000	
5	3	2	1.03	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	500,000,000	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			33,804,927,000			33,786,303,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPSDM	85 Persen	20,761,655,185		85 Persen	20,777,160,757	
5	4	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja BPSDM	100 Persen	92,863,500		100 Persen	143,572,000	
5	4	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	7,363,500	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	3 Dokumen	7,252,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	43,040,000	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	1 Laporan	18,940,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	42,460,000	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	1 Laporan	117,380,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan pada BPSDM	100 Persen	13,345,487,553		100 Persen	13,340,130,000	
5	4	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/ Bulan	12,942,827,553	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	57 Orang/ Bulan	12,942,820,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	358,740,000	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	9 Dokumen	353,390,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	42,000,000	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	2 Dokumen	42,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,920,000	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	1 Laporan	1,920,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan kegiatan administrasi BArang Milik Daerah Pada BPSDM	100 persen	6,310,000		100 persen	6,310,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	4	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6,310,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	6,310,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	1	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah pada BPSDM	100 Persen	3,210,000		100 Persen	3,210,000	
5	4	1	1.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	3,210,000	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	1 Laporan	3,210,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Kegaiatan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	184,210,000		100 Persen	154,110,000	
5	4	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	80,000,000	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	100 Paket	65,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	66,250,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Orang	66,250,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	37,960,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	22,860,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	4	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Pada BPSDM	95 persen	1,559,718,990		95 persen	1,549,027,305	
						Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Pada BPSDM	95 Persen			95 Persen		
5	4	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	62,766,990	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	6 Paket	62,933,890	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	52,560,000	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	4 Paket	58,260,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 Paket	178,444,000	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	8 Paket	176,876,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25,392,000	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	1 Laporan	25,392,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	1,190,560,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	1,175,569,415	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	8,800,000	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	1 Dokumen	8,800,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	41,196,000	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	2 Dokumen	41,196,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah pada BPSDM	100 Persen	491,434,410		100 Persen	118,054,000	
5	4	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	59 Unit	491,434,410	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	59 Unit	118,054,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	4	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Layanan Penunjang Pada BPSDM	100 Persen	2,966,369,732		100 Persen	3,402,218,452	
5	4	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6,920,000	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	1 Laporan	6,920,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1,444,197,700	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	4 Laporan	1,788,147,700	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	1,515,252,032	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	3 Laporan	1,607,150,752	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada BPSDM	100 Persen	2,112,051,000		100 Persen	2,060,529,000	
5	4	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	59,767,000	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	3 Unit	59,767,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	127,982,000	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	6 Unit	127,982,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	260 Unit	187,960,000	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	260 Unit	187,960,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	1	1.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	1,225,420,000	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	28 Unit	1,225,420,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	510,922,000	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	4 Unit	459,400,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Peningkatan Kapasitas Pengembangan Komptensi SDM/ASN	85 Persen	13,043,271,815		85 Persen	13,009,142,243	
5	4	2	1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis	85 Persen	4,833,956,000		85 Persen	4,730,845,428	
5	4	2	1.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	620 Orang	4,833,956,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	620 Orang	4,730,845,428	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
					Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum							
5	4	2	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Kelembagaan, Sertifikasi Komptensi dan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	85 Persen	8,209,315,815		85 Persen	8,278,296,815	
5	4	2	1.02	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	1 Dokumen	99,999,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	100,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	2	1.02	2	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	1 Dokumen	177,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	177,500,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	2	1.02	3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	180 Orang	399,832,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	180 Orang	399,832,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	2	1.02	4	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	4 Laporan	541,422,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	541,422,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	2	1.02	5	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	10 dokumen	172,382,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 dokumen	172,388,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	2	1.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1482 orang	6,303,950,815	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1482 orang	6,403,950,815	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	2	1.02	8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Dokumen	514,230,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	483,204,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			19,727,019,000			25,881,623,078	
5	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas Balitbangda	98 %	16,121,375,000		98 %	20,811,759,978	
5	5	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan hasil evaluasi kinerja PD yang direalisasikan tepat waktu	31 Dokumen	130,250,000		31 Dokumen	169,325,000	
5	5	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	41,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 dokumen	53,755,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan penyusunan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	21 Laporan	88,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 Laporan	115,570,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	14 Dokumen	10,352,255,260		14 Dokumen	13,474,854,206	
5	5	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn	45 orang/bulan	10,352,255,260	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 orang/bulan	13,474,854,206	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	20 Dokumen	64,600,000		20 Dokumen	83,980,000	
5	5	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20 orang	64,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 orang	83,980,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana	12 Bulan	2,470,647,000		12 Bulan	3,455,340,400	
5	5	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	28,108,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	36,540,400	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	274,650,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	357,045,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralataan rumah tangga yang disediakan	1 paket	51,752,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	67,278,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	5	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakaan	1 paket	180,592,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	234,477,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1,935,545,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	2,760,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	58 Unit	469,362,000		58 Unit	608,854,000	
5	5	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	1 paket	69,320,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	88,800,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	JUmlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	31 Unit	339,022,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31 Unit	440,728,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	6 Unit	61,020,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Unit	79,326,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	12 Bulan	2,051,891,540		12 Bulan	2,262,327,372	
5	5	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan jasa surat menyurat	12 Laporan	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	26,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	266,191,604	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	361,167,038	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	13 Laporan	1,765,699,936	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Laporan	1,875,160,334	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana milik daerah	5 Kegiatan	582,369,200		5 Kegiatan	757,079,000	
5	5	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	198,139,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Unit	257,580,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	62 Unit	50,760,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62 Unit	65,988,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	199,650,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	259,545,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	5	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	75 Unit	35,020,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Unit	45,526,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	98,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	128,440,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	100 %	3,605,644,000		100 %	5,069,863,100	
5	5	2	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	100 %	665,194,000		100 %	864,752,100	
5	5	2	1.01	2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	97,500,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	1.01	3	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	128,867,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	167,527,100	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	1.01	4	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	97,500,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	1.01	5	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	2 Laporan	286,327,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	372,225,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	1.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	130,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	100 %	334,810,000		100 %	435,252,000	
5	5	2	1.02	2	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	170,904,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	222,175,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	1.02	3	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	163,905,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	213,077,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100 %	1,225,000,000		100 %	1,760,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	5	2	1.03	1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	250,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	325,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
5	5	2	1.03	2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	260,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	1.03	4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	455,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	1.03	6	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	200,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	1.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	260,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	1.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	260,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Lomba Penjaringan Peserta Inovasi Kreativitas Pelayanan Perangkat daerah (PEPES IKAN PEDA)	100 %	1,380,640,000		100 %	2,009,859,000	
5	5	2	1.04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	587,123,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	763,259,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	1.04	2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	149,979,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	194,972,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
5	5	2	1.04	3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	293,580,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	381,654,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	1.04	4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	249,978,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	3 Laporan	540,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Semua Kelurahan			Daerah
5	5	2	1.04	5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	99,980,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	129,974,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5	7				PENGELOLAAN PENGHUBUNG			20,046,709,000			16,500,000,000	
5	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas Badan Penghubung Provinsi	98 %	17,384,375,039		98 %	13,536,430,352	
5	7	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	595,095,400		16 Dokumen	333,923,000	
5	7	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	166,854,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Dokumen	122,309,000	Badan Penghubung Provinsi
5	7	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	54,820,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	49,350,000	Badan Penghubung Provinsi
5	7	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	54,820,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	44,358,000	Badan Penghubung Provinsi
5	7	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	54,820,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	18,394,000	Badan Penghubung Provinsi
5	7	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	54,820,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	18,094,000	Badan Penghubung Provinsi
5	7	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	208,961,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	81,418,000	Badan Penghubung Provinsi
5	7	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	6,014,428,299		12 Bulan	5,941,308,075	
5	7	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/Bulan	2,579,101,171	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang/Bulan	2,579,005,027	Badan Penghubung Provinsi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	7	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	61 Dokumen	3,435,327,128	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61 Dokumen	3,362,303,048	Badan Penghubung Provinsi
5	7	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Yang Memiliki Standar Kompetensi	60 %	491,864,000		60 %	496,671,000	
5	7	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	239,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	315,120,000	Badan Penghubung Provinsi
5	7	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	63 Orang	252,564,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63 Orang	181,551,000	Badan Penghubung Provinsi
5	7	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1,547,580,400		12 Bulan	1,479,858,608	
5	7	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	92,975,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	77,116,662	Badan Penghubung Provinsi
5	7	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	350,027,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Paket	288,619,646	Badan Penghubung Provinsi
5	7	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	94,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	83,790,000	Badan Penghubung Provinsi
5	7	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	105,087,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	99,936,300	Badan Penghubung Provinsi
5	7	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67 Laporan	904,790,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67 Laporan	930,396,000	Badan Penghubung Provinsi
5	7	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	127 Unit	2,612,836,800		127 Unit	928,949,000	
5	7	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	109 Unit	2,612,836,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	109 Unit	928,949,000	Badan Penghubung Provinsi
5	7	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1,434,789,040		12 Bulan	1,658,000,000	
5	7	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	11,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	26,000,000	Badan Penghubung Provinsi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
5	7	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	1,423,789,040	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48 Laporan	1,632,000,000	Badan Penghubung Provinsi
5	7	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	4,687,781,100		12 Bulan	2,697,720,669	
5	7	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	1,001,455,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Unit	1,056,980,000	Badan Penghubung Provinsi
5	7	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	552 Unit	313,540,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	552 Unit	375,810,000	Badan Penghubung Provinsi
5	7	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	3,372,786,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Unit	1,264,930,669	Badan Penghubung Provinsi
5	7	2			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Indeks kepuasan mitra kerja terhadap pelayanan Badan Penghubung	85 %	2,662,333,961		85 %	2,963,569,648	
5	7	2	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Pelayanan Penghubung yang dilaksanakan	3 Kegiatan	2,662,333,961		3 Kegiatan	2,963,569,648	
5	7	2	1.01	1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	2 Laporan	465,185,961	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	525,255,000	Badan Penghubung Provinsi
5	7	2	1.01	2	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	4 Laporan	548,330,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	692,593,000	Badan Penghubung Provinsi
5	7	2	1.01	3	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	16 Laporan	628,916,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Laporan	684,175,000	Badan Penghubung Provinsi
5	7	2	1.01	4	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	7 Laporan	679,558,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Laporan	721,011,648	Badan Penghubung Provinsi
5	7	2	1.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	4 Laporan	340,344,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	340,535,000	Badan Penghubung Provinsi
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							
6	1				INSPEKTORAT DAERAH			38,960,600,000			40,919,982,390	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Inspektorat	98 %	24,587,618,400		98 %	27,620,413,920	
6	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Skor / Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	82 skor	323,094,936		82 skor	455,103,770	
6	1	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	323,094,936	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	9 Laporan	455,103,770	Inspektorat
6	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan PD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	95 persen	16,350,662,297		95 persen	18,448,322,560	
6	1	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/ Bulan	15,924,573,833	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	87 Orang/ Bulan	17,729,340,660	Inspektorat
6	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	426,088,464	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	718,981,900	Inspektorat
6	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pesentase ASN yang memiliki Standar Kompetensi	95 persen	4,216,183,000		95 persen	4,143,577,000	
6	1	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	118 Paket	505,311,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	118 Paket	422,337,000	Inspektorat
6	1	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	122 Orang	3,710,872,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	122 Orang	3,721,240,000	Inspektorat
6	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	2,477,857,000		12 Laporan	3,428,922,000	
6	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	1,377,560,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	25 Paket	1,982,962,000	Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
6	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	266,057,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	12 Paket	239,414,500	Inspektorat
6	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	139,904,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	12 Paket	148,945,500	Inspektorat
6	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	694,336,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Laporan	1,057,600,000	Inspektorat
6	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlayaninya Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	703,134,632		12 Bulan	784,178,590	
6	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	40,000,000	Inspektorat
6	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	79,520,400	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	12 Laporan	139,764,360	Inspektorat
6	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	603,614,232	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	13 Laporan	604,414,230	Inspektorat
6	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	30 unit	516,686,535		30 unit	360,310,000	
6	1	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit	272,560,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	18 unit	272,560,000	Inspektorat
6	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	54,126,535	Kota Samarinda, Samarinda Ulu,	12 unit	69,750,000	Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
									Jawa			
6	1	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	190,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	1 unit	18,000,000	Inspektorat
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	95 %	11,311,831,600		95 %	10,457,305,970	
6	1	2	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Level Maturitas SPIP Pemda	3 level	3,533,925,000		3 level	3,410,967,440	
6	1	2	1.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Laporan	400,742,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	10 Laporan	302,050,000	Inspektorat
6	1	2	1.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	30 Laporan	928,832,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Laporan	837,515,000	Inspektorat
									Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa			
6	1	2	1.01	5	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	30 Laporan	1,352,201,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Laporan	1,402,252,440	Inspektorat
6	1	2	1.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	852,150,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	869,150,000	Inspektorat
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
6	1	2	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Tertanganinya Pengaduan Mayarakat melalui Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 persen	7,777,906,600		100 persen	7,046,338,530	
6	1	2	1.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12 Laporan	389,580,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	12 Laporan	285,550,000	Inspektorat
6	1	2	1.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	38 Laporan	7,388,326,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38 Laporan	6,760,788,530	Inspektorat
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase meningkatnya pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)	95 %	3,061,150,000		95 %	2,842,262,500	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
6	1	3	1.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Capaian Pencegahan KKN	95 persen	3,061,150,000		95 persen	2,842,262,500	
6	1	3	1.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	25 Perangkat Daerah	507,310,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	25 Perangkat Daerah	588,041,000	Inspektorat
6	1	3	1.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	14 Kegiatan	2,553,840,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Kegiatan	2,254,221,500	Inspektorat
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			35,750,000,000			34,617,988,500	
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	99 %	14,384,179,000		99 %	16,170,147,500	
8	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	12 Bulan	554,028,000		12 Bulan	637,132,200	
8	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	344,244,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Dokumen	395,880,600	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	209,784,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Laporan	241,251,600	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	9,969,583,852		12 Bulan	10,008,583,852	
8	1	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/ Bulan	9,574,913,852	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	41 Orang/ Bulan	9,574,913,852	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	41,160,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	2 Dokumen	41,160,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	313,560,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	1 Dokumen	313,560,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	39,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Laporan	78,950,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
8	1	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah PD	12 Bulan	18,036,000		12 Bulan	18,036,000	
8	1	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	18,036,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	18,036,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	48,000,000		12 Bulan	48,000,000	
8	1	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	48,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	2 Paket	48,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2,257,355,300		12 Bulan	3,051,520,000	
8	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	740,555,300	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	6 Paket	1,000,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	40,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	7 Paket	40,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	11,520,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	12 Dokumen	11,520,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	1,219,580,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	1,500,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	245,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	500,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Dinas	2 Unit	684,000,000		2 Unit	1,500,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
8	1	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	684,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	2 Unit	1,500,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	655,614,848		12 Bulan	667,114,448	
8	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7,500,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	1 Laporan	7,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	63,500,400	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	12 Laporan	75,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	584,614,448	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	12 Laporan	584,614,448	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang MIlik Daerah	12 Bulan	197,561,000		12 Bulan	239,761,000	
8	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	159,761,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	18 Unit	159,761,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	75 Unit	37,800,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	75 Unit	80,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase meningkatnya penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8,00 %	1,001,853,000		8,00 %	1,909,853,000	
8	1	2	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	2 Dokumen	1,001,853,000		2 Dokumen	1,909,853,000	
8	1	2	1.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	19,510,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	37,510,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	2	1.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	3,360,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	3,360,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
8	1	2	1.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1370 Orang	565,735,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1370 Orang	1,065,735,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	2	1.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	18 Orang	143,624,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Orang	323,624,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	2	1.01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Laporan	269,624,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	479,624,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat	75,50 %	10,369,449,000		75,50 %	10,677,449,000	
8	1	3	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	2 Dokumen	10,369,449,000		2 Dokumen	10,677,449,000	
8	1	3	1.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	19,510,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	37,510,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	1.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1,440,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1,440,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
					Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
8	1	3	1.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	605 Orang	9,532,051,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	605 Orang	9,432,051,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	1.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	42 Orang	378,824,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42 Orang	558,824,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	1.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan	437,624,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	647,624,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan Ormas se Kaltim	40,05 %	6,139,877,000		40,05 %	784,877,000	
8	1	4	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	2 Dokumen	6,139,877,000		2 Dokumen	784,877,000	
8	1	4	1.01	1	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	18,755,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	18,755,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4	1.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	1 Dokumen	480,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	480,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
					Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Asing di Daerah yang Disusun						
8	1	4	1.01	3	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	330 Orang	5,827,618,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	330 Orang	277,618,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4	1.01	4	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	11 Orang	99,412,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Orang	189,412,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4	1.01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	193,612,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	298,612,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase rekomendasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	100 %	486,651,000		100 %	899,671,000	
8	1	5	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	2 Dokumen	486,651,000		2 Dokumen	899,671,000	
8	1	5	1.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	9,755,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	27,775,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5	1.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	960,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	960,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5	1.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	410 Orang	228,512,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	410 Orang	428,512,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
					Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						
8	1	5	1.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 Orang	108,412,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Orang	198,412,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5	1.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	139,012,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	244,012,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan konflik sosial di Kalimantan Timur	33,00 %	3,367,991,000		33,00 %	4,175,991,000	
8	1	6	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	2 Dokumen	3,367,991,000		2 Dokumen	4,175,991,000	
8	1	6	1.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	19,510,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	37,510,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	1.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	600,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	1.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan	550 Orang	489,106,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	550 Orang	889,106,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
					Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						
8	1	6	1.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	22 Orang	198,824,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22 Orang	378,824,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	1.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	240,224,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	450,224,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	1.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen	2,419,727,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2,419,727,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL								**11,539,354,481,538**			**12,178,639,038,495**	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai dalam pembangunan yang tergambarkan dalam pencapaian indikator-indikator dari *impact* dan *outcome*. Indikator *impact* dan *outcome* ini dianggap mampu mewakili dan menggambarkan hasil capaian kinerja pembangunan yang dilakukan melalui berbagai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pembangunan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan dengan tinjauan terhadap visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur beserta turunannya, yakni tujuan dan sasaran pembangunan. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana pembangunan tahunan daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di masa kini maupun yang akan datang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (o*utcome*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Indikator kinerja pembangunan merupakan alat ukur yang mampu memberikan suatu informasi kinerja dan hasil kerja baik *outcome* ataupun *output* pada instansi atau lembaga pemerintahan suatu daerah. Dalam

perkembangannya, indikator kinerja harus mampu mengikuti perkembangan dinamika global manajemen kinerja pemerintah daerah sehingga setiap permasalahan maupun pra kondisi pembangunan dapat dianalisis melalui capaian target indikator kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Indikator kinerja daerah ini selanjutnya dirumuskan kedalam Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur yang digunakan sebagai ukuran utama pencapaian kinerja pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel VII.1
Capaian dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian 2021	Target 2023
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,88	77,75
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,54	5,90
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,83	6,50
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,48	3,5±1
5.	PDRB per Kapita (Juta Rp)	182,54	193
6.	Laju Pertumbuhan Ekonomi non migas dan Batubara (%)	2,69	2,50
7	Nilai Tukar Petani	120,94	120,00
8	Indeks Gini	0,334	0,308
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,06	76,15
10	Indeks Reformasi Birokrasi	68,47 (B)	B (72,00)

Kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya, digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada Perubahan RPJMD. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil. Berdasarkan uraian makna

penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (*key performance indicator*).

Sebagai salah satu alat ukur Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD), maka Indikator Kinerja Kunci (IKK) pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; serta
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) beserta target kinerjanya di dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 di sajikan pada tabel VII.2 berikut:

Tabel VII.2
Penetapan Target Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Capaian Tahun 2021	Target Capaian Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi		
1.1	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	15,13	13,50
1.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	10,47	9,91
1.3	Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)	16,34	15,68
1.4	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB (%)	8,24	9,86
1.5	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,54	0,65
1.6	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,32	0,37

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Capaian Tahun 2021	Target Capaian Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1.7	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	4,97	5,30
1.8	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,56	1,72
1.9	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,04	1,08
2	Fokus Kesejahteraan Sosial		
2.1	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,84	10,17
2.2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,81	14,13
2.3	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,61	74,75
3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga		
3.1	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan (%)	60	70
3.2	Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan (%)	20,59	80
B	ASPEK PELAYANAN UMUM		
a	Fokus : Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
1	Pendidikan		
1.1	Jumlah sekolah yang mengembangkan ekstrakurikuler berbasis agama (SMA/SMK/SLB) (unit)	150	233
1.2	Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri (SMK)	70	86
1.3	Angka Partisipasi Murni SMA/MA. SMK. MAK. SMLB (%)	78,15	85
1.4	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki ijazah diploma dan sarjana (%)	95,74	100
1.5	Jumlah Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS (orang)	48.085	31.700
1.6	Jumlah Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa (Siswa)	3369	2500
1.7	Persentase sekolah yang telah menggunakan sistem pendidikan jarak jauh (%)	90	100
1.8	Persentase pelayanan pendidikan luar biasa (%)	87,61	85
2	Kesehatan		
2.1	Persentase Kab/Kota yang memiliki ≥45% Puskesmas memenuhi 9 tenaga jenis tenaga kesehatan	60	50
2.2	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan	87,66	88,70
2.3	Persentase Puskesmas Minimal Terakreditasi Utama (%)	23,50	60

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Capaian Tahun 2021	Target Capaian Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
2.4	Jumlah penduduk miskin dan kurang mampu yang memperoleh Jaminan Pelayanan Kesehatan	88.707	90.000
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
3.1	Persentase Capaian Layanan SDA	67,99	78,91
3.2	Capaian Akses Air Minum Layak Perpipaan (%)	67,48	68,64
3.3	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	72.010	69.681
3.4	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,87	1
4	Ketentraman. Ketertiban Umum. Dan Perlindungan Masyarakat		
4.1	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat (%)	74,46	75,00
4.2	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana (%)	66,67	100
5	Sosial		
5.1	Jumlah PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (PMKS)	23.350	2.700
b	Fokus : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar		
1	Tenaga Kerja		
1.1	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	26,04	40,00
1.2	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Terserap di pasar kerja (%)	70	70
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	65,54	65,70
2.2	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak (%)	90	90
2.3	Persentase pelaku ekonomi perempuan (%)	47,98	70
2.4	Rasio KDRT	0,029	0,038
2.5	Kampung KB	299	330
3	Lingkungan Hidup		
3.1	Persentase emisi yang diturunkan dari BAU (%)	41,96	29,33
3.2	Indeks Kualitas Air Sungai	51,92	53,85
3.3	Indeks Kualitas Udara	88,84	89,21
3.4	Indeks Kualitas Air Laut	85,40	83,66

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Capaian Tahun 2021	Target Capaian Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
3.5	Indeks Kualitas Lahan	82,21	79,91
3.6	Indeks Risiko Bencana	153,28	150,49
4	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
	Indeks Desa Membangun	0,7071	0,7285
4.1	Jumlah desa tertinggal (desa)	78	0
4.2	Meningkatkan jumlah Bumdes yang aktif (Bumdes)	390	470
4.3	Desa berkembang (Desa)	27	30
4.4	Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal (Desa)	30	45
4.5	Jumlah kampung Iklim	35	45
5	Perhubungan		
5.1	Jumlah penumpang yang terlayani (orang)	4.667.228	8.100.000
5.2	Jumlah barang yang diangkut (ton)	323.233.820	370.000.000
5.3	Peningkatan fasilitas pelabuhan Laut dan SDP (Unit/%)	11 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (83%)	10 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (88%)
5.4	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	418	342
6	Komunikasi dan Informatika		
6.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,2	3,30
7	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
7.1	Persentase tercapainya target UKM naik kelas (%)	1	1
7.2	Persentase tercapainya target Koperasi sehat (%)	-	10
7.3	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital (%)	2,75	3
8	Kepemudaan dan Olahraga		
8.1	Indeks Pembangunan Pemuda	54,83	56.86
8.2	Persentase pemuda dalam pembinaan kepemudaan (%)	0,13	0,40
9	Kebudayaan		
9.1	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola (%)	45	65
9.2	Persentase kebudayaan yang dikembangkan (%)	80	88

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Capaian Tahun 2021	Target Capaian Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Perpustakaan		
10.1	Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (on line dan on site) (orang)	110.802	209.500
c	Fokus : Urusan Pelayanan Pilihan		
1	Pariwisata		
1.1	Jumlah Destinasi Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya (kawasan)	2	3
1.2	Persentase sub sektor ekraf yang dikembangkan (%)	-	23,53
2	Pertanian		
2.1	Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan yang Difasilitasi (Ha)	7.000	8.700
2.2	Jumlah Fasilitas Pengembangan Prasarana Tanaman Hortikultura (unit)	6	7
2.3	Jumlah produksi padi (ton)	244.678	289.846
2.4	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (ton)	345.230	292.383
2.5	Jumlah Aparatur. Non Aparatur yang dibina (orang)	91	441
2.6	Jumlah Kelembagaan Petani Berbasis Koorporasi yang dibina (Lembaga)	4	4
2.7	Jumlah *Mini ranch* yang teregister (unit)	24	30
2.8	Angka Kelahiran Sapi (%)	19,00	22
2.11	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (juta ton CO2eq)	6,73	4.044
2.12	Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan (kelompok tani)	34	30
2.13	Luas Kebun yang dibangun (Ha)	1.551.343	1.500.674
2.14	Produksi komoditas perkebunan (ton)	17.363.298	18.313.874, 25
2.15	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (Lembaga)	1	1
2.16	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP) (Perusahaan)	41	35
3	Kehutanan		
3.1	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat (Ha)	25.942	32.000
3.2	Produksi Hasil Hutan Kayu (M3)	4.798.049,68	5.050.000
3.3	Produksi Hasil Hutan Non Kayu (Ton)	694,28	730
4	Energi dan Sumber Daya Mineral		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Capaian Tahun 2021	Target Capaian Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
4.1	Persentase pemanfaatan EBT (%)	6,53	8,40
4.2	Jumlah KK Berlistrik (KK)	1.143.533	1.200.000
5	Perdagangan		
5.1	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US$)	4,75	1,89
5.2	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara (%)	116,56	5
6	Perindustrian		
6.1	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri (industri)	2	2
7	Kelautan dan Perikanan		
7.1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	160.240	167.730
7.2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	173.996	166.170
7.3	Luas kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Ha)	289.048	297.805,90
7.4	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang mendapat pembinaan dan sertifikasi (UMKM)	36	20
7.5	Jumlah Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran (IUP)	36	30
d	Fokus : Urusan Penunjang		
1	Perencanaan		
1.1	Konsistensi perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan (%)	78,50	80
2	Keuangan		
2.1	Pendapatan Daerah (Miliar Rp)	10.220	12.122
2.2	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya (%)	92,98	100
2.3	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah (%)	114,69	100
2.4	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kalimantan Timur (wajib pajak)	692	777
3	Pengawasan		
3.1	Hasil Penilaian Integritas (skor/nilai)	66,33	80
4	Umum/Sekretariat		
4.1	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIPnya memperoleh predikat minimal B (Baik) (%)	75,67	81
4.2	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk	92	97

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Capaian Tahun 2021	Target Capaian Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
	sesuai dengan Norma Standar prosedur dan kriteria (NSPK) (%)		
4.3	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) sesuai standar (%)	83,44	89
C	ASPEK DAYA SAING		
1	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur		
1.1	Tingkat kemantapan jalan provinsi (%)	75,20	78,27
1.2	Jumlah Kawasan Ekonomi Yang Terhubungkan (Kawasan)	4	7
1.3	Capaian akses Air Minum Layak (%)	70,78	70,53
1.4	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	14.078,50	14,778,50
1.5	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	406,3	329
1.6	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	1.190,14	1.137,82
1.7	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	75,44	83,10
1.8	Rasio elektrifikasi (%)	91,98	95,00
2	Fokus iklim berinvestasi		
2.1	Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	31,05	35,67
2.3	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan (hari)	5	10
2.4	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM (%)	100	100
3	Fokus Sumber Daya Manusia		
3.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	77,82	78,00
3.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,64	83,00
3.3	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 3	Level 4

BAB VIII
P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ke lima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Tema Pembangunan RKPD tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas Guna Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Kalimantan Timur yang Berdaulat”. Tema ini mengandung substansi pokok pembangunan tahun 2023 yaitu menguatkan ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan melalui penguatan kapasitas SDM, meningkatkan kondisi perekonomian dan sosial masyarakat, peningkatan kualitas layanan infrastruktur, dan pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik.

Penyusunan RKPD tahun 2023, dilakukan melalui berbagai tahapan dan dibahas dalam forum koordinasi dan konsultasi, baik antar pemerintah kabupaten/kota, Perangkat Daerah, lembaga pemerintah non kementerian dan pemangku kepentingan lainnya, serta memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Keberhasilan pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, tergantung pada kesesuaian asumsi-asumsi yang dibangun pada saat penyusunan RKPD tahun 2023 ini. Salah satu asumsi yang digunakan dalam proses penyusunan RKPD tahun 2023 ini adalah adanya kerjasama semua pelaku pembangunan dalam memberikan komntribusi sesuai peran serta kemauan untuk turut mengawal dan mengendalikan pelaksanakan semua rencana program/kegiatan yang telah direncanakan.

8.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan RKPD 2023 yang menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen ini antara lain :

1. RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin efektivitas dan efesiensi pelaksanaan;
2. RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 merupakan pedoman penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023;
3. RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 merupakan rencana kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memerlukan peran serta aktif seluruh Pemangku Kepentingan untuk berkontribusi sesuai perannya masing-masing;
4. Setiap PD/Dinas/Instansi lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur wajib menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan mempedomani RKPD Tahun 2023 serta melakukan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program/kegiatan terhadap kebijakan Renja K/L 2023 dan Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota tahun 2023;
5. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 wajib dilaksanakan oleh seluruh kepala perangkat daerah dan bupati/walikota dengan tujuan untuk: (1) memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan; (2) memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel dan partisipatif; serta (3) melakukan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan kepada gubernur dan masyarakat umum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku
6. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif baik sebagai subyek maupun sebagai obyek pembangunan, dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;

7. Gubernur melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan RKPD berdasarkan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah secara berkala, untuk selanjutnya menjadi bahan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 (jika dilakukan perubahan);
8. Kepala Bappeda melakukan evaluasi hasil di akhir tahun pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 yang selanjutnya menjadi bahan bagi penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
9. RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahun 2023.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

ROZANI ERAWADI
NIP. 197101241997031007